

MEMBAWA KEADILAN & PERDAMAIAN KE TANAH PAPUA



EDITOR

Pius Suratman Kartasasmita

Ferry Sutrisna Wijaya

This book is about a topic that could not be more interesting and pertinent. It is about conflict in Papua, the unresolved case that Indonesia, a superpower of peacemaking, still must resolve, hopefully during the term of the next Indonesia's president. The book is a collection of analyses by true insiders with long-term engagement in the practice of bringing peace to Papua. It is sharp, academic, and yet focused on practical solutions.

—**Timo Kivimäki**. Profesor of International Relationship University of Bath United Kingdom, Founder of Indonesian Conflict Study Network.

Pius Suratman Kartasmita dan Ferry Sutrisna Wijaya telah menuliskan kembali setumpuk permasalahan yang secara langsung memengaruhi perdamaian dan keadilan bagi daerah dan juga masyarakat Papua. Buku ini memberikan konfirmasi atas tiga hal. Pertama, konflik meluas dan kekerasan terus berulang di Papua. Kedua, kebijakan negara terhadap Papua tidak sesuai dengan dinamika konflik, terutama di sektor sumber daya alam. Ketiga, para pihak memiliki multi-kepentingan (politik dan ekonomi) yang saling berkorelasi. Meskipun belum ada solusi yang pas, nirkekerasan merupakan cara terbaik bagi proses pemulihan kondisi Papua dalam jangka panjang menuju rekonsiliasi.

—**Adriana Elisabeth**. Jaringan Damai Papua.

Buku ini pantas kita apresiasi sebagai usaha memperkenalkan permasalahan di Tanah Papua dari berbagai sudut pandang, yang intinya memaparkan ada keinginan untuk menemukan wujud Tanah Papua yang memberi harapan akan hidup aman sejahtera, adil dan makmur, sehat dan terdidik, sampai ke pelosok pedalaman di wilayah Papua. Sudah sepantasnya kita menekuni berbagai pemaparan yang tertuang di dalamnya dengan sikap arif bijaksana supaya kita juga bisa mengambil sikap rasional kritis dan juga bisa berempati dengan permasalahan yang ada. Kita berharap dengan membaca buku ini banyak orang semakin tertarik untuk berpartisipasi membangun masyarakat Papua yang bisa menemukan identitas budayanya yang menekankan hidup yang berharmonis dengan Sang Pencipta, alam, dan sesama. Selamat membaca.

—**Albertus Istiarto**. Dosen dan Pendamping Mahasiswa Timika di Universitas Katolik Soegijapranata, pernah berkarya di Asmat, penulis buku *Asmat Peramu Sejati Mengukir Jatidiri*.

Tulisan yang tersaji dalam buku ini merupakan ungkapan kegelisahan atas situasi Papua dalam 60 tahun pendudukan pemerintah Indonesia di West Papua sejak 1963, lahir dari tangan para penulis yang juga berjuang keras, bahkan ada yang telah menjadi korban dalam perjuangan panjang perdamaian dan keadilan di West Papua. Merefleksikan 60 tahun pendudukan Indonesia, orang Papua bertanya: apakah bersama Indonesia akan diakui keadilan, hak asasi, pengakuan atas martabat manusia bagi Bangsa Papua? Apakah rumah Indonesia menjamin masa depan Orang Papua?

Sekelumit pertanyaan ini diulas oleh para penulis dalam buku yang ada di tangan pembaca. Dengan membaca buku ini, kita akan diantar bukan hanya untuk memahami lorong kegelapan panjang orang Papua, tetapi juga untuk melakukan aksi nyata demi perwujudan keadilan dan perdamaian bagi Bangsa Papua. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang menjadi pelaku dan pemerhati perjuangan keadilan dan perdamaian di West Papua.

—**Markus Haluk**. Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, penulis 5 buku *Seri Sejarah Politik, HAM, dan Demokrasi West Papua*.

Dari Bandung menuju Papua. Berangkat dari Savoy Homann. Nasihat agung untuk semua. Mari wujudkan kemanusiaan. Hampir 10 tahun yang lalu di Hotel Savoy Homann Bandung, sudah lama sekali, namun ingatan saya akan Papua tak pernah pudar. Lahirnya buku ini merupakan bukti bahwa warta kemanusiaan tak pernah henti untuk didengungkan.

—**Romo Agustinus Heri Wibowo**. Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia.

Di tengah rasa frustrasi dan lelah dari para pemerhati serta masyarakat pada umumnya yang melihat masalah di Tanah Papua justru semakin kompleks dan sulit terurai, buku ini justru mengajak kita semua untuk tetap semangat dan optimis bahwa kompleksitas tersebut akan dapat dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah bahwa kita perlu berempati dan tidak boleh abai, apatis, namun sekaligus juga perlu berhati-hati dalam melihat masalah di Papua yang melibatkan beragam kepentingan. Melihat dinamikanya, masalah Papua harus dijadikan wacana nasional yang senantiasa harus diobservasi secara berkesinambungan sebagai suatu *on-going study*. Sebagai contoh, berkembangnya teknologi justru menjadi ancaman baru yang dapat memperburuk situasi di Papua melalui disinformasi. Informasi dijadikan sebagai sebuah senjata dalam situasi konflik di Papua tersebut. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk bersikap kritis dalam menanggapi fenomena tersebut.

Buku ini membawa pesan penting bahwa upaya menyelesaikan masalah di Tanah Papua harus dimulai dengan mengadakan dialog yang inklusif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan di mana oposisi atau “musuh” harus dirangkul sebagai kawan dalam proses dialog tersebut.

Tema-tema yang dibahas dalam buku ini sangat beragam dan sudah menggambarkan beberapa masalah penting yang sedang terjadi di Papua. Oleh karena itu, buku ini adalah referensi, sekaligus karya budaya yang penting bagi Presiden Republik Indonesia terpilih nanti dan pemerhati masalah Papua tidak saja untuk lebih memahami kompleksitas masalah di Papua, tetapi juga sekaligus mencari jalan keluar yang konkret dengan harapan akan terwujudnya Tanah Papua yang berkeadilan dan damai.

—**Vidhyandika Djati Perkasa**. Peneliti Senior, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Indonesia.

Tema buku ini menarik dan aktual, selaras dengan kerinduan terdalam setiap manusia. Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud kalau ada keadilan, kebenaran, kebebasan, cinta kasih, pengampunan dan rekonsiliasi. Keadilan mensyaratkan pengakuan dan penghargaan dan perlindungan setiap manusia, baik itu hak atas hidup, ekonomi, politik, maupun budaya. Buku ini terbit tepat waktu dan layak dibaca oleh para pemimpin bangsa dan semua orang yang peduli terhadap kesejahteraan orang Papua.

—**Mgr. Laurentius Tarpin, OSC**. Magister General Odo Salib Suci (OSC)

Rasanya masih relevan gagasan Muridan Widjojo ini: “Sejarah menjadi sangat penting dalam kasus Papua karena ia terkait dengan kepentingan dan identitas masyarakat Papua pada hari ini dan masa depan ... Sejarah seharusnya lebih diperlakukan sebagai konstruksi yang interpretasinya dapat dinegosiasikan, yang melibatkan penerimaan dan kompromi, dan yang mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, daripada hanya menjadi monopoli satu pihak saja. Kalau tidak, sejarah di Papua akan terus menjadi penyebab siklus konflik yang tak pernah berakhir.” Setelah dua puluh tahun Otsus Papua berjalan dan berbagai pendekatan telah dilakukan, masalah Papua tampaknya belum mengalami pergeseran yang signifikan, bahkan bertambah kompleks. Dalam konteks itulah buku ini perlu dibaca dan dimaknai.

—**Bernarda Meteray**. Dosen Universitas Cenderawasih, penulis buku *Nasionalisme Ganda Orang Papua*

MEMBAWA KEADILAN & PERDAMAIAN KE TANAH PAPUA

EDITOR :

PIUS SURATMAN KARTASASMITA
FERRY SUTRISNA WIJAYA

KONTRIBUTOR :

Agus Sumule, Ambirek G. Socratez Yoman, Antie Solaiman, Biru Kira,
Bernadeta Subandini Astuti, Brigitta Isworo Laksmi, Cahyo Pamungkas,
Ignatius Haryanto, I Ngurah Suryawan, Markus Haluk, Martha Betaubun,
Paul Satyo Istandar Tan, Petrus Bahtiar, Ronald Guido Suitela, Theo van den
Broek., Wilhelmus Kamamas, Wolas Krenak, Yan Puduuwiyai Aplukol Dou,
Yanuaris Theofilus Matopai You, Yohanes B.J. Rusmanta

2024

UNPAR PRESS, BANDUNG

Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua
©2024 Unpar Press

Editor:
Pius Suratman Kartasasmita
Ferry Sutrisna Wijaya

Kontributor:
Agus Sumule, Ambirek G. Socratez Yoman, Antie Solaiman, Biru Kira,
Bernadeta Subandini Astuti, Brigitta Isworo Laksmi, Cahyo Pamungkas, Ignatius Haryanto,
I Ngurah Suryawan, Markus Haluk, Martha Betaubun, Paul Satyo Istandar Tan, Petrus Bahtiar,
Ronald Guido Suitela, Theo van den Broek., Wilhelmus Kamamas, Wolas Krenak,
Yan Puduuiyai Aplukol Dou, Yanuarius Theofilus Matopai You, Yohanes B.J. Rusmanta

Foto sampul:
USAID Indonesia, Public domain, via Wikimedia Commons

Diterbitkan oleh Unpar Press
Jl. Ciumbuleuit 100
Bandung 40141
0895-7025-02255
www.unparpress.com

dalam kerja sama dengan
Integral Ecology Institute
www.ecolearningcamp.org

404 hlm + xxviii; 17,6 cm x 25 cm
ISBN 978-623-7879-51-0 (Cetak)
ISBN 978-623-7879-52-7 (PDF)

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SAMBUTAN

Rektor Universitas Katolik Parahyangan

PROF. TRI BASUKI YUWONO, PH.D.

Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) didirikan pada tahun 1955 oleh dua orang uskup, yaitu Uskup Bandung dan Uskup Bogor, sebagai upaya menjawab persoalan nyata menyediakan kekurangan tenaga ahli untuk mengisi kemerdekaan pada saat usia negara Indonesia masih sangat muda. Perjalanan waktu menunjukkan konsistensi Unpar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan jawaban nyata terhadap persoalan bangsa dan dunia. Sesanti Unpar, *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*, menjadi motivasi bagi setiap *civitas academica* Unpar untuk mencurahkan hati, budi, dan pikiran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan kecintaan dan keimanan pada Tuhan. Konsistensi ini dilaksanakan dengan Visi Unpar 2040, yaitu menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan.

Dalam perjalanannya, insan-insan Unpar secara pribadi maupun secara kelembagaan menunjukkan bagaimana sesanti dan visi tersebut direalisasikan. Berbagai aktivitas telah dilakukan yang dilandaskan pada kebebasan akademik dan kewibawaan keilmuan. Ketekunan dalam menjalankan berbagai aktivitas menunjukkan bagaimana Unpar bekerja merealisasikan sesanti dan berusaha mewujudkan Visi Unpar.

Demikian juga dengan inisiatif penerbitan buku *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua*. Kami sangat mengapresiasi besarnya hati dan kecintaan pada bangsa dan negara ini, dan terutama pada kemanusiaan. Cinta, perhatian, dan tindakan nyata yang terwujud pada terbitnya buku ini, menjadi salah satu cara mewujudkan komunitas akademik humanum yang bertindak nyata dengan memberikan yang dimilikinya untuk kebaikan. Perjuangan para pelaku dan penulis yang kemudian dibagikan dalam tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku ini menjadi cara untuk menularkan dan menumbuhkan rasa cinta pada

kemanusiaan. Tulisan ini menjadi cara akademik untuk memberikan pencerahan, dan pada saat yang sama memberikan dukungan nyata dengan menunjukkan pada dunia hal yang sebenarnya terjadi.

Kecintaan dan keberpihakan pada Papua menjadi topik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kecintaan dan keberpihakan pada kemanusiaan. Terima kasih untuk para penulis. Terima kasih kepada para editor. Langkah dan kontribusi para penulis dan editor akan menjadi kontribusi yang terekam hingga ke masa depan. Semoga kontribusi ini akan membawa pencerahan, sehingga akan dibangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang humanum. Semoga Saudara Papua kita akan dianugerahi kebahagiaan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang humanum.

Bandung, 16 Desember 2023

SAMBUTAN

Kaprodi Magister Ilmu Sosial FISIP Unpar

RULYUSA PRATIKTO

Program Studi Magister Ilmu Sosial (Prodi MIS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan bekerja sama dengan Institute for Community and Regional Development (ICORD) telah terlibat dalam penyusunan buku *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua* secara ekstensif, terutama dalam hal memfasilitasi diskusi-diskusi di antara para pihak yang terlibat (penulis, editor, pengulas, dan penerbit). Dukungan Prodi MIS Unpar terhadap penyusunan buku ini tidak terlepas dari visi dari Prodi, yaitu menjadi „pusat unggulan pembelajaran“ “dalam” “Kajian Pembangunan yang berkelanjutan dalam dimensi manusia dan keadilan sosial” di Indonesia yang berbasiskan “penelitian” dan dalam semangat pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai *humanum religiosum*. Karenanya, penerbitan buku ini tentunya sangat sejalan dengan visi dari Prodi MIS Unpar tersebut.

Visi Prodi MIS sendiri juga muncul karena masih terdapatnya isu eksternalitas negatif dalam pembangunan, di mana aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pembangunan mendapatkan manfaat secara langsung, namun mereka yang tidak terlibat justru mengalami hal yang sebaliknya. Berdasarkan alasan utama tersebut, maka saat ini Prodi MIS sendiri sedang mengalami proses transformasi yang cukup signifikan, yaitu dalam proses perubahan nomenklatur dari Magister Ilmu Sosial ke Magister Studi Pembangunan. Secara konten keilmuan, Prodi MIS sudah melakukan perubahan kurikulum yang sejatinya mendukung arah perubahan tersebut, yang sebelumnya lebih merupakan kelanjutan dari program studi sarjana dalam lingkungan FISIP Unpar, menjadi suatu program studi multi-disiplin dengan isu utama studi pembangunan. Dalam hal ini, fokus utama dalam prodi MIS (studi pembangunan) ini tentunya adalah bagaimana setiap kebijakan dalam pembangunan, baik itu yang bersifat sosial maupun ekonomi, mampu

memberikan manfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak eksternalitas negatif tersebut.

Seperti yang juga sudah diketahui secara bersama, isu mengenai pembangunan yang berkeadilan ini masih juga belum dapat teratasi dengan baik dalam proses pembangunan di Indonesia, baik itu secara vertikal (antarmanusia) maupun horizontal (antardaerah). Meskipun telah terdapat upaya dari pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan, namun hingga kini belum terlihat hasil yang memuaskan, di mana isu mengenai ketimpangan masih menjadi salah satu sorotan dalam pembangunan, khususnya Indonesia Timur. Papua menjadi salah satu provinsi di mana kebijakan dan strategi pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat belum memberikan *ouput* yang optimal bagi provinsi ini. Salah satu yang diduga menjadi penyebab utamanya adalah dalam hal merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan, pemerintah khususnya pusat masih menggunakan pandangan *bird's eye view* sehingga belum mampu menangkap permasalahan sesungguhnya yang dihadapi oleh daerah untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini kemudian memunculkan kebijakan dan strategi yang kurang tepat sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanah Papua secara efektif dan terintegrasi.

Dengan demikian, maka kehadiran Prodi MIS yang bertransformasi ke Studi Pembangunan dan juga buku *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua* diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam hal memberikan pandangan *worm's eye view* mengenai kondisi sosial dan ekonomi tanah Papua. Hal ini juga menjadi keunikan dan keunggulan dari buku ini, mengingat para kontributor dari tulisan ini adalah mereka yang telah merasakan dan melihat secara langsung bagaimana kondisi keadilan dan perdamaian di Papua itu sendiri. Pada akhirnya, buku ini bertujuan untuk menyajikan pandangan jujur dan dari dalam hati masyarakat Papua, sehingga para pembuat kebijakan, peneliti, dan pelajar yang tertarik untuk mendalami isu mengenai Papua mendapatkan suatu pemahaman yang seimbang dan terintegrasi.

SAMBUTAN

Direktur Amnesty International Indonesia

USMAN HAMID

Buku ini sangat penting dan terbit tepat pada waktunya. Penting karena buku ini menjadi pengingat kita akan situasi konflik bersenjata Papua serta berbagai permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh Orang Asli Papua. Tepat pada waktunya karena buku ini dapat menjadi bahan pembicaraan dengan para kandidat presiden, wakil presiden dan DPR RI pada pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024.

Situasi di Tanah Papua, khususnya di dataran tinggi pulau tersebut, terus diwarnai eskalasi konflik dan kekerasan secara tajam sejak tahun 2018. Warga sipil terus menjadi korban kekerasan yang dilakukan para pihak berkonflik. Krisis pengungsian ribuan warga di sejumlah area seperti Nduga hingga Maybrat, penyanderaan pilot Selandia Baru Phillip Mehrstens pada Februari 2023, terbunuhnya puluhan prajurit TNI pada April 2023, serta pembunuhan perempuan pekerja kemanusiaan adalah sebagian contoh fenomena eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua.

Di kalangan elite penyelenggara negara, terutama di sebagian pimpinan lembaga legislatif dan kalangan militer, situasi seperti ini kerap memperkuat paradigma kebijakan penyelesaian konflik berdasarkan “pendekatan keamanan”. Meskipun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkali-kali menyerukan pendekatan kesejahteraan, pola pendekatan keamanan terus berjalan dan nyaris tanpa koreksi. Satu demi satu personel TNI dan Polri yang telah merengas nyawa seolah tidak berarti untuk dievaluasi.

Bahkan klaim pendekatan ekonomi maupun kesejahteraan pun belakangan dipandang tidak efektif oleh kajian lembaga pemerintah sendiri. Proses dan hasil dari tiga belas putaran kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sejak awal 2022 hingga kuartal pertama 2023 memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan kesejahteraan ekonomi tidak akan menurunkan eskalasi konflik dan kekerasan.

Kesimpulan semacam ini juga ikut menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah sendiri. Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), misalnya, menyimpulkan empat faktor penyebab konflik Papua, yaitu marginalisasi, kegagalan pembangunan, kekerasan dan pelanggaran HAM, hingga polemik sejarah integrasi Papua (2008). Sayangnya, meskipun penelitian kebijakan perihal peta masalah konflik dan kekerasan di Papua telah sangat jelas dan membantu pembuat kebijakan, pendekatan-pendekatan yang tidak efektif justru masih terus menjadi pilihan kebijakan yang dijalankan di lapangan.

Sebelum tahun 2022 dan sejak berakhirnya pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, belum pernah ada peristiwa di mana sebuah wadah organisasi politik yang mewakili pihak pemberontak bersenjata dan sayap politik gerakan prokemerdekaan Papua telah mulai duduk bersama dengan unsur perwakilan negara Republik Indonesia. Mereka menjajaki pembicaraan tentang penyelesaian damai untuk konflik dan kekerasan bersenjata di Papua.

Proses dialog yang bersifat penjajakan pun bisa dibilang belum pernah terjadi, kecuali ketika serangkaian pertemuan dimulai pada Juni tahun 2022. Di saat itu, penjajakan ini mendapat dukungan unsur-unsur lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kantor Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebuah Nota Kesepahaman (MoU) awal mengenai Jeda Kemanusiaan Bersama pun ditandatangani pada 11 November 2022. MoU ini menitikberatkan perhatiannya pada situasi kemanusiaan seperti pengungsi di Papua, khususnya Maybrat.

Dalam enam dekade konflik antara Indonesia dan kelompok prokemerdekaan Papua, MoU ini baru pertama kali terjadi. Kelompok prokemerdekaan Papua yang kini diwadahi dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), didampingi oleh pimpinan Dewan Gereja Dunia (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP) mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam rangka menangani situasi kemanusiaan yang terus melanda Tanah Papua. Sayangnya, MoU ini dengan cepat kehilangan momentum setelah adanya keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 7 Februari 2023 yang lalu.

Sekarang, nyaris tidak ada inisiatif apa pun yang berjalan secara efektif untuk mengelola konflik Papua melalui penyelesaian dialog. Ini mungkin karena pihak Pemerintah Indonesia sendiri tengah fokus pada masalah pemilihan presiden dan legislatif mendatang. Di sisi lain, Komnas HAM tampaknya lebih terfokus pada pemantauan situasi HAM yang tanpa sebuah jeda kemanusiaan, hampir mus-

tahil berhenti. Isu Papua sempat menjadi salah satu sorotan dalam debat para kandidat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perdebatan yang terangkat dalam debat resmi tersebut bisa menjadi titik tolak diskursus kebijakan pemerintah yang terpilih dalam Pemilu 2024.

Dua kandidat presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tampak memiliki janji yang relatif selaras dengan aspirasi Orang Asli Papua, antara lain perihal solusi dialog, berakhirnya kekerasan, dan hadirnya rasa keadilan. Meskipun kandidat Prabowo Subianto awalnya cenderung menyalahkan satu pihak dengan cara berpikir militeristik sebagaimana tercermin dalam penggunaan istilah-istilah “separatis” dan “teroris”, dia pun akhirnya setuju dengan pendekatan dialog dan keadilan. Pertanyaannya, sejauh manakah komitmen itu akan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan ke depan?

Mengingat kompleksnya permasalahan di tingkat kebijakan negara dan juga keadaan di lapangan, sebagaimana terlihat dalam uraian pembahasan buku ini, maka janji tersebut belum tentu akan mudah diwujudkan. Wajar pula jika masih banyak kalangan pemerhati Papua yang meragukan apakah dalam waktu dekat kita akan dapat menyaksikan resolusi konflik Papua berbasis penyelesaian damai.

Pada akhirnya, kita semua harus berusaha mendorong kemauan para pihak berkonflik untuk bersedia duduk kembali dan menjajaki penyelesaian damai atas konflik Papua. Ini penting agar masalah-masalah kemanusiaan dapat berakhir. Upaya-upaya pembangunan kepercayaan dan keyakinan dari para pihak harus terus didorong melalui berbagai cara yang melibatkan semua pemangku kebijakan dan kepentingan.

Tak kalah pentingnya, buku ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana situasi di Papua saat ini. Buku ini jelas memperkuat diskursus tentang permasalahan Papua dan juga perlunya upaya untuk meningkatkan perhatian pembuat kebijakan negara atas pentingnya solusi damai Papua.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2023.

SAMBUTAN

Kepala Biro Papua

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

PDT. RONALD RISCHARD T.

Bunga rampai tulisan dari berbagai narasumber yang dikompilasi menjadi buku ini sangat menarik dan penting untuk dibaca, terutama bagi siapa saja yang tidak mengikuti seminar internasional dengan tema “Bringing Justice and Peace to Papua” 10 tahun lalu. Ini sebuah refleksi pengingat bagi pembaca tentang pergumulan mendalam untuk membawa keadilan dan perdamaian ke Tanah Papua, tanah yang indah penuh susu dan madu tapi diselimuti “awan hitam” sepanjang tahun berjalan sejak berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Itu pertanyaan yang selalu muncul dalam berbagai diskusi tentang Papua.

Kajian refleksi dalam buku bunga rampai ini pada prinsipnya ingin mengatakan dengan jujur bahwa berbagai upaya untuk meniti solusi terhadap persoalan Papua sudah dan sedang terus dilakukan. Tapi ketika semua yang direkomendasikan itu menjadi masalah, maka tidaklah mungkin masalah menyelesaikan masalah. Lalu pertanyaan berikut pun muncul: apa sebenarnya solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan Papua? Keadilan dan perdamaian seperti apa yang sangat dibutuhkan di Papua? Kalau dibuat daftar panjang kebutuhan yang perlu dihadirkan di Papua, maka tentu sangat banyak, karena persoalan yang terjadi saat ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan persoalan pada saat awal terjadinya integrasi. Kompleksitas persoalan sudah semakin rumit, sudah menjadi benang kusut yang butuh *extraordinary effort* untuk menguraikannya satu per satu. Karena itu pula muncul pertanyaan lain: mau dimulai dari mana persoalan Papua hendak diselesaikan untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian itu sendiri?

Menurut Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, pada suatu diskusi tentang Papua, persoalan Papua hari ini sudah

seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul lagi luka yang baru di atasnya. Ini sebuah personifikasi refleksi yang sangat mendalam dan mengingatkan kita semua mengenai pentingnya memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk memulihkan situasi Papua dengan cara yang benar dan manusiawi, juga pentingnya menghindari pertumpahan darah yang terus berlangsung atas nama integrasi, kesejahteraan, kepentingan ekonomi, atau apa pun yang hanya menjadikan Papua dan Tanah Papua tidak sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, dan dihargai.

Tulisan reflektif dalam buku ini menjadi pengingat bagi kita pembaca untuk terus berdoa dan mendukung semua aksi kemanusiaan dan memastikan bahwa ada keseriusan yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh elemen masyarakat dalam rangka membawa keadilan dan perdamaian bagi Papua. Semoga Tuhan menolong kita semua atas komitmen ini.

Jakarta, 18 Desember 2023

SAMBUTAN

Koordinator Forum Akademisi Papua Damai

MANGADAR SITUMORANG

Apakah ada masalah di Papua? Persoalan apa yang sejatinya terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu? Kalaupun ada persoalan, itu persoalan siapa? Apa yang harus dilakukan dan siapa yang terutama bertanggung jawab dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Lalu, penyelesaian seperti apa yang paling baik untuk mengakhiri persoalan-persoalan tersebut?

Ada banyak pertanyaan lagi yang bisa diajukan terkait dengan Papua. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh posisi, pengetahuan, dan kepentingan dari yang mengajukan. Sebagian besar warga negara biasa tidak mengetahui bahwa ada persoalan di Papua dan mereka tidak akan mengajukan pertanyaan apa pun. Sebagian kecil masyarakat terdidik dan berasal dari kelas menengah-atas bahkan mungkin tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi, sebaliknya, membuat pernyataan-pernyataan yang keliru dan menyesatkan tentang Papua; atau, tidak tertutup kemungkinan, yang justru melihat peluang-peluang yang sangat terbuka dan menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis dari Papua yang sangat kaya sumber daya alam.

Maka, tampaknya hanya segelintir orang di Nusantara ini yang melihat, menyadari, dan memprihatinkan ragam persoalan di Bumi Cenderawasih. Daftar persoalannya bisa sangat panjang, mulai dari persoalan kesejarahan, legalitas dan pengakuan internasional, persoalan tanah dan adat istiadat, ketimpangan sosial antara Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang, kekerasan dan pelanggaran HAM, konflik bersenjata, eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, keserakahan dan kompetisi di antara para pemilik kapital dengan ragam kolaborasi global, nasional dan lokal, sampai pada marginalisasi peran lembaga-lembaga sosial-adat dan keagamaan, ketidakmampuan instansi-instansi pemerintahan dan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan.

Semakin sedikit pula orang yang mampu mengkonversi pengetahuan dan keprihatinan atas persoalan-persoalan Papua ke dalam aksi yang lebih konkret, tidak melulu pada program-program pembangunan, pemberdayaan, atau pendampingan di lapangan dan berbagai lembah-gunung sebagaimana dilakukan oleh organisasi kemanusiaan. Di antara orang yang sedikit itu ada yang memilih dan merasa lebih mampu untuk mengajak lebih banyak orang agar lebih peduli dengan saudara-saudara Papua. Ajakan yang dilakukan adalah lewat mencatat, mendokumentasi, dan mempublikasi peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang dialami Masyarakat Papua. Ada pula yang menuangkan kepedulian dan keprihatinan yang berbuah pada pemikiran-pemikiran tentang solusi-solusi yang mungkin dapat ditempuh menuju perbaikan.

Buku suntingan atau bunga rampai karya Prof. Pius Suratman Kartasasmita dan Pastor Ferry Sutrisna Wijaya ini adalah wujud pengetahuan, kepedulian, sekaligus kecintaan pada warga, tanah, dan budaya Papua. Kedua penyunting bersama semua tulisan yang tertuang dalam buku ini menyuarakan hal yang sama: “damai dan keadilan di tanah Papua”. Semoga pada diri para pembaca buku ini juga tumbuh kepedulian dan kecintaan yang sama serta turut menggemakan suara hati, suara harapan, suara optimisme agar kedamaian dan keadilan nyata dan dialami oleh seluruh warga masyarakat Papua.

—Mantan Rektor Unpar (2015-2023), Koordinator Forum Akademisi Papua Damai (FAPD)

PROLOG: Bermula dari Sebuah Seminar di Hotel Savoy Homann Bandung

EDITOR

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24-25 September 2013, Centre for Public Policy and Management Studies (CPMS) Universitas Katolik Parahyangan Bandung, bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB); menggelar sebuah seminar internasional dengan tema “*Bringing Justice and Peace to Papua: Assessment on Asymmetrical Local Autonomy, Communal Property Rights on Land, and Conflict Resolution.*” Topik tersebut diambil selain sebagai sebuah refleksi tentang pelaksanaan otonomi khusus di Papua, juga karena tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Agraria Nasional. Seminar tersebut selain merupakan kegiatan ilmiah rutin CPMS, juga sebagai tindak lanjut penandatanganan naskah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara CPMS dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Mei 2013.

Ketika seminar tersebut diselenggarakan, di Tanah Papua baru terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saat ini wilayah Papua sudah dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Papua yang dimaksud dalam bunga rampai ini adalah wilayah Papua bagian Barat, tidak mencakup Papua New Guinea. Dulu wilayah tersebut pernah diberi nama *Nederlands Nieuw Guinea* oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian disebut *Irian Barat* saat masuk menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu diubah menjadi *Irian Jaya* pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto, dan sejak tahun 1999 disebut dengan nama *Papua* oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Persoalan dasar yang menjadi bahan refleksi pada saat seminar sepuluh tahun lalu yang juga masih relevan sampai saat ini adalah: seberapa jauh Otonomi

Khusus Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak atas tanah ulayat sudah menjadi kenyataan. Secara lebih spesifik, ada tiga persoalan strategis yang dibahas dalam seminar internasional ketika itu, yakni:

- a. Sejauh mana UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya pasal 43 tentang hak atas tanah ulayat, telah terealisasi di Provinsi Papua Barat serta seberapa besar hal tersebut mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah?
- b. Seberapa jauh masalah hak atas tanah ulayat berkaitan dengan terjadinya konflik sosial dan konflik politik yang terjadi di Tanah Papua; baik berupa konflik komunal horizontal maupun konflik struktural vertikal?
- c. Seberapa signifikan peran institusi lokal, yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, memainkan peran konstitusional seperti yang tertuang dalam Pasal 19 sampai Pasal 25 UU Nomor 21 Tahun 2001 dalam mewakili kepentingan Orang Asli Papua.

Pendekatan yang digunakan dalam seminar ketika itu ada dua. *Pertama*, pendekatan kebijakan dan governansi publik. Sebuah pendekatan *top-down* yang berfokus pada bagaimana pemerintah Republik Indonesia menangani masalah Papua sebagai salah satu provinsi yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus persoalannya adalah, bagaimana pemerintah pusat mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap berbagai masalah-masalah yang ditemukan. *Kedua*, pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community development*), yaitu sebuah pendekatan *bottom-up* yang berfokus untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua (khususnya Orang Asli Papua, OAP) dalam menegaskan identitas mereka, menginventarisasi aset terutama tanah dan segala kekayaan yang terikat dengannya, serta bagaimana membangun kapasitas masyarakat Papua dalam menyatakan masalah-masalah tersebut secara afirmatif.

Sebagai kilas balik, menurut catatan ada lebih dari 200 orang yang menghadiri seminar tersebut, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta yang penuh semangat, hangat, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari ketahanan mereka dalam mengikuti setiap sesi seminar, mereka bertahan dari awal sampai akhir tanpa kehilangan fokus pembicaraan atau kekurangan topik untuk didiskusikan. Alhasil, para moderator yang bertugas terpaksa bekerja keras untuk memilah dan memilih pertanyaan yang penting dan menarik untuk dibahas, serta membatasi

waktu bicara bagi para peserta secara ketat. Para pembicara dan peserta seminar tersebut berasal dari:

- a. Seluruh *Anggota Majelis Rakyat Papua* Provinsi Papua Barat yang aktif pada saat itu.
- b. *Akademisi dan peneliti independen* yang memiliki minat khusus dan sedang atau pernah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua pada umumnya dan tentang hak atas tanah ulayat serta resolusi konflik di Papua Barat pada khususnya.
- c. Pejabat pemerintah yang pernah atau pada waktu itu sedang bertugas dalam melaksanakan Otonomi Khusus di Papua dan mereka yang bertanggung jawab dalam menangani hak atas tanah ulayat, dan resolusi konflik di Papua, baik di pusat maupun di daerah.
- d. *Pelaku bisnis*, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang menjalankan bisnis dan investasi di Papua, khususnya Papua Barat.
- e. *Organisasi non-pemerintah*, yang telah mendedikasikan pelayanan mereka di Papua, khususnya Papua Barat.
- f. *Mahasiswa dan masyarakat umum*, yang tertarik untuk menyajikan makalah dan menjadi peserta dalam seminar, baik yang berasal dari Papua maupun dari luar Papua.

Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap tujuan seminar, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap pertanyaan “sejauh mana UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya pasal 43 tentang hak atas tanah ulayat, telah terealisasi di Provinsi Papua Barat serta hal tersebut mendapat perhatian dan perlindungan pemerintah”, para pembicara dan peserta secara garis besar sepakat dengan kesimpulan bahwa tujuan pelaksanaan otonomi khusus di Papua Barat belum sepenuhnya tercapai, seperti yang diilustrasikan dalam bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan, meskipun dana yang dialokasikan melalui Otonomi Khusus cukup besar. Adapun mengenai persoalan tanah ulayat, selain secara hukum merupakan masalah yang kompleks, pemerintah belum memberikan perhatian yang memadai.
- b. Terhadap pertanyaan “sejauh mana masalah hak atas tanah ulayat ini berkaitan dengan terjadinya konflik sosial, baik secara horizontal komunal maupun secara vertikal struktural di Papua pada umumnya

dan di Papua Barat pada khususnya”, beberapa pembicara dan peserta memperkuat indikasi bahwa persoalan tanah ulayat merupakan salah satu akar terjadinya konflik sosial di Papua termasuk di Papua Barat.

- c. Terhadap pertanyaan sejauh mana peran institusi lokal, yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat, diakui lembaga tersebut memainkan peran konstitusional yang besar dalam mewakili kepentingan orang asli Papua, seperti yang tertuang dalam Pasal 19 sampai Pasal 25 UU Nomor 21 Tahun 2001. Hal tersebut terjawab secara imperatif oleh Wakil Ketua MRP-PB yang menjadi salah seorang pembicara dan para anggota MRP Papua Barat yang hadir dan berpartisipasi aktif sebagai peserta seminar. Di tingkat pelaksanaan, MRP Papua Barat secara faktual dan institusional telah melaksanakan beberapa kegiatan penting bagi kepentingan Orang Asli Papua, termasuk ikut menangani masalah konflik tanah ulayat dan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses penyelenggaraan seminar tersebut, baik pembicara, peserta, maupun panitia secara umum merasa sangat puas dengan proses pelaksanaan seminar. Hal ini dapat disimpulkan melalui indikator-indikator berikut ini:

- a. Acara pembukaan dihadiri oleh hampir seluruh pembicara, peserta dan panitia sebanyak lebih dari 200 orang, ruang *ballroom* Hotel Savoy Homann terisi penuh. Acara dirancang sederhana tetapi bermakna. Pertunjukan Kelompok Paduan Suara dan Kelompok Lingkungan Seni Tradisional (Listra) Universitas Katolik Parahyangan, serta penyanyi kondang putra Papua, Edo Kondologit, menjadikan suasana pembukaan seminar momen yang sangat berkesan bagi sebagian besar pembicara dan peserta.
- b. Para peserta mengikuti seluruh acara dengan sangat antusias, aktif, dan tidak beranjak dari ruang seminar sampai acara penutupan berakhir.
- c. Beberapa pembicara dan peserta sempat menyayangkan ketidakhadiran Kementerian Dalam Negeri dalam acara tersebut seperti yang disampaikan kepada panitia, namun secara keseluruhan hal tersebut tidak mengganggu kelancaran acara seminar sampai selesai. Penyelenggara sebetulnya merasa yakin bahwa kehadiran Kementerian Dalam Negeri dalam seminar tersebut dapat membuat perbedaan yang cukup berarti dalam memahami berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.

Ada dua hasil konkret kegiatan seminar tersebut. *Pertama*, prosiding seminar yang merupakan kompilasi seluruh materi dan proses penyelenggaraan seminar. *Kedua*, rekomendasi kebijakan mengenai penataan tanah ulayat yang berdasar pada pengetahuan teoretis hasil studi pustaka, bukti empiris hasil penelitian dan pemodelan tanah ulayat di Kabupaten Sorong Selatan sebagai pilot proyek, serta hasil studi perbandingan mengenai tanah ulayat, baik yang berlaku di Indonesia, maupun di luar negeri. Sebagian materi sempat dimuat sebagai artikel di dua edisi *Jurnal Administrasi Publik* yang diterbitkan oleh CPMS. Sekarang jurnal tersebut bertransformasi menjadi *Contemporary Public Administration Review (CoPAR)*. Para peserta melalui forum diskusi dan tanya jawab dengan semangat memberi rekomendasi kepada CPMS khususnya, dan kepada UNPAR umumnya, untuk terus aktif dan melanjutkan berbagai kegiatan positif, afirmatif, konstruktif, dan fasilitatif bagi penyelesaian berbagai masalah Papua, khususnya Papua Barat.

*

Sepuluh tahun setelah seminar internasional di Savoy Homann itu, pesan dan amanat para pembicara dan peserta seolah kembali menemukan relevansinya, terutama menjelang terjadinya pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum serentak pada bulan Februari 2024. Bagi siapa pun yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, sikap afirmatif dan pencarian solusi terhadap masalah Papua harus merupakan salah satu agenda politik penting yang perlu menjadi salah satu prioritas. Dalam hal tersebut, Universitas Katolik Parahyangan, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki sesanti *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti* (berdasarkan ketuhanan, menuntut ilmu untuk diabdikan kepada masyarakat), diharapkan dapat tetap berperan aktif dan melanjutkan berbagai langkah positif, afirmatif, konstruktif, dan fasilitatif bagi penyelesaian berbagai masalah kemanusiaan, termasuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Dalam rangka itulah tim editor berinisiatif menerbitkan sebuah bunga rampai dengan judul yang sama dengan tema seminar sepuluh tahun lalu: *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua*. Prakarsa tersebut mendapat sambutan antusias dari Dr. Rulyusa Pratikto, M.Si., Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial yang saat ini sedang bertransformasi menjadi Program Magister Studi Pembangunan. Ada satu pertanyaan pokok yang mendasari penulisan bunga rampai ini, yaitu “Apakah isu-isu yang mengemuka dalam seminar di Savoy Homann sepuluh tahun lalu masih merupakan isu sentral dalam upaya menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim

editor bekerja sama dengan Institute for Community and Regional Development (ICORD), melakukan tiga langkah strategis berikut:

- a. Pertama, pada tanggal 5 Juli 2023, tim editor menulis sebuah kerangka acuan kerja (KAK) dan mengirimkannya kepada para calon penulis yang ditentukan secara sengaja (*purposive*) dari berbagai latar belakang dan mengundang mereka untuk menulis tentang salah satu persoalan yang dianggap sebagai persoalan kritis yang terjadi di Tanah Papua selama 10 tahun terakhir. Dalam waktu lima bulan berproses, upaya tersebut berhasil mengumpulkan 21 tulisan dengan diksi dan narasi yang bervariasi.
- b. Kedua, dengan difasilitasi oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial, pada tanggal 1 November 2023 tim editor melakukan sebuah lokakarya untuk membahas hasil *review* yang dilakukan oleh 7 *reviewer* independen yang dipilih berdasarkan kredensial akademik mereka. Secara bergantian para *reviewer* menyampaikan penilaian mereka, baik tentang isi maupun format setiap tulisan. Dalam lokakarya tersebut hadir pula Ibu Navita Kristi Astuti sebagai representasi dari Penerbit Unpar Press.
- c. Ketiga, memutuskan bahwa semua tulisan yang terkumpul akan dimuat dalam bunga rampai dan disajikan apa adanya, kecuali sekadar penyuntingan bahasa tanpa mengubah makna tulisan. Dengan demikian, para pembaca dapat menikmati dan memahami bahwa upaya menghadirkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua tidaklah sederhana, hal tersebut tercermin dalam variasi diksi dan narasi yang dapat ditemui dalam bunga rampai ini. Oleh karena itu, isi tulisan tetap merupakan diskresi, hak prerogatif, dan tanggung jawab para penulis.
- d. Keempat, melakukan pengelompokan 21 artikel yang terkumpul dengan tujuan agar memudahkan para pembaca mengikuti alur logika yang tertata, menarik benang merah, dan menyajikan esensi serta simpul-simpul pembelajaran yang dapat ditarik dari setiap tulisan tersebut yang secara lengkap disajikan di bagian epilog bunga rampai ini.

Bunga rampai ini adalah wujud kolaborasi dari banyak orang yang merindukan hadirnya keadilan dan perdamaian di tanah Papua. Untuk itu izinkan kami, tim editor, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat. *Pertama*, kepada para penulis; tanpa kontribusi mereka bunga rampai ini tidak akan terwujud. *Kedua*, kepada anggota tim *reviewer* Bapak Dr. Gandhi Pawitan, Bapak Dr. Mangadar Situmorang, Ph.D., Bapak Pius Sugeng Prasetyo,

Ph.D., Bapak Dr. Rulyusa Pratikto, Bapak Stephanus Djunatan, Ph.D., Ibu Prof. Sukawarsini Djelantik, Ph.D., dan Bapak Dr. Tristam Pascal Muliono, S.H., M.H., LL.M.; terima kasih atas *insight* yang meneguhkan keyakinan bahwa setiap artikel berharga dan layak dibaca sebagai bagian integral dari bunga rampai ini. *Ketiga*, ucapan terima kasih istimewa disampaikan kepada Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Tri Basuki Juwono, Ph.D., yang berkenan menyambut baik upaya penerbitan bunga rampai ini; juga kepada Bapak Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, Bapak Pendeta Ronald Rischard T., Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang telah bersedia memberikan pengantar bagi buku ini. *Keempat*, terima kasih kepada Kaprodi Magister Ilmu Sosial yang sedang bertransformasi menjadi Magister Studi Pembangunan, Dr. Rulyusa Pratikto, terima kasih atas fasilitasi penyelenggaraan *workshop*-nya. *Kelima*, terima kasih kepada Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. atas kata pengantar sebagai Koordinator Forum Akademisi Papua Damai. Keenam, terima kasih kepada Unpar Press, terutama Bapak F. Wiyanto dan Ibu Navita yang terlibat dalam proses dan bersedia menerbitkan manuskrip ini dan menerbitkannya menjadi sebuah buku ber-ISBN. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para sahabat yang berkenan memberi dukungan berupa *endorsement*, yaitu Prof. Timo Kivimäki, Prof. Adriana Elisabeth, Bapak Albertus Istiarto, Bapak Markus Haluk, Romo Agustinus Heri Wibowo, Bapak Vidhyandika Djati Perkasa, Ibu Bernarda Meteray, dan Mgr. Laurentius Tarpin. *The last but not least*, tim editor sangat mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas dua tim kerja yang luar biasa. Tim penyunting dan perwajahan buku, Bapak Juan St. Sumampouw dan Natalias Mula, serta tim pengolahan dan analisis data dari Institute for Community and Regional Development (ICORD) di bawah koordinasi Sdr. Inten Safitri Kuswandy. Tanpa kontribusi setiap orang, bunga rampai ini tidak akan mewujud.

Akhirnya, kepada para pembaca yang budiman, semoga bunga rampai ini bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan niat baik dan karya kita semua.

Tim Editor:

Pius Suratman Kartasasmita

Ferry Sutrisna Wijaya

Daftar Isi

Sambutan Rektor Universitas Katolik Parahyangan.....	vii
Sambutan Kaprodi Magister Ilmu Sosial FISIP Unpar.....	ix
Sambutan Direktur Amnesty International Indonesia	xi
Sambutan Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.....	xv
Sambutan Koordinator Forum Akademisi Papua Damai.....	xvii
PROLOG	xix

Bagian 1

Sejarah dan Status Politik

Merawat Harapan Bersama Papua untuk Papua	3
Gerakan Tungku Api Kehidupan.....	35
Jaringan Damai Papua dan Papua Road Map	61
Saat Cenderawasih Jatuh ke Tanah.....	79

Bagian 2

Marginalisasi dan Diskriminasi

Mahasiswa Papua di Perantauan	87
-------------------------------------	----

Bagian 3

Tantangan Pembangunan

Kesenjangan Sosial dan Karya Misi Gereja Katolik di Keuskupan Jayapura	111
Geologi dan Sumber Daya Alam Papua.....	125
Papua, Sumber Pangan Nusantara	139
Masa Depan Pangan Lokal Papua?	151
Transportasi Papua: Tantangan dan Harapan	163
Peran Pendidikan Tinggi bagi Peningkatan SDM di Papua dan Papua Barat	179
Studi Kasus Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Kabupaten Merauke	227
Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat.....	251
Bagaimana Mempercepat Terciptanya Kebajikan di Papua?	271
Pelayanan Publik di Tanah Papua dan Faktor Keamanan	279

Meneropong Kemajuan Papua Barat dalam Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2024	285
Joko Widodo: Pemimpin yang Melayani	309

Bagian 4

Hak Asasi Manusia

Ke(tidak)bebasan Pers di Papua Satu Dekade Terakhir	317
Kronik Papua November 2023.....	333
10 Tahun Kegelapan Melanda Orang Asli Papua	359
EPILOG	371
BIODATA	399

BAGIAN 1

.....

Sejarah dan Status Politik

Merawat Harapan Bersama Papua untuk Papua

FERRY S. W.

Pengantar

Dalam tulisan ini saya ingin menjelaskan keyakinan saya bahwa kita masih bisa merawat harapan bersama Papua. Harapan untuk merawat harapan tersebut dimulai dari pengalaman pribadi berjumpa dengan beberapa tokoh Papua, khususnya Octovianus Mote yang selalu berjuang untuk Papua dan Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, Orang Asli Papua pertama yang menjadi uskup di Papua, yaitu Uskup Jayapura.

Saya juga belajar banyak saat peluncuran lima buku *Seri Sejarah Politik, HAM, dan Demokrasi di West Papua* tulisan Markus Haluk dan ketika membaca tulisan Usman Hamid “Masalah di Papua atau Masalah Papua?” di *Kompas*, yang merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi bahwa di Papua tidak ada masalah.

Dalam tulisan ini saya juga mencoba mempelajari apa itu Melanesian Spearhead Group (MSG) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Menurut saya, upaya untuk menyelesaikan masalah Papua memerlukan keterbukaan untuk berdialog dan melibatkan MSG dan ULMWP. Tanggal 7 November 2023, MSG baru saja menunjuk Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua New Guinea James Marape sebagai utusan khusus MSG untuk menemui Presiden Jokowi dan membicarakan upaya penyelesaian masalah Papua. ULMWP adalah salah satu harapan bahwa orang Papua bisa bersatu dan bisa diajak berdialog untuk mencari penyelesaian masalah Papua.

Saya juga mencoba mempelajari bagaimana tujuh Presiden RI yang sudah mengunjungi Papua sebanyak 42 kali dalam 60 tahun terakhir berbeda sikap dan langkah dalam menangani masalah Papua. Semoga dalam waktu yang masih ada, Presiden Jokowi berani mengambil langkah *affirmative action* berupa keputusan politik tentang Papua dengan harapan diteruskan langkahnya oleh Presiden RI periode 2024-2029.

Mengapa Masih Ada Harapan?

Apakah masih ada harapan untuk Papua yang lebih adil, otonom, dan damai sejahtera? Ya, saya ingin bergabung bersama banyak sahabat orang asli Papua maupun pendatang serta bersama sahabat dari luar Papua untuk mewujudkan harapan serta berjuang sebisa-bisanya demi masa depan Papua baru yang lebih adil dan damai.

Bagi saya, harapan tersebut dimulai ketika saya menghadiri tahbisan Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You di Jayapura 2 Februari 2023. Dengan penuh keyakinan iman, beliau mengajak semua orang untuk berdoa, berjuang, dan menyerahkan masa depan Papua ke dalam tangan Allah. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk Papua. Mgr. Yan tidak ingin terjebak dalam diksi “NKRI Harga Mati” ataupun “Papua Merdeka Harga Mati” dan berharap bahwa tidak terjadi kekerasan dan korban dalam memperjuangkan Papua baru yang adil, otonom, dan damai sejahtera.

Sekitar Paskah tahun 2023, saya sekali lagi berkunjung ke Papua, tepatnya ke Desa Hepuba di Lembah Wamena. Saya mencoba secara lebih cermat melihat, mengenal, mendengarkan, dan memahami kisah-kisah kehidupan orang Papua termasuk anak-anak, seperti Marta Asso dan Marta Weitipo. Saya semakin percaya dan mengimani bahwa semua orang Papua adalah milik Allah sehingga Allah pasti peduli dan berjuang untuk Papua yang lebih baik.

Sepulang dari Papua saya menerbitkan buku *Belajar Mencintai Papua: Menantikan Paskah*. Isinya tulisan tentang Papua yang dipicu oleh perjumpaan dengan sahabat saya Octovianus Mote pada tanggal 27-29 Oktober 2021 di Hamden, Connecticut AS ketika saya menjalani *sabbatical leave on the road* selama lima bulan di AS dan Kanada. Octo Mote adalah kawan lama di Bandung yang mengantarkan saya saat masuk Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus di Buah Batu, Bandung, tahun 1982.

Setelah lulus dari Jurusan Administrasi Publik FISIP Unpar tahun 1986, Octo sempat bekerja sebagai peneliti dan wartawan di Kompas. Tahun 1999 Octo Mote dan keluarga meninggalkan Indonesia untuk pindah ke AS. Ia bekerja sebagai *visiting fellow* di Cornell University (1999-2002) dan di Yale University (2002-2012). Sekarang ia sudah pensiun dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca, menulis, dan berbagai kegiatan ULMWP, khususnya membangun jaringan dan mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak di dunia untuk perjuangan Papua.

Octo sering mengingatkan saya bahwa masalah Papua sangat kompleks dan saya harus berhati-hati dalam mempelajari masalah Papua serta harus mende-

ngarkan berbagai pihak yang berbeda kepentingan dalam hal Papua. Ada yang memang dengan tulus sungguh ingin mencari dan mengusahakan jalan penyelesaian bagi masalah Papua. Ada juga yang justru mempersulit upaya mencari solusi bagi Papua dan malahan terus menciptakan berbagai masalah di Papua.

Tahun 2014, ketika terbentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octo Mote terpilih sebagai Presiden ULMWP dengan sebutan Sekjen. Sebagai Presiden ULMWP 2014-2017, Octo Mote sangat aktif bepergian menemui banyak kepala negara dan pemerintahan untuk menjelaskan masalah Papua dan berjuang agar masalah Papua dibahas kembali oleh PBB. Octo Mote digantikan oleh Benny Wenda yang tinggal di Inggris sebagai Presiden ULMWP periode 2017-2023. Saat ini Presiden ULMWP 2023-2026 adalah Menase Tabuni yang tinggal di Papua. Sejak 22 Agustus 2023, Octo Mote menjadi Wakil Presiden ULMWP.

Saya lalu menuliskan apa saja yang saya ingat dan saya tahu tentang Papua. Lalu saya juga meminta beberapa sahabat untuk ikut menulis atau saya minta izin agar tulisannya boleh saya muat dalam buku tersebut. Buku tersebut adalah buku pertama mengenai perjuangan saya untuk belajar mencintai Papua karena pengetahuan dan pengalaman saya tentang Papua masih sangat terbatas.

Sekarang saya sering mengenakan *noken* anggrek yang saya kalungkan di leher dan tergantung di dekat hati saya. Noken itu hadiah dari sahabat saya, Romo Yanuarius Puduwiyai Dou, imam diosesan Keuskupan Jayapura yang saat ini bertugas di Nabire mendampingi para calon imam dari seluruh Papua menjalani Tahun Rohani. Saya juga mendapat noken dari banyak sahabat Papua termasuk noken anggrek dari Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You. Kedua sahabat saya itu menyandang nama yang bermakna. “Matopai” berarti pribadi yang mempunyai integritas, yaitu konsisten dalam apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Adapun “Puduwiyai” artinya adalah pribadi yang perkasa dan memiliki banyak gagasan dan inspirasi. Keduanya berasal dari suku Mee yang berasal dari wilayah pegunungan di Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Mimika di Provinsi Papua Tengah.

Mengalungkan noken adalah salah satu kebiasaan kecil dan sederhana, seperti kebiasaan sahabat saya Romo Paul Satyo Istandar Tan, imam diosesan Keuskupan Sorong, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pastoral dan Kateketik (STPK) St. Yohanes Rasul di Waena Jayapura. Menyandang noken di dekat hati, bagi saya, adalah salah satu cara agar perjuangan dan penderitaan saudara-saudari saya orang Papua ada di hati saya. Saya juga senang mengenakan batik motif Papua, terutama dalam acara-acara resmi. Sering orang lalu ber-

tanya tentang noken yang saya sandang. Itulah kesempatan untuk menjelaskan tentang situasi di Papua.

Menurut Markus Haluk, Sekretaris ULMWP periode 2023-2026, noken yang saya sandang itu mempunyai nilai material dan budaya yang tinggi karena noken itu umumnya dibuat di wilayah Mapia (suku Mee) dan ditenun oleh kaum laki-laki dengan bahan khusus dari kulit batang anggrek. Menurut Titus Pekei, salah satu tokoh Papua yang namanya sering dikaitkan dengan noken, menyandang noken berarti menghargai tradisi dan warisan budaya hidup orang Papua bagi dunia di alam Papua. Titus Pekei dari Lembaga Ekologi Papua adalah tokoh yang ikut mengusahakan agar noken diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda pada tanggal 4 Desember 2012. Titus Pekei sampai saat ini giat mewartakan bahwa noken adalah warisan budaya takbenda, yang sudah diakui UNESCO.

Judul buku *Belajar Mencintai Papua* masih ditambahi anak judul *Menantikan Paskah* karena saya tidak ingin lupa bahwa Papua masih sedang mengalami jalan salib Jumat Agung dan belum mengalami kebangkitan Paskah. Khususnya selama 60 tahun terakhir, Papua yang masih mengalami banyak penderitaan sedang berjuang menantikan Paskah. Bersama seluruh sahabat Papua marilah kita berjuang agar suatu saat kita sungguh-sungguh dapat merayakan hidup baru kebangkitan Paskah bagi Papua bersama semua orang dan sahabat Papua.

Lima Buku Seri Sejarah Politik West Papua Karya Markus Haluk

Pada Mei 2023 terbit lima buku “Seri Sejarah Politik, HAM, dan Demokrasi West Papua” karya Markus Haluk. Saya hadir pada acara peluncurannya di Gedung PGI Cikini, Jakarta, 15 Juni 2023. Berperan sebagai pembicara waktu itu adalah Markus Haluk sang penulis, Prof. Dr. Cahyo Pamungkas dari BRIN, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, dan Dr. Antie Solaiman dari Universitas Kristen Indonesia.

Lima buku serial itu ditulis tidak sekali jadi, melainkan dalam proses selama 20 tahun. Markus Haluk menulis apa yang terjadi, apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan Papua. Menurut Markus Haluk, sampai saat ini Papua masih menderita.

Suatu ketika ia pernah dihadang dan ditodong orang tak dikenal di Jayapura yang mengancam keselamatannya. Peristiwa itu membuatnya berpikir, apa yang bisa ia tinggalkan untuk Papua. Maka, ia mengumpulkan tulisan dengan 17 tema tentang berbagai masalah Papua dan kemudian diterbitkan menjadi 5 buku.

Buku pertama berjudul *West Papua Kembali ke Pangkuan Melanesia*, berisi sejarah politik Papua, Konsensus Persatuan, ULMWP, dan Perjuangan Hak

Penentuan Nasib Sendiri. Rumah yang bisa menampung bangsa Papua adalah Melanesia. Papua kembali ke pangkuan Melanesia lewat wadah ULMWP yang dideklarasikan tahun 2014 dan diterima sebagai *associate member* Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG yang dirintis tahun 1986 mempunyai empat negara anggota, yaitu Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fiji, serta satu anggota berupa partai politik, yaitu The Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia. Selain itu, ada satu *associate member*, yaitu Indonesia, dan ada dua *observer*, yaitu East Timor dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kantor pusat MSG terletak di Port Vila, Vanuatu.

Buku kedua berjudul *Fakta Pelanggaran HAM di West Papua* berisi kronik kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Buku ketiga berjudul *Bersama Tuhan Kita Menang*, berisi perjuangan melawan politik rasisme dan teror Pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua. Buku keempat berjudul *Mewujudkan Visi Satu Tungku dalam Satu Honai Papua* berisi gagasan, resolusi honai, dan dinamika umat Melanesia. Buku kelima berjudul *Kejahatan Kemanusiaan, Kehancuran Ekologi Freeport, dan Pelanggaran HAM di Degeuwo Paniai*.

Markus Haluk memberikan apresiasi kepada banyak sahabat yang mencintai Papua dan mungkin juga menjadi korban karena menyuarakan kebenaran dan membela Papua. Banyak sahabat Papua secara konsisten berbicara dan membela Papua dan menyuarakan penderitaan yang dialami bangsa Papua, khususnya selama 60 tahun terakhir. Selama 60 tahun sesungguhnya telah terjadi proses genosida, etnosida, dan ekosida bangsa Papua dan bumi Papua. Konflik tidak pernah berakhir. Darah masih mengalir sampai saat ini.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, mengisahkan bagaimana banyak orang di Jakarta bukan ahli masalah Papua, melainkan ahli membuat masalah di Papua. Mereka duduk bersama melihat Papua sebagai tanah kosong dan melihat Papua sebagai kue untuk diambil dan dibagi semau-maunya seolah tidak ada orang Papua yang berhak dan memiliki Papua.

Usman Hamid juga mengingatkan bahwa secara hukum, tidak boleh memberi label kelompok kriminal atau separatis tanpa pengadilan bagi seseorang atau kelompok mana pun di luar pengadilan. Menyebut seseorang atau suatu kelompok sebagai separatis harus diputuskan lewat pengadilan. Maka, penyebutan suatu kelompok sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) tanpa melalui pengadilan adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum.

Dalam suatu kesempatan, Menkopolkam Mahfud MD pernah menjelaskan bahwa penyebutan “kelompok kriminal bersenjata” (KKB) memudahkan pena-

nganan oleh Polri sebagai suatu kriminalitas. Penggunaan kata “teroris” atau “separatis” sengaja dihindari karena aturan hukumnya lebih kompleks dan dapat mengundang campur tangan asing atau lembaga internasional.

Presiden Jokowi sudah mengakui bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi beberapa pelanggaran berat HAM. “Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Januari 2023. Dari 12 peristiwa pelanggaran berat HAM yang diakui Presiden Jokowi ada dua peristiwa di Papua, yaitu Peristiwa Wasior (2001-2002) dan Peristiwa Wamena (2003).

Peristiwa Wasior terjadi pada tanggal 13 Juni 2001 ketika terduga aparat Korps Brigade Mobil melakukan penyerbuan kepada warga sipil di Desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan ini dipicu oleh terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di markas perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa oleh terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka.

Peristiwa Wamena yang terjadi pada tahun 2003 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang dan korban luka 53 orang. Selain itu, bangunan milik masyarakat rusak dan terbakar sebanyak 530 unit, kendaraan rusak sebanyak 238 unit, dan gedung milik pemerintah rusak sebanyak 17 unit. Tidak jelas mengapa hanya dua peristiwa tersebut, yakni di Wasior dan di Wamena yang diakui sebagai pelanggaran berat HAM karena sebenarnya masih banyak peristiwa pelanggaran berat HAM lainnya.

Maka, penulisan lima buku oleh Markus Haluk adalah salah satu upaya menulis ulang sejarah, khususnya mengenai pelanggaran berat HAM di Papua. Menurut Usman Hamid, kelima buku Markus Haluk berisi daftar “dosa yang membutuhkan pengampunan dan pemaafan”. Markus Haluk berusaha menceritakan siapa pelaku dan apa kesalahan yang telah dilakukan di Papua. Masalahnya adalah, apakah para pelaku akan mengakui perbuatannya dan meminta maaf? Proklamator Mohammad Hatta pernah mengingatkan agar jangan mengambil Papua karena Indonesia justru bisa menjadi imperialis meskipun mengakui dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Bagi Usman Hamid, kelima buku Markus Haluk mengingatkan kita akan lima sila Pancasila. Semoga yang kita usahakan adalah “persatuan” dan bukan “persatean”. Semoga kita berjuang untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dengan tidak melakukan “ketidakadilan”. Jangan sampai di Indonesia tidak ada kerakyatan dan tidak ada kebijaksanaan. Jangan sampai Indonesia gagal

mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi rakyat Papua.

Usman Hamid memperhatikan bahwa konsep kedaulatan bagi Papua itu ada dan Papua bisa bersatu, antara lain dalam wadah ULMWP. Orang Papua ingin mempelajari sejarah dan masa lalu, tetapi sekaligus juga menentukan sejarah dan masa depan sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri ini sesuai dengan nilai-nilai yang diakui PBB. Buku ini menjadi kritik berbagai buku sejarah yang ditulis Indonesia. Buku-buku Markus Haluk membuktikan bahwa Otsus ternyata tidak berhasil dan bahwa justru orang di Jakarta yang telah menyebabkan orang Papua ingin berpisah dari Indonesia karena tidak adanya keadilan dan kemanusiaan bagi orang Papua.

Usman Hamid juga melihat bahwa buku ini mengkritik mereka yang tidak bisa melihat bahwa praktik rasisme masih terjadi di Papua, bahwa masyarakat Papua tidak sungguh didengarkan, dan bahwa tidak terjadi dialog untuk mencari solusi bagi Papua. Usman Hamid meyakini bahwa orang Papua mempunyai kultur persatuan, damai, dan pengambilan keputusan. Orang Papua tidak bodoh. Di Lembah Baliem ada banyak kebijaksanaan. Alam Papua harus dijaga, jangan dijarah. Yang untung adalah Freeport dan pemerintah. Yang menjadi korban adalah tentara, polisi, dan masyarakat. Bagi Usman Hamid, kelima buku Markus Haluk memberi sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan dan bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran.

Dengan berseloroh Usman Hamid mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi membeli buku Markus Haluk untuk semua pejabat maka semua pejabat pasti lupa akan pemilu. Ambrosius Mulait sebagai moderator menambahkan, semoga tidak ada orang yang takut untuk menulis dan menerbitkan buku-buku tentang kebenaran yang terjadi di Papua. Seandainya ada intel atau aparat yang hadir dalam acara *launching* buku 15 Juni 2023, semoga mereka bersedia membaca dan mempelajari buku-buku Markus Haluk dan menyampaikannya kepada pimpinan mereka agar bisa lebih memahami situasi dan kondisi Papua.

Kalau berkunjung ke Papua lagi, Presiden Jokowi sebaiknya tidak hanya meresmikan pasar, jalan, dan bangunan, namun juga bersedia membuka pintu dialog. Ketika meresmikan Papua Youth Creative Hub tanggal 22 Maret 2023, yang merupakan kolaborasi Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Kementerian PUPR, Presiden Jokowi tidak menyempatkan mampir dan berdialog dengan MRP (Majelis Rakyat Papua) yang gedungnya berdekatan.

Sebenarnya akan sangat baik bila Presiden Jokowi yang rajin berkunjung ke Papua, juga rajin berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai rumah

dan roh orang Papua yang seharusnya dihormati, didengarkan, dan sering diajak berdialog untuk mengusahakan solusi bagi Papua. Pemberdayaan MRP serta pemberdayaan budaya dan agama seharusnya diberi perhatian besar oleh pemerintah. Konflik di Aceh dan Timor Leste akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Maka konflik dan masalah Papua juga seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Buku Markus Haluk adalah salah satu ajakan bagi pemerintah untuk mengobati luka-luka orang Papua.

Prof. Cahyo Pamungkas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau kini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memahami lima buku Markus Haluk sebagai hasil pergumulan orang Papua dalam perspektif Papua. Ketika diminta memberi kata pengantar dalam buku Markus Haluk, Prof. Cahyo sempat ragu-ragu karena Markus Haluk sebagai aktivis ULMWP masuk dalam radar sebagai salah satu anggota kelompok separatis. Namun Prof. Cahyo akhirnya bersedia menulis kata pengantar sebagai wujud kebebasan insan akademik untuk mencari kebenaran sebagaimana diingatkan peneliti senior Dr. Riwanto Tirtosudarmo.

Prof. Cahyo juga mengingat sikap dan kebijaksanaan Prof. Muridan Satrio Widjojo (1967-2014), peneliti Papua dari BRIN dan Ketua Jaringan Damai Papua (JDP) di Jakarta yang mengajak para peneliti Papua tidak memihak sisi “NKRI Harga Mati” maupun sisi “Papua Merdeka Harga Mati”. Prof. Muridan mengajak semua peneliti Papua untuk berpijak pada kebenaran dan keadilan pada platform universal “Papua Tanah Damai” atau “Menyelamatkan Manusia Papua”. Di BRIN masih ada kebebasan akademik untuk penelitian dan publikasi tentang Papua. Pemerintah RI tidak perlu takut akan referendum bila sudah sungguh-sungguh dengan sepenuh hati membangun Papua dengan adil dan damai. Bisa saja lebih banyak orang memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Masih ada harapan untuk membangun damai dengan cara-cara bukan kekerasan entah Papua berdiri sendiri, bergabung dengan MSG, ataupun tetap menjadi bagian RI.

Prof. Cahyo juga mengingat persahabatannya dengan Romo Neles Tebay (1964-2019) imam diosesan Keuskupan Jayapura yang mendirikan Jaringan Damai Papua (JDP) sebagai salah satu perjuangan mengupayakan solusi untuk Papua. Prof. Cahyo sempat menengok Romo Neles Tebay di rumah sakit sebelum Romo Neles Tebay dipanggil Tuhan tanggal 14 April 2019.

Prof. Cahyo mengutip Octovianus Mote yang mengatakan bahwa wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan salah satu bukti bahwa orang Papua bisa bersatu. Kesulitan Organisasi Papua Merdeka adalah bagaimana menyatukan semua orang Papua dalam perjuangan bersama bagi bangsa Papua. ULMWP adalah bukti bahwa bangsa Papua bisa bersatu dan

berjuang bersama untuk kepentingan bangsa Papua dan kehadirannya diakui oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) dan sudah diterima sebagai anggota observer. ULMWP selalu diundang untuk hadir dan berbicara dalam forum MSG mewakili bangsa Papua yang merupakan bagian dari bangsa Melanesia.

Prof. Cahyo memperhatikan bahwa peradaban Papua sekarang mulai dirobokkan dengan berbagai hal. Lima buku Markus Haluk adalah *counter* terhadap buku sejarah yang diterbitkan narasi legitimasi Pemerintah RI yang meyakini bahwa proses integrasi Papua menjadi Indonesia sudah selesai dilakukan. Komisi yang seharusnya dibentuk Otonomi Khusus untuk menulis ulang sejarah Papua berdasarkan kebenaran tidak pernah dilakukan. Lima buku Markus Haluk merupakan narasi sejarah di mana orang Papua, walaupun tidak semua, masih merasa Indonesia bukan rumah yang aman dan memberi keadilan bagi bangsa Papua. Bangsa Papua ingin kembali ke rumah Melanesia. Lima buku Markus Haluk menjadi bahan yang penting untuk memahami mengapa kekerasan dan korban justru semakin meningkat hari demi hari. Semoga lima buku Markus Haluk dapat dipakai sebagai bahan belajar untuk memahami kondisi Papua sesungguhnya dan mendorong penyelesaian masalah Papua.

Dr. Antie Solaiman dari Universitas Kristen Indonesia pernah tinggal di Papua dan dipanggil “Mama Antie” oleh banyak orang Papua, khususnya para mahasiswa Papua karena cinta dan perhatiannya yang sangat besar untuk Papua, antara lain dengan mencarikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk para mahasiswa Papua. Bagi Antie Solaiman, Papua itu luka dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak dan bahkan generasi cucu.

Antie Solaiman masih mengalami ketika ibu-ibu di Mamberamo melahirkan berdiri karena puskesmas penuh rumput dan tidak ada dokter. Dokter tinggal di Biak karena anak-anak dokter sekolah di Biak. Antie Solaiman pernah kena malaria lima kali. Kisah Papua versi laki-laki adalah kisah tembak-tembakan. Kisah Papua versi wanita adalah kisah kesehatan dan pendidikan. Mantri di puskesmas hanya selesai kelas 2 SD. Obat-obatan sudah *expired*. Kalau orang sakit dibawa ke Puskesmas, hanya dibiarkan menunggu mati.

Tidak ada guru yang datang di sekolah dan tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah karena gaji diambil di Jayapura. Guru dan kepala sekolah datang ke sekolah hanya untuk mengambil data untuk mengambil gaji di Jayapura. Pendidikan di Papua hanya dijadikan bahan diskusi dan ditulis dalam buku-

buku hasil penelitian. Tidak pernah ada solusi nyata untuk masalah kesehatan dan pendidikan.

Mengapa tidak ada aksi nyata untuk memperbaiki kesehatan dan pendidikan di Papua? Apakah pemerintah sudah lumpuh sehingga tidak bisa berbuat apa-apa? Mereka yang berani berjuang dan berbicara untuk Papua merasa takut untuk makan dan minum sembarangan karena takut diracun. Mereka takut kalau suatu saat dijemput dan entah dibawa ke mana. Mereka takut diculik kalau naik kendaraan umum. Prof. Muridan dan Romo Neles Tebay sudah diantar masuk liang lahat.

Dalam *launching* buku tanggal 15 Juni 2023 tersebut, Markus Haluk menyatakan kekhawatirannya bahwa dengan bersama Indonesia selama 60 tahun ini maka bangsa Papua akan habis dan musnah. Pernah ada solusi gila untuk menyelesaikan masalah Papua yang disampaikan kepada Prof. Juwono Sudarsono saat beliau menjadi Menteri Pertahanan RI (2004-2009), yaitu bunuh saja semua orang Papua atau pindahkan 1,6 juta orang Papua ke pulau tersendiri karena tidak ada masa depan Papua bersama Indonesia.

Bagi Markus Haluk, bangsa Papua dengan paspor negara mana pun terbukti bisa bersatu yang dibuktikan dalam wadah ULMWP, yang sudah diterima sebagai *observer* dalam MSG untuk mewakili bangsa Papua di rumah Melanesia yang masih membuka dialog dan duduk bersama untuk menentukan masa depan Papua. Markus Haluk yakin bahwa penentuan masa depan Papua tidak akan merugikan Indonesia. Sudah ada contoh bagaimana kemerdekaan Timor Leste tetap mengenyangkan dan menguntungkan Indonesia. Masa depan dan nasib 1,6 juta orang Papua akan ikut mengenyangkan dan menguntungkan Indonesia.

Usman Hamid: Masalah di Papua atau Masalah Papua?

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menulis di *Kompas* 28 Juli 2023 dengan judul “Masalah di Papua atau Masalah Papua?” sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi pada tanggal 7 Juli 2023 saat berkunjung ke Papua. Ketika ditanya soal konflik Papua, Presiden Jokowi menjawab demikian, “Secara umum, 99 persen itu enggak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Semua tempat di mana pun di Papua aman-aman saja.”

Menurut Usman Hamid, masalah Papua itu besar. Artinya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada masalah dan aman-aman saja. Tahun lalu Usman Hamid pernah dilibatkan dalam inisiatif dialog antara negara Indonesia, yang diwakili oleh Komnas HAM, bersama pemimpin orang asli Papua yang mewakili beragam kelompok politik, adat, dan agama. Memperhatikan telah

banyaknya korban yang jatuh, termasuk warga sipil serta pentingnya menahan diri untuk tidak meneruskan konflik bersenjata maka para pihak menyepakati sebuah nota kesepahaman tentang Jeda Kemanusiaan Bersama selama dua bulan di Distrik Maybrat di Papua Barat. Sayangnya, tak ada apa pun yang terjadi sebagai langkah nyata di Papua. Nota kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Komnas HAM.

Menurut Usman Hamid, semua dialog tentang Papua seharusnya dimulai dengan satu fakta penting, yaitu bahwa Papua adalah wilayah geostrategis yang sangat luas dan kaya akan kekayaan alam. Selain Freeport yang merupakan tambang emas terbesar kelima di dunia, masih ada Blok Wabu di Intan Jaya dan Yapen Waropen yang sedang diperebutkan. Raja Ampat yang terkenal unik dan indah malahan dijadikan lokasi tambang nikel. Papua kadang dianggap mengalami “kutukan sumber daya alam”. Kekayaan alam Papua malahan menyebabkan penderitaan Papua.

Papua memang memiliki kekayaan alam yang luar biasa raksasa. Tambang Grasberg yang digarap Freeport memiliki kekayaan emas 29,8 juta *troy ounce*. Tambang yang digali itu berdiameter 4 kilometer dan sedalam 1 kilometer.

Freeport, yang mulai berproduksi pada 1973, beroperasi di pegunungan terpencil di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Wilayah operasi produksi Freeport seluas 10.000 hektar dengan total luas wilayah pendukung mencapai 202.950 hektar. Tambang Freeport menghasilkan mineral jenis tembaga, emas, dan perak. Sepanjang tahun 2017, bijih yang ditambang Freeport 140.445 ton per hari. Dari jumlah ini terdapat kandungan tembaga sebanyak 1,01 persen per ton, emas 1,15 gram per ton, dan perak 4,32 gram per ton. Freeport pernah memproduksi bijih hingga 238.000 ton per hari pada tahun 2009. Bila setiap tahun Freeport mendapatkan keuntungan bersih sekitar 2 miliar USD, maka selama 45 tahun beroperasi di Papua sejak 1973-2018, Freeport mendapatkan keuntungan bersih 90 miliar USD atau 1.350 triliun rupiah.

Dalam laporan *Global Witness* Juli 2005 berjudul “*Paying for Protection: The Freeport Mine and the Indonesian Security Forces*”; Freeport McMoran dalam laporan ke Securities and Exchange Commission tahun 2002 melaporkan pengeluaran sejumlah 4,7 juta USD (70,5 miliar rupiah) di tahun 2001 dan 5,6 juta USD (84 miliar rupiah) di tahun 2002 untuk biaya “*support costs for government-provided security*” yaitu “*cost of infrastructure, food, travel, administrative costs, and community assistance programmes run by the Indonesian military and police.*” Tidak bisa disangkal bahwa Freeport mengeluarkan biaya “*paying for protection*” yang cukup banyak setiap tahunnya. Biaya di atas adalah biaya yang

dicatat dalam pembukuan sebagai biaya pengamanan. Mungkin saja ada biaya pengamanan lainnya yang dicatat dalam pos pengeluaran yang lain termasuk biaya yang bersifat CSR (*corporate social responsibility*) untuk masyarakat lokal Papua. Freeport misalnya mengaku memberikan kontribusi untuk masyarakat lokal senilai 30 triliun rupiah selama 30 tahun.

Papua memang memiliki cadangan bijih emas terbesar di Indonesia yakni sebesar 52% atau 3,2 miliar ton bijih emas. Luas tambang emas di Papua seluas 229,893 hektar di enam kabupaten yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika, dan Paniai. Di daerah tambang emas inilah banyak terjadi konflik.

Di Blok Wabu saja potensi sumber daya emas mencapai 8,1 juta *troy ounce* atau senilai Rp 236 triliun. Dua aktivis HAM yaitu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dituntut ke pengadilan oleh Luhut Binsar Panjaitan karena dianggap mencemarkan nama baik. Luhut Binsar Panjaitan membantah keterlibatannya dalam perusahaan yang bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu. Blok Wabu jaraknya 40 km dari tambang Grasberg yang dikelola Freeport dengan potensi emas yang berkali-kali lipat dibandingkan emas yang ditambang Freeport.

Selain Blok Wabu di Intan Jaya masih ada Blok Warim yang sebagian berada di lokasi Taman Nasional Lorentz yang menyimpan potensi minyak 25,969 miliar barel atau senilai Rp 30.646 triliun. Selain potensi minyak, Blok Warim juga memiliki potensi gas hampir lima lipat lebih besar dibandingkan Blok Masela di Maluku yakni 47,37 triliun kaki kubik (TCF). Blok Masela memiliki potensi gas sebesar 10,73 TCF.

Perhatikan bahwa sebagian besar lokasi konflik di Papua adalah di daerah di mana ada lokasi pertambangan kekayaan alam Papua yaitu di Distrik Dekai, Yakuhimo, Distrik Ilaga, Pegunungan Bintang, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Maybrat.

Kapten Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air, disandera di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023 yang termasuk daerah konflik. Penyanderaan pilot tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah RI untuk mengirimkan lebih banyak pasukan TNI di daerah-daerah tersebut untuk operasi pembebasan pilot dan mengatasi berbagai konflik. Saya yakin sebenarnya bahwa Pemerintah Indonesia tahu di mana Kapten Philip berada dan mempunyai kemampuan untuk membebaskan Kapten Philip Mark Mehrtens. Kalau pembebasan pilot yang disandera itu belum terjadi, mungkin karena ada berbagai situasi, kondisi, dan pertimbangan lainnya. Sampai saat ini upaya membebaskan Kapten Philip Mark Mehrtens masih diupayakan antara lain lewat mediator tokoh-tokoh agama dan lewat pendekatan budaya.

Papua dengan luas 420.000 kilometer persegi merupakan 22% luas daratan Indonesia, padahal penduduknya hanya 5 juta jiwa atau 2% dari total 278 juta penduduk Indonesia. Orang Asli Papua saat ini hanya berjumlah 1,6 juta jiwa atau jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pendatang. Yang menyedihkan adalah ada pihak-pihak yang memandang Papua seolah tanah kosong tanpa pemilik, yang bisa diperebutkan dan dibagi-bagi begitu saja untuk kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu.

Usman Hamid berpendapat bahwa Jeda Kemanusiaan Bersama yang disepakati antara Komnas HAM dan para pemimpin ataupun tokoh Papua tahun lalu membuktikan bahwa dialog itu sangat mungkin. Jika ditindaklanjuti, ini akan memulai proses menuju de-eskalasi kekerasan dan penyelesaian masalah, terlepas mau dinilai kecil atau besar. Kekerasan di Papua memiliki dimensi politik dan tak akan hilang selama orang Papua dianggap penghalang bagi pihak-pihak yang ingin menikmati keuntungan dari alam Papua bagi diri mereka sendiri.

The Melanesian Spearhead Group (MSG)

MSG adalah organisasi yang saat ini memiliki empat anggota negara berdaulat (*sovereign state*) di Kepulauan Melanesia, yaitu Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, dan Vanuatu serta satu anggota berbentuk partai, yaitu The Kanak and Socialist National Liberation Front dari New Caledonia. Selain itu ada satu *associate member*, yaitu Indonesia dan dua *observer*, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Timor Leste. Indonesia diterima sebagai *observer* tahun 2011 dan sebagai *associate member* tahun 2015. ULMWP yang didirikan tahun 2014 diterima sebagai *observer* tahun 2015. Timor Leste diterima sebagai *observer* tahun 2011.

MSG dirintis tahun 1986 oleh Papua New Guinea, Vanuatu, dan Solomon Islands sebagai kerja sama perdagangan antarnegara Melanesia. *The MSG Trade Agreement* ditandatangani tiga negara tersebut tahun 1993 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan ekspor dan impor termasuk pengaturan bebas fiskal. Fiji diterima sebagai anggota *The MSG Trade Agreement* tahun 1998. MSG didirikan secara resmi pada tanggal 23 Maret 2007 dengan ditandatanganinya *The Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* sebagai organisasi berbentuk asosiasi di bawah hukum internasional. MSG Secretariat didirikan tahun 2008 di Port Vila di Vanuatu.

Fokus utama MSG adalah pertumbuhan ekonomi para anggotanya. MSG merumuskan tiga tujuan organisasi mereka. Tujuan pertama adalah untuk mempromosikan dan memperkuat perdagangan antar-anggota serta menjadi

sarana pertukaran budaya, tradisi, nilai-nilai, dan kualitas kedaulatan antar-bangsa Melanesia. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan teknik antar-anggotanya. Tujuan ketiga adalah untuk menyelaraskan kebijakan para anggota dan memperkuat tujuan bersama dalam bidang pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, *good governance*, dan keamanan wilayah.

Indonesia diterima sebagai *observer* pada tahun 2011, dengan alasan Indonesia memiliki 11 juta penduduk bersuku bangsa Melanesia yang tinggal di lima provinsi di Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Perwakilan dari lima provinsi tersebut mewakili Indonesia dalam pertemuan MSG. Indonesia diterima menjadi *associate member* pada tahun 2015.

MSG memiliki anggota yang bukan negara berdaulat (*sovereign state*), melainkan suatu partai, yaitu The Kanak and Socialist National Liberation Front atau Front De Liberational De Nationale Kanak Et Socialiste (FLNKS) dari New Caledonia. Partai Kanak and Socialist National Liberation Front adalah aliansi beberapa partai politik di New Caledonia yang didirikan tahun 1984, yang bertujuan mengusahakan kemerdekaan New Caledonia dari Prancis. Anggotanya kebanyakan dari etnis Kanak, namun juga ada dari etnis lainnya.

Tanggal 7 November 2023, MSG baru saja menunjuk Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua New Guinea James Marape untuk menjadi utusan khusus MSG untuk menemui Presiden Jokowi untuk membicarakan upaya menyelesaikan masalah Papua.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Sebelum ULMWP terbentuk tahun 2014, beberapa organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sudah mengajukan keinginan menjadi anggota MSG. MSG menyarankan agar berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia bergabung menjadi satu sebelum menjadi anggota MSG.

Rupanya sikap MSG terhadap The Kanak and Socialist National Liberation Front dari New Caledonia yang berjuang untuk mengupayakan kemerdekaan New Caledonia dari Prancis menjadi kunci harapan bagi didirikannya ULMWP untuk mewakili Bangsa Papua di forum MSG. ULMWP didirikan dengan harapan bahwa solidaritas bangsa Melanesia menjadi alasan yang kuat bagi negara-negara anggota MSG untuk mendukung perjuangan Bangsa Papua.

ULMWP didirikan pada 6 Desember 2014 di Vanuatu sebagai koalisi antara West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Ketiga

organisasi pendiri ULMWP ini sepakat bahwa kepemimpinan ULMWP secara bergiliran dan secara bersama-sama sebagai bukti persatuan orang Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Octovianus Mote dari NFRPB terpilih sebagai presiden pertama ULMWP (2014-2017) meskipun Octo sendiri lebih senang disebut sebagai sekjen. Pendirian ULMWP tanggal 6 Desember 2014 tersebut dihadiri dan disaksikan oleh wakil Pemerintah Vanuatu, Pacific Council of Churches, dan Dewan Adat Vanuatu.

Sesudah terbentuk tahun 2014, ULMWP segera mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG. ULMWP diterima sebagai *observer* di MSG tahun 2015 dan terus berupaya untuk menjadi *associate member* MSG. Memang ada catatan bahwa bangsa Melanesia yang ada di lima provinsi di Indonesia diwakili Indonesia, sedangkan ULMWP dianggap lebih mewakili bangsa Melanesia dari Papua yang tinggal di luar Indonesia.

Octovianus Mote dari ULMWP menyadari bahwa ULMWP belum diterima sebagai anggota penuh MSG, namun pintu telah terbuka sehingga dalam pertemuan MSG Indonesia dan ULMWP bisa duduk berhadapan di forum yang sama. Octovianus Mote mengatakan, “*We might not be a full member of the MSG, but a door has opened to us. We will sit across a table from Indonesia as equal.*”

Forum MSG sendiri telah diadakan sebanyak 22 kali. Forum ke-22 diadakan pada tanggal 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Vanuatu. Forum kali ini membahas dua hal penting. Pertama, ditetapkannya Deklarasi Udaune tentang pencegahan terjadinya perubahan iklim dengan menolak negara-negara membuang limbah nuklir ke Samudra Pasifik. Kedua, membahas terkait penetapan ULMWP sebagai anggota MSG.

Kejadian *walk out* delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Mansury, di KTT MSG di Port Vila di Vanuatu tanggal 24 Agustus 2023 terjadi saat Benny Wenda sebagai Presiden ULMWP akan menyampaikan pidato. Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi keluarnya delegasi RI dari forum tersebut dan menerangkan alasan *walk out* dari KTT MSG. “Indonesia tak bisa menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan bersenjata di Papua, termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat,” ungkap Teuku Faizasyah. Lebih lanjut, Faizasyah menerangkan WO merupakan tindakan yang biasa dalam dunia diplomasi. Faizasyah juga memberi contoh sejumlah negara Barat yang keluar dari forum saat delegasi Rusia tengah berbicara.

Usai KTT MSG rampung, Kemenlu RI pada tanggal 26 Agustus 2023 merilis pernyataan bahwa forum tersebut menolak ULMWP menjadi anggota. “Dalam

Komunike Bersama (*Joint Communique*) yang dikeluarkan pada 24 Agustus, para pemimpin anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG,” demikian menurut pernyataan Kemenlu RI yang kemudian menegaskan bahwa keanggotaan MSG hanya untuk negara yang berdaulat. “RI menegaskan ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengan organisasi itu yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap Orang Asli Papua,” kata Kemenlu RI.

Memperhatikan rilis Kemenlu RI tanggal 26 Agustus 2023, tampak ada perbedaan pendapat. Kemenlu RI memilih *walk out* dengan alasan ULMWP menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengan ULMWP. Kemenlu RI juga berpendapat bahwa ULMWP tidak bisa diterima menjadi anggota MSG karena bukan negara berdaulat (*sovereign state*), meskipun sebenarnya MSG memiliki anggota berupa suatu partai, yaitu The Kanak and Socialist National Liberation Front dari New Caledonia sebagai suatu partai di New Caledonia yang memperjuangkan kemerdekaan New Caledonia dari Prancis.

Melanesian Spearhead Group (MSG) menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen *Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit* pada 24 Agustus lalu. Komunike itu merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Vanuatu pada 23-24 Agustus. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua. MSG mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM) adalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM. MSG mengusulkan agar Komisaris HAM PBB melakukan misi ke Papua untuk membuat laporan situasi Papua yang sesungguhnya. Laporan Komisaris HAM PBB tersebut akan dijadikan pertimbangan KTT MSG tahun 2024. MSG juga meminta Pemerintah Indonesia agar mengizinkan kunjungan tersebut serta mengizinkan perwakilan MSG dan Pacific Islands Forum untuk menemani kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua. MSG meminta Sekretariat MSG membangun dialog antar-pihak-pihak terkait untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua. Menanggapi komunike ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani menyambut baik.

Dua hari sesudah KTT MSG, pada tanggal 26 Agustus sampai 3 September 2023 ULMWP mengadakan The 2nd ULMWP Leaders Summit atau KTT II ULMWP di Port Vila di Vanuatu yang dihadiri 50 perwakilan berbagai organisasi yang

memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dalam KTT tersebut Menase Tabuni dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) terpilih sebagai Presiden ULMWP periode 2023-2028.

Menase Tabuni memilih tetap tinggal di Papua dan dengan demikian menyatakan bahwa ULMWP tidak hanya mewakili Bangsa Papua di luar Indonesia melainkan mewakili Bangsa Papua di mana pun termasuk di Indonesia. Octovianus Mote dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang terpilih menjadi Presiden pertama ULMWP (2014-2017) tinggal di AS. Benny Wenda dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang terpilih menjadi Presiden kedua ULMWP (2017-2023) tinggal di Inggris. Sesuai konstitusi ULMWP, kepemimpinan ULMWP bergilir dari tiga pendiri ULMWP, yaitu NFRPB, PNWP, dan WPNCL.

Selain Menase Tabuni sebagai Presiden ULMWP Periode 2023-2028, terpilih Octovianus Mote sebagai Wakil Presiden, Markus Haluk sebagai Sekretaris, Benny Wenda untuk Urusan Luar Negeri, Buchtar Buni sebagai Ketua Dewan Legislatif, dan Apolos Sroyer sebagai Ketua Dewan Kehakiman. Dari sini tampak bahwa mereka yang sebenarnya mewakili berbagai organisasi yang berbeda masih sepakat untuk menggunakan wadah ULMWP sebagai wadah perjuangan bersama orang Papua. Tanggal 4 September 2023 dilakukan jumpa pers perdana oleh kepemimpinan baru ULMWP periode 2023-2028 di Port Vila Vanuatu.

Tanggal 20 Oktober 2023 dilakukan Doa Syukur dan Pengukuhan Kepemimpinan ULMWP 2023-2028, di Kantor Pusat Koordinasi Dalam Negeri ULMWP di Wamena West Papua. Acara ini dihadiri sekitar 500 orang para pemimpin dan perwakilan dari berbagai kalangan rakyat West Papua yang ada di Wamena.

Pada 9 November 2023, ULMWP mulai melakukan audiensi sekaligus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Moderator Dewan Gereja Papua di Jayapura. Selanjutnya mulai dilakukan audiensi dengan berbagai kalangan.

Sayang sekali, upaya mempersatukan semua orang Papua dalam wadah ULMWP yang sudah dirintis bertahun-tahun sejak 2014, dan sudah menghasilkan KTT II ULMWP, ditolak oleh oknum dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan tersendiri dan didukung oknum dan pihak-pihak yang ingin agar wadah ULMWP dipecah belah agar tidak bisa lagi menjadi representasi orang Papua di forum regional dan internasional.

Pada awal dan pertengahan bulan September 2023, Matias Wenda, Buchtar Tabuni, Edison Waromi, dan beberapa orang lainnya menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka kemudian diviralkan melalui media sosial. Pada pertengahan September 2023, Benny Wenda dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengeluarkan

pernyataan mendukung hasil KTT II ULMWP, namun pada saat yang sama ia juga mempertahankan Pemerintahan Sementara Republic of West Papua yang dulu pernah diumumkannya pada tanggal 1 Desember 2020. PNWP kemudian menarik diri dari ULMWP dengan menentang keputusan bersama yang dihadiri sendiri oleh PNWP di KTT II ULMWP di Vanuatu. Kemudian berbagai pihak mengumumkan dilakukannya mobilisasi penolakan hasil KTT II ULMWP di berbagai tempat di Papua.

Pada 20 November 2023, PNWP dan pendukung Pemerintahan Sementara Republic of West Papua pimpinan Benny Wenda melalui Forum Rakyat West Papua menggelar Kongres yang disebut Kongres I ULMWP di halaman tempat tinggal Buchtar Tabuni. Forum Rakyat West Papua dibentuk secara mendadak pada akhir Oktober 2023 untuk memediasi aksi penolakan hasil KTT II ULMWP. Buchtar Tabuni adalah orang pertama yang menyampaikan selamat kepada Menase Tabuni sebagai Presiden Eksekutif tetapi bulan berikutnya ia juga yang pertama mendorong delegitimasi hasil KTT II ULMWP.

Bagi para pimpinan ULMWP Periode 2023-2028 yang terpilih dalam KTT II ULMWP di Vanuatu, UUD Sementara tahun 2020 sudah digugurkan dan diganti UUD ULMWP 2023. Pemerintahan Sementara Republic of West Papua pimpinan Benny Wenda dan ULMWP adalah dua institusi yang berbeda dengan UUD yang berbeda. Kongres I ULMWP di Papua yang dilakukan di Sentani tanggal 20 November 2023 oleh Buchtar Tabuni dan Edison Waromi dan kawan-kawan adalah Kongres Parlemen Nasional West Papua (PNWP) pimpinan Benny Wenda dan bukan Kongres ULMWP. Kongres PNWP tersebut mengangkat Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Republic of West Papua dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Republic of West Papua.

Bagi ULMWP, Kongres PNWP di Sentani 20 November 2023, Forum Rakyat West Papua, dan Pemerintahan Sementara Republic of West Papua pimpinan Benny Wenda dari PNWP adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan roh semangat Deklarasi Saralana 2014, Hasil KTT I 2017, hasil KTT II ULMWP 2023, Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Komunike para pemimpin MSG 2014-2023, PIF 2015-2023, dan dukungan komunitas internasional yang terus memberikan dukungan kepada ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa Papua untuk memperjuangkan Kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua. Sampai saat ini hanya ULMWP yang mempunyai relasi dengan Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), Pacific Island Coalition on West Papua (PICWP),

serta forum regional dan forum internasional lainnya serta diakui keberadaannya mewakili orang-orang Papua dalam forum regional dan internasional.

Menase Tabuni menjelaskan bahwa semua pihak yang mewakili pendiri ULMWP yaitu WPNCL, NFRPB, dan PNWP hadir dalam KTT II ULMWP dan mencapai kesepakatan bersama termasuk mengenai kepemimpinan ULMWP. Semua pendiri ULMWP juga masih ikut dalam kepengurusan ULMWP yang baru untuk periode 2023-2026. Menase Tabuni berharap reaksi penolakan hasil KTT II ULMWP bisa dihentikan karena ULMWP adalah bukti bahwa rakyat Papua bisa bersatu dalam wadah perjuangan bersama. ULMWP adalah forum atau wadah koordinasi antar-kelompok yang memperjuangkan Papua lewat jalan damai dan diplomasi di forum regional dan internasional. Wadah ULMWP sangat penting untuk dipertahankan dan dipersatukan sebagai bukti bahwa berbagai pihak yang berjuang untuk Papua bisa bersatu dan berjuang bersama.

Seperti kita ketahui, selain ULMWP masih ada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pimpinan Agus Kossay yang berkomitmen tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangan Papua. KNPB didirikan 19 November 2008 di Sentani oleh berbagai organisasi dan aktivis khususnya mahasiswa. Saat pembentukan terpilih Buchtar Tabuni dan Victor F. Yeimo sebagai Ketua Umum dan Ketua I KNPB. KNPB secara organisasi menyatakan tidak pernah mengajak atau mendidik anggotanya untuk melakukan tindakan kriminal dan menggunakan kekerasan terhadap siapa pun, baik orang asli Papua maupun pendatang.

Beberapa aktivis KNPB sempat ditangkap dan ditahan namun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Yang terakhir adalah Victor F. Yeimo (lahir 25 Mei 1983), juru bicara internasional KNPB, yang ditangkap 9 Mei 2021 atas tuduhan makar dan menggerakkan demonstrasi antirasisme di Papua pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.

Usman Hamid Direktur Amnesty International Indonesia menghormati keputusan hukum Indonesia, namun sempat mendesak agar Victor F. Yeimo dan aktivis lainnya yang dipenjarakan hanya karena menyampaikan pendapat secara damai dibebaskan karena hal itu dijamin konstitusi. Menurut data Amnesty International Indonesia, sejak 2019-2022 sedikitnya ada 78 orang di Papua telah ditangkap karena tuduhan melanggar pasal makar berdasarkan KUHP.

Victor F. Yeimo dibebaskan tanggal 23 September 2023 dan tidak terbukti menggerakkan aksi makar dan unjuk rasa antirasisme tahun 2019 di Papua. Aksi unjuk rasa antirasisme tersebut dipicu insiden rasisme terhadap orang Papua yang terjadi di Surabaya tanggal 16-19 Agustus 2019.

Atas kegigihannya memperjuangkan HAM, kebebasan berbicara, atau kebebasan sipil, tanggal 10 November 2023 yang lalu Victor Yeimo dianugerahi Voltaire Empty Chair Award Winner 2023 oleh Liberty Victoria di Melbourne. Victor mengatakan bahwa penghargaan itu bukan untuk dirinya pribadi, melainkan untuk semua individu dan kelompok yang berdedikasi untuk memperjuangkan Papua baru yang lebih baik.

Selain KNPB, masih ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Goliath Tabuni dengan berbagai komandan di berbagai daerah antara lain Gabriel Melkisedek Awom, Terianus Satto, Egianus Kogoya, Fernando Worabai, dll. Para komandan tersebut lebih bersifat otonom dan independen. TPNPB inilah yang dituduh dengan nama KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau KST (Kelompok Separatis Teroris) karena mempunyai senjata dan menggunakan senjata dalam konflik dengan TNI dan Polri. Dalam berbagai insiden konflik yang melibatkan kekerasan dan korban, TPNPB biasanya mengaku bila memang TPNPB yang terlibat.

Secara adat, dalam budaya Papua setiap ada konflik termasuk perang antar suku tidak dibenarkan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, dan bahkan pemimpin pihak lain yang berkonflik. Juga tidak dibenarkan secara adat untuk menyerang pihak lawan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Selain itu bila ada korban, maka korban harus diperlakukan secara layak menurut aturan adat. Untuk menyelesaikan konflik secara adat dan budaya Papua juga ada prosedur untuk berdamai dan memberikan ganti rugi termasuk ganti rugi yang disebut uang darah. Cara adat atau budaya untuk penyelesaian konflik tersebut itulah yang barangkali perlu lebih dipahami dan diterima sebagai solusi oleh pihak-pihak lain yang bukan orang asli Papua termasuk oleh Pemerintah RI. Bila hanya pendekatan hukum formal yang dipakai, maka berbagai konflik yang terjadi tidak akan dapat diselesaikan. Bahasa budaya dan bahasa hukum tidak selalu harus dipertentangkan karena pada hakikatnya hukum seharusnya justru melindungi nilai-nilai budaya yang luhur dan dihayati masyarakat.

Dalam kasus pembunuhan Michelle Kurisi Doga tanggal 28 Agustus 2023 di Distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, tidak jauh dari Wamena di Provinsi Papua Pegunungan, TPNPB maupun KNPB membantah keterlibatan mereka dan mengatakan bahwa orang-orang yang ditangkap Polri dan dituduh pembunuh Michelle Kurisi bukan anggota TPNPB maupun KNPB. Michelle Kurisi dibunuh karena diduga sebagai mata-mata dan bagian intelijen Badan Intelijen Negara (BIN) atau TNI. Pihak BIN dan TNI juga tidak mengakui dan membantah tuduhan bahwa Michelle Kurisi adalah intelijen BIN atau TNI. Dengan demikian sangat

penting bahwa insiden dibunuhnya Michelle Kurisi sungguh diinvestigasi dan diungkapkan kebenarannya agar ditemukan siapa dan alasan mengapa Michelle Kurisi dibunuh agar tidak terjadi sikap tidak mengakui dan malahan menuduh bahwa pihak tertentu itulah yang melakukan pembunuhan Michelle Kurisi.

Menurut berita *Jubi.id*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua menerima pernyataan Egianus Kogoya yang membantah keterlibatan TPNPB dalam pembunuhan Michelle Kurisi. Berdasarkan pengaduan Elisabeth Mandosir ibu dari Michelle Kurisi mengenai informasi dan dugaan adanya keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan Michelle Kurisi, Komnas HAM Papua lalu meminta klarifikasi kepada Pangdam XVII Cenderawasih. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) misalnya mendesak agar Komnas HAM Papua melakukan investigasi yang lengkap dan menyeluruh atas kasus pembunuhan Michelle Kurisi. Semoga kebenaran akan terungkap pada saatnya.

Memang tidak mudah untuk membaca berita-berita tentang Papua dan meneliti kebenarannya. Vidhyandika D. Perkasa peneliti senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam tulisan “Patologi Informasi, Konflik, dan Warga Sipil di Papua” di *Kompas* tanggal 18 Oktober 2023, mengingatkan pentingnya meneliti berbagai informasi yang berkembang secara liar di media sosial maupun media daring (*online*) tanpa verifikasi sehingga mempunyai potensi memberikan informasi sesat. Dalam situasi konflik, motif penyebaran berita yang tidak benar adalah untuk mencemarkan nama baik pihak yang terlibat konflik yaitu TPNPB ataupun aparat keamanan. Motif lain adalah untuk mencari dukungan termasuk dukungan internasional atau sebagai pembenaran terhadap aksi atau insiden tertentu. Untuk mendapatkan informasi yang benar, maka diperlukan verifikasi informasi yang akurat dan kejujuran serta keterbukaan pihak-pihak yang berkonflik. Di sini dibutuhkan juga kebebasan pers untuk menyelidiki fakta-fakta di lapangan dan memverifikasi informasi yang beredar.

Salah satu media yang saat ini cukup dipercaya oleh banyak pihak adalah *Jubi.id*. Tabloid *Jubi* didirikan Victor Mambor dan Dominggus Mampioer bersama beberapa kawan wartawan dan sebagai surat kabar harian pertama kali terbit tahun 2014. *Jubi* adalah singkatan “Jujur Bicara” dan saat ini merupakan salah satu media yang cukup dapat dipercaya mengenai berbagai berita tentang Papua karena berita yang lebih terverifikasi dan berimbang.

Kelompok-kelompok yang berjuang untuk Papua Merdeka disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nama OPM adalah nama yang diberikan oleh Peme-

rintah RI kepada setiap kelompok di Papua maupun di luar negeri yang memiliki tujuan untuk Papua Merdeka atau lepas dari Indonesia.

Selain berbagai kelompok yang berjuang untuk Papua Merdeka, masih ada kelompok-kelompok yang mengaku berjuang untuk tetap menjadi bagian Indonesia.

Mengapa delegasi Indonesia melakukan *walk out*? Saya ingin memberi komentar bukan dari sudut politik, melainkan dari sudut budaya dan etika pergaulan sehari-hari. Kalau saya bertamu di rumah seorang sahabat, sepantasnya saya menghargai adat istiadat di rumah sahabat tersebut. Bila sahabat saya juga menerima tamu yang lain yang tidak saya sukai, saya bisa memilih dari dua opsi. Opsi pertama, saya menerima tamu lain tersebut karena menghormati tuan rumah yang adalah sahabat saya. Opsi kedua, saya tidak ingin berjumpa dengan tamu lain tersebut, maka saya akan minta izin terlebih dulu kepada tuan rumah untuk meninggalkan rumahnya.

Indonesia tidak mau memilih opsi pertama, yaitu menerima tamu tersebut karena menghormati tuan rumah yang adalah sahabat. Namun, Indonesia agaknya juga tidak memilih opsi kedua, yaitu meninggalkan tempat, dengan meminta izin lebih dahulu kepada tuan rumah karena melakukan *walk out* langsung tanpa izin tuan rumah.

Pertanyaan lebih dalam adalah, apakah Indonesia menganggap tuan rumah dan negara-negara anggota MSG lainnya sebagai sahabat? Bagi orang Papua, MSG adalah rumah honai bagi bangsa-bangsa Melanesia. Indonesia sebagai *associate member* diharapkan menghormati budaya bangsa Melanesia untuk duduk bersama. Apakah Indonesia memiliki kesadaran bahwa MSG adalah rumah honai bagi bangsa Melanesia? Apakah Indonesia sungguh mengakui diri sebagai bagian dari bangsa Melanesia sehingga bersedia dan berjuang bersama anggota MSG untuk masa depan bangsa-bangsa Melanesia yang lebih sejahtera dan damai? Apakah Indonesia sungguh memahami dan menggunakan pendekatan budaya dalam relasi dan interaksi dengan MSG dan ULMWP? Apakah Indonesia bersedia mendengarkan, berbicara, dan berdialog dengan MSG dan ULMWP kalau Indonesia juga mempunyai itikad dan komitmen untuk menyelesaikan masalah Papua?

Kalau MSG tanggal 7 November 2023 yang lalu menunjuk Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua New Guinea James Marape sebagai utusan khusus untuk menemui Presiden Jokowi untuk membicarakan masalah Papua, apakah Presiden Jokowi bersedia menerima kedua utusan khusus tersebut dan berdiskusi mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Papua?

Menurut Menase Tabuni, ULMWP bukan pemerintah sementara dan merupakan badan perwakilan atau wadah koordinatif bagi semua orang Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sementara itu, Benny Wenda di Inggris masih menyatakan bahwa dirinya adalah Presiden Pemerintahan Sementara Republic of West Papua yang didukung International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang didirikan Benny Wenda bersama beberapa politisi di Inggris dan didukung beberapa pihak dari Papua New Guinea dan Fiji. Perbedaan pendapat mengenai ada tidaknya pemerintahan sementara Republic of West Papua dengan Benny Wenda sebagai presiden adalah salah satu faktor yang menyulut berbagai insiden protes terhadap keputusan KTT II ULMWP di Vanuatu.

Markus Haluk sebagai sekretaris ULMWP menyambut baik keputusan para pemimpin MSG yang mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB ke West Papua bersama delegasi Pasifik agar masyarakat internasional memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi nyata di lapangan di West Papua. Markus Haluk berharap kepada masyarakat West Papua di tanah air, agar bersatu dan berkomitmen untuk bekerja sama demi mencapai visi negara West Papua yang merdeka dan demokratis dalam keluarga Pasifik. Kesatuan ULMWP sebagai wadah koordinatif untuk perjuangan bersama bagi Papua seharusnya dijaga dan dipertahankan serta jangan dirusak oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu yang akan sangat merugikan perjuangan bersama Papua untuk Papua.

Profesor Cahyo mengutip Octovianus Mote yang mengatakan bahwa wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan salah satu bukti bahwa orang Papua bisa bersatu. Kesulitan Organisasi Papua Merdeka adalah bagaimana menyatukan semua orang Papua dalam perjuangan bersama bagi bangsa Papua. ULMWP adalah bukti bahwa bangsa Papua bisa bersatu dan berjuang bersama untuk kepentingan bangsa Papua dan kehadirannya diakui oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) dan sudah diterima sebagai anggota observer. ULMWP selalu diundang untuk hadir dan berbicara dalam forum MSG mewakili bangsa Papua yang merupakan bagian dari bangsa Melanesia.

Hubungan Tujuh Presiden RI dengan Papua

Selama 60 tahun terakhir (1963-2023), Papua sudah dikunjungi 43 kali oleh 7 Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo (2014-2024) adalah presiden yang paling sering berkunjung ke Papua yaitu 18 kali sampai saat ini. Presiden Soekarno (1945-1967) berkunjung dua kali ke Irian Barat pada tahun 1963. Presiden Soeharto (1967-1998) berkunjung ke Irian Jaya lima kali tahun, yaitu

tahun 1969, 1973, 1991, 1993, dan 1994. Presiden B.J. Habibie (1988-1989) dua kali pada tahun 1988 dan sekali tahun 1999. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) berkunjung ke Papua dua kali yaitu tahun 1999 dan 2000. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) tiga kali yaitu tahun 2001, 2002, dan 2003. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berkunjung 12 kali yaitu tahun 2005 (2 kali), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (2 kali), 2012, 2013 (2 kali), dan 2014. Nama daerah yang dikunjungi para Presiden RI berubah dari Irian Barat menjadi Irian Jaya dan kemudian Papua sampai saat ini.

Presiden Soekarno (18 Agustus 1945—12 Maret 1967) menyebut Irian Barat sebagai “negara boneka bentukan Belanda” dan bertekad bulat agar Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Presiden Soekarno mengirim Operasi Trikora yang dimulai 19 Desember 1961 dan berakhir di 15 Agustus 1962. Presiden Soekarno berhasil melaksanakan keinginannya untuk mengintegrasikan Papua menjadi bagian Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno selalu yakin dan berusaha agar Papua menjadi bagian Indonesia.

Presiden Soekarno dua kali berkunjung ke Irian Barat tanggal 10 Mei 1963 dan 1 Desember 1963. Dapat disimpulkan bahwa kedua kunjungan ke Irian Barat tersebut tentu saja dalam rangka konsolidasi upaya Indonesia menjadikan Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Keyakinan Presiden Soekarno sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 bahwa Irian Barat adalah juga bagian dari negara Indonesia akhirnya terwujud dalam periode kepemimpinan Presiden Soekarno.

Presiden Soeharto (12 Maret 1967—21 Mei 1998) berkunjung lima kali ke Irian Barat, yaitu 15-24 September 1969, awal Maret 1973, 8 Desember 1977, 23 September 1993, dan 1 Juli 1994.

Saat pemerintahan Presiden Soeharto nama Irian Barat resmi diubah menjadi Irian Jaya dan diresmikan menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 1973.

Presiden Soeharto membangun jalan, melaksanakan program transmigrasi yang mengubah demografi Papua, membuka kerja sama pengelolaan tambang Freeport pada tahun 1967 yang mengubah geologi Papua, dan dapat dikatakan mempertahankan peran militer di Papua dan pendekatan keamanan dengan mengangkat para perwira aktif TNI untuk menduduki berbagai jabatan di Papua.

Dapat dicatat bahwa pada tahun 1996, Indonesia terlibat sebagai pihak ketiga dan berhasil sebagai fasilitator dan mediator dalam konflik di Mindanao Selatan yang melahirkan perjanjian damai tahun 1996 antara Pemerintah Filipina dengan

Presiden Fidel Ramos dengan Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari.

Namun dapat dikatakan bahwa Presiden Soeharto sebenarnya masih menggunakan pendekatan militer untuk Papua dengan memberlakukan Operasi Militer di Papua untuk mengakhiri Gerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Dalam berbagai publikasi, Operasi Militer di Papua sejak 1965 sampai tahun 1998 dikatakan mengakibatkan jumlah korban antara 100 ribu sampai 500 ribu jiwa. Daerah Operasi Militer baru dicabut tahun 1998 oleh Presiden B.J. Habibie.

Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998—20 Oktober 1999) mulai mengubah kebijakan Indonesia terhadap Papua. Presiden B.J. Presiden BJ Habibie berkunjung tiga kali pada tanggal 1 November 1998, 7 Desember 1998, dan 21 Agustus 1999.

Kunjungan ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang kemudian mengarah pada pembentukan “Paket Otonomi Khusus Papua” yang diumumkan oleh Presiden B.J. Habibie pada Agustus 1999. Paket tersebut bertujuan memberikan Papua lebih banyak kewenangan otonom dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi isu-isu Papua yang telah lama menjadi perhatian dan sumber konflik di wilayah tersebut.

Presiden B.J. Habibie menyerahkan urusan keamanan di Papua lebih banyak ke POLRI daripada ke TNI. Bulan Agustus 1998, Panglima TNI Jenderal Wiranto meminta maaf secara terbuka dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Presiden B.J. Habibie menyatakan masalah Papua harus segera diselesaikan lewat jalur diplomasi. Presiden B.J. Habibie juga membebaskan para tahanan politik terkait Papua.

Presiden B.J. Habibie juga mengundang para tokoh Papua ke Istana untuk mendengarkan aspirasi orang Papua dan berdialog dalam rangka mengupayakan solusi penyelesaian masalah Papua yang disebut Dialog Nasional 1999 dengan Tim 100 yang terdiri dari berbagai perwakilan orang Papua dan dipimpin Tom Beanal.

Rupanya tidak terpikir oleh Presiden B.J. Habibie bahwa dalam Dialog Nasional 1999 tersebut rombongan Papua secara terbuka menuntut kemerdekaan Papua. Presiden B.J. Habibie tidak secara tegas menolak maupun menerima tuntutan tersebut, namun berjanji akan mempertimbangkan yang paling baik untuk masyarakat Papua.

Presiden B.J. Habibie juga mengesahkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat dan pemekaran

beberapa kabupaten. Namun pembentukan provinsi baru ini tidak terlaksana. MPR RI pada saat ini juga mengeluarkan Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999 yang memberikan landasan untuk provinsi Papua untuk mendapatkan status khusus yang menjadi landasan di kemudian hari untuk lahirnya UU Otonomi Khusus untuk Papua.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (20 Oktober 1999—23 Juli 2001) berkunjung ke Papua dua kali yaitu tanggal 30 Desember 1999-1 Januari 2000 dan tanggal 7-8 Juli 2000.

Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya yang dicetuskan Soekarno menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera kebudayaan seandainya bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping dan tidak lebih tinggi daripada bendera Merah Putih. Presiden Abdurrahman Wahid sangat dihormati orang Papua sampai saat ini karena menggunakan pendekatan kultural dan bersedia mendengarkan aspirasi dan membuka dialog dengan orang Papua. Mengenai tuntutan Papua Merdeka, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan hal itu harus diajukan ke MPR, sedangkan beliau hanya mandataris MPR.

Presiden Abdurrahman Wahid juga memberikan ruang bagi kelompok yang menentang keberadaan Indonesia di tanahnya untuk melakukan dialog secara aman. Beliau juga mendukung dan memberikan bantuan biaya untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar dan Kongres Masyarakat Papua tahun 2000.

Presiden Abdurrahman Wahid juga mendorong perumusan UU Otonomi Khusus untuk Papua yang baru kemudian diundangkan saat Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sampai sekarang Presiden Abdurrahman Wahid masih sangat dihormati orang-orang Papua karena bersedia mendengarkan dan menghargai aspirasi orang Papua serta membuka pintu dialog lewat pendekatan budaya. Presiden Abdurrahman Wahid yakin bahwa pendekatan budaya adalah sangat penting dan seharusnya menjadi landasan bersama untuk penyelesaian masalah Papua dan membangun Papua.

Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001—20 Oktober 2004) berkunjung ke Papua tiga kali yaitu tanggal 22 Oktober 2001, 20 Agustus 2002, dan 25-26 Desember 2003.

Ruang terbuka untuk berdialog dan pendekatan budaya yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid tidak diteruskan oleh Presiden Megawati. Pemerintahan RI kembali ke cara lama yang kaku dan menggunakan kekerasan.

Meskipun demikian, Presiden Megawati mendorong diberlakukannya UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua termasuk pemberian dana otonomi khusus tiap tahun yang cukup besar. Di dalam UU tersebut dicantumkan soal Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua. Antara lain dicantumkan bahwa yang dipilih sebagai gubernur, wakil gubernur, dan anggota MRP harus Orang Asli Papua.

UU Nomor 21 Tahun 2001 ini di kemudian hari diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 karena bertambahnya provinsi dengan tambahan antara lain keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten (DPRK).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004—20 Oktober 2014) berkunjung 12 kali ke Papua, yaitu tanggal 9 Oktober 2005, 25 Oktober 2005, 14 Agustus 2006, 10 Agustus 2007, 12 Mei 2008, 9 November 2009, 21 Februari 2010, 13 Juli 2011, 1 Agustus 2011, 3 Maret 2012, 10 Juni 2013, 4 Desember 2013, dan 24 Juli 2014.

Presiden SBY menggunakan pendekatan dialog yang lebih terbuka mengenai Aceh dan Papua. Untuk Papua, Presiden SBY menyetujui pembentukan MRP yang cukup lama tertunda dalam zaman Presiden Megawati dengan mengeluarkan PP No. 54 tahun 2005.

Presiden SBY melakukan tiga agenda strategis, yaitu rekonstruksi UU 21/2001 menuju RUU Otonomi Khusus Plus, agenda penyelesaian konflik menuju Papua Tanah Damai, dan rencana melanjutkan pembangunan Tanah Papua yang komprehensif dan ekstensif.

Presiden SBY juga mendukung tim riset Papua di LIPI untuk melakukan penelitian mengenai akar permasalahan di Papua yang menghasilkan *Papua Road Map* pada tahun 2009.

Presiden SBY juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Perpres tahun 2011.

Semua niat baik Presiden SBY tersebut sayangnya tidak sungguh didukung pelaksanaan yang konsisten yang dibuktikan dengan tidak kunjung dibentuknya pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Masyarakat Papua juga tidak merasakan kemajuan yang besar dalam kesejahteraan sosial ekonomi.

Presiden Joko Widodo (2014—2024) mengunjungi Papua sebanyak 18 kali dan merupakan Presiden RI yang paling sering berkunjung ke Papua. Dapat dikatakan Presiden Jokowi melakukan pendekatan kesejahteraan dengan membangun infrastruktur dan memperhatikan masalah ekonomi. Presiden Jokowi banyak membangun jalan, jembatan, lapangan udara, pelabuhan, pasar, termi-

nal, Pos Lintas Batas Negara, Gedung PON, Papua Youth Creative Club, dan berbagai prasarana dan sarana lainnya.

Kunjungan terakhir ke Papua dilaksanakan tanggal 22-24 November 2023. Turut mendampingi adalah Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Panglima TNI, dan Kapolri. Tanggal 22 November Presiden Jokowi mengecek persediaan beras di Kompleks Perdagangan Bulog Mandala dan membagikan bantuan beras kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Presiden Jokowi didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia malahan sempat bermain bola dengan anak-anak dan pemuda Papua di Lapangan Sorido, Kabupaten Biak Numfor.

Tanggal 23 November Presiden Jokowi menghadiri acara puncak Sail Teluk Cenderawasih di kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor. Potensi tuna di Teluk Cenderawasih dan Provinsi Papua 1,1 juta ton per tahun. Dengan ekspor 600-800 ribu ton saja bisa menyumbang devisa PNPB Rp 17,5 triliun per tahun. Presiden Jokowi juga meresmikan Kampung Nelayan Modern di Biak. Setelah itu Presiden Jokowi meresmikan Bandara Siboru di Fakfak Papua Barat dan Bandara Douw Aturure di Nabire Papua Tengah untuk meningkatkan konektivitas di Papua. Lalu beliau melakukan peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak yang merupakan satu-satunya industri pupuk di Indonesia Timur, sedangkan 5 industri pupuk lainnya di Indonesia Barat.

Tanggal 24 November Presiden Jokowi menandatangani prasasti Tugu Pancasila Kampung Tanama di Fakfak untuk menghormati para pejuang dan pahlawan yang berasal dari Kampung Tanama. Setelahnya Presiden Jokowi meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni dan melakukan *groundbreaking* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong.

Dari 18 kali kunjungan ke Papua, tampaklah bahwa pendekatan yang diutamakan Presiden Jokowi adalah pendekatan pembangunan kesejahteraan. Untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua tersebut, Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Wakil Presiden RI. Wakil Presiden RI ditugaskan untuk sering mengunjungi Papua dan mengusahakan berbagai solusi untuk Papua yang lebih baik dan sejahtera.

Dalam upaya penyelesaian konflik Papua, dapat dikatakan bahwa Presiden Jokowi juga tidak lupa mengupayakan solusi bagi penyelesaian masalah Papua melalui jalan dialog. Tahun 2014 Presiden Jokowi sebagai Presiden yang baru langsung berkunjung ke Papua untuk menghadiri Perayaan Natal Nasional bersama di Papua. Presiden Jokowi juga menemui tokoh-tokoh di Papua dan menyatakan niat dan persetujuan beliau untuk jalan dialog. Presiden Jokowi mengundang semua pihak di Papua untuk turun gunung dan berjumpa untuk berdialog.

Tahun 2019 Presiden Jokowi bahkan masih menyatakan niatnya untuk meneruskan jalan dialog bahkan dengan kelompok garis keras yang ditolak oleh sebagian pejabat. Dapat dikatakan bahwa Presiden Jokowi menerima gagasan dan solusi yang ditawarkan LIPI berupa *Papua Road Map* dan berusaha untuk mewujudkannya. Sayang bahwa berbagai upaya Presiden Jokowi untuk mewujudkan jalan dialog damai tidak didukung anak buah beliau.

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden Jokowi menerima Forum Komunikasi Para Pemimpin Agama di Papua (FKPPA) beserta sejumlah tokoh masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan penyelesaian konflik Papua. Pada waktu itu, Pater Neles Tebay dari Jaringan Damai Papua membawa kertas kebijakan (*Policy Brief*) Tim Papua LIPI (2016) yang berjudul “Dialog Nasional Membangun Papua Damai”. Kertas kebijakan ini berisikan mengenai pentingnya dialog Jakarta-Papua dan berbagai tahapan dialog. *Pertama*, Presiden menunjuk utusan khusus untuk dialog dengan kriteria: (1) mendapatkan kepercayaan penuh dari Presiden RI; (2) memiliki pemahaman dasar yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; (3) objektif dan tidak diskriminatif; (4) tidak terlibat dalam pelanggaran HAM; dan (5) tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua. *Kedua*, Presiden mengumumkan dan meminta dukungan kepada semua Gubernur, DPRD, dan MRP di seluruh provinsi Papua terhadap dialog Jakarta-Papua. *Ketiga*, agenda dialog adalah membahas indikator Papua Tanah Damai antara Papua dan Jakarta.

Adapun rangkaian dialog adalah sebagai berikut. *Pertama*, dialog internal Papua yang dilakukan oleh Presiden beserta seluruh Menteri dan Ketua Lembaga untuk membahas agenda penyelesaian konflik Papua secara damai. *Kedua*, dialog internal Papua, dimana semua kelompok sosial dan politik di Tanah Papua melakukan musyawarah untuk menunjuk perwakilan mereka dalam dialog dengan Pemerintah dan isu-isu apa yang akan dibahas. *Ketiga*, dialog sektoral, dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral seperti pendidikan dan kesehatan. *Keempat*, dialog untuk

rekonsiliasi antara Pemerintah dan perwakilan Papua yang ditunjuk oleh dialog internal Papua.

Setelah mendengar aspirasi tersebut, Presiden Joko Widodo menyetujui bahwa Pemerintah dapat melaksanakan dialog sektoral karena tidak menimbulkan resistensi dari kementerian atau lembaga negara. Kemudian, beliau menunjuk tiga orang *special envoy* untuk dialog sektoral yakni Menkopolhukam Wiranto, Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, dan Ketua Jaringan Damai Papua Romo Neles Tebay.

Namun, dalam perkembangannya sampai Romo Neles Tebay meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019, tidak ada satu dialog sektoral pun yang sudah diwujudkan. Sebenarnya tim yang dibentuk Kantor Staf Presiden (KSP) untuk melaksanakan komitmen, dan janji Presiden Jokowi untuk mulai melakukan dialog sektoral menuju penyelesaian masalah Papua sudah mulai bekerja dengan mengadakan beberapa pertemuan di Lombok dan antara lain dengan melibatkan Henry Dunant Center (HDC) yang bisa juga disebut Centre for Humanitarian Dialogue dari Swiss.

HDC inilah yang menjadi fasilitator agar Pemerintah Indonesia yang diwakili Komnas HAM dan ULMWP bisa mengadakan perundingan dan mencapai kesepakatan untuk melakukan jeda kemanusiaan atau *pause for humanity* di Papua selama enam bulan pada tanggal 15 November 2022 di Jenewa, Swiss. Seandainya semua pihak berkomitmen untuk merealisasikan kesepakatan ini, maka tidak akan ada lagi konflik di Papua. Kesepakatan mengenai jeda kemanusiaan tersebut yang diwakili ULMWP dan Komnas HAM ditolak oleh beberapa pihak. Salah satu yang menolak dengan keras adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui ketuanya Seby Sambom antara lain karena tidak melibatkan pihak yang berkonflik di lapangan yaitu TPNPB dan TNI serta Polri. Sayang bahwa kesepakatan mengenai jeda kemanusiaan yang seharusnya menjadi bukti bahwa dialog itu masih mungkin tidak menjadi kenyataan di lapangan.

Persetujuan, komitmen, dan janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah Papua agaknya masih bisa ditagih dari Presiden Jokowi sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Bila Presiden Jokowi bersedia melakukan *affirmative action* sebelum pergantian presiden, maka *affirmative action* ini dapat menjadi langkah awal Presiden RI periode 2024-2029 untuk sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Penutup

Apakah kita masih bisa merawat harapan bersama Papua? Penyelesaian masalah Papua harus dikerjakan bersama-sama antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua bersama masyarakat internasional karena bila kita mempelajari sejarah integrasi Papua menjadi bagian Indonesia, maka kita paham bahwa sejak tahun 1960 masalah Papua sudah melibatkan komunitas internasional.

Kita perlu mempelajari kembali sejarah bagaimana Papua dikuasai oleh Belanda dan dinamai *Nederlands Nieuw Guinea* serta disiapkan untuk menjadi merdeka tanggal 1 Desember 1961 sebagai Republic of West Papua. Belanda menyiapkan Bangsa Papua menuju negara merdeka dengan mengizinkan pembentukan partai politik, pemilihan umum, dan terpilihnya anggota Nieuw Guinea Raad atau kemudian dibentuk menjadi Komite Nasional Papua.

Pada tanggal 1 Desember 1961 tersebut dikibarkan bendera Bintang Kejora, dinyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, serta dipilihnya lambang Burung Cenderawasih dan motto *One People One Soul*. Saat itu hadir secara resmi utusan dari berbagai daerah Pasifik, termasuk Samoa yang merdeka dari Selandia Baru tanggal 1 Januari 1962. Bagi beberapa pihak tanggal 1 Desember 1961 tersebut diyakini sebagai hari kemerdekaan Papua.

Benih kemerdekaan itu dibunuh dua tahun kemudian ketika, atas tekanan Amerika Serikat, Belanda menyerahkan Papua tanpa melibatkan wakil Bangsa Papua dalam perjanjian yang disaksikan PBB di New York tanggal 15 Agustus 1962.

Kita juga perlu mempelajari kembali bagaimana sikap Indonesia terhadap Papua sejak pernyataan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, berbagai perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Papua, khususnya Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, serta campur tangan Amerika Serikat dan PBB dalam masalah Papua yang melahirkan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962.

Kita perlu mempelajari kembali isi New York Agreement, proses masuknya Indonesia ke Papua, dan bagaimana pelaksanaan *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Perhatikan misalnya bahwa kerja sama Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soeharto dengan Freeport bahkan sudah ditandatangani tahun 1967, yaitu sebelum Pepera dilaksanakan pada tahun 1969.

Indonesia memasuki wilayah Papua pada tahun 1962 atas perintah Presiden Soekarno dengan Komando Mandala yang dipimpin Mayjen Soeharto. Tanggal 15 Agustus 1962 Belanda meninggalkan Papua dan menyerahkan kekuasaan atas

Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 bendera Merah Putih sudah dikibarkan bersama bendera UNTEA.

Bagi Indonesia tanggal 1 Mei 1963 dipandang sebagai hari pembebasan Papua dari Belanda dan menjadi hari integrasi Papua menjadi bagian Indonesia. Namun, bagi sebagian orang Papua tanggal 1 Mei 1963 adalah hari di mana penjajahan Indonesia terhadap Papua secara resmi dimulai. Penjajahan Belanda digantikan penjajahan Indonesia. Karena itulah, sebagian orang Papua tersebut berjuang untuk merebut kembali Tanah Papua agar nasibnya ditentukan Bangsa Papua sendiri.

Pepera yang dilaksanakan dalam periode 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 oleh Pemerintah Indonesia dinyatakan final dan berlaku sehingga melahirkan antara lain sikap “NKRI Harga Mati”. Keyakinan bahwa Pepera 1969 bersifat final melahirkan sikap dan langkah Pemerintah Indonesia yang kaku dan menganggap bahwa setiap upaya yang berbeda dari keputusan Pepera mengganggu kedaulatan Indonesia. Tujuh Presiden RI juga berbeda sikap dan langkahnya dalam menangani masalah Papua.

Sementara itu, sampai saat ini masih ada banyak pihak yang belum bisa menerima hasil Pepera 1969 yang hasil dan prosesnya sudah dicatat di PBB. Proses pemilihan 1.025 orang Papua dan proses pengambilan suara di 8 tempat di Papua masih dipertanyakan apakah sesuai jiwa dan amanat New York Agreement 1962.

Sampai sekarang konflik di Papua belum juga usai, yang artinya masih banyak masalah di Papua. Saya masih yakin bahwa kita masih bisa merawat harapan bersama Papua untuk Papua baru yang lebih adil dan damai hanya bila kita melibatkan semua pihak, bahkan komunitas internasional, untuk mencari jalan solusi bersama yang terbaik bagi Papua. Kita harus terus-menerus mencari dan menemukan semakin banyak pihak, khususnya orang muda Papua, yang masih mau terus merawat harapan untuk Papua baru yang lebih adil dan damai. Jangan sampai upaya merawat harapan bersama ini dirusak dan ditiadakan karena harapan itulah yang bisa mempersatukan semua pihak untuk berjuang bersama Papua untuk Papua.

Gerakan Tungku Api Kehidupan

BIRU KIRA

Abstrak

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Keuskupan Timika mengusahakan terjadinya keadilan dan perdamaian di Tanah Papua secara damai. Selain itu, penelitian ini juga akan memperlihatkan bagaimana usaha atau perjuangan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) dalam merespons perubahan zaman untuk menciptakan situasi hidup yang adil dan damai. Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur, observasi, dan keterlibatan peneliti sebagai orang yang hidup dan berjuang bersama OAP. Usaha mencapai keadilan dan perdamaian di Tanah Papua secara damai itu secara jelas tampak dalam program pastoral utama dan gerak perjuangan OAP yang bernaung di bawah gerakan yang berakar pada iman dan strategi budaya Papua, yakni Gerakan Tungku Api Kehidupan (Gertak). Gerakan ini secara khusus didorong pelaksanaannya oleh Mgr. John Philip Saklil, uskup pertama Keuskupan Timika.

1. Pendahuluan

Tanah Papua adalah daerah di timur Nusantara yang tidak pernah lepas dari situasi konflik semenjak 1962 hingga saat ini.¹ Kompleksitas masalah bermula dari situasi politik, kesenjangan sosial ekonomi, dan kini ditambah dengan kekerasan tak berkesudahan, diskriminasi, rasisme, pengungsian, kemiskinan, dan bahkan kematian yang seakan tak pernah berhenti. Semua hal ini dengan jelas memberikan ketegasan bahwa sampai sekarang Tanah Papua belum mengalami keadilan dan perdamaian.

Secara khusus peneliti ingin mengangkat salah satu penyebab yang menyumbang bagi terciptanya situasi tidak adil dan damai di Tanah Papua, yaitu

1 Dalam perspektif nasionalis Papua, Bangsa Papua sudah merdeka pada 1 Desember tahun 1961. Kehadiran Pemerintah Indonesia pada tahun 1962 di Papua menandai babak awal kekerasan politik sampai sekarang. Lih. Widjoyo, Muridan ed. (2009). *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia. Hal. 8-12.

perubahan yang berwajah tidak manusiawi. Sekian lama Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat Papua² mengalami perubahan model ini, yang di satu sisi memang membawa perkembangan, tetapi di sisi lain lebih banyak membawa penderitaan dan situasi ketidakberdayaan. Di balik terciptanya perubahan berwajah tidak manusiawi ini adalah fenomena globalisasi, kapitalisme, dan militerisme.

Berhadapan dengan itu, lalu apa yang diperbuat oleh OAP? Bagaimana Gereja Lokal Keuskupan Timika menjalankan misi dan pendampingan bagi OAP demi mencapai suasana adil dan damai? Di berbagai tempat, baik di Papua maupun di belahan dunia lainnya Orang Asli berjuang untuk tetap ada dan membangun hidup berdasarkan keunikan dan kekayaan budayanya. Mereka tidak sendiri. Banyak pihak lokal, nasional, bahkan internasional, termasuk di dalamnya Gereja, ikut bersama mendampingi dan berjuang. Perubahan zaman harus diarahkan oleh para subjek ini (OAP dan Gereja) sehingga menjadi berwajah lebih manusiawi, ke arah lebih baik, di mana ada keadilan dan kedamaian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi bagi kompleksitas permasalahan di Tanah Papua yang bisa menyumbang bagi terciptanya keadilan dan perdamaian. Dengan sendirinya penelitian ini juga berusaha mengangkat bagaimana solusi itu dilaksanakan oleh OAP sendiri bersama Gereja Lokal Keuskupan Timika.

2. Studi Literatur

Mengenai situasi dan perjuangan Orang Asli, peneliti mengajukan dua buku. Henningfeld mengedit kumpulan tulisan terkait Orang Asli di seluruh dunia, yakni tentang situasi yang dialami dan bagaimana mereka merespons situasi tersebut. Buku *Indigenous Peoples* memaparkan penegasan akan keberadaan Orang Asli dan keunikan budayanya. Di berbagai negara mereka mengalami situasi yang tidak menguntungkan akibat perubahan, antara lain globalisasi dan ketidaksetaraan.³ Berbagai pihak perlu mengakui keberadaan Orang Asli yang sedang berjuang dengan keunikan budayanya mencari kehidupan yang lebih baik dalam dunia yang berubah.

Dalam buku *The New Imperial Order: Indigenous Responses to Globalization*, Stewart-Harawira meneliti dan memaparkan mengenai proses globalisasi dan

2 Ketika menyebut “OAP” dan “Masyarakat Adat Papua”, peneliti juga bermaksud menyinggung di dalamnya adalah umat beriman Gereja Katolik Keuskupan Timika.

3 Lih. D.A. Henningfeld (ed.). (2009). *Indigenous Peoples*. New York: Greenhaven Press. Hal. 14-18.

tatanan baru yang dibentuknya, serta bagaimana pengaruhnya bagi Orang Asli yang tidak tinggal diam, tetapi berusaha menemukan bentuk baru perlawanan terhadap struktur imperialisme baru itu. Proses globalisasi yang ditandai oleh liberalisasi perdagangan dan pembentukan strukturnya, serta pasar bebas, menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan, termasuk di dalamnya perlindungan akan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Namun, yang terjadi kemudian adalah kegagalan yang tampak pada fenomena kesenjangan sosial yang semakin melebar, kemiskinan, eksploitasi dan perampasan tanah-tanah adat milik Orang Asli, dan konflik-konflik yang mewarnai suasana tidak adil dan tidak damai. Menanggapi situasi itu, Orang Asli mencari keadilan dan berjuang mempromosikan spiritualitas dan keunikannya terkait relasinya dengan tanah dan alam lingkungan.⁴

Ada beberapa sumber yang bisa dibaca mengenai situasi Papua dan permasalahannya. Sumber pertama adalah buku suntingan Muridan (2009), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present dan Securing the Future*, yang secara menyeluruh namun padat merangkum kompleksitas permasalahan di Tanah Papua. Di dalamnya diuraikan empat agenda kerja utama yang perlu diambil oleh lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. Pertama, diperlukan rekognisi yang berorientasi pemberdayaan atas rakyat asli Papua sebagai semacam kompensasi atas marginalisasi dan diskriminasi yang mereka alami selama ini. Kedua, diperlukan paradigma baru pembangunan yang berorientasi pemenuhan hak-hak dasar rakyat Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketiga, diperlukan dialog yang dilandasi saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dalam rangka menyamakan persepsi dalam menatap masa depan. Keempat, diperlukan rekonsiliasi yang berorientasi pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami rakyat Papua serta kesediaan otoritas politik dan negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu.⁵

Sumber kedua adalah buku suntingan Rusdiarti dan Pamungkas (2017) yang merupakan kelanjutan dari *Papua Road Map*, yakni *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Buku ini mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh menyelesaikan

4 Lih. Makere Stewart-Harawira. (2005). *The New Imperial Order, Indigenous Responses to Globalization*. London & New York: Huia Publisher. Hal. 6-27.

5 Lih. Muridan Widjoyo (ed.). (2009). *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia. Hal. 7.

akar persoalan di Tanah Papua, yakni masalah perbedaan pandangan mengenai sejarah dan status politik Papua, tidak jelasnya penyelesaian masalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan dan implementasi UU Otsus Papua yang tidak optimal, serta marginalisasi dan diskriminasi terhadap OAP. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyusun kebijakan dan strategi perdamaian yang komprehensif demi membangun Papua Tanah Damai.⁶

Sumber ketiga menyinggung begitu banyak persoalan yang menjadikan Papua sebagai tanah yang penuh dengan ketidakadilan dan tiada damai. Hal ini ditegaskan oleh kehadiran dan kerja Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua. SKPKC Fransiskan Papua secara berkala menerbitkan laporan terkait peristiwa dan fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Buku *Papua, Surga yang Terlantar* (2018) memaparkan peran Gereja Katolik menanggapi isu HAM, situasi HAM di Tanah Papua dan rekomendasi serta solusinya. Di dalamnya tercatat kasus-kasus seperti hancurnya Bumi Papua akibat eksploitasi tak bertanggung jawab dan penuh kekerasan.⁷ Buku *Papua di Ambang Kehancuran* (2017) memotret fenomena masalah, seperti kesehatan yang terabaikan, ruang kebebasan berekspresi yang dipasung, situasi Orang Asli yang terhempas dari tanah adatnya, serta penembakan-penembakan yang menambah duka Orang Asli.⁸ Buku *Papua Bukan Tanah Kosong* (2019) mengangkat persoalan konflik bersenjata, militerisasi, penghancuran hutan Papua, dan munculnya radikalisme di Tanah Papua.⁹

Terkait dengan kehadiran para kapitalis atau pemilik modal dan bagaimana implikasinya di Tanah Papua, Krinus Kum menerbitkan penelitiannya dengan judul *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat pemilik tanah dan pemilik modal yang sering kali didukung oleh militer; antar-pemerintah daerah, antara Orang Asli dan pendatang, antara suku satu dan suku yang lain. Konflik ini terjadi karena persoalan izin eksplorasi yang tidak jelas,

6 Lih. S.R. Rusdiarti, C. Pamungkas (eds.). (2017). *Updating Papua Road Map, Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. v-xi.

7 Lih. Bernard Koten, et al. (2018). *Papua, 'Surga' yang Terlantar: Laporan Hak Asasi Manusia SKP Se-Papua 2015-2017*. Jayapura: SKPKC (Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Fransiskan Papua.

8 Lih. A. Jenaru, B. Triharyanto, B. Koten (eds.). (2017). *Papua di Ambang Kehancuran: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016*. Jayapura: SKPCK Fransiskan Papua.

9 Lih. B. Koten, D. Gobay, Tim Kerja SKPKC FP. (2019). *Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.

tidak terpenuhinya hak-hak rakyat, dan ketidakteraturan pengelolaan *tailing*.¹⁰ Haluk dalam buku *Menggugat Freeport: Suatu Jalan Penyelesaian Konflik* secara detail memaparkan sepak terjang perusahaan besar Freeport yang kehadirannya telah menciptakan banyak persoalan, yang akhirnya memicu perlawanan dari masyarakat adat Amungme.¹¹

Mengenai tema perdamaian dan peran Gereja, peneliti mengangkat sosok Pater Neles Tebay dan pemikirannya. Ia adalah imam Katolik asli Papua yang sangat dikenal pemikiran dan kiprahnya dalam membangun keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Tahun 2002 ia menulis artikel “The Role of The Catholic Church in Defending and Promoting Human Rights in West Papua”. Begitu banyaknya pelanggaran HAM di Tanah Papua menggerakkan Gereja untuk bekerja melindungi HAM dan mempromosikannya.¹² Tahun 2007, lewat artikel “Papua, The Land of Peace: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua” ia berusaha menggerakkan agama-agama di Papua untuk bekerja bersama menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Visi “Papua Tanah Damai” menjadi impian yang harus dikejar oleh semua pihak demi menghentikan segala konflik yang telah menimbulkan banyak penderitaan.¹³ Lalu pada tahun 2008 Pater Neles menerbitkan buku *Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*. Di dalamnya Pater Neles menawarkan persepsi Orang Asli Papua terkait masalah-masalah di Papua dan kemungkinan cara-cara damai yang dimilikinya untuk mengatasi persoalan itu.¹⁴ Selanjutnya tahun 2012, dalam buku *Angkat Pena demi Dialog Papua* Pater Neles menegaskan posisinya sebagai sosok yang tidak pernah mengakui dan menerima kekerasan, entah apa pun motivasi dan tujuannya, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah Papua. Ia mendorong agar semua pihak memilih jalan dialog.¹⁵ Kiprah Pater Neles dalam memperjuangkan cara damai dan dialog diakui oleh 100 orang Indonesia dengan berbagai macam latar

10 Lih. Krinus Kum. (2015). *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal. 1-10.

11 Lih. Markus Haluk. (2014). *Menggugat Freeport, Suatu Jalan Penyelesaian konflik*. Jayapura: Deiyai, Honai Center, Satu Tungku dalam Satu Honai.

12 Lih. Neles Keadabi Tebay. (2002). “The Role of The Catholic Church in Defending and Promoting Human Rights in West Papua”. *Exchange* 31: 362-372.

13 Lih. Neles Tebay. (2007). “Papua, the Land of Peace: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua”. *Exchange* 36: 337-358.

14 Lih. Neles Tebay. (2008). *Papua Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*. Jayapura: SKP Jayapura. Pp. xiii-xv.

15 Lih. Neles Keadaby Tebay. (2012). *Angkat Pena demi Dialog Papua, Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.

belakang dalam buku yang terbit tahun 2013, *100 Orang Indonesia Angkat Pena demi Dialog Papua*.¹⁶ Akhirnya, tahun 2014 sekali lagi Pater Neles menegaskan bahwa keterlibatan Gereja di Tanah Papua terkait perjuangan akan keadilan dan perdamaian adalah bagian integral dari misi Gereja mewartakan Injil Tuhan. Pada artikel berjudul “Misi dan Keterlibatan Gereja Demi Perdamaian” Pater Neles memberi penjelasan bagaimana misi Gereja di Papua adalah bagian dari misi penyelamatan Tuhan yang dilaksanakan Kristus dan diteruskan Roh Kudus, serta didukung oleh tradisi Gereja yang tampak pada ajaran sosialnya.¹⁷

Selanjutnya, peneliti melihat dua karya dari Suryawan dan Erari sebagai sebuah seruan bagi OAP untuk bangkit menyadari suasana keterbelengguannya dan mulai berjuang memakai alam dan budaya, secara damai, demi menjadi subjek utama yang mempengaruhi perubahan dan tidak tertinggal. Suryawan dalam bukunya, *Hidup Papua Suatu Misteri*, menampilkan krisis yang disebabkan globalisasi dan modernitas. Di tengah krisis itu Orang Papua berusaha keras untuk menyadari dan menemukan cara untuk bertahan. Dengan strategi budayanya, Orang Papua mencoba mengakomodasi perubahan yang datang. Kalau mereka pasrah dan pasif, modernisme dan kapitalisme tidak akan melibatkan dan bahkan melibas mereka. Orang Papua harus bekerja keras menjadi agen dan subjek agar memperoleh tempat dalam perkembangan ini.¹⁸

Erari dengan caranya sendiri membagikan pengetahuannya melalui buku *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Sebagai Orang Asli Papua, Erari secara tertata memaparkan warisan kultural dan adat Melanesia terkait relasi manusia Papua dengan tanahnya. Di dalamnya ada pergumulan dan harapan OAP, juga suara rakyat serta suara budaya. Erari berharap bahwa masyarakat adat terus berjuang mempertahankan budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu, tidak luntur diterpa badai globalisasi.¹⁹

Akhirnya, walaupun masalah terlalu kompleks, Orang Asli Papua perlu berjuang dengan cara damai berdasarkan imannya dan memakai strategi budayanya untuk merespons perubahan demi mencapai hidup yang adil dan damai. Bagai-

16 Lih. Elga J. Sarapung (ed.). (2013). *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Yogyakarta: Interfidei.

17 Lih. Neles Tebay. (2015). “Misi dan Keterlibatan Gereja Demi Perdamaian”. *Jurnal Limen STFT* Vol. 11 No. 2: 79-99.

18 Lih. I Ngruh Suryawan. (2022). *Hidup Papua Suatu Misteri*. Yogyakarta: Basabasi. Hal. 19-28.

19 Lih. Karel Phil Erari. (1999). *Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis (Eko Teologi dalam Perspektif Melanesia)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 1-17.

mana selanjutnya Gereja Keuskupan Timika dan Orang Asli Papua di wilayahnya mengusahakan hal ini? Sebagai uskup yang menggembalakan umat di daerah yang rawan konflik dan dalam situasi perebutan sumber daya alam yang kaya, Mgr. John Philip Saklil senantiasa menciptakan program-program pastoral yang bisa membawa keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Dalam buku *Gereja dan Tragedi Kemanusiaan di Keuskupan Timika*, Uskup John menyadari realitas luasnya wilayah penggembalaan dan kompleksitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang sangat sulit ditangani secara komprehensif. Gereja berusaha menentukan secara tepat apa yang menjadi kehendak dan tindakan Tuhan dalam situasi itu. Pada saat yang sama Gereja juga adalah minoritas dalam negara ini sehingga tidak memiliki daya dominasi. Gereja juga tertekan, terdikte, terkontrol, dan tidak banyak diberi ruang untuk mengambil bagian dalam mengubah sistem di negara ini. Namun demikian, berangkat dari teologi penyelenggaraan ilahi, Uskup John percaya bahwa keuskupan tetap bisa berkembang dalam karya pastoralnya karena Tuhan menjaga dan menuntun umat-Nya serta mentransformasi malapetaka atau kesulitan hidup menjadi suatu kesempatan bagi Injil untuk berakar; sama seperti Tuhan mengubah penderitaan dan malapetaka yang dialami Kristus menjadi jalan penyelamatan umat manusia. Karenanya, Gereja tetap sepekat untuk menggugat ketidakadilan yang dialami setiap orang di tanah ini dengan selalu bersuara, juga bila perlu Gereja tetap bekerja dalam diam tanpa membutuhkan penilaian orang akan keberhasilannya.²⁰

Terkait sosok Uskup John, Biru Kira dalam buku *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika* menegaskan peran Uskup John yang senantiasa terlibat dalam keheningannya membongkar struktur yang mengekang manusia dari dalam.²¹ Salah satu caranya adalah dengan menjalankan “Gerakan Pastoral Tungku Api Kehidupan”. Hal ini bisa dilihat pula dari tulisan-tulisan Uskup John terkait program pastoral Keuskupan Timika, “Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal”, juga tampak dalam arahan dan surat-surat gembalanya dalam tahun 2017, 2018, dan 2019.²²

20 Lih. John Philip Saklil. (2018). *Gereja dan Tragedi Kemanusiaan di Keuskupan Timika: Kumpulan Pernyataan Sikap dan Suara di Media Massa*. Timika: SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Timika dan SKPKC Fransiskan Papua. Hal. ix-xvii.

21 Lih. Biru Kira, dkk. (2022). *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 23-34.

22 Lih. John Philip Saklil. (2017). “Arah Dasar Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal”. Arahan Uskup pada Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika 13-17 Februari 2017.; John Philip Saklil. (2017). “Keluarga sebagai Tungku Api Kehidupan”. Surat Gembala Keuskupan Timika.; John Philip Saklil. (2018). “Surat Gembala Masa Prapaskah

Pencanangan Gerakan Tungku Api Kehidupan ini kemudian ditindaklanjuti oleh umat. Dekenat Paniai dan Tigi yang terdiri dari 12 paroki di Keuskupan Timika melaporkan Kegiatan Musyawarah Pastoral Mee VI yang bertema “Kembali ke Tanah Kudus-Ku, Aku Melindungi dan Mengelola Tanah Secara Utuh”. Masyarakat adat suku Mee di wilayah Keuskupan Timika bersepakat untuk melindungi dan mengelola tanahnya. Mereka bersepakat untuk kembali ke warisan budayanya yang melihat tanah sebagai kudus, tidak bisa diperjualbelikan dan adalah “mama” pemberi kehidupan. Fenomena menjual tanah dan kapitalisasi tanah adat harus dihindari.²³ Laporan ini menjadi bukti bahwa Orang Asli Papua mau bangkit berjuang untuk merespons era global yang membawa perubahan berwajah tidak manusiawi sehingga situasi adil dan damai sulit tercapai.

3. Metodologi

Peneliti adalah imam diosesan Keuskupan Timika yang sejak tahun 2012 berkarya di wilayah keuskupan ini. Selama tujuh tahun, yakni 2015-2022 peneliti bekerja di pedalaman Papua sebagai Pastor Paroki Modio dan dosen di STK Touye Paapa. Dalam program pastoral Gertak peneliti terlibat sebagai “orang dalam” yang bersama-sama OAP berjuang melindungi dan mengelola sumber hak hidup OAP. Karenanya, peneliti dapat mengamati secara dekat dan merefleksikan fenomena dan pengalaman keterlibatan itu.

Analisis atas pemikiran dalam beberapa buku diterapkan. Sambil menganalisis pemikiran, fenomena yang telah diamati dan pengalaman yang dimiliki kemudian direfleksikan dan ditafsir. Peneliti paling tidak memakai dua pendekatan. Pendekatan pertama berasal dari Johannes L. van der Walt terkait *interpretivism-constructivism*. Penafsiran dilakukan demi membangun pemahaman, pengertian, dan penjelasan atau kesatuan makna. Darinya solusi ditemukan, namun kesimpulan harus senantiasa terbuka untuk dievaluasi.²⁴ Pendekatan kedua berasal dari John S. Dunne yang memikirkan sebuah metode *passing over*. Penafsir secara simpatik memasuki sudut pandang hidup seseorang

2018”. Dokumen Keuskupan Timika; John Philip Saklil. (2019). “Gerakan Tungku Api Kehidupan: Mengakarkan Injil, Membangun Budaya Literasi Kehidupan”. Surat Gembala Uskup Keuskupan Timika (Prapaskah 2019).

23 Lih. Dekenat Tigi Paniai. (2020). Kembali ke Tanah Kudusku ...!?, Aku Melindungi dan Mengelola Tanah Secara Utuh. Laporan Kegiatan Muspasmee VI, Dekenat Tigi-Paniai, Keuskupan Timika. Enarotali: Keuskupan Timika.

24 Lih. Johannes van der Walt. (2020). “Interpretivism-Constructivism as a Research Method in the Humanities and Social Sciences – More to it Than Meets the Eye”. *International Journal of Philosophy and Theology*, vol. 8, no. 1. Hal.59-68.

(dalam hal ini adalah OAP dan umat), melihat keseluruhan dunia secara baru dari sudut pandang mereka (mengenai diri, sesama, dan Tuhan), dan kemudian kembali (*coming back*) ke sudut pandang diri sendiri yang sudah diperkaya dengan sudut pandang mereka dan dengan sebuah pemahaman akan hidup orang lain.²⁵

4. Pembahasan

Keuskupan Timika adalah salah satu Gereja partikular dari 5 keuskupan yang ada di Tanah Papua. Empat yang lain adalah Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong, dan Keuskupan Agats. Bersama dengan para pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah dan pusat serta organisasi-organisasi kemasyarakatan, Keuskupan Timika sejak awal berdirinya memiliki misi yang terarah pada usaha menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Misi Gereja yang berpusat pada evangelisasi terkait pula dengan usaha keterlibatan demi perdamaian. Hal ini dijelaskan oleh Pater Neles; bahwa evangelisasi belum lengkap apabila tidak memperhitungkan pengaruh Injil dan kehidupan konkret manusia, baik personal maupun sosial. Gereja percaya bahwa misteri penyelamatan dari Tuhan perlu menyentuh situasi konkret yang tidak adil, dan karena itu perlu diperbarui dan keadilan perlu ditegakkan. Pater Neles melanjutkan bahwa bagi Gereja, suatu tindakan demi keadilan dan transformasi dunia merupakan dimensi konstitutif dari pewartaan Injil. Oleh sebab itu, tegas Pater Neles, tidak mungkin bagi Gereja untuk mengabaikan persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, pembangunan, dan perdamaian di dunia dalam karya evangelisasinya. Mengutip *Evangelii Nuntiandi* 31²⁶, Pater Neles mengatakan bahwa mengabaikan persoalan-persoalan kemanusiaan berarti mengabaikan kasih kepada sesama yang menderita dan membutuhkan.²⁷ Selanjutnya, di bawah ini peneliti memaparkan bagaimana Keuskupan Timika melaksanakan misinya dalam program pastoral Gerakan Tungku Api Kehidupan yang dimotori oleh Mgr. John Philip Saklil sebagai Uskup Timika.

25 Lih. Jon Nilson. 1987. "Doing Theology By Heart: John S. Dunne's Theological Method". *Theological Studies* 48. Hal. 65-86.

26 EN, *Evangelii Nuntiandi*, Anjuran Apostolik Paus Paulus VI kepada uskup, para imam dan semua orang beriman di seluruh dunia.

27 Lih. Neles Tebay. (2015). "Misi dan Keterlibatan Gereja Demi Perdamaian". *Jurnal Limen STFT* Vol. 11 No. 2. Hal. 86.

4.1. Mgr. John Philip Saklil, Bapak “Tungku Api”

Dalam buku yang kami susun, *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika*, diceritakan mengenai siapa Uskup John. Sabtu, 3 Agustus 2019, pukul 14.16 WIT, secara tidak terduga Uskup John meninggal dunia. Seluruh umat di Tanah Papua berduka. Pihak medis menduga bahwa kemungkinan penyebabnya karena *silent heart attack* yang biasa dialami oleh pasien dengan riwayat penyakit gula.

Beliau bernama lengkap Yohanes Philip Saklil, lahir di Ararau, sebelah barat Kokonau, Mimika, pada 20 Maret 1960. Ayah dan ibunya adalah guru perintis awal di daerah Mimika yang berasal dari Kepulauan Kei. Pendidikannya dialami di SD YPPK Don Bosco Timika Pantai, SMP YPPK Le Cocq d’Armandville Kokonau, SMA Gabungan di Jayapura, dan melanjutkan ke STTK/STFT Fajar Timur Abepura (S1 dan pascasarjana). Uskup John menjalani Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Hepuba-Wamena dan Paroki Kristus Sahabat Kita, Nabire. Sesudah itu beliau mengikuti studi pastoral di Yarra Theological Union Manila, Filipina. Beliau ditahbiskan sebagai imam oleh Mgr. Herman Munninghoff, OFM di Gereja Kristus Terang Dunia Yiwika pada 23 Oktober 1988. Beliau kemudian ditunjuk sebagai uskup pertama Keuskupan Timika pada tanggal 19 Desember 2003 dan ditahbiskan oleh Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM di Timika pada hari Minggu, 18 April 2004. Oleh masyarakat suku Mee, beliau diberi nama adat Gaiyabi, yang dapat diartikan sebagai konseptor, pembebas, penyelamat, pemersatu, perencana, pelindung, motivator, dan fasilitator bagi umatnya.

Selama hidupnya beliau berkarya sebagai pastor paroki di Hepuba, Yiwika dan Katedral Jayapura. Ia pernah menjabat Dekan Dekenat Jayawijaya bagian barat, lalu Vikaris Episkopal bagian barat Keuskupan Jayapura. Sebagai uskup beliau menjabat juga sebagai Penasihat Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika, Ketua Badan Pengurus Yayasan AMA Papua, Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Presiden Komisaris PT AMA, Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) KWI, Anggota Presidium KWI (wakil Provinsi Gerejawi Papua), dan tahun 2019 menjabat sebagai Administrator Apostolik sede *plena* Keuskupan Agung Merauke.²⁸

Dalam buku yang sama, Uskup John digambarkan sebagai pribadi kuat yang memiliki jiwa pastoral yang luar biasa. Beliau rajin dan setia mengunjungi umat di seluruh wilayah keuskupan. Beliau akrab dengan tim pastoral dan umat.

28 Lih. Kira, Biru dkk. (2022). *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 2-4

Tahun 2016 di Paroki Modio tanpa ragu beliau mengangkat dan menetapkan tokoh Orang Asli Papua (OAP), Auki Tekege, sebagai tokoh Gereja. Martabat OAP diangkat ke tempatnya yang luhur. Misi di Tanah Papua tidak hanya dikerjakan oleh para misionaris dari luar Papua, tetapi juga hanya bisa berhasil karena ada tokoh-tokoh awam asli seperti Auki. Dalam tahun yang sama Uskup John mulai mengkampanyekan “Gerakan Stop Jual Tanah”. Gerbang dan pagar dibangun untuk melindungi alam, manusia, dan budaya Papua sekaligus mengingatkan umat untuk tidak menjual tanah; dan, bagi mereka yang datang, untuk menyesuaikan diri. Tahun 2018 beliau menerapkan langkah strategis perlindungan dan pengelolaan sumber hak hidup OAP dengan menetapkan Paroki Modio sebagai area sejarah dan area ziarah. Secara tidak langsung, beliau memberikan contoh bagaimana menjalankan usaha perlindungan hak-hak masyarakat asli. Tanah yang kaya akan sumber daya alam dan yang mungkin bisa menjadi incaran banyak pihak (pemilik modal) telah dijadikan sebagai area sejarah dan ziarah sehingga terhindar dari fenomena jual beli, dan mereka yang datang akan menyesuaikan diri dengan adanya tanah yang dianggap kudus, tidak sembarangan melakukan eksploitasi alam.²⁹

Uskup John sangat memberi perhatian pada orang muda. Pada masa menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan KWI, beliau berhasil meyakinkan para uskup untuk memulai pertama kalinya “Indonesian Youth Day” (IYD) yang diselenggarakan di Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai sekarang IYD tetap dilanjutkan dan menegaskan arah pastoral Gereja Nusantara yang berfokus pada orang muda sebagai tenaga penggerak Gereja.³⁰ Sesudahnya, ketika menjabat sebagai Ketua PSE KWI, beliau mencanangkan sebuah langkah pastoral transformatif berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Langkah itu dikenal dengan “Gerakan Tungku Api Kehidupan”, sebuah usaha pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada perlindungan dan pengelolaan baik itu alam, manusia, dan budayanya. Pengalamannya menjadi uskup di antara suku Amungme-Kamoro dan suku asli Papua lain, yang menderita karena eksploitasi alam oleh pemilik modal sehingga kehilangan sumber dayanya, mendorong Uskup John untuk memahami dan menyimpulkan keprihatinan yang terjadi di Gereja Nusantara.³¹

29 *Ibid.* hal 6-8. Lih. juga Kira, Biru. *Bergerak Menjadi Papua, Kumpulan Refleksi Pastoral menjadi Pelayan Gereja Katolik di Tanah Papua*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 205-2013.

30 *Ibid.* Hal. 9-10.

31 *Ibid.* Hal. 10-13.

Di satu sisi Uskup John memberdayakan umat untuk melakukan gerakan perlawanan kepada para pemilik modal, penguasa, dan aparat pendukungnya berdasar pada iman (tanpa kekerasan) dan strategi budaya (tungku api). Di sisi lain, secara bijaksana layaknya seorang gembala, beliau merangkul semua pihak (termasuk perusahaan besar PT Freeport Indonesia) dan mempersatukan mereka yang berbeda. Sifat merangkul ini salah satunya lahir karena situasi Uskup John yang memang lahir, besar, dan berkarya dalam situasi kontras yang sangat mencolok: orang asli vs pendatang, kaya vs miskin, suku gunung vs suku pantai, pemilik modal vs pekerja, perusak vs pemelihara, orang yang hidup menyatu dengan alam dan menjadikannya sebagai “mama” vs mereka yang hidup dari eksploitasi alam, dan mereka yang memakai senjata untuk menyelesaikan masalah vs mereka yang memakai cara damai.³²

Sesudah kepergiannya, usaha perlindungan dan pengelolaan sumber hak hidup masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat, dan “perlawanan” dengan cara damai dan strategi budaya tetap dijalankan di seluruh penjuru Keuskupan Timika.

4.2. Subjek Gertak: Orang Asli Papua dan Umat Keuskupan Timika

Orang Asli Papua (OAP) adalah bagian dari *Indigenous People* yang ada di seluruh dunia. Apa yang terjadi pada masyarakat asli di Tanah Papua juga terjadi dan dialami masyarakat asli lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Seruan masyarakat asli Papua menjadi seruan masyarakat asli di tempat lain yang mengalami nasib sama. Kira-kira ada sekitar 370 juta masyarakat asli di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Kebanyakan tinggal di Asia dan Pasifik. Mereka adalah pewaris dan praktisi sebuah budaya unik dalam cara-cara berelasi dengan sesama serta alamnya. Mereka sudah begitu lama tinggal di sebuah daerah, sebelum kedatangan para pendatang (yang pindah karena dorongan ekonomi, politik, dan agama) dari daerah-daerah lain. Masyarakat asli secara sosial, budaya, ekonomi, dan politis terbedakan dengan masyarakat lain yang lebih dominan. Selain karena perbedaan budaya, banyak dari masyarakat asli ini mengalami permasalahan dalam rangka melindungi hak-hak mereka sebagai orang yang terbedakan.³³

32 *Ibid.* Hal. 51-57. Biru Kira menjelaskan bahwa sifat merangkul Uskup John lahir dalam situasi hidup di pantai bersama suku Mimika yang memandang laut dan gelombang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tantangan yang harus diakrabi (hal. 14-15). Selain itu, Uskup John juga terpengaruh oleh inspirasi “Ajaran Sosial Gereja” tentang mempersatukan si kaya dengan si miskin.

33 Lih. D.A. Henningfeld (ed.). (2009). *Indigenous Peoples*. New York: Greenhaven Press. Hal. 21.

Umat dan wilayah Keuskupan Timika saat ini berada di Provinsi Papua Tengah dan sebagian kecil Provinsi Papua. Sebanyak 44 paroki ada dalam 6 dekenat (Paniai, Tigi, Kamuu-Mapia, Teluk Cenderwasih, Moni-Puncak Jaya, dan Mimika-Agimuga). Paroki-paroki ini tersebar di 13 kabupaten (Papua Tengah: Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Nabire, dan Papua: Yapen, Waropen, Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya). Kecuali di daerah pesisir seperti Timika, Nabire, Biak, dan Serui, hampir sebagian besar paroki ada di wilayah pedalaman atau pegunungan; dan di wilayah ini Keuskupan Timika melayani umat yang hampir 100 persen adalah masyarakat asli yang hidupnya tergantung pada alam baik dari tanah maupun sungai, rawa, dan laut. Karenanya, GERTAK yang dijalankan Keuskupan sangat relevan dengan realitas umat beriman dan masyarakat. Suku-suku yang ada di wilayah Keuskupan adalah Mee (Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire), Migani/Moni (Kabupaten Intan Jaya), Mimika-Wee/Kamoro-Amungme (Kabupaten Mimika), Dani-Lani-Damal-Nduga (Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya), Biak (Kabupaten Biak), Serui (Kabupaten Serui), Wate-Yerisiam-Hegure (Kabupaten Nabire).³⁴

4.3. Mengenai “Gerakan Tungku Api Kehidupan”: Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal

Dalam Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika pada tanggal 13-17 Februari 2017, Uskup John memberikan arah dasar mengenai GERTAK.³⁵ Beliau memaparkan apa yang menjadi permasalahan: 1. sumber kehidupan yang berasal dari kekayaan alam di dusun semakin terancam hilang; 2. khususnya di perkotaan, tanah dan dusun terjual habis untuk kepentingan pembangunan dan migrasi yang lajunya cepat; 3. investasi para pengusaha secara besar-besaran; 4. penebangan dan penggusuran hutan; 5. krisis pangan dan ekologis; 6. munculnya penyakit dan gizi buruk; 7. meningkatnya jurang antara si kaya dan si miskin yang memperbesar potensi konflik dan kekerasan; dan 8. pengabaian hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat yang akan menimbulkan ketidakseimbangan dan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beliau melanjutkan bahwa pengertian tungku api digunakan sebagai simbol kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat adat. Tungku api yang biasanya

34 Lih. bagian kelima terkait data-data Keuskupan Timika, Kira, Biru dkk. (2022). *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika*. Yogyakarta: Kanisius.

35 Lih. John Philip Saklil. (2017). “Arah Dasar Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal”. Arahan Uskup pada Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika 13-17 Februari 2017.

terletak di tengah dapur atau rumah adalah bagian penting dalam rumah, yang digunakan untuk mengelola makanan yang berasal dari dusun yang memiliki hasil tanah, hutan, sungai, rawa, dan laut. Tungku api menyala kalau kekayaan sumber alam dijaga, dirawat, dan diolah dengan baik. Di sekitar tungku api, keluarga dan komunitas duduk dan berbicara bersama untuk melakukan sesuatu bersama. Bagi masyarakat asli atau umat beriman di wilayah Keuskupan Timika, tungku api yang menyala penting untuk membangun hidup dan kesejahteraannya.

Lalu beliau melanjutkan bahwa tujuan gerakan ini adalah sebagai berikut.

1. Melindungi hak atas sumber daya alam, khususnya yang berada di dusun-dusun yang produktif. Usaha perlindungan ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan pemilik hak ulayat.
2. Mengelola: sesudah dilindungi maka sumber daya alam itu, termasuk manusia dan budayanya dikelola (memberdayakan diri) agar menghasilkan dan mendatangkan kesejahteraan. Sekali lagi, semua pihak termasuk pemerintah harus mempermudah akses terhadap pelatihan dan infrastruktur agar masyarakat memiliki peluang untuk bertahan dalam arus perubahan.
3. Membangun solidaritas antarmanusia dan kelompok agar tercipta kesejahteraan hidup bersama.

Untuk memberi dasar pijakan kuat bagi gerakan ini, Uskup John memaparkan aspek-aspek yang menjadi sumber inspirasinya. Dari segi pastoral-spiritual, Uskup John meyakini bahwa manusia diajak untuk bersama Tuhan menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan bumi dengan segala isinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta keberlangsungan keutuhan ciptaan (bdk. Kitab Kejadian 1:27). Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk memelihara dan mengolah alam ini secara bijaksana serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua ciptaan (Nota Pastoral KWI, 2013). Juga, Tuhan menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang sehingga harta benda yang tercipta bisa mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi cinta kasih (bdk. *Gaudium et Spes* 69). Tuhan yang sama yang diimani oleh Uskup John hadir di dunia (bdk. Yohanes 1:14), solider mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia (Filipi 2:7), berbela rasa kepada mereka yang menderita (Matius 9:36), dan mengupayakan hidup baru dan berkelimpahan dengan membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan pembebasan bagi orang tertindas serta memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Lukas 4:18). Selain itu, Uskup John menegaskan bahwa perilaku terhadap lingkungan harus mencerminkan bahwa seluruh alam ciptaan adalah baik dan bernilai pada dirinya sendiri (bdk. *Laudato Si* 95).

Dari aspek hukum, Uskup John menyinggung otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Mereka harus memberdayakan diri dan tidak membiarkan diri diperdaya oleh kepentingan politik suatu kelompok atau individu. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 memberikan perlindungan dan pengakuan akan masyarakat adat dan wilayahnya yang berupa tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di atasnya untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek sosialnya mengangkat rumusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang menegaskan hubungan sosial antar-anggota masyarakat adat yang dibangun di atas dasar hak atas masyarakat adat terkait sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya. Orang lain di luar masyarakat adat tidak memiliki hak atas sumber daya alam itu, kecuali atas izin masyarakat adat. Sementara, aspek ekonomi mengacu pada Konvensi International Labour Organization (ILO) no. 169 yang menetapkan prinsip dasar bahwa masyarakat adat memiliki hak atas sumber daya alam terkait dengan lahan mereka, termasuk juga berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber-sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu terbagi atas dua macam, yakni terbarukan (ikan, kayu) dan tidak terbarukan (pasir, air, mineral). Masyarakat adat juga berpartisipasi dalam pembagian manfaat hasil pengolahan dan usaha pengelolaan.

Selanjutnya, Uskup John menyinggung aspek budaya yang mengangkat kearifan lokal (yang adalah GERTAK) yang menjadi milik dan keunggulan masyarakat setempat. Kearifan lokal ini harus dijadikan pegangan hidup dan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal di berbagai bidang. Di dalamnya terdapat pengetahuan dan kebijaksanaan yang senantiasa relevan dengan konteks hidup masyarakat adat. Akhirnya, pada aspek lingkungan Uskup John menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhitungkan keterbatasan dan ketidakmerataannya. Permintaan akan sumber daya alam terus meningkat, sedangkan daya ketersediaannya terbatas. Kearifan lokal diharapkan dapat mengatur dan mempengaruhi keputusan publik yang berakibat pada pemanfaatan dan pelestariannya dalam jangka panjang.

Berangkat dari seluruh penjelasan terkait GERTAK yang adalah gerakan perlindungan-pengelolaan sumber hak hidup masyarakat lokal inilah Uskup John kemudian mengharapkan program-program pastoral yang akan dibuat di tingkat keuskupan, dekenat, atau paroki perlu memperhatikan tiga prinsip. Program itu haruslah: 1. visioner: program yang menjangkau jauh ke depan, berupa

rancangan jangka panjang; 2. profetis: program yang di dalamnya mengemban tugas kenabian—spiritual, yang mengubah—mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan, membimbing ke arah perbaikan hidup masyarakat; dan 3. profitis: program yang secara ekonomi-sosial menguntungkan bagi kehidupan masyarakat.

4.4. Model-Model Perlindungan dan Pengelolaan

Program pastoral GERTAK ini sudah berlangsung enam tahun. Masing-masing paroki telah menjalankan program-program sesuai arahan dari Mgr. John Philip Saklil, terutama umat beriman dan masyarakat asli Papua didorong dan digerakkan untuk memotivasi dan memberdayakan diri untuk melindungi dan mengelola apa yang menjadi sumber hak hidupnya seperti tanah, hutan, rawa, sungai, laut, dan dusunnya. Masyarakat lokal berjuang menjadi subjek atau aktor perubahan yang tidak membiarkan dirinya disetir oleh perubahan, secara khusus perubahan yang “berwajah” tidak manusiawi (membawa ketidakadilan dan situasi tidak damai). Terkait hal ini peneliti perlu memberi sedikit keterangan. Bernardo Jurema dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akar deforestasi, pelanggaran hak adat/tanah dan HAM, dan terciptanya kesenjangan sosial adalah tekanan pasar global untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan produksi massal beserta pendekatan militer sebagai respons terhadap konflik sosial yang terjadi akibat aktivitas tersebut. Singkatnya, semakin besar usaha eksploitasi alam demi mencapai keuntungan, semakin besar pula potensi kerusakan alam dan lingkungan, dan semakin besar pengaruhnya bagi masyarakat lokal yang hidup darinya. Akan muncul perlawanan, dan pada saat itu pendekatan militer dan kekerasan akan digunakan dan dibenarkan demi kepentingan nasional.³⁶

GERTAK dan program-program yang searah dengannya dijalankan dalam kondisi yang sering kali tidak mudah: kompleksitas masalah dan konflik-konflik sosial budaya dan politik yang sering kali menghentikan gerak langkah pastoral atau bahkan membuatnya seakan jatuh mundur ke belakang. GERTAK juga kadang kala dijalankan dalam nuansa kontras adanya tindakan dan fenomena perlawanan yang memakai kekerasan dan berakibat pada jatuhnya korban dari antara pihak-pihak yang bertikai. Akibatnya, Tanah Papua sebagai tanah damai dan adil semakin sulit diraih. GERTAK adalah gerakan “perlawanan” terhadap

36 B. Jurema, M.C. Oliveira. 2023. “The Indigenous Struggle against ‘New’ Extractivism in the Peruvian Amazon. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 15:1. Hal. 126-138.

perubahan yang tidak manusiawi berbasis pada gerakan iman (tanpa kekerasan) dan strategi budaya. Berikut ini kami tampilkan beberapa contoh di antaranya.

4.4.1. Pastoral Berbasis Data: Pendataan Umat dan Pemetaan Kampung

Usaha-usaha perlindungan dan pengelolaan akan berjalan dengan baik jika masing-masing dusun atau paroki memiliki data. Data yang pertama adalah data umat (misalnya: jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status keberadaan rumah tinggal). Data yang kedua adalah peta yang di dalamnya berisi batas-batas, titik-titik tempat beradanya hutan, sumber air, tempat keramat, tempat sejarah, pemukiman, dan lain-lain. Semakin detail data maka akan semakin baik dan membantu bagi siapa pun, misalnya pastor paroki dalam membuat program pastoral perlindungan dan pengelolaan.

Uskup John bersama Tim Tungku Api Keuskupan Timika mulai menggerakkan para pastor paroki untuk mendata umat. Langkah pertama adalah mengumpulkan para pastor dan memberi pelatihan mengisi form data umat. Sesudahnya, para pastor paroki membentuk tim kecil dan mulai bekerja mendata umat di masing-masing dusun atau stasi. Format dibagikan untuk diisi oleh umat. Tidak berhenti di situ, pastor paroki bersama tim mendatangi rumah umat satu per satu untuk mengisi form data umat. Sambil mendata, pastor paroki melihat langsung realitas kehidupan umat. Data yang sudah terkumpul ditata dalam *file* komputer dan direkapitulasi untuk selanjutnya dikumpulkan di keuskupan. Diharapkan dari data ini usaha pengelolaan sumber daya manusia melalui program pastoral bisa dijalankan dengan terarah.

Sesudah pendataan umat, tim Tungku Api Keuskupan menggerakkan kembali para pastor yang selanjutnya memotivasi timnya untuk melakukan pemetaan dusun, kampung, dan paroki. Para pastor dikumpulkan untuk diberi pembekalan bagaimana melakukan pemetaan dengan menggunakan aplikasi dalam komputer dan GPS (*global positioning system*). Sesudahnya, para pastor turun ke dusun-dusun dan bersama penduduk mulai membuat peta. Adanya peta akan membantu usaha perlindungan dusun beserta isinya. Peta-peta yang ada akan digunakan untuk: diserahkan kepada pemerintah dan dewan perwakilan agar bisa dibuatkan payung undang-undang perlindungan, khususnya daerah-daerah yang memiliki area sejarah, keramat, atau penting bagi masyarakat lokal. Peta itu juga akan disosialisasikan ke berbagai pihak, secara khusus para pemilik modal atau investor, sebagai bentuk penegasan bahwa Tanah Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dengan mudah dirampas dan dieksploitasi tanpa melibatkan masyarakat asli. Adanya peta ini tidak dengan sendirinya membuat eksploitasi dan

perampasan tanah berhenti. Hal ini dikarenakan para investor bersama oknum pemerintah dan oknum DPR telah melakukan perjanjian dan kaveling-kaveling terhadap Tanah Papua demi kepentingan pembukaan lahan untuk tambang maupun perkebunan kelapa sawit.

4.4.2. Pembangunan Areal Sejarah dan Ziarah

Di wilayah Keuskupan Timika sedang marak pembangunan, baik itu gereja, aula, pastoral, tempat doa dan ziarah, dan tempat sejarah. Gagasan di balik pembangunan ini adalah perlindungan area yang menjadi ruang lingkup hidup masyarakat dan umat asli Papua. Tanah dan dusun akan terlindung dari fenomena jual beli tanah jika terdapat area sejarah (keramat) dan area ziarah (kudus) yang sudah dibangun di tempat itu. Penduduk asli akan terhalang niatnya untuk menjual tanah adat dan mereka yang datang akan menyesuaikan diri dengan areal sejarah dan ziarah, serta berpikir ulang untuk merencanakan hal-hal terkait eksploitasi yang tak melibatkan masyarakat pemilik dusun.

Sebagai contoh di Paroki Modio, tempat peneliti bertugas selama tujuh tahun. Selama di sana, peneliti bersama umat telah merintis pembangunan areal sejarah dan ziarah yang meliputi: Monumen Perdamaian tempat misionaris awal dan OAP bertemu untuk mengawali babak baru modern di Pegunungan Tengah dibimbing oleh Injil. Lalu, renovasi makam tokoh Gereja asli Papua, Auki Tekege yang menjadi pembawa terang bagi masyarakat koteka. Dilanjutkan dengan pembuatan area jalan salib dan tempat doa di mana berdiri patung “Tota Maria” (Bunda Maria Asli) yang mengenakan pakaian berbalut budaya Mee. Kemudian di Paroki Kokonau (Mimika Tengah): pendirian tiga salib besar di dusun, masing-masing didirikan di Kokonau, dan dua lagi akan didirikan di Potowaiburu (sebelah barat Mimika) dan Otakwa (Mimika Timur). Pendirian salib besar ini menjadi simbol seruan rekonsiliasi masyarakat asli Mimika-Wee (Kamoro) yang ingin mulai memperbaiki diri dan memberdayakan diri membangun hidup berpegang pada kearifan lokal, agama, dan alamnya, demi usaha perlindungan sumber hak hidup. Dusun dan alamnya selama ini telah mendapat ancaman dari *tailing* Freeport, kehadiran perkebunan sawit yang menguras sumber air tawar, serta nelayan-nelayan luar Papua yang mengeksploitasi isi laut mereka.³⁷ Usaha lain juga dilakukan di wilayah Dogiyai,

³⁷ Peneliti menghadiri penanaman salib besar di Kokonau pada tanggal 23 April 2022. Pada saat yang sama diadakan Ekaristi Rekonsiliasi, sebuah usaha umat beriman untuk memulihkan relasi dengan alam, budaya, sesama, dan Tuhan. Dari pulihnya relasi, umat dapat mulai memberdayakan diri, melindungi dan mengelola alam budayanya.

dengan penanaman salib di sepanjang jalan raya di batas Kabupaten Dogiyai.³⁸ Semua usaha ini hendak mengatakan bahwa masyarakat asli akan menjaga tanah dan tidak boleh ada kekerasan dan perampasan di tanah damai Papua, supaya tercipta keadilan bagi semua orang, secara khusus masyarakat asli Papua.

4.4.3. Perintisan dan Pengembangan Koperasi

Koperasi-koperasi dirintis dan dikembangkan, khususnya di daerah-daerah di mana hasil alam yang dimiliki masyarakat asli memiliki daya jual di pasaran nasional maupun internasional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ide dasar dari perintisan koperasi ini adalah seperti yang digaungkan oleh Mgr. John Philip Saklil dalam arah dasar GERTAK bahwa masyarakat harus hidup dari olah tanah, bukan jual tanah. Masyarakat diajak memberdayakan diri dengan cara mengolah tanah dan hutan hingga menghasilkan uang. Dengan sendirinya, manusia dan budaya tani atau budaya yang lahir dari tanah akan terkelola. Pelan-pelan OAP melihat tanahnya sebagai sesuatu yang berharga dan mendatangkan kehidupan (tungku api di rumah menyala). Mental bekerja, mandiri, dan bangga akan hasil alam dan budayanya semakin berkembang di dalam jiwa masyarakat.

Koperasi St. Isidor di Paroki Bomomani didirikan salah satunya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pegunungan Mapiha (Weyland Mountains), yang di wilayah itu terdapat Paroki Modio, Timepa, dan Abouyaga, adalah daerah yang subur dan terkenal karena beberapa hasil alamnya: biji kopi, kacang tanah, bawang merah, dan noken kulit kayu/anggrek (tas tradisional Papua). Hampir seratus persen masyarakat di sana adalah petani yang hidup dari olah tanah dan hutan. Daerah ini potensial, kaya dengan para petani kopi, petani kacang dan bawang merah, serta pengrajin noken. Kebutuhan hidup dan bahkan biaya anak sekolah diperoleh dari hasil mengelola tanah. Pada saat yang sama, daerah ini perlahan juga mulai mengalami perubahan, pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Para pastor di Bomomani, mengingat apa yang telah dilakukan misionaris zaman dahulu di Paroki Moanemani, mulai peka dengan realitas dan menangkap peluang. Hal ini kelak akan diikuti oleh para pastor di daerah pegunungan suku Mee lain, seperti di Modio, Timepa, Abouyaga (Dogiyai), dan Obano (Paniai). Para pastor mulai membantu para petani untuk memperoleh uang dari hasil tanahnya. Hasil alam berupa biji kopi, kacang, bawang merah, dan

38 Paroki Modio tempat kami bertugas terletak di Kabupaten Dogiyai. Bersama dengan masyarakat, peneliti menggerakkan umat menanam salib di tempat-tempat tertentu.

noken dibeli dan ditampung dengan harga yang tinggi. Kemudian, biji kopi secara khusus diolah kembali: dikeringkan, disortir, dimasak, dan digiling, lalu dijadikan kopi kemasan. Sebagian biji kopi lain dijual ke kafe-kafe di Nabire, Timika, dan Jakarta. Dengan usaha ini, para pastor mempermudah pekerjaan para petani yang sering kali kesulitan mengolah dan apalagi memasarkan biji kopi dan hasil tanah lainnya. Bahkan sekarang di Paroki Modio, tempat kami pernah bertugas, beberapa petani kopi yang dulu hanya bisa menjual biji kopi kini sudah terampil membuat kopi kemasan dan memasarkannya sendiri.

Ada hasil alam lain yang telah diusahakan pemasarannya oleh anggota tim pastoral. Sebagai contoh, Suster DSY di Enarotali (Paniai) yang mengusahakan minuman kemasan dari buah terong belanda, Suster KSFL di Damabata (Deiyai) yang menghasilkan kue, roti, dan minuman jahe dari tanaman jahe yang ditanam dan dikelola oleh para petani di Damabagata. Di Mimika, Koperasi Maria Bintang Laut, dengan visi dan misi yang sama, mendampingi masyarakat Mimika/Kamoro di pesisir selatan Mimika agar mampu memberdayakan dirinya dengan mengolah hasil alam dari laut, sungai, dan rawa. Hasil tangkapan ikan ditampung oleh koperasi dan kemudian dipasarkan. Setiap bulan koperasi harus bisa menyediakan 3 ton ikan untuk dibeli oleh Freeport. Para nelayan dengan segala keterbatasan mengalami kesulitan untuk memperoleh banyak tangkapan. Usaha demi usaha terus dilakukan koperasi agar masyarakat semakin berdaya dan mau bekerja, khususnya di tengah tersedianya segala macam bantuan dari pemerintah dan perusahaan yang membuat mental ketergantungan dan malas bekerja mengolah alam yang ada.

Usaha-usaha ini memicu semangat di antara masyarakat untuk mempertahankan tanah dan hutannya. Mereka mulai mandiri, bangga akan tanah dan hasilnya, serta menyadari bahwa tanah adalah berharga dan harus dijaga. Mental-mental ini yang ke depan akan menjadi penghalang bagi mental instan, hedonis, materialis, dan tergantung yang muncul dari fenomena globalisasi dan kapitalisme (militarisme). Tim Pastoral Keuskupan Timika berjalan searah dengan visi Uskup John memberdayakan masyarakat untuk berjuang menjadi aktor perubahan bagi diri sendiri dan menyesuaikan dengan perubahan yang sering kali “berwajah” tidak manusiawi dengan berpegang pada iman dan budayanya.

4.4.4. Musyawarah Pastoral Mee

Disadari oleh Uskup John bahwa Gereja adalah salah satu dari sekian banyak aktor di Tanah Papua. Sering kali Gereja tidak memiliki daya tawar dan suara yang cukup berpengaruh di hadapan aktor lain, seperti perusahaan besar PT Freeport atau

perusahaan kelapa sawit PT PAL yang ada di Mimika atau Nabire, juga pemerintah pusat atau daerah serta aparat keamanan TNI-POLRI. Maka, selain mendorong individu dan kelompok masyarakat yang ada di paroki-paroki untuk bekerja mengolah tanah dan menghasilkan, Uskup John bersama para pastor mendorong masyarakat adat untuk mengorganisasi diri, belajar, dan “mempersenjatai” diri dengan pengetahuan dan kearifan lokal dalam rangka berjuang menghadapi perubahan yang sering kali hadir dengan kekerasan yang merusak tatanan sosial dan budaya.

Musyawarah Pastoral Mee diadakan setiap tiga tahun sekali. Walaupun dimulai sebelum pencanangan GERTAK, Muspas Mee ini sedikit banyak mempengaruhi dan kelak juga dipengaruhi oleh GERTAK. Muspas Mee merupakan wadah pertemuan para pastor, pelayan umat, tokoh awam, kaum intelektual, dan berbagai komponen umat di suatu gereja partikular atau lokal berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Gereja. Muspas Mee ini dimulai dan dilaksanakan di daerah suku Mee yang meliputi Dekenat Paniai, Tigi, dan Kamuu-Mapia (atau wilayah adat suku Mee). Latar belakangnya adalah keinginan tim pastoral Dekenat Paniai untuk menyiapkan umat/suku Mee agar bisa mandiri di era global. Peneliti sendiri pernah mengikuti Muspas Mee ke IV pada tahun 2014 mengenai pendidikan. Hasil pertemuan yang melibatkan ribuan umat ini adalah pendirian STK Touye Paapa yang mempersiapkan para calon guru agama Katolik. Di sekolah ini pula sekarang peneliti bekerja dan mengajar. Lalu Muspas Mee V tahun 2017 mengenai rekonsiliasi yang mendorong seluruh umat untuk membangun kembali relasi baiknya dengan Tuhan, alam, dan sesama agar perubahan zaman tidak membawa umat dan Gereja ke arah kehancuran masyarakat dan alam. Kemudian pada tahun 2020, peneliti mengikuti Muspas Mee VI bertema “Kembali ke Tanah Kudusku”. Umat diajak untuk menjaga, mempertahankan, dan mengelola tanah sumber kehidupannya. Pada intinya, Muspas Mee ini memiliki semangat seperti GERTAK. Di dalamnya ada usaha bertemu dan berpikir bersama untuk mengorganisasi diri dalam rangka melindungi dan mengelola apa yang dimiliki: iman, alam, budaya, manusia.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Keuskupan Timika mengusahakan terjadinya keadilan dan perdamaian di Tanah Papua, khususnya dalam situasi kompleksitas masalah di mana terjadi banyak konflik dan kerusakan. Situasi ini terjadi salah satunya karena proses globalisasi dan kapitalisme yang didukung

militerisme telah mendesak masyarakat asli Papua ke pinggiran lalu menjadi penonton, bahkan terlindas dan tersingkir.

Orang Asli Papua atau *Indigenous Papuans* adalah bagian kecil dari *indigenous people* di seluruh dunia. Mereka adalah kelompok manusia yang memiliki budaya unik: relasi spesial dengan tanah tradisionalnya. Di banyak tempat, mereka tersingkir atau berpindah, khususnya di daerah-daerah di mana pemerintah memberikan hak pembangunan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ketika berpindah, terpisah dan tercerabut dari tanahnya, mereka mengalami situasi hidup yang terus menurun dan merugikan hidup. Globalisasi dan pasar bebas menjanjikan kemajuan. Namun yang terjadi, kemajuan bagi sedikit orang, dan penyingkiran "*indigenous people*" dari tanahnya. Situasi ini memaksa mereka untuk bersuara dan berjuang menawarkan praksis keunikan budayanya demi melawan tatanan baru yang merusak. Mereka ingin memperoleh kebebasan dan otonomi membangun hidup sesuai kearifan lokalnya.

Dalam konteks Papua, apa yang dialami *indigenous people* di tempat lain menurut *Papua Road Map* juga dialami OAP sebagai situasi marginalisasi dan diskriminasi. Lalu ditegaskan kembali oleh *Updating Papua Road Map* sebagai bentuk kekerasan negara dan kegagalan pembangunan. SKPKC memaparkan data-data dan fakta-fakta yang menunjang akan adanya kompleksitas masalah yang di dalamnya terdapat juga bentuk-bentuk ketidakadilan, marginalisasi, dan diskriminasi. Secara khusus Krinus Kum dan Markus Haluk memaparkan hasil penelitiannya terkait konflik-konflik yang terjadi antara pemilik modal dan negara dengan masyarakat adat atau OAP.

Maka, berkaca dari pengalaman dan pemikiran Pater Neles, Gereja dan negara perlu mengedepankan cara damai demi mengatasi berbagai macam persoalan yang ada dan merugikan masyarakat lokal/OAP. Cara damai yang bersumber dari spiritualitas ajaran kristiani ini kelak perlu ditambahkan dengan strategi budaya. Peran Suryawan di sini kemudian adalah: Memahami bahwa modernisasi tidak bisa menjamin kemajuan untuk seluruh manusia maka OAP perlu menyadari, bangkit, dan berjuang bermodalkan kearifan lokalnya untuk menjadi aktor mandiri di dalam arus perubahan yang sarat dengan ketidakadilan ini. Terkait kearifan lokal, peneliti melihat bahwa Erari berperan dalam menyodorkan sebuah perspektif akan ketakterpisahan OAP dengan tanahnya (yang adalah sumber hidup).

Menyadari realitas dan nuansa pemikiran Tanah Papua yang demikian dan didorong oleh semangat misi dan penggembalaan, Mgr. John Philip Saklil bersama Keuskupan Timika mencanangkan "Gerakan Tungku Api Kehidupan",

sebuah gerakan perlindungan-pengelolaan dan pendampingan umat/masyarakat untuk memberdayakan diri melindungi dan mengelola alam, budaya, dan manusia, berdasar pada iman (cara damai tanpa kekerasan) dan strategi budaya (filosofi tungku api), untuk merespons perubahan dan tata dunia baru yang “berwajah” tidak manusiawi sebagai akibat dari tata pemerintahan yang tidak baik dan struktur dosa yang melingkupinya.

Secara formal, program pastoral GERTAK ini ditanggapi dalam Muspas Mee VI yang bertemakan “Kembali ke Tanah Kudus-Ku”. Di sini terlihat bagaimana umat mulai mengorganisasi diri untuk membangun kesadaran, kembali mengangkat kearifan lokal untuk berjuang membangun kemandirian dan semangat melindungi/mengelola yang diharapkan bisa menahan laju perubahan yang tidak manusiawi sehingga dengan demikian situasi adil dan damai di Tanah Papua bisa tercapai.

Peneliti melihat pada tataran teori, GERTAK ini harus terus diperdalam dengan penelitian-penelitian lokal dan terarah terkait respons-respons masyarakat asli terhadap era global, berdasarkan kearifan lokalnya. Dengan banyaknya contoh usaha perlindungan dan pengelolaan berdasar kearifan lokal, pengertian GERTAK semakin diperkaya dan memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahaminya.

Pada tataran praktis, usaha perlindungan dan pengelolaan ini tidak mudah dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan. Sebab internal adalah keterbatasan sumber daya Gereja dan OAP. Hal-hal yang menghambat ini bisa menjadi “ladang” bagi penelitian-penelitian pada masa depan. Sebab eksternal adalah besarnya kekuasaan-kekuasaan di luar Gereja dan masyarakat adat yang berhasil mempengaruhi dan mengubah jalan perubahan. Sebagai contoh: usaha pemetaan dusun yang pernah dilakukan oleh Keuskupan Timika mengalami jalan buntu karena pada akhirnya pemerintah daerah dan DPRD seakan tidak mampu mengusahakan agar peta-peta itu dijadikan dasar untuk membuat peraturan dan undang-undang perlindungan. Mengapa demikian? Semoga ke depan, akan muncul penelitian-penelitian yang bisa menemukan penyebab dari tidak maksimalnya usaha perlindungan dan pengelolaan ini.

Daftar Pustaka

Erari, Karel Phil. (1999). *Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis (Eko-Teologi dalam Perspektif Melanesia)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Haluk, Markus. (2014). *Menggugat Freeport, Suatu Jalan Penyelesaian konflik*. Jayapura: Deiyai, Honai Center, Satu Tungku dalam Satu Honai.
- Henningfeld, D.A. ed. (2009). *Indigenous Peoples*. New York: Greenhaven Press.
- Jenaru, A., Triharyanto, B., Koten, B. (eds.). (2017). *Papua di Ambang Kehancuran, Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016*. Jayapura: SKPCK Fransiskan Papua.
- Jurema, B., Oliveira, M.C. (2023). "The Indigenous Struggle against 'New' Extractivism in the Peruvian Amazon. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 15:1, hal. 126-138.
- Kira, Biru. *Bergerak Menjadi Papua, Kumpulan Refleksi Pastoral menjadi Pelayan Gereja Katolik di Tanah Papua*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kira, Biru, dkk. (2022). *Mgr. John Philip Saklil, Peletak Dasar Keuskupan Timika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koten, Bernard, et al. (2018). *Papua, 'Surga' yang Terlantar, Laporan Hak Asasi Manusia SKP Se-Papua 2015-2017*. Jayapura: SKPKC (Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Fransiskan Papua.
- Koten, B., Gobay, D., Tim Kerja SKPKC FP. (2019). *Papua Bukan Tanah Kosong, Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- Kum, Krinus. (2015). *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nilson, Jon. 1987. "Doing Theology By Heart: John S. Dunne's Theological Method". *Theological Studies* 48, pp. 65-86.
- Rusdiarti, S.R., Pamungkas, C. (eds.). (2017). *Updating Papua Road Map, Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saklil, John Philip. (2017). "Arah Dasar Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal". *Arahan Uskup pada Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika* 13-17 Februari 2017.
- _____. (2017). "Keluarga sebagai Tungku Api Kehidupan". *Surat Gembala Keuskupan Timika*.
- _____. (2018). *Gereja dan Tragedi Kemanusiaan di Keuskupan Timika, Kumpulan Pernyataan Sikap dan Suara di Media Massa*. Timika: SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Timika dan SKPKC Fransiskan Papua.
- _____. (2018). "Surat Gembala Masa Prapaskah 2018". Dokumen Keuskupan Timika.

- _____. (2019). "Gerakan Tungku Api Kehidupan: Mengakarkan Injil, Membangun Budaya Literasi Kehidupan". Surat Gembala Uskup Keuskupan Timika (Prapaskah 2019).
- Sarapung, Elga J. (ed.). (2013). *100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Yogyakarta: Interfidei.
- Stewart-Harawira, Makere. (2005). *The New Imperial Order, Indigenous Responses to Globalization*. London & New York: Huia Publisher.
- Suryawan, I Ngruh. (2022). *Hidup Papua Suatu Misteri*. Yogyakarta: Basabasi.
- Tebay, Neles. (2002). "The Role of The Catholic Church in Defending and Promoting Human Rights in West Papua". *Exchange* 31: 362-372
- _____. (2007). "Papua, the Land of Peace: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua". *Exchange* 36: 337-358
- _____. (2008). *Papua Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*. Jayapura: SKP Jayapura.
- _____. (2012). *Angkat Pena demi Dialog Papua, Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- _____. (2015). "Misi dan Keterlibatan Gereja Demi Perdamaian". *Jurnal Limen STFT* Vol. 11 No. 2: 79-99
- Tigi Paniai, Dekenat. (2020). Kembali Ke Tanah Kudusku, Aku Melindungi dan Mengelola Tanah Secara Utuh. *Laporan Kegiatan Muspas Mee VI, Dekenat Tigi-Paniai, Keuskupan Timika*. Enarotali: Keuskupan Timika.
- Van der Walt, Johannes.(2020). "Interpretivism-Constructivism as a Research Method in the Humanities and Social Sciences – More to it Than Meets the Eye". *International Journal of Philosophy and Theology*, Vol. 8, No. 1. Hal. 59-68.
- Widjojo, Muridan (ed.). (2009). *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia.

Jaringan Damai Papua dan Papua Road Map

CAHYO PAMUNGKAS & I NGURAH SURYAWAN

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menceritakan kembali perjalanan Jaringan Damai Papua (JDP) dan sekaligus melakukan refleksi terhadap karya-karya yang dihasilkan JDP sejak awal pembentukannya sampai sekarang. Selain itu, tulisan ini juga akan merefleksikan kritik terhadap *Papua Road Map* yang melandasi perjalanan JDP. Topik ini penting di tengah-tengah meningkatnya intensitas konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB OPM) sejak 2016. Konflik tersebut telah mengakibatkan gugurnya aparat keamanan, pejuang OPM, maupun warga sipil. Selain itu juga berimplikasi pada pengungsian warga sipil dan terhambatnya pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini lebih pada analisis dokumen dengan menelusuri laporan-laporan JDP dan artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah sejarah pembentukan dan perjalanan JDP dan pelajaran apa yang dapat diambil dari perjalanan JDP serta buku *Papua Road Map*.

Kata kunci: Papua, JDP, Papua Road Map, proses perdamaian.

1. Pendahuluan

Sebelum tahun 2014, istilah “dialog” sulit diterima baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun aktivis Papua. Pemerintah cenderung menstigmatisasi dialog sebagai tindakan separatisme. Aktivis Papua mengatakan bahwa dialog adalah upaya perdamaian. Hanya sedikit aktivis atau lembaga perdamaian yang bekerja untuk dialog antara Jakarta dan Papua. Kampanye dialog antara Jakarta dan Papua telah dimulai oleh beberapa aktivis perdamaian di Jakarta dan Papua pada tahun 2008. Pada akhir tahun tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang sekarang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkenalkan *Papua Road Map* (Widjojo dkk., 2008), yang salah satunya merekomendasikan dialog antara Jakarta dan Papua. Setelah publikasi tersebut, urgensi dialog

disampaikan melalui serangkaian diseminasi kepada pemerintah pusat, parlemen, LSM, lembaga keagamaan, dan komunitas internasional di luar negeri. Salah satu tindak lanjut atas gagasan dialog adalah pembentukan Jaringan Damai Papua (JDP), yakni suatu perhimpunan relawan dari berbagai kelompok etnis dan agama yang berkomitmen dan bekerja memperjuangkan dialog antarpihak-pihak yang berkonflik di Tanah Papua maupun antara Jakarta dan Papua. Pertanyaan yang akan dijawab oleh tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah sejarah pembentukan dan perjalanan Jaringan Damai Papua dan (2) Pelajaran apa yang dapat diambil dari proses perdamaian yang diinisiasi oleh JDP dan *Papua Road Map*?

2. Pembentukan dan Perjalanan JDP

Pada tahun 2009, LIPI dan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP, Kantor Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura) memprakarsai pembentukan jaringan fasilitator dialog. SKP menyelenggarakan sebuah konferensi pada tahun 2010, yang menyimpulkan beberapa indikator tanah perdamaian Papua. Setelah itu, LIPI melatih para fasilitator dialog di tujuh wilayah adat. Para mantan peserta kemudian membentuk Jaringan Papua Damai (JDP) yang bekerja secara sukarela untuk mempromosikan dialog, serta memfasilitasi konsolidasi awal menuju dialog antara pemerintah nasional dan masyarakat Papua.

JDP didirikan pada tahun 2010 untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua dan untuk mendorong komunikasi antara masyarakat Papua demi menyelesaikan konflik Papua. Jaringan ini didirikan oleh koordinator tim peneliti Papua LIPI, yang juga merupakan editor *Papua Road Map* (Supriyono, 2014: 66), Muridan S. Widjojo dan seorang pastor Katolik, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur Jayapura, Pater Neles Tebay. Pater Neles Tebay juga merupakan penulis buku *Dialog Jakarta-Papua* (2009) yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Papua. Serangkaian diskusi muncul untuk membahas kemungkinan dialog Jakarta-Papua pada masa depan. Pater Neles hadir dalam perdebatan dan diskusi tentang dialog tersebut dengan tidak hanya para intelektual, tetapi juga para aktivis dari berbagai kelompok. Gagasan dialog menyebar dengan cepat dan mendapat tanggapan yang berbeda. Banyak kelompok moderat baik dari etnis Papua maupun etnis pendatang mendukung ide dialog untuk menyelesaikan konflik. Namun, kelompok konservatif baik di Papua maupun di Jakarta menolak dialog karena dianggap mengancam negara Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi, JDP merupakan jaringan fasilitator perdamaian sukarela yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan pendidikan.

Partisipasi mereka dalam JDP tidak mewakili pendapat institusi asal mereka. Satu-satunya hal yang mengikat mereka dengan JDP adalah komitmen pribadi mereka untuk bekerja demi perdamaian di Papua (Widjojo & Tebay, 2014). Fasilitator terlatih yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil, dari dosen hingga peneliti, dari mahasiswa hingga lembaga sosial, dari organisasi keagamaan hingga organisasi etnis dan berbagai kelompok strategis dikumpulkan untuk menjadi anggota JDP. Tugas utama mereka adalah untuk menghubungkan berbagai kelompok dan membantu masyarakat Papua dan Indonesia pada umumnya untuk membangun dialog Jakarta-Papua. Saat ini, terdapat 30 fasilitator yang mewakili berbagai institusi, baik dari Papua maupun non-Papua, di mana sekitar 30% anggotanya adalah perempuan. Selain itu, JDP juga memiliki koordinator wilayah di berbagai kota di mana mereka telah mengadakan beberapa konsultasi publik (*Profil JDP*, n/a). Para anggota JDP bekerja untuk “Papua Tanah Damai” melalui dialog.

Tugas utama anggota JDP adalah memfasilitasi proses sinkronisasi persepsi tentang tanah perdamaian Papua antara kelompok-kelompok etnis dan agama yang tinggal di Papua. Setelah pembentukan JDP pada tahun 2010, JDP secara aktif mempromosikan konsep tersebut melalui serangkaian konsultasi publik, baik di dalam maupun di luar Papua. JDP telah berhasil menyelenggarakan konsultasi publik di tujuh wilayah adat Tanah Papua. Konsultasi tersebut juga melibatkan perwakilan masyarakat pendatang di enam kabupaten. Dalam setiap konsultasi publik, masyarakat diberi pemahaman mengenai konsep dialog dan diminta untuk memberikan pendapat dan harapan mereka untuk dialog pada masa depan.

JDP juga mengadakan seminar untuk mahasiswa, akademisi, dan perempuan untuk terlibat dengan masyarakat Papua secara menyeluruh. Gereja Katolik di Papua berinisiatif untuk menjabarkan indikator-indikator *Papua Tanah Damai* melalui lokakarya. Indikator-indikator tersebut didiskusikan dan diperkaya melalui lokakarya di Jayapura pada bulan Juni 2011. Lokakarya ini menghadirkan seluruh anggota JDP, para peneliti, dan para ahli di bidang terkait serta perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan di Jayapura. Setelah serangkaian konsultasi publik dan lokakarya, Konferensi Perdamaian Papua berhasil diselenggarakan pada bulan Juli 2011. Semua peserta setuju dengan deklarasi yang menyatakan bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua.

Konferensi Perdamaian Papua kemudian diselenggarakan oleh JDP pada bulan Juli 2011 di Jayapura. Acara ini dihadiri oleh perwakilan daerah, Pemerintah Pusat, delegasi Papua, dan akademisi lokal. Mereka yang hadir di antaranya adalah

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Gubernur Papua, Kapolda, Pangdam, Uskup Keuskupan Jayapura, Majelis Muslim Papua, Sinode Gereja-gereja Papua, dan Dewan Adat Papua (Press Release JDP, n/a). Para peserta konferensi dipilih melalui beberapa konsultasi publik yang diadakan oleh JDP. Peserta konferensi mewakili aspirasi arus utama masyarakat adat Papua. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran tokoh adat, agama, Dewan Presidium Papua yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hasil konferensi tersebut adalah Papua Tanah Damai, dengan indikator di bidang politik, keamanan, hukum dan HAM, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Konferensi ini memilih negosiator yang akan mewakili penduduk asli Papua untuk berdialog dengan Pemerintah Indonesia. Mereka adalah diaspora Papua, yaitu Rumakiek Rex, John Ondawame, Leoni Tangahma, Octo Motte, dan Benny Wenda. Mereka tinggal di Australia, Vanuatu, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris (Orang Papua harus bicara, 11 Oktober 2014).

Pembacaan deklarasi Konferensi Perdamaian Papua yang memuat nama kelima juru runding tersebut akhirnya memunculkan tanggapan kritis dari beberapa peserta, Pemerintah Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Beberapa pejabat pemerintah pusat terkejut dengan pembacaan nama tersebut, dan sejak saat itu, kepercayaan pemerintah terhadap JDP dan beberapa kampanye dialog menjadi berkurang. Kejadian ini merupakan kejadian yang tidak direncanakan, tiba-tiba muncul secara spontan dari para peserta konferensi sehingga tidak dapat dicegah oleh panitia karena desakan dari para peserta yang sangat antusias. Karena hal tersebut, kepercayaan pemerintah kepada JDP mulai berkurang, dan dialog juga mulai berkurang. Namun, bertolak dari pengalaman selama puluhan tahun di mana pendapat orang Papua selalu dibungkam, mereka selalu berusaha menyampaikan pendapat dalam setiap kesempatan.

Salah satu respons pemerintah terhadap Konferensi Perdamaian Papua 2011 dan juga tuduhan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan membentuk apa yang disebut sebagai UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) pada akhir tahun 2011 (Hernawan, 2013). Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi percepatan pembangunan Papua. Namun, UP4B hanya berfokus pada program-program *quick win* di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. Menurut mayoritas masyarakat Papua, UP4B belum melibatkan masyarakat Papua, terutama dalam masalah keamanan dan penegakan hukum. Mereka juga menyatakan bahwa UP4B belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya orang asli Papua. Dalam persepsi mereka, kebijakan

keamanan dan kebebasan berekspresi yang ditunjukkan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan represif. Masih banyak terjadi kekerasan politik yang dilakukan oleh TNI, gerakan pro-kemerdekaan, dan kelompok sipil bersenjata lainnya.

3. Pertemuan Eksploratif antara Pemerintah dan Tokoh Papua

Komunikasi yang konstruktif merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antara pejabat pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pada tahun 2012, Kantor Wakil Presiden memprakarsai pertemuan eksploratif antara para pemimpin Papua dan pejabat pemerintah pusat. Mengikuti inisiatif Kantor Wakil Presiden; LIPI dan JDP mengadakan serangkaian pertemuan eksploratif untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan para pemimpin Papua. Pertemuan tersebut berlangsung enam kali di tujuh kota, yaitu Denpasar, Manado, Lombok, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bogor. Pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan-pertemuan eksploratif tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dan mengidentifikasi akar konflik Jakarta-Papua. Pertemuan-pertemuan tersebut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.

Sejak tahun 2013, LIPI dan JDP memfasilitasi pertemuan-pertemuan eksploratif yang mempertemukan para pemimpin dari Papua dan Jakarta, sebagai berikut (Wiratri, 2016: 19-25). Pertemuan antara kedua belah pihak dimulai dengan pertemuan eksploratif pertama yang diadakan di Bali pada bulan Februari 2013. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga di Jakarta (26 delegasi) serta perwakilan dari Papua. Pertemuan eksploratif ini membahas isu-isu yang dapat membantu para pihak untuk menciptakan visi bersama yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan untuk masa depan Papua dan membangun rasa saling percaya di antara para peserta yang mewakili berbagai pemangku kepentingan dari Jakarta dan Papua. Pertemuan eksploratif pertama berlangsung sangat tegang. Masing-masing perwakilan dari kementerian dan lembaga di Jakarta dan para aktivis Papua masih saling curiga. Namun demikian, sesi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempertemukan kedua pihak yang bertikai. Pada akhir pertemuan, semua peserta sepakat untuk bertemu kembali dalam pertemuan eksploratif berikutnya.

Pertemuan eksploratif kedua diadakan di Manado pada bulan April 2013. Seperti pertemuan-pertemuan penjabakan sebelumnya, pertemuan ini juga

bertujuan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman mengenai masalah-masalah yang ada di Papua, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Diskusi pada pertemuan eksploratif kedua ini secara khusus difokuskan pada tiga aspek: sosial budaya, ekonomi, serta politik dan keamanan. Dalam sesi ini, pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap masalah konflik politik, keamanan, sosial-ekonomi, dan aspek pembangunan lainnya, meskipun pemerintah juga memiliki kendala dalam koordinasi dan implementasi program. Pemerintah juga menegaskan akan berdiskusi dengan berbagai kelompok kepentingan di Papua, termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bulan Agustus 2013, pertemuan eksploratif diadakan kembali di Lombok. Pada pertemuan ketiga ini peserta dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok politik, ekonomi, dan sosial-budaya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesi mereka. Hasil pertemuan ini adalah Indikator Papua Damai. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan strategi jangka pendek yang mengacu pada proses 'lobi-lobi' ke kementerian dan lembaga pemerintah agar tercipta terobosan terhadap isu Papua pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya, pertemuan eksploratif keempat diadakan pada bulan Januari 2014 di Yogyakarta. Gubernur DIY membuka dan mendukung pertemuan ini dan menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakui bahwa masalah Papua Barat adalah masalah politik. Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris dan simpati dari lembaga swadaya masyarakat internasional merupakan bukti akan adanya masalah di Papua. Gubernur DIY mendorong Pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan dialog terbuka dengan masyarakat Papua pada tahun 2014 dan memperingatkan bahwa dialog tidak akan terjadi jika kedua belah pihak tetap pada pandangannya masing-masing.

Pertemuan eksploratif kelima diselenggarakan pada bulan September 2014 di Semarang, yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh hampir semua peserta pertemuan dari Jakarta dan Papua serta pejabat pemerintah daerah. Gubernur mendukung pertemuan eksploratif ini dan menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk membangun Papua yang stabil dan damai melalui pendekatan dialogis menuju rekonsiliasi Papua. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 41 peserta dari Jakarta dan Papua, termasuk perwakilan dari kementerian dan lembaga yang mengimplementasikan kebijakan dan program di Papua sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kertas kebijakan yang diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada bulan September 2014.

Berdasarkan kertas kebijakan yang dipresentasikan oleh JDP, Presiden menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah, yaitu pembebasan tahanan politik dan memberikan akses kepada jurnalis asing ke Papua. Pada bulan Mei 2015, Presiden memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik di Papua. Kelima tahanan politik tersebut merupakan terpidana kasus perampokan gudang senjata di Wamena pada tahun 2003. Upaya ini merupakan langkah awal untuk membangun Papua dengan pendekatan perdamaian dan kesejahteraan. Pemberian grasi dapat dimaknai sebagai rekonsiliasi kebijakan untuk mewujudkan perdamaian Papua. Selain itu, pemberian akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing ke Papua menjadi bukti kebebasan pers berlaku di seluruh Indonesia dan tidak ada diskriminasi terhadap orang Papua. Namun, realitanya, institusi politik dan keamanan tidak sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, misalnya hanya mengizinkan jurnalis asing yang dianggap tidak mendiskreditkan Pemerintah Indonesia.

Pada bulan Februari 2015 pertemuan eksploratif keenam diadakan di Jakarta, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Pemberdayaan Perempuan. Menteri tersebut mengaku memiliki strategi pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Kehadiran dua menteri dalam acara peninjauan tersebut menunjukkan apresiasi yang tinggi di JDP. Hal ini sangat luar biasa dalam membangun kepercayaan perwakilan Papua karena mereka percaya bahwa forum ini dapat menjadi wadah aspirasi mereka.

Selanjutnya, pertemuan eksploratif ketujuh diadakan pada bulan November 2015 di Bogor untuk membahas urgensi penghentian kekerasan di Papua dan internasionalisasi isu Papua. Pertemuan ini membahas akar permasalahan politik, hukum, keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Topik lain yang dibahas adalah antisipasi kekerasan politik pasca-pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Dari rangkaian pertemuan yang bersifat eksploratif tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi informal yang berkesinambungan antara pejabat pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman terkait penyebab dan permasalahan konflik Papua. Setidaknya, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan dan pihak-pihak yang bertikai ke dalam satu meja perundingan secara damai.

Terakhir, pertemuan eksploratif yang kedelapan diselenggarakan pada 2017 dengan fokus pada persoalan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial budaya

masyarakat adat Papua. Pembicara yang dihadirkan antara lain Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Yan Pieter Yarangga.

Pada 15 Agustus 2017, Pater Neles Tebay bersama Forum Komunikasi Para Pemimpin Agama di Papua (FKPPA) serta sejumlah tokoh masyarakat Papua diterima oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan penyelesaian konflik Papua. Pada waktu itu, Pater Neles membawa kertas kebijakan Tim Papua LIPI (2016) yang berjudul “Dialog Nasional Membangun Papua Damai”. Kertas kebijakan ini berisikan mengenai pentingnya dialog Jakarta-Papua dan berbagai tahapan dialog. *Pertama*, Presiden menunjuk utusan khusus untuk dialog. Utusan tersebut harus memenuhi kriteria: a) mendapatkan kepercayaan penuh dari Presiden RI; b) memiliki pemahaman dasar yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; c) objektif dan tidak diskriminatif; d) tidak terlibat dalam pelanggaran HAM; dan e) tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua. *Kedua*, Presiden mengumumkan dan meminta dukungan kepada semua gubernur, DPRD, dan MRP di seluruh provinsi Papua terhadap dialog Jakarta-Papua. *Ketiga*, agenda dialog adalah membahas indikator Papua Tanah Damai antara Papua dan Jakarta.

Adapun rangkaian dialog adalah sebagai berikut. *Pertama*, dialog internal Papua yang dilakukan oleh Presiden beserta seluruh menteri dan ketua lembaga untuk membahas agenda penyelesaian konflik Papua secara damai. *Kedua*, dialog internal Papua di mana semua kelompok sosial dan politik di Tanah Papua melakukan musyawarah untuk menunjuk perwakilan mereka dalam dialog dengan Pemerintah Indonesia dan isu-isu apa saja yang akan dibahas. *Ketiga*, dialog sektoral, yakni dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral, seperti pendidikan dan kesehatan. *Keempat*, dialog untuk rekonsiliasi antara Pemerintah dan perwakilan Papua yang ditunjuk oleh dialog internal Papua.

Presiden Joko Widodo, setelah mendengar aspirasi tersebut, menyetujui bahwa Pemerintah dapat melaksanakan dialog sektoral karena tidak menimbulkan resisten dari kementerian atau lembaga negara. Kemudian, beliau menunjuk tiga orang *special envoy* (utusan khusus) untuk dialog sektoral, yakni Menkopolkam (Wiranto), Kepala Kantor Staf Presiden (Teten Masduki), dan Ketua JDP (Pater Neles Tebay). Namun dalam perkembangannya, sampai Pater Neles meninggal dunia pada April 2019, tidak ada satu pun dialog sektoral yang diwujudkan. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada mandat resmi kepada tim *special envoy* yang telah ditunjuk. Selain itu, tidak ada dukungan dari Menkopolkam dan para pejabat terkait dialog sektoral tersebut.

4. Setelah Pater Neles Tebay

Setelah Pater Neles meninggal dunia, JDP bermusyawarah dan memilih Pastor John Bunay sebagai koordinator JDP Papua dan Adriana Elisabeth sebagai koordinator JDP Jakarta untuk periode 2019-2022. Namun, tidak lama kemudian pandemi covid-19 menimpa seluruh Indonesia, termasuk Papua sehingga mengganggu konsolidasi JDP setelah ditinggal oleh Pater Neles. Hal ini berakibat jaringan ini tidak maksimal dalam mendorong kampanye dialog, meskipun telah dilakukan beberapa webinar, misalnya gagasan jeda kemanusiaan pada tahun 2021. Pada saat yang sama situasi kekerasan politik meningkat di Tanah Papua sejak 2018, terutama di Pegunungan Tengah Papua, dan menimbulkan banyak korban jiwa dari para pihak yang berkonflik, TNI/Polri dan TPN-PB, serta masyarakat sipil. Dalam keterbatasan, JDP memfokuskan kegiatan pada kampanye *online* mengenai perlunya jeda kemanusiaan di Pegunungan Tengah Papua.

Pada bulan April 2022, JDP melakukan musyawarah untuk memilih pengurus baru karena masa kepemimpinan Pastor John Bunay telah habis. Koordinator baru JDP masa kepengurusan 2022-2025 yang terpilih adalah Septer Manufandu, mantan Deputi JDP pada masa Pater Neles Tebay dan Ketua Forum Kerjasama LSM 2007-2012. Dalam masa kepengurusan ini, gagasan jeda kemanusiaan diterima oleh salah satu institusi pemerintah, Komnas HAM, dan gerakan Papua merdeka, ULMWP, serta didukung oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Gereja Papua. Setelah melakukan serangkaian dialog antara pimpinan Komnas HAM dan para pemimpin TPN-PB di Puncak, Paniai, Yapen, Demta, dan PNG, dilakukan pembicaraan damai antara Komnas HAM dengan ULMWP. Puncaknya adalah penandatanganan MoU Jeda Kemanusiaan antara Komite Eksekutif ULMWP, Markus Haluk, dengan Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik pada November 2022 (Ramandey, 2023). Dalam proses pelaksanaannya, LIPI yang telah berganti nama menjadi BRIN tidak dilibatkan, sedangkan Sekjen JDP turut diundang sebagai pengamat dalam acara tersebut.

Namun demikian, MoU Jeda Kemanusiaan yang ditujukan untuk penyelesaian konflik di Maybrat ini tidak dapat dijalankan di lapangan karena beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, pengurus Komnas HAM yang menandatangani MoU ini secara hukum telah kedaluwarsa masa jabatannya dan tidak melibatkan pengurus Komnas HAM yang baru. Pengurus Komnas HAM yang baru tidak melanjutkan Jeda Kemanusiaan karena bukan termasuk tugas dan wewenang mereka secara konstitusional. *Kedua*, TNI/Polri dan Menkopolhukam tidak terikat pada MoU ini karena MoU ini merupakan inisiatif Komnas HAM. Dengan kata lain,

MoU ini tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia. *Ketiga*, TPN-PB juga tidak mengakui Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani oleh ULMWP dan merasa tidak terikat. Setelah tiga bulan tidak ada implementasinya, MoU ini telah kedaluwarsa pada Februari 2022. Tidak lama setelah itu, terjadi penyanderaan pilot New Zealand, Philip Mehrrens, oleh TPN-PB di bawah Panglima Komando Daerah Perang Ndugama-Derekma.

5. Pertemuan Eksploratif dan Implikasinya terhadap Pembangunan Perdamaian

Melalui serangkaian pertemuan eksploratif, JDP merumuskan delapan masalah yang dihadapi masyarakat Papua. Masalah-masalah tersebut adalah: a) konflik vertikal meliputi stigma separatistis, pelarangan penggunaan simbol-simbol daerah, kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan kelompok bersenjata Indonesia, dan konflik nasionalisme Indonesia versus etnonasionalisme Papua, b) kekerasan politik dalam pilkada, perpecahan, dan korupsi, c) ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah dengan implementasinya, terutama yang kurang memperhatikan nilai-nilai lokal, d) hambatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, e) kebijakan keamanan negara, tetapi tidak pada keamanan manusia, f) ketidakharmonisan pelaksanaan ekonomi modern dan tradisional serta hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang tidak terlindungi, g) terbatas dan tidak meratanya tenaga pengajar yang berkualitas dan sarana/prasarana pendidikan, serta kurikulum sekolah yang belum mengakomodasi nilai-nilai budaya Papua, h) terbatasnya dan tidak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang masih rendah, kurangnya program-program perbaikan gizi masyarakat, masih tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, dan tingginya angka *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) (LIPI & JDP, 2015: 3-4).

Peserta pertemuan eksploratif dari Papua lebih banyak menanggapi masalah stigmatisasi separatisme, penggunaan simbol-simbol budaya Papua, dan kekerasan di Puncak Jaya di mana sejumlah aparat TNI dan Organisasi Papua Merdeka terlibat konflik bersenjata. Topik lainnya adalah banyaknya kebijakan dan regulasi untuk Papua, namun masyarakat Papua melihat hanya sedikit kebijakan dan regulasi yang sudah diimplementasikan, sementara beberapa di antaranya gagal diimplementasikan, seperti UU No. 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa mereka telah berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap masalah konflik politik, keamanan, sosial-ekonomi, dan aspek pembangunan lainnya, meskipun pemerintah juga memiliki kendala dalam koordinasi dan implementasi program.

Pemerintah juga menegaskan akan berdiskusi dengan berbagai kelompok kepentingan di Papua, termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Masalah keamanan, hukum, dan politik menjadi isu yang sensitif dalam pertemuan eksploratif tersebut. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait aspek keamanan, hukum, dan politik, bukan hanya masalah pembangunan di Papua. Masih ada perbedaan sudut pandang mengenai akar masalah, dan masalah di Papua didasari oleh realitas tertentu, yaitu nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Selain itu, ada perbedaan persepsi antara pembatasan akses ke Papua dengan tidak adanya akses ke Papua, terutama bagi jurnalis asing.

Permasalahan sosial ekonomi di Papua mendapatkan banyak perhatian dari para peserta dialog. Misalnya: perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi; peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam; pemberdayaan masyarakat; pengelolaan sumber daya Papua dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; serta membangun infrastruktur, terutama untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di sektor pelayanan pendidikan, direkomendasikan untuk membuat kurikulum khusus Papua dengan mempertimbangkan daerah-daerah terpencil, mengingat ketidakmampuan beberapa kelompok etnis untuk berbicara dengan bahasa Indonesia dan tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Rekomendasi lainnya adalah membuka sekolah berasrama terkait dengan sulitnya akses ke beberapa daerah; sekolah berasrama untuk suku tertentu. Mereka yang berada di sektor pelayanan kesehatan direkomendasikan untuk melakukan hal-hal berikut: meningkatkan pelayanan kesehatan dan menggabungkan pelayanan kesehatan tradisional dan modern untuk masyarakat terpencil di Papua. Mereka yang berada di sektor ekonomi didukung untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas hak atas tanah dan kepemilikan.

Masalah sosial dan budaya di Papua yang juga dibahas dalam pertemuan eksploratif tersebut terutama mengenai masalah pendidikan di Papua dan perlunya memandang budaya sebagai suatu totalitas dan faktor penentu Papua dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Papua. Isu lainnya adalah perlunya penggunaan bahasa/dialek lokal sebagai bagian dari kurikulum. Hal lain yang dibahas adalah pemetaan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah adat serta pengorganisasian dan pembentukan kembali Dewan Adat Papua (DAP) (LIPI dan JDP, 2015).¹ Topik ini telah sering dibahas dalam wacana

¹ Rangkuman hasil pertemuan eksploratif, "Upaya mencapai konsensus untuk perdamaian di Papua".

akademik, misalnya: Martanto (2007: 183-184) mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua berdampak pada keberlanjutan suku-suku Papua karena kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada alam.

Salah satu implikasi dari pertemuan-pertemuan eksploratif adalah bahwa gagasan dialog kemudian dibahas secara lebih luas di kalangan pejabat pemerintah nasional dan masyarakat Papua. Beberapa pejabat pemerintah pusat yang moderat mulai memahami bahwa dialog diperlukan untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia bersedia untuk berdialog dengan masyarakat Papua, termasuk mereka yang ingin memerdekakan Papua. Namun, pemerintah pusat tidak memiliki peta jalan yang komprehensif untuk dialog damai. Di sisi lain, beberapa pemimpin gereja dan organisasi suku Papua juga mendukung gagasan dialog untuk mengakhiri kekerasan politik di Tanah Papua.

Namun demikian, hasil pertemuan eksploratif hanya sebatas wacana di tingkat personal, yaitu para pejabat pemerintah dan juga para pemimpin Papua. Delegasi pemerintah dalam pertemuan eksploratif tersebut pada kenyataannya tidak memiliki otoritas ketika kembali ke institusinya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ideologi nasionalisme-chauvinisme di kalangan pejabat pemerintah pusat warisan rezim otoriter Orde Baru. Situasi politik di Papua menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan politik yang dilakukan oleh militer dan polisi terhadap masyarakat Papua masih terus terjadi. Meningkatnya kekerasan di Papua mengurangi komitmen pemerintah terhadap penyelesaian damai Papua. Kekerasan ini meliputi penculikan, penembakan, penangkapan, ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh warga sipil di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat.

6. Refleksi terhadap JDP dan Papua Road Map

Beberapa tulisan yang merefleksikan perjalanan JDP dan *Papua Road Map* sudah banyak dipublikasikan oleh akademisi dan peneliti. Salah satunya adalah Budi Hernawan dalam buku bunga rampai mengenang Muridan S. Widjojo (Tirtosudarmo dan Pamungkas, 2021). Budi Hernawan mengatakan,

“Sejak Pater Neles jatuh sakit dan sepeninggal Muridan Widjojo, aktivitas JDP menurun drastis. Di bawah kepemimpinan Adriana Elisabeth LIPI masih terus mengadakan diplomasi ke kalangan petinggi pemerintah dalam dialog sektoral, tetapi di tingkat Papua dialog tidak lagi menjadi sebuah gerakan rakyat. Ide dialog tetap digaungkan, tetapi intensitas kegiatan di tingkat akar rumput tidak

ada lagi. Petisi Rakyat Papua yang digelar untuk menolak Otsus Jilid II, misalnya, diorganisasi oleh kalangan muda Papua, bukan oleh JDP.”

Setelah Pater Neles dan Muridan Widjojo meninggal, JDP masih ada dan melakukan beberapa kampanye perdamaian, namun terbatas pada kalangan elit di Jakarta. Sementara di akar rumput, kampanye dialog tidak lagi dilakukan oleh JDP karena terbatasnya sumber daya. Gerakan di akar rumput ini diorganisasi oleh Petisi Rakyat Papua; tidak lagi membicarakan dialog, namun lebih pada penolakan Otonomi Khusus jilid II dan pemekaran provinsi serta menuntut hak menentukan nasib sendiri. Budi Hernawan (2021) juga menyebutkan, setelah Muridan dan Pater Neles, JDP mengalami kesulitan untuk mendorong dialog Jakarta-Papua selama beberapa waktu. Sekarang, Pater John Bunay memimpin JDP. Sejauh ini, peran JDP sebagai penggerak dinamika di akar rumput belum terlihat lagi, seperti konsultasi publik pada awalnya. Pater John Bunay mengeluarkan seruan beberapa kali, tetapi lebih banyak dalam konteks internal Gereja. Selain itu, belum ada kegiatan diplomasi di tingkat presiden yang melanjutkan upaya sebelumnya.

Budi Hernawan (2021) juga mempertanyakan relevansi konsep dialog. Mengapa tingkat kekerasan di Papua masih tinggi, meskipun telah dilakukan banyak perjalanan untuk mendorong perdamaian dan diskusi? Banyak orang di Papua masih mempertanyakan konsep dialog. Dengan kata lain, seberapa penting percakapan Jakarta-Papua saat ini di tengah eskalasi kekerasan di Papua? Namun, dalam pandangan aktivis-aktivis perdamaian yang kami jumpai di Tanah Papua, dialog yang sekarang ini mendesak adalah dialog untuk menghentikan kekerasan politik antara TNI/Poldi dan ULMWP, atau disebut sebagai dialog kemanusiaan. Persoalannya adalah, dialog untuk kemanusiaan yang pernah dicoba, seperti MoU Jeda Kemanusiaan pada 2022, hasilnya tidak diimplementasikan sehingga muncul *distrust* tinggi antar-pihak yang berkonflik.

Penulis lain, Nino Viartasiwi (2013) mengatakan bahwa tantangan JDP yang dihadapi pada awal berdirinya adalah kompleksitas persoalan dan pluralitas aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Papua. Hal ini menjadikan JDP harus memiliki strategi dengan memilih fasilitator dan mediator dialog yang tidak memiliki interes di Tanah Papua. Hal ini ini menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi JDP dalam perjalanannya, namun kepemimpinan JDP selalu mengingatkan anggotanya bahwa jaringan ini adalah jembatan yang menghubungkan para pihak yang berkonflik, bukan salah satu aktor konflik.

Proses perdamaian yang sulit di Tanah Papua mungkin disebabkan oleh cara berpikir yang melandasinya, seperti *Papua Road Map*. Salah satu kritik penting dari buku *Papua Road Map* (2008), adalah minimnya kajian ini untuk merekognisi

“orientasi-orientasi” orang Papua yang tidak selalu sejalan dengan orientasi pembangunan dalam konteks negara bangsa Indonesia. Jika kita mencermati, kajian PRM dengan tajam menggambarkan empat akar permasalahan Papua (status politik, kekerasan, “kegagalan” pembangunan, dan marginalisasi orang Papua), namun alpa merekognisi apa dan bagaimana “orientasi-orientasi Papua” mengimajinasikan empat masalah mendasar tersebut. Intinya adalah, nilai dan pengetahuan orang Papua, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana respons dan rumusan orang Papua sendiri terhadap diri dan masa depan mereka terhadap empat akar permasalahan Papua tersebut.

Kami mengadaptasi pemikiran ini dari artikel Jaap Timmer (2021), “Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map” di buku *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah PRM dan gagasan dialog Jakarta-Papua memberikan ruang dan nuansa bagi orang Papua sendiri untuk mengimajinasikan dirinya, relasi mereka dengan alam, leluhur, dan orientasi kehidupan dan pengetahuan mereka yang sering kali tidak penad (relevan) dengan orientasi kemajuan dan negara-bangsa Indonesia?

Akar rasisme pembangunan dan pemaksaan “kemajuan” telah melahirkan ingatan kekerasan dan penderitaan yang menubuh (baca: hidup dalam keseharian hidup orang Papua). Rasisme pembangunan dan pemaksaan kemajuan hingga kini terus berlangsung dengan bahasa yang dipercanggih melalui konektivitas melalui infrastruktur hingga kawasan ekonomi eksklusif. Apa yang hilang dari hal ini? Menurut saya yang hilang adalah rekognisi terhadap kekayaan-kekayaan pengetahuan berkaitan dengan orientasi-orientasi Papua dan usaha kita memahaminya.

Salah satu hal terpenting dan menjadi urat nadi berbagai kompleksitas permasalahan Papua adalah pertanyaan berkaitan dengan usaha merekognisi identitas Papua agar menjadi subjek dalam proses politik dan pembangunan. Apa bentuknya dan bagaimana melakukannya?

Gagasan menempatkan orang Papua sebagai subjek politik dan pembangunan terhadap tembok perspektif NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati yang diterjemahkan dalam “keras” maupun “halus”. Penerapan yang “keras” berhubungan dengan pendekatan militeristik yang melahirkan sejarah penyiksaan, kekerasan, dan rasisme dalam relasi orang Papua dengan institusi-institusi kekerasan Indonesia. Penerapan lainnya juga berkaitan dengan eksploitasi alam Papua yang dilakukan jejaring korporasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengaveling alam Papua dengan ber-

bagai perusahaan ekstraktif maupun sawit. Penerapan yang “halus” berkaitan dengan penyingkiran orang Papua berkedok pembangunan untuk kemajuan yang bias migran (pendatang), elit (Papua), dan juga birokratis. Cara halus ini juga berhubungan dengan serangkaian pengetahuan yang direproduksi oleh kaum cerdas pandai atau akademisi tentang Papua yang kolonialistik dan juga menjadi legitimasi pemerintah dan korporasi untuk mengeruk alam Papua.

Jaap Timmer secara retorik mengungkapkan bahwa gagasan yang dikemukakan PRM justru terbatas “hanya” pada bagaimana orang Papua memahami dirinya dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Ia menuliskan bahwa sasaran utama PRM adalah “rekognisi (identitas Papua) harus diarahkan agar orang asli Papua menjadi subjek dalam proses politik dan pembangunan”. PRM baginya tidak memberi nuansa pada proses rekognisi ini, tetapi malah menggunakan gagasan negara-bangsa Indonesia sebagai titik tolak. Akibatnya, PRM hanya memberikan sedikit ruang untuk cara orang mengetahui siapa mereka, rasa kebersamaan mereka, dan cara mereka menciptakan diri (Timmer, 2021: 309).

Tindak lanjutnya adalah rangkaian pertemuan dari berbagai *stakeholder* (pengampu kepentingan) baik dari pihak Pemerintah Indonesia maupun berbagai elemen dari rakyat Papua yang difasilitasi oleh JDP (Jaringan Damai Papua). Berbagai istilah kemudian bermunculan: dialog damai, dialog sektoral, dialog konstruktif, hingga berbagai lembaga dan program yang mengurus “percepatan” pembangunan Papua. Terkini, pemekaran daerah disebut untuk tujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tanah Papua dibagi-bagi oleh kewenangan Pemerintah Indonesia yang didukung oleh para elit lokal sebagai “tim sukses”.

Serangkaian kerangka konseptual “memaksa” orang Papua masuk dalam skema pembangunan dan modernitas yang ditentukan negara. Di antara kerangka tersebut misalnya pembangunan (modernitas), kemajuan kolonial, agama, dan konsep negara bangsa. Kerangka-kerangka tersebut mengharapakan masyarakat Papua untuk menjadi bagian dari modernitas, sejarah, dan masa depan Indonesia. Apabila tidak ikut dalam proses kemajuan negara yang berlangsung cepat, mereka tidak bisa ikut serta dalam semua program sosialisasi dan pembangunannya. Kemajuan memberikan dasar untuk memasukkan orang Papua dalam modernitas Indonesia bersama dan ini membatasi “kemungkinan untuk membayangkan dan memberlakukan penentuan nasib sendiri sebagai pribumi”.

Pengabaian “orientasi-orientasi Papua” ini berlangsung masif, yang perlahan-lahan diadaptasi oleh orang Papua sendiri dalam cara pandang mereka. Sejatinya orang Papua memiliki pengetahuan dan gagasan yang memperkuat kekuatan

imajinasi dan gagasan religius tentang kedaulatan lokal dan gagasan terkait bangsa mereka. Bentuk-bentuk kehidupan yang dihasilkan dibangun di atas hubungan asli dengan tanah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertanyaan selanjutnya yang patut dielaborasi adalah bagaimana berpikir tentang tanah, hubungan mereka dengan kerabat, leluhur, roh, Tuhan, dan entitas non-manusia (Timmer, 2021: 309-317).

Pengabaian “orientasi-orientasi Papua” berlangsung beriringan dengan penyingkiran orang Papua dari atas tanahnya sendiri. Penyingkiran tersebut adalah perampasan secara perlahan-lahan rakyat Papua di tanahnya sendiri. Inilah yang sering disebut dengan sistem kolonialisme baru pemukim (*settler colonialism*), yang menekankan kepada invasi “para penjajah” yang datang untuk mengeliminasi (baca: menyingkirkan) komunitas lokal (tempatan), membubarkannya, dan kemudian mendominasi wilayah yang sebelumnya menjadi tanah leluhur masyarakat pribumi tersebut.

Rangkaian sistem kolonialisme baru pemukim tersebut bisa dilacak dengan merangkai berbagai peristiwa invasi yang dialami oleh masyarakat pribumi (Papua) yang saling berkait dan menunjukkan tujuan politiknya. Seperti dengan tegas ditekankan oleh Wolfe (2006: 388), logika *settler colonialism* adalah menghancurkan untuk menggantikan masyarakat pribumi dari serangkaian peristiwa invasi yang tidak berdiri sendiri, namun mencipta sebuah struktur penjajahan yang tampak “memberdayakan”, halus, dan berlangsung sehari-hari.

Menuju dialog damai Papua, sangat perlu memasukkan “orientasi-orientasi Papua” ini di dalamnya. Hal ini sekaligus juga menantang pengetahuan dan pemahaman kita terhadap keberagaman kosmologi budaya dan pengetahuan tentang kedaulatan identitas orang Papua, yang selama ini disederhanakan, bahkan dianggap tidak ada. Cara ini harus dilakukan untuk memberikan nuansa dan cakrawala yang menyemaikan pemahaman kita terhadap Papua, yang selama ini terkungkung oleh proyek politik NKRI harga mati dan pembangunan untuk kemajuan. Pada momentum inilah sebenarnya kita memulai gerakan memahami Papua yang selama ini berlangsung dalam kepura-puraan semata.

7. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di muka, kami sampai pada kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, perjalanan JDP sejak pembentukannya sampai sekarang penuh dengan dinamika. Pembentukan jaringan ini merupakan tindak lanjut dari gagasan dialog yang diajukan dalam buku *Papua Road Map* dan *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Almarhum Muridan Widjojo dan almarhum Pater Neles Tebay

merupakan dua tokoh sentral dalam pendirian dan perjalanan JDP dari 2010-2014. Dalam perjalanannya, JDP aktif melakukan kampanye publik mengenai pentingnya dialog Jakarta-Papua baik di antara masyarakat Papua maupun publik nasional. Sejumlah konsultasi publik dan Konferensi Perdamaian Papua merupakan hasil karya JDP pada awal perjalanannya. Setelah Muridan meninggal dunia, ide dialog juga disuarakan di Jakarta melalui berbagai pertemuan eksploratif dan dialog dengan Presiden Joko Widodo pada 2015. Presiden menerima gagasan dialog sektoral, tetapi tidak menyetujui dialog Jakarta-Papua, namun sampai Pater Neles meninggal, tidak ada satu pun dialog sektoral dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, pasca-meninggalnya Pater Neles, JDP masih melakukan kampanye dialog secara terbatas, namun tidak lagi berperan signifikan dalam upaya dialog Jakarta-Papua. Diplomasi dan diseminasi gagasan dialog masih disuarakan oleh JDP di Jakarta maupun di Papua, namun mengalami beberapa kendala, terutama sumber daya dan masa pandemi. Sementara di akar rumput masyarakat Papua, kampanye dialog Jakarta-Papua sudah digantikan oleh gerakan untuk menolak revisi Otsus dan pemekaran, yang dilakukan oleh kalangan anak muda Papua yang kritis. Bila ditelusuri lebih jauh, baik *Papua Road Map* maupun gagasan dialog JDP dinilai tidak memberikan ruang bagi orientasi-orientasi orang Papua yang berbeda dengan Indonesia. Hasil pertemuan eksploratif yang dilakukan JDP lebih bersifat diskursif, tetapi tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yang tidak mengikat institusi atau organisasi yang diwakilinya.

Namun demikian, dialog di tengah meningkatnya kekerasan politik di Papua pada masa kini masih tetap penting, terutama dialog kemanusiaan untuk menghentikan konflik bersenjata. Dialog seperti jeda kemanusiaan masih dibutuhkan, mengingat masih terjebaknya warga sipil dalam konflik di sejumlah tempat, terutama di Pegunungan Tengah Papua. Selain itu juga untuk mengatasi persoalan pengungsi yang masih belum ditangani dengan baik

Daftar Pustaka

- Hernawan, Y.B. (2013). *From The Theatre of Torture to The Theatre of Peace: The Politics of Torture and Re-imagining Peacebuilding in Papua, Indonesia*. (Disertasi pada Australia National University).
- Hernawan, B. (2021). "Dialog Jakarta-Papua, Apa Masih Relevan?" dalam: *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*. Jakarta: Imparsial. Pp. 323-340.
- LIPI & JDP. (2015). *Policy Brief Bersama-sama Membangun Papua Damai*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI dan Jaringan Damai Papua.

- Martanto, U. (2007). "Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security." dalam: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 173-192.
- Ramandey, F. (2022). *Membuka Ruang Membangun Dialog: Laporan Tim Pemantauan dan Negosiasi di Papua 2021-2022*. Jayapura: Lamalera.
- Rangkuman Hasil Pertemuan Eksploratif. (2017). Laporan Pertemuan Eksploratif LIPI dan JDP (tidak diterbitkan).
- Supriyono, J. (2014). "Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara." dalam: *Jurnal Ultima Humaniora*, 2(1), 59-78.
- Tebay, N. (2009). *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: SKP-KC.
- Timmer, J. (2021). "Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map." dalam: *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*. Jakarta: Imparsial. Pp. 307-321.
- Viartasiwi, N. (2013). "The Prospect of Mediation in West Papua-Indonesia Conflict Transformation." dalam: *Chinese Journal of International Review*, 26, 2.
- Widjojo, M.S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, and Securing The Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Widjojo, M.S & Tebay, N. (2014). *Indikator Papua Tanah Damai versi Masyarakat Papua*. Jayapura: JDP.
- Wiratri, A. (2017). "Peran LIPI dan Proses Perdamaian Papua." dalam: S. Rusdiarti & C. Pamungkas (Eds.), *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua* (43-96). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017.
- Wolfe, P. (2006). "Settler Colonialism and the Elimination of the Native." dalam: *Journal of Genocide Research*, 8(4), 387-409.

Data Media

- "Orang Papua harus bicara pengganti juru runding Papua Ondawame." (2014, 11 Oktober). Diakses dari <http://tabloidjubi.com/2014/10/11/orang-papua-harus-bicara-pengganti-juru-runding-papua-ondawame/>, diakses pada 20 Januari 2016.
- "Pers release JDP." (n.a). Diakses dari http://www.jdp-dialog.org/download/cat_view/17-pers-release-jaringan-damai-papua?orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC diakses pada 13 Maret 2016.
- "Profil JDP." (n.a). Diakses dari <http://jdp-dialog.org/profil/tentang-jdp> diakses pada 14 Maret 2016.

Saat Cenderawasih Jatuh ke Tanah

BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Papua adalah permata. Papua adalah simpanan kekayaan. Ini bukan kiasan karena beratus meter di kedalaman tanah tersimpan kekayaan yang akan membuat silau siapa pun. Negara yang pernah dijuluki sebagai negara adidaya, Amerika Serikat, pernah menikmati siraman kekayaan dari emas yang dikeruknya dari Tanah Papua. Lebih dari 50 tahun lamanya emas yang tersimpan di perut Pegunungan Carstenz dibongkar dengan menembus badan gunung hingga kedalaman.

Papua adalah surga. Surga menjadi atribut salah satu satwanya, burung cenderawasih, *the birds-of-paradise* dari keluarga Paradisaeidae. Beberapa dari anggota keluarga burung surga ini hanya ditemukan di Papua.

Papua adalah benteng terakhir bumi dalam menghadapi “krisis perubahan iklim”—lebih tepat “darurat iklim”. Kalimat semacam ini sering kali terdengar dalam berbagai peristiwa, menegaskan posisi Papua. Di perhelatan global, mulai dari pemerintah berbagai negara, lembaga internasional, dan kalangan masyarakat sipil menunjuk Papua dengan hutannya sebagai benteng pertahanan terakhir bumi menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Secara akademik, pernyataan tersebut sangat beralasan. Dari luasan pulau sekitar 420.000 hektar, hutan Papua menutup lebih dari 70 persen daratan.

Keberagaman tinggi adalah keniscayaan di Papua. Hutan yang membentang dari dataran rendah hingga pegunungan adalah sebuah kantong keberagaman untuk semua bentuk kehidupan. Tumbuhan, satwa, dan manusia yang hidup di dalam dan di sekitar hutan memiliki kekhasan masing-masing bergantung pada lokasi di mana mereka hidup. Mencuplik contoh kekayaan Papua di secuil wilayahnya, yaitu Misool, Raja Ampat, Papua, di sana hidup 574 jenis terumbu karang, 553 jenis ikan karang (Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016). Pada saat buku itu dicetak, spot tersebut dikenal sebagai kawasan laut terkaya dengan kekayaan kehati yang tertinggi di dunia.

Berada di posisi ujung timur Indonesia, Papua tak hanya istimewa dari segi kekayaan keahliannya, baik kualitas (banyak satwa dan tumbuhan endemik ditemukan di sana) maupun jumlahnya yang berlimpah. Dari sisi antropologi, Papua kaya akan keberagaman suku yang hidup tersebar dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan budaya yang beragam, dengan cara hidup yang beragam karena tantangan alam yang mereka hadapi berbeda-beda.

Alih-alih mendapatkan perlakuan istimewa untuk mendapatkan kesejahteraan, Papua sebagai “anak bungsu” keluarga besar NKRI justru menjadi yang sering ditinggalkan. Janji melalui otonomi khusus tak menjadi kenyataan, sebaliknya kekayaan alam Papua menjadi incaran. Prinsip “*trickle down effect*” yang dipercaya dalam era Pemerintahan Soeharto sama sekali tidak ada jejaknya di Papua. Kesenjangan barat-timur demikian tajam ketika bahkan harga bahan bangunan pun bisa menjadi 10 kali lipat di Papua dan harga BBM bisa menyentuh angka 6 kali lipat harga di Indonesia bagian barat, wilayah yang dekat dengan pusat.

Paradigma pembangunan rupanya tak berubah dari waktu ke waktu. Prinsip pembangunan konvensional bahwa pembangunan infrastruktur menjadi keniscayaan untuk menyejahterakan masyarakat, tetap dipegang oleh pemerintah. Maka, pemerintahan Presiden Jokowi dalam periode kedua tanpa ragu membelah Papua dengan pembangunan infrastruktur. Tak jelas berapa luasan hutan yang telah dibabat demi pembangunan infrastruktur. Yang menjadi persoalan, proses pembangunan tersebut meninggalkan prosedur “*free prior informed consent*” yang mengutamakan prinsip partisipatif masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Jalan yang dikatakan telah dibangun sepanjang 3.446 km tersebut (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/12/20/08060251/sederet-fakta-jalan-trans-papua-panjangnya-4-kali-lipat-jarak-jakarta>) masih akan dilanjutkan dengan ruas jalan Mamberamo-Eleelim. Jalan tersebut telah membelah dan menggunduli hutan di sepanjang jalurnya. Jika setidaknya lebar jalan adalah 11 meter, maka luas permukaan jalan (minimal) menjadi sekitar 37.900 hektar; seluas itulah hutan yang dibabat. Tahun 2024, Pemerintahan Jokowi menargetkan untuk menyelesaikan jalur jalan Jayapura-Wamena sepanjang 575 km sebagai bagian dari Trans Papua.

Papua yang Terfragmentasi

Papua sebagai satu entitas pulau besar dengan tutupan hutan yang lebat dan luas kini terancam tercabik. Dibuka sebagai jalan adalah salah satunya,

sementara secara politis Papua yang semula hanya terbagi menjadi dua provinsi kini telah terbagi menjadi enam provinsi. Pemekaran provinsi, pembagian wilayah administrasi tak semata berdampak secara politis. Dengan pemekaran dan menjadikannya provinsi-provinsi yang lebih kecil seperti membuka kotak pandora, membuka peluang bagi para perusak lingkungan untuk semakin mudah berkiprah. Semakin banyak provinsi maka peluang alih fungsi pun semakin besar, hutan yang terancam alih fungsi pun semakin besar.

Pembukaan lahan hutan dengan izin luas maksimal dari satu wilayah provinsi atau kabupaten bisa berhimpitan dengan kawasan hutan dari daerah yang berbatasan langsung. Secara langsung maka luas lahan yang dibuka bisa menjadi satu lanskap yang lebih luas sehingga risiko kerusakan ekosistem menjadi lebih tinggi. Penolakan akan pemekaran diwarnai demonstrasi menjadi ungkapan suara hati masyarakat Papua. Mereka menyadari, pemekaran hanya menjadi jalan yang mempermudah penguasaan lahan, sama seperti pembuatan jalan hanya menjadi cara memuluskan transportasi sumber daya alam yang digali.

Pembukaan jalan dan pemekaran wilayah di Papua dampaknya tidak sesederhana jika hal yang sama dilakukan di pulau yang padat penduduk, seperti Jawa. Di Papua, setiap jengkal tanah ada pemiliknya, mulai dari tingkatan marga hingga suku, yang jumlahnya pun tak sedikit. Satu suku bisa memiliki lebih dari tiga marga. Pemekaran wilayah hanya akan memisahkan sesama marga atau suku, menghilangkan sebagian ruang hidup mereka yang berdampak pada rusaknya tatanan hidup, budaya, dan tatanan adat istiadat mereka.

Masyarakat adat Papua yang kebanyakan hidup dari kegiatan berburu dan meramu akan kehilangan hewan buruan dan tumbuhan yang mereka butuhkan, sejalan dengan lenyapnya hutan mereka. Di tataran budaya, kosakata pun akan turut menghilang bersamaan dengan hilangnya ruang aktivitas mereka. Kata “berburu” atau “meramu” atau kata “babi hutan” –dengan bahasa lokal– terancam hilang karena kata-kata itu tak lagi memiliki makna penting dalam kehidupan mereka.

Menyongsong Bencana

Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Papua adalah tak ada sejengkal pun tanah di Papua yang tak bertuan. Marga, suku, dan komunitas adalah pemilik setiap jengkal lahan di Papua. Persoalannya, mereka belum pernah disapa sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan berbagai haknya. Hak atas tempat tinggal dan hak untuk hidup sesuai dengan budayanya, sesuai dengan ajaran

nenek moyangnya, serta untuk mendapatkan haknya untuk hidup di lingkungan yang sehat.

Masyarakat adat Papua belum pernah mendapatkan manfaat dari implementasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Hak ulayat atau hak atas hutan adat hingga sekarang baru tujuh daerah yang mendapatkannya sejak lahirnya Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi merupakan hutan negara. Tujuh hutan adat yang mendapatkan surat keputusan sebagai hutan adat yaitu enam di Kabupaten Jayapura dan satu di Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas total 40.881,9 hektar. Dengan mendapatkan hak atas hutan adat, masyarakat secara hukum berhak mengatur pemanfaatannya sendiri.

Keputusan MK No. 35 rupanya bukan pil penyembuh semua penyakit. Proyek demi proyek nasional terus membanjir ke Papua yang kini menjadi satu-satunya pulau yang masih menyimpan kekayaan di tubuhnya. Laporan investigasi *The Gecko Project* (2018) membongkar semua krisis agraria dan deforestasi di Indonesia (<https://thegeckoproject.org/id/topics/papua>), di antaranya Proyek Tanah Merah yang menyasar hutan alam rumah dari Suku Awyu. Satu hamparan seluas 280.000 hektar bakal dijadikan perkebunan kelapa sawit, terbentang dari Kali Mappi hingga Kali Digoel.

Hutan bagi suku Awyu dan semua masyarakat adat adalah toko serba ada yang serba lengkap. Untuk kebutuhan pangan, papan, obat-obatan, sumber pengetahuan, bahan pembelajaran tentang kehidupan mereka, tempat mereka melakukan ritual, ruang sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Untuk keperluan pendidikan, misalnya, mereka bisa menjual kayu atau sagu pada waktu membutuhkan uang yang cukup banyak.

Praktik yang mengabaikan proses berdasarkan prinsip FPIC menjadi praktik yang marak hampir di setiap cerita pemberian konsesi lahan hutan kepada investor. Hal ini telah menjadi sejarah kelam di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang hutannya telah berubah menjadi “karpet sawit” jika dilihat dari udara. Partisipasi warga dipalsukan dengan menggunakan orang tertentu, sementara mereka yang tidak setuju pendapatnya tidak dimasukkan ke dalam laporan. Proses sosialisasi sering kali hanya menjadi seremoni tanpa benar-benar melibatkan warga yang bersangkutan.

Masyarakat Awyu melaporkan dugaan akan adanya proses perizinan dalam Proyek Tanah Merah kepada pihak Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mereka pun telah mengajukan gugatan ke PTUN. Mereka pun bersurat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun

gugatan melalui jalur meja hijau tersebut pada 2 November lalu ditolak oleh PTUN Jayapura. Disebutkan bahwa dalil penggugat yang menyebutkan bahwa izin kelayakan perkebunan sawit tersebut bertentangan dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, dan keadilan dinilai tidak relevan.

Kisah protes dan gugatan warga Woro dari suku Awyu adalah kepingan cerita dari apa yang terjadi di Papua dan umum terjadi di berbagai sudut pulau di Indonesia. Logika pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan global tak berlaku di sini. Pembangunan dengan logika ekstraktif menjadi asas pembangunan nasional demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi nasional. Kesepakatan global yang berprinsip “*no one left behind*”, tak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, tak berlaku di kawasan hutan dengan masyarakat adatnya.

Pujian terhadap Papua sebagai benteng terakhir pertahanan bumi terhadap perusakan lingkungan tak bermakna di akar rumput. Prinsip yang dipercayai dan sering didengungkan di konferensi global bahwa masyarakat adat adalah “penjaga bumi” tak lagi bergema di lapangan. Itulah fakta nyata di lapangan, yang sekarang sedang dihadapi oleh warga, marga, dan suku di Papua. Hutan alam dan kekayaan alam di dalamnya bukan lagi berkah bagi mereka, berbalik menjadi “kutukan”.

Kita hanya bisa merasakan betapa rasa kehilangan yang ditanggung warga Papua akibat praktik pembangunan yang mengutamakan praktik ekstraktif. Anak-anak Awyu dan anak-anak adat Papua akan kehilangan identitasnya, mereka tak akan lagi tahu bagaimana mereka harus hidup karena ruang hidup yang menjadi ruang budaya dan ruang ekonomi mereka telah dilenyapkan dalam “seketika” di saat mereka “tidur”—tak ada proses pembelajaran atau persiapan soal bagaimana cara mereka hidup dalam budaya baru yang mereka hadapi, budaya yang tak lagi berkawan dengan alam. Istilah Yulia Sugandi dalam suatu acara kebudayaan bulan Oktober lalu, budaya masyarakat adat adalah budaya regeneratif yang berkait erat dengan pewarisan identitas.

Dari semua cerita pembabatan hutan yang akan berakibat pada “penggundulan bumi” ini, para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan adalah manusia-manusia yang memandang alam sekitarnya sebagai “sesuatu yang di luar dirinya”. Padahal alam adalah sebuah entitas tak terbatas yang berisikan semua yang ada di alam yang semuanya saling berinteraksi positif maupun negatif yang berlangsung sedemikian rupa dengan tujuan mempertahankan kelangsungan kehidupan dan kelangsungan bumi.

Masyarakat adatlah penjaga kelangsungan (hidup) bumi. Dengan menjaga hutan maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan pasokan oksigen, air tanah,

pangan, obat-obatan, bahan untuk papan. Bumi menyediakan semuanya bagi manusia secara gratis.

Sayangnya, para pembuat kebijakan dan praktik pembangunan telah melenyapkan semua itu yang pada akhirnya hanya akan berbuah kesengsaraan melalui bencana-bencana: tanah longsor, banjir, kebakaran hutan. Indonesia tinggal menunggu waktu untuk mengalami bencana yang bisa jadi akan tak terbayar nantinya.

Ada satu kalimat sederhana yang bagi pendengarnya bisa sangat membekas. Kalimat itu diucapkan seorang warga Papua dalam suatu acara kebudayaan Papua. “Burung cenderawasih akan jatuh ke tanah karena tak ada lagi tempat untuk hinggap saat dia melompat...”

BAGIAN 2

Marginalisasi dan Diskriminasi

Mahasiswa Papua di Perantauan

ANTIE SOLAIMAN

Ini adalah secuplik cerita saya tentang suka duka perjalanan para mahasiswa Papua yang merantau untuk studi di Pulau Jawa, khususnya yang pernah saya dampingi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta.

Generasi Awal

Beberapa saat setelah New York Agreement yang disepakati oleh Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat tentang status Papua, Presiden Soekarno langsung mengirim puluhan mahasiswa untuk menempuh pendidikan ke Pulau Jawa. Dalam rombongan pertama ini mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, diundang untuk bergabung meskipun pada waktu itu ia belum menyelesaikan SMA-nya.

Pada 10 November 1962, berdasarkan Keputusan Presiden, didirikanlah Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, tempat anak-anak muda diimbau untuk melanjutkan studinya. Jurusan yang dibuka adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Hukum. Dosen-dosen didatangkan dari Jawa dan Sulawesi. Namun, selain ke Uncen, anak-anak muda juga dikirim ke sekolah-sekolah di luar Papua, antara lain Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Manado, dan kota lainnya. Bapak Freddy Numberi dan Ibu Annie Betawi adalah orang-orang yang termasuk rombongan ini. Menyusul kemudian angkatan Dr. James Modouw yang melanjutkan studi FKIP di Yogyakarta dan di kemudian hari melanjutkan studinya ke Amerika.

Para mahasiswa tinggal di asrama. Sampai hari ini asrama-asrama itu masih berdiri, antara lain Asrama Kamasan di Yogyakarta dan di Bandung. Di Jakarta tidak dibangun asrama, melainkan mes berlantai tiga, kamar-kamarnya luas, dengan konstruksi dari besi. Letaknya di pusat kota, persisnya di kampung Tanah Abang, di belakang Thamrin City Mall. Mantan Gubernur Papua Barat, Jenderal

Abraham Atururi, pernah tinggal di sana. Saat ini mes sudah tidak lagi dihuni mahasiswa, melainkan menjadi tempat tinggal keluarga.

Cukup banyak di antara mereka yang kemudian menikah dengan orang-orang setempat, antara lain Dr. James Modouw, Ir. Karafir, Dr. Frans Wanggai, Nafuny, Gerson, dan lain-lain.

Mahasiswa perantau angkatan pertama berasal dari daerah-daerah seperti Biak, Jayapura, Serui, Merauke, dan Manokwari.

Asrama UKI

Pada tahun 1990-an datang beberapa mahasiswa Papua, antara lain Demianus Wanimbo, Jeffry Papare, Titus Tambaip, Albert, Ertson Saragih, Willy Hegemur, Decky Rumbiak, Frans Sisir Rumbino, Jeffry Papare, Michael Beanal, Alex Kayame, dan Jimmy Ijie. Banyak nama lainnya yang saya sudah lupa. Semuanya laki-laki. Pada tahun-tahun itu, banyak anak Papua terlibat urusan politik yang menyebabkan mereka sulit mengatur waktu. Terlebih lagi, waktu itu “kota-kota perjuangan” ini mulai terhubung lewat ponsel yang mulai populer dengan biaya pulsa yang makin terjangkau. Anak-anak Papua yang berada di Jakarta berkomunikasi dengan mereka yang berada di Yogyakarta dan Bandung, dan membentuk Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Setelah Reformasi, Bupati Merauke adalah satu-satunya kepala daerah Papua yang melakukan perjanjian dengan UKI untuk menerima putra-putri Merauke, khususnya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Meski awalnya hanya berhasil 60-70 persen, pengiriman mahasiswa ke Fakultas Kedokteran terus berlanjut. Ini juga yang antara lain mendorong FK UKI untuk mengirim tenaga-tenaga dokter muda ke wilayah Papua, antara lain ke Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Manokwari.

Tahun 2000-an, semakin banyak pelajar dari Papua melanjutkan pendidikan di UKI. Umumnya mereka masuk dengan biaya pribadi, entah dari dana keluarga murni atau dari sponsor yang diupayakan oleh keluarga. Mulai ada anak-anak perempuan. Dari Merauke cukup banyak yang perempuan. Mayoritas masuk Fakultas Kedokteran, tapi kemudian merambah juga ke fakultas-fakultas lain, seperti Sastra Mandarin, Ekonomi, dan Hukum.

Di luar program Pemda Merauke yang memang membuat *MoU* dengan pihak Rektorat, sponsor studi datang juga dari Gereja dan lembaga-lembaga lain yang peduli seperti Pijar Lentera dan Pesat Nabire. Selain dari Merauke, juga ada mahasiswa dari Nabire, Mimika, Manokwari, Serui, Wondama, Kaimana, Fakfak, juga dari Pegunungan Tengah seperti Wamena, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Deyai, dan lain-lain.

UKI kemudian membangun asrama di lingkungan kampus untuk menampung mahasiswa dari wilayah “Tiga T” (tertinggal, terpencil, terisolir), antara lain dari Mentawai dan Papua. Di asrama mereka hidup dengan cara baru. Semuanya serba teratur: bangun pagi, korve, tugas memasak dan berbelanja, menyapu, mengepel, dan berkebun. Semua kegiatan diatur dengan jam yang telah ditentukan, termasuk kapan boleh bermain di luar, kapan harus belajar, kapan harus tidur. Salah satu yang sangat mereka tidak sukai adalah aturan bahwa lampu kamar harus mati pada pukul 11 malam. Mereka menghadap pimpinan asrama untuk protes dan mengajukan keberatan. Alasannya, pukul 11 malam sama sekali belum waktunya mengantuk. Keberatan ditolak pimpinan asrama karena pada pukul 5 pagi mereka semua sudah harus bangun dan mengikuti doa pagi.

Mereka yang datang tanpa sponsor umumnya indekos di sekitar kampus UKI. Sejak itulah rumah-rumah kos mulai menjamur di sekitaran UKI, dari yang sempit kecil tanpa fasilitas apa pun, hingga yang mewah dengan AC, kamar mandi dalam, dapur, lemari baju, kursi, meja tulis. Kategori yang terakhir ini biasanya diambil oleh anak-anak pejabat, sementara mereka yang datang dengan biaya sendiri umumnya tinggal di rumah kos kecil kategori pertama tadi.

Sepengetahuan saya, ada beberapa asrama Papua yang disponsori oleh pemerintah daerah. Asrama yang dimiliki pemda antara lain Asrama Yahukimo di Condet, Asrama Jengky Jayawijaya di Halim, dan Asrama Wissel Meren milik Pemda Nabire di Tebet. Ada juga asrama-asrama lain yang statusnya bukan dimiliki, melainkan hanya disewa oleh pemda, seperti Asrama Fakfak, Asrama Kaimana, Asrama Wamena di Jakarta Selatan, dan asrama di Tangerang.

Di asrama UKI bisa dikatakan semuanya gratis, termasuk makan minum dan alat-alat kebersihan. Nama asrama ini sekarang adalah Asrama Yap Thiam Hien, diambil dari salah satu pendiri UKI, ahli hukum dan tokoh pembela hak asasi manusia yang disegani di Republik ini.

Asrama juga menerima kunjungan pelayanan dari kelompok-kelompok Gereja. Ada yang datang mengajarkan cara berkebun. Ada yang datang dengan memberikan makanan dan minuman, sarung bantal, gorden, handuk, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Biasanya mereka datang dalam rombongan, kadang disisipi dengan kebaktian, puji-pujian, dan makan bersama.

Sekitar tahun 2004-2005, kami pernah mendapatkan bantuan satu truk besar penuh bahan makanan, berkarung-karung beras, minyak goreng, makanan kaleng, mie instan, dan tas ransel. Jika tak salah ingat, bantuan ini datang dari salah seorang anak keluarga William Soerjadjaja. Tidak ada dokumen yang kami tandatangani selain pernyataan bahwa truk pengangkut telah datang dengan

baik. Karena beras yang kami terima sedemikian banyaknya, saya mengambil kebijakan untuk membagikannya juga kepada anak-anak Papua lain di luar UKI.

Kami dua kali menerima kunjungan Ibu Annie Numberi, istri Bapak Freddy Numberi mantan Menteri Perhubungan. Pada kunjungan pertama, Ibu Annie melihat-lihat kamar anak-anak, mengobrol, memberi nasihat, dan berdoa bersama anak-anak. Pada kunjungan kedua, Ibu Annie datang dengan membawa berkilo-kilo daging. Kulkas sampai penuh. Untuk beberapa hari lamanya anak-anak makan daging sepuas-puasnya.

Orang penting berikut yang mengunjungi anak-anak adalah Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze. Akan tetapi, waktu kunjungan beliau tidak lama karena ditarik untuk siaran di Radio UKI yang terletak di lantai atas.

Pada kesempatan lain ada juga kunjungan dari istri seorang rektor UKI. Beliau datang bersama kawan-kawan sepelayanannya. Uniknya, ibu tersebut memainkan gitarnya sambil bernyanyi. Kunjungan ditutup dengan makan siang bersama. Mereka membawa makanan dengan panci-panci besar, juga minuman es buah. Anak-anak tentu saja senang.

Pertengahan sampai akhir 1990-an, datang beberapa anak dari berbagai daerah dengan sponsor pribadi, entah itu dari kakek, bapak tua, bapak muda (paman), made (mama adik, bibi). Mahasiswa dari Mimika disponsori oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Amungme dan Kamoro (LPMK), sementara dari Jayapura disponsori oleh Gereja GKI. Lainnya datang dari Fakfak, Kaimana, Biak, Serui, Sorong, dan Manokwari. Ada yang pada awalnya dibiayai pemerintah daerah, setelah itu dilanjutkan oleh keluarga. Seperti umumnya keluarga Papua, biaya studi sering ditanggung bersama oleh keluarga besar, misalnya tahun 1-2 ditanggung oleh bapak adik, tahun 3-4 ditanggung oleh bapak tua, dan biaya wisuda ditanggung oleh mama adik. Tiket untuk datang menghadiri acara wisuda dimintakan dari pemda.

Awal tahun 2000, mulai berdatangan anak-anak perempuan. Banyak yang masuk ke Fakultas Kedokteran, baik utusan dari Pemda Merauke maupun dari kalangan anak-anak pejabat, antara lain anak Bupati Nabire, Isaias Douw, dan cucu Kepala Dinas RRI Manokwari. Sebagian lain masuk ke Fakultas Hukum (antara lain Tina Wanimbo Pagawak, anak Kepala Dinas Sosial, Bapak Liur Pagawak), Fakultas Ekonomi (antara lain anak anggota DPRD Nabire), Fisipol Jurusan Hubungan Internasional (antara lain Alex Kayame, anak Sekda Nabire, dan lainnya).

Tahun 2007, anak-anak berdatangan dalam jumlah yang cukup besar. Mahasiswa dari Merauke disponsori oleh Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua (GPI). Di antara mereka ada yang datang dari Kaimana, Boven Digoel,

dan desa-desa kecil di sekitar Merauke. Di bandara kami sambut kedatangan mereka yang tampak cukup kelelahan akibat perjalanan panjang selama 7-8 jam. Sesampai di asrama, muncul masalah. Jumlah tempat tidur yang tersedia lebih sedikit dari jumlah orang yang hendak tidur. Maka, pendamping dari Merauke yang adalah seorang pendeta bergegas pergi membeli beberapa kasur tambahan supaya anak-anak bisa beristirahat dengan baik.

Mereka tersebar ke sejumlah fakultas, antara lain Hukum, Ekonomi, Fisipol Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional, Pajak, dan Fisioterapi. Namun, sayang sekali, dari 12 anak yang dikirim 80 persen tidak berhasil menuntaskan studi. Pada semester kedua, 3 orang terpaksa *drop out*. Menurut laporan dosen, mereka sering tidak masuk kuliah. Setelah diselidiki, rupanya dorongan untuk makan pinang (sirih) cukup besar sehingga di tengah-tengah kuliah mereka berani ke luar ruangan hanya untuk makan pinang, tapi kemudian tidak kembali lagi.

Rombongan lain datang dari Nabire. Mereka sudah diseleksi oleh pihak sekolah. Sponsornya adalah Lembaga Pelayanan Pesat Nabire (Sekolah Anak Panah) di bawah pimpinan Pastor Daniel Alexander. Secara umum anak-anak Nabire ini relatif lebih siap karena mereka berasal dari sekolah yang sama. Bahkan ada satu dua yang sudah pernah tinggal di Jawa ketika SMA sehingga kesulitan-kesulitan budaya sudah teratasi. Di UKI mereka masuk ke berbagai fakultas, seperti Hukum, Fisipol, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional, Teknik Sipil, Elektro, Arsitektur, dan Ekonomi. Secara umum mereka bisa dibilang berhasil. Hanya 20 persen yang gagal.

Yang dimaksudkan dengan “sponsor” adalah pihak yang membantu pembiayaan kepergian calon mahasiswa dari Papua. Biaya perkuliahan dan proses-proses lainnya biasanya diserahkan kepada pihak UKI. Di sinilah para pendamping cukup sering menemui kesulitan. Ada yang datang secara pribadi, berbekal uang seadanya, dan berharap universitas akan menolongnya. Pernah terjadi seorang mahasiswa dari Yahukimo datang menemui saya. Ia minta untuk bisa mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. Saya menerimanya dan ia pun mengikuti kuliah sampai tiga semester. Kemudian hari, dia juga meminta saya untuk membantu mengatasi kesulitannya dalam hal biaya kos dan makan minum. Sayang sekali, saya tidak bisa memenuhinya karena sudah ada sekitar sembilan orang mahasiswa yang saya tanggung saat itu. Jika dihitung-hitung, mungkin ada sekitar dua puluhan anak yang datang menemui saya dengan maksud seperti itu. Biasanya kami segera mencarikan bantuan dalam bentuk uluran tangan pribadi-pribadi.

Pada tahun 2012, datang rombongan khusus dari Papua. Menurut berita, mereka akan masuk ke sekolah Dinas Perhubungan karena mendengar kabar

bahwa Departemen Perhubungan membuka kesempatan kerja bagi para lulusan SMA atau sederajat. Yang datang sekitar dua puluhan orang, berasal dari Nabire, Kaimana, Timika, Deyai, dan Jayapura. Semuanya laki-laki. Tes dilaksanakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI. Anehnya, tidak ada staf UKI yang terlibat selain menyiapkan meja kursi dan makan siang. Lebih aneh lagi, setelah tes itu, tidak satu pun dari para peserta mendapat kabar mengenai kelanjutannya. Mereka kecewa berat karena sudah jauh-jauh datang dengan harapan bisa masuk sekolah Dinas Perhubungan. Ada satu anak yang pada malam setelah mengikuti tes bermimpi naik perahu dan tiba pada satu pulau yang indah. Ia kepada saya, “Mama, saya pasti lulus. Tuhan sudah kasih tahu saya.” Betapa kecewanya karena tes itu tampaknya sekadar formalitas belaka. Yang sesungguhnya terjadi adalah tidak ada proses selanjutnya. Saya beberapa kali menanyakan hal ini ke pihak terkait, tetapi hanya dijawab “nanti tunggu kabar”. Baru di kemudian hari kami tahu bahwa pada waktu itu sedang terjadi masalah dalam keluarga petinggi Kementerian Perhubungan yang berdampak pada gagalnya program tersebut. Untuk dua puluhan anak itu, saya memohon kebijakan UKI agar memperkenankan mereka tes masuk ke fakultas-fakultas yang mereka inginkan. Sayangnya, tidak semua dari mereka ini selesai sampai ke garis akhir.

Tantangan di Ruang Kuliah

Di UKI mahasiswa Papua diterima dengan baik. Di kelas-kelas perkuliahan, mahasiswa Papua diperlakukan sama seperti mahasiswa lainnya. Hanya untuk menjelaskan kasus-kasus tertentu, diperlukan ekstra upaya. Para dosen melakukan demikian karena memahami kondisi anak-anak ini yang berasal dari daerah dengan kondisi pendidikan yang masih jauh tertinggal, dengan fasilitas yang serba minim, kelangkaan guru, dan kekurangan bahan ajar, dan tiba-tiba berada di kota besar Jakarta yang serba sangat berbeda kondisinya.

Jika dibandingkan dengan mahasiswa lainnya, anak-anak Papua perlu penyesuaian lebih banyak. Ada yang masih sulit membedakan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, belum lagi soal pembagian alinea dan penulisan kata-kata dengan ejaan yang baku. Mereka biasanya menulis berdasarkan bunyi mulut atau apa yang didengar. Misalnya, ada yang menulis “mendukun” untuk kata *mendukung*, “langkah” untuk kata *langka*, dan “bedah” untuk kata *beda*. Ketiadaan bahan bacaan di kampung, miskinnya informasi akibat tidak ada TV, tidak ada listrik, tidak ada *wi-fi*, tidak adanya forum-forum diskusi yang memadai menyebabkan wawasan orang-orang muda ini terbatas. Tahun-tahun awal adalah

tahun-tahun tersulit bagi mereka. Nanti setelah masuk tahun kedua atau ketiga, barulah mereka mulai bisa menyesuaikan diri.

Syukurlah, anak-anak ini bisa bicara dalam bahasa Indonesia dengan sesamanya yang datang dari Papua. Bahasa Indonesia menyatukan mereka. Bahasa daerah hanya mereka gunakan ketika bertemu dengan teman sesama suku. Yang berasal dari kota seperti Jayapura, Manokwari, Biak, atau Sorong kebanyakan sudah cukup terbiasa dengan bahasa Indonesia. Hal ini cukup memudahkan kami dalam mendampingi mereka. Namun, agak berbeda halnya dengan mereka yang datang langsung dari pedalaman. Mereka kadang sulit mengekspresikan diri dalam bahasa Indonesia dengan cepat karena kurangnya perbendaharaan kata. Jadi, sangat dimengerti kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak dari pedalaman ketika harus membuat makalah.

Kesulitan juga dialami ketika mereka diminta untuk melakukan analisis bacaan. Mengapa? Karena selama mereka bersekolah dari SD sampai SMA, perbandingan hampir tidak ada, apalagi bila jadwal sekolah “bolong-bolong” seperti yang banyak terjadi di pedalaman. Anak-anak bisa begitu saja meninggalkan sekolah selama satu dua bulan karena mengikuti orang tua mencari nafkah. Di Mamberamo, misalnya saja, mereka bisa meninggalkan sekolah dalam waktu lama karena ikut membantu orang tua mencari buaya. Ditambah lagi, karena pelbagai keterbatasan, sekolah-sekolah di pedalaman sering terpaksa menelantarkan administrasi persekolahan. Setiap tahun murid-murid pasti naik kelas.

Mahasiswa Papua cukup tertolong apabila bekerja dalam kelompok. Redaksi *paper* bisa dibantu diperbaiki oleh kelompok. Dalam presentasi mereka bisa didukung oleh teman dalam kelompoknya. Semua mahasiswa lain pada umumnya bisa memahami kesulitan-kesulitan kawan-kawan mereka ini.

Anak-anak Papua mengalami beban ganda, yaitu beban akademik dan beban budaya. Selain itu, ada juga beban stigma daerah tertinggal, sekolah tidak layak atau belum maju. Dan itu semua benar. Namun, toh, itu tidak berarti bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak bisa diatasi. Mereka yang semula belum bisa menggunakan komputer, setelah 1-2 semester, ternyata sudah bisa membiasakan diri. Tentu saja tidak semua anak-anak itu berada pada kecepatan yang sama. Ada yang bisa cepat menyesuaikan, ada juga yang lebih lambat. Dalam ujian skripsi ada yang lancar menjawab pertanyaan dosen penguji dan ada juga yang tersendat sehingga ada yang langsung lulus dan ada juga yang perlu membuat revisi berat.

Bahasa Inggris juga menjadi masalah. Mereka tak terbiasa mendengar kata-kata asing yang digunakan oleh anak-anak lain di perkotaan Jawa. Kesempatan itu sangat langka. Tidak ada orang asing di kampung, tidak ada TV, tidak ada buku-

buku, tidak ada koran, tidak ada film yang diputar dalam bahasa Inggris. Bahkan pada tahun-tahun 1980-an pun listrik belum rata ada di kampung-kampung. Sampai awal tahun 2000-an, kota-kota besar, bahkan ibu kota provinsi pun, masih kerap mengalami pemadaman listrik.

Mabuk

Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak Papua adalah dalam kerangka proses sosial: perilaku yang berbeda, kebiasaan hidup yang berbeda, budaya dan tradisi yang berbeda. Awalnya, lingkungan kampus di sekitar Cawang terkaget-kaget juga. Ada sekitar 200-an orang yang tinggal di kos sekeliling UKI. Belum lagi yang tinggal di asrama. Ada berbagai tingkah yang dilakukan oleh anak-anak Papua yang tidak dilakukan oleh anak-anak lain.

Salah satu fenomena yang sangat merusak reputasi anak-anak Papua di lingkungan Cawang adalah mabuk. Tentu saja ada orang-orang lain non-Papua yang juga suka mabuk, tetapi frekuensi mabuk ini sangat tinggi di kalangan anak Papua. Mengalami sesuatu yang menggembirakan sedikit saja mereka rayakan dengan minum dan berakhir dengan mabuk. Mendapat kiriman uang dari rumah, misalnya, mereka rayakan dengan membeli minuman. Akibat dari mabuk ini sangat banyak, mulai dari yang ringan sebatas omong-omong sendiri sampai yang tingkat berat seperti berurusan dengan polisi atau masuk rumah sakit.

Ada seorang mahasiswa yang terbiasa mabuk. Waktu itu dia naik motor dalam keadaan mabuk dan melepaskan tangannya dari setang. Otomatis dia terguling dan teman yang diboncengnya jatuh luka parah sampai harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu. Waktu kami tiba di kantor polisi, keduanya tak bisa menjelaskan apa yang terjadi selain bahwa mereka sebelumnya minum. Polisi tidak bisa menentukan siapa yang salah. Karena satu anak luka cukup parah, kami hubungi orang tuanya. Mereka datang, menunggu proses operasi, lalu membawa sang anak pulang ke Manokwari. Yang mengendarai motor minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang, tetapi dalam catatan kami, dia masih melakukannya lagi beberapa kali.

Lain waktu, ada dua anak mabuk setelah selesai ujian. Saking mabuknya, mereka berkelahi sampai berdarah-darah dan akhirnya terpaksa berurusan dengan polisi. Ada lagi pasangan pacar mabuk berdua. Entah bagaimana, bertengkarlah mereka. Si anak perempuan dipukuli sehingga mukanya luka-luka. Bahkan matanya perlu tindakan perawatan khusus karena efek kerasnya pukulan. Esok harinya, mereka datang minta maaf kepada saya dan menyatakan menyesal.

Mabuk juga menimbulkan rasa jengah dari warga sekitar. Ada satu anak dari Merauke yang dikenal sebagai tukang mabuk. Kalau mabuk, dia sering keluar dari kamar kos lalu berjalan keluar masuk gang sambil melontarkan kata-kata ancaman. Warga kampung membiarkannya saja karena mereka tahu nanti dia akan pulang sendiri dan masuk kamar kosnya. Tetapi suatu kali mabuknya berlangsung lama, lebih dari satu jam. Warga pun memanggil polisi untuk menangkapnya. Saya yang dilaporkan bergegas datang ke sana. Melihat saya dari pihak universitas, dia berhenti berteriak-teriak dan menunduk-nunduk. Saya minta dia pulang dan masuk ke kamar kos untuk tidur. Perilakunya mengganggu aktivitas warga. Anak ini kemudian dikeluarkan karena prestasi akademik yang buruk dan masa studi sudah habis.

Ada satu lagi anak yang suka mabuk dan tertidur di kantin. Mungkin dia mabuk setelah menjelang pagi sehingga sampai tengah hari dia masih tertidur di kantin yang sudah penuh pengunjung. Dia dibangunkan satpam dan diminta pulang. Akan tetapi, karena mengantuk berat, dia berdebat dengan satpam dan menyinggung tentang hak asasi. Menurut dia, adalah hak mahasiswa untuk ada di kantin. Setelah lama berdebat dengan satpam, si mahasiswa tak juga paham kenapa dia diminta meninggalkan tempat tersebut. Suasana semakin panas. Kebetulan saya datang. Kontan saya tegur dia, "Tinus, ayo pulang. Kamu tidak bisa tidur di bangku kantin ini." Dia langsung tersadar dan menjawab, "Baik, Mama. Baik, Mama." Dia salah satu mahasiswa di kelas saya. Sayangnya, Tinus juga pulang ke Merauke tanpa menyelesaikan studinya.

Kebiasaan mabuk ini sangat merugikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga merugikan semua anak Papua. Ada stigma buruk terhadap anak-anak Papua yang laki-laki. Oleh karena perilaku mabuk itu, banyak usaha kos yang menolak menerima anak Papua. Mereka bisa diterima kalau ada yang membawanya, misal teman senior yang pernah kos di situ atau sudah cukup dikenal oleh warga dan berperilaku baik.

Satu kali ada seorang anak Papua masuk ke sebuah rumah kos. Ketika ditanya dari mana asalnya, ia memperkenalkan diri sebagai orang Sangir, Sulawesi Utara. Memang anak ini tidak berkulit hitam dan rambutnya tidak tampak keriting, hanya bergelombang saja. Ketika pemilik kos meminta KTP, dia terkejut, "Kamu orang Papua rupanya. Kenapa bohong dengan menyebut diri sebagai orang Sangir?" Jawab anak itu, "Saya memang orang Sangir. Tapi saya lahir di Timika, dan dari kecil sampai besar saya tinggal di Timika." Jadilah dia lolos. Waktu dia menceritakan ini kepada saya, dia tertawa-tawa senang karena merasa telah mengalahkan pemilik kos.

Waktu saya mengunjungi asrama Yahukimo di Condet, saya kaget karena banyak handel pintu terlepas, termasuk handel toilet. Kaca-kaca ruang tamu juga sudah banyak yang pecah tak beraturan. Waktu saya tanya, mereka bilang “ada teman yang merusak”. Pada kesempatan kunjungan lain, saya menemukan kursi ada yang patah-patah kakinya, disebutkan juga “dirusak oleh teman”. Rupanya, di antara mereka tidak ada yang berani menghadapi orang mabuk. Orang mabuk cenderung dibiarkan, ditolerir. Asrama Yahukimo di Condet adalah bangunan yang sangat bagus. Lantainya terbuat dari marmer, bukan keramik biasa. Asrama ini dibeli sekitar tahun 2000-an oleh Bupati dengan uang Pemda. Selain fasilitas asrama, Bupati juga melengkapinya dengan dua sepeda motor untuk memudahkan urusan. Juga ada seperangkat *sound system* guna keperluan kebaktian. Tetapi gara-gara ada satu mahasiswa penghuni yang sering mabuk, maka apa yang diberikan untuk maksud baik itu jadi rusak. Kalau hari ini kita datang ke asrama Condet, maka rasa sedih saja yang menggelayuti hati kita. Saya mendengar, setelah dua tahun mahasiswa pemabuk itu “merajalela”, akhirnya dia meninggalkan asrama, dibawa pulang keluarga ke Papua karena dianggap gagal dalam studi.

Awalnya, asrama ini dihuni oleh anak-anak laki dan perempuan. Terdapat 7-8 kamar, dua di antaranya disediakan untuk mahasiswa perempuan. Tetapi dengan adanya pemabuk di antara mereka, anak-anak perempuan meninggalkan asrama. Mereka takut tidur di kamar yang tanpa kunci, takut pergi ke toilet yang tanpa kunci. Peristiwa ini terjadi antara tahun 2011-2012.

Hamil di Luar Nikah

Usia muda, perkembangan hormon, dan perasaan bebas karena jauh dari pengawasan orang tua kadang menjadi latar belakang muda-mudi jatuh dalam pergaulan bebas dan kasus hamil di luar nikah. Itu juga terjadi pada anak-anak Papua perantau ini, walaupun tentu saja ini fenomena yang umum, bisa terjadi pada anak muda dari mana saja. Dan akibat yang juga umum terjadi pihak perempuanlah yang biasanya paling banyak menanggung akibatnya.

Suatu kali terjadi seorang mahasiswi hamil. Pacarnya teman dari satu daerah. Mereka berdua sama-sama mahasiswa baru. Kami panggil si laki-laki untuk meminta membicarakan kelanjutannya. Antara lain kami menawarkan pilihan bagi mereka untuk menikah di catatan sipil dan mendapatkan pemberkatan dari Gereja. Kami jelaskan hal ini perlu agar si bayi punya akte kelahiran. Kalau dia setuju, maka kami akan segera mengontak keluarga dan sponsor. Tapi jawab si laki-laki, “Mama jangan menghabisi masa depan saya. Saya masih muda, umur

19 tahun. Tidak mungkin saya menikah dan berkeluarga.” Pihak perempuan cenderung pasrah, meskipun mengaku bahwa sebetulnya mereka bukan pacaran, baru saling suka saja. Karena sudah sungguh-sungguh ditolak oleh pihak laki-laki, maka selanjutnya kami antar anak perempuan ini ke sebuah *shelter* yang dilayani oleh lembaga Gereja di Sentul. Kami lalu menghubungi keluarganya di Mappy. Ternyata dia anak yatim. Akhirnya, salah seorang tantenya datang ke Jakarta walaupun tidak terlalu lama karena esok harinya dia harus segera balik ke Mappy. Sang tante bisa menerima ketika kami jelaskan bahwa kami terpaksa harus menghentikan perkuliahannya seperti yang tertulis dalam perjanjian yang sudah disepakati ketika anak-anak ini datang. Menurut perjanjian, beasiswa akan dihentikan apabila berturut-turut selama dua tahun indeks prestasi tidak mencapai 1,7, melanggar peraturan asrama, melanggar moral seperti hamil di luar ikatan perkawinan, melakukan pencurian, dan beberapa hal lainnya.

Kami tetap terus mendampingi mahasiswi kami ini sampai melahirkan. Di *shelter* itu diatur bahwa setelah kelahiran genap tiga bulan, maka sang ibu diminta meninggalkan *shelter* dengan membawa bayinya, atau meninggalkannya untuk diserahkan kepada yayasan yang mengelola *shelter* tersebut untuk kemudian dicarikan keluarga yang bersedia mengadopsinya. Puji Tuhan, ada salah seorang dosen yang bersedia menampung sang ibu muda dan bayinya untuk tinggal di rumahnya. Si ibu muda ini juga diberi kesempatan untuk meneruskan kuliah. Sekarang ia sudah menjadi sarjana dari universitas lain, dan anaknya sudah masuk sekolah. Sementara itu, pihak laki-laki tetap kuliah di UKI hingga selesai. Saya menjadi dosen pembimbing skripsinya empat tahun kemudian.

Kasus lainnya. Lagi-lagi, seorang mahasiswi hamil. Karena mereka bukan lagi di semester-semester awal, saya mencoba menengahi. Saya ajak pihak laki-laki untuk bertemu dengan keluarga perempuan yang kebetulan tinggal di Jakarta. Si perempuan bukan anak Papua, tapi sesama mahasiswa UKI, hanya beda fakultas. Setelah memperkenalkan diri, meminta maaf, dan menjelaskan apa yang terjadi, kami mulai membicarakan kelanjutannya. Awalnya, disepakati bahwa mereka akan menikah di gereja dan di catatan sipil. Karena sang mahasiswi sudah tidak punya ayah, maka kami bicara dengan ibu dan dua anaknya yang sudah dewasa. Setelah proses komunikasi sekitar dua minggu lamanya, si laki-laki menjadi galau dan membatalkan kesepakatan tadi. Dia merasa terbebani karena belum bekerja. Ia merasa belum siap memimpin keluarga. Sang perempuan tentu saja kecewa berat.

Hampir tiap dua hari mereka menghubungi saya atau datang ke kamar dosen. Lalu suatu hari, si perempuan berhenti mendesak-desak lagi. Setelah sebulan,

keduanya bahkan berhenti berkomunikasi. Sekuat apa pun saya membujuk, si laki-laki tetap bergeming. Sempat dikatakannya, “Mama, saya tidak akan menikah dengan perempuan yang gampang.” Baginya gadis yang ditidurinya itu adalah gadis yang gampang. Ternyata ada dua orang yang melakukan hal itu, bukan satu saja. Juga hal itu mereka lakukan di kos si laki-laki. Begitulah, kira-kira tujuh bulan kemudian bayi dilahirkan di RS UKI. Si laki-laki tidak mau datang, bahkan minta dilakukan tes DNA. Pihak perempuan menuruti permintaan itu. Hasilnya, benar dia bapaknya. Semua biaya ditanggung oleh pihak perempuan. Saya dengar dari keluarga perempuan, anak bayi itu diasuh oleh keluarga kerabat dan saat ini berada di Jepang. Sang mahasiswi tidak melanjutkan kuliah, sementara sang pemuda tetap kuliah hingga selesai.

Pernah juga terjadi peristiwa yang agak tragis sekitar tahun 2002. Entah bagaimana, seorang mahasiswi melahirkan di kloset. Bergegas teman-temannya membawanya ke RS UKI. Sayang sekali, sang bayi tidak dapat diselamatkan. Ketika saya akan kunjungi lagi sekitar 1-2 minggu kemudian, ternyata sang mahasiswi sudah pulang ke Papua, mungkin karena rasa malu dan bingung.

Kejadian lain tahun 2007. Sepasang muda-mudi berpacaran dan si perempuan hamil. Tiba saatnya melahirkan, si laki-laki terus-terusan menunda sampai akhirnya air ketuban pecah. Karena panik dan kesakitan, sang pemuda dilarikan ke RS Pasar Rebo. Untung saja, bayi lahir normal, hanya si ibu yang memerlukan perawatan ekstra. Lebih seminggu dia terpaksa menginap di rumah sakit. Sejak kehamilan memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit Ketika saat persalinan tiba? Alasan si laki-laki, “Saya tidak ada uang.” Akhirnya, keluarga perempuan datang setelah diberi tahu bahwa anaknya dirawat. Mereka membayar semuanya.

Jatuh Sakit

Saat-saat awal kedatangan di Jakarta, beberapa anak sakit demam. Ternyata malaria. Mungkin karena kecapaian akibat padatnya acara, berangkat dari desa menuju kota, naik pesawat, turun di bandara, mengikuti acara penyambutan, berpindah-pindah tempat, masuk asrama, dan sebagainya, malaria pun kambuh. Pernah terjadi dalam kurun waktu satu tahun sempat dirawat karena malaria. Umumnya yang terkena adalah mahasiswa di awal-awal kedatangan mereka ke Jakarta. Setelah cukup waktu beradaptasi, malaria tidak pernah lagi datang.

Penyakit berikut yang cukup kerap menyerang anak Papua adalah TBC. Gejalanya demam tinggi dan pusing berkepanjangan. Kami bawa mereka ke rumah sakit. Darah diperiksa, rontgen, dan lain-lain. Ternyata mereka terkena TBC dan

harus dirawat. Setelah seminggu, mereka dibolehkan pulang dengan minum obat selama enam bulan. TBC umumnya kita jumpai pada anak-anak laki-laki, tidak hanya mereka di tahun-tahun awal, tetapi juga mereka yang sudah 3-4 tahun di Jakarta. Ditengarai hal ini terjadi karena mereka suka begadang, bercerita (ini istilah Papua untuk *ngobrol*, *ngerumpi*) sampai larut malam. Terkadang mereka baru bubar jam dua pagi. Tidak heran, mereka jadi sering terlambat masuk kelas.

Ada satu kasus yang cukup mengkhawatirkan. Satu anak asal dari Yahukimo tiba-tiba panas tinggi, mual, lemas, diare, sakit perut, dan pusing. Dia kami larikan ke rumah sakit, tapi dokter belum bisa menentukan sakit apa. Sampai perawatan hari kedua, dokter belum juga tahu penyakitnya. Tiba-tiba satu dokter asal Papua berinisiatif memeriksa limpa dan lain-lain. Dan benarlah, pasien ini terkena infeksi cacing pita atau *Taeniasis*. Bagaimana pikiran dokter bisa ke situ? Dokter bilang, sebagai orang Papua dia tahu bahwa di lingkungan itu ada budaya “bakar batu”, yaitu memasak daging di atas batu yang dipanasi dengan cara dibakar. Kemungkinan infeksi didapat dari situ, yakni terselip di daging babi yang tidak terbakar sempurna. Anak ini dirawat beberapa hari dan pulang dalam keadaan sehat.

Kami bersyukur UKI memiliki rumah sakit yang mudah diakses. Juga ada perlakuan khusus untuk mahasiswa yang sakit. Pada waktu itu mahasiswa memiliki kartu khusus untuk berobat tanpa dikenakan biaya. Untuk tindakan-tindakan khusus seperti operasi besar, tentu akan ada tambahan biaya.

Lain waktu, satu anak minta saya berdoa karena dia sakit. Hari berikutnya, saya datang. Aduh, kondisinya ternyata parah. Dia tidur dengan dada terbuka tanpa baju. Kasur tanpa seprei digelar di ruang tamu, bahkan persis di depan pintu masuk. Tubuhnya panas sekali dan terus-terusan mengeluh sakit perut. Dia sudah tidak makan dua hari, juga tidak minum. Tidak ada teman-teman yang melayaninya karena semua sibuk dengan urusan perkuliahan masing-masing. Saya beli nasi, menyuapinya, dan juga membeli beberapa botol air minum ukuran besar. Dispenser yang ada di ruang tamu teronggok kosong dan berdebu. Saya tidak bisa membawanya ke rumah sakit karena saya seorang diri. Anak ini tidak bisa berdiri. Menurut penjelasannya, sudah lebih dari seminggu dia dalam keadaan seperti ini.

Esok harinya, saya datang lagi menjenguknya. Anak Yahukimo ini terus mengeluh sakit yang luar biasa. Saya panggil taksi dan minta abang taksi menggotongnya ke dalam mobil, lalu meluncur ke Rumah Sakit UKI, masuk UGD. Dokter bilang harus dilakukan tindakan, dan saya diminta memberi uang muka. Tidak biasanya, saya tidak ada cukup uang di dompet, sudah habis untuk

pemeriksaan darah, feses, dan lain-lain. Tiba-tiba salah satu anak menyusul dan mengusulkan untuk membawanya ke RS Polri Kramat Jati.

Suasana RS Polri ini sangat berbeda, tidak biasa buat saya. Di bagian penerimaan berdatangan pasien dengan kondisi yang berdarah-darah, penjahat yang ditembak, orang yang mencoba bunuh diri, yang tersengat listrik, dan lain-lain. Semua ditaruh begitu saja. Untung ada dokumen hasil pemeriksaan laboratorium dari RS UKI sehingga memudahkan proses. Sampai subuh pukul dua pagi saya menunggu pasien. Jam lima, anak kita baru bisa masuk ke kamar, diinfus, diberi obat, dipasang kateter, dan lain-lain. Saya kemudian pamit pulang untuk beristirahat.

Hari berikutnya saya datang berusaha menemui dokter, tapi saya ditemui oleh petugas, mungkin perawat. Dijelaskan ini itu, tapi intinya adalah anak ini harus segera dioperasi. Ususnya harus dipotong beberapa centimeter karena membusuk. Biaya operasi 10 juta, plus biaya perawatan. Saya bersyukur karena penyakit anak kita sudah diketahui. Antara lain akibat kurang konsumsi air, plus kuman di usus. Saya berdoa dan menghubungi keluarga dan teman-teman. Dana operasi ada. Tetapi obat-obat lain yang harus dimasukkan ke tubuh pasien, baik sebelum maupun sesudahnya, jumlahnya sama besar, sekitar 10 juta juga. Awalnya mulai dengan membeli alat-alat untuk keperluan pasien 1,5 juta, obat-obatan 3 juta, transfusi darah, dan seterusnya. Setelah dirawat 12 hari, akhirnya si anak sembuh dan diperbolehkan pulang. Waktu saya menjemputnya, pihak rumah sakit menyodorkan rekening lagi 5 juta untuk visitasi dokter dan perawatan makan minum. Saya berdoa, dan entah bagaimana, waktu saya menghadap pimpinan, mereka membolehkan pasien pulang tanpa membayar 5 juta itu. Petugas administrasi bilang ada jenderal yang membayar. Puji Tuhan.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2007. Saat ini ini si anak yang sakit itu sudah balik ke Yahukimo dan menjadi kepala desa.

Tantangan Besar untuk Disiplin

Mereka yang kuliahnya dibiayai oleh UKI harus menyepakati perjanjian yang ditandatangani saat awal masuk. Salah satunya adalah bahwa beasiswa akan dihentikan apabila secara berturut-turut indeks prestasi tidak mencapai 1,7. Artinya, semua mata kuliah cukup mendapat nilai C dengan beberapa D. Sepintas terasa bahwa itu bukan standar yang sulit dicapai. Tetapi untuk mahasiswa Papua lain halnya. Karena pelbagai kondisi keterbatasan di Papua, sekolah sangat longgar dalam disiplin dan pemberian nilai. Ketika anak-anak ini harus bersekolah di Jawa, mereka menghadapi kondisi yang sangat jauh berbeda. Mereka tidak

terbiasa mencari bahan-bahan di perpustakaan, membuat tugas-tugas tidak tertangani dengan baik. Beberapa anak tidak terbuka tentang kesulitan yang dialaminya. Jadi, bukannya menceritakannya kepada sesama kawan atau senior untuk dicarikan jalan keluarnya, melainkan justru diam. Kalau ditanya “Apakah ada masalah,” jawabnya “Tidak ada”. Memang tahun-tahun awal adalah yang paling sulit. Mereka harus banyak melakukan penyesuaian, lebih banyak daripada mahasiswa-mahasiswa lainnya.

Ketika akhirnya beasiswa dihentikan karena alasan tadi, mereka semakin kusut. Ada yang tidak berani memberi tahu orang tua. Beberapa kali kami menerima pertanyaan dari orang tua. Mereka kurang mengerti apa itu IP. Mereka bertanya, apakah tidak ada toleransi untuk anaknya. Tapi kami tetap harus menjelaskan hal itu dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa anak yang harus keluar dari asrama. Alasannya macam-macam, antara lain tidak mengikuti kebaktian pagi, tidak melakukan tugas kelompok untuk membersihkan rumah, dan lainnya. Ada anak yang marah-marah karena lampu kamar dimatikan jam sebelas malam. Merasa belum mengantuk, dengan marah-marah mereka keluar dan duduk-duduk di lapangan bola persis di depan asrama. Mereka duduk-duduk *bacarita* sambil memetik gitar. Mereka kembali masuk asrama jam lima subuh ketika penghuni lain sedang bersiap untuk kebaktian pagi. Akibatnya, di kelas mereka mengantuk berat. Ketika dosen menanyakan apa yang terjadi, mereka bilang kurang tidur. Yang lucu, kadang sampai kuliah selesai anak itu masih tidur di ruang kuliah.

Ada kasus lain yang cukup menyedihkan. Seorang mahasiswa laki-laki suku Mee, tapi lahir besar di Jakarta, terpaksa *drop out* karena tidak bisa mematuhi aturan perkuliahan. Secara ekonomi, dia sebenarnya anak yang mampu. Dia tinggal di apartemen Kalibata berdua bersama ayahnya yang adalah seorang anggota DPR.

Sayangnya, karena kesibukannya sang ayah kurang memperhatikan sang anak. Teman-teman ayahnya sering berkumpul-kumpul sampai larut untuk membicarakan berbagai hal. Apalagi karena tidak ada nyonya rumah atau anggota keluarga yang lain, jadi para politisi menjadi lebih bebas. Yang jadi korban adalah anak kita ini. Jadwal tidurnya tidak teratur, dan yang menyedihkan adalah mengkonsumsi alkohol sesukanya. Sering dia datang ke kampus dalam keadaan terhuyung-huyung. Kebetulan saya adalah dosen pembimbing akademiknya. Beberapa kali saya panggil dia ke ruang dosen. Kalau dinasihati, dia hanya akan menjawab, “Iya, iya. Saya minta maaf.”

Saya sempat bertemu bapaknya dua kali untuk bicara khusus tentang studinya. Tapi bapaknya terlalu sibuk dengan urusannya. Yang keluar dari mulutnya adalah “Minta bantuannya, Mama.” Selama empat semester anak ini tidak ada kemajuan, dan tiba-tiba dia menghilang. Rupanya bapaknya tidak lagi membiayai kuliah anaknya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan keputusan ini. Tapi mahasiswa tersebut masih suka muncul di kampus, bertemu dengan kawan-kawannya, dan main futsal. Setahun kemudian, saya dengar kabar bahwa ayahnya wafat. Mahasiswa kita ini menjadi yatim piatu. Dari media sosial saya melihat bahwa saat ini dia ditarik ke Jayapura dan diasuh oleh sebuah keluarga yang masih kerabat, tetapi tidak kuliah.

Berpacaran adalah hal yang lumrah di kalangan anak-anak muda ini. Berkompetisi atau saling memperebutkan kekasih hati juga hal yang lumrah. Suatu ketika, seorang mahasiswa tingkat akhir menemui saya. Dia minta saya berdoa untuk pacarnya yang tidak menanggapi chat WA-nya. Dia bilang dia sangat stres karena ini terjadi di tengah-tengah dia mempersiapkan skripsi. Gadis yang sudah setahun dipacarinya seolah-olah lenyap tanpa kabar. Gadisnya adalah mahasiswa semester dua, sama-sama di UKI.

Sehari setelah kami berdoa dan bicara, dia datang lagi. Kali ini dia menangis sesenggukan, hal yang tidak biasa saya lihat pada anak laki-laki Papua, apalagi dia berasal dari suku Dani yang dikenal semangat perangnya. Selesai menangis, baru dia menjelaskan. Ada mahasiswa senior dari universitas lain yang juga menginginkan gadis yang sudah dipacarinya tersebut. Suatu hari si senior datang ke asrama si gadis dan mengajaknya pergi. Seminggu dia tidak pulang ke asrama. Kami coba menghubungi ibu yang menjadi sponsornya. Ternyata si gadis sudah tiga hari tak bisa dihubungi. Maka, sesuai aturan, beasiswa dihentikan. Kami tidak tahu lagi nasibnya. Tapi mahasiswa kami yang kemarin datang sesenggukan seminggu kemudian menempuh ujian dan lulus. Sekarang dia sudah bekerja sebagai insinyur sipil di sebuah perusahaan internasional. Peristiwa ini terjadi belum lama berselang, tahun 2022.

Ada juga mahasiswa yang lebih suka menuruti kata hatinya sendiri, tapi sayangnya kurang mempertimbangkan aspek lain dengan kepala dingin. Salah satu contohnya adalah seorang mahasiswa dari Wamena. Anak ini kuliah di UKI program studi politik dan tinggal di rumah saya. Dia sudah bisa menyetir mobil, dan bisa antar saya ke gereja, dan bisa disuruh ke sana-sini. Untuk keperluan kuliahnya saya membelikannya ponsel, laptop, dan buku-buku. Masuk ke semester empat, tiba-tiba dia bilang, “Mama, saya harus pulang dulu. Saya mau jemput adik saya supaya dia sekolah di Jakarta dan tinggal dengan kita.” Kebetulan waktu itu

ada dua anak kecil umur lima tahun dan enam tahun saya asuh di rumah, selain beberapa anak dewasa. Saya bilang bahwa saya tidak punya uang cukup untuk membiayai dia pulang balik Jakarta-Wamena. Tapi dia bersikukuh untuk pulang. Jadilah dia berangkat. Saya hanya memberi uang cukup sampai Jayapura. Empat hari kemudian dia minta tambahan uang. Singkat kata, dia berkabar sudah sampai ke Wamena. Dan apa yang dia janjikan tidak ditepatinya. Dia tidak pernah kembali lagi. Saya tahu bahwa dia memiliki gadis incaran yang dikenalnya lewat media sosial. Peristiwa ini terjadi tahun 2011.

Semua yang mendapatkan beasiswa tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Juga semua mahasiswa yang kuliah di UKI dilarang berpolitik praktis. Tetapi ada juga beberapa yang keluar jalur. Kasus yang pertama adalah seorang anak perempuan dari Nduga. Bersama pacarnya dia turun ke jalan. Satu-dua kali berhasil. Tapi kali ini dalam gerakan besar akibat peristiwa rasisme tahun 2019, ia ditangkap polisi, bersama puluhan lainnya. Beberapa anak UKI masuk penjara selama delapan bulan. Studi mereka terpaksa tertunda.

Peristiwa kedua adalah mahasiswa asal Pegunungan Tengah yang juga ditangkap polisi. Di depan dewan dosen, dia terus membantah. Tapi dalam rekaman CCTV kelihatan jelas dia berteriak-teriak dan melompati pagar. Jadilah dia diangkut ke Polda, dan mendekam di sana selama beberapa bulan.

Kendala-Kendala

Kalua ditanyakan kepada kami, apa kendala yang dialami anak-anak Papua ini dalam menjalankan studinya? Maka jawabannya adalah “banyak”. Ada kendala yang datang dari luar, tapi juga ada kendala dari dalam.

Kendala dari luar yang utama adalah kendala ekonomi. Berbeda dengan para mahasiswa yang datang ke universitas-universitas lain seperti UPH, UI, Atma Jaya, dan Ukrida, mereka yang datang ke UKI umumnya bukan berasal dari kelas menengah ke atas. Orang tua mereka kebanyakan adalah petani subsisten, dengan pendapatan yang tidak tetap. Banyak dari antara mereka datang ke UKI dengan disponsori oleh Gereja atau Pemda untuk tiket perjalanan ke Jakarta dan uang saku sekadarnya. Selebihnya, mereka mengandalkan bantuan dari UKI. Biasanya anak-anak ini datang dan mendaftar dengan biaya sponsor. Setelah diterima, mereka ada yang masuk asrama UKI, masuk asrama pemerintah daerah asal mereka, atau kos pribadi di sekitar kampus. Masalah baru timbul pada semester dua. Uang habis dan mereka tidak bisa bayar kuliah. Saat itulah saya kerap mencarikan bantuan bagi mereka. Syukurlah, terdapat lembaga-lembaga

pelayanan yang mengulurkan tangan semisal Pijar Lentera, Papua Ministry, juga sosok perorangan yang murah hati.

Anak-anak Papua cenderung sangat suka olah raga. Bahkan saking sangat sukanya, mereka bisa mengabaikan hal-hal lain demi olah raga. Setiap undangan untuk kompetisi selalu mereka penuhi. Karena kuliah sampai sore, maka mereka berolahraga malam. Dan ini yang sering membuat mereka melupakan tugas-tugas. Kalau futsal mulai pukul 9 malam dan selesai jam 11, maka mereka akan tiba di rumah sekitar jam 12 malam dan baru pergi tidur jam 2 subuh. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pagi ketika mereka harus mengikuti kuliah.

Ada satu peristiwa yang menyedihkan. Anak-anak Papua dari Fakultas Kedokteran baru selesai ujian. Mereka menuju ke lapangan sepakbola, masih dengan baju rapi dan sepatu pantofel mereka bermain tendang-tendang bola. Iseng saja untuk bersenang-senang. Tiba-tiba seorang anak berteriak sambil memegang dadanya, “Aduh, aduh, sakit, sakit.” Segera ia dilarikan ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 10 menit, tapi sayang sekali dia tak tertolong; meninggal. Dokter bilang, dia terkena serangan jantung.

Sebagian anak memperlihatkan sikap yang terlampau santai, hidup menurut perasaan, *mood*. Kalau hati senang, oke. Kalau hati tidak senang, mereka tidak mau melakukannya. Sekitar tahun 1998, ada anak dari Biak, yang kalau disuruh melakukan sesuatu, dia selalu menjawab “Sa malas” yang artinya ‘saya malas/tidak mau’. “Sa malas” ini kemudian menjadi kata yang populer di kelas kami waktu itu. Tetapi ini sungguh merugikan karena selanjutnya anak-anak ini tidak mau mencoba. Waktu dibagi tugas untuk membahas tokoh, dia menolak dan mengatakan “sa malas”. Langsung semua anak-anak di kelas bersorak tertawa. Sebab kata itu tak mungkin bisa keluar dari mulut mereka. Dan begitulah, anak Biak ini tidak mempresentasikan apa yang menjadi tugasnya. Saya langsung memanggil dan berbicara dengannya secara khusus.

Disiplin yang longgar ini membuat anak-anak sulit mengelola waktu. Mereka bisa tidur larut malam atau bahkan subuh. Mengerjakan tugas kalau hati sedang mau. *Bacarita* alias *ngobrol* panjang-panjang sampai lupa waktu. Mereka seperti tidak pernah tergesa. Kalau ada tugas menulis tentang suatu topik, dan mereka mengalami kesulitan, mereka tetap tenang, diam, tidak bertanya kepada teman atau kepada dosen. Ini yang menyebabkan mereka kerap mendapat nilai di bawah rata-rata. Dosen harus memanggilnya secara khusus dan memberinya tugas baru dengan penjelasan yang cukup. Barulah dia bisa melangkah untuk mengerjakannya.

Mengapa begini? Jawabannya karena pendidikan dasar mereka tidak tuntas, juga kurang ada pendidikan karakter. Mengapa tidak tuntas? Umumnya anak-anak yang datang dari pedalaman ini tidak menjalani pendidikan dasarnya secara lengkap. Anak-anak Mamberamo, misalnya, setiap tahun bisa pergi meninggalkan kelas selama 2-3 bulan untuk mengikuti orang tua mencari buaya. Selain mencari buaya, di tempat lain mereka ikut bapaknya mencari gaharu dan sarang semut.

Mereka tidak dicari oleh gurunya karena guru juga melakukan hal yang sama. Guru juga harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Penyebab lain adalah persoalan klasik, yaitu amat kurangnya tenaga guru. Saya mengalami ini di Wasior, di Dabra-Mamberamo Hulu, dan Kondo-Merauke. Anak-anak sudah datang mulai pukul 7 atau 8 pagi, tetapi guru baru muncul pukul 9 atau 10. Itu pun tidak segera memulai pelajaran. Setelah diabsen, anak-anak dibiarkan bermain bola di halaman. Ketika mereka dipanggil masuk kelas, badan mereka sudah berpeluh, haus, dan lapar. Mereka menyanyi sebentar, berdoa, lalu pulang.

Sebelum kita menyalahkan para guru di sana, kita harus tahu bahwa guru-guru di pedalaman Papua sarat beban. Tenaga pendidik sangat sedikit, hanya 1-2 orang untuk satu sekolah. Selain mendidik para murid, para guru juga harus mengurus anak-anak dan keluarga mereka sendiri, mengurus kebun untuk bertahan hidup, dan lain-lain. Sementara itu, fasilitas kesehatan bisa dibilang hampir tidak ada. Ongkos ke kota mahal karena harus naik pesawat. Tahun 2010, ongkos dari Dabra ke Jayapura sekitar 3 juta per orang dan ke Kasanoweja sekitar 700 ribu naik perahu ketingting. Ongkos transportasi ini sangat mahal dibanding di Jawa karena harga bahan bakar pun selisihnya jauh sekali. Praktis, guru-guru di pedalaman hidup terkurung dalam wilayah yang sempit tanpa banyak interaksi dengan dunia luar. Khusus mereka yang sudah punya anak, keadaan lebih sulit lagi karena fasilitas-fasilitas yang serba terbatas. Gaji yang mereka terima bisa lenyap begitu cepat karena tingginya harga-harga barang. Minyak tanah 10 ribu per liter. Kopi, gula, Indomie, rata-rata dua kali lipat dari harga di kota.

Beberapa anak, terutama yang lelaki di awal-awal kedatangan mereka di Jakarta, tampak kurang memperhatikan kebersihan. Habis olah raga yang mengeluarkan banyak keringat, mereka duduk-duduk mendinginkan badan. Setelah badan tidak gerah lagi, mereka mengantuk dan langsung tidur. Akibatnya, kamar-kamar, kasur-kasur di asrama berbau menyengat. Selain itu, mereka juga tidak mengganti seprei pada waktunya. Karena sibuk, baju-baju teronggok di lantai tidak segera dicuci. Ketika kehabisan baju, pakaian yang sudah “bekas pakai” dipakai lagi. Tentu saja baunya cukup lumayan dan bisa membuat orang sekitar kurang nyaman.

Di kalangan anak-anak Papua, emosi cepat naik. Sebagai pendamping saya familier dengan ungkapan-ungkapan ini: “*Sapa ko, sa lap ko*”, “*Sa tampeleng ko*”, “*Sa kasih mati ko*”, “*Tunggu sa, sa kasih hancur-hancur muka ko*”. Bagi telinga yang belum terbiasa, kata-kata ancaman seperti ini dapat menimbulkan rasa kaget dan khawatir. Jika dialami, biasanya itu ungkapan amarah akibat pengalaman pahit dan kecewa. Bahkan ekspresinya kadang tak hanya terbatas pada kata-kata, melainkan juga tindakan yang bersifat destruktif seperti menghancurkan barang, menyobek-nyobek buku, merusak baju, dan sebagainya. Di kampung halaman mereka bisa ke luar rumah dan marah-marah di tanah lapang yang luas. Tapi di kamar kos? Sulit dilampiaskan sampai tuntas. Pelariannya, kalau ada uang di saku, mereka akan pergi ke luar mencari minuman. Setelah mabuk, ada yang merusak motor kawan, ada yang memecahkan kaca jendela rumah kos. Setelah reda, anak itu akan minta maaf, dan mengganti kerugiannya. Ketika saya bertanya, mengapa kamu buat keonaran? Jawabnya, “Hati saya panas sekali, rasa tak terobati jengkelnya.” Pada saat seperti itulah peran pendamping diperlukan juga. Saya kadang mengajak anak-anak untuk mengampuni, belajar menahan diri. Tidak boleh mencari kepuasan sesaat dengan merusak barang orang lain sewaktu kita merasa jengkel dan marah.

Ada lagi kebiasaan yang kerap menimbulkan masalah di tempat kos atau asrama, yaitu kurang bisa menjaga barang. Barang berharga semisal ponsel atau laptop ditaruh begitu saja di meja kamar dan ditinggalkan tanpa kamar terkunci. Peristiwa kehilangan barang cukup sering terjadi. Apalagi barang-barang itu sangat mudah dilempar ke pasar untuk mendapatkan uang secara cepat. Selaku pendamping, saya sering mendapat laporan barang hilang di kamar. Di asrama, di kos, di kantin ketika makan dengan teman, dan sebagainya. Pencurinya tidak jarang adalah kawan sendiri yang sedang kesulitan keuangan.

Selain hal di atas, perlu dicatat bahwa hampir 70 persen lebih anak-anak kita ini datang dari keluarga yang tak utuh, *broken home*. Sekitar 30 persen adalah yatim dan 20 persen yatim piatu. Mereka pasti membutuhkan suasana yang mendukung, yang memungkinkan mereka juga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Karenanya, kami yang bekerja di dalam institusi pendidikan ini dengan sendirinya harus punya hati yang lebar dan penuh kasih. Jangan heran kalau kami juga harus sedia menanggung ban bocor, melunasi hutang di kantin, menebus laptop di tempat gadai, memperbaiki kipas angin, menutup hutang kepada kawan, menebus obat, dan membayar reparasi sepeda motor. Dalam perkara besar, juga dalam perkara kecil.

Sukses dan Hari Depan

Bertahun-tahun pengalaman telah memberi saya pengalaman yang amat berharga. Bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan dengan macam-macam karakter telah memperluas wawasan saya tentang kehidupan. Saat ini, saya membuka lembaran-lembaran ingatan tentang anak-anak yang pernah saya dampingi sekian lama, anak-anak Papua yang merantau di ibukota. Anak-anak muda itu kini sudah menjadi anggota DPR, Kepala Dinas Keerom Lanny Jaya, pekerja lingkungan internasional di Mbuay, tenaga kesehatan di Sugapa Intan Jaya, pekerja advokasi di LBH Jakarta, pekerja di Freeport sebagai mekanik, insinyur sipil, ahli listrik, ahli mesin, ahli pemberdayaan, ada juga yang menempuh studi lanjut di Rusia, menjadi dosen di perguruan tinggi Jakarta, dan berbagai jalan kehidupan lainnya. Saya merasa bangga pada mereka. Saya bahagia.

BAGIAN 3

.....

Tantangan Pembangunan

Kesenjangan Sosial dan Karya Misi Gereja Katolik di Keuskupan Jayapura

MGR. YANUARIUS THEOFILUS MATOPAI YOU

Pengantar

Judul tulisan ini mewakili seluruh hasil pengamatan dan refleksi atas Papua dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023): kesenjangan sosial di tengah kemajuan struktural Papua. Untuk memangkas aspek subjektif, judul ini merupakan pernyataan Dr. Arie Ruhyanto, peneliti Gugus Tugas Papua (GTP) dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebutkan bahwa program-program pemerintah memberikan hasil dalam konteks struktural, misalnya penambahan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. “Tapi dalam konteks sosial, dalam lingkup yang lebih luas, justru konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan. Kesenjangan makin lebar. Segregasi makin kuat, deforestasi, isu lingkungan, dan macam-macam.” Pernyataan Arie Ruhyanto senada dengan pengalaman hidup kami sebagai orang asli Papua, sebagai seorang imam maupun sebagai seorang uskup Papua pertama, saat ini dalam tugas-tugas pastoral.

Bagian pertama dari tulisan ini akan memaparkan situasi kesenjangan sosial tersebut sambil menunjukkan kepada pembaca aspek-aspek mana yang perlu mendapat perhatian. Kami akan memakai hasil dokumentasi tertulis, terutama *Memoria Passionis* yang diterbitkan setiap tahun oleh SKP Keuskupan Jayapura (kemudian menjadi SKPKC Fransiskan Papua) selama sepuluh tahun terakhir (edisi terbaru ialah *Terpasung di Rumah Sendiri*, 2022) dengan aspek-aspek sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kerohanian menjadi poin-poin pembahasan. Diharapkan kita mendapat gambaran yang kurang lebih holistik tentang Papua. Gambaran yang lebih holistik pada gilirannya (semoga) dapat menjadi pemantik diskusi berkelanjutan bagi usaha mencari solusi yang di satu sisi meningkatkan kemajuan struktural, di sisi lain menjadikan orang asli Papua sebagai tuan di atas tanahnya sendiri.

Bagian kedua dari tulisan ini akan mengetengahkan apa saja yang dilakukan oleh Keuskupan Jayapura dengan visi membangun Gereja mandiri yang misioner. Pada bagian kedua ini, penulis membeberkan dua Misi Gereja Keuskupan Jayapura yang penulis sendiri pernah alami sebagai pastor dan kini sedang dan akan terlibat penuh sebagai uskup di Keuskupan Jayapura. Bagian terakhir dari tulisan ini, sebagai Uskup Orang Asli Papua pertama, kami hendak menyampaikan suatu harapan dalam rangka menciptakan Papua Tanah Damai.

2. Kesenjangan Sosial di Papua

2.1. Bidang Sipil dan Politik

Dalam bidang sipil dan politik, kami hendak mengulang seruan kami bersama para pemimpin Dewan Gereja Papua di Jayapura pada 24 April 2023. Kami menyebut perkembangan memprihatinkan dalam bidang sipil dan politik. Kami mengutip sebagian dari tulisan Usman Hamid, Direktur *Amnesty International Indonesia*.

“Amnesty International Indonesia mencatat, sejak 2018 hingga 2022 terdapat setidaknya 91 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, POLRI, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 177 warga sipil. Sementara itu, jumlah anggota TNI-POLRI yang menjadi korban pada periode yang sama sebanyak 44 orang, dan anggota kelompok pro-kemerdekaan sebanyak 21 orang. Data Institute for Policy Analysis and Conflict Studies (IPAC) juga menunjukkan bahwa jumlah insiden kekerasan terkait pemberontakan dari 2010 hingga 2021 terus meningkat, hingga melebihi 80 kasus pada tahun 2021. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 320 jiwa, sebagian besar warga sipil (178 orang); sedangkan korban dari pasukan keamanan ada 92 orang, dan kelompok bersenjata 50 orang. Sebanyak 98% kematian (316 jiwa) terjadi di Provinsi Papua. Riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengungkapkan kekerasan di Papua, empat kali lebih besar daripada rata-rata nasional. Ini sangat ironis mengingat Papua memiliki salah satu ratio pasukan keamanan per penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.”¹

Tulisan Hamid menampilkan data umum para korban yang sempat terdokumentasi dan terverifikasi. Ada banyak korban meninggal di hutan-hutan Papua, yang tidak sempat tercatat. Akan tetapi, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban terbesar akibat konflik berkepanjangan di Papua, secara khusus konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB/KKB/OPM/KSB/teroris OPM, ialah warga sipil. Eskalasi yang digambarkan dalam data umum tadi masih dapat dilengkapi dengan sejumlah kejadian belum lama ini. Ada pembunuhan

1 Usman Hamid, *Mencari Jalan Keluar Konflik Papua*, *Harian Kompas*, 18 April 2023.

dan mutilasi oleh anggota-anggota TNI di Timika (4 orang mati), ada penembakan oleh aparat terhadap massa di Wamena (9 orang mati), ada pembunuhan sejumlah prajurit oleh TPNPB-OPM di Nduga (5 orang mati). Sementara pada tingkat paling akar rumput sejumlah warga menjadi korban—ada yang tewas—dalam operasi penyisiran oleh aparat; habitat mereka dirusak, keamanan dihilangkan, dan akhirnya warga mengungsi hingga jumlah pengungsi membengkak sampai sekitar 67.000 orang.

Menurut pengamatan kami sebagai pemimpin umat beragama, setelah insiden rasis Agustus 2019, perkembangan didominasi oleh penerapan suatu skenario yang bukan lagi berniat untuk mencari suatu solusi konflik atau berniat mencari tahu akar-akar konflik (akar rasisme, akar diskriminasi, akar marginalisasi, akar peningkatan protes politik). Niatnya ternyata melulu untuk menguasai seluruh wilayah Papua dan melumpuhkan segala perlawanan politik.² Skenario ini dijalankan melalui suatu tindakan militerisasi yang sangat nyata, terarah, dan terstruktur.³ Penguasaan total ini bukan saja terungkap melalui kehadiran tambahan ribuan prajurit dari luar Papua⁴, melainkan terungkap juga dalam pemaksaan kebijakan institusional/struktural, seperti revisi Otsus, hingga menjadi “alat penguasaan” bagi pemerintah pusat dan pemaksaan pemekaran yang tidak berlandaskan pertimbangan ilmiah yang wajar dan/atau kesejahteraan rakyat. Dalam proses itu pun peranan pemerintah sipil di Papua dipangkas sampai hilang.⁵ Selain itu, hak-hak konstitusional masyarakat Papua sering kali dikebiri, seperti hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum lewat demonstrasi damai. Warga Papua tidak boleh berbicara secara bebas, pun pula secara damai, tidak berhak berbeda pendapat; sementara kebebasan ini sebenarnya terjamin dalam UUD ‘45 kita. Kami mengalami bahwa sejumlah hak konstitusional ini

2 “Pemimpin Gereja Keluarkan Seruan kepada Presiden Jokowi Terkait Tragedi Kemanusiaan di Tanah Papua.” Lih., <https://www.odiyaiwuu.com/2023/05/08/pemimpin-keluarkan-kemanusiaan/>.

3 Bdk., Hipolitus Wangge, *Papua Sedang Tidak Baik-Baik Saja*, dalam Alexandro F. Rangga (Ed.), *Terpasung di Rumah Sendiri*, Seri Memoria Passionis No. 41, 2022, Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, hal. 148-154.

4 Menurut data kelompok advokasi *Imparsial*, jumlah prajurit di Papua sebanyak 16.900 orang yang sebagian besar merupakan satuan dengan kualifikasi tempur. Lih., <https://indonesia.ucanews.com/2023/04/28/uskup-jayapura-dan-pimpinan-gereja-protestan-di-papua-minta-presiden-jokowi-hentikan-operasi-militer/>

5 Bdk. Paskalis Kossay, *Catatan Kritis Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru*, dalam Alexandro F. Rangga (Ed.), Seri Memoria Passionis No. 41, 2022, *Ibid.*, hal. 4-9.

mulai disingkirkan dan suasana demokrasi merosot secara berarti. Kedua unsur itu sangat terasa di Papua.⁶

2.2. Bidang Ekonomi dan Sosial

Dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, aspek pendidikan dan kesehatan memprihatinkan. Dua puluh tahun otonomi khusus tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kita menghadapi persoalan lama yang tidak diselesaikan, seperti kekurangan tenaga pendidik (guru), sarana prasarana yang tidak memadai, maupun penyelewengan dana BOS, yang dibarengi oleh sikap asal-asalan para peserta didik (siswa/mahasiswa) serta lemahnya partisipasi warga (peran orang tua/wali) dan tidak efektifnya kontrol atau pengawasan pemerintah (Dinas Pendidikan). Persoalan klasik ini belum tuntas, muncul masalah baru akibat konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB/OPM. Yang satu menduduki fasilitas-fasilitas publik, yang lain membakarnya.⁷ Belum lagi ada sekitar 5.000 hingga 7.000 anak Papua, yang karena tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, terjebak dalam aktivitas buruk, seperti mengisap lem aibon, mengonsumsi narkoba, atau menjadi pekerja usia dini seperti tukang parkir dadakan atau bahkan pengemis jalanan. Dalam kunjungan pastoral ke Saminage, kami menemukan situasi pendidikan dan kesehatan yang amat buruk. Ada tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama, tetapi tanpa tenaga pendidik. Ada pula puskesmas pembantu, tetapi tanpa tenaga kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, meningkatnya kasus HIV/AIDS di Papua perlu menjadi perhatian semua pihak. Kasus-kasus HIV/AIDS meningkat pesat khususnya di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Nabire (9.189 kasus), Kabupaten Jayawijaya (6.867 kasus), dan Kabupaten Mimika (6.824 kasus). Telah banyak orang Papua yang meninggal karena HIV/AIDS, selain karena miras, melampaui jumlah orang Papua yang meninggal akibat konflik bersenjata. Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengidap HIV/AIDS kebanyakan adalah usia muda yang produktif (usia 15-19 tahun, 5.774 kasus; usia 20-24 tahun, 11.882 kasus; usia 25-49 tahun, 28.812 kasus).⁸

Dalam bidang ekonomi dan sosial, kami juga secara khusus menyaksikan kemerosotan dalam bidang ekologis akibat kepentingan ekonomi nasional di

6 *Pemimpin Gereja Keluarkan Seruan kepada Presiden Jokowi Terkait Tragedi Kemanusiaan di Tanah Papua. Ibid.*

7 Bdk. Bernardus Boki Koten, *Yang Klasik Belum Tuntas Muncul Masalah Baru*, dalam Alexandro F. Ranga (Ed.), *Seri Memoria Passionis No. 41, 2022, Ibid.*, hal. 324-329.

8 *Ibid.*, hal. 365-370.

Papua yang berdampak pula pada krisis sosial. Kami memaparkan kemerosotan tersebut dalam seruan pastoral kami pada bulan Januari-Februari 2023 berkaitan dengan “Keadilan Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi dan Lebih Peduli”.⁹ Keadilan ekologis berarti adil terhadap sesama manusia (sosial) dan sekaligus adil terhadap ciptaan lainnya (kapitalisme ekonomi). Kami secara khusus menyoroti perubahan iklim yang merupakan masalah global dengan dampak buruk untuk lingkungan, masyarakat, ekonomi, perdagangan, dan politik (Lih. LS, 25). Dampak perubahan iklim di Papua dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat secara kasat mata, seperti menurunnya debit air di mata air dan menurunnya tingkat kesuburan tanah; punahnya keanekaragaman spesies (habitat), misalnya burung Cenderawasih yang semakin berkurang; berkurangnya luas dan kualitas hutan akibat pengambilan kayu atau pembabatan hutan secara besar-besaran; memburuknya kesehatan di mana banyak warga menderita berbagai penyakit, bahkan wabah, dan sebagainya.

Selain pengaruh perubahan iklim, untuk konteks di Papua, perilaku manusia juga menjadi penyebab ketidakadilan ekologis. Banyak praktik ketidakadilan ekologis, seperti penjualan tanah yang menjadi bagian hak ulayat suku tertentu kepada pihak perusahaan (misalnya, kelapa sawit di Arso, Taja-Lereh, Merauke,) yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas air dan tanah. Memburuknya kesehatan yang berakibat pada hilangnya generasi penerus yang tangguh, pembakaran semak dan hutan secara tidak bertanggung jawab, serta penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) menyisakan penderitaan bagi masyarakat. Selain itu, banjir biasa maupun banjir bandang akibat penggundulan atau pembabatan hutan selalu terjadi setiap saat, yang berdampak pada munculnya korban baik harta maupun nyawa. Mentalitas malas yang menjangkiti kebanyakan para petani juga sering kali menjadi salah satu penyebab banyak lahan pertanian tidak diolah dengan baik. Di sisi lain, ketergantungan pada bantuan pemerintah, seperti raskin (beras untuk keluarga miskin) dan dana bantuan desa semakin tinggi.

2.3. Bidang Kebudayaan dan Spiritualitas

Dalam bidang kebudayaan dan spiritualitas terjadi kemerosotan pada hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dan moral etis. Nilai-nilai kearifan lokal yang hilang, seperti penghargaan terhadap alam sebagai ibu dan tanah sebagai aset kepemilikan

9 Mgr. Yanuarius You, Keadilan Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi dan Lebih Peduli, *Majalah Berita Keuskupan Jayapura*, Edisi Januari-Februari 2023.

kolegial, hilangnya etos kerja dalam meramu hutan atau mengelola tanah, maupun alih fungsi hutan adat menjadi lahan-lahan produktif seperti sawit atau pertanian dalam skala besar. Krisis ini ditandai oleh semakin banyaknya praktik manipulasi pelepasan tanah adat, ketergantungan pada bantuan pemerintah, seperti dana desa dan raskin, serta lahirnya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti konsumsi miras, ganja, lem aibon maupun perjudian.

Bertolak dari pengamatan-pengamatan tersebut, tanggung jawab moral budaya yang berupa 7 larangan dan 7 ajakan menjadi wacana yang diulang-ulang di setiap tingkatan masyarakat.¹⁰ Seruan-seruan berupa larangan menjadi kampanye di tingkat akar rumput seperti:

- a. stop jual tanah adat,
- b. stop bergantung pada bantuan uang dan beras dari pemerintah,
- c. stop konsumsi minuman keras, isap aibon, ganja, narkoba, dan perjudian,
- d. stop seks bebas,
- e. stop memecah belah,
- f. stop melakukan tindak kekerasan dan kejahatan, dan
- g. stop mengancam nasib dan masa depan generasi penerus.

Pada saat yang sama, seruan-seruan berupa ajakan menjadi panggilan moral untuk memotivasi masyarakat, seperti:

- a. hidup dari tanah adat,
- b. hidup dengan berkebun, beternak, berburu, bernelayan, dan berusaha,
- c. hidup tanpa minuman keras, lem aibon, ganja, narkoba, dan perjudian,
- d. hidup tanpa melakukan hubungan seks di luar nikah,
- e. hidup dalam kesatuan, persatuan, dan persaudaraan,
- f. hidup damai tanpa kekerasan dan kejahatan, dan
- g. membangun keluarga sehat untuk melahirkan dan menyiapkan generasi penerus sebagai garam dan terang di Tanah Papua.

Dalam aspek lain, sebagai makhluk rohani yang hidup di negara yang beragama, seruan moral keagamaan juga didengungkan. Doa-doa agar ada persaudaraan, kerukunan, dialog kasih, keadilan, damai sejahtera sehingga kita diluputkan dari berbagai konflik vertikal-horizontal, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan multidimensi, serta solidaritas perjuangan setiap agama pada penghormatan akan martabat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa tahun terakhir diwarnai tidak hanya oleh konflik vertikal, tetapi juga

¹⁰ <https://suarapapua.com/2023/02/05/usai-ditahbis-uskup-jayapura-bicara-tujuh-larangan-dan-ajakan-plus-doa/>

konflik horizontal antara Papua gunung dengan Papua pantai maupun antara Papua dan non-Papua.

Sebagai Orang Asli Papua, kami mengakui bahwa sudah terjadi banyak perkembangan selama sepuluh tahun terakhir ini. Kami melihat pembangunan di mana-mana, jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, bangunan-bangunan perekonomian, maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Sebagai imam yang pernah bertugas di paroki dan di universitas, kami menemukan bahwa meskipun ada pembangunan di mana-mana, masyarakat Papua tetap menjadi penonton, banyak mahasiswa yang masih kesulitan berhitung, membaca, dan menulis, kebijakan-kebijakan publik ditentukan oleh pihak luar hingga terjadi peralihan fungsi tanah ulayat masyarakat menjadi lahan sawit, bisnis kayu, maupun pertambangan. Sebagai seorang uskup, dengan wilayah pelayanan yang lebih luas, kami menemukan perubahan pola hidup masyarakat yang memprihatinkan, seperti pudarnya relasi dengan adat dan agama, hilangnya nilai-nilai kearifan lokal, sulitnya mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, ibu-ibu yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, pengangguran di kalangan kaum muda, serta situasi para pengungsi yang memprihatinkan. Kesimpulannya ialah, memang terdapat kesenjangan sosial di tengah kemajuan struktural di Papua. Dengan demikian, usaha untuk mempersempit kesenjangan tersebut menjadi tugas semua pihak.

3. Dua Misi Gereja Katolik Keuskupan Jayapura-Papua

Selama ini, kami selalu menyaksikan berbagai kesenjangan sosial maupun masalah-masalah sosial (entah apa pun istilah yang tepat), bahkan konflik demi konflik di tengah-tengah kehidupan umat beriman Katolik pada khususnya dan kehidupan masyarakat pada umumnya, dengan pluralisme budaya di Papua. Pihak Gereja Katolik Keuskupan Jayapura tidak tinggal diam, namun selalu aktif mengikuti perubahan-perubahan melalui “tanda-tanda zaman” serta telah merumuskan Arah Dasar Pengembangan Gereja dengan merumuskan Visi Gereja Mandiri yang Misioner selama tiga puluhan tahun ini. Kami sudah lama bertugas sebagai pastor dan kini sebagai Uskup Keuskupan Jayapura; dalam tugas pelayanan guna mengatasi kesenjangan sosial selalu kami bertitik tolak pada rumusan Misi Keuskupan Jayapura yang antara lain adalah membangun di semua aspek kehidupan dan membangun dialog dan kerja sama dengan semua pihak.

3.1 Membangun di Semua Aspek Kehidupan¹¹

Persekutuan umat beriman Keuskupan Jayapura dipanggil dan diutus untuk menghayati persekutuan hidup bukan hanya dalam segi kehidupan rohani, melainkan juga dalam kehidupan jasmani yang langsung terkait dengan masalah-masalah keduniawian. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan berbagai pelayanan demi pemberdayaan umat di satu pihak, dan di pihak lain demi memberikan pelayanan di tengah masyarakat.

Pelayanan-pelayanan mendasar yang perlu dibangun meliputi pelayanan bidang pendidikan, asrama, keluarga dan pemberdayaan perempuan, ekonomi, kesehatan, hukum dan HAM, serta perhatian kepada upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut terarah pada pembangunan manusia seutuhnya dan pembentukan masyarakat yang layak dan bermartabat demi kesaksian dan pengembangan dimensi misioner Gereja.

Pendidikan dan Asrama

Persekutuan umat beriman Keuskupan Jayapura mengembangkan pendidikan dan persekolahan secara lebih serius untuk menciptakan dan memberdayakan manusia muda yang tangguh dan mandiri dengan pewarisan nilai Injil dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan pewarisan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka menjadi pelaku perubahan sosial.

Untuk mendukung hal di atas hierarki bersama persekutuan umat beriman Keuskupan Jayapura memberi perhatian dan pengembangan pada hal-hal berikut.

- a. Mendorong yayasan-yayasan pendidikan Katolik untuk membenahi diri baik personel, kinerja, fasilitas, maupun kurikulumnya sesuai dengan standar pelayanan pendidikan Katolik yang bermutu.
- b. Memberikan kesempatan kepada tarekat-tarekat dan kongregasi religius Katolik yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di Keuskupan Jayapura.
- c. Mendorong dan meningkatkan pembenahan sekolah prioritas secara lebih serius dan konkret untuk memperbaiki mutu pendidikan dasar.
- d. Untuk pengaderan orang muda, dikembangkan terus pembinaan lewat asrama Katolik, baik di pedalaman maupun asrama pendukung di

¹¹ *Membangun Gereja Mandiri yang Misioner, Arah Umum Pengembangan Keuskupan Jayapura 2006-2016*, hal. 51-57.

Jayapura dengan menyiapkan tenaga pembina, fasilitas, dan program pembinaan yang jelas.

- e. Menyiapkan dana beasiswa bagi yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi memiliki kemampuan secara intelektual dan mempunyai kepribadian yang terpuji.
- f. Mendorong dan mendampingi Ikatan Insan Pendidik Katolik (IIPK) agar dapat menjadi mitra dalam menjalankan pastoral pendidikan dan pendampingan di lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah non-Katolik.
- g. Mendorong dan mendampingi kaum awam dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Katolik atau universitas Katolik.

Keluarga dan Gender

Dalam pengembangan Gereja, keluarga merupakan basis yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan pembinaan iman dan pendampingan keluarga, bukan hanya dalam hal pembinaan kehidupan spiritual, melainkan juga dalam hal pengembangan ekonomi, gizi, penanganan masalah kekerasan dalam keluarga, serta pencegahan dan penanganan bahaya HIV-AIDS dan alkoholisme.

Dalam pada itu, peran kaum perempuan perlu terus ditingkatkan dengan mengembangkan emansipasi perempuan dan pola pendampingan serta pastoral gender, baik untuk pembinaan dan kaderisasi maupun untuk menjalin hubungan kerja sama antara kelompok perempuan dengan hierarki. Kaum perempuan dipandang sebagai mitra pastoral.

Ekonomi

Pelayanan di bidang ekonomi dikembangkan mengarah pada penguatan ekonomi rakyat dan ekonomi rumah tangga dengan usaha-usaha kooperatif. Penguatan itu dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada (potensi alam dan potensi manusia), dan melalui kerja sama dengan kelompok atau pihak pemberdayaan yang berpotensi dalam suatu bentuk kerja sama yang membangun.

Untuk mendukung upaya pengembangan pelayanan di bidang ekonomi, Gereja Keuskupan Jayapura memposisikan para pelaku ekonomi, pelaku pasar, dan pemilik modal sebagai mitra kerja unit pelayanan yang ada di lingkungan Gereja.

Kesehatan

- a. Mendorong dan memfasilitasi persekutuan umat beriman setempat untuk mengembangkan *Primary Health Care* di unit-unit pelayanan kesehatan.
- b. Memberi perhatian lebih serius pada upaya peningkatan status kesehatan masyarakat/umat dengan menitikberatkan pada kegiatan promosi serta pencegahan, tanpa meninggalkan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi.
- c. Mengembangkan pelayanan yang berkualitas di bidang kesehatan melalui peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan di unit-unit pelayanan kesehatan.
- d. Mendorong unit-unit pelayanan kesehatan dan kelompok pemerhati untuk mengembangkan pendampingan kesehatan sampai pada basis yang paling kecil. Berkaitan dengan itu, unit-unit pelayanan kesehatan, seperti RS Dian Harapan, Provita, Bethesda, dan Perdhaki perlu ditata ulang menurut tuntunan misi pelayanan Katolik.
- e. Secara khusus memberikan perhatian kepada kondisi lingkungan, gizi masyarakat, penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, dan malaria), kemampuan hidup sehat bagi masyarakat serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk alkohol.

Hukum dan HAM

Guna turut serta secara aktif dalam memajukan keadilan, martabat, dan nilai kemanusiaan, Gereja secara konsisten dan berkelanjutan mendukung dan mengembangkan pelayanan di bidang hukum dan HAM melalui unit pelayanan yang terkait.

Secara khusus memberikan perhatian kepada:

- a. upaya menghilangkan kekerasan dan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang menghambat pembentukan manusia yang bebas, mandiri, dan percaya diri dalam kerangka cita-cita Papua sebagai Tanah Damai,
- b. korban ketidakadilan, baik melalui upaya pembelaan maupun melalui bantuan kemanusiaan darurat.

Lingkungan Hidup

Sebagai wujud penghayatan rasa hormat kepada Sang Pencipta, persekutuan umat beriman perlu terus-menerus:

- a. membangun kesadaran dan kepekaan akan kerusakan lingkungan, eksploitasi alam yang berlebihan, serta tata guna bangunan/ruang yang tidak menghargai martabat manusia dan keutuhan alam,
- b. mengembangkan sikap turut menjaga keutuhan ciptaan dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal,
- c. memberikan evaluasi dan pertimbangan secara kritis atas upaya pembangunan di Papua agar tidak mengorbankan alam ciptaan dan masyarakat pemilik hak ulayat demi kepentingan ekonomi pemodal, dan
- d. sikap dan perlakuan positif terhadap lingkungan hidup perlu diwariskan kepada generasi penerus dengan mengembangkan model pendidikan yang menanamkan sikap ramah dan hormat terhadap alam ciptaan.

3.2 Membangun Dialog dan Kerja Sama dengan Semua Pihak¹²

Dalam buku *Membangun Gereja Mandiri yang Misioner* dirumuskan beberapa misi, di antaranya disebutkan dua hal, yakni: membangun di semua aspek kehidupan dan membangun dialog dan kerja sama dengan semua pihak.

Gereja sebagai persekutuan umat beriman kepada Yesus Kristus menyadari jati diri dan keberadaannya di dalam masyarakat yang majemuk. Keberadaan itu bukan hanya bersifat kebetulan dan pasif, melainkan harus disadari sebagai suatu panggilan dan perutusan untuk bekerja sama mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis berdasarkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Gereja perlu mengembangkan kepekaan dan kepedulian, keterbukaan dan kerja sama dengan pelbagai pihak dalam masyarakat.

Keterbukaan dan kerja sama itu dikembangkan agar persekutuan Gereja semakin kaya, hidup, dan dinamis sehingga semakin mantap dalam kemandirian. Selain itu, dikembangkan upaya-upaya bersama demi tercapainya kehidupan yang harmonis, rukun, dan kooperatif dengan pihak lain di luar Gereja atas dasar kasih persaudaraan, keadilan, dan penghargaan akan martabat manusia serta keutuhan ciptaan. Kami terlibat bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti berikut.

- a. Pemerintah: mengembangkan dialog dan hubungan kerja sama dengan pemerintah secara bermartabat. Hubungan ini dikembangkan baik dalam hubungan antar-lembaga maupun hubungan melalui insan Katolik di lembaga pemerintahan di setiap jenjang, baik spontan maupun

¹² *Membangun Gereja Mandiri yang Misioner, Arah Umum Pengembangan Keuskupan Jayapura 2006-2016*, hal. 58-63.

- dalam forum kemitraan yang sudah tersedia, demi kerja sama dan demi kerasulan Gereja di bidang pemerintahan.
- b. Agama Protestan: keberadaan bersama Gereja Katolik Keuskupan Jayapura dengan Gereja Protestan di Papua perlu terus dibina dengan mengembangkan hubungan ekumene dan kerja sama dalam karya mulai dari tingkat pimpinan sampai pada dialog personal dan dialog kehidupan tingkat basis. Berkaitan dengan itu, dalam kerja sama dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), kami Uskup Jayapura dilantik sebagai Ketua Umum PGGP selama dua tahun, yakni 2023-2025, kemudian secara bergiliran tugas sebagai ketua umum akan digantikan oleh pimpinan Gereja yang lain.
 - c. Agama lain: persekutuan umat beriman kristiani juga hidup bersama dan/atau di tengah masyarakat yang beragama lain. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan: hubungan dialog dan kerja sama dengan umat agama lainnya di tingkat lembaga; hubungan antarpribadi sehari-hari; bimbingan dan penyadaran untuk menghilangkan prasangka yang salah dan sikap fanatik yang tertutup dan sempit, dan forum komunikasi antar-umat beragama.
 - d. Lembaga adat: Gereja Keuskupan Jayapura lahir dan berkembang dalam lingkungan adat masyarakat Papua. Oleh karena itu, perlu terus-menerus dikembangkan: bentuk-bentuk hubungan, kerja sama, dan dialog dengan tokoh-tokoh adat; serta bentuk-bentuk hubungan, kerja sama, dan dialog dengan lembaga adat di setiap wilayah atau di setiap jenjang dan unit kerja.
 - e. Kelompok yang berkemauan baik: hubungan dengan kelompok atau organisasi lain (LSM, kelompok pemerhati, organisasi lain) tak sampai membuat kelompok itu mengambil alih tugas Gereja, tetapi menempatkan mereka sebagai mitra kerja dalam rangka pencapaian misi Gereja mandiri yang misioner.
 - f. Pelaku pasar: secara khusus perlu dikembangkan hubungan dan kerja sama dengan para pemodal dan pelaku pasar untuk: mendorong dan mengembangkan kesaksian iman dan moral kristiani dalam bidang usaha demi terciptanya keadaban publik yang makmur berkeadilan serta adil berkemakmuran; serta mendorong dan mengembangkan pola pikir dan perilaku kooperatif dalam membantu pemberdayaan kehidupan persekutuan kaum beriman melalui penguatan karya dan usaha.

4. Penutup: Harapan Seorang Uskup Asli Papua Pertama

Sebagai (uskup) Orang Asli Papua, kami melihat pembangunan di mana-mana, jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, bangunan-bangunan perekonomian, maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Sebagai imam yang pernah bertugas di paroki dan di universitas, kami menemukan bahwa meskipun ada pembangunan di mana-mana, masyarakat tetap menjadi penonton; banyak mahasiswa yang masih kesulitan berhitung, membaca, dan menulis, kebijakan-kebijakan publik ditentukan oleh pihak luar hingga terjadi peralihan fungsi tanah ulayat masyarakat menjadi lahan sawit, bisnis kayu, maupun pertambangan. Sebagai seorang uskup, dengan wilayah pelayanan yang lebih luas, kami menemukan perubahan pola hidup masyarakat yang memprihatinkan, seperti pudarnya relasi dengan adat dan agama, hilangnya nilai-nilai kearifan lokal, sulitnya mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, ibu-ibu yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, pengangguran di kalangan kaum muda, serta situasi para pengungsi yang memprihatinkan. Kesimpulannya, memang terdapat kesenjangan sosial di tengah kemajuan struktural di Papua.

Oleh karena itu, kami mempunyai beberapa harapan demi terciptanya keadilan dan perdamaian di Papua yang selama ini terus-menerus dilanda konflik.¹³

- a. Konflik berkepanjangan di Tanah Papua selama ini lebih dikarenakan tersumbatnya saluran komunikasi antar-pihak yang saling bertikai. Karena itu, perlu keterlibatan secara serius pemerintah pusat (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua karena masalah Papua bukan hanya soal kesejahteraan semata, melainkan ada masalah sejarah dan status politik yang perlu diselesaikan secara paripurna dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Papua bukanlah daerah konflik. Hingga saat ini Papua belum pernah dinyatakan sebagai daerah yang berstatus daerah darurat sipil atau daerah darurat militer. Karena itu, tidak perlu mendatangkan banyak pasukan satuan tugas baik TNI maupun POLRI. Selama ini Papua lebih merupakan rawan konflik sehingga diperlukan pendekatan yang modern dan tepat guna, salah satunya adalah negosiasi dialog bermartabat.

13 Frits Ramandey dan Tim Pemantauan & Negosiasi di Papua. (2023). Stanley Adi Prasetyo (Ed.). *Membuka Ruang Membangun Dialog*. Yogyakarta:Lamalera. Hal. 201-202.

- c. Perlu segera dilakukan usaha pemulangan para pengungsi di Nduga, Hitadipa Intan Jaya, Kiwirok, Maybrat (terkini) ke kampung mereka. Untuk itu perlu dukungan dari para pihak yang berwenang.
- d. TPNPB-OPM agar menghentikan aksi intimidasi terhadap warga sipil, termasuk penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pedagang, atau pekerja bangunan yang sama sekali bukan bagian dari pihak yang berkonflik.
- e. Dalam penyelesaian konflik, hendaknya pemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh agama, maupun tokoh-tokoh Gereja di masing-masing wilayah.
- f. Para Pemimpin Gereja Katolik Provinsi Gerejawi Papua dalam kerja sama dengan Pemimpin Gereja-Gereja Papua (PGGP) hendaknya menyampaikan suara kenabian demi perjuangan keadilan, harkat-martabat manusia, serta kedamaian di Tanah Papua.
- g. Forum Pemimpin-Pemimpin Gereja di Indonesia melalui KWI dan PGI hendaknya mendukung penuh perjuangan harkat-martabat manusia di Papua, demi terciptanya keadilan dan perdamaian di Indonesia, Asia, maupun dunia.

Demikianlah harapan kami. Semoga harapan-harapan ini mengetuk hati semua pihak yang berkehendak baik dalam membangun Papua Tanah Damai. Dengan demikian Damai Papua yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai dan dirasakan, terutama oleh masyarakat Papua di wilayah-wilayah konflik.

Geologi dan Sumber Daya Alam Papua

BERNADETA SUBANDINI ASTUTI

Pendahuluan

Kunjungan penulis yang baru beberapa kali menumbuhkan kecintaan akan Tanah Papua karena keindahan alam dan keramahan orang-orang Papua. Inilah yang menjadi alasan penulis ingin memberikan kontribusi terkait kekayaan alam, yang ditinjau dari pemahaman geologi yang merupakan latar belakang pendidikan penulis. Penelitian secara langsung tentang geologi Papua masih kurang saya lakukan, maka kontribusi sederhana yang disampaikan berdasarkan referensi tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan minyak bumi (hidrokarbon).

Prospek hidrokarbon erat terkait dengan cekungan, yaitu wadah tempat batuan yang mengandung hidrokarbon terbentuk dan tersimpan dan mengisi cekungan. Cekungan adalah wadah di mana batuan sedimen terendapkan dan akan menjadi komponen hidrokarbon. Cekungan juga tempat di mana hidrokarbon akan terbentuk dan tersimpan. Komponen hidrokarbon tersebut di antaranya adalah batuan yang memiliki kandungan organisme (sebagai sumber cikal bakal minyak) dikenal sebagai batuan induk (*source rock*), juga batuan tempat hidrokarbon terakumulasi, yakni batuan reservoir. Cekungan terbentuk karena proses tektonik. Proses tektonik tersebut juga dapat menjelaskan keberadaan batuan yang mengandung mineral. Prospek *gold* dan *copper* di Papua dalam skala kecil sudah ditemukan sejak 1870-an dan masih dilakukan eksploitasi hingga sekarang.

Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dan setelahnya dalam menuju kemandirian menyisakan beragam rekaman sejarah, baik sejarah perjuangan bangsa maupun jejak pengelolaan kekayaan alamnya. Kekayaan alam Indonesia merupakan magnet sejak sebelum kemerdekaan. Rekaman sejarah dalam pencarian sumber daya alam, khususnya dalam pertambangan baik mineral

dan minyak bumi (hidrokarbon) banyak didapatkan. Rekaman tersebut berupa literatur dan juga lokasi penambangan yang prosesnya masih berlangsung hingga sekarang.

Sejak sebelum kemerdekaan, banyak peneliti didatangkan oleh bangsa asing untuk mengetahui potensi kekayaan alam di Indonesia. Mereka ahli di bidang eksplorasi dan eksploitasi, yaitu ahli geologi dan pertambangan. Para ahli tersebut jejaknya terekam dalam publikasi penelitian yang dihasilkannya, baik penelitian secara umum di seluruh Indonesia maupun secara khusus di Papua. Penelitian-penelitian tersebut terus berkembang hingga masa kini dan terekam oleh van Gorsel dalam bukunya berjudul *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas* dalam 4 volume (van Gorsel, 2018) dan *Pioneers and Milestones of Indonesian Geology* dalam 4 volume (van Gorsel, 2021). Para peneliti awal secara tidak langsung memperkenalkan bagian-bagian penting dalam melakukan kegiatan eksplorasi hidrokarbon, batu bara, dan pertambangan di seluruh Indonesia, yaitu terkait mineral (petrologi dan petrografi), paleontologi, biostratigrafi, sedimentologi, dan stratigrafi. Di antara para peneliti tersebut dijumpai peneliti sekaligus tokoh religius. Prof. Dr. Father Henri Fontain adalah seorang misionaris yang mendalami geologi dan paleontologi (van Gorsel, 2021a). Beberapa penelitiannya di Pulau Sumatra tentang paleontologi serta *gas-bearing* pada batu gamping yang terkekarkan. Josef Schmutzer ahli dalam pertambangan dan ahli mineral (van Gorsel, 2021b), juga pendiri pabrik gula di Yogyakarta. Selain itu juga mendirikan gereja, rumah sakit, dan sekolah di daerah Ganjuran, Bantul. Saat itu rumah sakit dan sekolah adalah bentuk pelayanan bagi para tenaga kerja di pabrik gula dan warga sekitar Ganjuran. Bangunan tersebut masih berdiri dan terawat dengan baik hingga sekarang. Demikian pun Gereja Ganjuran.

Rekaman penelitian dan eksplorasi dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian pengelolaan sumber daya alam diikuti dengan semakin banyak didirikannya program studi di bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan pada perguruan tinggi. Hal tersebut untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi sumber daya alam. Program studi terutama geologi dan pertambangan awal mulanya terpusat di Pulau Jawa, sekarang tersebar hampir di pulau-pulau besar di Indonesia, terutama di pulau-pulau yang memiliki prospek mineral dan hidrokarbon, termasuk di Papua. Perguruan tinggi yang memiliki program studi kebumihan di Papua baik geologi, pertambangan, dan perminyakan adalah Universitas Ottow Geissler Jayapura, Universitas Papua Manokwari, Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, Universitas Papua, dan Universitas Cenderawasih Papua. Dengan banyaknya lulusan di bidang tersebut yang awalnya

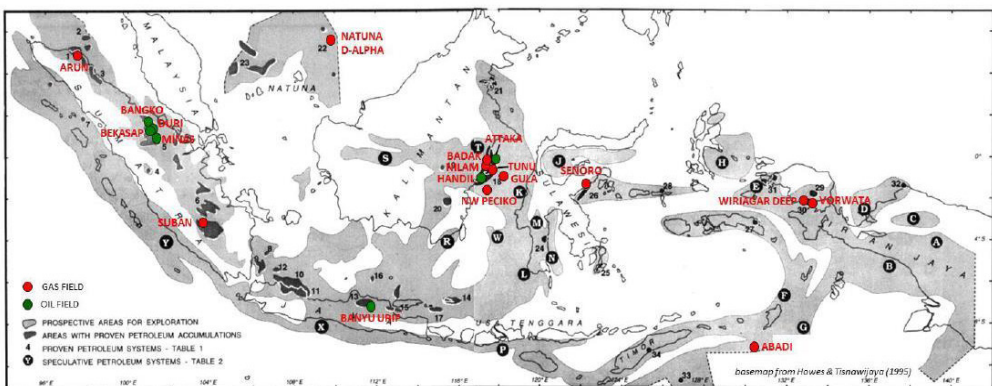
proses eksplorasi dan eksploitasi didominasi oleh ekspatriat mulai didominasi oleh putra bangsa Indonesia, bahkan putra daerah setempat.

Geologi Papua

Kembali pada kondisi geologi, rekaman jejak ekspedisi atau perjalanan penelitian ilmiah di Papua berlangsung antara akhir 1800-an atau awal tahun 1900-an oleh pemerintahan Belanda (van Gorsel, 2021c). Pada kurun waktu tersebut, dengan didatangkannya para ahli di bidang geologi dan pertambangan maka daerah-daerah yang ditengarai memiliki prospek ekonomis dari hasil kekayaan perut bumi Indonesia dapat dieksploitasi.

Secara geologi, Papua sudah terpetakan sejak 1914 oleh Abendanon, dipresentasikan di *ECAPE meeting* tahun 1954, dan diperbarui oleh Klompe dan Sigit Soetaryo pada tahun 1965 (van Gorsel, 2021b). Pemetaan tersebut merupakan bagian dari penjajahan Belanda pada tahun 1600-1942/1949 (van Gorsel, 2021b). Papua yang termasuk dalam Pulau New Guinea, sejak tahun 1800 dikuasai oleh Belanda, sedangkan bagian timur, yaitu Papua New Guinea dikuasai oleh Jerman dan Inggris.

Sebagian besar Papua pada tahun 1962 belum terpetakan, kecuali area-area yang dianggap memiliki prospek minyak bumi (hidrokarbon) dan tambang. Rembesan minyak yang menandai adanya prospek minyak bumi atau hidrokarbon dijumpai pertama kali pada tahun 1903. Hal tersebut menjadi acuan dilakukannya eksplorasi. Eksplorasi dilakukan hingga sukses ditemukan hidrokarbon di Cekungan Bintuni dan Cekungan Salawati antara tahun 1930 hingga 1950. Gas yang cukup besar ditemukan di Cekungan Bintuni tahun 1996 oleh ARCO, yang melibatkan batuan pra tersier, yaitu Jura (144-208 juta tahun lalu-jtl) hingga Kapur

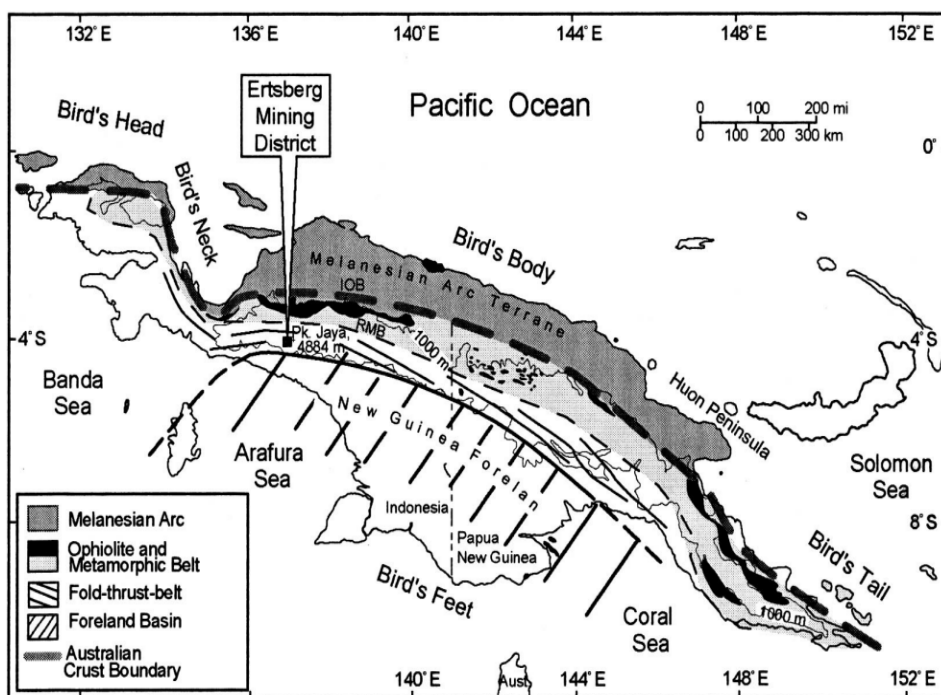


Gambar 1. Ladang minyak atau gas raksasa di Indonesia, salah satunya di Cekungan Bintuni Papua (Satyana, A.H., 2019).

(66-144 jtl). Eksplorasi ini hingga sekarang masih beroperasi, bahkan termasuk dalam kategori ladang gas raksasa di Indonesia (Gambar 1).

Perkembangan ilmu geologi terus berkembang. Pada tahun 1990-an tektonik mulai dikenal secara luas. Hal ini memberikan dampak besar dalam sudut pandang geologi terkait potensi hidrokarbon dan mineral. Tektonik terbangun dari berbagai rangkaian penelitian yang panjang dan menerus dari berbagai keahlian, berbagai peneliti. Tektonik terkait dengan rangkaian zona penunjaman antarlempeng (lempeng benua dan lempeng samudera). Tektonik di Indonesia terbentuk oleh tumbukan tiga lempeng, yaitu Lempeng Eurasia atau Lempeng Sunda, Lempeng India-Australian, dan Lempeng Pasifik atau Lempeng Caroline.

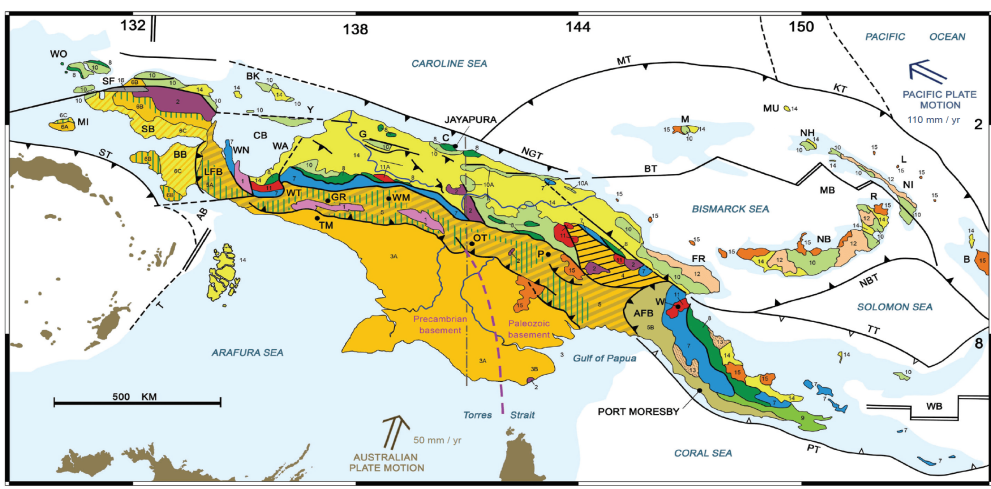
Lempeng adalah kerak dan bagian atas mantel. Gerakan lempeng bisa berupa gerakan bersentuhan atau tumbukan (konvergen) dan bisa saling memisahkan diri (divergen). Selain itu bisa juga membentuk *transform*. Papua dipengaruhi oleh pergerakan Lempeng India-Australia dan Lempeng Pasifik/Caroline. Hasil interaksi konvergen dari kedua lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya jalur *foreland basin*, *fold-thrust belt*, *ophiolite and metamorphic belt*, dan *Melanesia Arc* (ada yang menyebutnya sebagai *mobile belt*) (Gambar 2, Sapiie dan Cloos, 2004).



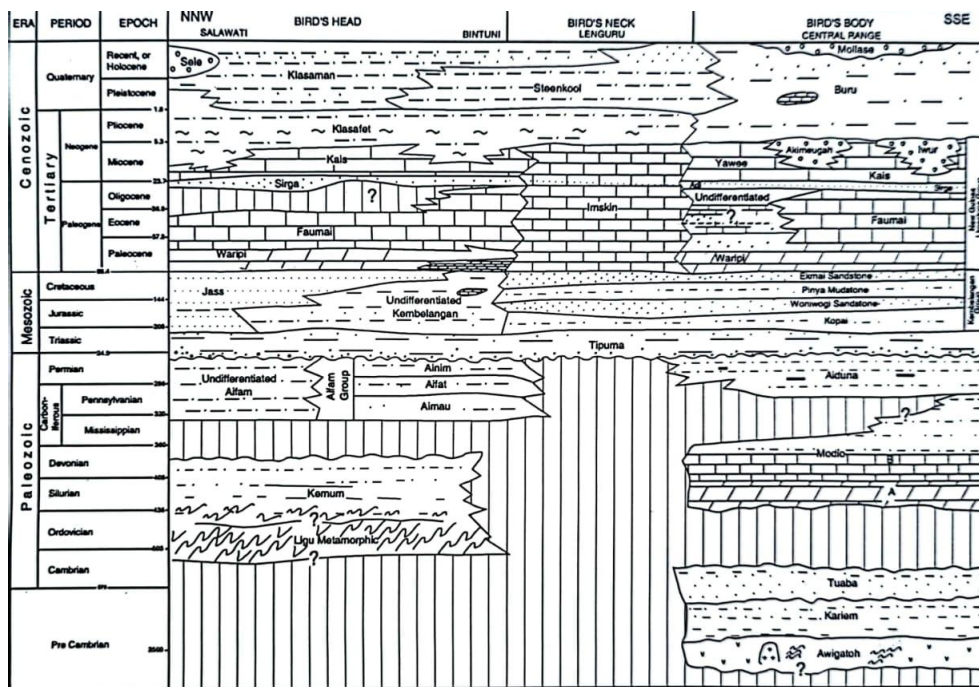
Gambar 2. Peta litotektonik di Pulau New Guinea (Sapiie dan Cloos, 2004).

Gerakan lempeng akan menghasilkan kegiatan magma, pola struktur batuan, dan pembentukan cekungan. Kegiatan magma terkait dengan proses mineralisasi. Cekungan adalah tempat hidrokarbon dijumpai. Jalur *foreland basin* di Papua adalah jalur dijumpainya cekungan, sedangkan jalur *fold-thrust belt* adalah jalur dijumpainya mineralisasi. Lempeng sebagai bagian bumi yang dinamis akan selalu bergerak menyeimbangkan diri, juga akan menghasilkan gempa bumi dan akan mempengaruhi hasil kegiatan yang ditimbulkannya.

Pola struktur merupakan bagian yang dihasilkan akibat pergerakan lempeng. Pola struktur di Indonesia bagian timur cenderung lebih kompleks (zona suture) dibandingkan dengan di Indonesia bagian barat. Batas tatanan geologi Indonesia bagian barat dan bagian timur berimpit dengan garis *Wallace*, yaitu garis khayal yang ditengarai sebagai batas persebaran jenis flora dan fauna. Perbedaan flora dan fauna pada lokasi yang relatif dekat merupakan salah satu yang mendukung teori pergerakan lempeng, sehingga batas *Wallace* tersebut kemudian dianggap sebagai batas tektonik. Batas garis *Wallace* dijumpai di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang menerus ke arah selatan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Interaksi konvergen yang menyerong antara Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik menghasilkan Sesar mendatar yang melewati Sorong sehingga disebut sesar mendatar Sorong. Sesar mendatar Sorong memanjang di sisi utara dari New Guinea. Menurut Charlton (2015), sesar mendatar Sorong tersebut sepanjang 900 km, menyebabkan terjadinya pergeseran kerak benua Australia yang bergerak ke barat dan bertumbukan dengan Sulawesi. Hal tersebut



Gambar 3. Peta geologi regional New Guinea (Davis 2012, dalam van Gorsel 2018)



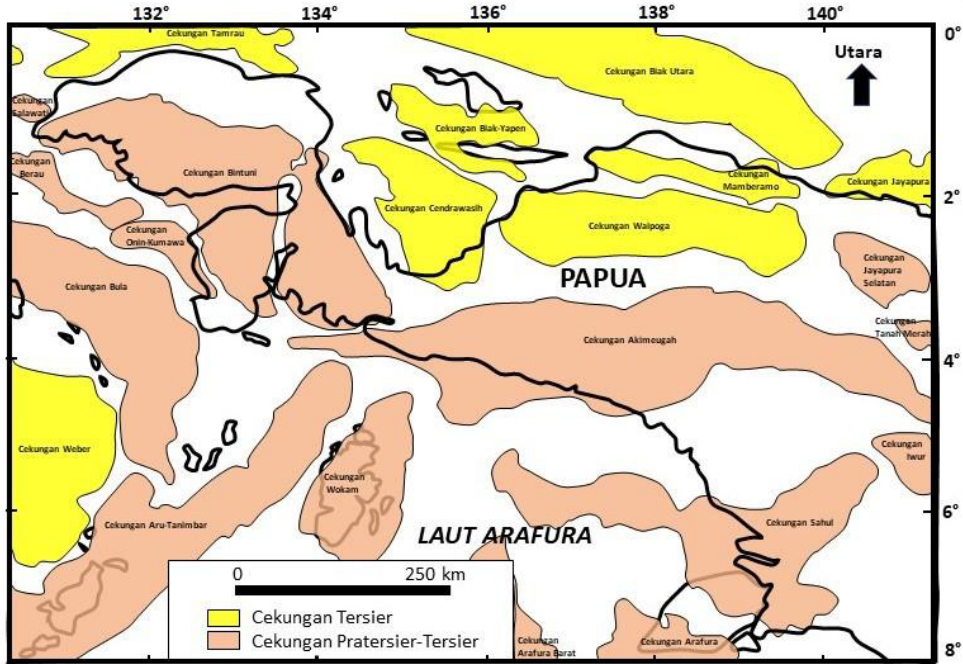
Gambar 4. Stratigrafi atau urutan batuan di kepala, leher, dan badan burung dan mewakili Cekungan Salawati, Cekungan Bintuni, dan Cekungan Lengguru (Darman dan Sidi, 2000).

bertanggung jawab terhadap deformasi di Sulawesi dan terbentuknya Cekungan Salawati di Papua yang memiliki prospek hidrokarbon.

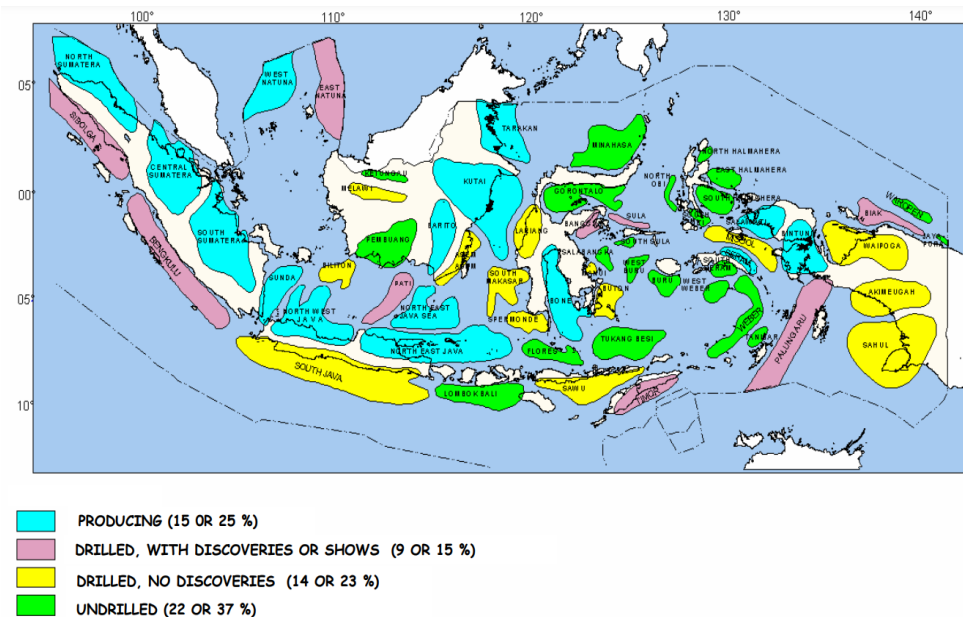
Gambaran umum tentang batuan isian cekungan, juga batuan yang mengandung mineral ekonomis, serta pola struktur yang terekam dalam batuan, keseluruhan yang tampak di permukaan sudah banyak dipetakan sebagai peta geologi. Peta geologi regional Papua dapat dilihat pada Gambar 3. Sementara, urutan susunan batuan atau stratigrafinya dapat dilihat pada Gambar 4.

Potensi Hidrokarbon dan Mineral di Papua

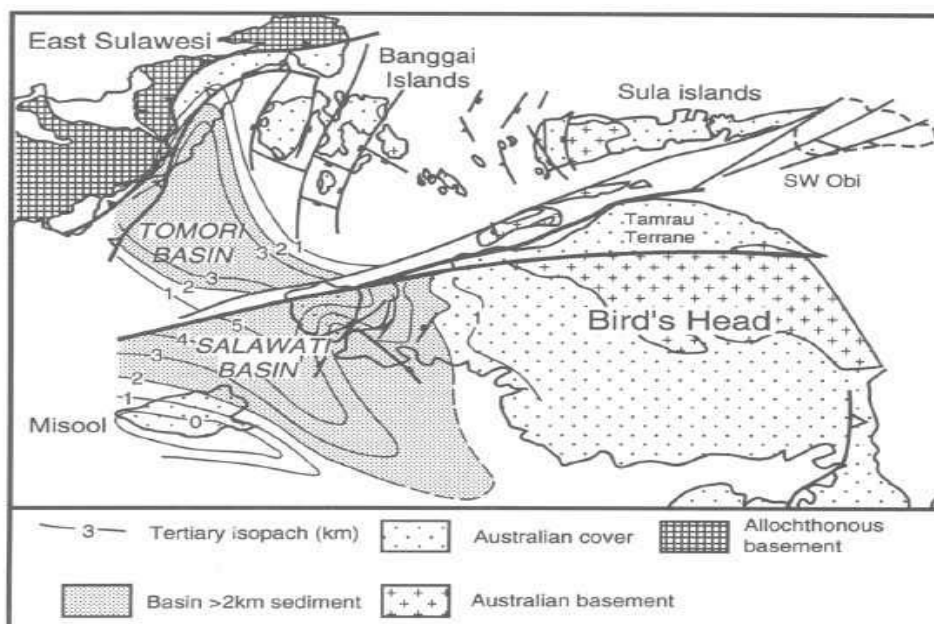
Sebelumnya telah dibahas mengenai jalur dijumpainya cekungan prospek hidrokarbon dan mineral. Cekungan di Indonesia oleh badan geologi sudah terpetakan sebagai peta cekungan sedimen Indonesia tahun 2009, demikian pun peta terkait keberadaan mineral terpetakan sebagai peta Metalogeni Indonesia tahun 2013. Dasar klasifikasi peta cekungan sedimen Indonesia adalah umur, yang terbagi sebagai Cekungan Tersier, Cekungan Pratersier dan Cekungan Pratersier-Tersier. Berdasarkan peta cekungan, daerah Papua termasuk dalam Cekungan Tersier dan Cekungan Pratersier-Tersier (Gambar 5). Khusus untuk Cekungan



Gambar 5. Peta cekungan hidrokarbon di Papua (dimodifikasi dari Badan Geologi, 2009 dan Bachri, S., 2014).



Gambar 6. Peta cekungan hidrokarbon di Indonesia berdasarkan status eksplorasinya (Sumber: IAGI, 2005).

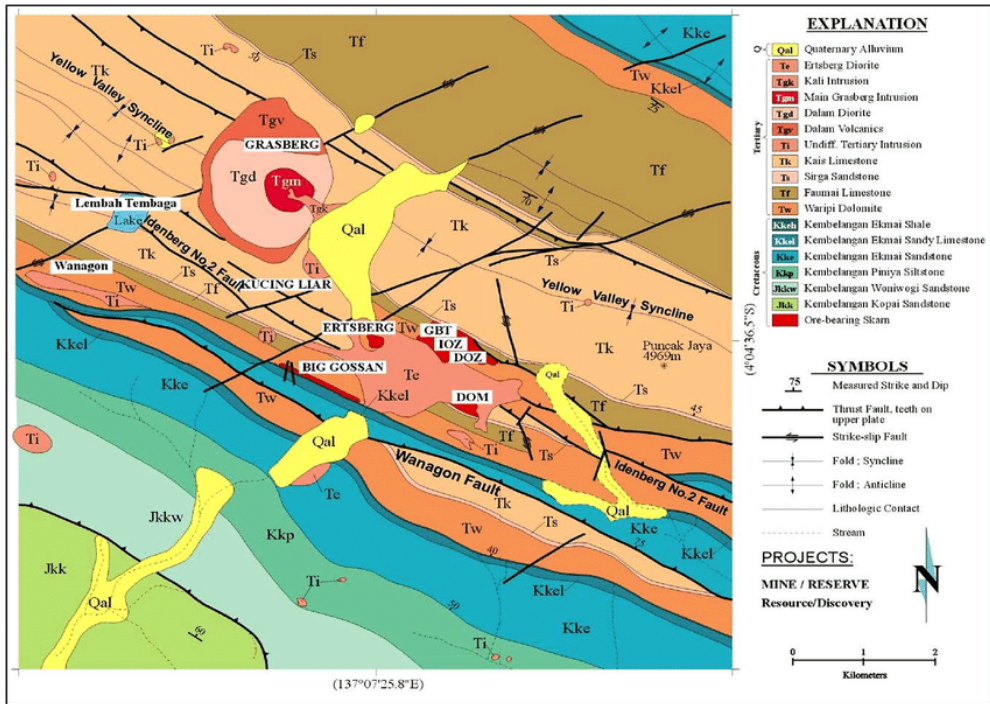


Gambar 7. Rekonstruksi Sesar Sorong terhadap Cekungan Tomori dan Cekungan Salawati (Charlton, 2015).

Bintuni dan Cekungan Salawati termasuk dalam Cekungan Pratersier-Tersier (Gambar 5). Berdasarkan status eksplorasinya, cekungan di Indonesia terpetakan pada Gambar 6 sebagai cekungan produksi hidrokarbon, cekungan telah dibor tetapi tidak ditemukan hidrokarbon, cekungan telah ditemukan tetapi belum berproduksi, dan cekungan belum dieksplorasi. Cekungan hidrokarbon masing-masing memiliki karakteristik. Salah satu cekungan di Papua, yaitu Cekungan Salawati terbentuk oleh interaksi lempeng secara *transform* yang menghasilkan sesar mendatar Sorong, yang juga bertanggung jawab terhadap terbentuknya Cekungan Tomori (Gambar 7) di Sulawesi (Charlton, 2015).

Gambaran sederhana membaca isian cekungan hidrokarbon adalah tentang urutan batuan pengisi atau stratigrafi. Masing-masing batuan tersebut mempunyai peranan, di antaranya sebagai batuan induk (*source rock*), batuan reservoir, batuan penudung (*cap rock*). Gambaran umum urutan stratigrafi Papua dapat dilihat pada Gambar 4. Batuan yang diendapkan sejak Kenozoikum (sekitar 66 juta tahun lalu) adalah batuan Formasi Waripin, Formasi Fumai, Formasi Siga, Formasi Kais, Formasi Klasafet, dan Formasi Klasaman, keseluruhan sebagai batugamping, batupasir, napal, dan batulempung pasiran.

Jalur mineralisasi sangat terkait dengan elemen tektonik. Di Papua jalur mineralisasi dijumpai pada zona *fold-thrust belt* (Gambar 5). Tambang Grasberg



Gambar 8. Peta lokasi tambang Grasberg dan geologi sekitar Grasberg (Setiawan, dkk., 2013).

(Gambar 8) yang dikelola PT Freeport juga terdapat pada jalur *fold-thrust belt*, terbentuk akibat pengaruh intrusi yang menghasilkan mineral tembaga dan emas. Jalur mineralisasi *fold-thrust belt* tersebut sudah banyak dikelola baik oleh berbagai industri pertambangan maupun oleh masyarakat lokal. Dalam perkembangannya, Grasberg adalah tambang terbuka yang kemudian dilanjutkan sebagai *Grasberg block cave* yang merupakan tambang bawah tanah. Besarnya cadangan *Grasberg block cave* hingga akhir tahun 2015 sebesar 1.011 miliar ton, dengan kandungan tembaga (Cu) 1% dan emas (Au) sebesar 0,77 g/t (Awoy dkk., 2018). Untuk meningkatkan perolehan hasil tambang mineral tembaga dan emas tersebut kemudian dilakukan perluasan area yang masih dipengaruhi intrusi dan di sepanjang jalur *Fold-thrust belt*, yaitu di area Kucing Liar, *Big Gosan*, DOZ (*Deep Ore Zone*), dan DMLZ (*Deep Mill Level Zone*). DMLZ memiliki cadangan sebesar 472 juta ton, dengan kadar tembaga 0,85% dan emas 1,72 g/t, dengan mineral bijih berupa kalkopirit, bomit, kovelit, hematit, stalerit, galena, dan pirit (Ruswanto dkk., 2017).

Berdasarkan peta metalogeni Indonesia (Badan Geologi, 2013), jalur mineralisasi bukan hanya pada zona *fold-thrust belt*. Pada rangkaian Pegunungan

Cycloop di Jayapura juga dijumpai mineral ekonomis berupa Ni dan Fe. Berdasarkan Pieters dkk. (dalam Permanadewi dkk., 2017), Jayapura masuk sisi selatan zona Kerak Samudera (Pieters dkk., 1983, dalam Permanadewi dkk., 2017), dengan batuan pembawa nikel berupa ofiolit yang berumur Jura (Kertapati dkk., 2001, dalam Permanadewi dkk., 2017). Tatanan tektonik terhadap mineralisasi berpengaruh terhadap pembawa nikel dan kandungan pembawa nikel di Jayapura khususnya mineral serpentin dan olivin, terdapat pada jalur batuan ultramafik (Haryati dkk., 2021).

Berdasarkan cekungan hidrokarbon (Gambar 5), Papua termasuk dalam cekungan tersier dan cekungan pratersier-tersier yang sebagian sudah produksi. Cekungan pratersier – tersier di antaranya adalah Cekungan Salawati, Cekungan Bintuni, Cekungan Sahul, Cekungan Akimeugah, dan Cekungan Iwur (Badan Geologi, 2009 dan Bachri, 2014). Tipe Cekungan Bintuni memiliki lapangan Wiriagar *deep* dan lapangan Vorwata, masing-masing memiliki cadangan sebesar 6,08 TCFG dan 1013 MMBOE, serta 14,03 TCFG dan 2338 MMBOE (Satyana, A.H., 2019). Berdasarkan besar cadangannya, kedua lapangan tersebut termasuk dalam kategori ladang gas raksasa di Indonesia (Gambar 4). Kategori sebagai ladang raksasa adalah memiliki cadangan ≥ 500 MMBO (*Million barrels of Oil*) atau 3 TCFG (*Trillion Cubic Feet of Gas*), sedangkan kategori ladang super raksasa memiliki cadangan sebesar ≥ 5000 MMBO atau 30 TCFG (Satyana, A.H., 2019).

Proses penelitian di daerah yang sudah terbukti memiliki prospek sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan hasil perolehan berdasarkan data-data baru terkait penyebaran dan jebakan minyak dalam satu cekungan. Selain itu hasilnya juga dapat dikembangkan pada cekungan lain dengan tipe yang sama. Demikian pun proses penelitian di Cekungan Salawati yang sudah ditemukan antara tahun 1930 hingga 1950, juga masih dilakukan, khususnya terhadap Cekungan Tomori yang sama-sama terpengaruh Sesar Sorong. Cekungan Salawati dan Cekungan Tomori yang terbentuk oleh sesar mendatar yang sama, sama-sama terbukti memiliki cadangan dan dieksploitasi, oleh Charlton (2015) dilakukan penelitian dan perbandingan. Batuan pengisi Cekungan Salawati adalah batuan yang berumur Paleozoik hingga Kenozoik (Satyana, 2001). Stratigrafi Cekungan Salawati dan Cekungan Tomori menumpang pada batuan dasar kontinental. Selama Miosen Akhir (umur Miosen adalah 5-24 juta tahun lalu), di Cekungan Salawati dan Cekungan Tomori diendapkan sedimen karbonat yang ditengarai oleh *pinnacle reef*, untuk Cekungan Salawati sedimentasi karbonat tersebut menerus. Saat Miosen–Pliosen di Cekungan Salawati diendapkan Formasi Klasaman, sedangkan di Cekungan Tomori diendapkan Formasi Kinton



Gambar 9. Batuan yang tersingkap di permukaan yang mewakili batuan Formasi Kintom dijumpai di daerah Batui, Sulawesi Tengah (kiri), dan batuan Formasi Biak yang dijumpai di daerah Biak, Luwuk, Sulawesi (kanan).

dan Formasi Biak. Gambaran umum batuan Formasi Kintom dan Formasi Biak dapat dilihat pada Gambar 9. Baik Formasi Kintom maupun Formasi Biak keduanya tersusun oleh batuan fraksi kasar berupa konglomerat dengan sisipan batupasir krikilan yang prospek sebagai batuan reservoir. Batuan prospek *source rock* dari kedua cekungan tersebut adalah batuan karbonat dan *calcareous shale*, yaitu Formasi Tomori (Cekungan Tomori) dan Formasi Klamongun atau Formasi Klasafet (Cekungan Salawati). Dalam Satyana (2001), batuan sumber minyak bumi (*source rock*) Cekungan Salawati terdapat pada Formasi Klasafet yang diendapkan pada awal Miosen hingga Pliosen. Adapun potensi reservoir pada batuan Formasi Faumai (akhir Eosen hingga Oligosen akhir) dan Formasi Kais (Oligosen akhir hingga Miosen akhir) berupa batuan karbonat, serta pada batupasir dari Formasi Klasaman (Pliosen awal hingga Pliosen akhir). Formasi Klasaman terbentuk dengan kecepatan sedimentasi yang tinggi serta oleh penurunan cekungan yang cepat sebagai hasil dari tektonik Sesar Sorong (Ovinda, 2018).

Penutup

Demikian gambaran umum dan sederhana tentang Papua, untuk memberikan gambaran betapa Papua kaya akan potensi sumber daya alam. Penelitian dan teori yang terus berkembang khususnya di Papua, merupakan kesaksian dalam menyingkap alam semesta. Proses menyingkap alam semesta secara konkret adalah bagian dari tugas dan perutusan. Tugas dan perutusan dalam

Katolik menjadi semakin mendesak dengan adanya perubahan-perubahan yang meluas dan mendalam (Anonim, 1975). Peranan dan tugas Gereja dalam proses perutusan masing-masing individu, khususnya masyarakat Papua, adalah memberi pengaruh agar dalam melaksanakan proses perutusan itu tidak bertentangan dengan sabda Allah dan rencana keselamatan. Dari diskusi dengan perwakilan warga Papua, terlihat bahwa masyarakat Papua sangat membutuhkan pendampingan yang tersistem dan terus-menerus untuk menjadi masyarakat mandiri. Pendampingan tersebut terutama oleh tokoh agama. Tokoh agama bagi kebanyakan warga Papua adalah tokoh yang sangat dihormati dan disegani. Peran Gereja adalah mempengaruhi masyarakat agar menjadi pribadi dengan kemampuan memahami, menerima, membagi hidup dan nasibnya dengan orang lain, memiliki solidaritas, serta usaha masing-masing untuk melakukan semua hal luhur dan baik (Anonim, 1975).

Dalam Anonim (2015) disebutkan bahwa alam semesta adalah saudari dan ibu pertiwi adalah rumah bersama, seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita, memelihara dan mengasuh, serta menyediakan aneka ragam; seharusnya kita bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Tanggung jawab tersebut dengan cara tidak merusak dan tidak menyalahgunakan, dan janganlah kita berpikir bahwa kita adalah tuan dan penguasa yang berhak menjarahnya. Hal tersebut karena alam ibarat sebuah kitab yang sangat indah, di dalamnya Allah berbicara tentang keindahan dan kebaikan-Nya yang tanpa batas (Fransiskus, dalam Anonim, 2015). Bukti tanggung jawab antara lain dalam mengeksploitasi sumber daya alam tidak menyebabkan kerusakan ekologis, perubahan iklim, pencemaran (air, tanah, dan udara); tidak melakukan kejahatan terhadap alam karena kejahatan terhadap alam adalah sebuah dosa (Bartolomeus, P., dalam Anonim, 2015).

Daftar Pustaka

- Anonim. 1975. *Evangelii Nuntiandi*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. (Kalangan sendiri)
- Anonim. 2015. *Laudato Si*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. (Kalangan sendiri)
- Aiwoy, F.G., Safri, I., dan Yuningsih E.T. 2018. *Kontrol Mineralogi terhadap "Problematik Ore" Cadangan Grasberg Block Cave (GBC) Tambang Bawah Tanah Freeport Indonesia di Papua*.
- Bachri S. 2014. *Kontrol Tektonik dan struktur geologi terhadap keterdapatan Hidrokarbon di Daerah Papua*. Bandung: Pusat Survei Geologi.

- Badan Geologi, 2009, Cekungan Sedimen Indonesia, <http://psg.bgl.esdm.go.id/pameran/index.php?kategori=cekungan-sedimen&halaman=cekungan&title=CekunganSedimen> (diakses pada 3 April 3 2018).
- Charlton. 2015. *Correlation of the Salawati and Tomori Basins, Eastern Indonesia: A Constraint on Left-Lateral Displacements of the Sorong Fault Zone*. Pardue University.
- Darman H. dan Sidi, F.H., 2000. *An Outline of The Geology of Indonesia*. Ikatan Ahli Geologi Indonesia.
- Haryati E., Dahlan K., Mamtiri S.Y.Y., dan Singir B. 2021. "Profil dan Karakteristik Mineral Nikel Laterit di Daerah Angkasa Pura, Kota Jayapura, Papua, Indonesia." dalam: *Jurnal Fisika* 11 (2) 95-104.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2022. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 301.K/MB.01/MEM.B/2022*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nurjana I. 2021. *Pengaruh Geomorfologi terhadap Proses Laterisasi Nikel (Ni) di Sulawesi*. Gorontalo: Penerbit UNG Press.
- Ovinda, Sunardi E., Hamdani A.H., Burhannudin M., dan Triwerdhana A. 2018. "Facies and Sequence Stratigraphy Analysis of Klasaman Formation in the "X Well", Northern Salawati Basin, Papua, Indonesia." dalam: *Open Journal of Geology*, <http://www.scirp.org/journal/oig>.
- Permanadewi S., Wahyudiono J., Tampubolon A. 2017. "Cebakan Nikel Laterit di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat." dalam: *Buletin Sumber Daya Geologi*, Volume 12, no 2. 55-70.
- Ruswanto, Rosana, M.F., Yuningsih, E.T., dan Purwaiswanto. 2017. "Mineragrafi Batuan Penyusun Tambang Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT. Freeport." dalam: *Bulletin of Scientific Contribution: Geology*. Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran.
- Sapiie B. dan Cloos M. 2004. "Strike-Slip Faulting in The Core of The Central Range of West New Guinea: Ertzberg Mining District, Indonesia." dalam: *GSA Bulletin*, v 116, no. 3/4, hal. 277-293.
- Satyana, A.H. 2009. "Emergence of New Petroleum System in the Mature Salawati Basin: Keys from Geochemical Biomarkers." dalam: *Proceedings Indonesian Petroleum Association*, 172-192. <https://doi.org/10.29118/IPA.1871.09.G.172>
- _____. 2019. "Giant Fields of Indonesia: Play Types, Geologic Factors, and Prospectivities of Suture Giant Fields." dalam: *Proceedings, Indonesian Petroleum Association*.
- Setiawan, B., de Jong, G., Soeldjana, A., Aloysius, C., Webb, B., Issel, A., Lasito S. 2013. "Mineralogy and Chemical Characteristics of The Waripi-Hosted

- Cu-Au Skaran System at The Big Gossan Underground Mine, Papua, Indonesia-Determining The Host Rocks Using XRD and XRF Analysis.” dalam: *Proceedings of Papua and Maluku Resources*, MGEI Annual convention, Kuta, Bali, Indonesia.
- Hall K.H.R. 2003. *Mesozoic-Cenozoic Evolution of Australia’s New Guinea Margin in West Pacific Context*.
- Harahap B.H. dan Abidin H.Z. 2013. *Peta Metalogeni Indonesia, Skala 1 : 5.000.000*. Bandung: Badan Geologi.
- Van Gorsel, J.T. 2021a. *Pioneers and Milestones of Indonesian Geology: 3-Paleontologists and Other Specialists, WWII and Post-1945 Restart*. ITB Press, hal. 468.
- _____. 2021b. *Pioneers and Milestones of Indonesian Geology: 4-Petroleum and Mining Industries, WWII and post-1945 Restart*. ITB Press, hal. 468.
- _____. 2021c. *Pioneers and Milestones of Indonesian Geology: 1-Scientific Exploration*. ITB Press, hal. 333.
- _____. 2018a. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Regional, Sunda Land*. Vol. 1. www.vangorselslist.com
- _____. 2018b. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Sulawesi, North Moluccas, Banda, Lesser Sunda Island, New Guinea*. Vol 3. www.vangorselslist.com
- _____. 2018c. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Java, Borneo*. Vol. 2. www.vangorselslist.com
- _____. 2018d. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Sulawesi, North Moluccas, Banda, Lesser Sunda Island, New Guinea*. Vol. 3. www.vangorselslist.com
- _____. 2018. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Circum-Indonesia-NW, Circum-Indonesia-SE*. Vol. 4. www.vangorselslist.com
- _____. 2018. *Bibliography of the Geology of Indonesia and Surrounding Areas: Paleontologi, Biostratigraphy, Hydrocarbons, Coal, Mining, Historic Interest, Links*. Vol. 5. www.vangorselslist.com

Papua, Sumber Pangan Nusantara

RONALD GUIDO SUITELA

Tampaknya judul tulisan ini agak berlebihan, namun setelah saya pikirkan lebih lama, tampaknya ada benarnya juga karena sumber bahan pangan kita, lebih khusus lagi sumber karbohidrat kita bukan hanya beras, jagung, dan kentang. Ketika kita membicarakan ketersediaan beras dan kawan-kawannya, sering kali kita terhenti pada perhitungan yang rumit, padahal kita punya sumber karbohidrat lain yang tak kalah hebatnya, bahkan lebih banyak keunggulannya daripada sumber karbohidrat yang selama usia kita sudah kita kenal dan hidupi.

Saya merasa cukup mengenal Papua, walaupun pasti masih belum seberapa dalam seperti orang lain. Setelah bertugas selama lima tahun di Papua, saya menjadi tahu dan sadar bahwa ternyata Papua yang saya kenal dari informasi di sekolah, organisasi, dan semua sumber informasi yang bisa saya dapatkan sejak kecil sangatlah jauh berbeda. Papua tidak hanya memiliki orang-orang asli yang hebat dan menyenangkan, emas berlimpah, burung cenderawasih, ikan hiu tutul yang cantik, puncak tertinggi dan bersalju abadi di Cartenz. Papua juga menyimpan sumber pangan yang tidak akan habis untuk menghidupi semua penduduk Nusantara.

Dari informasi yang saya terima dalam perjalanan penugasan tersebut, kebutuhan pati nasional sekitar 5 juta ton per tahun (informasi ini saya terima tahun 2015, tentu perlu *di-update* lagi), di mana lebih dari setengahnya harus dicukupi oleh pati impor (jagung, beras, dan lain-lain). Ternyata Papua menyimpan jauh melebihi kebutuhan pati nasional tersebut. Satu hektare hutan sagu alam Papua, jika dikelola dengan baik, bisa menghasilkan rata-rata 15 ton pati setiap tahun. Maka, untuk memenuhi kebutuhan pati nasional, kita hanya perlu mengelola sekitar 334 ribu ha saja. Di Papua ada 5,5 juta ha lahan basah yang bisa diasumsikan berisi pohon sagu alam. Bayangkan, hanya dengan kurang dari 10% saja luasan potensi sagu alam yang ada di Papua, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pati nasional.

Apalagi sekarang tepung sagu sudah bisa (bahkan sudah ada di pasaran) dibuat buliran beras analog sagu.

Hutan sagu alam tentu punya cerita dan sejarahnya sendiri. Dengan keilmuan yang sudah lebih dari cukup dan dikerjakan oleh SDM yang berintegritas maka bisa dipastikan Papua bukan hanya bisa sejahtera, melainkan juga menjadi inang bagi semua rakyat Indonesia. Papua adalah lumbung pangan, bukan hanya sumber emas.

Cerita Dimulai di Sini

Saya Ronald Guido Suitela, pensiunan Perum Perhutani tahun 2017. Pada lima tahun terakhir (2012-2017) masa tugas saya, saya bertugas sebagai perwakilan Perum Perhutani Papua. Penugasan ini agak luar biasa karena berada di luar wilayah kerja dan (agak unik) juga karena tidak searah dengan tugas dan usaha pokok sebagai BUMN kehutanan. Penugasan dari Menteri BUMN saat itu (Bapak Dahlan Iskan) bertanggal 5 Januari 2012, untuk membangun pabrik sagu di Papua, tepatnya di Kais Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya (waktu itu Papua Barat).

Direksi bekerja “cepat” dalam merespons penugasan yang diberikan oleh Menteri BUMN, sebuah tugas *out-of-the-box* karena memang tugas Perhutani hanya menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung seluas 2,4 juta ha di Pulau Jawa dan Madura. Tugas ini jelas di luar wilayah kerja, apalagi sagu adalah urusan pangan. Kata “cepat” di atas saya beri tanda kutip rupanya menjawab kondisi saat ini. Pabrik sagu yang berhasil dibangun dan sudah diuji coba di depan Presiden pada 1 Januari 2016 lalu, akan saya ceritakan dalam pembahasan setelah ini.

Awal Februari 2012, saya (waktu itu masih menjabat sebagai Administratur/KKPH Telawa, yang wilayahnya meliputi empat kabupaten dan pusatnya di Boyolali) mendapat perintah tugas untuk menjadi salah satu dari empat orang yang diutus ke Papua Barat untuk melakukan studi awal inventarisasi potensi sagu alam di daerah kepala burung Papua. Kami (tim survei awal) berangkat pada tanggal 22 Februari 2012, langsung ke Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat. Kami menghadap Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan, dan Universitas Papua, dimulai dengan kontak dan jejaring yang ada baik kedinasan maupun personal. Karena ini adalah penugasan *out-of-the-box*, semua serba “gelap”, yang terang dan bisa diakses dalam kesempatan pertama adalah jejaring alumni IPB, UGM, dan Unhas serta jejaring Gereja (Keuskupan). Kebetulan sekali Gubernur Papua

Barat saat itu, (Alm) Bapak Abraham Atururi, adalah seorang Katolik, jadi saya bisa masuk dengan alasan keperluan Gereja.

Dari Manokwari kami langsung memilih Sorong Raya sebagai lokasi yang dianjurkan Dinas Kehutanan Provinsi. Kebetulan sekali ada kontak yang bersambung di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Harapan yang menggebu untuk menunaikan tugas kurang bersambung dengan baik karena birokrasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong kurang mendukung, walaupun ada beberapa teman alumni Unhas dan SKMA yang bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ini. Masyarakat kampung yang mau kami masuki juga tidak menyambut dengan baik. Kami disambut di dermaga kampung itu dengan kalimat yang kurang bersahabat, kami bahkan tidak diizinkan masuk ke dalam desa itu. Perahu yang kami tumpangi harus berputar ke arah Kota Sorong kembali, dalam keadaan hujan lebat. Untungnya ada kampung terapung para nelayan Bugis di tepi teluk kecil. Kami menginap dan diberi makan malam karena perahu bahan makanan kami terpisah saat memasuki sungai ke arah kampung tadi. Malam itu kami boleh menginap di pondok genset yang berminyak karena oli dan bahan bakar ada di semua area pondok yang berukuran 3x3 meter itu. Kami kembali ke Sorong tanpa hasil.

Hari berikutnya kami mencoba daerah yang tidak direncanakan, yakni Kabupaten Sorong Selatan. Kami langsung ke Teminabuan, dan disambut baik oleh teman-teman Dinas Kehutanan Sorong Selatan dan Bappeda Sorsel. Atas anjuran mereka, keesokan harinya kami meneruskan perjalanan ke Distrik Kais, 5 jam berperahu ke sana melalui sungai, muara, laut, lalu masuk muara dan sungai lagi. Rupanya alam semesta mendukung dan Tuhan mengizinkan kami masuk ke desa tersebut. Nama kampungnya Kais, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan. Kami disambut hangat oleh masyarakat dan perjumpaan yang luar biasa itu membuahkan hasil. Sebenarnya kampung itu juga pernah didatangi pengusaha sagu dan mereka juga menolak, bahkan salah satu kampung yang sangat menolak adalah mereka. Sekali lagi jika Tuhan berkehendak, kami yakin pasti semua sudah disiapkan.

Satu hari, dua hari kami berkenalan dan mulai pelan-pelan menghimpun cerita rakyat. Akhirnya kami diizinkan untuk memulai studi lapangan untuk inventarisasi potensi pohon sagu di hutan. Hasilnya sangat mencengangkan karena kandungan sagu dalam sebatang pohon sagu (mereka menamainya sagu raja, tinggi pohon bisa mencapai 12 meter) bisa mencapai 60-100 kg. Ini sepuluh kali lebih banyak daripada pohon sagu yang ada di Sumatera dan Malaysia. Seminggu lebih kami di Kais dan kami kembali ke Jakarta membawa kabar yang cukup baik. Semua

kembali melaksanakan tugas seperti sediakala, hanya ketua tim yang bekerja untuk menuntaskan hasil inventarisasi dan membuat resume karena kebetulan beliau bekerja di Pusat Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan di Kantor Direksi Jakarta.

Setelah dilakukan FGD dan beberapa rapat penting dan melaporkan hasil studi kelayakan kepada Menteri BUMN, Direksi Perum Perhutani memutuskan lokasi pembangunan pabrik sagu, yakni di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat (saat ini menjadi Provinsi Papua Barat Daya). Tim pendahulu ditentukan sebanyak empat orang dan saya ditunjuk sebagai pimpinan yang bertugas mengurus semua aspek legal (Izin Prinsip dari Bupati, Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu, Amdal, IMB, dan sebagainya), juga menyiapkan masyarakat untuk menerima investasi negara melalui pabrik sagu di daerahnya. Ada tim lainnya dengan jabatan setingkat, yang disebut PMU (*Project Management Unit*) yang bertanggung jawab membangun fisik pabrik, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai uji coba pabrik. Jadi, saya hanya mengerjakan bangunan sosialnya dan perizinan yang dibutuhkan, juga koordinasi antarlembaga dan pemerintah setempat.

Pada 5 Oktober 2012 perwakilan Perum Perhutani yang telah ditunjuk berangkat melaksanakan tugas persiapan pembangunan pabrik sagu di Kais. Tiga bulan pertama berhasil mendapatkan izin prinsip Bupati, 3 bulan setelah itu izin IUPHHBK dari Kementerian LHK terbit, dan 2 bulan setelahnya lagi AMDAL beres. Oktober 2013, GTA (Gelar Tikar Adat), musyawarah tertinggi masyarakat adat digelar dan masyarakat sepakat menerima pabrik sagu di kampung mereka dan bersedia menjadi bagian dari industri pengolahan sagu tersebut, mulai dari menyediakan bahan baku sampai ikut serta dalam pekerjaan di pabrik sagu nantinya.

Awal 2014, *ground breaking* pabrik sagu dilakukan dan semester pertama 2015 pabrik selesai dikerjakan, *finishing* sampai dengan Oktober dan akhir 2015 dilakukan *commissioning* pabrik untuk menyatakan pabrik bisa berfungsi dengan baik. Dari enam kali uji coba pabrik didapatkan hasil tepung sagu yang bagus, dengan total hasil kurang lebih 400 ton tepung sagu. Tanggal 1 Januari 2016 Presiden RI berkenan mengunjungi pabrik ini dan sempat melihat sendiri pengoperasiannya sampai menghasilkan tepung sagu. Setelah dikunjungi Presiden beberapa kali, percobaan produksi dilaksanakan untuk memastikan pabrik siap beroperasi sampai dengan Januari 2017. Seiring dengan masa uji coba, semua kendala dicatat dan dilaporkan. Namun sejak 2017 sampai sekarang tidak pernah lagi dioperasikan.

Perum Perhutani terlalu cepat bereaksi dan kurang berani menagih janji BUMN lain yang sudah menjanjikan kerja sama saat menerima penugasan di Papua. Sekiranya PLN dan Pertamina dan beberapa BUMN lain bisa bahu-membahu mengatasi masalah dan kendala yang ada, niscaya produksi sagu sebagai bahan pangan Nusantara sudah mulai tercukupi saat ini.

Beberapa Masalah

- a. *Power*: Awalnya dirancang dengan menggunakan listrik, namun karena PLN tidak kunjung mewujudkannya padahal pada awal penugasan Menteri BUMN menugaskan semua BUMN yang berhubungan, termasuk PLN dan Pertamina. Untuk sementara lalu ditambahkan *Power Supply* dari genset, tetapi tidak akan kuat lama akibat tingginya biaya produksi dengan BBM fosil.
- b. *Kanal*: diperlukan pembangunan kanal untuk mengangkut batang sagu dari hutan ke pabrik, namun pembangunannya belum dilakukan.
- c. *Jaringan Jalan*: pembangunan jalan tembus dan jembatan di titik yang diperlukan terhenti seiring berhentinya aktivitas pembangunan di pabrik.

Sekilas Tentang Sagu

Cerita yang (Mungkin) Tidak Pernah Tertulis

Saat terjadi penumpasan gerilyawan bersenjata di Maluku, komandan operasi menerima informasi intelijen bahwa para gerilyawan sudah terkepung dan tidak ada lagi pintu logistik bagi mereka. Semua pintu masuk ke hutan sudah dikuasai. Maka, komandan memerintahkan untuk tidak perlu lagi mengejar para gerilyawan karena sebentar lagi mereka akan menyerahkan diri karena kehabisan bahan pangan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti, gerilyawan tidak menyerahkan diri bahkan meningkatkan perlawanan. Pada akhir operasi didapatkan kabar intelijen bahwa para gerilyawan makan sagu, mereka tidak perlu makan nasi, lauk berlimpah di hutan. Maka pada tahun 1979 Presiden RI (yang adalah komandan operasi tersebut, sangat penasaran dan mau tahu seperti apa kehebatan sagu itu) mengeluarkan perintah tugas kepada tim BPPT agar melakukan penelitian tentang sagu dan mengembangkannya sebagai alternatif pangan bagi bangsa Indonesia. Cerita menjadi bersambung karena pertengahan 1980-an ada tim juga yang sudah pernah masuk ke Kais ini, tetapi tidak berhasil tuntas dan setelah terputus dua dekade, tim terakhir yang masuk adalah Perum Perhutani.

Saat survei awal sebelum mulai proyek pembangunan pabrik, beberapa tetua suku bercerita tentang kedekatan mereka pada korps rimbawan. Dari semua petugas negara yang paling dekat dan dipercaya oleh masyarakat adat adalah orang kehutanan. “Mereka memperhatikan kami, keluarga kami dan tidak pernah memaksa kami untuk keperluan mereka. Semua yang bekerja dibayar sesuai perjanjian dan pekerjaannya hanya mengukur dan memasang tanda batas hutan.”

Pendekatan inilah yang saya lalui untuk menjangkau hati masyarakat. Di awal tugas saya di Papua, saya menyewa eks kantor Dinas Kehutanan Sorong Selatan di Teminabuan yang sudah lama tidak terpakai. Kemudian saya membuat sebuah acara makan papeda bersama senior rimbawan. Saya mencari dan mengundang para senior Kehutanan, pensiunan Jawatan Kehutanan yang masih hidup di sekitar Teminabuan. Saya mendapatkan 16 orang dan hampir semua laki-laki, hanya ada 1 orang ibu. Mereka semua adalah pekerja di hutan damar (*Agathis dammara*), mulai dari penyadap getah (getah damar, yang disebut kopal, diekspor langsung ke Belanda dari Pelabuhan Teminabuan). Satu-satunya ibu tadi adalah tenaga administrasi, dan salah seorang dari mereka adalah mandor sadap. Jabatan tertinggi di Teminabuan adalah KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan, yang biasa dipanggil Pak Mantri). Beliau adalah Meneer Jansen. Kantornya adalah kantor yang saya sewa tersebut. Semua sangat segan pada Meneer Jansen karena beliau sangat disiplin dan tegas. Jabatan di atas KRPH adalah KBKPH atau sering disebut sinder kehutanan, berkedudukan di Kota Sorong. Lalu di atasnya lagi adalah KKPH atau sering disebut administratur, berkedudukan di Manokwari. Mereka semua tidak pernah bertemu dengan sinder, apalagi administratur; jabatan itu seperti di atas langit. Masyarakat Papua pedalaman banyak yang sudah akrab dengan dunia kehutanan dan para rimbawan tersebut sudah sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Dalam acara tersebut mereka semua memperkenalkan diri dan dengan bangga menceritakan pengalaman masa lalu, bagaimana mereka diajarkan bekerja dan bangga menjadi pegawai kehutanan, sangat hormat kepada atasan, dan memegang teguh jiwa korsa rimbawan. Saat gaji bulanannya, mereka mesti berjalan kaki dari Ayamaru yang jaraknya sekitar 64 km, melalui jalan setapak di hutan. Sebagian dari mereka sudah hidup lebih baik sekarang, beberapa dari mereka malah mempunyai anak yang menjadi kepala dinas dan pejabat di kabupaten dan provinsi. Ketika tiba giliran saya untuk memperkenalkan diri, mereka semua mendesak untuk menceritakan juga pengalaman bekerja sebagai rimbawan di Jawa. Hal ini bisa dimaklumi karena mereka mendengar bahwa kehutanan di Jawa itu sangat bagus pengelolaannya. “Anak, kamu ini sebagai

apa di kehutanan di Jawa sana?” tanya mereka. Saya sudah mempersiapkan diri untuk mengenakan seragam kehutanan saya (kami, rimbawan mempunyai seragam yang universal, sama di seluruh penjuru dunia, yakni cokelat dan hijau, baju yang sama yang mereka miliki dulu), bukan seragam administratif. Saat saya memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa saya adalah administratif di Jawa Tengah, mereka semua lama terdiam dan ada yang mulai berbicara, “Akhirnya kita lihat juga yang namanya administratif hari ini...” Sebagai informasi, sejak kemerdekaan RI manajemen dan administrasi kehutanan berubah menjadi Dinas Kehutanan, kecuali di Pulau Jawa dan Madura.

Pertemuan kami akhiri dengan makan papeda bersama dan saya menyempatkan diri mengantarkan mereka pulang dengan mobil yang saya kemudikan agar bisa mengobrol lebih lama, yang paling jauh harus menempuh satu jam perjalanan dari Teminabuan. Besoknya semua urusan di Kantor Bupati dan banyak urusan kemasyarakatan lainnya menjadi sangat lancar karena para senior sudah bercerita kepada anak-anak dan keluarganya, dengan pesan, “*Harus kamorang bantu itu orang perhutani, dong semua Bapa pu teman.*”

Cerita tidak berhenti di situ karena tahun 2014 saat pilpres, Distrik Kais (lokasi pabrik sedang dibangun) menjadi satu-satunya distrik dari 10 distrik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan yang 100% memilih Joko Widodo (9 distrik lainnya memilih Prabowo) karena mereka tahu dari berita bahwa Pak Joko Widodo adalah insinyur kehutanan. Luar biasa rasa sayang mereka kepada sesama rimbawan. Sayang sekali saat kunjungan Presiden ke Kais pada 1 Januari 2016, cerita itu tidak muncul karena semua rangkaian acara “dikondisikan” oleh protokol kantor direksi yang tidak tahu cerita di lapangan.

Fakta Ekologis

Hasil alam ini didapatkan dalam bentuk tepung yang diperoleh dari batang pohon sagu yang menjelang berbunga, seluruh batangnya dipenuhi persiapan makanan berupa pati untuk persiapan regenerasi melalui bunga dan buah. Setelah berbunga dan apalagi menjadi buah, pohon ini menggunakan semua deposit makanan yang ada di batang tersebut sehingga ketika selesai masa berbuah persediaan makanan di batang sudah terpakai semua. Dengan kata lain tepung sagunya sudah tidak ada.

Sagu mempunyai dua cara berkembang biak: secara generatif melalui buah dan secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh seperti pisang. Jadi, kalau kita memanen pati yang ada di batang pun sebenarnya tidak menghentikan

perkembangbiakannya, malah membuatnya berguna dan memberi ruang tumbuh bagi tunas baru yang tumbuh dari dalam tanah.

Sagu tumbuh di lahan basah dan mempunyai kemampuan tumbuh sebagai jenis yang pionir, tumbuh cepat di lahan yang dulunya bukan dominan sagu. Pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan secara masif melalui HPH, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama telah mengubah hutan-hutan yang didominasi oleh merbau (*Intsia bijuga*) di lahan lahan basah menjadi kawasan yang terbuka dan berubah menjadi hutan sekunder. Hutan merbau yang dulu lebat telah habis digantikan lahan hutan yang berisikan jenis-jenis non kayu yang (waktu itu) tidak dilirik sama sekali.

Sagu tumbuh dengan subur di areal hutan lahan basah yang telah rusak, bahkan formasi (sagu) ini bisa mendominasi kawasan yang terbuka. Walaupun di sana juga ada nipah dan pinang, saudara-saudaranya, sagu telah menunjukkan keunggulannya. Hal ini juga menunjukkan betapa kemurahan Tuhan selalu hadir di saat manusia terancam bencana. Sagu telah hadir dalam jumlah yang banyak sebagai lumbung pati yang tidak akan habis, kecuali dirusak keberadaannya.

Mendominasi hampir semua lahan basah yang ada di Papua sampai lebih dari 5 juta ha, sagu memberi persediaan pati untuk bahan pangan kita. Sebagai substitusi beras dan pati lainnya, sagu tersedia dalam jumlah yang melimpah. Dari hasil studi kelayakan yang kami (Perhutani) lakukan, didapatkan angka setidaknya 15 ton/ha. Jika kita mengelola kawasan seluas 100 ribu ha saja maka kita akan memperoleh hasil 1,5 juta ton tepung sagu alias pati siap konsumsi. Ini sama dengan nilai produksi pati nasional dalam setahun. Bandingkan dengan sawah yang hanya bisa menghasilkan 6-8 ton per hektar setiap tahunnya, padahal subsidi pemerintah untuk menghasilkan beras cukup besar, mulai dari irigasi, pupuk, penanggulangan hama dan penyakit, penyuluhan, dan lain-lain. Sagu yang ada di hutan alam akan menjamin ketersediaan kebutuhan pangan nasional, bahkan bisa diekspor ke negara yang membutuhkan pangan. Teknik pemanenan yang baik dan bijaksana serta ramah lingkungan akan menghasilkan kebutuhan pangan yang bisa diperoleh terus-menerus tanpa harus dirawat dengan biaya tinggi.

Fakta Nutrisi

Sejak ditugaskan mengawal pembangunan pabrik sagu di Kais, saya beruntung bisa mengikuti berbagai seminar dan lokakarya di dalam maupun luar negeri, bertemu dengan orang-orang pintar. Beberapa informasi penting tentang sagu yang disampaikan oleh para ahli sagu (ironisnya negara yang tidak memiliki

sagu, seperti Jepang, justru mempunyai profesor sagu lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki kawasan dan sebaran sagu alam yang sangat luas) dapat saya sampaikan sebagai berikut.

- a. Sagu memiliki indeks glikemik paling rendah, membuat pati ini tidak mudah berubah menjadi gula yang berbahaya bagi penderita DM (diabetes melitus) sehingga memungkinkan dikonsumsi dengan bebas oleh penderita DM.
- b. Non-GMO (*Genetic Modified Organism*) karena tidak perlu dimodifikasi genetiknya. Sagu sudah tersedia banyak dan tidak memerlukan rekayasa teknologi. Sagu diekstrak dari hutan alam yang tidak perlu dipupuk dengan pupuk anorganik dan tidak perlu disemprot obat-obatan pembasmi gulma dan hama.
- c. *Gluten free*. Sagu adalah pati yang tidak mengandung gluten. Bagi penderita penyakit tertentu, makanan yang mengandung gluten harus dihindari. Maka itu, sagu adalah jawaban bagi yang memerlukan makanan bebas gluten. Memang ada teknologi yang bisa digunakan untuk melepaskan zat gluten dari tepung, tetapi teknologi ini cukup mahal sehingga makanan dengan label “*gluten free*” menjadi berkali-kali lipat harganya daripada makanan yang masih mengandung gluten. Sagu sudah dibebaskan dari gluten sejak dari sumbernya dan tanpa biaya.
- d. *Taste free*. Sagu tidak berasa sehingga kita tetap akan bisa menikmati lezatnya lauk yang kita makan.
- e. Kandungan gizi lainnya yang masih banyak.

Fakta Gaya Konsumsi

Sejak tahun 2000-an teknologi pangan sudah berkembang pesat. Kita tidak saja disuguhi nasi dari beras/padi (*Oryza sativa*) tapi juga beras analog sagu, porang, dan lain-lain. Sagu saat ini bisa dikonsumsi dalam bentuk nasi, mie pasta, dan lain-lain. Sudah banyak yang memproduksinya, termasuk PT Asindo dari Bangka. Jadi, makan sagu tidak lagi hanya dalam bentuk papeda, kapurung, ongol-ongol, dan pangan lokal lainnya.

Fakta Produk

Tepung sagu bisa dikembangkan lagi menjadi produk lainnya, seperti gula pasir. Selain gula, juga bisa dibuat produk energi, seperti bioetanol yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan (sudah diujicobakan oleh BPPT).

Penutup

Perum Perhutani bisa menunaikan tugas dengan baik, nyaris sempurna di Papua karena kemampuannya menyatu dengan lingkungan. Di Jawa dan Madura pun harus bisa mengatasi masalah sosial di sepanjang batas hutan negara karena tekanan masyarakat sekitar yang pada umumnya kurang beruntung dibandingkan orang yang hidup di kota besar, walaupun ada saja yang hidup miskin di pinggiran kota. Perhutani sudah sangat paham dan andal menemani masyarakat yang kurang beruntung hidupnya.

Papua punya cerita yang lain. Orang Papua tidak miskin dan apalagi lapar, juga tidak bodoh dan apalagi jahat. Masyarakat lokal telah jauh dipaksa mengubah pola hidup sehat menjadi sangat tidak sehat, mengajarkan mereka makan nasi, mi instan, dan semua panganan kemasan yang praktis. Juga mengajarkan mereka cara hidup praktis yang melupakan kearifan lokal yang sangat menghargai dan bersahabat dengan alam. Orang Papua telah jauh dipaksa berpola hidup sama dengan saudaranya di Jawa dan pulau-pulau lain. Rimbawan yang dikirim Menteri BUMN adalah insan BUMN yang sesuai (dari sisi pemerintah), yang biasa *live in* dalam menjalankan tugasnya, yang memungkinkan mereka makan apa yang dimakan orang lokal, tidur di tempat masyarakat tidur, bergaul bahkan berbahasa dengan bahasa masyarakat asli. Rimbawan bisa memahami semua masalah sosial yang ada dengan lebih baik karena mereka datang dan hidup bersama masyarakat. Rimbawan bukan amtenar dari kota yang datang dengan setumpuk nasihat tentang bagaimana hidup di tempat yang tidak pernah mereka hidupi. Rimbawan lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Dalam hal ini Pak Menteri melakukan kebijakan yang sangat pas. Papua membutuhkan amtenar yang bisa mendengarkan, karena itulah Perhutani tidak membutuhkan waktu yang lama (33 tahun setelah perintah Presiden dikeluarkan 1979) dan hanya butuh 3 bulan saja izin prinsip dari pemerintah daerah dan masyarakat adat bisa didapatkan.

Akan tetapi, Perum Perhutani kurang andal dalam hal industri di luar bidang kehutanan, apalagi industri pangan. Perum Perhutani harus *legawa* mengajak pihak lain yang berkompeten dalam hal ini untuk bersama-sama membangun industri pangan ini jika mau terus terlibat. Peranan Perhutani dalam menata dan mengelola hutan sagu dan memasok bahan baku industri sagu menurut saya paling sesuai, sementara bagian hilir diberikan kepada yang punya kapasitas. KOLABORASI adalah keniscayaan dalam dunia usaha.

Jika kita berbicara soal ketahanan pangan saat ini, tampaknya seperti sesuatu yang menakutkan karena kita tidak mempunyai jawaban yang pas atau

setidaknya serangkaian teori berat dan perhitungan yang *njlimet* (kusut) untuk mengakali berbagai jenis panganan impor (kentang, kedelai, jagung, bahkan beras) yang dikuasai oleh negara lain, tetapi dipaksakan tetap mengimpor karena seperti tidak ada pilihan lain.

Di sisi lain sebenarnya sudah banyak sekali penelitian ilmiah dan hebat dari para profesor kita yang hanya menjadi penghuni museum penelitian. Jika kita memang mau bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, mari berdiri di atas kaki sendiri, ada banyak pangan lokal yang bisa kita kembangkan, seperti sagu, umbi-umbian (salah satunya yang sangat terkenal yaitu porang), dan lain-lain. Sagu tersedia berlimpah di daratan Papua, alami dan tidak perlu menanam, tinggal memanen. Dengan perencanaan pemanenan yang ramah lingkungan akan melestarikan ketersediaan pangan kita dalam jangka panjang. Jika mau mengelola sagu ini maka semua kebutuhan pati seluruh Nusantara tampaknya bisa dicukupi.

Selain sumber pangan, sagu juga menyediakan energi bersih bagi kehidupan yang lebih baik. Kita hanya perlu kemauan bersama untuk menggunakan berkat dari Tuhan dengan baik dan bijaksana. Kita sudah memiliki pabrik sagu siap beroperasi sejak 2016, namun belum dioperasikan sampai sekarang karena beberapa masalah teknis. Saya yakin pemerintah bisa mengatasinya, hanya butuh komitmen dan kehendak baik dari segenap pemangku tugas yang sudah dipercaya negara.

Masa Depan Pangan Lokal Papua?

YAN P.A. DOU

Secara historis, pangan lokal Papua sudah ada dalam tiga dekade. Dekade pertama adalah masa Orang Papua tanpa sentuhan budaya Luar (sebelum tahun 1898); dekade kedua adalah masa Orang Papua hidup bersama pemerintah Belanda (1898-1962), dan dekade ketiga adalah masa Orang Papua hidup bersama Pemerintah Indonesia (1962-2023). Pangan lokal masyarakat Papua yang diuraikan berikut ini adalah pangan lokal campuran, yakni pangan lokal Papua asli yang sudah ada sebelum adanya sentuhan budaya luar dan pangan lokal yang diperkaya pada zaman pemerintahan Belanda dan zaman misionaris Barat.

Pangan Lokal Papua yang Tersedia dalam Tiga Dekade

Masyarakat Papua hidup dan berkembang sebagai kultur Melanesia di atas alam Papua yang berlimpah kekayaan alam, khususnya pangan lokal, dalam ketiga dekade tersebut di atas. Secara geografis masyarakat Papua terbagi dalam dua kelompok dengan pangan lokal masing-masing, yakni masyarakat Papua pesisir pantai (utara dan selatan) dan masyarakat Papua pegunungan.

Pangan lokal Papua pantai dan Papua pegunungan yang sudah ada sebelum sentuhan budaya luar dan masih tetap ada hingga pada era milenium ini adalah sebagai berikut.

Umbi-Umbian

Pantai Utara dan Selatan Pulau Papua	Papua Pegunungan Sorong sampai Pegunungan Bintang
Sagu (4-6 jenis batang pohon)	Ubi jalar (30-an jenis)
Singkong (4-6 jenis)	Singkong (4-6 jenis)
Talas (5-10 jenis umbi)	Talas (5-10 jenis umbi)
Pisang (10-20 jenis batang)	Pisang (10-20 jenis batang)
Keladi pantai (umbi)	Keladi gunung (5-10 jenis umbi)

Ubi kelapa (pohon)

Jagung (4-6 jenis)

Dan lainnya

Kacang hutan (2 jenis pohon)

Dan lainnya

Jenis Pangan Sumber Protein

Pantai Utara dan Selatan Pulau Papua

Papua Pegunungan Sorong sampai Pegunungan Bintang

Babi hutan

Babi hutan

Aneka jenis kuskus rawa dan hutan

Aneka jenis kuskus hutan

Kasuari pantai

Kasuari gunung

Babi rusa

Bebek dan angsa

Aneka jenis

Ikan danau

Ulat sagu

Udang dan kepiting

Ayam dana ayam hutan

Ayam dana yam hutan

Katak

Katak dan Bengkulu

Aneka jenis ikan rawa, kali, danau dan laut

Tikus tanah

Dan lainnya

Dan lainnya

Jenis Pangan Sumber Vitamin dan Mineral

Pantai Utara dan Selatan Pulau Papua

Papua Pegunungan Sorong sampai Pegunungan Bintang

Daun keladi

Daun keladi

Daun petatas

Daun petatas

Daun singkong

Daun singkong

Sawi

Sawi

Aneka jenis sayur paku

Aneka jenis sayur paku

Bayam

Bayam

Aneka jenis buah-buahan

Aneka jenis buah-buahan

Pepaya

Pepaya

Nenas

Nenas

Mangga

Mangga

Markisa

Markisa

Kacang panjang	Kacang panjang
Kacang tanah	Kacang tanah
Buah matoa	Sayur gedi dan sayur hitam
Sayur lilin	Sayur lilin
Dan lainnya	Dan lainnya

Jenis Tanaman Rempah

Pantai Utara dan Selatan Pulau Papua	Papua Pegunungan Sorong sampai Pegunungan Bintang
Kunyit	Kunyit
Cabe	Cabe
Jahe	Jahe
Tomat	Tomat
Sereh	
Lengkuas	

Sebelum Bergabung dengan Negara Indonesia Orang Papua Hidup dari Pangan Lokal

Allah tidak hanya menciptakan manusia Papua dan menempatkannya di Tanah Papua. Namun, sebelumnya Allah menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan hidup manusia Papua untuk kelangsungan hidup. Tak pernah ada cerita turun-temurun dari leluhur suku-suku bangsa Papua bahwa pangan lokal adalah warisan pemerintah Belanda atau bangsa mana pun di luar Pulau Papua. Orang Papua hidup dan melangsungkan generasi manusia untuk hidup dan berkembang dengan kelimpahan makanan, minuman, sayuran, dan buah-buahan yang alami di Tanah Papua.

Bicara tentang pangan, pangan lokal Papua adalah kebutuhan pokok manusia Papua sehingga mampu hidup dan berkembang dalam rumpun-rumpun kesukuan yang terdiri atas 250 suku bangsa dan bahasa Papua, ras Melanesia, sejak Allah menciptakan mereka di Tanah Papua hingga kini.

Ketika orang Papua berhadapan dengan suku-suku bangsa Eropa dan Amerika, manusia Papua menerima mereka dan memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Bangsa Eropa mampu beradaptasi dengan manusia Papua,

budaya Papua, dan pangan lokal Papua. Pada masa pemerintahan Belanda, suku bangsa di Papua dilengkapi dengan fasilitas untuk mengolah pangan lokal Papua, berupa alat-alat seperti sensor, kapak, parang, sekop, dan lainnya. Karena itu, leluhur manusia Papua tidak pernah mengatakan bahwa mereka hidup dengan makanan pokok dari Belanda, melainkan orang Papua memberikan makanan pokok kepada Belanda dari alam dan hasil kerja manusia Papua.

Manusia Papua memiliki alat-alat tradisional untuk mengolah kebun, membuat rumah, dan melangsungkan hidup di alam Papua yang indah, luas, dan kaya raya. Alat yang mereka gunakan adalah kapak batu. Dengan kapak batu itu, para leluhur dapat menebang pohon, membuat pagar, membangun rumah, membuat alat berkebun dari pepohonan, dan lain-lain.

Manusia Papua dalam budayanya tidak pernah mengatakan bahwa manusia Papua datang dari pulau mana pun di belahan dunia ini. Manusia Papua percaya dan mewariskan cerita bahwa Allah menciptakan manusia Papua dari Tanah Papua dan ditempatkan di atas Pulau Papua ini. Bahkan bukan hanya manusia Papua saja yang diciptakan Allah, melainkan semua manusia di belahan bumi ini diciptakan di Tanah Papua, lalu mereka ditempatkan di pulau dan benua masing-masing melalui berbagai peristiwa alam agar semua manusia bertanggung jawab di atas tanah dan alamnya masing-masing, untuk mengelolanya dan bertanggung jawab atas ciptaan yang Allah pagari dan Allah beri kewenangan masing-masing.

Ketika bangsa Papua bergabung dengan Indonesia tahun 1969, segala pembangunan di Tanah Papua dilanjutkan oleh para misionaris melalui Gereja Katolik (MISI) dan Gereja Protestan (ZENDING). Para misionaris Katolik dan Protestan membangun lapangan terbang, pertukangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui P5 (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Pertukangan). Sementara, semua fasilitas pembangunan dan dokumen warisan pemerintah Belanda diambil alih dan dibawa pergi oleh Pemerintah Indonesia di Jakarta. Karena itu, sejak tahun 1969 hingga reformasi tahun 1998, Pemerintah Indonesia membangun Papua dengan segala kekayaan alam dan pangan lokal Papua. SEMBAKO yang dikenal sebagai sembilan bahan pokok hanya boleh disediakan untuk guru-guru yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Itu pun, SEMBAKO yang diberikan kepada para guru dan pegawai pemerintahan tidak mencukupi. Maka, masyarakat Papua selalu memberikan bantuan dan memperhatikan guru-guru dan pegawai pemerintahan dengan selalu memberikan bantuan berupa pangan lokal setempat demi kelanjutan hidup dan kelancaran pelayanan dan pengabdian mereka. Dengan demikian, kekayaan pangan lokal Papua adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihidupkan

melalui berbagai program bangsa Indonesia untuk mengurangi beban negara memenuhi kebutuhan manusia Indonesia di Tanah Papua.

Dewasa ini, kemandirian masyarakat Papua yang telah hidup bertahun-tahun dan berabad-abad dari pangan lokal Papua sudah mulai beralih kepada sikap ketergantungan kepada pangan nasional, yaitu beras, mi instan, sauris, maling, garam, vetsin, minyak goreng, dan lain-lain melalui berbagai program nasional Indonesia sejak bergulirnya Otonomi Khusus tahun 2001. Melalui program Otonomi Khusus, pemerintah melakukan kebijakan bantuan BERAS RASKIN (Beras Rakyat Miskin). Akibatnya, masyarakat Papua mengalami ketergantungan kepadanya, lalu mulai meninggalkan kerja keras untuk mengolah tanah demi menghidupi diri dengan pangan lokal Papua. Apalagi dilakukan sosialisasi secara keliru kepada masyarakat Papua, bahwa bahan pangan nasional adalah makanan yang berkualitas tinggi dengan kandungan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lebih baik daripada bahan pangan lokal.

Memang Pemerintah Indonesia dalam banyak hal – dalam memajukan dan memandirikan masyarakat di Tanah Papua – melakukannya secara keliru melalui kebijakan, sistem pelayanan publik, dan program kerja yang KENA KOSONG daripada KENA ISI. Baik kebijakan, sistem pelayanan publik, dan program kerja yang dilakukan kurang mengangkat derajat hidup masyarakat lokal Papua berdasarkan konteks hidup, budaya, dan kearifan lokal yang kaya raya di Tanah Papua. Lebih parah lagi, pelayanan kepada masyarakat Papua untuk mengangkat derajat hidup bangsa Papua dengan berbasis pada pemberdayaan pangan lokal oleh Pemerintah Indonesia, dari tingkat atas hingga tingkat bawah tidak menampilkan diri sebagai PELAYAN PUBLIK, melainkan sebagai PENGUSAHA dan PEBISNIS. Sudah barang tentu bahwa model Pemerintah Indonesia sebagai PELAYAN PUBLIK dipengaruhi oleh pengusaha, pemodal, dan kaum kapitalis, baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa suku-suku bangsa Papua pada zaman Indonesia banyak kali mengalami musibah kematian, kelaparan, dan kesakitan.

Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan dan sistem pelayanan publik Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh tampil sebagai pelayan publik menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Papua berbasis kemandirian pangan lokal? Ataukah pola pelayanan dari dan dalam pemerintahan Indonesia kepada masyarakat Papua masih tetap dijalankan dengan sistem pelayanan berpola bisnis dan kapitalis sehingga masyarakat Papua tergantung pada pangan nasional dengan terus-menerus mengalami kehilangan pangan lokal yang telah ada sejak Allah menciptakan Tanah dan Manusia Papua?

Apa dan Bagaimana Menyediakan Pangan Lokal?

Pangan lokal Papua dibagi dalam dua bagian, yakni pangan lokal asli Papua yang sudah ada sebelum orang asli Papua bersentuhan dengan dunia luar dan pangan asli Papua yang diperkaya di Tanah Papua melalui Pemerintah Belanda, Misionaris Kristen (Katolik dan Protestan), dan Pemerintah Indonesia. Pangan lokal yang datang dari luar seperti ubi jalar jenis tertentu, berkol, wortel, sawi, cabai, buah markisa jenis tertentu, buah belanda, kuda, kerbau, sapi, babi jenis tertentu, kambing, domba, angsa, bebek, kelinci, ayam jenis tertentu, ikan jenis tertentu, sayur bayam, buncis jenis tertentu, kedelai, kacang panjang, semangka, jeruk manis, buah naga, pisang jenis tertentu, keladi jenis tertentu, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Semua itu dibawa masuk ke Tanah Papua untuk memperkaya pangan lokal asli Papua yang sudah diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia Papua sebagai ciptaan-Nya.

Dengan demikian, demi memajukan manusia asli Papua baik di pesisir pantai maupun di pegunungan, pemerintah Belanda, para misionaris Kristen, dan Pemerintah Indonesia telah menyediakan dan mengembangkan pangan lokal luar Papua digabungkan dengan pangan lokal asli Papua melalui berbagai program kerja, baik itu program resmi pemerintah, program resmi Gereja-gereja, dan juga usaha swadaya masyarakat secara pribadi maupun kelompok. Oleh sebab itu, saat ini Tanah Papua memiliki aneka jenis pangan lokal yang perlu dibudidayakan.

Tantangan zaman sekarang ini adalah minimnya gerakan yang dibangun oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membudidayakan segala jenis pangan lokal. Ini bukan berarti bahwa pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sudah tidak peduli lagi kepada masyarakat Papua, melainkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan kapitalisme global pelayanan kepada publik asli Papua yang seharusnya dilaksanakan sebagai tugas dan tanggung jawab, justru dilaksanakan demi keuntungan pribadi. Tidaklah mengherankan lagi bahwa sistem pelayanan, pola kerja, dan cara pandang yang berubah ini mempengaruhi dinamika hidup masyarakat Papua yang mengarah pada kemiskinan ekstrem dan pengabaian ekstrem terhadap pangan lokal Papua.

Pengabaian ekstrem terhadap pangan lokal dipengaruhi oleh program Jakarta untuk menggantikan lahan sagu dan berbagai biota hidup yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat asli Papua dengan kelapa sawit, hadirnya perusahaan kayu secara legal maupun *illegal*, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*

serta berbagai program Jakarta yang bekerja sama dengan para kapitalis global untuk menghadirkan berbagai jenis dan bentuk perusahaan.

Upaya yang perlu diperjuangkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem masyarakat Papua dan pengabaian ekstrem terhadap pangan lokal adalah Pemerintah Indonesia dan semua lembaga usaha yang berkolaborasi perlu mengevaluasi kebijakan, pola dan metode pelayanan, ketentuan perundang-undangan, sistem dan cara kerja, serta program pelayanan kepada Orang Asli Papua untuk tidak lagi “main kuasa” dengan sistem *top down* dengan alasan segala kekayaan alam di Indonesia dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Metode pendekatan *bottom up* adalah cara yang sudah ditentukan oleh negara, namun tak pernah terealisasi dalam kenyataannya. Karena itu, nurani pejabat negara yang penuh dengan kecintaan pada keadaban kemanusiaan universal bagi kesejahteraan rakyatnya dapat menjadi titik tolak mengangkat kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Siapa yang Menyediakan dan Membudidayakannya?

Ada sepuluh komponen penyedia dan pembudidaya pangan lokal Papua, yaitu sebagai berikut.

Pertama, alam Papua. Alam raya Papua memiliki daya dan energi yang diciptakan dan diberikan oleh ALLAH Pencipta. Maka tempat-tempat di mana alam Papua menyediakan pangan lokal Papua perlu dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Misalnya lahan sagu, lahan rawa, kali, danau, dan laut yang menghasilkan udang, kepiting, ikan, dan segala jenisnya. Selain itu, hutan tempat berkebum dan berburu oleh masyarakat lokal dibebaskan dari *illegal logging*, *illegal mining*, dan pembelian tanah oleh oknum pejabat negara lewat pendekatan masyarakat tertentu yang mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya. Dalam hal inilah perlu konservasi alam untuk dijadikan hutan lindung. Oleh karena itu, alam Papua perlu diberi ruang untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari pejabat negara, penguasa, dan semua komponen masyarakat.

Kedua, Pemerintah Indonesia dari pusat hingga daerah. Aneka program dan kebijakan negara melalui lembaga pemerintah untuk menyediakan dan membudidayakan pangan lokal Papua tidak lagi hanya berada di atas kertas dan di tingkat wacana dan program. Pemerintah dibiayai oleh uang rakyat dan bahkan diutus oleh dan untuk rakyat. Maka, mereka sepatutnya melayani rakyat dengan menghentikan segala “permainan gelap” untuk menanam berbagai saham di Tanah Papua atas nama kepedulian dan perhatian kepada masyarakat asli

Papua. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem rakyat Asli Papua dan pengabaian ekstrem terhadap pangan lokal Papua tidak lagi “diprojekkan” oleh negara untuk mendapatkan dana bantuan luar negeri. Untuk itu, pemerintah perlu merangkul semua *stakeholder* untuk mengembangkan dan memajukan manusia dan pangan lokal Papua sebagai kekayaan bangsa Indonesia bagi kesejahteraan manusia Indonesia seutuhnya.

Ketiga, aneka perusahaan dan pebisnis di Tanah Papua. Berbagai perusahaan dan pebisnis Papua semestinya mengelola kekayaan alam Papua dengan memperhatikan pemberdayaan dan pembudidayaan pangan lokal masyarakat pemilik hak ulayat serta perlindungan terhadap alam penyedia pangan lokal bagi manusia penghuninya.

Keempat, aparat keamanan (TNI/POLRI). Sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan negara hendaknya menjalankannya secara murni di Tanah Papua, tanpa berorientasi pada usaha dan bisnis dengan menanam saham, dengan bekerja sama dengan pihak penguasa (pemerintah) dan para pebisnis.

Kelima, lembaga swadaya masyarakat. Meskipun selalu lemah dan tak berdaya karena tidak lagi dipercaya sebagai mitra pemerintah untuk memajukan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat selalu eksis dan peduli untuk berjalan bersama masyarakat asli Papua demi mempertahankan hak hidup mereka dan melindungi alam Papua sebagai anugerah Tuhan.

Keenam, pihak lembaga agama-agama di Tanah Papua. Agama-agama yang ada di Tanah Papua kiranya dapat menjadi “terang dan garam” bagi masyarakat asli Papua yang mayoritas Katolik dan Kristen Protestan. Agama seharusnya tidak lagi dipengaruhi oleh cara pandang pebisnis dan pengusaha untuk mengejar keuntungan ekonomi. Juga, agama tidak seharusnya menjadi lembaga yang melayani masyarakat Asli Papua guna menyebarkan agamanya serta merebut masyarakat asli Papua menjadi menganut agamanya.

Ketujuh, Gereja-Gereja Papua. Gereja Katolik dan Gereja Protestan perlu memelihara dan mempertahankan pemberdayaan dan pembudidayaan pangan lokal Papua yang diwariskan oleh para misionaris Belanda, Jerman, dan Amerika.

Kedelapan, Dewan Adat Papua. Dewan Adat Papua perlu bangkit dari ketidakberdayaan untuk menjaga hak ulayat masyarakat adat Papua.

Kesembilan, paguyuban-paguyuban kesukuan di Tanah Papua. Semua paguyuban kesukuan di Tanah Papua, seperti BBM (Buton, Bugis, Makassar), ikatan Flobamora, Ikatan Toraja, Ikatan Maluku-Tanimbar, Ikatan Manado, Ikatan Sumatra, Ikatan Jawa, dan lain-lain tidak lagi mengejar kepentingan dan

keuntungan kelompok kesukumannya, melainkan saling memberdayakan dengan masyarakat asli Papua dalam kemandirian pangan lokal Papua.

Kesepuluh, masyarakat asli Papua. Hendaknya menghidupkan sikap tenggang rasa dan gotong royong secara kelompok di lingkungan sosial dan tempat Orang Asli Papua berada, dengan selalu siap sedia sebagai mitra semua lembaga yang berkehendak baik guna mengembangkan pangan lokal Papua.

Peran Gereja Katolik

Pangan lokal Papua hidup oleh karena peran gereja dalam upaya memberdayakan ekonomi umat. Gereja dalam hal ini bukan menjadi segalanya bagi umat, melainkan Gereja hadir di tengah umat untuk melihat, mengalami, dan merasakan segala yang dihidupi oleh umat untuk gerak bersama membangun kehidupan manusia apa pun tantangan dan persoalannya.

Secara historis, Gereja memiliki misi membangun Gereja mandiri dengan berpijak pada kakinya sendiri, tanahnya sendiri, rumahnya sendiri, keluarganya sendiri, komunitas umatnya sendiri, dan minum air dari sumurnya sendiri. Untuk tujuan tersebut setiap keuskupan dalam wilayah gerejani Papua selalu menerjemahkan nota Pastoral KWI untuk kemandirian ekonomi umat dalam konteks setiap keuskupan. Keuskupan Timika menerjemahkan Nota Pastoral KWI 2005 dengan “Gerakan Tungku Api Kehidupan” sebagai strategi pastoral yang tepat untuk membangun kemandirian Gereja sebagai umat Allah.

Gereja menjadi kekuatan umat untuk mempertahankan pangan lokal. Alm. Mgr. John Philip Saklil, Pr. mengajak umat Keuskupan Timika: *“Orang Papua tidak bisa hidup dari hasil jual tanah, melainkan orang Papua bisa hidup dari hasil olah tanah. Tanah jangan dijual.”*

Gereja Papua selalu mengalami dan merasakan hidup dan pergumulan orang Papua dalam ketakberdayaan menghadapi kaum migran di Tanah Papua. Kaum migran Indonesia yang datang di Tanah Papua bukan orang berada yang hendak memajukan pembangunan, melainkan orang miskin yang hendak berjuang mempertahankan hidup. Dalam hal ini, hak yang hendak didapatkan masyarakat asli Papua lebih banyak beralih kepada masyarakat migran miskin yang hendak berjuang untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Akibatnya, kesenjangan sosial dan kecemburuan selalu saja terjadi.

Gereja selalu hadir untuk mengayomi segenap umat, bukan hanya masyarakat pribumi Papua, melainkan juga masyarakat migran yang memadati Pulau Papua.

Pendampingan Para Petani

Ada berbagai upaya pendampingan pastoral dalam setiap paroki, dekenat, dan keuskupan. Wilayah Gereja Keuskupan Timika dalam suku Mee Dekanat Paniai, Deiyai, dan Kamapi memiliki program pastoral yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga tahun sekali, yakni MUSPAS-MEE (Musyawarah Pastoral Suku Mee) untuk membahas berbagai program pastoral menuju kemandirian umat. Segala sesuatu yang dibicarakan dan dihasilkan MUSPAS-MEE ini menjadi program strategis untuk merencanakan, mengorganisasi, menindaklanjuti, kerja sama, monitoring, dan evaluasi. Misalnya program BOP (Bugi-Owaa-Piya), Oda, Owada, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari upaya menghidupi pangan lokal Papua.

Tanggung Jawab Pemerintah

Saya tidak menemukan satu pun di Tanah Papua lahan khusus yang dimiliki pemerintah sebagai model percontohan menghidupi pangan lokal Papua secara khusus. Memang saya yakin pemerintah memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Di Papua dibutuhkan pemerintah yang memiliki kepedulian besar terhadap peningkatan hidup pangan lokal Papua. Masyarakat Papua dari dulu sudah hidup dengan pangan lokal, maka pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, sosialisasi konsep pendampingan, keterlibatan langsung dengan masyarakat pemilik pangan lokal, dan perhatian yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat pemilik pangan lokal. Pasar mama-mama Papua untuk menjual pangan lokal Papua di Jayapura yang sudah pernah diperjuangkan oleh SOLMAPA (Solidaritas Mama-Mama Papua) telah mengalami proses yang panjang untuk realisasinya, bahkan telah menimbulkan korban nyawa, yakni ketua SOLMAPA, Alm. Robert Jitmau. Orang Papua di atas tanahnya sendiri sedang bergeser, seolah-olah menjadi pendatang di negerinya sendiri.

Maka, langkah strategis yang perlu diambil pemerintah pada masa mendatang adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu menentukan hari khusus untuk membeli dan mengkonsumsi pangan lokal di seluruh Papua pada setiap minggu. *Kedua*, pemerintah membangun koperasi pangan lokal di setiap kampung agar pemerintah dan masyarakat datang membelinya. *Ketiga*, dana desa yang diberikan kepada setiap kampung diarahkan untuk menghidupi pangan lokal dengan sosialisasi dan kontrol yang teratur oleh dinas terkait. *Keempat*, dana desa dikurangi, jika desa tersebut tidak menghidupi pangan lokal dan tidak menggunakan dananya untuk pembangunan desa. *Kelima*, pemerintah menyediakan dana khusus bagi

masyarakat yang mengembangkan pangan lokal di setiap provinsi, kabupaten, dan distrik. *Keenam*, pemerintah menyediakan bibit-bibit pangan lokal untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. *Ketujuh*, pemerintah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan dan membudidayakan pangan lokal masyarakat Papua. *Kedelapan*, pemerintah melakukan peraturan khusus untuk hutang lindung bagi pemeliharaan dan pelestarian pangan lokal yang sudah dijaga oleh masyarakat pemilik hak ulayat.

Penutup

Demikian artikel ini saya tulis, bukan berdasarkan sumber buku, melainkan bertolak dari hidup dan pergumulan terhadap realitas umat dan masyarakat yang saya jumpai dan alami di Tanah Papua. Keilmiahan tulisan ini bukan terletak pada catatan kaki atau daftar pustaka, melainkan terdapat pada kemampuan mengonsepan pemahaman, pengamatan, pengalaman, pendampingan, dan keterlibatan hidup saya bersama masyarakat asli Papua, pemilik dan penghidup pangan lokal Papua di Indonesia.

Transportasi Papua: Tantangan dan Harapan

PETRUS BAHTIAR

1. Gambaran Umum

Secara astronomis, Provinsi Papua terletak antara 2°25'-9°0' Lintang Selatan dan antara 130°0'-141°0' Bujur Timur. Provinsi Papua berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah memiliki luas wilayah 319.036,05 km² yang terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota. Batas wilayah Provinsi Papua sebelum adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU Nomor 16 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Maka itu, sebelum DOB tersebut Provinsi Papua memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: Samudra Pasifik

Sebelah selatan: Samudra Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia

Sebelah barat: Papua Barat, Kepulauan Maluku

Sebelah timur: Negara Papua New Guinea

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia, berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Pulau di sekitarnya adalah Biak, Numfor, Yapen, dan Mapia. Di sebelah barat Pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo, dan Yefman. Di pesisir selatan terdapat Pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak, dan Panjang. Luas wilayah Provinsi Papua adalah 319.036,05 km². Luas wilayah terbesar yang terdapat di Provinsi Papua ialah Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 44.071 km². Sementara itu, wilayah terkecil adalah Kabupaten Deiyai seluas 537,39 km².

Tabel Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua

No.	Kota/Kabupaten	Ibu Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kab. Merauke	Merauke	20	11	179
2	Kab. Jayawijaya	Wamena	40	4	328
3	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
4	Kab. Nabire	Nabire	15	9	72
5	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
6	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
7	Kab. Paniai	Enarotali	23	5	216
8	Kab. Puncak Jaya	Kota Mulia	26	3	302
9	Kab. Mimika	Timika	18	19	133
10	Kab. Boven Digoel	Tanah Merah	20	0	112
11	Kab. Mappi	Kepi	15	2	162
12	Kab. Asmat	Agats	19	0	221
13	Kab. Yahukimo	Sumohai	51	1	510
14	Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	34	0	277
15	Kab. Tolikara	Karubaga	46	4	541
16	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
17	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
18	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
19	Kab. Supiori	Sorendiweri	5	0	38
20	Kab. Mamberamo Raya	Biurmeso	8	0	60
21	Kab. Nduga	Kenyam	32	0	248
22	Kab. Lanny Jaya	Tiom	39	1	354
23	Kab. Mamberamo Tengah	Kobakma	5	0	59
24	Kab. Yalimo	Elelim	5	0	300
25	Kab. Puncak	Ilaga	25	0	206
26	Kab. Dogiyai	Kigamanani	10	0	79
27	Kab. Intan Jaya	Sugapa	8	0	97
28	Kab. Deiyai	Tigi	5	0	67
29	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
			560	110	5.411

Sumber: Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

2. Kondisi Infrastruktur

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah Provinsi Papua masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini diakibatkan oleh:

- a. Luasnya jangkauan pelayanan akibat penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil;
- b. Kondisi topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam; dan
- c. Keterbatasan pendanaan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Kawasan perkotaan masih ditandai oleh minimnya sarana dan prasarana, padahal minimal terdapat 7 aspek prasarana yang disediakan dalam pembangunan kota, yaitu: jalan kota; jaringan air bersih; jaringan listrik, jaringan telepon; persampahan; jaringan air kotor (*sewerage*); dan drainase. Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Program Peningkatan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) namun hingga saat ini hasil maupun dampak program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga dalam perumusan kebijakan/program ke depan harus lebih mantap lagi.

2.1. Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat di Provinsi Papua dicerminkan oleh 2 hal penting, yakni terbatasnya panjang dan kondisi jalan dan terbatasnya jumlah kendaraan sebagai pengguna jalan (dalam kegiatan produktif). Panjang jalan di Provinsi Papua tahun 2008 mencapai 15.327,36 km, terdiri dari 1.794,95 km jalan negara, 1.400,63 km jalan provinsi, dan 12.131,78 jalan kabupaten/kota. Jika dilihat dari jenis perkerasan jalan, jenis perkerasan aspal adalah sepanjang 4.130,07 km (26,95%) sedangkan sisanya sekitar 73,05% masih belum diaspal. Terhadap jumlah penduduk, kepadatan jalan (panjang jalan per 1.000 jiwa) di Provinsi Papua adalah 7,45. Angka ini jauh di atas rata-rata Indonesia (1,3) mengingat jumlah penduduk relatif sedikit. Namun demikian, terhadap luas wilayah, kepadatan jalan (panjang jalan per 1.000 km²) justru sebaliknya 48,34. Angka ini jauh di bawah rata-rata Indonesia (174). Dengan kata lain, angka-angka ini menegaskan bahwa tingkat layanan jalan terhadap penduduk telah cukup tinggi meski terhadap wilayah masih relatif rendah.

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua tahun 2008 adalah 246.257 unit atau naik sekitar 22,41% dibandingkan tahun 2007. Dari jumlah tersebut, 30.778 unit (12,50%) adalah mobil penumpang, 2.122 unit (0,86%) merupakan

mobil barang, dan 664 unit (0,27%) mobil bus. Sementara itu, jumlah sepeda motor sebanyak 199.740 unit (81,11%).

Terdapat pula 11 ruas jalan strategis sepanjang 2.171 km yang menghubungkan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terdiri dari 1.560,53 km atau 51% dengan kondisi JAPAT, 440,30 km atau 14% dengan kondisi hutan, dan 1.061,16 km atau 35% kondisi jalan aspal. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pelayanan sosial dan ekonomi. Namun demikian, untuk jaringan jalan lokal sekitar 60% mengalami kerusakan. Jaringan jalan strategis di Provinsi Papua terdiri dari 11 ruas yaitu:

1. Nabire-Wagete-Enarotali,
2. Timika-Mapurujaya-Pomako,
3. Serui-Menawi-Saubeba,
4. Jayapura-Wamena-Mulia,
5. Jayapura-Sarmi,
6. Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Batas Negara Papua New Guinea,
7. Merauke-Waropko,
8. Ring Road Jayapura-Sentani,
9. Depapre-Bongrang,
10. Wamena-Habema-Nduga-Kenyem-Yoguru,
11. Timika-Fotowaiburu-Enarotali.

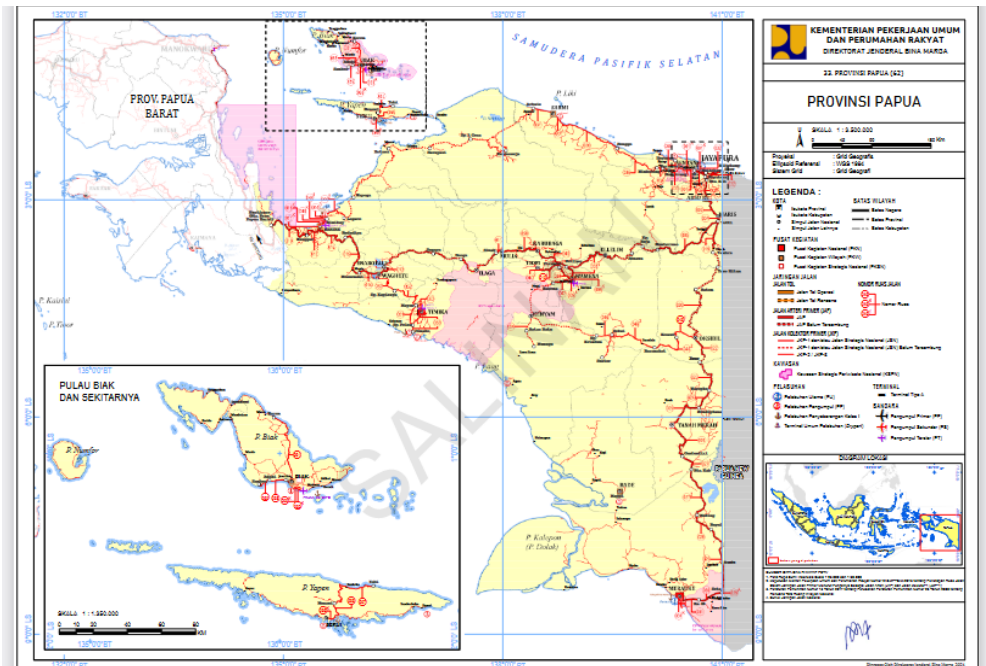
Penentuan 11 ruas jalan strategis tersebut perlu didukung dengan pengembangan jaringan jalan pendukung, yakni Sarmi-Nabire, Waropko-Oksibil-Muaranawa, Wagete-Sugapa-Ilaga-Mulia, dan Ilaga-Jita.

Empat belas tahun kemudian, yaitu tahun 2022, panjang jalan nasional bertambah hingga 64,6% dan panjang jalan provinsi bertambah hingga 59,35%. Berdasarkan SK Menteri PU terbaru Nomor 430 Tahun 2022, total panjang jalan dalam status jalan nasional adalah 2.778,38 km yang terdiri atas jalan arteri primer (JAP) sepanjang 1.793,32 km dan jalan kolektor primer (JKP) sepanjang 985,24 km. dengan rincian seperti pada Gambar 1a.

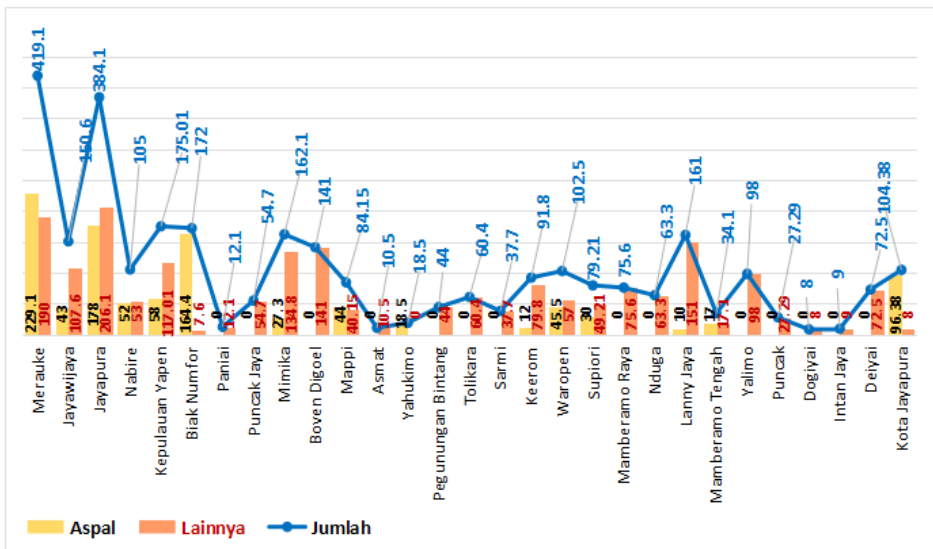
Ruas jalan yang dikelola Provinsi Papua yang berdasarkan SK 188.4/368/Tahun 2016 adalah sepanjang 2.359,76 km tidak termasuk ruas-ruas jalan yang nonstatus yang dikelola oleh provinsi. Adapun ruas jalan berdasarkan SK 188.4/368/Tahun 2016 seperti pada Gambar 1b.

2.1.1. Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah

Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10 km (12,99%),



Gambar 1a. Peta Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Papua. (Sumber: SK Menteri PUPR 430/2022)

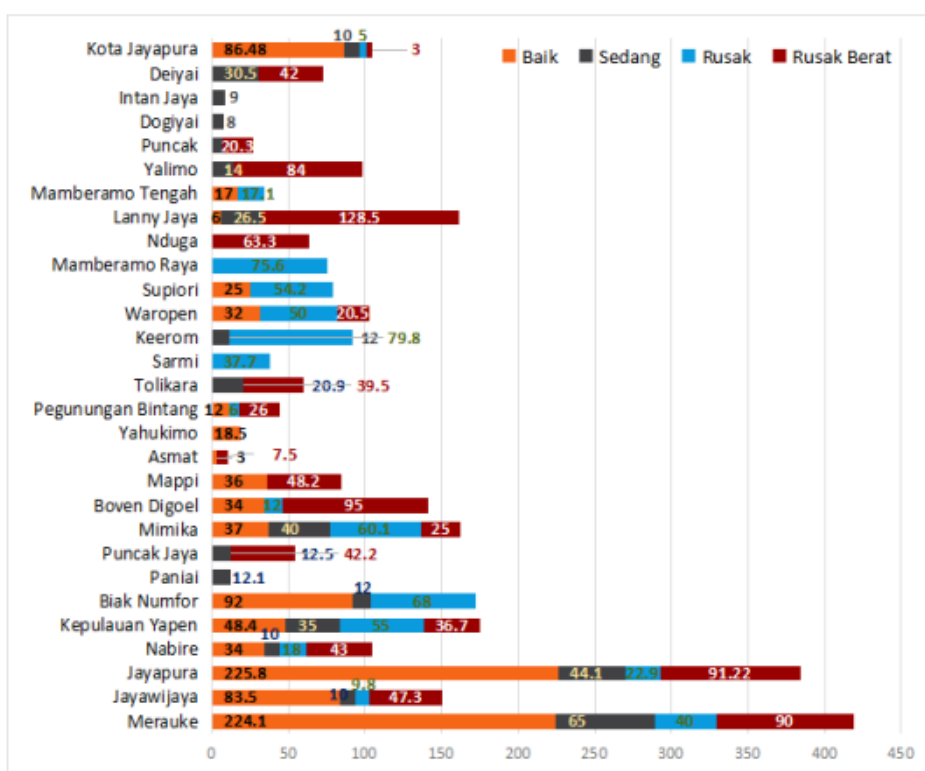


Gambar 1b. Panjang Jalan Provinsi menurut Jenis Permukaan, Tahun 2016. (Sumber: BPS Provinsi Papua 2017 dalam Renstra PUPR Provinsi Papua)

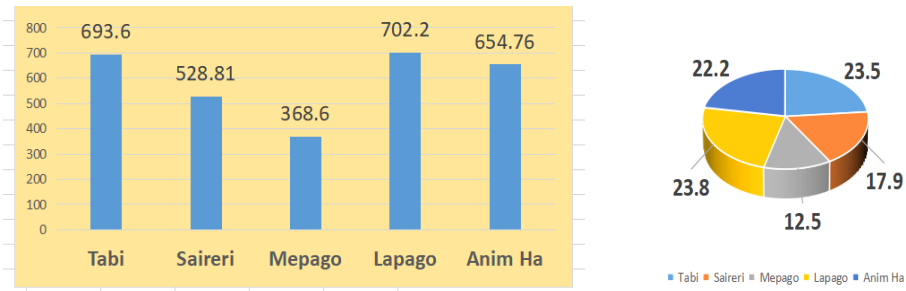
Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01 km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172 km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10 km (5,48%).

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Papua tahun 2016 yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66%) dan yang belum dilapisi aspal atau jalan lainnya sepanjang 1.932,46 km (65,34%). Jalan aspal terpanjang terdapat di Kabupaten Merauke 229,10 km (22,35%), Kabupaten Jayapura 178 km (17,36%), Kabupaten Biak Numfor 164,40 km (16,04%), Kota Jayapura 96,38 km (9,40%), dan Kabupaten Kepulauan Yapen 58 km (5,66%).

Pada tahun 2016, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik, yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan aspal baik (tahun 2017) sepanjang 1025,18 km (34,66%), terdapat kekurangan jalan aspal baik sepanjang 1358.27 km untuk 3.322.526 juta jiwa sehingga perlu



Gambar 2a. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016. (Sumber: BPS Provinsi Papua 2017 dalam Renstra PUPR Provinsi Papua)



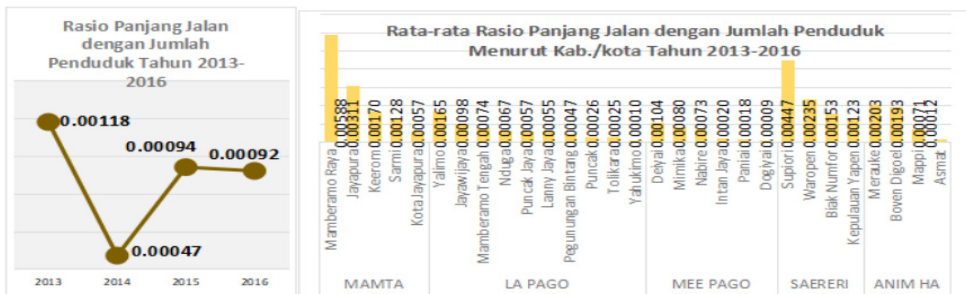
Gambar 2b (kiri). Panjang Jalan Provinsi Menurut Wilayah Adat Tahun 2016 (KM). (Sumber: Data Diolah). **Gambar 2c** (kanan). Persentase Panjang Jalan Provinsi Menurut Wilayah Adat Tahun 2016 (KM). (Sumber: Data Diolah)

ada penambahan jalan aspal mantap (baik dan sedang) untuk 5 tahun mendatang paling tidak lebih dari 60% tahun sekarang.

Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, yang dalam hal ini persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

2.1.2. Kebijakan Pengembangan Jalan

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk sehingga tidak dapat menaikkan rasio mobilitas



Gambar 3. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Sumber: Papua dalam Angka 2018 dalam Renstra PUPR Provinsi Papua)



Gambar 4. Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan (Sumber: Renstra PUPR Provinsi Papua)

terutama dalam empat tahun terakhir. Rasio mobilitas tahun 2013 sebesar 0.00118 km/jiwa turun menjadi 0.00047 km/jiwa pada tahun 2014 kemudian terlihat menurun lagi pada tahun 2015, yaitu dari 0.00094 km/jiwa menjadi 0.00092 km/jiwa pada tahun 2016 dengan rata-rata penduduk dapat mengakses jalan sebesar 0,00088 km/jiwa.

Berdasarkan kabupaten/kota maka posisi pertama mobilitas penduduk terhadap panjang jalan di Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya (Mamta) dengan nilai rata-rata sebesar 0,00588 km/jiwa, selanjutnya adalah Kabupaten Supiori (Saereri) sebesar 0,00447 km/jiwa, Kabupaten Jayapura (Mamta) sebesar 0,00311 km/jiwa. Adapun daerah yang memiliki aksesibilitas penduduk paling rendah adalah Kabupaten Dogiyai (Mee Pago), Yahukimo (La Pago), dan Asmat (Anim Ha) yang masing-masing memiliki rasio mobilitas di bawah 0,00015 km/jiwa.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014, diketahui bahwa jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh setiap desa di Provinsi Papua cukup beragam untuk setiap jenis sarannya. Rata-rata jarak untuk menempuh sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD) adalah 20,12 km. Jarak ini cukuplah jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu pun jarak yang harus ditempuh untuk mengakses Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah rata-rata 48,75 km. Berbeda dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai Sekolah Menengah Pertama (SMP), relatif lebih dekat, yaitu sekitar 0,04 km. Hal ini menunjukkan bahwa akses yang ada masih perlu diperbaiki. Tidak jauh berbeda dengan sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan pun harus ditempuh dengan jarak yang relatif jauh. Untuk mencapai Rumah Sakit, jarak yang harus ditempuh dari setiap distrik rata-rata adalah sekitar 66,33 km.

Berdasarkan data yang tercantum pada tahun 2014 di dalam Potensi Desa, bukan hanya jarak yang ditempuh relatif jauh dibandingkan dengan wilayah lainnya, tetapi diketahui pula bahwa masih terdapat beberapa distrik yang masih belum dapat mengakses sarana pendidikan dan juga kesehatan. Terdapat 20% distrik yang masih belum memiliki akses berupa jaringan jalan yang memadai

untuk mencapai SD, 31,37% yang belum memiliki akses ke SMP. Sedangkan untuk akses ke SMA, 96,1% sudah memiliki akses meskipun masih beragam jaraknya. Berbeda dengan sarana pendidikan, distrik yang ada di Provinsi Papua sudah relatif memiliki akses yang lebih baik ke sarana kesehatan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ternyata 96% distrik sudah memiliki akses ke tempat praktik dokter, 88,7% memiliki akses ke Puskesmas, dan 96,5% sudah memiliki akses ke Rumah Sakit.

Dalam meningkatkan konektivitas di daerah, jembatan juga merupakan salah satu penunjang utama dalam memudahkan adanya aksesibilitas dan mobilitas daerah. Berdasarkan kondisi jembatan, menunjukkan jembatan dalam kondisi baik (28,45%), sedang (18,16%), rusak ringan (21,55%), rusak berat (19,58%), kritis (10,61%), dan runtuh/putus (1,64%).

Kebutuhan pengembangan jalan di Provinsi Papua dilakukan untuk meningkatkan tingkat mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan antarwilayah. Pengembangan jalan dilakukan dengan memperhatikan aspek tingkat keterhubungan dengan moda yang lain, baik laut maupun udara, dan konektivitas antarmoda, yaitu konektivitas antara ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi atau kabupaten dengan masing-masing fungsinya sebagai arteri primer dan kolektor ataupun kolektor primer dan kolektor sekunder.

Semakin tinggi tingkat keterhubungan atau konektivitas moda dan wilayah akan semakin memberi dampak pada mobilitas logistik antarwilayah yang juga semakin tinggi dengan biaya dan waktu yang semakin rendah. Sebaliknya, buruknya konektivitas akan berefek pada biaya perjalanan yang tinggi dan sulitnya pergerakan logistik antarwilayah dan selanjutnya memberi pengaruh pada lambannya progres pembangunan karena membutuhkan harga satuan belanja yang tinggi.

Permasalahan yang saat ini terjadi adalah isu strategis pembangunan transportasi di Papua, yaitu:

- a. Belum optimalnya konektivitas antarkawasan strategis provinsi,
- b. Rendahnya ketersediaan moda transportasi antardaerah,
- c. Rendahnya kualitas manajemen pelayanan perhubungan darat dan laut,
- d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat,
- e. Rendahnya ketersediaan moda transportasi darat dan laut,
- f. Rendahnya ketersediaan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan,
- g. Rendahnya kualitas pelayanan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan,
- h. Belum optimalnya ketersediaan bandara,
- i. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat,

- j. Rendahnya kualitas pelabuhan dan fasilitas pelabuhan,
- k. Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara.

Aspek lain yang menjadi dasar pengembangan jalan adalah keterhubungan dengan sentra-sentra ekonomi yang potensial, termasuk kawasan potensial wisata, kawasan kampung adat terutama kawasan tertinggal dan terisolir dengan tetap memperhatikan situs-situs yang dilindungi karena memiliki nilai sejarah dan religius bagi masyarakat adat di samping aspek mempertahankan kelestarian alam. Perbaikan akses menuju sentra-sentra ekonomi masyarakat kampung akan memberi stimulus bagi masyarakat adat untuk mengelola potensi ekonomi yang ada tentu dibarengi dengan upaya pembinaan dan pendampingan terpadu dan kontinu.

Percepatan pembangunan pada kawasan atau daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan wilayah yang memiliki sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung,
- b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP,
- c. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan,
- d. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS,
- e. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,
- f. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak

2.1.3. Konsep Pengembangan Jaringan Jalan

Dari uraian-uraian di atas, ada beberapa ruas jalan yang butuh untuk dikembangkan adalah:

(a) Konektivitas antara ruas jalan nasional Trans Papua: (Batas Kota Jayapura–Arso sepanjang 24,45 km), (Arso–Waris; 50,04 km), (Waris–Yetty; 9 km), (Yetty–Senggi–Memberamo; 155 km), (Elelim–Vasvaley–Batas Kota Wamena; 128,25 km). Ruas jalan nasional sepanjang 366,74 km menjadi ruas strategis yang menghubungkan PKN Kota Jayapura dan PKW Kota Wamena, dan menjadi akses alternatif selain jalur udara Sentani-Wamena. Menjadi strategis karena saat ini transportasi darat dengan menggunakan truk dapat menyuplai logistik ke Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan sekitarnya.

Ruas jalan nasional ini harus terkoneksi dengan ruas jalan provinsi dan kabupaten yang ada di kabupaten yang dilalui, yaitu Kabupaten Keerom dan Yalimo serta Jayawijaya. Perlu melahirkan simpul-simpul antara ruas nasional dan provinsi serta kabupaten. Antara arteri primer hingga ke kolektor sekunder bahkan mengakses ke kampung-kampung adat ataupun potensi-potensi ekonomi, wisata, pertambangan serta industri rakyat.

Berfungsinya ruas strategis ini akan memotong komponen biaya transportasi yang cukup signifikan pada setiap harga barang jika dibandingkan dengan akses udara. Semakin tinggi nilai aksesibilitas atau kemudahan melewati ruas ini akan menekan komponen biaya transportasi. Oleh karena itu, ruas yang menggunakan biaya konstruksi yang sangat besar ini harus semaksimalnya dikelola yaitu dengan:

- a. Membangun simpul-simpul yang akan menjadi sentra ekonomi pada sepanjang ruas jalan. Simpul ini dapat berperan sebagai *feeder* hingga menjangkau daerah terisolir. Kegiatan ekonomi pada simpul-simpul baru ini dikelola secara tersistem dan terkoordinasi oleh BUMD atau unit pemerintah kabupaten atau provinsi.
- b. Memberi stimulus kepada logistik atau masyarakat yang mengelola suplai logistik sehingga iklim perdagangan yang sehat dapat terbangun, termasuk stimulus pada simpul-simpul yang memberdayakan masyarakat setempat. Stimulus termasuk jaminan keamanan dan kenyamanan. Secara bersamaan memberi penguatan dan pendampingan yang berkesinambungan dan terpadu lintas sektor kepada kelompok-kelompok masyarakat adat, masyarakat lokal OAP untuk dapat berperan aktif disertai dengan kebijakan proteksi. Hal ini untuk menghindari pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat adat pasca terbukanya kampung. Proteksi menjadi penting agar kelompok masyarakat tidak dibiarkan bersaing secara alami dengan pedagang luar yang telah mapan ekonomi dan skill serta pengetahuan.
- c. Kalau pemerintah pusat memiliki program Tol Laut untuk membantu daerah T3P (tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan) dalam menekan disparitas harga, Pemerintah Provinsi Papua dapat menduplikasi dengan maksud yang sama, yaitu menjamin harga barang di daerah tujuan tetap normal bahkan lebih murah. Program ini kami disebut dengan Tol Logistik yang dapat berupa kehadiran armada logistik plat merah/bersubsidi terukur pada kurun waktu tertentu, memberi jaminan kepesertaan OAP dalam aktivitas ekonomi termasuk di simpul-simpul yang dilewati. Program ini dapat dilaksanakan selama lima tahun

hingga terbentuknya sendi-sendi ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal melahirkan produk-produk ekonomi hasil olahan komoditi lokal masyarakat pedalaman. Produk olahan komoditi lokal hasil pertanian dan perkebunan ini tentu akan menjadi logistik balik dari Wamena ke Jayapura. Kegiatan ini dapat diintervensi oleh BUMD provinsi atau kabupaten atau terpadu agar menghindari praktik-praktik tengkulak yang tidak memberdayakan masyarakat.

Terbukanya ruas jalan ini juga membuka kehidupan dan budaya masyarakat kampung yang dilewati dan sekitarnya yang selama ini tertutup atau terisolasi. Budaya konsumtif akan menjadi budaya baru karena akses mendapatkan produk perkotaan semakin mudah dengan tidak diimbangi *income* baru. Perubahan pola hidup ini tentu akan memberi dampak buruk dan pada saatnya mereka akan semakin lemah. Ini secara jelas memberi indikasi bahwa pembangunan ruas jalan ini sama dengan memberikan pelemahan/dampak buruk kepada masyarakat lokal OAP. Seharusnya pembangunan ruas jalan ini memberikan kemajuan ekonomi dan peradaban baru yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sekali lagi dibutuhkan proteksi, intervensi, dan investasi/subsidi untuk memberi kemampuan dengan program terpadu.

(b) Peningkatan mutu konektivitas antara ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, dan Pelabuhan Petikemas Depapre. Ruas nasional (Sentani–Bongkrang–Warambaim; 54,69 km), (Warombaim–Nimbontong; 9,09 km), (Nimbontong–Bonggo; 89,94 km), (Bonggo–Betaf–Sarmi; 117,32 km), (Sarmi–Arbais; 37 km) harus terkoneksi dengan Pelabuhan Peti Kemas Depapre dan terkoneksi pula dengan ruas jalan provinsi (Kemiri–Depapre), (Sentani–Kemiri), (Jayapura Kota–Sentani), termasuk terkoneksi dengan sistem kargo Bandara Sentani yang mengakses Pegunungan Tengah/Wamena.

2.2. Transportasi Laut

Sebagian besar kota dan kabupaten di Provinsi Papua dapat dijangkau melalui (perhubungan) laut/sungai. Oleh karena itu, perhubungan laut seharusnya dapat memainkan peran strategis dalam angkutan manusia dan barang. Dari 20 kota dan kabupaten di Provinsi Papua, 14 di antaranya berada di pesisir atau di tepi sungai besar sehingga dapat dijangkau oleh moda transportasi air.

Saat ini sebagian besar kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan bahan bangunan diangkut melalui laut; demikian pula sebaliknya, untuk komoditas yang dihasilkan oleh Provinsi Papua. Namun demikian, persoalan yang

mengganggu adalah belum tersedianya cukup data arus penumpang dan barang yang diangkut, prediksi perkembangannya pada masa mendatang sehingga menyulitkan penyusunan rencana induk pengembangan perhubungan laut dan integrasi antarmoda.

Jumlah kunjungan kapal yang beroperasi di wilayah Papua selama tahun 2008 mencapai 3.215 kapal atau naik 17,96%. Dengan jumlah penumpang sebanyak 783.096 penumpang, dengan rincian penumpang turun sebanyak 362.811 orang dan berangkat 420.285 orang. Sementara itu, barang yang dibongkar antarpulau sebanyak 435,35 juta ton dan antarnegara sebanyak 238,63 ribu ton dan barang muat antarpulau sebanyak 2,59 juta ton dan antarnegara sebanyak 237,50 ribu ton. Pelabuhan Merauke merupakan pelabuhan dengan frekuensi kunjungan kapal terbanyak, yakni 1.563 kunjungan (36,60%), diikuti Jayapura sebanyak 680 kunjungan (15,93%).

Pelabuhan laut yang melayani pelayaran antarkabupaten di Provinsi Papua saat ini adalah Pelabuhan Jayapura dan Biak, dengan fungsi sebagai pelabuhan nasional. Sementara itu, Pelabuhan Merauke, Pomako, Sarmi, Nabire, dan Serui berfungsi sebagai pelabuhan regional.

Potensi pengembangan pelabuhan nasional adalah di Holmafen, Nabire, Agats, dan Bade. Sedangkan pelabuhan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional adalah Pelabuhan Korido, Bagusa, Wasior, Serui, dan Asiki.

2.3. Transportasi Udara

Harus dikatakan bahwa perhubungan udara masih, dan bahkan cenderung menguat, sebagai tulang punggung perhubungan di Provinsi Papua. Pernyataan ini tak terbantahkan untuk koneksi dengan kawasan pedalaman karena ketiadaan alternatif perhubungan lain. Bukti pendukung juga ditunjukkan oleh keberadaan bandar udara tempat jumlah bandara paling banyak di Indonesia berada di wilayah Provinsi Papua.

Dari sekian jumlah bandar udara di Provinsi Papua, hanya 4 bandar udara yang volume penumpangnya di atas 200.000/tahun. Hal ini memunculkan isu lain, yakni efisiensi. Konsekuensinya, meskipun Departemen Perhubungan telah menetapkan tarif kelas ekonomi, karena faktor efisiensi di satu pihak dan ketergantungan pasar di lain pihak, biaya perhubungan udara di Provinsi Papua jauh di atas tarif yang ditetapkan itu. Sebagai contoh, menurut tarif yang ditetapkan, biaya pergi-pulang Jayapura – Wamena adalah sekitar Rp385.000,00 tetapi dalam kenyataannya tarif itu mencapai 1 - 1,5 juta rupiah, atau sekitar 3 kalinya.

Ketergantungan pada perhubungan udara yang mahal dan kurang efisien mengakibatkan mahalnya harga sembilan bahan pokok dan bahan bangunan di pedalaman. Komoditas-komoditas tersebut dapat diangkut dengan perhubungan laut dari luar Papua ke Tanah Papua. Namun demikian, pengangkutan dari kota pelabuhan ke pedalaman terpaksa harus menggunakan perhubungan udara. Demikianlah, maka pada tahun 2006, harga semen di Wamena adalah Rp380.000,00/sak, di Mulia Rp1.240.000,00/sak. Sementara itu, di Pelabuhan Logpon Dekai, Kab. Yahukimo, harga semen “hanya” Rp90.000,00/sak.

Pada saat ini, tidak kurang dari 15 maskapai (termasuk 2 milik misi keagamaan) beroperasi di Provinsi Papua. Artinya, penerbangan antarpulau dari/ ke Provinsi Papua dapat dikatakan memadai. Akan tetapi, tidak demikian dengan penerbangan di dalam Provinsi Papua sendiri. Layanan dari/ke pedalaman penuh ketidakpastian karena ketiadaan penerbangan berjadwal, gangguan cuaca, dan kapasitas penerbangan yang terbatas. Ini tidak termasuk faktor keselamatan penerbangan, yang juga dinilai kritis akibat sering terjadi kecelakaan.

Namun demikian, karena kondisi cuaca berubah-ubah dan topografi yang berat, kecelakaan penerbangan akan rawan terjadi sehingga sulit untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Di samping itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan perhubungan udara, yaitu:

- a. Hubungan transportasi udara pada kabupaten baru dan pusat-pusat permukiman masyarakat lokal belum berkembang akibat terbatasnya prasarana dan sarana transportasi seperti bandara dan sarana pendukung lainnya;
- b. Transportasi udara pada beberapa kabupaten baru seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Sarmi, dan Mappi membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.

Jumlah pesawat yang berangkat pada tahun 2008 di Papua tercatat 62.166 (naik 26,55%) dan jumlah pesawat tiba tercatat 52.423 (naik 5,71%) dengan jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 901.837 orang (naik 17,69%) dan *dating* 951.532 orang (naik 27,54%).

Jumlah barang dan bagasi yang dimuat selama tahun 2008 mencapai 47.783 ton (naik 20,74%) dan 11.625 ton (naik 39,14%). Sementara itu, jumlah barang dan bagasi yang dibongkar mencapai 62.706 ton (naik 8,50%) dan 12.220 ton (naik 52,27%). Sedangkan pos paket yang dibongkar mencapai 473 ton (naik 846%) dan muat sebanyak 99 ton (naik 125%).

3. Harapan

Masih rendahnya indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas transportasi di Tanah Papua sangat dipengaruhi oleh luasnya bentang wilayah dengan kondisi topografi yang bergunung, berpantai, dan berawa dengan komposisi yang cukup kompleks. Kondisi topografi juga secara langsung membentuk tipikal dan karakteristik transportasinya, misalnya di Papua bagian selatan dengan karakteristik rawa, transportasi sungai menjadi pilihan. Di bagian tengah, yang didominasi dengan deretan pegunungan, transportasi udara menjadi moda utama, sedangkan di Papua bagian utara, dengan tipikal kombinasi pantai dengan dataran memungkinkan untuk transportasi laut, darat, dan udara.

Tipikal moda transportasi yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap kemudahan pergerakan orang dan barang yang kemudian berdampak pada pertumbuhan wilayah dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Papua bagian utara (wilayah adat Mamta) dan juga Kepala Burung dan Teluk Cenderawasih (wilayah adat Bomberai–Saireri) yang dimungkinkan untuk diakses oleh seluruh moda transportasi membuat perekonomian menjadi lebih baik. Maka itu, kabupaten dan kota, seperti Jayapura, Sorong, Manokwari, Sentani relatif lebih baik. Sebaliknya, wilayah adat Lapago yang berada di pegunungan pada wilayah yang terisolasi sebagian besar hanya dapat diakses dengan pesawat. Harga semen yang dapat mencapai lebih dari satu juta rupiah dimungkinkan karena diangkut menggunakan pesawat yang dibayar berdasarkan beratnya. Oleh karena itu, jika survei statistik kemiskinan keluarga menurut kementerian sosial, yaitu (1) mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak dipleset; (2) kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; (3) atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; masyarakat Lapago sebagian besar akan masuk kategori miskin karena sulitnya membeli seng, keramik, semen, dan bahan bangunan yang diangkut pesawat. Namun demikian, sebenarnya mereka cukup aman dan tenteram serta sejahtera dengan menggunakan papan, alang-alang untuk konstruksi rumah. Alam juga cukup menyediakan mereka hasil bumi karena mereka punya *skill* bercocok tanam dan meramu serta beternak. Hanya disayangkan karena semangat itu perlahan hilang dengan adanya bantuan beras miskin dan BLT serta sejumlah program pemerintah yang merangsang semangat ketergantungan.

Berbeda dengan Lapago yang berada di pegunungan, Papua Tengah pada wilayah Meepago dapat diakses dengan darat, laut, dan sungai serta juga terdapat wilayahnya yang hanya dapat diakses lewat udara, seperti di Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya tergolong kabupaten termiskin di Papua dan juga secara nasional. Hanya mengandalkan pesawat udara berbadan kecil jenis caravan, dan dipersulit dengan telanjur terbangunnya semangat ketergantungan pada barang dari luar seperti beras dan komoditi lainnya. Namun demikian, di Kabupaten inilah terletak Blok Wabu yang menyimpan mineral dan logam yang memiliki deposit terbanyak dan belum diolah.

Saat ini Papua Tengah secara finansial memiliki prospek ekonomi yang sangat bagus untuk jangka pendek karena di daerah ini terdapat tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Berdasarkan UU Minerba, 6% dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, yang sebelumnya dibagi kepada 29 kabupaten kota dalam Provinsi Papua, kini hanya dibagi pada delapan kabupaten dalam Provinsi Papua Tengah, termasuk kabupaten kaya di Indonesia, yaitu Mimika. Selanjutnya, mulai tahun 2025 dampak dari divestasi saham delapan kabupaten ini akan menikmati tambahan 10% dari keuntungan PT Freeport Indonesia dengan rincian Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan mendapatkan 3% dan Kabupaten Mimika 7%. Ini berarti diperkirakan Kabupaten Mimika akan mendapatkan hingga 10 triliun rupiah lebih setiap tahunnya, di samping dana transferan dari APBN. Kondisi ini akan memantapkan Mimika sebagai kabupaten terkaya di Indonesia di samping Bontang dan Jakarta. Demikian halnya dengan tujuh kabupaten lainnya, akan mendapatkan efek positif dari DOB lewat potensi tambang, belum terhitung jika potensi emas dan uranium di Blok Wabu Intan Jaya diolah. Seharusnya dalam lima tahun ke depan, jika anggaran dikelola baik, kecukupan membangun infrastruktur jalan ke Intan Jaya sangat memadai. Akses ke Intan Jaya dapat membuka akses ke Kabupaten Puncak di Meepago untuk memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan membeli beras, atap seng, dan semen untuk memenuhi standar Kementerian Sosial menuju Papua pedalaman yang lebih sejahtera. Semoga.

Peran Pendidikan Tinggi bagi Peningkatan SDM di Papua dan Papua Barat

PAUL SATYO I STANDAR TAN

Abstrak

Studi ini bermaksud menyelidiki dua hal sebagai berikut. Pertama, sejauh mana kehadiran pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat telah berdampak bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perubahan sosial kemasyarakatan? Kedua, model pendidikan tinggi macam apa yang lebih tepat diperjuangkan di Papua dan Papua Barat saat ini? Dua pertanyaan kunci ini menjadi fokus kajian ini.

Hal ini ditekankan sebab pendidikan merupakan strategi dasar pengentasan kemiskinan. Kemiskinan melekat dengan kebodohan. Kebodohan adalah buah dari ketidaktahuan atau tidak adanya transfer informasi secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Kebodohan dan kemiskinan merupakan indikator dari keterbelakangan peradaban. Negara menjamin kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan satuan-satuan pendidikan, baik tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Tujuan pendidikan itu mau mencapai dua hal sebagai berikut. Pertama, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka itu, penekanannya terletak pada pembentukan wawasan, pemahaman, pengetahuan untuk mencapai suatu keterampilan (kompetensi) tertentu. Kedua, untuk membentuk karakter (*character building*). Penekanan di sini terletak pada pendidikan nilai, pengembangan identitas diri.

Di Papua dan Papua Barat saat ini telah tumbuh berbagai sistem pendidikan tinggi dengan pelbagai tujuan dan orientasinya, yang diharapkan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Anehnya, sekitar 10 ribu lulusan perguruan tinggi tiap tahun di Papua dan Papua Barat namun belum memperlihatkan adanya perubahan hidup secara signifikan dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan vokasi merupakan daya tawar alternatif, yang secara sinergis dan kolaboratif digarap pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus serta keterampilan spesifik yang diakui sesuai tuntutan zaman.

Kata kunci: pendidikan, peran pemerintah, perguruan tinggi, pendidikan vokasi.

1. Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan sumber daya manusia (SDM), yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari tujuh agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.¹

Arah pembangunan SDM semacam ini merupakan program strategis yang sangat mendesak untuk diaktualisasikan di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, saat ini telah muncul berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, namun belum memperlihatkan *output* lulusan yang berkualitas dan profesional, yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat bahkan mensinyalir bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam perguruan tinggi belum memberikan hasil yang memuaskan kendati di Papua dan Papua Barat ada 6 perguruan tinggi negeri (PTN) dan ada 59 perguruan tinggi swasta (PTS). Dikatakannya bahwa dari sisi jumlah, rata-rata setiap tahun PTN dan PTS meluluskan kurang lebih 10 ribu lulusan. Namun demikian, dari sisi kualitas masih perlu peningkatan dan dari sisi keadilan perlu pemerataan penyebaran PTS di Papua dan Papua Barat.

Bagi Kopertis, pendidikan merupakan alat penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM, sebagai tolok ukur kesejajaran manusia dan pengakuan eksistensi dalam sebuah bangsa dan negara.

Disadari bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan tinggi di wilayah XIV, Kopertis merumuskan visi dan misi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat. Rumusan visi itu adalah: “menjadikan perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat yang andal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tinggi iman, berkualitas intelektual, berketerampilan dan tinggi daya juang.” Untuk mewujudkan *visi* tersebut, *misi* yang dirumuskan adalah:

- a. Meningkatkan mutu tata kelola perguruan tinggi swasta;
- b. Meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan PTS;

1 BPS Provinsi Papua, *Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2021*, Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2021, hal. iii.

- c. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memperluas pemerataan pendidikan tinggi dan daya tampung;
- e. Membangun jejaring kemitraan.

Berdasar pada misi ini, Kopertis bertekad menyediakan program-program strategis yang diharapkan dapat mendorong PTS di Papua dan Papua Barat, baik secara institusi maupun secara program studi mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi dan program studi bermutu pada level akreditasi minimal sangat baik (B). Rumusan visi-misi Kopertis ini, hemat saya merupakan sebuah langkah maju sekaligus strategis sebagai pengaktualisasian kewajiban Pemerintah Negara Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk melaksanakan amanat ini, pasal 31 UUD 1945 dipertegas dengan “Hak Warga Negara dan Kewajiban Pemerintah”. Pada ayat 1 tertulis: “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran” dan pada ayat 2 tertulis: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Negara menjamin kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan satuan-satuan pendidikan, baik tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 (ayat 1 & 2) memberikan definisi pendidikan dan pendidikan tinggi sebagai berikut. Ayat 1 berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Sedangkan ayat 2 mengatakan: “Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.

Selanjutnya, pasal 4 (huruf a, b, c) menegaskan tentang fungsi pendidikan tinggi itu sebagai berikut. Huruf a: “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”; huruf (b): mengembangkan *civitas academica* yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui

pelaksanaan tridarma; dan huruf (c): mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Fungsi pendidikan sebagaimana ditekankan di atas mau mencapai dua hal sebagai berikut. *Pertama*, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka itu, penekanannya terletak pada pembentukan wawasan, pemahaman, pengetahuan untuk mencapai suatu keterampilan (kompetensi) tertentu. *Kedua*, untuk membentuk karakter (*character building*). Penekanan di sini terletak pada pendidikan nilai, pengembangan identitas diri.

Pengembangan SDM melalui pendidikan terutama pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat sangat mendesak saat ini. Pasalnya, pendidikan merupakan salah satu alat yang sangat strategis sebagai dasar pengentasan kemiskinan. Salman Habeban mengatakan:

“Pendidikan merupakan strategi dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan melekat dengan kebodohan. Kebodohan adalah buah dari ketidaktahuan atau tidak adanya transfer informasi secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Kebodohan dan kemiskinan merupakan indikator dari keterbelakangan peradaban.”

Oleh karena itu, meski diakui bahwa telah muncul berbagai sistem pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat, kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan. Sementara itu, tuntutan globalisasi telah memaksa setiap lembaga pendidikan tinggi untuk berinovasi dalam mengubah pola pembelajaran dan kurikulumnya.

Untuk menyaingi tuntutan globalisasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan visi Indonesia 2045, pada Mei 2019. Visi ini memberikan lecutan semangat, optimisme, dan harapan bahwa bonus demografi yang dialami Indonesia kelak akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa, didukung oleh empat pilar utama. Keempat pilar itu adalah (1) pembangunan manusia dan penguasaan iptek; (2) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; serta (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pembangunan manusia dan penguasaan iptek tidak bisa dipisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi memiliki potensi luar biasa dalam membekali SDM bangsa ini menghadapi megatren dunia yang bervariasi dan juga terus berubah.

Oleh karena itu, studi kecil ini dimaksudkan untuk menjawab dua persoalan penting sebagai berikut. *Pertama*, sejauh mana dampak pendidikan tinggi bagi upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua dan Papua Barat? *Kedua*, pendidikan tinggi macam apa yang lebih tepat diperjuangkan untuk

menjawab tuntutan globalisasi saat ini di Papua dan Papua Barat? Sebelum mengulas lebih jauh terkait dua persoalan di atas, baiklah kita menelusuri terlebih dahulu perkembangan pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat saat ini.

2. Perkembangan Pendidikan Tinggi di Papua dan Papua Barat

Pendidikan menurut Emile Durkheim memiliki dua wajah ganda; di satu sisi pendidikan dapat berperan sebagai pembebas, namun di lain sisi pendidikan dapat pula menjadi belenggu. Sebagai pembebas, pendidikan diarahkan bagi proses pencerahan umat manusia, yaitu sebagai agen untuk meningkatkan kualitas manusia secara utuh. Sebagai belenggu, pendidikan dapat mematikan kreativitas maupun kemampuan manusia karena tingginya biaya pendidikan yang tak terjangkau dan juga oleh sistem yang tidak terstruktur.

Munculnya pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat tidak terlepas dari upaya pemerintah dan lembaga keagamaan untuk mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat serta membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan hidup. Untuk itu, sebelum membahas lebih lanjut tujuan munculnya pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat, terlebih dahulu kita akan menyelidikinya dari dua aspek. *Pertama*, sejarah singkat perkembangan pendidikan tinggi, dan *kedua*, munculnya pendidikan tinggi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan memahami konteks perkembangan pendidikan ini, diharapkan akan muncul gambaran menyeluruh mengenai orientasi dan tujuan munculnya Pendidikan Tinggi di Papua dan Papua Barat.

2.1. Sejarah Singkat Pendidikan Tinggi

Untuk menelusuri sejarah perkembangan pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat, kita akan mengacu pada Laporan Akhir Masa Jabatan Koordinator Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Drs. Festus Simbiak, M.Pd. pada tahun 2017 lalu. Didasarnya bahwa pendidikan merupakan alat penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM, sebagai tolok ukur kesejajaran manusia dan pengakuan eksistensi dalam sebuah bangsa dan negara.

Di awal perkembangannya, Papua masih dinomorduakan. Pendidikan Dasar diprakarsai oleh misionaris. Belum ada pendidikan tinggi. Baru setelah tahun 1962, Presiden Soekarno memerintahkan untuk mendirikan UNIVERSITAS NEGERI CENDERAWASIH yang disingkat UNCEN di New Guinea (Irian Barat). Tujuan mendirikan perguruan tinggi ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Pemerintah Belanda, bahwa Pemerintah Republik Indonesia

mempunyai niat baik untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua sejajar dengan saudara-saudaranya di daerah lain dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perintah Presiden Soekarno ini diproses sejak Agustus 1962 dan pada tanggal 10 November 1962 Uncen didirikan di Kotabaru (Jayapura) Papua. Posisi Uncen pada saat itu merupakan alat politik Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Irian Barat sudah berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi, walaupun pada saat itu Irian Barat masih berada dalam penguasaan Pemerintah UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority = Pemerintahan Peralihan yang Ditunjuk oleh PBB*). Oleh karena itu, dalam setiap perayaan ulang tahun Uncen selalu dikumandangkan bahwa sebelum ada instansi Pemerintah RI lain berada di Irian Barat, Uncen merupakan instansi Pemerintah Indonesia pertama dengan julukan Universitas Perjuangan.

Setelah Uncen berdiri, tahun 1967 perguruan tinggi swasta mulai berdiri di Irian Barat yang dimulai oleh Gereja Katolik dan Gereja Baptis. Pada tahun 1969 disusul oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dan yayasan-yayasan lainnya. Sampai saat ini, terdapat 59 PTS yang tersebar di Papua dan Papua Barat sebagai Wilayah Kopertis XIV seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Terlihat bahwa perkembangan PTS yang pesat mulai terjadi di atas tahun 1980. Keadaan ini terjadi demikian karena kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM mulai tumbuh dan regulasi pada

Tabel 1. Awal Perkembangan PTS di Papua dan Papua Barat

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	TAHUN
1	Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur (Gereja Katolik)	1967
2	Institut Teologi Baptis (Gereja Baptis)	1967
3	Akademi Teologi GKI (menjadi STT GKI di TP)	1969
4	AIAA (menjadi UNIYAP)	1974
5	STIH Manokwari	1975
6	APP (menjadi Universitas Ottow-Geissler)	1981
7	ATPU (menjadi USTJ)	1984
8	STIA Karya Dharma Merauke	1984
9	STISIPOL Silas Papare Jayapura	1985
10	STIPS Jayapura (sudah ditutup 1995)	1985
11	PTS lainnya	1986 - >

saat ini memungkinkan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi swasta dapat dijadikan ajang bisnis yang perlu ditekuni. Pandangan seperti ini pada akhirnya terlihat pada ketidak-sungguhannya pengelolaan PTS.

Selain perkembangan PTS, PTN juga mengalami perkembangan, walaupun tidak secepat dan sebanyak PTS. Tabel 2 memperlihatkan perkembangan PTN di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, rekapitulasi keadaan perkembangan perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 2. Keadaan Perkembangan PTN di Papua dan Papua Barat

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	TAHUN
1	Universitas Negeri Cenderawasih	1962
2	Universitas Negeri Papua	2002
3	Universitas Negeri Musamus	2009
4	Sekolah Tinggi Agama Kristen Jayapura	2001
5	STAIN Al-Fatah Jayapura	2006
6	STAIN Sorong	2006
7	Politeknik Fakfak	2012
8	Community College Sorong Selatan	2013
9	IPDN Jayapura (Filial Bandung)	2011

Tabel 3. Keadaan PTS dan PTN di Papua dan Papua Barat

NO.	BENTUK PT	PENYELENGGARA		JUMLAH
		PTS	PTN	
1	Universitas	9	3	12
2	Institut	2	1	3
3	Sekolah Tinggi	34	3	37
4	Politeknik	3	1	4
5	Akademi	11	0	11
6	Community College	0	1	1
		59	9	68

2.2. *Dinamika Pendidikan Tinggi di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo*

Dari data yang dirilis Kopertis Wilayah XIV PPB ini, kita mengetahui bahwa pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014, dinamika pendidikan di Papua dan Papua Barat mengalami pasang surut. Dikatakannya bahwa PTS di Papua dan Papua Barat menunjukkan tren naik di atas tahun 1980. Sejak tahun 1967 sampai dengan 2012, jumlah PTS di Papua berjumlah 59. Pada tahun 2014 turun menjadi 56 karena ada 3 PTS yang ditutup, yaitu: (1) Politeknik Internasional di Sorong, (2) AMI di Jayapura, dan (3) STIE Amor di Timika. Tahun 2015 naik lagi menjadi 60 PTS karena bertambah 4 PTS baru, yaitu: (1) Universitas Nani Bili di Sorong, (2) STIE Trinitas di Sorong, (3) STIE Theresia di Merauke, dan (4) STKIP Hermon di Timika. Selanjutnya pada tahun 2016 ada 1 PTS lagi ditutup, yaitu AKPER Yamas di Jayapura.

Perkembangan PTS sejak tahun 2012/2013 tidak berlanjut seiring dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berbagai Perpem dan Permen. Sesungguhnya peraturan perundang-undangan ini bukan menjadi penghalang, tetapi masyarakat (yayasan) belum mampu memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan sebagai dasar pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, terutama persyaratan tenaga dosen, fasilitas, dan pembiayaan.

Perkembangan PTS yang mengalami kendala, selain karena keterbatasan SDM untuk menjadi dosen, yayasan tidak memiliki fasilitas dan dana, kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Keadaan ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat yang lemah dan calon input yang belum memenuhi standar sebagai mahasiswa.

Dengan adanya data ini, pantaslah bagi kita untuk menyelidiki tiga jenis pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ketiga jenis pendidikan itu adalah pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan keahlian (vokasi).

2.2.1. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Penekanan pada sistem ini adalah lebih banyak teori daripada praktik. Perbandingannya adalah 60:40. Mahasiswa yang lulus dari sistem pendidikan akademik akan memperoleh gelar sarjana (S1, S2, S3) yang diikuti oleh bidang keahlian yang dipilih. Misalnya, jika memilih bidang ekonomi, setelah lulus akan

mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E.). Begitu pula dengan bidang keahlian yang lain.

2.2.2. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi adalah lanjutan dari pendidikan akademik, ketika sudah mendapatkan gelar Sarjana (S1). Pendidikan profesi dipersiapkan untuk mahasiswa agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapat gelar profesi/keahlian tertentu. Contoh pendidikan profesi yang ada di Indonesia adalah akuntan (Ak.), konsultan pajak (B.K.P), apoteker (Apt.), dokter (dr.), dokter gigi (drg.), perawat (Ns.), Psikolog (Psi.), Fisioterapis (Ftr.), Insinyur (Ir.), Guru , Arsitek (Ar.), dan lain-lain.

2.2.3. Pendidikan Vokasi (Keahlian)

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Sistem pendidikan ini lebih menekankan praktik daripada teori. Perbandingannya adalah 60:40.

Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3), dan diploma IV (D4). Seorang mahasiswa yang lulus dari pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi, seperti ahli pratama (A.P.), ahli muda (A.Ma.), ahli madya (A.Md.), dan sarjana terapan (S.Tr.).

2.3. Dampak Pendidikan Tinggi di Papua dan Papua Barat

Pada pokok ini akan ditelusuri sejauh mana dampak kehadiran pendidikan tinggi itu bagi peningkatan SDM dan mampu membawa perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mengacu pada tabel 03 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 59 PTS dan 9 PTN yang berada di Papua dan Papua Barat. Jumlah keseluruhan pendidikan tinggi itu adalah 68 unit. Pendidikan tinggi swasta jauh lebih banyak daripada pendidikan tinggi negeri.

Kopertis XIV mensinyalir bahwa perkembangan PTS yang pesat mulai terjadi di atas tahun 1980. Keadaan ini di satu sisi memperlihatkan bahwa telah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM; juga karena regulasi pada saat ini memungkinkan. Namun, di lain sisi muncul pandangan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi swasta dapat dijadikan ajang bisnis yang perlu ditekuni.

Maka itu, tidaklah mengherankan bahwa memasuki tahun 2000-an, dengan cepat telah merebak pendidikan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat. Berbagai orientasi dan tujuan ikut menyertainya. Di beberapa tempat, munculnya

pendidikan tinggi karena kebutuhan yayasan, atau karena keterpanggilannya pada situasi masyarakat sehingga yayasan berjuang untuk mendirikan perguruan tinggi tersebut demi menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, di lain tempat, munculnya pendidikan tinggi hanya karena motivasi dan orientasi tertentu yang ikut menyertainya.

Pandangan seperti ini pada akhirnya terlihat pada kesungguhan dalam mengelolah PTS. Memiliki motivasi yang besar dalam mendirikan PTS karena kebutuhan yayasan, yang mendorong untuk peningkatan mutu PTS sebagai sebuah sistem yang memiliki beberapa subsistem yang harus saling mempengaruhi untuk menjalankan PTS sebagai sistem, yayasan atau lembaga tersebut akan berjuang mewujudkannya. Subsistem yang dimaksudkan dalam PTS, yaitu: (1) kurikulum atau isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) dosen dan pegawai, (5) sarana-prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, (8) penilaian, (9) penelitian, dan (10) PKM.

Pengelolaan yang baik terhadap kesepuluh subsistem atau komponen ini akan menghasilkan PTS yang berkualitas. Sebaliknya, bila memiliki motivasi atau orientasi lain dalam mendirikan PTS, tentu dengan sendirinya akan tersingkir.

Kenyataan ini semakin dimurnikan lagi melalui diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2012, yang di dalamnya semua PTS dan program studi diberi akreditasi C dengan sendirinya. Ini merupakan konsekuensi dari pasal 97 huruf a yang menyatakan: “izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku”. Hal ini terkait juga dengan pasal 33 ayat 5 yang menyatakan: “Program studi ... mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan” dan pasal 30 (ayat) yang menegaskan bahwa: “*Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum*”. Dengan demikian, 59 PTS di Kopertis Wilayah XIV PPB dari 219 sekarang 235 program studinya memperoleh akreditasi C atau yang disebut akreditasi anugerah. Masa berlaku akreditasi anugerah ini ditetapkan sebagai berikut:

“Perguruan tinggi atau institusi berlaku sampai dengan 10 Agustus 2014 dengan catatan semua perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang dan wajib mengirim borang akreditasi sampai batas waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2014. Berarti masa akhir akreditasi ulang institusi adalah tanggal 10 Agustus 2019”;

“Program Studi berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, yaitu 6 (enam) bulan setelah sosialisasi atau setelah surat Edaran Dirjen Dikti pada bulan Februari 2013.”

Pada tahun 2014, proses pemurnian PTS itu terlihat. Dari 59 PTS yang semula ada, turun menjadi 56 karena ada 3 PTS harus ditutup, yaitu: (1) Politeknik

Internasional di Sorong, (2) AMI di Jayapura, dan (3) STIE Amor di Timika. Namun demikian, satu tahun kemudian (tahun 2015) naik lagi menjadi 60 PTS. Hal ini terjadi karena bertambahnya 4 PTS baru, yaitu: (1) Universitas Nani Bili di Sorong, (2) STIE Trinitas di Sorong, (3) STIE Theresia di Merauke, dan (4) STKIP Hermon di Timika. Selanjutnya, pada tahun 2016 ada 1 PTS lagi yang harus ditutup, yaitu AKPER Yamas di Jayapura.

2.3.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Terkait ditutupnya sejumlah PTS di Papua dan Papua Barat, kita memiliki gambaran menarik mengenai fenomena ditutupnya AKPER Yamas di Jayapura. Tahun 2016, melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 306/M/KPT/2016 Tertanggal 23 Agustus 2016 secara resmi mencabut izin pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Yayasan Masyarakat Sejahtera (Yamas) Papua. Namun demikian, anehnya pada tahun 2017, perguruan tinggi tersebut tetap membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru (PMB). Direktur AKPER Yamas, yang juga merangkap sebagai Ketua Yayasan, Wempi Arongear tetap bertekad membuka pendaftaran untuk PMB. Baginya, keputusan untuk penutupan kampusnya belum final sehingga penerimaan mahasiswa baru tetap dilaksanakan. Ia meminta supaya semua pihak tetap mendukung putra-putri Papua yang sedang menempuh pendidikan di AKPER Yamas. Kepada media *Jubi*, Arongear mengatakan, “Saya rasa anak-anak kita ini perlu didukung, sekali lagi saya mau katakan bahwa kami tetap lakukan proses penerimaan mahasiswa baru seperti biasa sebelum ada keputusan final” (*Jubi*, 17/2/2017).

Namun demikian, tekad Direktur AKPER Yamas itu ditentang oleh Kopertis. Ketua Kopertis Wilayah XIV PBB, Fetus Simbiak, kepada *Jubi* (14/2/2017) mengungkapkan keberatannya. Baginya, hal yang dilakukan Yamas sudah menyalahi aturan. “Itu sudah menyalahi aturan kalau mereka masih menggelar PMB karena jelas dari SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bahwa AKPER Yamas sudah tidak boleh beroperasi lagi.”

Alasan pencabutan izin pendirian AKPER Yamas adalah karena belum terdaftar dalam usulan reakreditasi program studi dan permohonan akreditasi institusi dalam pangkalan data BAN-PT. Meski izin sudah dicabut, perguruan tinggi tersebut telah berhasil meluluskan 4.876 ahli madya (A.Md.) keperawatan. Akibatnya, ijazah yang digunakan oleh para mahasiswa lulusan AKPER Yamas dalam mencari pekerjaan tidak pernah diakui.

Fenomena di atas merupakan potret singkat dampak kehadiran pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat saat ini. Tujuan pendidikan yang seharusnya

menjadi upaya dasar pengentasan kemiskinan, malahan menjadi embrio lahirnya “kebodohan” yang pada akhirnya semakin menguatnya kemiskinan. Pendidikan yang diharapkan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan sumber daya manusia (SDM), yakni membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global serta memiliki kualitas dan daya saing sehingga dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter, namun justru dirusak oleh sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok.

2.3.2. Perubahan Sosial yang Terjadi

Permasalahan pendidikan di Indonesia bahkan di Papua dan Papua Barat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan pada satu bidang dapat berdampak pada bidang yang lain. Paradoks pendidikan, di satu pihak, dianggap sebagai penggerak dari kemajuan ilmiah, teknologi, dan kebudayaan, tetapi di lain pihak, terdapat fakta tentang kurangnya adaptasi pendidikan terhadap masyarakat.

Faktanya adalah pendidikan selalu ketinggalan bila dibandingkan dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang sedemikian cepat. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai lembaga pendidikan merupakan suatu daya adaptasi kultural dalam menjawab proses pembangunan dan perubahan sosial. Menjadi pengetahuan bersama bahwa pendidikan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang perlu terus ditingkatkan, yaitu suatu proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moral melalui sejumlah informasi atau pengetahuan, sikap, perilaku, dan budaya guna memecahkan persoalan-persoalan hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik dan generasi muda.

Salah satu dampak dari perubahan sosial terhadap pengembangan pendidikan di Papua secara khusus adalah bahwa orang tidak lagi mengejar tujuan pendidikan dan pengajaran, yakni membantu anak menjadi orang dewasa mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi orang mengejar tawaran-tawaran modernisme. Mengikuti hal-hal yang modern orang lantas bangga bahwa mereka dapat disebut orang-orang modern. Padahal kalau dilihat dengan baik, pengejaran dengan mengikuti modernisme yang sekarang, karena perubahan sosial yang ada, tidak lain hanyalah merupakan keinginan menyesuaikan diri dengan apa yang sekarang berlaku atau bermotifkan kesadaran akan keharusan meninggalkan yang sudah usang demi perbaikan hidup.

Bentuk seperti ini bukanlah modernisme melainkan “konformisme” sebab di dalam modernisme harus ada pendapat pribadi mengenai yang baru itu, tetapi dalam konformisme “orang hanya ikut-ikutan”. Konformisme dalam pendidikan, dengan perubahan sosial yang ada di Papua saat ini, adalah berbahaya karena mematikan identitas diri.

Sikap “ikut-ikutan” hanya menciptakan pribadi yang tidak bertanggung jawab, tidak berinisiatif, dan sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pendidikan yang tidak mendewasakan yang ciri khasnya menyeragamkan (misalnya, mengikuti kurikulum nasional). Pembangunan masyarakat modern harus tidak dihindangi oleh kerendahan hati palsu karena ia sadar dan bangga atas kepribadiannya yang berharga, juga bagi sesama. Ia mempergunakan kemampuannya secara penuh. Mereka adalah pribadi mandiri dan kreatif yang merupakan daya manusia, *human resources* untuk modernisasi sejati.

3. Pendidikan Vokasi: Peluang Kemajuan SDM

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya, kita sedang hidup dalam sebuah sistem politik ekonomi globalisasi. Globalisasi adalah neoliberalisme (pasar bebas). Tekanan utama neoliberalisme adalah manusia ekonomi (*homo economicus*), dengan slogan saktinya: *consumo ego sum* (saya mengonsumsi, maka saya ada).

Itu berarti hakikat manusia pertama-tama dilihat hanya sebagai “makhluk ekonomi”. Sebagai makhluk ekonomi, tindakan dan relasi antarpribadi harus dilihat terutama sebagai model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang berlaku dalam sistem transaksi ekonomi.

Pengaruh neoliberalisme mau mencapai dua hal. *Pertama*, hubungan sosial dan antarpribadi, serta berbagai urusan bersama yang menyangkut bidang-bidang, seperti pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain harus dipahami dengan memakai konsep ekonomi (pasar bebas). Jadinya, ontologi (hakikat) *economicus* melibatkan cara pandang (epistemologi) *economicus* juga. Maka itu, segala perubahan yang dilakukan baik dalam sistem pendidikan, kesehatan, kebudayaan, maupun pertanian, dan seterusnya harus dilakukan dalam kerangka berpikir sistem pasar. *Kedua*, prinsip ekonomi sudah merupakan tolok ukur mengevaluasi sukses-gagalnya suatu kebijakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun budaya. Itu artinya ontologi dan epistemologi *economicus* pada akhirnya melibatkan pula etika *economicus*.

Perubahan cara pandang semacam ini tak dapat dielakkan lagi. Banyak hal telah berubah, baik secara perlahan maupun ekstrem akibat globalisasi, revolusi

industri 4.0, hingga pandemi yang memaksa manusia bertahan hidup hingga berhasil mencapai target yang dicanangkan.

Untuk menyiasati tuntutan globalisasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan visi Indonesia 2045, pada Mei 2019. Visi ini memberikan lecutan semangat, optimisme, dan harapan bahwa bonus demografi yang dialami Indonesia kelak akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa, didukung oleh empat pilar utama. Keempat pilar itu adalah (1) pembangunan manusia dan penguasaan iptek; (2) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; serta (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pembangunan manusia dan penguasaan iptek tidak bisa dipisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi memiliki potensi luar biasa dalam membekali SDM bangsa ini menghadapi megatren dunia yang bervariasi dan juga terus berubah.

Strategi pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, telah dirancang betul-betul untuk mencapai target ini. Namun demikian, selain aspek kognitif, kebijakan pendidikan hari ini juga memberikan fokus pada penguatan aspek karakter, *soft skills*, moral dan integritas, serta religiositas.

Namun demikian, persoalannya adalah bahwa pendidikan vokasi yang dicanangkan pemerintah belum begitu dikembangkan di Papua dan Papua Barat. Dari data yang dirilis oleh Kopertis XIV mengenai keadaan PTS menurut bentuk per kabupaten dan kota di Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, di bawah ini, kita melihat bahwa: (1) penyebaran PTS belum merata di berbagai kota di Papua dan Papua Barat; (2) PTS yang mengembangkan pendidikan vokasi masih sangat sedikit. Bahkan, di beberapa kota PTS belum ada. Padahal, vokasi sebagai pendidikan yang menitikberatkan pada penguasaan keahlian atau keterampilan terapan tertentu menjadi pemegang peran kunci dalam membekali anak bangsa kita untuk bersaing secara global pada masa depan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi mengubah orientasinya dari *supply-driven* menjadi *demand-driven*, disertai sinergi kuat sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Tujuannya semata-mata adalah menjadikan SDM kompeten dari sisi *hard skill*, *soft skill*, maupun karakter.

Meskipun demikian, diakui bahwa kondisi masyarakat (yayasan) belum mampu memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan sebagai dasar pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas. Selain keterbatasan SDM untuk menjadi dosen, yayasan tidak memiliki fasilitas dan dana. Juga, faktor sosial

ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi pun tak terwujud.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik dana, bila ingin membangun SDM Papua dan Papua Barat yang berkualitas dan berdaya saing dalam pasaran global, perlu menggandeng yayasan (pihak swasta) yang terpercaya untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa sesuai visi Indonesia 2045.

4. Penutup

Kenyataan bahwa telah muncul berbagai perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat, namun belum memperlihatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Disinyalir bahwa ada PTS yang didirikan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok tanpa berupaya untuk memenuhi tuntutan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS yang diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 dan terakhir Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa masyarakat melalui badan penyelenggara (yayasan) mengajukan permohonan rekomendasi untuk kepentingan pendirian, perubahan bentuk, dan penambahan program studi.

Beberapa PTS yang muncul belum memenuhi persyaratan sebagaimana tuntutan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi yang mengisyaratkan 10 standar yang harus dipenuhi, antara lain: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses (4) standar penilaian, (5) standar dosen, (6) standar sarpras, (7) standar pengelolaan, (8) standar pembiayaan, (9) standar penelitian, dan (10) standar PKM.

Oleh karena itu, supaya memiliki sebuah gambaran yang komprehensif mengenai pendidikan tinggi negeri (PTN) dan pendidikan tinggi swasta (PTS) di Papua dan Papua Barat, baiklah kiranya kami sertakan pula pada bagian “lampiran”: data, grafik, dan statistik PTN dan PTS di Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

Mengacu pada kenyataan bahwa adanya masalah pada pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat, dapat kita simpulkan bahwa:

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter belum sepenuhnya terwujud.
- b. Sebagian PTS yang muncul hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok tanpa memperhatikan terwujudnya tujuan utama pendidikan itu sendiri. Hal ini ikut mempengaruhi perkembangan PTS lain yang secara serius dan konsisten berupaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.
- c. Daya tampung PTN dan PTS di Papua dan Papua Barat juga masih terbatas. Diperkirakan hanya 18.000 lulusan dari 35.028 lulusan (57%) yang diterima di perguruan tinggi. Sisanya kurang lebih sebanyak 17.000 (43%) lulusan belum tertampung di perguruan tinggi. Dengan demikian, angka 43% menjadi target untuk misi: “peningkatan pemerataan pendidikan tinggi dan peningkatan daya tampung”. Maka itu, perlu adanya pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi baru sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pembangunan daerah.
- d. Pendidikan tinggi vokasi masih sangat sedikit di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mendirikan pendidikan tinggi vokasi sebagai upaya mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja dan industri dalam pasaran global.
- e. Pemerintah perlu menggandeng pihak swasta (yayasan) dan memberikan suntikan dana yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah guna menyokong PTS yang bertekad baik untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas di Papua dan Papua Barat.
- f. Masih banyak sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah Kementerian Agama tidak kami masukkan di sini karena data tidak kami peroleh dengan baik. Kami hanya dapat menyebutkan sekolah tinggi agama yang berada di bawah Kementerian Agama khususnya Bimas Katolik, yakni STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura, STK Santo Yakobus Merauke, STPK Santo Benediktus Sorong, dan STPK Toye Papa di Deiyai, STFT Fajar Timur (program magister teologi).

Daftar Pustaka

BPS Provinsi Papua. (2021). “Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2021.” Jayapura: BPS Provinsi Papua.

- Direktorat Jenderal Bimas Katolik Departemen Agama RI. (2008). “Kesepakatan Timika: Pertemuan Konsultasi Antarpimpinan Gereja dan Tokoh Katolik Se-Tanah Papua Tahun 2017.” Jakarta: Ditjen Bimas Katolik RI.
- Simbiak, M.Pd., Drs. Festus. (2017). “Memorandum Akhir Masa Jabatan.” *Tidak diterbitkan*.
- Koesoema A., Doni. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Mofu, Dr. Surriel S. “Memorandum Akhir Jabatan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua-Papua Barat Tahun 2017-2022.” *Tidak diterbitkan*.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Sakarinto, Wikan. “Pendidikan Vokasi dan Visi Indonesia 2045.”

Lampiran

Gambaran perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah XIV tahun 2017-2020 dapat terlihat pada pemetaan dan tabel di bawah ini: (Memorandum Akhir Jabatan Kepala LLDIKTI 2017-2020)



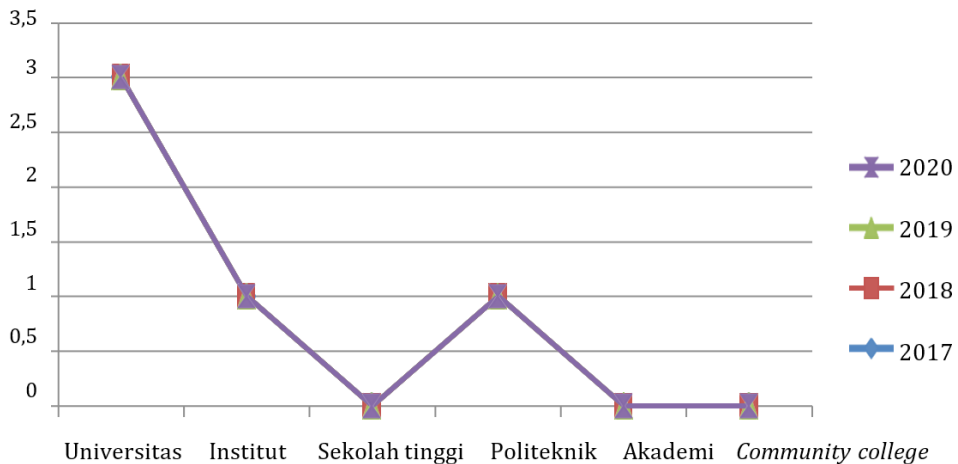
Gambar G-1. Pemetaan Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2020

Tabel T-1. Pemetaan PTN di LLDIKTI Wilayah XIV

NO.	PERGURUAN TINGGI NEGERI	TAHUN				KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	
1	Universitas	3	0	0	0	Tahun 1962 Universitas Cenderawasih
2	Institut	1	0	0	0	Tahun 2000 Universitas Papua
3	Sekolah Tinggi	0	0	0	0	Tahun 2010 Universitas Musamus
4	Politeknik	1	0	0	0	Tahun 2012 Politeknik Negeri Fakfak
5	Akademi	0	0	0	0	Tahun 2014 ISBI Tanah Papua
6	Community College	0	0	0	0	
Jumlah		5	0	0	0	

Dari Tabel T-1 dapat diketahui bahwa hingga tahun 2017 hanya ada 5 PTN yang meliputi 3 universitas, 1 institut, dan 1 politeknik di Wilayah XIV Papua dan

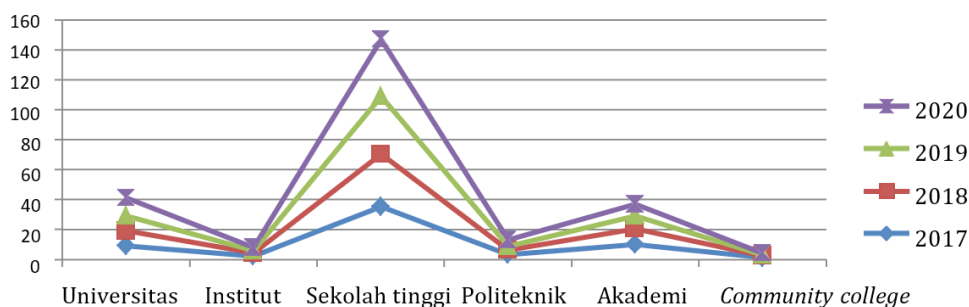
Papua Barat. Sementara itu, sekolah tinggi, akademi, dan *community college* hingga tahun 2020 justru belum menjadi perhatian serius pemerintah. Apakah untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang akan bersaing dalam dunia kerja dan industri demi masa depan bangsa Indonesia sudah cukup dengan 5 perguruan tinggi negeri yang ada?



Gambar G-2. Perkembangan PTN dari Tahun 2017-2020

Tabel T-2. Pemetaan PTS di LDDIKTI Wilayah XIV

NO.	PERGURUAN TINGGI SWASTA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Universitas	9	10	10	12
2	Institut	2	2	2	2
3	Sekolah tinggi	35	35	39	38
4	Politeknik	3	3	3	4
5	Akademi	10	10	9	8
6	Community college	1	1	1	1
	Jumlah	60	61	64	65



Gambar G-3. Perkembangan PTS dari Tahun 2017-2020

Dengan mencermati Tabel T-2, dapat kita simpulkan bahwa hingga tahun 2020, justru perguruan tinggi swasta semakin lebih banyak bermunculan. Ada penambahan 2 universitas swasta pada tahun 2020. Institut masih tetap sama, yakni 2 unit. Namun demikian, pada sekolah tinggi, justru terjadi penambahan dari semula 35 unit pada tahun 2017/2018 naik menjadi 39 pada tahun 2019. Akan tetapi, berkurang lagi satu unit pada tahun 2020 sehingga total sekolah tinggi swasta adalah 38 unit. Lalu, pada perguruan tinggi politeknik hanya bertambah satu unit pada tahun 2020. Menariknya, perguruan tinggi akademi justru berkurang dari semula tahun 2017/2018 ada 10 unit, pada tahun 2019 berkurang satu, begitu pula dengan tahun 2020. Jadi, total akademi per tahun 2020 adalah 8 unit. Sementara itu, pada *community college* tidak ada penambahan ataupun pengurangan, tetap satu unit hingga tahun 2020. Pertanyaan menariknya, mengapa perguruan tinggi swasta yang konsen pada pendidikan vokasi (keahlian) seperti politeknik dan akademi malahan berkurang?

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat dikemukakan bahwa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat jumlah perguruan tinggi swasta lebih banyak dibanding dengan perguruan tinggi negeri karena untuk pendirian perguruan tinggi negeri sejak 1 Januari 2017 sedang *moratorium* sesuai Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/M/SE/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi yang menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) akan dilakukan *moratorium* sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;

2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan institut teknologi;
3. Pembukaan program studi pendidikan sarjana akan diberikan untuk program studi di bidang *science*, *technology*, *engineering*, dan *mathematics* (STEM);
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya akan terus berupaya mendorong pengelolaan perguruan tinggi yang semakin baik, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, dalam mendorong usul perubahan perguruan tinggi swasta dalam bentuk penyatuan dan penggabungan, pengusul dapat mengajukan usul untuk pembukaan program studi baik di bidang STEM maupun di bidang non-STEM sebagai penambahan program studi yang sudah ada.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pembukaan program studi baru yang telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi akan mendapatkan akreditasi dengan peringkat “baik” pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan tersebut, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pembukaan program studi melalui kerja sama, pada pasal 36 ayat 2 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa selain memenuhi syarat minimum akreditasi, juga telah melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran, dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan program studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan program studi yang baru dibuka.

Adapun organisasi atau lembaga tersebut di atas dapat berupa perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) perguruan tinggi terbaik dunia; atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Pemimpin PTS membuat perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga mitra, yang terkait dengan

pengembangan kurikulum, kesediaan organisasi atau lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri, dan kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari program studi akademik tersebut.

Kebijakan pembukaan program studi melalui kerja sama ini memberikan kemerdekaan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau lembaga mitra sehingga diharapkan lulusan program studi tersebut dapat berkontribusi dalam organisasi atau lembaga mitra tersebut. Untuk pola kerja sama juga dimungkinkan untuk membuka program studi baik di bidang STEM maupun di bidang non-STEM sesuai dengan pengembangan kurikulum yang disepakati oleh organisasi atau lembaga mitra.

Oleh karena itu, apabila perguruan tinggi telah memiliki kesepakatan kerja sama seperti tersebut di atas, dapat mengajukan usul pembukaan program studi dengan nama program studi yang sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan tersebut langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Guna memperkuat pelaksanaan kurikulum yang disepakati serta memantau penyelenggaraan program studi tersebut, komposisi usul calon dosen tetap dalam program studi tersebut dapat melibatkan pegawai organisasi atau lembaga mitra sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keterlibatan organisasi atau lembaga mitra dalam penyelenggaraan program studi tersebut semakin nyata dan kompetensi lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga mitra tersebut.

Saat ini perguruan tinggi masih dalam proses mempelajari kebijakan baru ini. Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan akan banyak perguruan tinggi yang mengajukan pembukaan program studi dengan skema “kampus merdeka” sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat serta sejalan dengan revolusi industri 4.0.

Tabel T-3. Pemetaan PTN/PTS Berdasarkan Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2020

NO.	NAMA KAB/KOTA	BENTUK PTS DAN PTN						JUMLAH
		UNIV.	INST.	SETING	AKAD.	POL.	COM.COL.	
1	Kota Jayapura	5	1	8	3	-	-	17
2	Kab. Jayapura	-	-	2	-	-	-	2
3	Biak	-	1	2	3	-	-	6
4	Wamena	1	-	4	1	-	1	7
5	Merauke	1	-	4	1	1	-	7
6	Timika	1	-	3	-	1	-	5
7	Nabire	1	-	2	-	-	-	3
8	Serui	-	-	2	-	-	-	2
9	Manokwari	1	1	4	-	-	-	6
10	Kota Sorong	3	-	3	-	1	-	7
11	Kab. Sorong	2	-	-	-	-	-	2
12	Fakfak	-	-	3	-	1	-	4
13	Bintuni	-	-	1	-	-	-	1
14	Kaimana	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		15	3	38	8	5	1	70

Berdasarkan Tabel T-3, dapat dikemukakan bahwa sebaran perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di kabupaten kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah merata sehingga anak-anak Papua lulusan SMA maupun lulusan SMK dapat melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di daerahnya masing-masing.

Tabel T-4. Daftar Nama PTN dan PTS di LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2020**JAYAPURA**

Perguruan Tinggi Negeri

- 1 Universitas Cenderawasih Jayapura
- 2 ISBI Tanah Papua Jayapura

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
- 2 Universitas Yapis Papua Jayapura
- 3 Universitas Ottow Geissler Jayapura
- 4 Universitas Muhammadiyah Papua
- 5 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura
- 6 Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat dan Teologi GKI Izaak Samuel Kijne Jayapura

- 7 Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur Jayapura
- 8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
- 9 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura
- 10 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura
- 11 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura
- 12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura
- 13 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Umel Mandiri Jayapura
- 14 Sekolah Tinggi Bio Sains Swadiri Jayapura
- 15 Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Jayapura
- 16 Akademi Pariwisata 45 Jayapura
- 17 Akademi Keperawatan RS Marthen Indey Jayapura

BIAK

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Iisip Yapis Biak
- 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak
- 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biak
- 4 Akademi Pariwisata Petrus Kafiari Biak
- 5 Akademi Perikanan Kamasan Biak
- 6 Akademi Teknik Biak

SERUI

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui
- 2 STKIP PGRI Serui

NABIRE

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire
- 2 STIKES Persada Nabire
- 3 STMIK Pesat Nabire

TIMIKA

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Universitas Timika
- 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan Timika
- 3 STKIP Hermon Timika
- 4 STKIP Terang Bangsa Timika
- 5 Politeknik Amamapare Timika

MERAUKE

Perguruan Tinggi Negeri

- 1 Universitas Musamus Merauke

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke
- 2 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke
- 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke
- 4 STIE Saint Theresa Merauke
- 5 Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke
- 6 Politeknik Pertanian Yasanto Merauke

WAMENA

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

- 2 STKIP Abdi Wacana Wamena
- 3 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena
- 4 STKIP Kristen Wamena
- 5 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika & Teknik Komputer Agamua Wamena
- 6 Akademi Bahasa Asing Netaiken Wamena
- 7 Akademi Komunitas Diaspora Bung Karno Wamena

MANOKWARI

Perguruan Tinggi Negeri

- 1 Universitas Papua Manokwari

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Institut Sains dan Teknologi Indonesia Manokwari
- 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari
- 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa Manokwari
- 4 STKIP Muhammadiyah Manokwari
- 5 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Kreatindo Manokwari

BINTUNI

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni

SORONG

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Universitas Muhammadiyah Sorong
- 2 Universitas Kristen Papua Sorong
- 3 Universitas Victory Sorong
- 4 Universitas Nani Bili Nusantara Sorong
- 5 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong
- 7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong
- 8 STIE Trinitas Sorong
- 9 Akademi Akuntansi Trinitas Sorong
- 10 Politeknik Saint Paul Sorong

FAKFAK

Perguruan Tinggi Negeri

- 1 Politeknik Negeri Fakfak

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 STIE Ottow & Geissler Fakfak
- 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah Fakfak
- 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuubar Fakfak

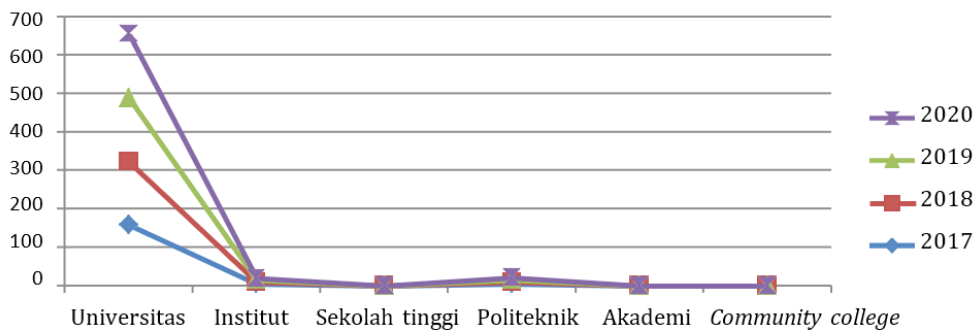
KAIMANA

Perguruan Tinggi Swasta

- 1 Politeknik Lengguru Kaimana

Tabel T-5. Data Program Studi PTN Tahun 2017-2020

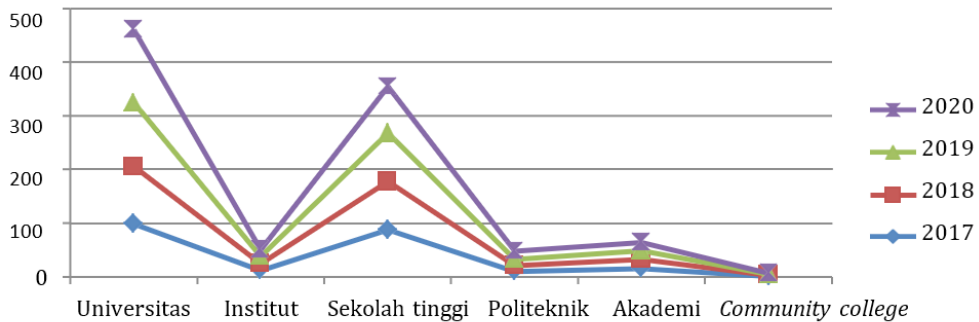
NO.	PERGURUAN TINGGI NEGERI	PROGRAM STUDI			
		2017	2018	2019	2020
1	Universitas	159	163	165	168
2	Institut	5	5	5	5
3	Sekolah Tinggi	0	0	0	0
4	Politeknik	5	5	5	6
5	Akademi	0	0	0	0
6	Community College	0	0	0	0
Jumlah		169	173	175	179



Grafik G-4. Perkembangan Program Studi PTN Tahun 2017-2020

Tabel T-6. Data Program Studi PTS Tahun 2017-2020

NO.	PERGURUAN TINGGI SWASTA	PROGRAM STUDI			
		2017	2018	2019	2020
1	Universitas	99	107	119	136
2	Institut	13	13	13	13
3	Sekolah Tinggi	88	90	90	87
4	Politeknik	11	11	12	15
5	Akademi	17	17	16	15
6	Community College	2	2	2	2
Jumlah		230	240	252	268



Gambar G-5. Perkembangan Program Studi PTS Tahun 2017-2020

Pada tabel dan grafik di atas tampak bahwa perkembangan program studi di PTN dan PTS Wilayah XIV Papua dan Papua Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan program studi baru dari tahun ke tahun. Ini berarti sejalan dengan reformasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan “merdeka belajar” yang dalam bidang pendidikan tinggi adalah “kampus merdeka”.

Salah satu kebijakan dalam kampus merdeka yang dilakukan adalah “pembukaan program studi melalui kerja sama”. Melalui kampus merdeka ini, perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk peka dan cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, mampu memberikan terobosan dan inovasi, serta mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang andal dan siap untuk bersaing dalam dunia kerja baik secara global dan nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya pembukaan dan pengembangan program studi pada perguruan tinggi Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan tersebut. Guna memperlancar pelaksanaan kebijakan “kampus merdeka”, terkhusus pada pembukaan program studi, telah dikeluarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam Permendikbud tersebut, diatur pula ketentuan terkait pembukaan program studi oleh perguruan tinggi Indonesia. Secara umum, pembukaan program studi akademik dapat dikategorikan dalam lima bentuk usul pembukaan program studi, yaitu:

- a. Pembukaan program studi akademik bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi;

- b. Pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- c. Pembukaan program studi akademik sebagai penambahan program studi akademik bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) program studi akademik;
- d. Pembukaan program studi akademik bersamaan dengan proses perubahan perguruan tinggi swasta yang berupa penggabungan, penyatuan, dan perubahan bentuk;
- e. Pembukaan program studi akademik (selain program studi bidang kesehatan dan kependidikan) oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi baik sekali, akreditasi unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerja sama.

Bentuk usul pembukaan program studi seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d merupakan bentuk usul yang selama ini diajukan oleh perguruan tinggi. Sedangkan bentuk usul pembukaan program studi yang tersebut pada huruf e merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka program “kampus merdeka”.

Tabel T-7. Daftar Nama Program Studi PTN dan PTS Tahun 2020**PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Universitas Cenderawasih			
Administrasi Perkantoran	D-3	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-2
Akuntansi	S-1	Pendidikan IPA	S-2
Akuntansi	S-2	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1
Antropologi	S-2	Pendidikan Kewarganegaraan	S-2
Antropologi Sosial	S-1	Pendidikan Kimia	S-1
Bimbingan dan Konseling	S-1	Pendidikan Matematika	S-1
Bimbingan dan Konseling	S-2	Pendidikan Matematika	S-2
Biologi	S-1	Pendidikan Olahraga	S-2
Biologi	S-2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Pendidikan Profesi Guru Profesi	Profesi
Farmasi	S-1	Pendidikan Sejarah	S-1
Fisika	S-1	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	S-2
Hubungan Internasional	S-1	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-2
Ilmu Administrasi Negara	S-1	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1
Ilmu Administrasi Publik	S-2	Planologi	S-1
Ilmu Ekonomi	S-2	Profesi Dokter Profesi	Profesi
Ilmu Ekonomi S3	S-3	Profesi Ners Profesi	Profesi
Ilmu Hukum	S-1	Sistem Informasi	S-1
Ilmu Hukum	S-2	Sosiologi	S-2
Ilmu Kelautan	S-1	Statistika	S-1
Ilmu Keolahragaan	S-1	Teknik Elektro	S-1
Ilmu Keperawatan	S-1	Teknik Elektronika	D-3
Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-1	Teknik Geofisika	S-1
Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2	Teknik Mesin	D-3
Ilmu Kesejahteraan Sosial	S-1	Teknik Mesin	S-1
Ilmu Manajemen S3	S-3	Teknik Mineral	D-3
Ilmu Pemerintahan	S-1	Teknik Pertambangan	S-1
Ilmu Perikanan	S-1	Teknik Sipil	D-3
Ilmu Perpustakaan	S-1	Teknik Sipil	S-1
Ilmu Sosial S3	S-3	Teknologi Listrik	D-3
Kebijakan Publik	S-2	Universitas Papua	
Keperawatan	D-3	Agribisnis	S-1
Keuangan Daerah	S-2	Agroteknologi	S-1
Kimia	S-1	Biologi	S-1
Manajemen	S-2	Ekonomi Pembangunan	S-1
Manajemen	S-1	Fisika	S-1
Manajemen Administrasi Perkantoran	S-1	Ilmu Kelautan	S-1
Manajemen Koperasi	S-2	Kehutanan	S-1
Manajemen Pendidikan	S-2	Kimia	S-1
Manajemen Pendidikan	S-1	Universitas Musamus	
Matematika	S-1	Administrasi Publik	S-2
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	Agribisnis	S-1
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2	Agroteknologi	S-1
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Akuntansi	S-1
Pendidikan Bahasa Inggris	S-2	Arsitektur	S-1
Pendidikan Biologi	S-1	Ekonomi Pembangunan	S-1
Pendidikan Dokter	S-1	Ilmu Administrasi Negara	S-1
Pendidikan Fisika	S-1	Ilmu Hukum	S-1
Pendidikan Geografi	S-1	Manajemen	S-1
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1

Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Teknik Pertanian	S-1
Pendidikan Ekonomi	S-1	Teknik Sipil	S-1
Pendidikan Fisika	S-1	Teknik Sipil	D-3
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	Desain Komunikasi Visual	S-1
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1	Kriya Seni	S-1
Pendidikan Kimia	S-1	Seni Musik	S-1
Pendidikan Komputer	S-1	Seni Rupa Murni	S-1
Pendidikan Matematika	S-1	Seni Tari	S-1
Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Politeknik Negeri Fakfak	
Peternakan	S-1	Agro Industri	D-3
Sastra Inggris	S-1	Manajemen Informatika	D-3
Sistem Informasi	S-1	Teknik Listrik	D-3
Teknik Elektro	S-1	Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin	D-3
Teknik Informatika	S-1	Teknik Sipil	D-3
Teknik Informatika	D-3	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	D-4
Teknik Mesin	S-1		
Teknik Mesin	D-3		
PERGURUAN TINGGI SWASTA			
Universitas Muhammadiyah Sorong		Universitas Yapis Papua	
Agroteknologi	S-1	Akuntansi	S-1
Ilmu Administrasi Negara	S-1	Budidaya Perairan	S-1
Ilmu Hukum	S-1	Ilmu Administrasi Negara	S-1
Ilmu Pemerintahan	S-1	Ilmu Hukum	S-2
Kehutanan	S-1	Ilmu Hukum	S-1
Manajemen	S-1	Ilmu Pemerintahan	S-1
Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	Manajemen	S-2
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Manajemen	S-1
Pendidikan Matematika	S-1	Pendidikan Agama Islam	S-1
Pengolahan Hasil Perikanan	S-1	PGSD	S-1
Sosiologi	S-1	Sistem Informasi	S-1
Teknik Industri	S-1	Teknik Sipil	S-1
Teknik Informatika	S-1	Universitas Satya Wiyata Mandala	
Teknik Sipil	S-1	Agribisnis	S-1
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura		Agroteknologi	S-1
Akuntansi	S-1	Budidaya Perairan	S-1
Analisis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medis	D-3	Ilmu Administrasi Bisnis	S-1
Arsitektur	S-1	Ilmu Administrasi Negara	S-1
Farmasi	D-3	Ilmu Pemerintahan	S-1
Hubungan Internasional	S-1	Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1
Ilmu Komunikasi	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1
Ilmu Pemerintahan	S-1	Pendidikan Matematika	S-1
Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	Peternakan	S-1
Sastra Inggris	S-1	PGSD	S-1
Sistem Informasi	S-1	Teknik Industri	S-1
Teknik Elektro	S-1	Teknik Informatika	S-1
Teknik Geologi	S-1	Universitas Kristen Papua	
Teknik Informatika / Ilmu Komputer	S-1	Hukum	S-1
Teknik Lingkungan	S-1	Manajemen	S-1
Teknik Mesin	S-1	Pend. Agama Kristen	S-2
Teknik Pertambangan	S-1	Pend. Agama Kristen	S-1
Teknik Sipil	S-1	Perikanan / Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1
		Pertanian / Agribisnis	S-1

Teknik Mesin	S-1	Pendidikan Biologi	S-1
Teologi	S-1	Pendidikan IPA	S-1
Teologi (Akademik)	S-3	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	S-1
Teologi (Akademik)	S-2	Pendidikan Matematika	S-1
Universitas Timika		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1
Agribisnis	S-1	Peternakan	S-1
Ilmu Komunikasi	S-1	PGSD	S-1
Psikologi	S-1	Psikologi	S-1
Universitas Victory Sorong		Teknik Kimia	S-1
Akuntansi	S-1	Teknik Sipil	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Teknologi Informasi	S-1
Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1	Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena	
Ilmu Hukum	S-1	Administrasi Bisnis	D-3
Kehutanan	S-1	Agronomi	S-1
Manajemen	S-1	Ilmu Administrasi Bisnis	S-1
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	Ilmu Administrasi Publik	S-1
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Ilmu Pemerintahan	S-1
Peternakan	S-1	Manajemen Retail	S-1
Sistem Informasi	S-1	Pengelolaan Sumber Daya Lahan	S-1
Universitas Ottow Geissler Jayapura		Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1
Agribisnis	S-1	Universitas Muhammadiyah Papua	
Agroteknologi	S-1	Bisnis Digital	S-1
Akuntansi	S-1	Hubungan Masyarakat	D-3
Biologi	S-1	Hukum	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Ilmu Komunikasi	S-1
Kehutanan	S-1	Ilmu Lingkungan	S-1
Manajemen	S-2	Kewirausahaan	S-1
Manajemen	S-1	Psikologi	S-1
Manajemen Sumber Daya Pesisir	S-1	IISIP Yapis Biak	
Sistem Informasi	S-1	Administrasi Perkantoran	D-3
Teknik Geologi	S-1	Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-2
Universitas Nani Bili Nusantara		Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1
Agribisnis	S-1	Ilmu Administrasi Niaga / Administrasi Bisnis	S-1
Agroteknologi	S-1	Ilmu Komunikasi	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Ilmu Pemerintahan	S-1
Ilmu Pemerintahan	S-1	Ilmu Politik	S-1
Manajemen	S-1	Sosiologi	S-1
PGSD	S-1	Institut Sains dan Teknologi Indonesia Manokwari	
Teknik Elektro	S-1	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1
Teknik Informatika	S-1	Teknik Elektro	S-1
Teknik Mesin	S-1	Teknik Industri	S-1
Teknik Sipil	S-1	Teknik Informatika	S-1
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong		Teknik Sipil	S-1
Agribisnis	S-1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari	
Akuakultur	S-1	Ilmu Hukum	S-1
Akuntansi	S-1	STISIP Silas Papare Jayapura	
Farmasi	S-1	Ilmu Pemerintahan	S-1
Hubungan Internasional	S-1	Sosiologi	S-1
Hukum	S-1	STFT GKI Izaak Samuel Kijne Jayapura	
Ilmu Pemerintahan	S-1	Ilmu Teologi	S-1
Pendidikan Anak Usia Dini	S-1		
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1		
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1		

Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur Jayapura		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua	
Ilmu Teologi	S-1	Analisis Kesehatan	D-3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma		Farmasi	S-1
Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1	Ilmu Keperawatan	S-1
STKIP Abdi Wacana Wamena		Kesehatan Masyarakat	S-1
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	Ners	Profesi
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak	
Pendidikan Matematika	S-1	Hukum	S-1
STIE Ottow & Geissler Fakfak		Hukum	S-2
Akuntansi	D-3	STMIK Sepuluh Nopember Jayapura	
Ekonomi Pembangunan	S-1	Sistem Informasi	S-1
Manajemen	S-1	Teknik Informatika	S-1
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah		Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena	
Administrasi Bisnis	S-1	Agribisnis	S-1
Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1	Agroteknologi	S-1
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura		STKIP Kristen Wamena	
Ekonomi Pembangunan	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1
Keuangan dan Perbankan	D-3	Pendidikan Matematika	S-1
Manajemen	S-1	STISIPOL Yaleka Maro	
Manajemen	S-2	Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1
STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura		Ilmu Pemerintahan	S-1
Agribisnis	S-1	STKIP Muhammadiyah Manokwari	
Agroteknologi	S-1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1
Budidaya Perairan / Akuakultur	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1
Peternakan	S-1	Pendidikan Biologi	S-1
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui		Pendidikan Matematika	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	PGSD	S-1
Manajemen	S-1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura	
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan		Farmasi	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Kebidanan	D-3
Keuangan dan Perbankan / Manajemen Keuangan	D-3	Keperawatan	S-1
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni		Pendidikan Profesi Ners	Profesi
Ilmu Hukum	S-1	STKIP Nuuwar Fakfak	
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa		PGSD	S-1
Akuntansi	D-3	Pendidikan Geografi	S-1
Manajemen	S-1	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biak	
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri		Pendidikan Matematika	S-1
Hukum	S-2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1
Hukum	S-1	PGSD	S-1
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong		STMIK Agama Wamena Papua	
Akuntansi	S-1	Teknik Komputer	S-1
Ekonomi Pembangunan	S-1	Sistem Informasi	S-1
Keuangan dan Perbankan / Manajemen Keuangan	D-3	STIE Yapis Merauke	
Manajemen	S-1	Ekonomi Pembangunan	S-1
Manajemen Pajak	D-3	Keuangan dan Perbankan	D-3
		STIE Saint Teresia Merauke	
		Akuntansi	S-1
		Manajemen	S-1
		STKIP Hermon Timika	
		Matematika	S-1
		Pendidikan Bahasa Inggris	S-1

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi/ Pendidikan Jasmani	S 1	Akademi Komunitas Diaspora Bung Karno Wamena	Komputer Akuntansi	D-2
STMIK Kreatindo Manokwari			Teknik Pengolahan Hasil Pertanian	D-2
Manajemen Informatika / Teknologi Informasi S-1		Politeknik Amamapare	Teknologi Listrik	D-3
Sistem Informasi	S-1		Teknologi Mesin	D-3
Teknik Informatika / Ilmu Komputer	S-1		Teknologi Pertambangan	D-3
STIE Trinitas Sorong			Teknologi Sipil	D-3
Akuntansi	S-1	Politeknik Katolik Saint Paul	Akuntansi	D-4
Perbankan	D-3		Teknik Elektro / Teknologi Rekayasa	
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Papua Serui			Instalasi Listrik	D-4
Pendidikan Biologi	S-1		Teknik Mesin / Teknologi Rekayasa	
PGSD	S-1		Pemeliharaan Alat Berat	D-4
Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Umel Mandiri Jayapura			Teknik Sipil / Teknologi Rekayasa Konstruksi	
Ilmu Komputer	S-1		Jalan dan Jembatan	D-4
Manajemen Informatika	D-3		Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	S-1
STIKES Persada Nabire		Politeknik Pertanian Yasanto	Budidaya Tanaman Pangan	D-3
Gizi	S-1		Budidaya Ternak	D-3
Sekolah Tinggi Bio Sains Swadiri Jayapura			Teknologi Penangkapan Ikan / Perikanan	
Bio Kewirausahaan	S-1		Tangkap	D-3
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pesat Nabire		Politeknik Lengguru Kaimana	Agribisnis Pangan	S-1
Informatika	S-1		Akuntansi Sektor Publik	S-1
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Terang Bangsa			Manajemen Kontrak Pemerintah	S-1
PGSD	S-1			
Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Jayapura				
Manajemen Perusahaan	D-3			
Sekretari	D-3			
Akademi Pariwisata 45 Jayapura				
Perhotelan	D-3			
Usaha Perjalanan Wisata / Perjalanan Wisata	D-3			
Akademi Pariwisata Petrus Kafiari Biak				
Perhotelan	D-3			
Usaha Perjalanan Wisata	D-3			
Akademi Perikanan Kamasan Biak				
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan/ Perikanan Tangkap	D-3			
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan/ Pengolahan Hasil Perikanan	D-3			
Akademi Teknik Biak				
Arsitektur	D-3			
Manajemen Informatika	D-3			
Teknik Mesin	D-3			
Teknik Sipil	D-3			
Akademi Bahasa Asing Netaiken Wamena				
Bahasa Inggris	D-3			
Akademi Keperawatan R.S. Marthen Indey				
Keperawatan	D-3			
Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke				
Kebidanan	D-3			

Data Akreditasi Institusi dan Program Studi PTS

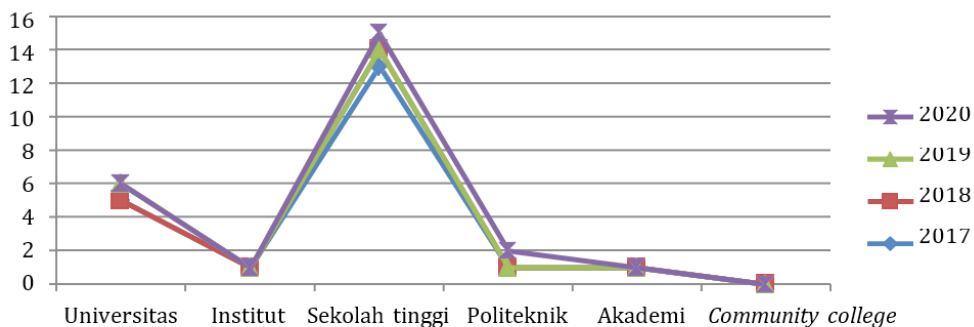
Data status akreditasi institusi dan akreditasi program studi perguruan tinggi swasta dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-8. Data Akreditasi Institusi PTS

NO.	JENIS PTS	PERKEMBANGAN AKREDITASI INSTITUSI PER TAHUN				KET.
		2017	2018	2019	2020	
1	Universitas	5	0	1	0	
2	Institut	1	0	0	0	
3	Sekolah Tinggi	13	1	0	1	
4	Politeknik	1	0	0	1	
5	Akademi	1	0	0	0	
6	Community College	0	0	0	0	
	Jumlah	21	1	1	2	25

Tabel T-9. Data Akreditasi Institusi Peringkat B (Baik Sekali) PTN/PTS

NO.	JENIS PTS	PERKEMBANGAN AKREDITASI /B/ INSTITUSI PER TAHUN				KET.
		2017	2018	2019	2020	
1	Universitas	2	1	1	-	Universitas Cenderawasih
2	Institut	-	-	-	-	Universitas Musamus
3	Sekolah tinggi	2	-	-	-	Universitas Yapis Papua
4	Politeknik	-	-	-	-	Universitas Muhammadiyah Sorong
5	Akademi	-	-	-	-	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
6	Community college	-	-	-	-	STIH Umel Mandiri
	Jumlah	4	1	1	-	6



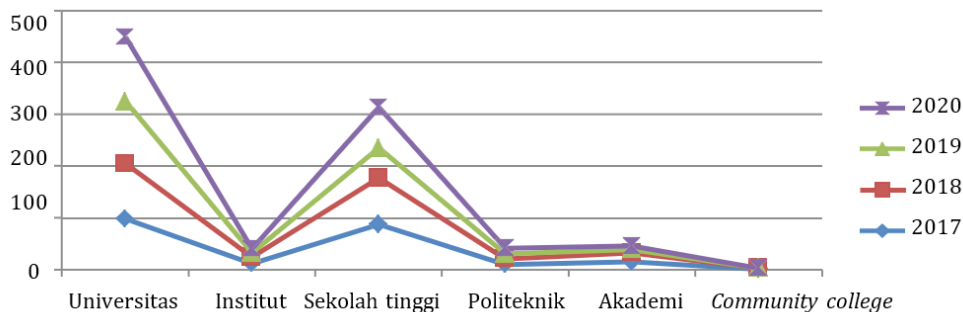
Gambar G-6. Perkembangan Akreditasi Institusi PTS Tahun 2017-2020

Tabel T-10. Data Akreditasi Program Studi PTS Tahun 2017-2020

NO.	JENIS PTS	PERKEMBANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PER TAHUN				KET.
		2017	2018	2019	2020	
1	Universitas	99	107	119	124	
2	Institut	13	13	8	8	
3	Sekolah tinggi	88	90	57	79	
4	Politeknik	11	11	10	11	
5	Akademi	17	17	6	7	
6	Community college	2	2	0	0	
Jumlah		230	240	200	229	

Tabel T-11. Data Akreditasi Program Studi Peringkat B (Baik Sekali) PTS

NO.	JENIS PTS	PERKEMBANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI /B/ PER TAHUN				KET.
		2017	2018	2019	2020	
1	Universitas	33	4	2	-	
2	Institut	3	1	1	-	
3	Sekolah tinggi	19	2	2	1	
4	Politeknik	0	-	-	1	
5	Akademi	0	-	-	1	
6	Community college	0	-	-	-	
Jumlah		55	7	5	3	total 70 dari 268



Gambar G-7. Perkembangan Akreditasi Program Studi PTS Tahun 2017- 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa rata-rata program studi perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berstatus akreditasi C (Baik), kenyataan ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Artinya perlu ada langkah-langkah progresif bagi PTN/PTS untuk mendongkrak status tersebut sehingga status terakreditasi A (Unggul) maupun B (Baik Sekali) dapat ditingkatkan. Status akreditasi mempunyai arti penting bagi perguruan tinggi yang bersangkutan karena tujuan akreditasi adalah untuk:

1. melindungi masyarakat,
2. membantu PT melakukan penjaminan mutu,
3. pertanggungjawaban publik perguruan tinggi,
4. dasar sertifikasi/lisensi,
5. bahan pertimbangan pemberian dan alokasi dana,
6. bahan pertimbangan penerimaan pegawai,
7. pengakuan internasional ijazah/kompetensi,
8. bahan masukan evaluasi kualitas pendidikan tinggi.

Tabel T-12. Data Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Tahun 2020

NO.	PERGURUAN TINGGI	NO. SK	TGL SK	THN SK	PERINGKAT
Perguruan Tinggi Negeri					
1	Universitas Cenderawasih	440/SK/BAN-PT/Ak- PPI/PT/ VII/2020	05-07-20	2020	B
2	Universitas Musamus Merauke	350/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XII/2018	05-12-18	2018	B
Perguruan Tinggi Swasta					
1	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura	4267/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XI/2017	07-11-17	2017	C

2	Universitas Satya Wiyata Mandala	2741/SK/BAN- PT/Akred/PT/ VIII/2017	15-08-17	2017	C
3	Universitas Muhammadiyah Sorong	152/SK/BAN- PT/Akred/PT/ IV/2019	02-04-19	2019	B
4	Universitas Ottow Geissler, Jayapura	293/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/ PT/VI/2020	24-05-20	2020	C
5	Universitas Victory Sorong	1025/SK/BAN- PT/Akred/ PT/X/2015	03-10-15	2015	C
6	Universitas Yapis Papua, Jayapura	1028/SK/BAN- PT/Akred/ PT/X/2015	03-10-15	2015	B
7	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong	210/SK/BAN-PT/Ak- PNB/ PT/VI/2020	19-12-20	2020	B
8	Iisip Yapis Biak	286/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/ PT/VI/2020	16-05-20	2020	C
9	STKIP Hermon Timika	358/SK/BAN-PT/Ak- PKP/PT/ VI/2020	23-06-20	2020	Baik
10	STISIP Silas Papare Jayapura	141/SK/BAN-PT/Ak- PKP/PT/ IV/2020	28-04-20	2020	Baik
11	STKIP Abdi Wacana Wamena	52/SK/BAN- PT/Akred/PT/ III/2018	27-03-18	2018	C
12	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Sepuluh Nopember	4049/SK/BAN- PT/Akred/ PT/X/2017	31-10-17	2017	C
13	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Jayapura	2700/SK/BAN- PT/Akred/PT/ VIII/2017	15-08-17	2017	C
14	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, Teluk Bintuni	0032/SK/BAN- PT/Akred/ PT/II/2017	10-01-17	2017	C
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa, Manokwari	0367/SK/BAN- PT/Akred/ PT/I/2017	19-01-17	2017	C
16	Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Jayapura	2654/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XI/2016	24-11-16	2016	C
17	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma, Merauke	2655/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XI/2016	24-11-16	2016	C
18	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 'UMEL MANDIRI', Jayapura	3173/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XII/2016	27-12-16	2016	B
19	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura	2144/SK/BAN- PT/Akred/PT/ IX/2016	29/29/16	2016	C
20	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari	1062/SK/BAN- PT/Akred/ PT/X/2015	03-10-15	2015	C
21	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari	257/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/ PT/VI/2020	16-05-20	2020	C

22	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena	889/SK/BAN- PT/Akred/PT/ VIII/2015	21-08-15	2015	C
23	Akademi Keperawatan Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura	2143/SK/BAN- PT/Akred/PT/ IX/2016	29-09-16	2016	C
24	Politeknik Amamapare	488/SK/BAN-PT/Ak- PKP/PT/ VII/2020	14-07-20	2020	Baik
25	Politeknik Katolik Saint Paul	3134/SK/BAN- PT/Akred/PT/ XII/2016	27-12-16	2016	C

Tabel T-13. Data Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Tahun 2020

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
PERGURUAN TINGGI NEGERI		
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua		
Desain Komunikasi Visual	S-1	C
Kriya Seni	S-1	C
Seni Musik	S-1	C
Seni Rupa Murni	S-1	C
Seni Tari	S-1	C
Politeknik Negeri Fakfak		
Agro Industri	D-3	C
Manajemen Informatika	D-3	C
Teknik Listrik	D-3	C
Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin	D-3	C
Teknik Sipil	D-3	C
Universitas Cenderawasih		
Akuntansi	S-2	B
Akuntansi	S-1	B
Antropologi	S-2	B
Bimbingan dan Konseling	S-2	C
Bimbingan dan Konseling	S-1	C
Biologi	S-2	B
Biologi	S-1	B
Ekonomi Pembangunan	S-1	B
Farmasi	S-1	B
Fisika	S-1	B
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Administrasi Publik	S-2	B
Ilmu Ekonomi	S-3	C
Ilmu Ekonomi	S-2	B
Ilmu Hukum	S-2	B
Ilmu Hukum	S-1	B
Ilmu Kelautan	S-1	B
Ilmu Keolahragaan	S-1	B

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2	B
Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-1	B
Ilmu Manajemen	S-3	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Ilmu Sosial	S-3	B
Kebijakan Publik	S-2	B
Kedokteran	S-1	B
Keperawatan	S-1	B
Keuangan Daerah	S-2	B
Kimia	S-1	B
Manajemen	S-2	B
Manajemen	S-1	B
Manajemen Administrasi Perkantoran	S-1	C
Manajemen Koperasi	S-2	C
Manajemen Pendidikan	S-2	C
Manajemen Pendidikan	S-1	C
Matematika	S-1	B
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	B
Pendidikan Bahasa Inggris	S-2	C
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Pendidikan Biologi	S-1	B
Pendidikan Fisika	S-1	C
Pendidikan Geografi	S-1	B
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	B
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	B
Pendidikan IPA	S-2	B
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1	C
Pendidikan Kimia	S-1	B
Pendidikan Matematika	S-2	C
Pendidikan Matematika	S-1	B
Pendidikan Olahraga	S-2	B
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1	B
Pendidikan Profesi Guru	Profesi	C
Pendidikan Sejarah	S-1	C
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	S-2	B
Perencanaan Wilayah dan Kota	S-2	C
Planologi	S-1	C
Profesi Dokter	Profesi	B
Profesi Ners	Profesi	B
Sistem Informasi	S-1	B
Sosiologi	S-2	B
Teknik Elektro	S-1	B

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Teknik Geofisika	S-1	B
Teknik Mesin	S-1	B
Teknik Pertambangan	S-1	B
Teknik Sipil	S-1	B
Teknik Sipil	D3	C
Teknologi Listrik	D3	C
Universitas Musamus Merauke		
Agrobisnis	S-1	B
Agroteknologi	S-1	B
Akuntansi	S-1	B
Arsitektur	S-1	B
Ekonomi Pembangunan	S-1	B
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Hukum	S-1	B
Manajemen	S-1	B
Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	B
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	B
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Pendidikan Fisika	S-1	B
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	B
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	B
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S-1	B
Pendidikan Kimia	S-1	B
Pendidikan Matematika	S-1	B
Pendidikan Profesi Guru	Profesi	C
Peternakan	S-1	B
Sastra Inggris	S-1	B
Sistem Informasi	S-1	B
Teknik Elektro	S-1	B
Teknik Informatik	S-1	B
Teknik Mesin	S-1	B
Teknik Pertanian	S-1	B
Teknik Sipil	S-1	B
Universitas Papua		
Agribisnis	S-1	B
Agroteknologi	S-1	B
Akuntansi	S-1	C
Antropologi	S-1	C
Biologi	S-2	C
Biologi	S-1	B
Budidaya Hutan	D3	C
Budidaya Perikanan	D3	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Budidaya Tanaman Pangan	D3	C
Budidaya Tanaman Perkebunan	D3	C
Budidaya Tanaman Perkebunan	D2	C
Budidaya Ternak	D3	C
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Ekowisata	D3	C
Fisika	S-1	C
Ilmu Kelautan	S-1	B
Ilmu Lingkungan	S-3	C
Ilmu Lingkungan	S-2	C
Ilmu Pertanian	S-2	B
Ilmu Peternakan	S-2	C
Ilmu Tanah	S-1	C
Kehutanan	S-2	C
Kehutanan	S-1	B
Kesehatan Hewan	D3	B
Kimia	S-1	B
Konservasi Sumber Daya Hutan	D3	C
Manajemen	S-1	C
Manajemen Hutan Alam Produksi	D3	C
Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	B
Matematika	S-1	C
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	S-1	C
Pendidikan Bahasa Indonesia	S-1	B
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	C
Pendidikan Biologi	S-1	B
Pendidikan Dokter	S-1	C
Pendidikan Fisika	S-1	B
Pendidikan Kimia	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	B
Pendidikan Sastra Indonesia	S-1	C
Peternakan	S-1	B
Profesi Guru	Profesi	C
Sastra Inggris	S-1	B
Sumber Daya Akuatik	S-2	C
Teknik Elektro	S-1	B
Teknik Geologi	S-1	C
Teknik Geologi Terapan	D3	C
Teknik Informatika	S-1	B
Teknik Komputer	D3	C
Teknik Listrik	D3	C
Teknik Perminyakan dan Gas Bumi	D3	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Teknik Pertambangan	S-1	C
Teknik Pertambangan	D3	C
Teknik Pertanian dan Biosistem	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	C
Teknologi Hasil Pertanian	S-1	B
PERGURUAN TINGGI SWASTA		
Akademi Bahasa Asing Netaiken Wamena		
Bahasa Inggris	D-3	C
Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke, Merauke		
Kebidanan	D-3	C
Akademi Keperawatan R.S. Marthen Indey, Jayapura		
Keperawatan	D-3	B
Akademi Perikanan Kamasan Biak		
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	D-3	C
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan / Pengolahan Hasil Perikanan	D-3	C
Akademi Teknik Biak		
Manajemen Informatika	D-3	C
Teknik Mesin	D-3	C
Teknik Sipil	D-3	C
IISIP Yapis Biak		
Administrasi Perkantoran	D-3	C
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-2	C
Ilmu Administrasi Niaga	S-1	B
Ilmu Komunikasi	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Ilmu Politik	S-1	C
Sosiologi	S-1	B
Politeknik Amamapare		
Teknik Listrik	D-3	C
Teknik Mesin	D-3	C
Teknik Pertambangan	D-3	C
Teknik Sipil	D-3	C
Politeknik Katolik Saint Paul		
Akuntansi Keuangan Publik	D-4	C
Teknik Elektro	D-4	C
Teknik Mesin	D-4	B
Teknik Sipil	D-4	C
Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	S-1	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Politeknik Pertanian Yasanto		
Budidaya Tanaman Pangan	D-3	C
Budidaya Ternak	D-3	C
Sekolah Tinggi Biosains Swadiri Jayapura		
Bio Kewirausahaan	S-1	C
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah		
Administrasi Bisnis	S-1	C
Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik	S-1	B
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma		
Ilmu Administrasi Negara	S-1	C
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak		
Hukum	S-1	B
Hukum	S-2	C
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari		
Ilmu Hukum	S-1	C
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri		
Ilmu Hukum	S-1	B
Ilmu Hukum	S-2	B
STF Fajar Timur Jayapura		
Ilmu Teologi	S-1	B
STFT GKI Izaak Samuel Kijne Jayapura		
Ilmu Teologi	S-1	B
STIE Bukit Zaitun Sorong		
Akuntansi	S-1	B
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Manajemen	S-1	C
Manajemen Keuangan dan Perbankan	D-3	C
Manajemen Perpajakan	D-3	C
STIE Jembatan Bulan		
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Keuangan dan Perbankan	D-3	B
STIE Mah-Eisa		
Akuntansi	D-3	C
Manajemen	S-1	B
STIE Ottow & Geissler Fakfak		
Akuntansi	D-3	C
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Manajemen	S-1	C
STIE Port Numbay Jayapura		
Ekonomi Pembangunan	S-1	B
Keuangan dan Perbankan	D-3	B
Manajemen	S-1	B

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Manajemen	S-2	C
STIE Saint Theresa Merauke		
Akuntansi	S-1	C
Manajemen	S-1	C
STIE Yapis Merauke		
Ekonomi dan Pembangunan	S-1	C
Keuangan dan Perbankan	D-3	C
STIKES Jayapura		
Farmasi	S-1	C
Kebidanan	D-3	C
Keperawatan	S-1	C
Ners	Profesi	C
STIKES Papua		
Analisis Kesehatan	D-3	C
Farmasi	S-1	C
Keperawatan	S-1	B
Kesehatan Masyarakat	S-1	B
Ners	Profesi	B
STIKES Persada Nabire		
Gizi	S-1	C
STIKOM Muhammadiyah Jayapura		
Hubungan Masyarakat	D-3	B
Ilmu Komunikasi	S-1	B
STIPER Petra Baliem Wamena		
Agribisnis	S-1	C
Agroteknologi	S-1	C
STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura		
Agribisnis	S-1	C
Agroteknologi	S-1	C
Budidaya Perairan	S-1	C
Peternakan	S-1	C
STISIP Silas Papare Jayapura		
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Sosiologi	S-1	B
STISIP Yaleka Maro		
Ilmu Administrasi Negara	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	C
STKIP Abdi Wacana Wamena		
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	C
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
STKIP Biak		
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	C
STKIP Hermon Timika		
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	Baik
Pendidikan Jasmani	S-1	Baik
Pendidikan Matematika	S-1	Baik
STKIP Kristen Wamena		
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	C
STKIP Muhammadiyah Manokwari		
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	C
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Pendidikan Biologi	S-1	C
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	C
STKIP PGRI Papua Serui		
Pendidikan Biologi	S-1	C
PGSD	S-1	C
STKIP Terang Bangsa		
PGSD	S-1	C
STMIK Agama Wamena Papua		
Sistem Informasi	S-1	C
Teknik Komputer	S-1	C
STMIK Pesat Nabire		
Informatika	S-1	C
STMIK Sepuluh Nopember Jayapura		
Sistem Informasi	S-1	C
Teknik Informatika	S-1	C
STMIK Umel Mandiri Jayapura		
Ilmu Komputer	S-1	C
Manajemen Informatika	D-3	C
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena		
Administrasi Bisnis	S-1	C
Administrasi Bisnis	D-3	B
Administrasi Publik	S-1	B
Agronomi	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	C
Manajemen Retail	S-1	C
Pengelolaan Sumber Daya Lahan	S-1	C
Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Universitas Kristen Papua		
Manajemen	S-1	C
Pendidikan Agama Kristen	S-1	C
Perikanan	S-1	C
Pertanian	S-1	C
Teknik Mesin	S-1	B
Teologi	S-1	B
Universitas Muhammadiyah Sorong		
Agroteknologi	S-1	B
Ilmu Hukum	S-1	B
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Kehutanan	S-1	C
Manajemen	S-1	C
Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	C
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Pendidikan Matematika	S-1	C
Pengolahan Hasil Perikanan	S-1	B
Sosiologi	S-1	B
Teknik Industri	S-1	C
Teknik Informatika	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	C
Universitas Nani Bili Nusantara		
Agribisnis	S-1	C
Agroteknologi	S-1	C
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	C
Manajemen	S-1	C
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	C
Teknik Elektro	S-1	C
Teknik Informatika	S-1	C
Teknik Mesin	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	C
Universitas Ottow Geissler		
Agribisnis	S-1	C
Agroteknologi / Agroekoteknologi	S-1	B
Akuntansi	S-1	C
Biologi	S-1	C
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Geologi	S-1	B
Kehutanan	S-1	C
Manajemen	S-2	C
Manajemen	S-1	B

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Manajemen Sumber Daya Pesisir	S-1	B
Sistem Informasi	S-1	C
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong		
Agribisnis	S-1	C
Akuakultur	S-1	C
Akuntansi	S-1	C
Farmasi	S-1	C
Hubungan Internasional	S-1	C
Hukum	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	C
Pendidikan Anak Usia Dini	S-1	C
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	B
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Pendidikan Biologi	S-1	B
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	B
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1	C
Pendidikan Jasmani	S-1	B
Pendidikan Matematika	S-1	B
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1	B
Pendidikan Teknologi Informasi	S-1	C
Peternakan	S-1	C
Psikologi	S-1	C
Teknik Kimia	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	C
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura		
Akuntansi	S-1	C
Analisa Kesehatan	D-3	C
Arsitektur	S-1	B
Farmasi	D-3	C
Ilmu Hubungan Internasional	S-1	B
Ilmu Komunikasi	S-1	C
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	C
Sastra Inggris	S-1	C
Sistem Informasi	S-1	C
Teknik Elektro	S-1	B
Teknik Geologi	S-1	C
Teknik Informatika	S-1	C
Teknik Lingkungan	S-1	C
Teknik Mesin	S-1	B
Teknik Pertambangan	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	C

NAMA PERGURUAN/PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT
Universitas Satya Wiyata Mandala		
Agribisnis	S-1	C
Agroteknologi	S-1	C
Budidaya Perairan	S-1	C
Ilmu Administrasi Bisnis	S-1	B
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Manajemen Sumber Daya Perairan	S-1	C
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	C
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1	C
Pendidikan Matematika	S-1	C
Peternakan	S-1	B
Teknik Industri	S-1	C
Teknik Informatika	S-1	C
Universitas Timika		
Agribisnis	S-1	C
Psikologi	S-1	C
Universitas Victory Sorong		
Administrasi Publik	S-1	B
Akuntansi	S-1	B
Ekonomi Pembangunan	S-1	C
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Hukum	S-1	C
Kehutanan	S-1	C
Manajemen	S-1	C
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	B
Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
Peternakan	S-1	C
Sistem Informasi	S-1	C
Universitas Yapis Papua		
Akuntansi	S-1	B
Budidaya Perairan	S-1	B
Hukum	S-2	C
Ilmu Administrasi Negara	S-1	B
Ilmu Hukum	S-1	B
Ilmu Pemerintahan	S-1	B
Manajemen	S-1	B
Manajemen	S-2	B
Pendidikan Agama Islam	S-1	B
PGSD	S-1	C
Sistem Informasi	S-1	C
Teknik Sipil	S-1	B

Studi Kasus Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Kabupaten Merauke

MARTHA BETAUBUN

Abstrak

Papua Selatan, sebagai bagian integral dari Provinsi Papua yang luas dan beragam, memiliki berbagai tantangan dan potensi unik yang perlu ditangani dan dieksplorasi. Wilayah ini—dengan hamparan hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta etnis dan budaya yang beragam—menawarkan peluang dan tantangan tersendiri dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Namun seiring dengan potensi ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur yang kurang memadai, akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta isu-isu konflik sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi prioritas penting dalam dekade terakhir di Papua Selatan. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, sekaligus memastikan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk meninjau perkembangan dan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Kabupaten Merauke, yang ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kata kunci: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Merauke.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, yang terletak pada koordinat 137°-141° BT dan 5°-9° LS. Kabupaten Merauke juga berada dalam posisi strategis; di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, serta di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan laut Arafura. Luas wilayah Kabupaten Merauke adalah 46.791,63 km² sehingga Kabupaten Merauke menjadi daerah dengan luas terbesar di Provinsi Papua.

Tabel 1. Pembagian wilayah di Kabupaten Merauke. Sumber: Kabupaten Merauke dalam Angka 2020 (Olahan).

No.	Distrik	Ibukota Distrik	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan
1.	Kimaam	Kimaam	4.630,3	14
2.	Waan	Waan	2.868,06	9
3.	Tabonji	Tabonji	5.416,84	11
4.	Ilwayab	Wanam	1.999,08	6
5.	Okaba	Okaba	1.560,5	9
6.	Tubang	Yowied	2.781,18	6
7.	Ngguti	Po Epe	3.554,62	6
8.	Kaptel	Kaptel	2.384,05	5
9.	Kurik	Harapan Makmur	977,05	13
10.	Malind	Kaiburse	1.465,6	5
11.	Animha	Wayau	490,6	7
12.	Merauke	Merauke	1.445,63	16
13.	Semangga	Muram Sari	905,86	5
14.	Tanah Miring	Hidup Baru	326,95	10
15.	Jagebob	Kartini	1.516,67	14
16.	Sota	Sota	1.364,96	14
17.	Naukenjerai	Onggaya	2.843,21	5
18.	Muting	Muting	3.501,67	12
19.	Eligobel	Bupul	1.666,23	12
20.	Ulilin	Kumaaf	5.092,57	11
Total			46.791,63	190

wilayah ini merupakan rumah bagi lebih dari 20.000 spesies tanaman, 602 spesies burung, dan 125 spesies mamalia. Keberlanjutan ekosistem ini memainkan peran penting dalam menopang kehidupan manusia, baik secara lokal maupun global, termasuk melalui penyimpanan karbon, penyediaan air bersih, dan pelestarian

keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pembangunan di Papua Selatan harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati ini.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam karya tulis ini adalah untuk melihat perkembangan dan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Kabupaten Merauke, yang ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

1.3. Tujuan

Tujuan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan perkembangan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. Karya ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan perkembangan Kabupaten Merauke ke depan.

2. Kajian Pustaka dan Pembahasan

2.1. Kajian Pustaka

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua, di mana secara geografis terletak antara 137°-141° Bujur Timur dan 5°-9° Lintang Selatan. Dengan luas mencapai 46.791,63 km² atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua, menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik, di mana Distrik Waan merupakan distrik yang terluas, yaitu mencapai 5.416,84 km², sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 km² atau hanya 0,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km². Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan. Secara geografis, Kabupaten Merauke di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafuru. Jika ditinjau menurut kelas ketinggian, Kabupaten Merauke merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kelas ketinggian antara 0-60 m dpl. Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kabupaten Merauke adalah 27,7°C, dengan suhu terendah sebesar 22,1°C yang terjadi pada bulan September dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Desember

sebesar 33,8°C. Kelembapan relatif di Kabupaten Merauke adalah 84%. Kondisi paling lembap terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Desember sebesar 100%. Pada tahun 2021 rata-rata tekanan udara sebesar 1.011,2 mb. Rata-rata kecepatan angin tahun 2021 adalah 4 knot. Secara total, selama tahun 2021 jumlah hari hujan di Kabupaten Merauke adalah 208 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 375,3 mm dengan 26 hari hujan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan 11,8 mm dengan 13 hari hujan.

Kabupaten Merauke sebelumnya merupakan kabupaten induk di Provinsi Papua wilayah selatan. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat kabupaten yang otonom, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Sejak dipecah menjadi 4 kabupaten, Kabupaten Merauke kini memiliki 20 kecamatan dan masih merupakan kabupaten terluas di Indonesia.

Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebanyak 231.696 orang dengan luas yang mencapai hingga 46.791,63 km², sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke sebesar 4,95 orang/km². Tahun 2021 ini laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merauke mencapai 0,44% per tahun. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin pria dan wanita di Kabupaten Merauke sebesar 109,46. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merauke sebanyak 127.177 orang, dengan pengangguran terbuka sebanyak 2.786 orang. Dari angkatan kerja yang ada, hanya 14.850 orang yang berpendidikan sarjana.

Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebanyak 232.357 orang. Dengan luas wilayah yang mencapai 46.791,63 km², berarti kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke sebesar 4,97 orang/km². Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin pria dan wanita di Kabupaten Merauke sebesar 109,10. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merauke sebanyak 114.311 orang, dengan pengangguran terbuka sebanyak 3.015 orang. Dari angkatan kerja yang ada, hanya 13.499 orang yang berpendidikan sarjana. Hal ini tentu sangat memberikan dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

Kabupaten Merauke adalah penghasil tanaman padi terbesar di Provinsi Papua. Pada tahun 2022 luas panen padi sebesar 54.612,25 (ha), dengan produksi padi 219.044,44 (ton) dan produktivitas padi 4,01 ton/ha. Pada tahun 2022 tanaman sayuran semusim dengan luas panen terbesar adalah cabai rawit, yaitu sebesar

159 (ha), disusul tomat dengan luas panen 53 (ha). Pada tahun 2022 tanaman perkebunan yang banyak dihasilkan di Kabupaten Merauke adalah tanaman kelapa sawit, dengan produksi sebesar 170.461.419,08 ton dan luas tanam seluas 87.860,96 ha. Kecamatan Ulilin merupakan kecamatan dengan luas tanam kelapa sawit terluas, yaitu sebesar 53.133,02 ha.

Pada tahun 2022 jumlah hewan ternak di Kabupaten Merauke mencapai 76.165 ekor. Jumlah ini didominasi oleh sapi potong sebesar 57%. Selain ternak, di Kabupaten Merauke juga terdapat populasi unggas yang mencapai 2.893.560 ekor, dengan dominasi ayam kampung, sebanyak 2.076.619 ekor.

Pada tahun 2021, perindustrian untuk usaha kecil dan menengah di Kabupaten Merauke sebanyak 1.047 unit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar unit usaha di Kabupaten Merauke adalah industri kecil nonformal, yaitu sebanyak 599 unit usaha. Meskipun demikian, industri kecil formal menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan industri kecil nonformal. Industri kecil formal, industri nonformal, dan industri menengah sebagian besar merupakan industri agro dan hasil kehutanan.

Sementara itu, untuk sektor perdagangan pada tahun 2018 di Kabupaten Merauke jumlah sarana perdagangan ada 1.789, yang terdiri atas 18 pasar, 259 toko, 1.309 kios, dan 203 warung. Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Merauke mencatat, pada tahun 2018 jumlah beras yang disalurkan sebanyak 23.136.168 ton. Penyaluran terbesar adalah untuk raskin, yaitu sebanyak 9.686.670 ton. Pada tahun 2018 ada 153 koperasi di Kabupaten Merauke, yang terdiri atas KUD, KPN, KOPKAR, KOPWAN, KSU, KOPERMAS, dan koperasi lainnya.

2.2. Pembahasan

2.2.1. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Merauke dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan lain-lain. Berikut beberapa data yang dapat menggambarkan perkembangan pendidikan di Kabupaten Merauke.

- a. Jumlah Sekolah: menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, jumlah sekolah di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 1.006. Jumlah ini terdiri atas 638 sekolah dasar, 204 sekolah menengah pertama, 109 sekolah menengah atas, 35 sekolah menengah kejuruan, dan 12 perguruan tinggi yang meliputi 1 perguruan tinggi negeri dan 11 perguruan tinggi swasta.

- b. Jumlah Siswa: menurut data BPS Kabupaten Merauke, jumlah siswa di kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 95.487. Jumlah ini terdiri dari 51.813 siswa sekolah dasar, 21.049 siswa sekolah menengah pertama, 13.303 siswa sekolah menengah atas, 5.694 siswa sekolah menengah kejuruan, dan 3.628 mahasiswa perguruan tinggi.
- c. Jumlah Guru: jumlah guru di kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 5.494. Jumlah ini terdiri dari 3.331 guru sekolah dasar, 1.040 guru sekolah menengah pertama, 637 guru sekolah menengah atas, 261 guru sekolah menengah kejuruan, dan 225 dosen perguruan tinggi.
- d. Angka Partisipasi Sekolah: Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, angka partisipasi sekolah di kabupaten Merauke pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
 - Angka Partisipasi Murni (APM): Persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
 - » APM sekolah dasar: 97,32%
 - » APM sekolah menengah pertama: 83,67%
 - » APM sekolah menengah atas: 64,10%
 - Angka Partisipasi Kasar (APK): Persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.
 - » APK sekolah dasar: 101,95%
 - » APK sekolah menengah pertama: 91,66%
 - » APK sekolah menengah atas: 72,75%
- e. Angka Melek Huruf: Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, angka melek huruf di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 93,22%. Angka ini menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Merauke Berdasarkan Jenis Kelamin.

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki & Perempuan
7-12	97,04	94,48	95,76
13-15	95,16	99,02	97,23
16-18	78,76	84,54	81,75

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2021.

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke.

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki & Perempuan
SD	94,22	91,02	92,62
SMP	60,38	81,19	71,56
SMA	67,30	65,65	66,45

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2021

Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke.

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki & Perempuan
SD	118,93	109,81	114,37
SMP	96,58	103,54	100,32
SMA	122,18	107,53	114,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2021.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Merauke cukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, masih ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu ditangani, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru, pemerataan dan aksesibilitas pendidikan, dan lain-lain.

Peningkatan pendidikan di Kabupaten Merauke adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat,

dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan di Kabupaten Merauke perlu ditingkatkan.

- a. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman, seperti globalisasi, revolusi industri 5.0, perubahan iklim, dan lain-lain. Pendidikan juga dapat membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan cinta tanah air.
- b. Pendidikan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan. Pendidikan juga dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah.
- c. Pendidikan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah, baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan hidup, budaya lokal, dan keamanan nasional.
- d. Pendidikan dapat meningkatkan kerja sama dan integrasi antara masyarakat Merauke dengan masyarakat lain di Indonesia maupun di luar negeri. Pendidikan juga dapat meningkatkan citra dan prestasi Merauke di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, peningkatan pendidikan di Kabupaten Merauke memerlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, swasta maupun masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke.
- b. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui peningkatan kompetensi, insentif, fasilitas, dan perlindungan.
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan, melalui bantuan biaya pendidikan, beasiswa, program inklusi, dan teknologi informasi.

- d. Meningkatkan relevansi dan mutu kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai budaya lokal.
- e. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lain-lain.

Pendidikan di Papua Selatan adalah topik yang penting dan mendesak. Meski memiliki potensi yang besar, tantangan pendidikan di wilayah ini cukup berat dan membutuhkan penanganan khusus (UNICEF, 2023). Berdasarkan data dari BPS (2023), angka partisipasi pendidikan di Papua Selatan masih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan antara lain keterbatasan akses ke sekolah, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan kendala finansial. Selain itu, konteks geografis Papua Selatan yang unik, dengan dataran tinggi yang sulit dijangkau dan komunitas terpencil, mempersulit penyediaan dan akses pendidikan yang merata.

Pendidikan berkualitas di Papua Selatan penting, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan (Suryadarma, 2023). Pendidikan dapat membantu masyarakat lokal untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan berpartisipasi secara aktif dan informatif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan di Papua Selatan harus difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dengan konteks lokal. Strategi ini harus mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan dan peningkatan sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Selain itu, strategi ini juga harus mencakup peningkatan kualitas kurikulum dan metode pengajaran, dengan memasukkan pengetahuan dan praktik lokal dalam kurikulum dan metode pengajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

Implementasi strategi pembangunan pendidikan di Papua Selatan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan pendidikan, serta dalam membuat dan menegakkan regulasi yang mendorong pendidikan berkualitas. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting, terutama dalam mendukung pendidikan dan memastikan rele-

vansi pendidikan dengan konteks lokal. Sementara itu, sektor swasta juga memiliki peran penting, terutama dalam investasi dan inovasi untuk pendidikan.

Pendidikan di Papua Selatan, sebuah wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan sumber daya alam, menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama terkait masalah aksesibilitas. Banyak komunitas di Papua Selatan yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau sehingga membatasi akses mereka ke fasilitas pendidikan. Selain itu, banyak anak di Papua Selatan yang harus berjalan jauh dan bahkan menempuh perjalanan yang berbahaya untuk bisa mencapai sekolah. Hal ini menjadi penghalang serius bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pendidikan (BPS, 2023).

Selain akses, kualitas pendidikan di Papua Selatan juga menjadi tantangan. Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dan kurangnya bahan ajar berkualitas mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Metode pengajaran yang sering kali tidak mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal juga menjadi isu. Pendidikan harus berarti bagi anak-anak dan masyarakat lokal dan harus dapat menjangkau mereka dalam cara yang paling efektif. Maka, sangat penting bagi kurikulum untuk mempertimbangkan pengetahuan dan praktik lokal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

Masalah diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi tantangan serius dalam pendidikan di Papua Selatan. Isu ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada akses dan partisipasi dalam pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan adil harus menjadi prioritas, dan ini memerlukan penegakan hukum yang kuat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (UNICEF, 2023).

Di sisi lain, Papua Selatan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pendidikan. Keberagaman budaya dan pengetahuan tradisional yang ada di Papua Selatan dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum dan pendekatan pengajaran. Ini bisa menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan menarik bagi anak-anak di Papua Selatan, dan juga bisa membantu mempertahankan dan melestarikan budaya serta pengetahuan lokal.

Selain itu, dengan pendidikan berkualitas, masyarakat lokal dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah di Papua Selatan secara berkelanjutan, dan bisa menjadi bagian dari solusi untuk tantangan pembangunan dan lingkungan. Misalnya, pendidikan bisa membantu masyarakat lokal untuk mengembangkan industri berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal atau untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi mendukung kehidupan mereka (Suryadarma, 2023).

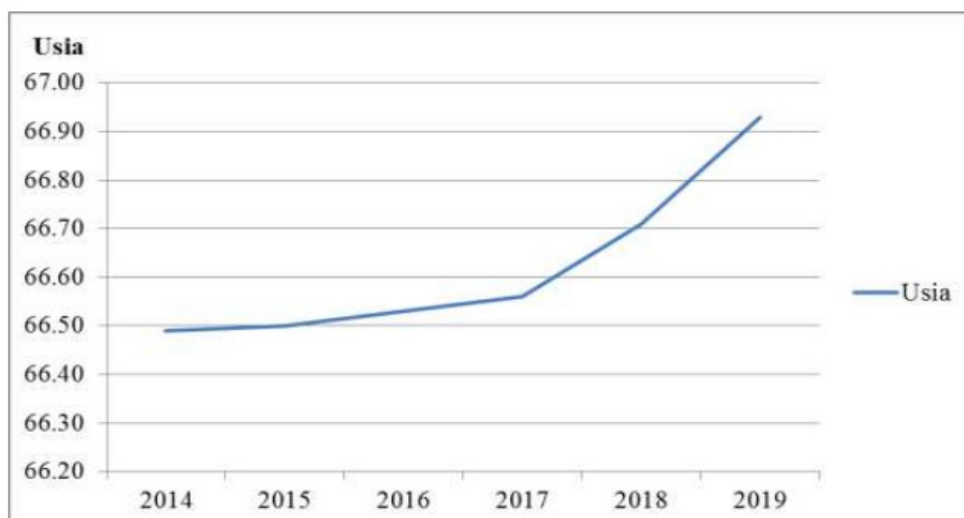
Jadi, meski tantangannya besar, potensi untuk pembangunan pendidikan di Papua Selatan juga sangat besar. Dengan pendekatan yang tepat, komitmen yang kuat, dan kerja sama antara berbagai pihak pembangunan pendidikan di Papua Selatan bisa menjadi katalis untuk perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan.

2.2.2. Kesehatan

Bidang kesehatan di Kabupaten Merauke adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, beberapa indikator kesehatan di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- a. Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan: 23,53%.
- b. Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan: 86,67%.
- c. Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap: 75,00%.
- d. Persentase penduduk yang mengobati sendiri keluhan kesehatannya: 28,57%.
- e. Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional: 15,38%.
- f. Persentase penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan modern: 64,29%.

Pada tahun 2021, tercatat ada 6 buah rumah sakit, 9 poliklinik, 26 puskesmas, 125 puskesmas pembantu, dan 12 apotek. Sementara tenaga kesehatan sebanyak



Gambar 1. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Merauke tahun 2014 s.d. 2019. (Sumber: BPS Merauke, 2020.)

38 orang dokter, 299 orang perawat, 270 orang bidan, 26 orang farmasi, dan 29 orang ahli gizi. Tahun 2021 di Kabupaten Merauke tercatat ada sebanyak 33 Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan 341 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Merauke sebesar 66,93, yang berarti, sebagai perkiraan, batas umur yang dapat dicapai oleh seseorang adalah 66,93 tahun. Angka harapan hidup tahun 2014 s.d. 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 5. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Merauke pada tahun 2018.

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Rumah Sakit	4
2.	Rumah Bersalin	0
3.	Puskesmas Umum	25
4.	Posyandu	246
5.	Klinik/ Balai Kesehatan	14
6.	Polindes	0

Sumber: BPS Merauke, 2020

Tingkat kesehatan di Kabupaten Merauke dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti angka kematian, angka harapan hidup, angka kesakitan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa data yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan di Kabupaten Merauke.

- a. Angka Kematian Bayi (AKB): Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, AKB di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 19,23 per 1.000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa ada sekitar 19 bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun, dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup. AKB di Kabupaten Merauke lebih rendah daripada rata-rata nasional, yang pada tahun 2019 adalah 23,3 per 1.000 kelahiran hidup.
- b. Angka Harapan Hidup (AHH): Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, AHH di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 69,08 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Merauke dapat hidup hingga usia 69 tahun. AHH di Kabupaten Merauke lebih tinggi daripada rata-rata nasional, yang pada tahun 2019 adalah 67,8 tahun.

- c. Angka Kesakitan: Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, angka kesakitan di Kabupaten Merauke pada tahun 2020 adalah 1.206 per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa ada sekitar 1.206 orang yang menderita penyakit dari setiap 100.000 penduduk. Angka kesakitan di Kabupaten Merauke lebih rendah daripada rata-rata nasional, yang pada tahun 2019 adalah 1.413 per 100.000 penduduk.

Dari data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Merauke cukup baik dan lebih baik daripada rata-rata nasional. Namun, masih ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu ditangani, seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi dan sanitasi, dan lain-lain.

Peningkatan kesehatan di Kabupaten Merauke adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesehatan di Kabupaten Merauke perlu ditingkatkan.

- a. Kesehatan dapat mencegah dan mengatasi berbagai penyakit yang dapat mengancam jiwa, seperti malaria, tuberkulosis, diare, dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini dapat menurunkan produktivitas, pendapatan, dan harapan hidup masyarakat. Kesehatan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas yang dibutuhkan untuk melawan berbagai penyakit.
- b. Kesehatan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Pendidikan juga dapat membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan cinta tanah air.
- c. Kesehatan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah, baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kesehatan juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan hidup, budaya lokal, dan keamanan nasional.
- d. Kesehatan dapat meningkatkan kerja sama dan integrasi antara masyarakat Merauke dengan masyarakat lain di Indonesia maupun di luar

negeri. Kesehatan juga dapat meningkatkan citra dan prestasi Merauke di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, peningkatan kesehatan di Kabupaten Merauke memerlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga kesehatan maupun non-kesehatan, swasta maupun masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, serta pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke.
- b. Meningkatkan cakupan dan mutu imunisasi serta pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular.
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan promosi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat melalui media massa, sosial media, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

2.2.3. Ekonomi

Peningkatan perekonomian di Kabupaten Merauke adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena perekonomian merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bidang ekonomi di Kabupaten Merauke perlu ditingkatkan.

- a. Ekonomi dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan konsumsi. Pendapatan per kapita penduduk kabupaten Merauke mencapai Rp63 juta pada tahun 2019. Angka ini masih lebih rendah daripada rata-rata nasional yang mencapai Rp66 juta pada tahun yang sama.
- b. Ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan dan diversifikasi sektor-sektor produktif, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Merauke, dengan kontribusi sebesar 38,94% pada tahun 2019, namun masih memiliki potensi yang belum tergali, seperti perkebunan kelapa sawit, kakao, dan karet. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata juga memiliki peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal yang kaya.
- c. Ekonomi dapat meningkatkan investasi dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Investasi merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

- d. Ekonomi dapat meningkatkan keseimbangan dan kesetaraan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang luas dan beragam, dengan tingkat pembangunan yang berbeda-beda. Peningkatan ekonomi dapat mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Merauke diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan terpadu dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga ekonomi maupun non-ekonomi, swasta maupun masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke, seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan insentif.
- c. Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa yang sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.
- d. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk dan jasa daerah melalui media massa, sosial media, pameran, festival, dan lain-lain.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu waktu di wilayah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Merauke menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2021, nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Merauke sebesar 16,731 miliar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Merauke pada tahun 2021 mencapai 10,424 miliar rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Merauke naik sebesar 2,02%.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi serta pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Merauke mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Merauke sebesar Rp10.355.150,5 juta dan PDRB ADHK Kabupaten Merauke sebesar Rp7.662.490,8 juta. Jumlah ini meningkat setiap tahun dengan tren kenaikan yang sangat baik. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa PDRB ADHB sebesar Rp16.009.245,7 juta dan PDRB ADHK mencapai Rp10.309.399,3 juta.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada masa atau periode yang lalu. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan yang dicerminkan merupakan pertumbuhan riil barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Perkembangan ekonomi dapat pula diamati dari sisi atas dasar berlaku dan konstan. Yang membedakan antara keduanya adalah perkembangan tidak riil dan perkembangan riil. Dikatakan perkembangan tidak riil, karena di dalamnya masih terdapat unsur perubahan harga, sedangkan dalam perkembangan riil unsur perkembangan harga telah dikeluarkan. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Merauke pada tahun

2019 sebesar 7,57%. Angka ini sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 8,11%. Pada tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 12,85% disusul lapangan informasi dan komunikasi sebesar 12,39% yang mempunyai pertumbuhan tertinggi kedua. Di posisi pertumbuhan tertinggi ketiga dicapai oleh lapangan penyediaan akomodasi dan makan minum dengan angka pertumbuhan sebesar 10,16%, sedangkan posisi pertumbuhan terkecil pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan capaian sebesar 1,05%.

Di Kabupaten Merauke, setiap tahun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat pada distribusi PDRB, di mana sektor pertanian memiliki persentase yang paling tinggi. Sampai dengan tahun 2019, sektor ini telah menyumbang sebesar Rp2.623.649,1 juta dari seluruh nilai PDRB atas harga konstan (ADHK) Kabupaten Merauke. Meskipun demikian, persentase distribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Merauke sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung tidak stabil bahkan lebih rendah dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2016 distribusi sektor pertanian mencapai 3,39%, kemudian mengalami tren turun dan naik selama empat tahun hingga pada tahun 2019 menjadi 4,5%.

Terdapat dua sektor yang memiliki tren pertumbuhan positif dalam empat tahun terakhir, dengan nilai distribusi di atas 10%, yakni sektor konstruksi dan sektor informasi serta komunikasi.

Sesuai dengan data distribusi PDRB Kabupaten Merauke, dapat dilihat beberapa sektor apakah tergolong sebagai sektor primer, sekunder, atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang paling berkembang di Merauke yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor sekunder adalah sektor yang kurang berkembang di Kabupaten Merauke, yaitu pengadaan listrik dan gas. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor sekunder yang relatif kecil bagi PDRB Kabupaten Merauke. Sektor tersier adalah sektor yang sekarang ini sedang berkembang di Kabupaten Merauke.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Proporsi pengeluaran makanan 47,69% dan pengeluaran bukan makanan 52,31%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Merauke

mengikuti pola konsumsi perkotaan, di mana pengeluaran bukan makanan lebih besar daripada pengeluaran makanan.

Pada tahun 2022, nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Merauke sebesar 17,326 miliar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 mencapai 10,838 miliar rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Merauke naik sebesar 4,58%.

2.2.4 Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Merauke

Papua Selatan memiliki sejarah dan geografi yang unik. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai suku dan budaya, dengan beragam tradisi dan pengetahuan lokal yang mendalam tentang lingkungan sekitar (Rumbewas, 2020). Potensi alam yang melimpah, termasuk sumber daya hutan dan mineral memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, telah muncul tantangan baru, seperti deforestasi dan konflik sosial (Indrayanti, 2021). Pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan di Papua Selatan, bukan hanya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mempromosikan keadilan sosial (*World Commission on Environment and Development*, 1987). Menyadari akan hal ini, berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (Kementerian PUPR, 2022; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Ditinjau dari segi hak asasi manusia, yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan di Papua Selatan ialah penduduk Papua Selatan terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis yang memiliki tradisi dan budaya yang beragam. Namun, beberapa laporan dari *Human Rights Watch* (2022) menunjukkan bahwa masyarakat ini sering kali menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah ini harus mempertimbangkan hak asasi dan keadilan sosial. Pembangunan yang inklusif dan adil dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari segi potensi Papua Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan kehutanan. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2023), wilayah ini memiliki cadangan mineral yang signifikan, termasuk emas, tembaga, dan nikel. Selain itu,

hutan Papua Selatan juga menjadi sumber kayu dan produk hutan non-kayu. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah ini harus mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, untuk mencegah eksploitasi dan kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, menurut data dari Badan Pusat Statistik (2023), akses masyarakat Papua Selatan terhadap infrastruktur dan layanan publik, seperti jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih terbatas. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik dan merata merupakan syarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah ini harus memprioritaskan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Tak hanya itu, Papua Selatan juga menghadapi beberapa isu politik dan keamanan, termasuk konflik antara kelompok separatis dan pemerintah, serta antara masyarakat lokal dan perusahaan pengelola sumber daya alam. Menurut laporan *International Crisis Group* (2023), konflik ini dapat mempengaruhi stabilitas dan perkembangan pembangunan di wilayah ini. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah ini harus mempertimbangkan penyelesaian isu-isu politik dan keamanan secara damai dan adil.

Pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan adalah sebuah isu penting dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam melaksanakan pembangunan ini, strategi dan implementasinya harus mempertimbangkan berbagai faktor yang unik dalam konteks lokal Papua Selatan, termasuk kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan tantangan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Wilayah Papua Selatan dikenal dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. Menurut WWF (2023), wilayah ini memiliki lebih dari 20.000 spesies tanaman, 602 spesies burung, dan 125 spesies mamalia. Selain itu, masyarakat Papua Selatan juga memiliki tradisi dan budaya yang beragam dan kaya, termasuk pengetahuan dan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam (Waris, 2023). Namun, masyarakat Papua Selatan juga menghadapi tantangan sosio-ekonomi yang signifikan. Menurut data BPS (2023), sebagian besar masyarakat Papua Selatan hidup dalam kemiskinan dan akses mereka terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan, masih sangat terbatas. Selain itu, masyarakat Papua Selatan juga sering kali menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam (HRW, 2023). Maka itu, strategi pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan harus didesain dengan mempertimbangkan kekayaan dan tantangan ini. Strategi

ini harus mempromosikan pembangunan yang inklusif dan adil, yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Strategi ini juga harus mempromosikan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk mencegah dan menangani diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan pembangunan berkelanjutan disebut juga *Sustainability Development Goals* (SDGs). Pembangunan berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan yang dicapai dalam program SDGs adalah sebagai berikut.

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- j. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
- k. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan

- penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- p. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
 - q. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dalam implementasinya, strategi pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, serta dalam membuat dan menegakkan regulasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan adil. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta dalam memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan benar-benar menguntungkan mereka. Sementara itu, sektor swasta juga memiliki peran penting, terutama dalam investasi dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Namun, implementasi strategi pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan juga menghadapi tantangan. Misalnya, konflik lahan sering kali terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan yang melakukan kegiatan ekstraktif, seperti pertambangan dan kehutanan. Selain itu, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia juga sering kali menjadi isu dalam konteks pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan, untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta.
- Human Rights Watch. 2022. *Laporan Hak Asasi Manusia di Papua Selatan 2022*. New York: HRW.
- Indrayanti, A. 2021. *Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Papua Selatan*. Jakarta: UI Press.

- International Crisis Group. 2023. *Konflik dan Pembangunan di Papua Selatan*. Brussels: ICG.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2023. *Potensi Sumber Daya Mineral di Papua Selatan*. Jakarta: ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Strategi Konservasi Lingkungan di Papua Selatan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. *Peningkatan Akses Pendidikan di Papua Selatan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. *Pembangunan Infrastruktur di Papua Selatan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Rumbewas, I. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan di Papua: Sebuah Analisis*. Papua: Universitas Cenderawasih.
- Suryadarma, D. 2023. *Pendidikan dan Pembangunan di Papua Selatan*. Jakarta: UI Press.
- UNICEF. 2023. *Situasi Anak dan Pendidikan di Papua Selatan*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- World Wildlife Fund. 2022. *Keanekaragaman Hayati Papua Selatan*. Washington D.C.: WWF.
- World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat

AGUS SUMULE

Latar Belakang

Pada tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Peristiwa itu menandai dimulainya babak baru perjalanan pemerintahan di Tanah Papua. Tanah Papua menjadi suatu daerah dengan status otonomi khusus. Salah satu alasan mengapa status ini diberikan adalah karena, seperti yang termuat dalam salah satu konsideran undang-undang tersebut, "... penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ... selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, ... khususnya masyarakat Papua". Itu sebabnya, pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat, identik dengan melakukan pemihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Semakin sejahtera OAP, maka semakin berhasil otonomi khusus dilaksanakan di Tanah Papua.

Salah satu aspek kesejahteraan manusia, termasuk kesejahteraan OAP, adalah kesehatan. Di dalam UU 21/2001 tentang Otsus Papua, terdapat dua pasal, yaitu pasal 59 dan pasal 60, yang secara spesifik memberikan pedoman tentang bagaimana pembangunan kesehatan seyogianya dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang memiliki status daerah otonomi khusus. Kedua pasal ini, apabila difokuskan pada OAP, yang merupakan alasan utama mengapa status otonomi khusus diberikan oleh negara kepada Tanah Papua, dapat dibaca sebagai berikut:

PASAL 59

1. Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi OAP.

2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup OAP.
3. Setiap OAP berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban OAP serendah-rendahnya.
4. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
5. Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban OAP serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan keikutsertaan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

PASAL 60

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi OAP, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Di dalam konteks UU Otsus Papua, pembangunan kesehatan OAP tidak semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia setempat. Lebih dari itu, pembangunan kesehatan adalah bagian dari "... langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua ..." sebagaimana tercantum dalam bagian Umum dari Penjelasan UU 21 Tahun 2001. Artinya, apabila pelayanan kesehatan bagi OAP dilakukan dengan baik dan berkesinambungan, serta menjangkau seluruh OAP di mana pun mereka bermukim di Tanah Papua, pembangunan sektor kesehatan di Tanah Papua sudah ikut memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah yang selama ini mempengaruhi hubungan Papua dan pemerintah pusat.

Argumen seperti yang dikemukakan dalam bagian Umum dari Penjelasan UU Otsus Papua di atas sesungguhnya juga digunakan oleh banyak negara di dunia yang menghadapi persoalan separatisme politik. Misalnya, Kpessa, Beland, dan

Lecours (2011)¹ menemukan bahwa ada hubungan erat antara *nation building* (mengkonstruksi identitas nasional dengan menggunakan kekuatan dan wibawa negara) dengan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial pasca-kemerdekaan di berbagai negara di wilayah sub-Sahara Afrika. Kebijakan sosial yang dimaksud di antaranya adalah pembangunan kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Program-program pembangunan ini sengaja dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional yang melewati batas-batas etnis yang sering menjadi sumber konflik di dalam negara-negara itu. Dan, ketika pada tahun 1980-an, negara-negara di wilayah sub-Sahara Afrika itu gagal mempertahankan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi semua penduduk, integrasi dan solidaritas nasional negara-negara itu runtuh dengan cepat. Itu sebabnya mereka berkesimpulan bahwa "... politik penghematan di dalam pembangunan kesejahteraan (rakyat) tidak hanya mengurangi manfaat dan meningkatkan ketidaksetaraan; (tetapi) hal itu juga berpotensi melemahkan persatuan nasional" (hal. 2115).

Itulah sebabnya, keputusan Gubernur Papua Barat untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan kesehatan adalah keputusan penting yang memberikan makna positif yang besar bagi integritas NKRI di Provinsi Papua Barat. Tantangannya adalah bagaimana pembangunan kesehatan itu mampu menjangkau seluruh OAP di mana pun mereka berada di Provinsi Papua Barat, dan bukan membuat semakin lebarnya tingkat kesejahteraan antara OAP dan penduduk Papua Barat lainnya?

Kondisi Kesehatan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat

Penelitian yang secara khusus dilakukan untuk mendalami kondisi kesehatan OAP di Provinsi Papua Barat, atau Tanah Papua secara keseluruhan, dan membandingkannya dengan penduduk non-OAP/migran belum pernah dilakukan selama ini. Walaupun begitu, terdapat sejumlah penelitian ilmiah yang memberikan indikasi bahwa kondisi kesehatan OAP sesungguhnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat migran. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini:

1 M. Kpessa, D. Beland, dan A. Lecours (2011), "Nationalism, Development, and Social Policy: The Politics of Nation-Building in Sub-Saharan Africa", *Ethnic and Racial Studies*, 34 (12), pp. 2115-2133. <https://doi.org/10.1080/01419870.2011.574717>.

- a. Triratnawati (2017)² menemukan bahwa Distrik Sumuri, Papua Barat, merupakan distrik yang memiliki angka kematian ibu dan bayi yang tinggi walaupun di distrik itu terdapat pelayanan kesehatan gratis yang bisa diakses oleh seluruh penduduk. Apabila hal ini diletakkan dalam konteks Kabupaten Teluk Bintuni yang adalah salah satu kabupaten dengan angka migrasi masuk yang tinggi, dan yang memiliki pelayanan kesehatan yang baik terhadap penduduknya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan bayi OAP di kabupaten ini lebih rendah dibandingkan ibu dan bayi penduduk non-OAP.
- b. Rees, van de Pas, Silove, dan Kareth (2008)³ mengemukakan sejumlah data kesehatan yang mereka kumpulkan di kabupaten-kabupaten yang dominan OAP di Provinsi Papua. Dalam banyak hal, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok mengenai situasi di kabupaten-kabupaten Provinsi Papua ini dengan kabupaten yang serupa di Provinsi Papua Barat. Mereka melaporkan bahwa LSM internasional “Médécins du Monde” menemukan tingkat kematian bayi OAP mencapai 85-150 per 1.000 kelahiran. Penyebab yang paling umum adalah penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, khususnya pneumonia dan diare. Tingkat morbiditas anak-anak OAP terutama disebabkan oleh malaria, ISPA, dan disentri. Mereka juga menemukan bahwa tingkat kematian ibu OAP lebih tinggi tiga kali dibandingkan bagian Indonesia lainnya, yang mencapai 500-1.000 kematian per 100.000 persalinan. Penyebab utamanya adalah perdarahan sesudah melahirkan (postpartum haemorrhage) yang seharusnya bisa ditangani apabila di kampung tempat mereka bermukim tersedia bidan dan obat.
- c. Surat kabar Radar Sorong⁴, dengan mengutip pernyataan Gubernur Papua Barat, melaporkan bahwa per Juni 2016 terdapat 6.947 kasus HIV dan AIDS di Provinsi Papua Barat — 838 orang di antaranya telah

2 A. Triratnawati (2017), “Dominasi Medis Modern Atas Medis Tradisional Suku Sumuri, Teluk Bintuni, Papua Barat”, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30 (2), pp. 174-187. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/download/3401/3173>.

3 Susan J. Rees, Remco van de Pas, Derrick Silove, Moses Kareth (2008), “Health and Human Security in West Papua”, *Medical Journal of Australia*, 189 (11), pp 641-643. <https://www.mja.com.au/journal/2008/189/11/health-and-human-security-west-papua>.

4 *Radar Sorong* (11 Agustus 2017). “Papua Barat Daerah Epidemi HIV-AIDS: Tercatat Sebanyak 6.497 Kasus HIV-Aids di Papua Barat, 838 Penderita Meninggal.” <http://www.radarsorong.com/read/2017/08/11/52892/Papua-Barat-Daerah-Epidemi-HIV-Aids>.

meninggal dunia. Jumlah OAP yang terinfeksi HIV dan AIDS 3,6 kali lebih tinggi dari non-OAP di Provinsi Papua Barat.

- d. Anderson (2014)⁵ memberikan catatan berikut ini mengenai tingkat kesehatan OAP di kawasan pegunungan Provinsi Papua: "... Akses ke pelayanan kesehatan adalah cerita orang kota. ... Di banyak daerah pedesaan tidak ada pelayanan kesehatan sama sekali. ... Topografi yang bergunung-gunung selalu digunakan sebagai alasan terbatasnya pelayanan kesehatan. ... Bank Dunia, melalui Program Analisis Kemiskinan, pada tahun 2006 menemukan bahwa rata-rata keluarga Papua bermukim 32 kilometer dari fasilitas kesehatan terdekat, sementara di Jawa, jarak dimaksud hanya empat kilometer". Anderson juga menyatakan bahwa pemekaran kabupaten tidak selalu berarti tersedianya pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi OAP. Pemerintahan kabupaten induk cenderung enggan memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat yang sekarang masuk ke dalam kabupaten pemekaran, sementara di kabupaten pemekaran, pelayanan kesehatan masih jauh dari memadai.
- e. Dalam batas tertentu, kita juga bisa mendeduksi pengalaman indigenous peoples di negara-negara lain untuk mengestimasi situasi kesehatan OAP. Wong, Allotey, dan Reidpath (2014)⁶ melaporkan situasi kesehatan indigenous peoples pada umumnya di beberapa tempat di dunia sebagai berikut: Kematian bayi di kalangan orang asli Australia tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk non-asli, sementara di Selandia Baru 1,5 kali lebih tinggi. Pola yang sama berulang di negara-negara Amerika Utara sampai ke Amerika Latin. Secara proporsi, lebih banyak indigenous peoples yang menderita penyakit malaria, TB, HIV/AIDS, cardiovascular, respiratory, dan diabetes dibandingkan dengan mereka yang non-indigenous peoples. Selain itu, indigenous people masih terus mengalami kekurangan gizi. Di Australia, bayi yang dilahirkan dengan berat kurang oleh ibu-ibu Aborigin mencapai 12,4% — lebih tinggi sekitar dua kali lipat dibandingkan penduduk non-Aborigin.

5 B. Anderson (2014), "Dying for Nothing", *Inside Indonesia*. Januari - Maret. <http://www.insideindonesia.org/dying-for-nothing>.

6 Y.S. Wong, P. Allotey, dan D.D. Reidpath (2014), "Health Care as Commons: An Indigenous Approach to Universal Health Coverage", *The International Indigenous Policy Journal*, 5 (3). <https://pdfs.semanticscholar.org/feec/210c6163fb5f3e2cb0ec9b7f407ca063ee59.pdf>.

Namun, masih ada situasi lain yang perlu diteliti lebih jauh di Provinsi Papua Barat: apakah, ketika OAP memiliki akses yang sama dengan penduduk non-OAP, mereka juga akan memperoleh pelayanan kesehatan yang sama kualitasnya? Pengalaman di Australia menunjukkan bahwa walaupun sistem pelayanan kesehatan Australia termasuk yang terbaik di dunia, dan orang-orang asli Australia (Aboriginals) memiliki akses yang sama dengan penduduk lainnya, namun dalam kenyataannya hanya sedikit yang benar-benar menikmati pelayanan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah sikap rasis yang sering ditujukan kepada mereka oleh penyedia jasa kesehatan (Australian Institute of Health and Welfare, 2011)⁷.

Mengapa Perlu Memberikan Perhatian Khusus pada Pembangunan Kesehatan OAP

Sejak Desember 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, bekerja sama dengan KOMPAK, telah memulai upaya untuk menyusun Raperdasi (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi) Papua Barat tentang Pembangunan Kesehatan. Rancangan itu kemudian dikonsultasikan kepada para pejabat dan praktisi kesehatan serta tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Kegiatan konsultasi publik itu dipusatkan di Manokwari (10 April 2018) dan Sorong (13 April 2018).

Berbagai apresiasi dan masukan/saran diberikan oleh peserta konsultasi publik tersebut. Salah satu saran yang menonjol adalah agar Raperdasi yang disusun itu harus benar-benar mengakomodir kepentingan seluruh OAP. Ada desakan yang kuat agar pada waktu mendatang pelayanan kesehatan bagi OAP harus meningkat secara signifikan — dan hal itu harus tampak dalam regulasi yang sementara disusun tersebut. Alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya desakan tersebut di antaranya adalah:

- a. Akses yang (sangat) terbatas. Umumnya OAP bermukim di daerah pedesaan — bahkan tidak jarang mereka hidup di daerah-daerah terpencil yang terpencar. Di sisi lain, kebanyakan fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan baik dibangun dan terletak di daerah-daerah perkotaan, pedesaan eks permukiman transmigrasi, atau ibukota-ibukota distrik yang lama. Sebagai akibatnya, kebanyakan OAP yang bermukim di daerah terpencil dan terpencar itu tidak memiliki akses atas pelayanan kesehatan yang sama baiknya dengan non-OAP.

⁷ Australian Institute of Health and Welfare (2011), "Access to Health Services for Aboriginal and Torres Strait Islander People", Canberra. <https://www.aihw.gov.au/getmedia/196cb4a7-969b-45cc-8b87-0f75ac837342/12263.pdf.aspx?inline=true>.

- b. Kurang mampu membayar jasa pelayanan kesehatan. Umumnya OAP adalah masyarakat miskin dan oleh karenanya kurang mampu untuk membayar jasa kesehatan. Tampaknya yang dimaksud adalah kekurangmampuan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak partikelir/swasta, atau ketika mereka harus membeli obat di apotek swasta.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah, khususnya di perkotaan, yang kurang berpihak kepada OAP. Bagi kebanyakan anggota masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk yang didahului dengan perbaikan fasilitas kesehatan, pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, seharusnya yang diprioritaskan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah adalah OAP, dan/atau fasilitas kesehatan dengan pelayan yang bermutu seharusnya dibangun di kawasan-kawasan yang penduduknya mayoritas OAP.

Selain ke-3 alasan yang dikemukakan di atas, OAP perlu memperoleh perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan, karena memang indikator kesehatan mereka lebih rendah dibandingkan penduduk migran di Provinsi Papua Barat. Hal ini telah dikemukakan pada bagian 2 tulisan ini. Karena status kesehatan adalah salah satu faktor penentu utama dalam kualitas SDM, dan kualitas SDM merupakan penentu kesejahteraan seseorang maupun masyarakat pada umumnya, perbedaan dalam indikator kesehatan seyogianya menjadi alasan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada OAP di dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sudah barang tentu tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak-hak penduduk lainnya di Provinsi Papua Barat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Alasan penting lainnya adalah karena di tingkat internasional terdapat pengakuan yang tegas tentang hak-hak *indigenous peoples* atas kesehatan. Salah satu kovenan terpenting adalah *UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Bangsa-Bangsa Pribumi) yang diadopsi pada tanggal 13 September 2007 oleh Majelis Umum PBB.

Deklarasi ini memuat dua pasal (pasal 23 dan 24) yang secara spesifik mengatur tentang kesehatan bangsa-bangsa pribumi/orang-orang asli. Indonesia, di dalam Sidang Pleno itu, memilih untuk mendukung — tidak menolak, atau bersikap abstain. Salah satu alasannya, sudah barang tentu, adalah karena Konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara tegas mengatur tentang masyarakat hukum adat (yang sering merupakan terjemahan dari *indigenous peoples* dalam berbagai

literatur ilmiah), sebagaimana yang tertera pada pasal 18B ayat (2), yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Uraian lebih jauh tentang hak-hak masyarakat adat dalam sektor kesehatan sebagaimana diatur dalam deklarasi PBB di atas dan konvensi-konvensi lainnya disajikan dalam bagian 4 tulisan ini.

Kovenan Internasional tentang Hak Bangsa Pribumi atas Kesehatan dan Pengalaman Empiris di Negara-Negara Sahabat

Pasal-pasal kesehatan sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Bangsa-Bangsa Pribumi⁸ adalah sebagai berikut:

ARTICLE 23

Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development. In particular, indigenous peoples have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions.

PASAL 23

Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk melaksanakan hak pembangunan mereka. Secara khusus, masyarakat adat memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam mengembangkan dan menentukan program pembangunan kesehatan, perumahan serta sosial dan ekonomi lainnya yang berpengaruh atas mereka dan, sedapat mungkin, terlibat untuk mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.

ARTICLE 24

1. *Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health services.*
2. *Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view to achieving progressively the full realization of this right.*

8 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf.

PASAL 24

1. Masyarakat adat memiliki hak atas obat-obat tradisional mereka dan untuk mempertahankan praktik kesehatan mereka, termasuk konservasi tanaman obat, hewan, dan mineral penting mereka. Setiap individu dalam masyarakat adat juga memiliki hak untuk mengakses, tanpa diskriminasi apa pun, semua layanan sosial dan kesehatan.
2. Setiap individu pribumi memiliki hak yang sama untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Negara harus mengambil langkah-langkah progresif yang diperlukan guna pemenuhan secara penuh hak ini.

Beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1989, ILO (International Labor Organization) telah merumuskan *ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples* (Konvensi ILO Nomor 169 tentang Bangsa-Bangsa Pribumi dan Masyarakat Suku)⁹. Hal-hal yang diatur tentang kewajiban negara bagi pembangunan kesehatan bangsa-bangsa pribumi dan masyarakat suku adalah sebagai berikut (Bagian V tentang Keamanan Sosial dan Kesehatan):

ARTICLE 24

Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned, and applied without discrimination against them.

PASAL 24

Skema jaminan sosial harus diperluas secara progresif untuk mencakup orang-orang yang bersangkutan [bangsa-bangsa pribumi dan masyarakat suku], dan diterapkan dengan tidak mendiskriminasi mereka.

ARTICLE 25

1. *Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.*
2. *Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.*

9 <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Indigenous.aspx>.

3. *The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.*
4. *The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country.*

PASAL 25

1. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang memadai tersedia bagi orang-orang yang bersangkutan [bangsa-bangsa pribumi dan masyarakat suku], atau harus memberi mereka sumber daya untuk memungkinkan mereka merancang dan menyediakan layanan [kesehatan] tersebut di bawah tanggung jawab dan kendali mereka sendiri, sehingga mereka dapat menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai.
2. Layanan kesehatan harus, sedapat mungkin, berbasis komunitas. Layanan-layanan ini harus direncanakan dan dikelola bersama-sama dengan orang-orang yang berkepentingan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi, geografis, sosial dan budaya mereka serta upaya pencegahan [penularan penyakit secara] tradisional, praktik-praktik penyembuhan, dan obat-obatan mereka.
3. Sistem perawatan kesehatan harus memberikan preferensi pada pelatihan dan rekrutmen pekerja kesehatan masyarakat setempat, dan fokus pada pelayanan kesehatan dasar sambil memelihara hubungan yang kuat dengan tingkatan layanan kesehatan lainnya.
4. Ketentuan layanan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan upaya-upaya [pembangunan] sosial, ekonomi dan budaya lainnya di negara tersebut.

Konvensi-konvensi internasional sebagaimana yang dikutip di atas menunjukkan paling tidak ada empat hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan oleh negara kepada bangsa-bangsa pribumi/penduduk asli di negara tersebut.

Pertama, setiap *indigenous people* (penduduk asli) memiliki hak yang sama dengan seluruh penduduk di negara itu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sampai tingkat yang paling tinggi — tidak saja secara konseptual, tetapi juga dalam praktik.

Kedua, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi penduduk asli, negara berkewajiban untuk berkonsultasi dengan mereka sehingga program maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh penduduk asli di negara tersebut.

Ketiga, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus melibatkan penduduk asli secara langsung. Tidak saja mereka terlibat di dalam konsultasi, tetapi mereka juga berhak untuk dilatih sehingga mampu menjadi bagian substansial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh negara kepada mereka.

Keempat, negara harus melindungi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap penggunaan dan pengembangan sistem kesehatan tradisional — baik dalam hal praktik-praktik penyembuhan maupun obat-obatan tradisional. Terkait dengan hal itu, hak-hak mereka untuk mengkonservasi hewan, tumbuhan dan/atau mineral yang mereka gunakan dalam praktik kesehatan tradisional mereka, juga harus dihormati dan dilindungi.

Sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, adil, dan nonrasis terhadap warga negaranya yang tergolong *indigenous peoples*. Salah satunya adalah *American Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples*¹⁰ yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016. Deklarasi ini disepakati bersama oleh 35 negara di Benua Amerika yang tergabung dalam *Organization of American States* — OAS (Organisasi Negara-Negara Amerika). Negara-negara OAS, termasuk Amerika Serikat, mengambil komitmen untuk menghormati dan meneguhkan hak-hak penentuan nasib sendiri, pendidikan kesehatan, pemerintahan sendiri, budaya, tanah, wilayah, dan sumber daya alam dari orang-orang asli/bangsa-bangsa pribumi di Amerika Utara, Mexico, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Penduduk pribumi/orang asli Benua Amerika adalah penduduk yang telah ada di benua tersebut sebelum Columbus menginjakkan kaki di wilayah itu pada akhir tahun 1490-an, dan keturunan mereka. Diperkirakan jumlah orang asli Benua Amerika mencapai 69 juta orang.

Deklarasi OAS tentang hak-hak penduduk pribuminya mencakup pula perihal pembangunan kesehatan. Secara umum deklarasi tersebut tidak banyak berbeda dari yang telah diatur di dalam *UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples*, kecuali dalam hal berikut ini: "... [N]egara akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan melarang masyarakat adat atau anggotanya secara individu untuk tunduk pada program penelitian, percobaan biologis atau medis, serta sterilisasi tanpa mereka sebelumnya memperoleh informasi yang cukup, dan memberikan izin. Demikian juga masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses

¹⁰ <https://www.narf.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/2016oas-declaration-indigenous-people.pdf>

data, catatan medis, dan dokumentasi penelitian tentang mereka yang dilakukan oleh individu dan/atau lembaga publik dan swasta.”

Canada telah maju lebih jauh dengan merinci *standard operating procedure* (SOP) yang harus dipenuhi terkait dengan hak-hak seksual dan reproduksi para warga negaranya yang masuk dalam kategori *indigenous peoples*. Misalnya, hak-hak seksual dan reproduksi dari setiap penduduk perempuan asli dewasa Canada di antaranya (Yee, Apale, dan Deleary, 2011)¹¹:

- a. mencegah [kehamilan], memperoleh perlakuan yang baik, dididik, dan memperoleh informasi serta dilindungi privacy-nya;
- b. menikmati pelayanan kesehatan yang tepat waktu, aman secara budaya, dan bermutu tinggi;
- c. memutuskan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan jarak kelahiran mereka;
- d. tergantung pada pengetahuan tradisional yang dimilikinya, namun juga memanfaatkan kemajuan ilmu kesehatan modern;
- e. memperoleh informasi tentang keputusan-keputusan yang telah diambil menyangkut kesehatannya;
- f. bebas dari praktik-praktik yang berbahaya, diskriminasi atas dasar gender atau alasan lainnya, dan semua bentuk kejahatan;
- g. menikmati hubungan yang saling memuaskan dan aman, bebas dari pemaksaan dan kejahatan, tanpa rasa takut akan ditulari penyakit atau mengalami kehamilan yang tidak direncanakan; dan
- h. mengatur fertilitasnya tanpa risiko yang membahayakan jiwanya.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Canada juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan mental dan ketergantungan penduduk aslinya (disebut *first nations*) terhadap alkohol dan zat-zat adiktif lainnya. Misalnya, negara ini memiliki lembaga *NNADP – National Native Alcohol and Drug Abuse Program*, atau Program Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Alkohol dan Obat-Obatan di Kalangan Penduduk Asli. Hal ini dilakukan karena sebagaimana halnya *indigenous peoples* lainnya di dunia, banyak penduduk asli Canada yang hidup tergantung pada alkohol dan napza.

Pemerintah Australia telah menyusun suatu dokumen penting yang berfokus pada pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi penduduk aslinya, yang disebut

11 J. Yee, A.N. Apale, dan M. Deleary (2011). “Sexual and Reproductive Health, Rights, and Realities and Access to Services for First Nations, Inuit, and Métis in Canada”, SOGC Joint Policy Statement, No. 259. [https://www.jogc.com/article/S1701-2163\(16\)34914-3/pdf](https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)34914-3/pdf).

dengan “Aboriginal” dan “Torres Strait Islander”. Dokumen itu adalah *National CQI Framework for Aboriginal and Torres Strait Islander Primary Health Care, 2015-2025*¹², atau Program Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Berkelanjutan bagi Penduduk Aborigin dan Pulau-Pulau di Selat Torres, 2015-2025.

Di dalam dokumen ini diuraikan bahwa visi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berciri CQI (*Continuous Quality Improvement*) atau Peningkatan Kualitas yang Berkelanjutan di kalangan penduduk Aborigin dan pulau-pulau di Selat Torres diwujudkan dengan enam hal berikut ini sebagai konteks:

- a. Perbedaan/gap kesehatan antara populasi penduduk asli dan penduduk nonasli (migran);
- b. Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif;
- c. Sektor pelayanan kesehatan dasar yang kompleks;
- d. Perbedaan-perbedaan dalam kapasitas organisasi;
- e. Reformasi sistem; dan
- f. Berbasis data dan bukti.

Pokok-Pokok Pelayanan Kesehatan bagi OAP

Isu-Isu Penting

Uraian yang telah dikemukakan dalam bagian 2 sampai 4 di atas sesungguhnya merupakan konteks bagi kita untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada bagian akhir dari bagian 1 tulisan ini: “Bagaimana pembangunan kesehatan itu mampu menjangkau seluruh OAP di mana pun mereka berada di Provinsi Papua Barat, dan bukan membuat semakin lebarnya tingkat kesejahteraan antara OAP dan penduduk Papua Barat lainnya?”

Untuk menjawab pertanyaan itu, pada bagian 2 sampai 4 setidaknya-tidaknya telah berhasil dirumuskan isu-isu penting kesehatan OAP, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu yang dapat dijangkau dan melayani setiap OAP tanpa kecuali — termasuk mereka yang bermukim di kawasan yang terpencil dan terpencar merupakan bagian penting dari pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia;
- b. Kondisi kesehatan OAP di Provinsi Papua Barat lebih rendah dibandingkan penduduk migran/non-OAP;

12 <http://www.amsant.org.au/wp-content/uploads/2015/11/National-CQI-Framework-FINAL-DRAFT.pdf>.

- c. Akses OAP terhadap fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu masih terbatas — salah satunya diakibatkan karena kebanyakan OAP masih miskin;
- d. Pelayanan kesehatan yang diakses oleh OAP dan non-OAP tidak serta merta menjamin bahwa OAP akan memperoleh pelayanan yang bermutu, adil, dan tidak diskriminatif;
- e. Sebagai anggota PBB dan penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak Bangsa-Bangsa Pribumi, Pemerintah Indonesia (mulai dari pusat sampai daerah) perlu merumuskan dengan jitu suatu tata kelola pelayanan kesehatan bagi orang-orang asli — yang dalam konteks UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah Orang Asli Papua; dan
- f. Penyusunan tata kelola pelayanan kesehatan kepada OAP dapat dilakukan dengan belajar dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di negara-negara lain yang memiliki penduduk asli, yang telah menyelaraskan praktik-praktik tersebut dengan kovenan-kovenan internasional yang secara spesifik mengatur hak-hak penduduk pribumi di dalam sektor kesehatan.

Visi

Sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat memberikan perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan terhadap OAP, serta membuka akses yang terjangkau, berkeadilan, efektif, berkualitas, dan dengan biaya serendah-rendahnya kepada setiap OAP di permukiman mereka masing-masing, dengan tidak mengurangi hak-hak penduduk Papua Barat lainnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Prinsip-Prinsip

- a. *Keadilan dan hak asasi manusia.* Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan di Provinsi Papua Barat yang adalah daerah otonomi khusus baru akan tercapai ketika seluruh dan setiap OAP memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas kapan saja pelayanan itu diperlukan. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan berpedoman pada pemenuhan hak asasi manusia — baik HAM OAP atas pelayanan kesehatan yang bermutu, maupun HAM penduduk non-OAP untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu pula.
- b. *Pelibatan OAP.* Untuk bisa memberikan pelayanan yang komprehensif dan menjawab kebutuhan OAP, mereka perlu dilibatkan di dalam

perancangan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelibatan yang dimaksudkan adalah terutama dengan mengakomodasi aspirasi mereka di dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

- c. *Kemitraan*. Pelayanan kesehatan bagi OAP hanya bisa berhasil dengan baik apabila dilaksanakan secara berkoordinasi dan/atau melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepedulian pada peningkatan kualitas kesehatan OAP — sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (4) UU 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam UU 35 tahun 2008, yaitu “... Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan [untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada OAP]”.
- d. *Akuntabilitas*. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada OAP diselenggarakan dengan berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bertanggung jawab, dan setiap tindakan/aksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. *Menyeluruh dan sistematis*. OAP yang sehat tidak saja dalam hal kesehatan fisik, tetapi juga dalam hal kesehatan mental dan sosial. Untuk mencapai kesehatan yang menyeluruh itu juga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan asupan gizi dan makanan, lingkungan perumahan yang sehat, infrastruktur yang memadai (perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi), budaya hidup sehat, serta penegakan hukum atas setiap produk dan/atau tindakan yang merusak kesehatan OAP.

Prioritas

Prioritas pembangunan pelayanan kesehatan bagi OAP paling sedikit terdiri dari hal-hal berikut ini:

- a. *Menutup ketimpangan/perbedaan*. Ketimpangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan (tempat banyak OAP hidup sebagai masyarakat miskin sehingga tidak memiliki akses yang memadai pada pelayanan kesehatan) dengan wilayah pedesaan (yang didominasi oleh OAP namun kurang memiliki fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai) harus segera diperbaiki. Apabila ketimpangan ini diperbaiki, ketimpangan indikator kesehatan antara OAP dengan non-OAP akan diperbaiki dengan sendirinya.
- b. *Pembangunan dan/atau revitalisasi fasilitas kesehatan dan penempatan SDM kesehatan di kawasan-kawasan OAP yang belum memiliki*. Fasilitas-

fasilitas kesehatan yang bermutu selama ini lebih banyak berlokasi di daerah perkotaan dan/atau ibu kota distrik. Banyak OAP yang justru bermukim jauh dari lokasi-lokasi tersebut. Itu sebabnya, peningkatan pelayanan kesehatan OAP harus identik dengan mendekatkan fasilitas yang bermutu, serta SDM kesehatan yang lengkap dan sarana/prasarananya, ke permukiman OAP.

- c. *Sistem jaminan kesehatan plus (SJK+)*. Pembangunan dan/atau revitalisasi fasilitas kesehatan seperti yang dikemukakan pada angka (2) perlu diimbangi dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan plus bagi OAP. Salah satu alasan perlunya SJK+ ini adalah karena UU Otsus Papua mengamanatkan bahwa paling sedikit 15 persen dari dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi harus dialokasikan bagi pelayanan kesehatan. Provinsi Papua Barat adalah salah satu daerah yang kaya minyak dan gas bumi di Indonesia — dan ke depan akan terus memperoleh tambahan dana yang besar dari pertambangan migas bumi. SJK+ harus memungkinkan OAP memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sampai di tingkat rujukan nasional. Selain itu, SJK+ ini juga harus dimungkinkan membiayai pelayanan kesehatan bagi OAP dengan kebutuhan kesehatan tertentu seperti yang dikemukakan dalam angka (7) sampai (10) di bawah ini.
- d. *Ibu hamil*. OAP hamil perlu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai syarat dasar dimulainya kehidupan generasi baru Papua Barat yang baik. Itu sebabnya, salah satu alasan perlunya membangun dan mendekatkan fasilitas kesehatan ke permukiman OAP sesungguhnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan reproduktif, *perinatal*, *antenatal*, dan *infancy* yang bermutu kepada ibu dan bayi/anak OAP. Dengan pendekatan ini, kematian yang terjadi pada tahap *postneonatal* akan dapat diturunkan secara signifikan.
- e. *Anak dan praremaja (birth to early teens)*. Ketika berada pada usia dini, anak-anak OAP perlu dipelihara kesehatannya dengan makanan bergizi, imunisasi, dan menghindarkan mereka dari bahaya alkohol, nikotin, dan zat-zat adiktif (misalnya menghirup lem dengan merek tertentu), sehingga kemampuan sosial, emosional, bahasa, kognitif, dan keterampilan komunikasi mereka dapat berkembang dengan baik. Kemampuan inilah yang memberikan dasar kecerdasan ketika mereka mulai terlibat dalam pembelajaran formal dan interaksi dengan teman-teman sebayanya kemudian hari.

- f. *OAP berusia awal remaja sampai dewasa.* OAP dalam kategori ini perlu mendapat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga bisa menjadi orang-orang dewasa yang sehat. Pada tahap ini terjadi perubahan-perubahan penting secara fisik dan mental/emosional dalam diri mereka. Inilah tahap ketika identitas diri mereka terbentuk – bisa baik dan bisa pula buruk. Persepsi terhadap diri sendiri dan kedudukan mereka di dalam masyarakat/negara juga terbentuk – bisa baik dan bisa juga buruk. Itu sebabnya, selain memperkenalkan dan melatih mereka untuk mempraktikkan pola hidup yang sehat, mental mereka pun harus dibentuk secara positif melalui *role models* yang berketeladanan. Mereka harus dilatih untuk menghindarkan diri dari narkoba, seks bebas, minuman keras, dan merokok.
- g. *OAP dewasa.* OAP dewasa harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang memadai supaya mereka dapat hidup lama dan produktif. Hal-hal yang harus dilakukan di antaranya adalah mendorong/memfasilitasi mereka untuk mempraktikkan pola hidup sehat, mencegah mereka menderita penyakit-penyakit kronis (*cardiovascular*, kanker, diabetes, ginjal, dll.) dan menolong mereka agar mampu mencapai kesejahteraan sosial dan emosional yang baik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sistem kesehatan yang memungkinkan setiap OAP dewasa, tanpa kecuali, diperiksa kesehatannya secara berkala.
- h. *OAP lanjut usia.* OAP lanjut usia harus dipelihara kesehatannya agar mereka dapat tetap hidup sehat, aktif, dan berbahagia. Selain pemeriksaan kesehatan berkala, mereka perlu mendapat dukungan yang memadai dari anggota keluarganya. Perlu pula dijajaki kemungkinan pembangunan fasilitas rumah jompo bagi OAP di Provinsi Papua Barat yang tidak memperoleh dukungan yang memadai dari anggota keluarganya.
- i. *HIV, AIDS, dan IMS.* Tidak bisa dimungkiri bahwa Papua Barat adalah salah satu daerah dengan tingkat prevalensi HIV dan AIDS tertinggi di Indonesia. Keadaan ini berbanding lurus dengan prevalensi penyakit kelamin lainnya. Penyebabnya adalah hubungan seksual yang tidak terproteksi. HIV dan AIDS serta IMS sebagai pintu masuknya adalah ancaman serius bagi keberlangsungan OAP dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk: (1) meningkatkan kesadaran OAP sejak muda tentang bahaya HIV dan AIDS serta IMS, dan pentingnya menerapkan “ABC”; (2) menghilangkan stigma negatif

- dalam masyarakat terhadap ODHA (orang dengan HIV dan AIDS; dan (3) menolong mereka yang sudah terinfeksi HIV agar bisa hidup sehat dan produktif — termasuk agar kaum perempuan ODHA dapat menikah dan memiliki anak-anak yang sehat dan bebas HIV.
- j. *Alkohol dan zat-zat adiktif*. Ancaman besar lainnya bagi OAP adalah ketergantungan pada alkohol dan zat-zat adiktif seperti lem (*glue sniffing*). Perlu diciptakan dan dilaksanakan suatu sistem penyadaran terpadu yang terus-menerus kepada OAP pada umumnya, dan generasi muda OAP pada khususnya, tentang bahaya alkohol dan zat-zat adiktif — termasuk membangun sistem ketahanan diri (*self resilience*) agar mereka tidak tergantung pada alkohol dan zat-zat adiktif tersebut. Selain itu, perlu dibangun pusat-pusat rehabilitasi bagi OAP yang hidupnya tergantung alkohol atau zat-zat adiktif sehingga mereka bisa sembuh dan menjadi warga masyarakat yang produktif.
 - k. *Pengobatan tradisional*. Bagi OAP, pengobatan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan mereka. Itu sebabnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi pengobatan tradisional dari kepunahan — salah satunya melalui penelitian dan uji coba klinis. Pada saat yang sama, akses OAP terhadap pengobatan modern harus terbuka selebar-lebarnya.
 - l. *Quality control*. Membentuk Komisi Kesehatan OAP yang bertanggung jawab memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tentang keluhan yang disampaikan oleh OAP serta upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan.

Penutup

Tulisan ini dibuat untuk menjawab tuntutan masyarakat agar Perdasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat merumuskan bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan bagi OAP itu dilakukan. Yang mereka maksudkan sesungguhnya bukanlah tentang aspek-aspek teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah. Yang diharapkan adalah agar ada kebijakan khusus yang menjawab pergumulan OAP selama ini dalam upaya mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan komprehensif di wilayah permukiman mereka masing-masing.

Itu sebabnya tulisan ini perlu dipandang sebagai komplemen bagi Raperdasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua Barat yang telah disusun dan dikonsultasikan kepada publik. Apabila isi tulisan dianggap penting dan oleh karena itu perlu lebih disempurnakan, ada dua kemungkinan pemanfaatannya:

(1) memasukkannya menjadi bagian dari Raperdasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua Barat yang ada, atau (2) menjadikannya sebagai Rapergub Papua Barat tentang Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan berinduk pada Raperdasi yang dimaksud pada angka (1).

Bagaimana Mempercepat Terciptanya Kebajikan di Papua?

AGUS SUMULE

Latar Belakang

Dalam kurang lebih dua tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan penting di Tanah Papua. Mungkin tidak pernah ada perubahan semendasar yang telah dan sementara berlangsung sekarang. UU Otsus Papua telah diubah untuk kali kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan turunannya, yaitu PP 106/2021 dan PP 107/2021 pun telah dibentuk.

Sejumlah Daerah Otonom Baru (DOB) tingkat provinsi dibentuk. Papua tidak lagi satu entitas seperti ketika ia dibentuk dengan UU Nomor 12 Tahun 1969, atau UU 2 Tahun 2021, atau dua entitas dengan Otonomi Khusus seperti sesudah dibentuknya UU Nomor 35 tahun 2008. Papua sekarang telah menjadi 6 (enam) provinsi. Masing-masing memiliki hak dan kewenangan yang sama, dan melapor sendiri-sendiri ke Jakarta.

Selain itu, pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, disingkat BP3OKP, yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Selain beranggotakan Mendagri, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas, BP3OKP juga diisi oleh satu orang anggota yang berasal dari setiap provinsi di Tanah Papua. Bappenas juga telah menghasilkan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Dari segi dana pembangunan, secara total jumlahnya pun meningkat, khususnya yang lazim disebut Dana Otsus Papua dari sejumlah 2% (setara dengan plafon DAU nasional) menjadi 2,25%. Tentu Pemerintah Pusat berharap bahwa dengan semua perubahan-perubahan ini, keadaan di Papua akan berubah. Kebajikan bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang asli Papua yang merupakan subjek

utama dari semua kebijakan yang diberlakukan di sana. Waktu yang diberikan pun tidak lama, hanya 20 tahun ke depan sejak tahun 2021.

Situasi Hari Ini

Sebelum Papua dimekarkan menjadi DOB, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Papua sudah mencapai 60,44, pindah dari posisi rendah ke sedang. Provinsi Papua Barat sudah mencapai 65,09. Melalui pemekaran, sejumlah provinsi tampak naik IPM-nya dibandingkan provinsi induk sebelumnya. Misalnya Provinsi Papua (baru) 66,96 dan Provinsi Papua Selatan 60,53. Tetapi, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan turun jauh menjadi hanya 55,72 dan 47,86.

Demikian pula dari segi tingkat kemiskinan. Pemekaran provinsi menjadi DOB-DOB tetap menempatkan ke-6 provinsi di Tanah Papua terendah di Indonesia. Rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia sudah turun menjadi 9,54%. Sementara di Tanah Papua tingkat kemiskinannya adalah Papua 26,86; Papua Selatan 20,24; Papua Barat 26,41; Papua Barat Daya 24,07; Papua Tengah 32,35; dan Papua Pegunungan 35,46.

Angka-angka IPM dan tingkat kemiskinan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa urgensi untuk melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua menjadi jauh lebih mendesak dibandingkan di waktu lalu. Ini salah satu contohnya: pada tahun 2021 penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di seluruh Tanah Papua diperkirakan berjumlah 620.724 orang. Angka ini diperoleh dengan menganalisis data-data Angka Partisipasi Murni yang resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Jumlah anak yang tidak bersekolah itu tidak/belum menjadi lebih sedikit sesudah hampir dua tahun UU 2 Tahun 2021 disahkan, namun terus bertambah.

Dari segi pembangunan kesehatan, situasinya juga masih belum banyak berubah. Masih sangat banyak kampung yang tidak memiliki bidan untuk membantu para ibu OAP menikmati pelayanan kesehatan reproduksi yang diharapkan. Masih banyak distrik yang tidak memiliki puskesmas, atau puskesmasnya tidak berfungsi dengan baik karena ketiadaan/keterbatasan SDM kesehatan. Padahal, rumus yang harus digunakan adalah: 1 kampung 1 bidan, dan 1 distrik 1 puskesmas yang fungsional.

Hal lain yang jarang dibicarakan adalah, bahwa akibat dari membanjirnya migrasi masuk, maka telah terjadi perubahan struktur demografi di banyak tempat. Jumlah OAP di Provinsi Papua Barat Daya hanya mencapai 39,92% apabila kita berpedoman pada hasil perhitungan Dinas Dukcapil Papua Barat

dan BPS yang dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Di Provinsi Papua (lama) telah diketahui sejak hasil Sensus Penduduk 2010 diumumkan, bahwa OAP di Kabupaten Mimika, Nabire, Merauke, Keerom, dan Kota Jayapura telah menjadi minoritas. Tentu diperlukan pemikiran dan hikmat tersendiri untuk merumuskan bagaimana pengelolaan Otonomi Khusus Papua di daerah-daerah yang OAP-nya telah minoritas.

Apa yang Harus Dikerjakan Supaya Kebijakan Bertumbuh di Papua?

Ketika Bapak Barnabas Suebu memimpin Provinsi Papua sebagai gubernur, saya membantu beliau sebagai staf ahli. Selama lima tahun saya belajar dari beliau tentang kata-kata kunci pembangunan Papua. Kata-kata kunci itu saya yakini masih merupakan pintu masuk untuk menumbuhkan kebijakan di Papua. Kata-kata kunci ini haruslah menjadi kebijakan Pemerintah. Sebagian dari kata-kata kunci itu saya kemukakan berikut ini:

- 1. Kampung:** Fokus perhatian haruslah pada masyarakat kampung, karena di kampung bermukim OAP. Sebanyak-banyaknya Dana Otsus harus dilakukan di kampung-kampung. Pada tahun 2006 sampai 2011 dilakukan RESPEK di Provinsi Papua, Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Dana yang diturunkan hanya Rp 100 juta per kampung pada awalnya. Dana itu dikelola oleh masyarakat kampung (bukan oleh satu-dua orang aparat pemerintah kampung) melalui panitia-panitia dan didampingi oleh para sarjana pendamping. Selain itu, semua SKPD diwajibkan untuk membuat program untuk kampung, khususnya SKPD-SKPD yang bertanggung jawab untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur kampung (perhubungan, energi listrik, air bersih, dan telekomunikasi). Ada koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di dalam mewujudkan pembangunan kampung. Pendekatan seperti itu haruslah dimulai kembali dan dikembangkan ke depan. Dana Desa yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat sangat besar. Di Provinsi Papua Pegunungan jumlahnya lebih besar dari dana Otsus. Total Dana Desa di Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp 2,1 triliun, sementara Dana Otsus Rp 1,7 triliun pada tahun 2023.
- 2. Pemerintahan distrik:** PP 106/2021 mengamanatkan tentang pentingnya me-revitalisasi pemerintah distrik. Berapa pun jumlah provinsi dibentuk di Tanah Papua, jarak sosialnya dengan masyarakat kampung tetap sangat

jauh. Jadi, seharusnya pemerintah distrik dengan kewenangan dan anggaran, sehingga kehadiran negara bagi OAP, khususnya di kampung-kampung, bisa dirasakan melalui program-program pembangunan yang nyata.

3. Penghormatan akan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam:

Hal apa yang apabila dilaksanakan akan menyelesaikan banyak masalah di Papua? Jawabannya adalah kebijakan negara yang memungkinkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk tanah, dihormati oleh semua pihak. PP 106/2021 telah memuat pengaturan tentang upaya ini. Tetapi, kebijakan yang sangat baik tersebut harus ditindaklanjuti dengan hal-hal nyata di lapangan. Wujud yang paling nyata adalah menghentikan pembelian/penjualan tanah adat dan menggantikannya dengan sistem sewa yang dikaitkan dengan pembentukan Dana Abadi Masyarakat Adat. Dana Abadi yang berasal dari sistem sewa itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang hidup sekarang maupun akan datang.

4. Guru: Memecahkan masalah pendidikan di Papua hanya bisa dilakukan apabila guru tersedia. Papua kekurangan 20.898 orang guru (tahun 2021). Angka ini hanya untuk sekolah-sekolah yang sudah ada sekarang. Padahal, seperti dikemukakan di atas, ada lebih dari 620.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah hari ini. Mereka pun membutuhkan guru untuk mendidik mereka. Belum lagi guru untuk melayani peningkatan penduduk dewasa (25 tahun ke atas) yang RLS (rata-rata lama sekolahnya) sangat rendah. RLS yang rendah inilah faktor utama yang membuat termarginalkannya OAP dalam merebut kesempatan kerja yang tercipta akibat investasi di Tanah Papua. PP 106/2021 sudah mengamanatkan tentang perlunya memberlakukan kebijakan khusus pengadaan tenaga guru, dengan sedapat mungkin merekrut putra-putri Papua yang berkompeten dan siap dilatih untuk menjadi guru. Kemendikbudristek sementara menyiapkan Permen tentang Pendidikan Guru di Tanah Papua. Permen ini perlu segera diselesaikan dan diberlakukan, karena, apabila terlambat, maka prosesnya harus menunggu tahun akademik baru. Selain itu, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah harus menghitung dan menyediakan dana bagi tenaga-tenaga guru tersebut. Harus ada keputusan Pemerintah untuk segera memulai pendidikan guru

ini di lokasi-lokasi tertentu di Tanah Papua. Sebaiknya, Bapak Wapres meresmikan lembaga-lembaga pendidikan guru ini dalam waktu dekat.

5. **Bidan dan kader kesehatan:** Masalah kesehatan di tingkat kampung, seperti gizi bagi ibu hamil, kematian bayi, gizi bayi, *stunting*, dan lainnya hanya bisa diselesaikan apabila bidan tersedia di setiap kampung. Karena ketersediaan bidan masih sangat kurang, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pelatihan kader-kader kesehatan reproduktif. Hal ini sudah pernah dilakukan di waktu lalu, baik pada zaman pemerintahan Belanda, maupun oleh pemerintah Orde Baru. Di setiap kampung di Papua pasti ada lembaga keagamaan, khususnya Gereja. Dari setiap Gereja ini perlu direkrut beberapa orang ibu/perempuan untuk dilatih menjadi kader kesehatan. Merekalah yang kemudian menyelenggarakan program-program penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi, seperti menyelenggarakan Posyandu, di bawah koordinasi bidan yang sekarang masih terbatas jumlahnya tersebut.
6. **Pasar:** Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan pasar untuk menampung hasil kegiatan ekonomi rakyat di kampung-kampung. Itu berarti setiap kabupaten/kota harus memiliki BUMD yang handal, yang tugas utamanya adalah menjadi tangan pemerintah dalam membangun perekonomian kampung. Kementerian BUMN seharusnya juga membina BUMD dan BUMDes sehingga perekonomian rakyat bisa bergerak.
7. **SSH (Sekolah Sepanjang Hari):** Ini adalah pendekatan baru yang perlu diberlakukan di setiap sekolah. Hingga saat ini banyak pihak masih berbicara tentang sekolah berpola asrama. Masalahnya, sekolah berpola asrama hanya bisa menjangkau sangat sedikit siswa. Tidak mungkin menyediakan sekolah berasrama untuk semua siswa. Padahal, sesuai UUD 1945, setiap penduduk usia sekolah berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Jalan keluarnya adalah dengan menyelenggarakan SSH, khususnya di kampung-kampung. Para murid datang lebih pagi, mandi di sekolah, mengenakan seragam dan sepatu di sekolah, sarapan di sekolah, memperoleh pembinaan/siraman rohani di sekolah, kemudian belajar normal, makan siang di sekolah, dan mengerjakan PR serta memperoleh pelajaran tambahan di sekolah. Mereka pulang sore hari ke rumah. Sekolah-sekolah jelas harus dilengkapi dengan air bersih, listrik, internet, perpustakaan yang baik, dan fasilitas lainnya. SSH dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Para ibu di kampung yang bertugas

menyiapkan makanan yang sehat dan mencuci/menyeterika pakaian sekolah anak-anak. SSH dengan demikian bisa menjadi alat yang ampuh untuk mendinamisasi pendidikan di kampung-kampung karena masyarakat ikut serta bertanggung jawab bagi keberhasilannya.

- 8. Pendidikan remedial:** Dalam jangka pendek pendidikan remedial/matrikulasi harus dilakukan bagi para lulusan SMA/SMK di Papua yang berminat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mutu pendidikan menengah sangat tidak merata di seluruh Papua. Melalui pendidikan remedial, para lulusan SMA/SMK bisa dilatih dan ditingkatkan kompetensi akademik, integritas dan kesamaptaannya selama setahun (dua semester). Sesudah lulus dari pendidikan remedial ini, mereka pasti lebih siap dan mampu untuk lulus seleksi pendidikan masuk perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun berbagai sekolah kedinasan.
- 9. Beasiswa LPDP khusus Papua:** Kementerian Keuangan melalui LPDP selama ini memberikan beasiswa untuk pendidikan S2/S3. Telah ada alokasi khusus bagi Papua. Disarankan agar alokasi itu juga diberikan bagi OAP lulusan SMA/SMK yang unggul sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri pada bidang-bidang yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah. Ini adalah bagian dari upaya mempercepat peningkatan mutu SDM Papua. Untuk menjamin keberhasilan para lulusan SMA/SMK tersebut, LPDP bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang telah terbukti berpengalaman dan berhasil selama ini menyiapkan para lulusan SMA/SMK dari Tanah Papua untuk kuliah di luar negeri. Sebagai contoh, PHLI (Papua Hope Language Institute) di Sentani, Kabupaten Jayapura, selama beberapa tahun menyiapkan OAP lulusan SMA/SMK dari berbagai tempat di Tanah Papua selama setahun, baik dalam hal kompetensi akademik dan bahasa, karakter, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persiapan yang dilakukan paling tidak satu tahun itu telah menghasilkan lulusan PHLI yang terbukti berhasil dalam kuliah dengan nilai-nilai yang tinggi di perguruan tinggi di luar negeri. Pendekatan yang sama bisa dipercayakan oleh LPDP/Pemda kepada lembaga-lembaga serupa PHLI untuk mempersiapkan para ASN Papua agar berhasil dalam pendidikan pascasarjana di dalam dan di luar negeri. Para ASN Papua sangat sedikit yang berhasil dalam seleksi memperoleh beasiswa LPDP karena tidak ada persiapan sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Penutup

Pembangunan di Tanah Papua harus menjawab kebutuhan yang mendesak dan mencakup sebanyak mungkin OAP. Hal-hal yang dikemukakan di atas menawarkan program-program yang apabila dilaksanakan dengan benar dan berintegritas akan memberikan dampak banyak OAP, khususnya mereka yang bermukim di kampung-kampung yang terpencil. Jumlah mereka banyak, dan merekalah subjek yang sesungguhnya dari pembangunan di Tanah Papua.

Pelayanan Publik di Tanah Papua dan Faktor Keamanan

YOHANES B.J. RUSMANTA

Berbagai peristiwa di Tanah Papua, terutama dalam 10 tahun belakangan ini, didominasi oleh krisis keamanan. Situasi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan penurunan mutu pelayanan publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun bila ditelisik lebih dalam, situasi krisis keamanan tidak terjadi secara merata di semua kabupaten di Tanah Papua. Demikian pula, tidak semua kabupaten kota memperoleh nilai “rendah” menurut standar pelayanan publik sesuai UU No. 25/ 2009 yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Bagaimana Hubungan antara Keamanan dan Pelayanan Publik di Suatu Daerah?

Kata “keamanan” berasal dari akar kata “aman”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “aman” berarti: “bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; atau tenteram; tidak merasa takut atau khawatir”. Sementara itu, definisi keamanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 1 ayat 5 adalah sebagai berikut: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”. Lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat 6 didefinisikan kata “keamanan dalam negeri” adalah “suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib

dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

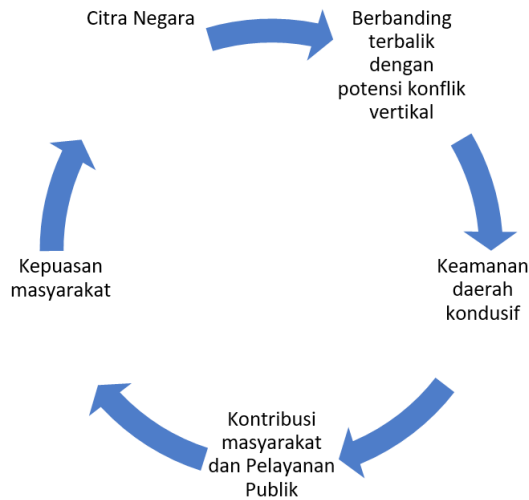
Beberapa kata kunci yang berkaitan erat dengan keamanan yaitu: ketenteraman, ketertiban, hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat atau publik. Berdasarkan landasan hukum tersebut terkandung hak-hak masyarakat untuk mendapatkan suasana aman, sekaligus kewajiban yang di dalamnya berbentuk keterlibatan aktif untuk menaati hukum dan menjaga kondisi dinamis sekaligus kondusif bagi berlangsungnya pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tidak disebutkan secara tersurat bahwa keamanan termasuk di dalam pelayanan publik. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun bila dihubungkan, masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Baik kaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keamanan berupa ketenteraman, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik; juga berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara, termasuk kepolisian untuk mewujudkannya dengan menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan memberi pelayanan administratif.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik di 29 kota/kabupaten se-Provinsi Papua pada tahun 2022. Hasilnya, beberapa kabupaten di Papua Tengah maupun Papua Pegunungan memperoleh nilai “sangat rendah”. Di daerah-daerah ini, menurut pengamatan penulis, memang tidak ada pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah kabupaten. Demikian pula proses pembangunan dalam arti luas sangat terhambat. Para pegawai negeri yang bertugas sebagian besar tidak berada di tempat karena alasan keamanan.

Alasan lain yang muncul adalah karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, juga karena mahalnya bahan kebutuhan sehari-hari. Bila ditelusuri lebih dalam, kurangnya sarana/prasarana dan faktor kemahalan disebabkan juga oleh faktor keamanan. Di beberapa Ibukota kabupaten, kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum pernah terbakar dan hingga kini (akhir 2023) belum semua dapat dibangun kembali.

Menurut hemat penulis, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten hendaknya memprioritaskan pemulihan kondisi keamanan disertai dengan



Gambar 1. Siklus hubungan keamanan daerah dengan mutu pelayanan publik.

pemulihan dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik dapat mengakibatkan peningkatan kepuasan masyarakat dan pada gilirannya “mempercantik wajah” negara di mata masyarakat. Citra positif negara di mata publik lambat laun menurunkan potensi konflik vertikal sehingga meningkatkan potensi keamanan daerah. Situasi keamanan yang kondusif akan sangat mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu. Demikian seterusnya.

Hubungan antara berbagai aspek di atas dapat digambarkan dalam “Siklus hubungan keamanan daerah dengan pelayanan publik” seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Bagaimana Hubungan Peran Pemerintah Daerah dengan Mutu Pelayanan Publik?

Semua visi dan misi pemimpin daerah, termasuk di Papua kurang lebih sama, yaitu menyelenggarakan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Semua pemimpin daerah mempunyai kemampuan untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan, sekaligus menggunakan semua potensi yang ada dengan strategi masing-masing. Kendala yang dimaksud termasuk gangguan keamanan akibat tingginya potensi konflik vertikal.

Menurut pengamatan penulis, ada juga daerah-daerah yang memiliki gangguan keamanan, tetapi mampu meningkatkan mutu pelayanan publik. Sebut

saja Kabupaten Jayawijaya (Wamena) yang saat ini menjadi ibukota Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten ini selama empat tahun terakhir (2019 hingga 2022, minus tahun 2020 tidak dinilai karena pandemi) memperoleh predikat “tinggi” dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik menurut Ombudsman RI.

Pernyataan tersebut di atas tidak bermaksud menafikan peristiwa berdarah pada akhir Februari 2023¹ dan beberapa peristiwa berdarah pada masa-masa terdahulu yang menimbulkan “*memoria passionis*” (ingatan kolektif akan penderitaan). Namun di sisi lain, upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan pelayanan publik tetap patut dihargai. Menurut hemat penulis, bahkan pelayanan publik dalam arti luas juga termasuk upaya “mengobati *memoria passionis*” tersebut, bukan sekadar “membalut perban”.

Sementara beberapa kabupaten lain yang kondisi keamanannya lebih kondusif justru memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik “rendah”. Untuk daerah seperti ini, tentu yang mempengaruhi penilaian tersebut bukanlah faktor keamanan. Demikian pula di daerah lain, yang situasi keamanannya relatif lebih kondusif sekaligus memiliki Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah² yang lebih tinggi, justru mendapat nilai kepatuhan pelayanan publik “rendah”.

Menurut laporan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dikeluarkan Ombudsman RI pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa beberapa kabupaten, seperti Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan Kota Jayapura dalam dua tahun terakhir mendapatkan nilai “tinggi” dan “sedang”. Ketiga daerah ini menurut hemat penulis, dipimpin oleh pemimpin yang memprioritaskan pelayanan publik dan mampu melakukan koordinasi ke tingkat paling depan dari pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan di atas tidak dimaksudkan bahwa daerah yang mendapatkan nilai “rendah” dari Ombudsman, pemimpinnya tidak memiliki kemampuan memimpin. Bisa jadi, prioritas di daerahnya belum menysasar aspek pelayanan publik. Demikian pula dengan faktor koordinasi. Kemungkinan besar koordinasi macet pada tingkat *middle management* sehingga pesan atau perintah yang datang dari *top leader* tidak dapat terimplementasi ke level pelaksana di garis depan. Penulis menemukan juga di lapangan, pada level pelaksana masih ditemukan kekurangan

1 <https://www.kompas.tv/regional/382219/situasi-terkini-wamena-korban-tewas-12-orang-keluarga-tuntut-visum-jenazah>

2 <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=26&pemda=->

personel atau ketidakmampuan menjalankan tugas karena faktor “*the right person in the right place*” belum terlaksana dengan baik.

Penutup

Walaupun judul tulisan ini tentang Tanah Papua, namun pengamatan dan penilaian penulis hanya terfokus pada wilayah Provinsi Papua sebelum pemekaran, yang terdiri atas 29 kabupaten/kota. Dengan asumsi bahwa pengamatan pada sebagian wilayah ini dapat mewakili keadaan Tanah Papua secara menyeluruh.

Inti yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut.

- a. Keamanan dan pelayanan publik saling mempengaruhi.
- b. Dalam konteks Papua, mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan memberi prioritas, koordinasi dan penempatan personel pelaksana yang sesuai dengan prinsip “*the right person in the right place*”.

Meneropong Kemajuan Papua Barat dalam Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2024

PAUL SATYO ISTDANDAR TAN & WOLAS KRENAK

Abstrak

Terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 pada pemilu 2014 telah membawa angin segar bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Betapa tidak, konflik yang berkepanjangan sejak Papua bergabung dengan NKRI tahun 1963 hingga pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua tahun 2001 belum terselesaikan dengan tuntas. Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal dan “kode harapan” bahwa persoalan Papua tentu juga akan diselesaikan. Melalui kebijakan Program Nawacita diharapkan dapat menuntaskan pelbagai persoalan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kebijakan Program Nawacita telah menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa. Namun, harapan masyarakat untuk memperoleh “kehidupan” yang adil yang berpihak kepada Papua dan Papua Barat masih belum tersentuh penuh. Oleh karena itu, dalam kemajuan Papua dan Papua Barat diperlukan pula diagnosis yang benar terhadap akar persoalan di Papua, niscaya akan melahirkan solusi yang tepat. Pemaksaan solusi yang keliru akan memperkeruh dan memperumit masalah.

Kata kunci: konflik Papua, kesejahteraan rakyat, persatuan bangsa, diagnosis solusi.

Pendahuluan

Hembusan angin segar yang ditiupkan keluar dari jendela Istana Kepresidenan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat hendaknya diapresiasi. Jika sebelumnya, angin segar itu kurang mereka rasakan, maka kini tidaklah demikian. Dengan terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 pada pemilu 2014, jendela Istana Kepresidenan telah dibuka lebar bagi semua daerah, khususnya Papua dan Papua Barat.

Hal ini patut ditegaskan. Peralnya, *memoria passionis* yang dialami masyarakat Papua dan Papua Barat selama bertahun-tahun telah menjadi “luka” yang sulit disembuhkan. Namun, pancaran cinta, kerendahan hati dan kesederhanaan dari sosok seorang Joko Widodo telah menaungi hidup dan memberi “kode harapan” bahwa masyarakat di Tanah Papua akan selalu ada di hatinya.

Pribadi yang demikian merakyat itulah yang selama ini dinantikan dan dirindukan warga masyarakat di Tanah Papua. Masyarakat merindukan dan mengharapkan lahirnya sosok pemimpin negara yang dapat mengerti kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan mereka. Dan tipe pribadi inilah yang mereka temukan di dalam diri seorang Jokowi.

Karena itu, tidaklah berlebihan bila kehadiran Joko Widodo di Papua dan Papua Barat dalam masa-masa kampanye presiden selalu membawa euforia kegembiraan yang teramat dalam bagi masyarakat. Mereka begitu menerima dan mencintai Pak Joko Widodo melalui “luapan emosi” yang tak dapat diukir dengan kata-kata. Rasa empati dan simpati antara kedua belah pihak sudah begitu mengikat sehingga memungkinkan setiap pribadi dapat menerima dan diterima, mencintai dan dicintai.

Semangat semacam ini tentu saja memuat sebuah harapan besar dari “masyarakat pinggiran” kepada sang calon presiden bahwa pengalaman hidup orang Papua dengan segala kerumitan dan keprihatinan dalam bidang sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, lingkungan, dan segala aspek yang terkandung di dalamnya: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hak-hak asasi manusia (Tebay, 2012: xi) akan dapat terselesaikan.

Hal ini ditegaskan mengingat dinamika sosial-politik selama ini sepenuhnya belum berpihak kepada masyarakat Papua dan Papua Barat sehingga kerap melahirkan “tindakan-tindakan” yang dianggap “berseberangan” dengan ideologi bangsa dan negara.

Namun, tahun 2014 yang kerap disebut-sebut sebagai “tahun politik” dan sekaligus “tahun bersejarah” bagi bangsa Indonesia telah menghembuskan “angin segar” dari jendela istana presiden. “Tahun politik” karena kita akan menghadapi dua kali pemilihan umum. *Pertama*, tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. *Kedua*, tanggal 9 Juli, rakyat Indonesia kembali menentukan pilihan pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 1, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla. “Tahun bersejarah” karena bangsa Indonesia untuk keempat kalinya sejak era reformasi

kembali mengadakan pemilihan umum. Selain itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI ke-6 setelah menjabat selama dua periode berturut-turut.

Momentum bersejarah ini tentu masih menyisihkan kegelisahan besar rakyat Indonesia kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Di satu sisi, rakyat menaruh harapan kepada pemerintahan yang baru agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di lain sisi, bangsa kita sedang berada dalam masa yang sulit, karena ancaman disintegrasi bangsa sendiri.

Dalam situasi kegelisahan bangsa yang demikian, pasangan nomor urut 2: Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 (periode 2014-2019). Sontak seluruh jagat semesta bersukacita, karena sosok pemimpin negara yang dirindukan rakyat telah muncul.

Pada momentum yang membahagiakan itu, presiden dan wakil presiden terpilih dapat memanfaatkannya dengan baik untuk menegaskan identitas bangsa Indonesia yang kian memudar. Kedua pasangan itu dengan mantap “mengumandangkan” visi Trisakti yang digagas dan diperkenalkan presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno), yakni mandiri dalam kehidupan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi yang berakar dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia itu ditegaskan kembali agar bangsa yang besar ini tidak kehilangan dasar pijakan. Melalui kemandirian ekonomi, suatu bangsa akan mampu mengangkat harkat dan martabatnya, dengan dilandasi kerja keras dan kepercayaan diri, seraya mengurangi ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

Penegasan pada visi Trisakti Bung Karno menunjukkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden terpilih merupakan pemimpin yang sangat menghargai sejarah bangsa, sekaligus membuktikan diri bahwa merekalah sosok pemimpin yang dinantikan segenap warga masyarakat Indonesia.

Karena itu, dalam pidato perdana sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla (JK) membuktikan kualitas diri sebagai sosok pemimpin negara yang diimpikan segenap warga masyarakat Indonesia. Pembuktian diri itu termaktub dalam rumusan visi dan misi yang diusung, yakni “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Dengan rumusan visi ini, komitmen dan kerja keras merupakan jalan untuk mencapai cita-cita bangsa yang besar sebagaimana ditegaskan oleh Jokowi:

Hadirin yang saya muliakan,

Baru saja kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna yang amat dalam, komitmen bekerja keras mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya menyatukan hati dan tangan, ini saatnya bersama-sama melanjutkan sejarah berikutnya, yakni mencapai kejayaan Indonesia di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong sangat menjadi bekal untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan.

[...] Mengakhiri pidato saya ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI, Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia raya. Kita akan mengembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan, saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi.

Penggalan pidato perdana Presiden Joko Widodo di atas merupakan bukti “hembusan angin segar” yang ditiupkan keluar dari “jendela Istana Presiden” untuk menyejukkan setiap hati yang gelisah; berharap bahwa di atas pundak pemerintahan yang baru, kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa niscaya akan terwujud. Dengan demikian semua warga bangsa benar-benar merasakan ikut berlayar menuju Indonesia raya.

Sebagai komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa, Joko Widodo dengan penuh keyakinan merumuskan visi-misi yang berpihak kepada masyarakat banyak. Program Nawacita yang digagaskan Joko Widodo pada periode I (2014-2019) telah melahirkan pelbagai perubahan dan kemajuan bagi rakyat di seantero pelosok tanah air, tak terkecuali di Papua dan Papua Barat.

Di Papua dan Papua Barat, justru Joko Widodo memberikan perhatian ekstra. Paling tidak selama kepemimpinan Joko Widodo, baik pada periode I maupun periode II (2019-2024), boleh dikatakan paling sering melakukan kunjungan ke Papua.

Seringnya mengunjungi Papua dan Papua Barat boleh dimaknai sebagai ungkapan cinta dan kepedulian Presiden kepada warga masyarakat. Bagi Joko

Widodo, Papua perlu mendapatkan perhatian serius dalam mengupayakan kesejahteraan dan persatuan bangsa yang utuh dan menyeluruh.

Menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum secara adil, dan belum sepenuhnya menghormati hak-hak asasi manusia, maka kini peningkatan di bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan harus menjadi solusi terbaik dalam upaya menyelesaikan konflik Papua.

Kendatipun pelbagai kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat sudah digagaskan Jokowi di Papua, konflik dan kekerasan seakan sulit terselesaikan. Justru dalam tahun-tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden, berbagai kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan, dan konflik (2014-2015) tetap terjadi dan bersifat masif di Papua dan Papua Barat. Apa gerangan konflik itu terus terjadi?

Melawan Lupa: Tanam Manusia

Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Negeri emas berguguran” ini dibebaskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dari penjajahan Belanda melalui Komando TRIKORA, 19 Desember 1961. Dia menerjunkan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) di Dataran Irian Barat. Sasaran utama adalah wilayah kepala burung Papua hingga pantai selatan Irian Barat (Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Merauke).

Akibatnya, Papua Barat (*West Papua*) yang diproklamasikan bangsa Papua sebagai negara pada 1 Desember 1961 direbut oleh Republik Indonesia (RI) dan berubah menjadi Irian Barat (Irbar). Belanda kemudian menyerahkan Papua kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA-Badan Pemerintahan Sementara PBB) pada 15 Agustus 1962 di New York, yang dikenal sebagai Perjanjian New York. Kemudian 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irbar kepada Republik Indonesia.

Tahun 1969 Rakyat Papua yang diwakili oleh 1.025 anggota Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (DMP) Irian Barat secara aklamasi memilih menjadi bagian integral dari RI. Penentuan pendapat rakyat dilaksanakan 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969. Hasil Pepera kemudian dilaporkan kepada Sekjen PBB U Thant, yang selanjutnya memberikan laporan kepada Majelis Umum PBB tentang pelaksanaan Pepera di Irbar, pada 6 November 1969. Pada 19 November 1969 Majelis Umum PBB melakukan perdebatan dan pemungutan suara, dengan

hasil 84 negara setuju dan 30 negara abstain terhadap hasil Pepera di Irbar. Keluarlah Resolusi 2504 sebagai jaminan bahwa masalah Papua sudah final, yakni sebagai bagian integral dalam RI.

Patut dicatat sejumlah keberhasilan yang diraih Presiden Pertama RI Soekarno bersama Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta serta para pejuang kemerdekaan, antara lain memproklamasikan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan membebaskan Irian Barat dari pemerintahan Kerajaan Belanda. Soekarno memimpin sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 12 Maret 1967, dalam pemerintahan Orde Lama (Orla).

Selanjutnya Presiden kedua RI, Soeharto (27 Maret 1968-21 Mei 1998) membangun Irian Jaya yang sebelumnya disebut Irian Barat. Kepemimpinannya dinamakan pemerintahan Orde Baru (Orba). Presiden Soeharto mengubah nama Irbar menjadi Irja ketika meresmikan beroperasinya PT Freeport Indonesia tahun 1975 di Tembagapura, Timika. Soeharto membangun Irja sejak tahun 1970-an. Salah satu programnya adalah Program Transmigrasi, yang oleh Gubernur Irja Izaak Hindom disebut “Program Tanam Manusia”. Selain itu ada program Inpres dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian, serta penerobosan isolasi sampai ke daerah pedalaman. Keberhasilannya tampak di mana-mana.

Akan tetapi, ada juga yang berjalan diam di balik kesuksesan itu, yakni Daerah Operasi Militer (DOM) karena adanya Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang mengganggu stabilitas nasional. Terjadi kekerasan terhadap penduduk asli. Ada ratapan dalam bisikan suara yang lemah seakan tak bersuara.

Tahun 1998 terjadi Gerakan Reformasi yang mengakhiri kepemimpinan Orba. Presiden Soeharto lengser 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga RI, 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Bersamaan dengan era reformasi, muncul Gerakan Rakyat Irja untuk memisahkan diri dari NKRI, yang kemudian semakin menguat dan bergema ke seluruh dunia. Terbentuk Presidium Dewan Papua (PDP) dengan Pemimpin Besar Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal sebagai Wakil Ketua PDP.

Presiden B.J. Habibie menerima Tim 100 Utusan Rakyat Irja. Ia berdialog dengan Tim 100 pada 26 Februari 1999 di Istana Negara Jakarta. Wakil Ketua PDP, Tom Beanal membacakan Pernyataan “Merdeka” dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Presiden B.J. Habibie meminta mereka pulang dan merenungkan kembali, kemudian menyampaikan hasilnya. Namun selama sisa masa jabatannya, Presiden B.J. Habibie tidak menerima kembali Tim 100 untuk menyampaikan hasil perenungan mereka. Mungkin jawaban atas

perenungan tersebut adalah Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Presiden Habibie diganti dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 1999. Anggota MPR RI memilih K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden keempat RI dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, putri mending Presiden pertama RI, Soekarno. Era kepemimpinan Presiden Gus Dur tidak berlangsung sampai 5 tahun seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (hanya 20 Oktober 1999-23 Juli 2001). Ia dilengserkan 23 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR RI. Presiden Gus Dur yang berhati mulia itu meninggalkan kenangan sepanjang abad bagi Orang Asli Papua (OAP) antara lain sebagai berikut.

- a. Mengizinkan Kongres II Rakyat Papua di GOR Cenderawasih APO Jayapura,
- b. Membantu dana Kongres II Rakyat Papua di GOR Jayapura sebesar Rp1 Miliar.
- c. Mengembalikan nama Papua menggantikan Irian Jaya.
- d. Mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera kebudayaan, tidak lebih tinggi daripada Bendera Kebangsaan RI, Sang Merah Putih.
- e. Mengangkat wartawan Harian Umum *Kompas* asal Papua, Manuel Kaisiepo sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden kelima Republik Indonesia hingga tahun 2004.

Otsus Papua

Dalam kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wapres H. Hamzah Haz, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian Otsus Papua ini terutama sebagai bentuk keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Prioritas utama dalam Otsus adalah pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, banyak yang menilai bahwa Otsus tersebut adalah “Otsus gagal”. Memang banyak pihak mengakui bahwa Otsus tersebut belum berhasil

sepenuhnya; perlu perbaikan dan peningkatan. “Otsus adalah upaya mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dalam NKRI,” demikian Gubernur Papua, J. P. Solossa mengatakan.

Pada Pilpres 2004 PDI Perjuangan tak berhasil meraih kemenangan. Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (Menteri Polhukam dalam Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri) meraih kemenangan. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden keenam Republik Indonesia periode 20 Oktober 2004-2009, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada periode berikutnya terpilih kembali sebagai Presiden RI, 2009-2014 bersama Wapres Dr. Boediono. Dalam masa kepemimpinannya UU Nomor 21 Tahun 2001 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua agar Provinsi Papua Barat diberi Dana Otsus Papua. Dia meneruskan rencana Amandemen UU Otsus Papua, namun belum berhasil. Ia juga membangun infrastruktur, termasuk Situs Peradaban Tanah Papua di Pulau Mansinam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla menyelesaikan konflik Aceh melalui Perjanjian Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut berisi nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada Pilpres tahun 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan koalisinya berhasil meraih kemenangan. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Silaturahmi pertama Orang Asli Papua dengan presiden terpilih berlangsung 13 Agustus 2014, pukul 19.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Pertemuan berlangsung setelah Presiden Joko Widodo membuka Kongres Nasional Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP). Tokoh Papua yang hadir ketika itu antara lain Drs. August Kafiar, M.A. (*Vice President* dan mantan Rektor Universitas Cenderawasih, Jayapura); anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Simon Patrice Morin, Thony Rahael; dosen Universitas Cenderawasih Jayapura, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise; dan sejumlah tokoh lainnya. Yembise diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam Kabinet Presiden Jokowi-Wapres J. Kalla.

Silaturahmi kedua berlangsung di Balai Kota Jakarta, 14 November 2014, pukul 17.00 WIT. Dalam pertemuan kedua yang dihadiri para pemimpin Papua di Jakarta ini, yang bertindak sebagai pembicara antara lain Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diwakili oleh Pendeta Hofni Simbiak dan Joram Wambrau, S.H., Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte, S.Pd., Ketua Kaukus Parlemen Papua di DPR RI Paskalis Kosay, dan Frans Ansanay dari BARA JP wilayah Maluku-Papua.

Silaturahmi yang difasilitasi BARA JP yang dinakhodai Sihol Manulang tersebut berlangsung sangat akrab.

Sebelumnya, presiden terpilih semasa kampanye telah mengunjungi Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagai calon pemimpin bangsa, Joko Widodo telah menyaksikan kesulitan yang dialami rakyat di Tanah Papua.

Dalam pertemuan itu, Joko Widodo berkata, “Saya ingin membangun rumah kecil sebagai tempat istirahat di tepi Danau Sentani, Jayapura. Juga membangun pasar khusus untuk mama-mama Papua.” Pernyataan itu disambut tepuk tangan hadirin. Pernyataan Joko Widodo diteruskan oleh moderator yang mengatakan, “Sesungguhnya, yang dimaksudkan Bapak Presiden terpilih masa jabatan 2014-2019 adalah membangun Rumah Negara/Istana Negara di Papua seperti Istana Negara di Bogor, Istana Negara di Cipanas, Istana Gedung Agung di Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring di Bali.” Joko Widodo tertawa, tepuk tangan hadirin membahana.

Joko Widodo menyetujui untuk merayakan Natal di Tanah Papua, juga menerima putra-putri Papua untuk bekerja di berbagai Kementerian. Selain itu juga menyelesaikan konflik di Tanah Papua dalam rangka mewujudkan Papua Tanah Damai.

Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejumlah janjinya terealisasi dan sebagian masih berproses. Pada periode pertama kepemimpinannya, seperti presiden terdahulu, Joko Widodo mendapatkan kritikan yang sama dari sebagian rakyat Papua, antara lain sebagai berikut.

- a. Otsus gagal, tidak menyejahterakan Orang Asli Papua.
- b. Kembali Otsus Papua ke Jakarta. Laksanakan dialog Papua-Jakarta.
- c. Hentikan kekerasan terhadap Orang Asli Papua.
- d. Selesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.

3. Upaya Pembangunan: Pemekaran Provinsi dan Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam masa jabatan kedua 2019-2024 sebagai presiden, Joko Widodo menyongsong sepuluh tahun kepemimpinan. Sejumlah keberhasilan yang diraih antara lain sebagai berikut.

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua, antara lain sejumlah jalan trans-nasional yang dapat menghubungkan antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi.
- b. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah provinsi di Tanah Papua memberikan beasiswa dari dana Otsus untuk putra-putri

Papua studi di dalam negeri dan luar negeri, lulusan perguruan tinggi bekerja di berbagai Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain.

- c. Mengundang investor untuk menginvestasikan dana dalam bidang pengelolaan sumber daya mineral dan minyak bumi dan gas alam di Tanah Papua.
- d. Reformasi birokrasi di Tanah Papua.
- e. Memperbaiki APBN termasuk, dana Otsus Papua agar tepat sasaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus; Pasal 68A ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 ditegaskan: Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Peraturan Presiden Pasal 85 Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua mengamanatkan dibentuknya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Badan tersebut diketuai oleh wakil presiden, dengan anggota-anggota:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional,
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
- d. 1 (satu) orang perwakilan setiap provinsi di Papua.

Memasuki sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berakhir, Undang-Undang Otsus Papua yang sudah berusia 25 tahun diamandemen. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Amandemen tersebut merupakan kebijakan yang sangat spektakuler yang dilakukan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin: Memekarkan Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi 6 (enam) provinsi.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berbunyi: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi,

hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Berdasarkan pasal tersebut DPR RI dan pemerintah menghasilkan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan,
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah,
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan,
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang telah diperjuangkan rakyat selama 17 tahun.

Menyongsong sepuluh tahun kepemimpinannya, Joko Widodo meminta Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong berkoordinasi dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Arar, Sorong.

Menjelang akhir masa jabatan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ada janji yang belum terlaksana, yakni sebagai berikut.

- a. Pembangunan pasar bagi mama-mama Papua di Sorong, Papua Barat Daya.
- b. Untuk mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, perlu penyelesaian melalui Dialog Papua–Jakarta demi menghentikan kekerasan yang semakin meningkat di Tanah Papua.

Sebaiknya belajar dari Presiden ketiga RI, B.J. Habibie: berdialog dengan Tim 100 yang dipimpin Wakil Ketua PDP Tom Beanal adalah salah satu jalan terbaik. “Dialog tak akan membunuh siapa pun,” demikian Almarhum Dr. Muridan Satrio Widjojo, Peneliti Indonesia.

4. Potensi Konflik Se-Papua

4.1. Perhatian Jokowi untuk Papua dan Papua Barat

Menurut Harian *Kompas.com*, selama periode pertama (2014-2019) kepemimpinannya, Joko Widodo sudah melakukan kunjungan kerja ke Papua sebanyak 12 kali. Memasuki periode kedua sebagai Presiden RI (2019-2024), Joko Widodo memilih Papua sebagai daerah pertama yang akan dikunjunginya. Dilansir dari wawancara Harian *Kompas.com* dengan Presiden Joko Widodo pada kesempatan

kunjungan Presiden ke Papua untuk meresmikan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, pada 28 Oktober 2019, Joko Widodo dengan tegas mengatakan, “Saya ke sini sudah 13 kali, terjemahkan sendiri artinya apa.”

Perhatian, kecintaan, dan kepedulian Jokowi terhadap Papua sungguh teramat dalam. Diakuinya sendiri bahwa sejak pertama kali berkunjung ke Papua, dia melihat langsung ketimpangan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain di wilayah barat Indonesia. Karena itu, sejak awal Joko Widodo berjanji akan cukup sering berkunjung ke Papua untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang ia buat.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa pada periode kedua masa kepemimpinannya, Joko Widodo akan terus-menerus mengunjungi Papua. “Datang kunjungan ke Papua, dua atau tiga kali,” ungkapnya kepada *Kompas.com* (lihat *Kompas.com* (30/8/2022)).

4.2. Menaksir Makna Kunjungan Joko Widodo yang Terus-Menerus ke Papua

Terlepas dari jumlah kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat, ada satu hal yang patut kita diskusikan, yaitu “makna kunjungan Presiden ke Papua”. Kami berpendapat bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo yang terus-menerus ke Papua dan Papua Barat tak bisa dipisahkan dari keprihatinannya terhadap ketimpangan pembangunan, kecintaan terhadap manusia Papua, dan kepeduliannya terhadap kondisi faktual kehidupan masyarakat yang jauh dari sejahtera.

Disadarinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam, perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga mudah menimbulkan konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal. Mengurangi konflik, menciptakan kesetaraan kesejahteraan rakyat, dan kebijakan pembangunan harus bisa dilakukan secara merata, proporsional, dan seimbang antara satu daerah dan daerah yang lain dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka tidaklah mengherankan bilamana Joko Widodo berhasil membangun pelbagai infrastruktur di Papua, antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan Proyek jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer yang menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Pembangunan Jembatan Youtefa. Selain sebagai penghubung dan berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG), jembatan

ini juga didesain untuk destinasi wisata. Hadirnya jembatan ini semakin memudahkan akses masyarakat yang ingin bepergian ke kawasan Pantai Holtekam (Koya), ke Skow, maupun Arso.

- c. Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Joko Widodo juga membangun infrastruktur di bidang kelistrikan. Dapat disebutkan antara lain: PLTA Orya Genyem, PLT Mini Hidro Prafi, dan saluran udara tegangan tinggi Genyem-Waena-Jayapura. Dua yang kemudian ialah Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura dengan tegangan 20 Megavolt Ampere. Lalu, yang terakhir adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berkekuatan 70 kilovolt Holtekamp-Jayapura dengan panjang 43,4 kilo meter sirkit. Dengan hadirnya fasilitas kelistrikan ini, pasokan energi listrik untuk masyarakat tetap terpenuhi.
- d. Sementara itu, pembangunan dan pembenahan Bandar Udara Sentani juga mendapat perhatian serius dari Joko Widodo. Bandara yang semula merupakan bandara kelas I, kini berubah menjadi bandar udara internasional yang dilengkapi dengan segala fasilitas yang lebih lengkap dan sudah diresmikan Presiden Jokowi pada 2017 silam.
- e. Di lain tempat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, yang dimulai dari Merauke hingga Jayapura, dengan panjang 1.098 kilometer. Pembangunan jalan perbatasan ini disebut-sebut merupakan rencana Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggir, dengan cara memperkuat daerah dan desa, membuka keterisolasian daerah pedalaman, mengurangi biaya hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Lihat <http://baliexpress.jawapos.com/tag/papua>. Diakses pada Jumat, 28 Juli 2023, pukul 11.30)

4.3. Keberhasilan Kebijakan Program Pembangunan Jokowi

Memimpin Indonesia selama lima tahun, periode I (2014-2019), Presiden Joko Widodo dikagumi warga masyarakat karena pelbagai prestasi yang diraihinya. Keberhasilan Program Nawacita yang digagasnya sungguh dirasakan oleh warga masyarakat di seantero Indonesia. Setelah empat tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia, beberapa prestasi yang sering dibanggakan Presiden Joko Widodo antara lain sebagai berikut.

Pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo terus mempercepat pembangunan nasional, terutama infrastruktur. Seperti yang dikatakan dalam suatu pidato kenegaraan pada 17 Agustus, tercatat kurang lebih empat tahun tol

laut terus dikuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Selain itu, dari tahun 2015 sampai 2017 sudah terbangun jalur kereta api dengan panjang kumulatif sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah beroperasi. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT yang berhasil dibangun.

Pembagian Sertifikat Tanah. Pembagian sertifikat tanah menjadi program andalan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan bangga Joko Widodo mengatakan bahwa penerbitan sertifikat tanah sudah mencapai jutaan. “Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” jelas Joko Widodo saat membacakan pidato kenegaraannya, 17 Agustus 2018. Bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus mengengcangkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk perhutanan sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

BBM Satu Harga. Pemerintah melakukan terobosan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah program BBM satu harga yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan. PT Pertamina (Persero) mencatat, sampai dengan minggu pertama September 2018 telah mengoperasikan 77 titik BBM Satu Harga. Dengan BBM satu harga, warga di Tolikara Papua yang sebelumnya membeli Premium dengan harga kisaran Rp25.000,00-Rp40.000,00 per liter, kini bisa menikmati harga Rp6.450,00 per liter. Demikian pula daerah lainnya bisa mendapatkan Premium dengan harga Rp6.450,00 dan Solar Rp5.150,00 per liter.

Merebut Tambang dan Migas dari Tangan Asing. Di tangan Presiden Joko Widodo sumber kekayaan alam berupa tambang dan minyak serta gas (migas) yang dikuasai pihak asing berhasil direbut dan pemerintah berhasil menguasai mayoritas pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas 51% saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian pengambilalihan aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di

Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional, Medco Energi. Setelah itu Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. (Lihat *merdeka.com*, dengan judul “Deretan Prestasi Jokowi yang Sering Dibanggakan”. Diakses pada 28 Juli 2023, 11.35)

Selain pencapaian-pencapaian di atas, Erick Tohir, Ketua KTN Joko Widodo juga merilis 18 poin keberhasilan dan kemajuan yang sangat dirasakan masyarakat pada periode I kepemimpinan Presiden Joko Widodo, antara lain sebagai berikut.

- a. *Harga-harga terkendali*: Pada masa pemerintahan Joko Widodo, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. *Kemiskinan terendah*: Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga, pada Maret 2018, mencapai kemiskinan terendah sepanjang sejarah.
- c. *Semakin banyak warga yang bekerja*: Perekonomian yang menarik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka.
- d. *Terjaminnya kehidupan warga*: Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah.
- e. *Kualitas hidup meningkat*: Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik.
- f. *Tingkat pendidikan membaik*: Wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mengalami peningkatan sehingga dapat mendorong kualitas SDM.
- g. *Penguasaan aset mulai menyebar*: Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada akhirnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
- h. *BBM satu harga*: Hingga Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama.
- i. *Membangun kawasan perbatasan*: Pembangunan infrastruktur di NTT meliputi ruas Dufala–Nualain, ruas Motamasin–Laktutus–Dafala, dan ruas

- Haliwen–Sadi–Asumanu–Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km, dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan misalnya Balai Karangan–Entikong–Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km, dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km. Pembangunan infrastruktur di Papua, seperti: Segmen 1, yaitu Jayapura–Arso–Waris–Yetti; Segmen 2, yaitu Yetti–Ubrub–Oksibil; dan Segmen 3, yaitu Oksibil–Tanah Merah–Muting–Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km, dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km. Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- j. *Poros maritim kian nyata*: Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan. Indonesia telah memiliki 12 SKPT dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.
- k. *Perizinan berusaha makin mudah*: Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan men-cabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat. Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani mengungkapkan penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia (16/06/2018). “Bagi kami dunia usaha ... ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia karena ini salah satu keluhan utama bagi investor ... selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.
- l. *Peringkat investasi membaik*: Moody’s, Fitch, dan Standard Poor menyatakan bahwa Indonesia layak investasi pada tahun 2018, di mana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi pada tahun 1992. “Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia,” katanya.
- m. *Daya saing membaik*: Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.

- n. *Proyek strategis nasional*: Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam proyek strategis nasional. Berdasarkan Perpres nomor 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
- o. *Komitmen membangun desa*: Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pada tahun 2017 dana desa mencapai Rp60 triliun dan transfer daerah pada tahun 2017 adalah Rp704,92.
- p. *Insentif pajak UMKM*: Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkat sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal. Menurut PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%.
- q. *Kredit usaha rakyat*: Akses pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci, selain akses terhadap aset. Pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga kian murah, hingga 7% pada 2018. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2017 sebanyak Rp69,9 triliun, yaitu 65,53% dari target Rp110 triliun dengan penyaluran KUR dibagi tiga, yaitu KUR Mikro 71%, KUR Ritel 28%, dan KUR TKI 0,3%.
- r. *Distribusi aset untuk rakyat*: Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses melalui program Reforma Agraria. Capaian redistribusi aset sampai dengan Agustus 2017 adalah 245.097 bidang dan 187.036 hektare. Sementara, capaian legalisasi aset sampai dengan Agustus 2017 adalah 2.861.556 bidang dan 508.391,11 hektare dengan total capaian redistribusi dan aset dan legalisasi aset 3.106.653 bidang dan 695.427,11 hektare. (Lihat <http://redaksi.okezzone.com/detail/andrea-heschaida-nugroho-2962>. Diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023, 10.30)

4.4. Potensi Konflik Papua dan Papua Barat

4.4.1. Mengidentifikasi Sumber Konflik

Kenangan penderitaan (*memoria passionis*) yang sudah lama menguasai alam pikiran masyarakat Papua telah menjadi luka yang sulit disembuhkan. Permasalahan terkait perbedaan ideologi politik yang disebabkan antara lain oleh perbedaan penafsiran sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI menjadi hambatan

untuk membangun dan juga menjadi konflik yang bisa destruktif. Oleh karena itu, sebuah institusi dari Komisi Eropa mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar yang menjadi sumber konflik di Papua. *Pertama*, dikaitkan dengan Kebebasan Penentuan Pendapat (*Act of Free Choice*) tahun 1969. *Kedua*, dikaitkan dengan gelombang kehadiran kaum migran non Papua yang masuk ke Papua dengan segala perbedaan etnis dan agama. Dikatakan bahwa total penduduk Papua sekitar 1.800.000 jiwa, di mana sekitar 770.000 kaum migran tinggal di Papua. Kebanyakan orang Papua merasa bahwa dengan hadirnya kelompok migran ini, orang Papua akan menjadi warga kelas II di atas tanahnya sendiri, dan dalam waktu lama akan melahirkan kekerasan dan diskriminasi. *Ketiga*, kebijakan pembagian penghasilan sumber daya alam Papua tidak wajar antara provinsi dan Jakarta (bdk. Tebay, 2012:15-16).

Sementara itu, tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengidentifikasi adanya empat sumber konflik yang terjadi di Papua. Keempat sumber konflik itu antara lain: 1) marginalisasi dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, 2) kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. 3) kekerasan negara pada masa lalu, dan 4) kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.

Menguatnya konflik-konflik di atas dan kurangnya perhatian negara untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada kerap melahirkan tindakan-tindakan subversif dari masyarakat asli. Protes masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM, menuntut keadilan, kebenaran, dan kedamaian di muka umum justru kerap dijawab dengan tuduhan makar dan separatis. Akibatnya, aparat keamanan dengan mudah melakukan tindakan represif terhadap masyarakat.

Akumulasi dari pelbagai persoalan yang terjadi sejak Papua bergabung dengan NKRI dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan yang sepenuhnya belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah melahirkan upaya perjuangan untuk membebaskan diri dari NKRI.

Situasi traumatis ini membuat orang-orang menjadi takut, hidup tidak tenang, dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Akhirnya, penduduk asli lalu memandang bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia dan kaum pendatang hanyalah sebagai musuh, yang kapan saja dapat bertindak arogan dan menyusahkan hidup mereka.

Kuatnya sikap saling curiga dan ketidakpercayaan terhadap orang lain semakin mempertajam situasi ketegangan dan konflik antara penduduk asli dan kaum pendatang. Neles Tebay menulis:

Selama kedua belah pihak (Pemerintah Indonesia dan Orang Asli Papua, *pen*) memandang satu sama lain sebagai musuh, dan selama hubungan di antara mereka diwarnai oleh sikap saling mencurigai dan saling tidak percaya, selama itu pula konflik Papua akan terus melahirkan berbagai percikan dalam bentuk aksi kekerasan.¹

Kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Papua baik melalui ujaran rasisme, stigma negatif, dan penembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI-POLRI, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), masyarakat sipil, maupun Warga Negara Asing (WNA) merupakan indikator bahwa ketegangan dan konflik di Papua masih terus terjadi dan belum diselesaikan secara tuntas. Lalu, kapan-kah konflik itu akan berakhir? Ini merupakan pertanyaan yang agak sulit dijawab dan sekaligus menjadi dilema bangsa. Meski demikian, patut diakui bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua adalah melalui pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Hal ini ditekankan karena maksud utama diberikannya Otsus adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.² Maka pada prinsipnya, Otsus diberikan agar pemerintah daerah dan masyarakat Papua bisa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Meskipun Otsus telah diberikan, sebagian orang menilai bahwa Otsus gagal dalam memberdayakan masyarakat asli Papua. Disinyalir bahwa kegagalan Otsus terjadi karena orang Papua tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya setelah pemberlakuan UU Otsus, kendati triliunan rupiah sudah dikucurkan ke Papua setiap tahun. Bukan hanya itu, rendahnya mutu pendidikan, kematian puluhan orang asli Papua karena kolera, hutan yang diambil alih dan dibabat oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu, banyaknya orang miskin di kampung-kampung, dan kesengajaan pemerintah dalam melanggar penetapan

1 Neles Tebay, hal. 145.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Jakarta: Departemen Kominfo, Tahun 2005, hal. 83.

3 *Ibid*, hal. 81.

UU Otsus⁴ diyakini merupakan sejumlah alasan atas “kegagalan implementasi Otsus” di Papua.

4.4.2. Adakah Solusi yang tepat?

Dinamika sosial politik yang terjadi di Papua sebagaimana diuraikan di atas telah mendapat “angin segar” dengan munculnya Joko Widodo sebagai presiden. Selama dua periode masa kepemimpinan Pak Joko Widodo, berbagai keberhasilan program pembangunan telah dicapai. Warga masyarakat pasti bangga atas pencapaian-pencapaian program pembangunan yang ada, termasuk juga di Papua dan Papua Barat. Melalui pelbagai program pembangunan dan kebijakan, Indonesia mendapat “wajah baru” sebagai salah satu negara maju dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Namun, pada situasi yang sama, persoalan penembakan gelap oleh Orang Tak Dikenal (OTK), pelanggaran HAM berat, diskriminasi dan kriminalitas yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil semakin masif terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada situasi semacam itu, pertanyaan menarik yang muncul adalah “Apa yang salah sehingga kendati pun berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah terlaksana, konflik terus tumbuh subur di Papua?”

Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam upaya pembangunan infrastruktur dan kebijakan politik kesejahteraan belum menyentuh akar persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, segala upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah masih dinilai hanya sebagai “kepentingan pemerintah semata” dan bukan sebagai “kebutuhan yang diharapkan” masyarakat. Selama cara pandang semacam ini belum diubah, selama itu pula sebegus apa pun kebijakan pembangunan yang dilakukan, masyarakat tetap merasa kurang. Dengan kata lain, pelbagai pencapaian dalam bidang pembangunan yang sudah diwujudkan pemerintah hanya dianggap sebagai “bentuk kebaikan hati” pemerintah sambil sengaja melupakan persoalan mendasar yang justru menjadi “kegelisahan dan kecemasan” masyarakat kecil, miskin, dan terpinggirkan.

Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa upaya penyelesaian konflik Papua secara utuh dan menyeluruh perlu adanya penyelidikan secara cerdas dan cermat; perlu diagnosis yang tepat atas akar persoalan dan kekuatan-kekuatan di balik persoalan tersebut. Dengan jalan itu, solusi penyelesaian konflik yang ditawarkan

4 Bdk. Tebay, hal. 124.

juga tepat sasaran. Bila hal ini tidak diperiksa secara cerdas, selama itu pula bara konflik kepentingan akan terus bergema di Papua dan Papua Barat.

5. Penutup

Bara konflik Papua bisa dipadamkan asalkan semua pihak mendukung program pembangunan dan kebijakan-kebijakan politik Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat secara utuh dan menyeluruh. Kepedulian dan keprihatinan Jokowi kepada Papua dan Papua Barat terbilang sangat luar biasa. Kunjungan yang terus-menerus ke Papua mesti dimaknai sebagai sinyal dan “kode harapan” bahwa konflik di Papua bisa terselesaikan. Meski diakui bahwa konflik di Papua merupakan persoalan yang ruwet dan rumit karena sudah berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat asli sejak Papua terintegrasi ke dalam NKRI.

Persoalan mengenai perbedaan ideologi politik yang disebabkan antara lain karena perbedaan penafsiran sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI menjadi hambatan untuk membangun dan menjadi konflik yang bisa destruktif. Juga, program transmigrasi besar-besaran yang terkesan dipaksakan pemerintah pusat telah membawa persoalan horizontal yang kapan saja berpotensi konflik. Apalagi, didukung dengan kebijakan pembagian penghasilan sumber daya alam Papua yang tidak wajar antara provinsi dan Jakarta telah memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, konflik terus terjadi dalam kehidupan bersama.

Protes masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM berat, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakdamaian di depan umum, ditanggapi dan dibalas dengan tindakan represif oleh aparat keamanan. Ruang demokrasi sungguh-sungguh dibungkam. Bahkan, protes masyarakat tersebut dengan mudah dituduh sebagai makar atau separatis yang memungkinkan tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan.

Atas tindakan yang dianggap diskriminatif ini, upaya memisahkan diri dari cengkeraman NKRI merupakan solusi tepat. Supaya meredam tuntutan merdeka (“M”), status Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada Papua dan Papua Barat. Awalnya, kebijakan otonomi khusus telah memberikan harapan bagi orang asli Papua. Banyak orang berpandangan bahwa kebijakan ini sebagai solusi yang paling realistis dan komprehensif terhadap pelbagai permasalahan di Papua.

Namun dalam praksisnya implementasi UU Otsus dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan bersama. Masalah-masalah mendasar di Tanah Papua masih belum dituntaskan karena UU Otsus tidak diterapkan secara konsisten. Justru saling

tuduh dan melempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai penyebab kegagalan dari implementasi UU Otsus di Papua.

Tahun 2014, dengan tampilnya Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, hembusan angin segar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Segera pelbagai program pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan. Dua provinsi yang mendapat banyak perhatian dari Presiden adalah Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan politik lainnya dibuat dengan harapan dapat menjawab persoalan hidup masyarakat Papua. Pelbagai keberhasilan dalam bidang pembangunan dicapai secara gemilang oleh Jokowi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa konflik dan kekerasan di Papua dan Papua Barat tak kunjung terselesaikan pula.

Karena itu, perlu adanya pendekatan yang baru dalam menanggapi persoalan Papua dan Papua Barat. Mengubah cara pandang terhadap kebijakan pembangunan dan mengenali gerak kekuatan-kekuatan lokal yang berpengaruh merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan konflik. Diagnosis yang tepat terhadap akar persoalan Papua akan melahirkan solusi yang tepat juga. Bila tidak, bara konflik Papua akan terus menyala.

Daftar Pustaka

- Departemen Komunikasi dan Informatika Badan Informasi Publik Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Depkominfo.
- Jacobus Perviddya Solossa, (2005). *Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 21 dan Peraturan Perundang-Undangan Lanjut, Jakarta 2011.
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Tebay, Neles. (2009). *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- _____. (2012). *Angkat Pena demi Dialog Papua: Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011*. Yogyakarta: Interfidei.
- Tim Penulis SKPKC. (2016). *Memoria Passionis Papua: Potret Hak Asasi Manusia Selama 2015*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Jayapura.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen I 19-10-1999, Amandemen II 18-08-2000, Amandemen III 10-11-2001, dan Amandemen IV 10-08-2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Joko Widodo: Pemimpin yang Melayani

WILHELMUS KAMAMAS

Di sekitar kita ada banyak perubahan. Kita dapat menemukannya dalam segala bidang kehidupan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan iptek yang tanpa henti. Sebuah istilah yang pas untuk menggambarkan perubahan dunia sekarang adalah bahwa dunia hanya selebar daun kelor. Tidak ada sekat-sekat yang memisahkannya. Semuanya mudah terakses. Keterbukaan dan fleksibilitas tampak di depan mata. Dunia terbuka bagi siapa saja, tua dan muda, dari kota sampai pedesaan. Kita mengikuti semua perkembangan yang ada sambil mensyukuri semuanya. Dalam situasi demikian kita harus bersikap mawas diri agar tidak terseret dan terombang-ambing dalam arus globalisasi tanpa kendali.

Masyarakat Indonesia dapat menjumpai dan menggunakan berbagai dimensi perkembangan saat ini dan pada masa depan demi memenuhi kebutuhan hidup. Segala sesuatu yang diakses dalam perkembangan dunia modern ini tidak bisa diserap begitu saja, sebab ada yang dapat memenuhi standar kebutuhan hidup bermartabat dan sejahtera, namun ada juga yang tidak. Dibutuhkan rambu-rambu yang tepat demi memfilter aneka perkembangan dan kemajuan pesat ini. Hal ini amat penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai dasar berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat harus diutamakan sebab nilai-nilai ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, rambu-rambu ini adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan Pancasila. Dasar negara ini telah teruji kokoh, kuat, dan bertahan dalam berbagai cobaan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Maka itu, dasar negara ini harus dijaga dan dipelihara serta diamalkan dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, seturut perkembangan modernisasi. Setiap orang harus menjiwai dan mewujudkan dasar negara ini. Namun, dasar yang kokoh ini perlu ditopang pula oleh kepemimpinan yang bijaksana dan pro rakyat.

Kepribadian dan Kebijakan Joko Widodo

Kepribadian dan kebijakan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dua hal tersebut melekat dalam satu jiwa. “Kepribadian” dalam *Kamus Bahasa Indonesia* adalah “sifat hakiki yang tercermin pada seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang lain atau bangsa lain”.

Thobias Pepet (20 tahun), seorang pemuda dari Kampung Warse, Kabupaten Asmat mengatakan bahwa Joko Widodo itu baik sebab bisa melihat masyarakat dari dekat. Ia melayani masyarakat dengan baik, seperti program bantuan rumah untuk masyarakat Asmat.

“Bapak Joko Widodo baik sekali dalam membangun Indonesia sebab banyak perubahan terjadi tidak hanya di pusat kota-kota besar, tetapi sampai ke pelosok dan pedalaman seperti kita di Asmat, sehingga masyarakat bisa merasakan betul adanya perkembangan di kampung-kampung,” ungkap warga Kampung Aworet bernama Mathias Mberak (61 tahun), pensiunan TNI AD sejak 2015 yang lalu.

Felix Fatlolon (72 tahun), seorang pensiunan guru dan sedang menetap di Kamur, Distrik Pantai Kasuari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepribadian yang baik maka segala kebijakan dan kerja nyata juga tercermin dari kepribadiannya yang baik itu.

Ditambahkan lagi oleh Isaias Kamamas (79 tahun), seorang petani yang masih aktif bekerja di kebun dan kerja kopra dari kampung Arui Bab, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sempat berlibur ke Agats, bahwa sifat hakiki Joko Widodo adalah melayani dengan cinta dan kasih Tuhan: ada kemurahan hati, kerendahan hati, sabar dan solider, ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ia mengatakan demikian sebab teringat ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa tahun lalu dan dalam sidang MPR DPR bulan Agustus 2023 yang lalu beliau mengenakan pakaian adat Tanimbar. Ia kagum dan bangga dengan kunjungan Presiden ke Tanimbar, suatu kunjungan bersejarah yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya.

Kapolsek Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Ipda Sugiarto (51 tahun) asal Sulawesi Tengah, mengungkapkan kekagumannya kepada Presiden dengan mengatakan bahwa Presiden memiliki komitmen, ketegasan, dan prinsip yang kuat sehingga Indonesia mengalami banyak perubahan, khususnya di daerah pedalaman. Turut memberikan pendapat Antonia Amore (51 tahun), seorang PNS bidang kesehatan yang mengatakan bahwa masyarakat Asmat merasa tersentuh oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebab proses pembangunan Indonesia ini sampai ke pelosok-pelosok. Ia memiliki jiwa kebabakan. Ia menyayangi

masyarakat Asmat sehingga bisa sampai di Asmat. Ia meminta perhatian aparat setempat agar memperhatikan kesejahteraan PNS, khususnya di daerah pedalaman, sebab tidak ada kenaikan gaji.

Realitas kepemimpinan Joko Widodo saat ini menjadi alasan yang kuat bagi kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita bersyukur sebab sejak sembilan tahun lalu memiliki seorang presiden yang amat bijaksana. Selama dua periode kepemimpinannya beliau berjuang untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan. Beliau juga membawa Indonesia disegani di dunia internasional melalui berbagai kebijakan yang amat pro pada kepentingan dan kebutuhan hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa Joko Widodo memiliki pola kepemimpinan yang bersumber dari kepribadiannya sendiri. Hal itu membuat perbedaan dengan beberapa presiden Indonesia sebelumnya. Ibu Falentina Serin (39 tahun), seorang janda dan ibu dua anak yang memiliki sebuah kios kecil di Kampung Pelangi, Distrik Agats mengatakan bahwa presiden sekarang sangat berbeda dengan presiden-presiden yang lain sebab mereka belum mengunjungi Asmat, tetapi Joko Widodo sudah datang ke Agats. Joko Widodo tampil beda. Ia seorang visioner, merakyat, dan peduli terhadap rakyatnya sendiri.

Dengan menyaksikan berbagai respons masyarakat, dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang sempat saya temui, jatuh cinta kepada Joko Widodo. Hal itu dikarenakan berbagai faktor kebijakan beliau yang amat pro masyarakat.

Dengan semboyan “kerja, kerja, dan kerja” selama periode pertama kepemimpinan, beliau hendak mengajak semua masyarakat dari perkotaan sampai desa dan dari pemimpin sampai bawahan untuk memiliki semangat dalam bekerja. Beliau mengajak semua pihak untuk memiliki tangan yang kotor alias bekerja nyata. Beliau sendiri memberikan contoh dan teladan yang unggul dan ulung dalam mewujudkan cita-cita Indonesia makmur dan sejahtera, dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat, mengalami, dan turut merasakan pengalaman rakyatnya sendiri.

Sudah saatnya Indonesia harus maju. Hal ini membutuhkan semangat dalam bekerja bersama, yang menjadi warisan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Warisan luhur itu adalah sikap hidup bergotong royong. Itu adalah karakter luhur bangsa Indonesia yang perlu digali dan diimplementasikan dalam hidup berbangsa dan bernegara saat ini. Presiden Joko Widodo selalu menegaskan dalam setiap kesempatan dan dalam pidato dan tatap muka di mana-mana:

“Kalau mau maju, kita harus bekerja sebab tanpa kerja keras Indonesia akan terus tergusur, hanyut terbawa arus gelombang dan dijajah dalam berbagai aspek walaupun sudah merdeka.”

Dalam kondisi dunia saat ini yang sudah berkembang pesat, bangsa Indonesia harus berada sejajar dengan bangsa lain. Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara maupun Eropa. Beliau hendak membawa Indonesia menjadi negara besar yang mampu bersaing dalam menciptakan hal-hal baru yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia maupun kebutuhan masyarakat global. Selama ini masyarakat Indonesia hanya menjadi konsumen, sebagai penonton, dan hanya mengikuti arah kebijakan global negara-negara besar yang telah maju.

Pada periode kedua kepemimpinan, beliau mengangkat tema “Indonesia Maju”. Beliau meyakini bahwa dengan lima tahun bekerja keras, pasti ada hasilnya. Hasil itu tersebar di seantero tanah air Indonesia tercinta ini.

Berbagai Keberhasilan dari Kebijakan yang Menyentuh Hati Masyarakat

Beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh menyentuh rakyat banyak. *Pertama*, menyamaratakan harga kebutuhan bahan pokok hidup masyarakat Indonesia. Implementasi dari kebijakan ini adalah membangun transportasi tol laut dan jembatan penghubung desa dan kota, harga bahan bakar minyak di semua daerah, dari pusat hingga pedalaman, sama. *Kedua* adalah pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi emas Papua. Implementasi yang nyata adalah *Papua Youth Creative Hub* yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo demi pengembangan manusia Papua. *Ketiga* adalah pengembangan perekonomian masyarakat di pedesaan. Implementasinya adalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan sebagai penghubung desa dan kota, tersebar di seluruh penjuru Indonesia. *Keempat* adalah penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam Indonesia yang amat kaya, seperti Freeport. *Kelima* adalah mempermudah akses administrasi perkantoran. Implementasinya adalah memutuskan berbagai sekat birokrasi yang berbelit-belit. Sebuah istilah yang cocok diterapkan adalah mempermudah hal-hal yang sulit. Sebelum Joko Widodo memimpin, segala urusan yang sebenarnya cepat dan mudah selalu dipersulit.

Masih banyak kebijakan dan implementasi yang amat berguna bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia pada masa sekarang demi

menyongsong hari depan Indonesia yang lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Segala bentuk kebijakan ini menuju pencapaian cita-cita negara Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kesejahteraan ini milik semua orang. Kesejahteraan ini bukan hanya dimiliki segelintir orang, namun bebas dicapai oleh setiap orang yang berdiam di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tua muda, laki-laki dan perempuan. Dengan berbagai perkembangan ini, masyarakat dan bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, juga dengan negara-negara maju. Semuanya terwujud dari semangat gotong royong dan kerja keras presiden bersama segenap masyarakat Indonesia.

Papua, khususnya Merauke, adalah salah satu daerah yang berada di ujung paling timur Indonesia. Walaupun jauh, nuansa kehadiran beliau tetap ada dan terasa hangat. Ada ungkapan: jauh di mata namun dekat di hati. Ungkapan ini cocok dialamatkan kepada beliau, Presiden Joko Widodo. Merauke, yang berada jauh dari ibu kota dan segala bentuk perkembangan dunia dalam hal ini iptek kini boleh berbangga hati, sebab Bapak Presiden selalu mencintai orang Papua. Ia menaruh minat dan hatinya yang mulia untuk selalu berkunjung. Maka, masyarakat dari berbagai profesi yang kami temui mengungkapkan kekaguman dan simpati, cinta, dan bangga berlebih kepada beliau. Tidak salah masyarakat bicara dari mulut ke mulut bahwa Joko Widodo selalu ada di dalam hati kami semua orang Papua. *Dormomoo*.

BAGIAN 4

.....

Hak Asasi Manusia

Ke(tidak)bebasan Pers di Papua Satu Dekade Terakhir

IGNATIUS HARYANTO

Abstrak

Tulisan ini hendak menggambarkan kondisi ke(tidak-)bebasan pers di Papua dalam sepuluh tahun terakhir, dan menjelaskan apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di sana, serta apa alasan terjadinya kondisi tersebut. Media berfungsi memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Ketidakbebasan pers di Papua mengganggu proses penyelesaian masalah di tempat tersebut, dan jika lebih bebas, media bisa lebih berkontribusi untuk menjadi jembatan bagi para pihak yang berkepentingan untuk terjadinya dialog ala demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: *Pers, Papua, Demokrasi Deliberatif*

Pengantar

Media dan arus informasi merupakan dua faktor yang menentukan apakah suatu negara atau suatu daerah dapat disebut negara demokratis atau tidak. Pendekatan yang banyak dikenal menggambarkan bahwa dalam negara yang demokratis, media memiliki kebebasan yang relatif, dan pada kondisi ini pula, arus informasi bergerak dengan bebas tanpa adanya sensor ataupun pembungkaman terhadap arus informasi yang ada.

Joseph Stiglitz, ekonom yang pernah meraih penghargaan Nobel Ekonomi, dalam salah satu bukunya, *Globalization and Its Discontent* (2002) menyebut kondisi yang ia sebut sebagai *asymmetries of information*—kondisi di mana terjadi perbedaan kepemilikan informasi, yang bisa terjadi antara para pekerja dan majikannya, antara kreditor dan debitor, antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, dan juga antara pemerintah dan masyarakatnya. Dengan konteks pemulihan ekonomi yang terjadi pada krisis Asia maka prinsip transparansi,

keterbukaan, dan mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah adalah bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan dalam proses perbaikan ekonomi tadi.

Lebih jauh Stiglitz mengatakan, kultur kerahasiaan memberikan peluang kepada para pejabat pemerintah untuk menghindari kebijakan mereka dianalisis, dievaluasi, ataupun dikritik oleh masyarakat. Bagi para pejabat pemerintah memang memelihara kultur kerahasiaan seperti ini membuat hidup mereka menjadi lebih nyaman; mereka bisa bertindak sesuka hati tanpa ada yang mengontrol, dan kerahasiaan juga memungkinkan para pejabat pemerintah untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Stiglitz juga mengemukakan bahwa kultur kerahasiaan melecehkan demokrasi. Suatu pemerintahan baru bisa dikatakan demokratis dan bisa dipercaya (*accountable*) jika pemerintahan ini mau terbuka tentang apa saja yang dilakukan pemerintahnya kepada masyarakat luas.

Sementara itu James Curran (2011: 1), guru besar Komunikasi di Goldsmiths, *University of London* mengatakan bahwa jika media hendak bebas dari pemerintah, media perlu diorganisasi sebagai pasar, bukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan, dan untuk membuat media menjadi pelayan demokrasi yang utuh, mereka harus dibantu oleh para profesional yang mengedepankan keakuratan, tidak memihak, dan bernilai informasi.

Sementara itu Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika Serikat pada abad ke-18 menyampaikan pandangannya yang visioner tentang informasi, di mana ia mengatakan, "*Information is power, safety and happiness, and ignorance is weakness.*" Informasi merupakan energi untuk keselamatan dan kebahagiaan. Informasi mencerdaskan, memajukan, dan membahagiakan. Singkatnya, informasi menjadi pendulum perubahan, bahkan energi peradaban (Hasugian 2021: 6).

Laura Neuman, dalam "Pendahuluan" buku *Access to Information A Key to Democracy* (2002: 1) menyebutkan bahwa "Pengetahuan adalah kekuatan, dan transparansi adalah obat untuk menghadapi kegelapan di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi". Demokrasi bergantung pada warga masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memiliki akses untuk berbagai jenis informasi yang memungkinkan mereka untuk dapat berpartisipasi dengan utuh dalam kehidupan publik, dan membantu untuk menentukan prioritas yang harus dilakukan dengan dana publik, mendapatkan akses yang sama pada keadilan, dan membuat para pejabat bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakannya.

Lebih jauh Neuman mengatakan, jika pemerintah dan agen-agen lainnya menampilkan banyak kerahasiaan maka warga tak dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan masalah publik, dan pers pun hanya dapat

berspekulasi serta memelihara suburnya rumor. Akses informasi yang buruk akan menyuburkan korupsi dan kerahasiaan memungkinkan terjadinya negosiasi tertutup dalam hal menentukan kebijakan publik yang akan menguntungkan segelintir orang atau masyarakat kebanyakan. Kurangnya informasi menghalangi kemampuan warga masyarakat untuk mengakses keputusan yang diambil oleh para pemimpin mereka, dan bahkan tak mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait individu yang akan mereka pilih sebagai wakil mereka nantinya.

Dalam novelnya yang sangat terkenal, 1984, penulis Inggris George Orwell menggambarkan bagaimana negara yang otoriter mengawasi penuh apa yang dilakukan oleh warga sehingga tak ada sedikit pun celah yang memungkinkan warga masyarakat bisa menghindari dari pengawasan negara. Dalam istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan pula oleh Michel Foucault, negara menjadi semacam *panopticon* yang menjadi menara pengintai terhadap isi penjara, dan para penghuni penjara tidak mengetahui bahwa mereka ada dalam situasi yang diawasi terus-menerus. (<https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-surveillance-jeremy-bentham>)

Dalam konteks seperti itulah artikel ini ditulis, di mana Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi wilayah yang diawasi terus-menerus oleh negara agar tidak melakukan sesuatu yang akan membahayakan negara itu. Sebagai wilayah luas di sebelah timur wilayah Indonesia, Papua sejak awal bergabung dengan Indonesia menimbulkan kontroversi yang tak berkesudahan. Ketika masuk dalam pemerintahan Orde Baru, wilayah yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya juga menjadi wilayah yang selalu mendapatkan pengawasan ketat pemerintah pusat. Ketika kekuasaan Orde Baru selama tiga puluh dua tahun berakhir, wilayah ini pun sedikit mengalami perubahan. Ada semangat demokratis seolah berhembus, terutama ketika Presiden Abdurrahman Wahid memegang kekuasaan. Namun semangat itu tidak lama bertahan karena kebijakan yang diambil pemerintah pusat setelah itu hingga saat ini kembali menunjukkan pergerasan atas kebebasan yang ada di Papua.

Kekerasan demi kekerasan terjadi di wilayah ini, dibarengi dengan kehadiran aparat keamanan yang lebih banyak daripada hadirnya guru ataupun dokter sehingga kekerasan akhirnya menjadi tak putus-putus dan situasi damai menjadi suatu utopia, padahal ada banyak masalah mendasar yang membutuhkan perhatian besar, baik soal pendidikan, kesehatan, pengakuan atas hak masyarakat, serta isu yang terkait masalah kesenjangan antara wilayah Papua dengan wilayah Indonesia lainnya.

Persoalan yang ada di Papua memang sangat kompleks, mulai dari soal lahan untuk hutan, perkebunan, pertambangan, hak masyarakat adat, degradasi lingkungan, pendidikan yang tertinggal, sarana kesehatan yang tidak memadai, dan lain-lain. Belum lagi jika kita membahas terkait aktor dan institusi tertentu yang memiliki kepentingan di Papua. Berbagai masalah tersebut hadir dan menuntut adanya solusi. Media dalam hal ini selain memiliki fungsi informasi untuk menyampaikan sejumlah masalah di atas, juga memiliki fungsi pendidikan dengan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Media juga memiliki fungsi untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah. Semua fungsi tersebut diakui dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Ada pepatah yang mengatakan “Jika tak pandai menari, jangan salahkah lantai yang berjungkat”. Pepatah ini jika diterapkan dalam konteks media bisa diartikan demikian: jika ada masalah yang memang diangkat oleh media, jangan salahkan medianya, tetapi salahkan mereka yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Atau dalam bahasa yang sering digunakan di Barat: “*Don’t shoot the messenger*” yang merujuk pada kondisi jangan menyalahkan media jika media menyampaikan berita yang negatif ataupun berita yang menggugat. Media harus dilihat sebagai penyampai pesan, baik itu pesan positif atau negatif, dan media harus tetap diperlakukan tanpa gugatan ataupun kecaman atas berita negatif yang dibawanya. Justru isi pesan itulah yang seharusnya lebih diperhatikan, mengapa sampai terjadi situasi tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang diangkat tersebut?

Dalam konteks besar seperti inilah maka tulisan sederhana ini mencoba untuk menelaah kondisi yang terjadi pada media di Papua. Mengapa Papua selalu memiliki nilai rendah ketika dinilai dalam Indeks Kemerdekaan Pers yang dilakukan oleh Dewan Pers, dan apakah akan ada kemungkinan bahwa kebebasan media di Papua akan menjadi lebih baik pada masa mendatang?

Papua dalam Ranking Indeks Kebebasan Pers

Papua sudah beberapa tahun terakhir ini menempati posisi terbawah atau kedua terbawah dalam ranking kebebasan pers sebagaimana diumumkan oleh Dewan Pers. Anggota Dewan Pers, M. Agung Darmajaya, misalnya, dalam diskusi publik “Masa Depan Kebebasan Pers Papua” di Jayapura pada akhir Januari 2022 memaparkan bahwa hasil survei Indeks Kebebasan Pers Papua 2021 turun menjadi 68,87 dibandingkan pada 2020 yang sebesar 70,04. (<https://www.antaranews.com/berita/2673129/dewan-pers-sampaikan-indeks-kebebasan-pers-di-papua>)

Dengan nilai tersebut dalam konteks Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2021, Provinsi Papua berada dalam kategori “agak bebas”. Dengan nilai tersebut Provinsi Papua menempati ranking ke-33 dari 34 provinsi yang disurvei. Nilai ini menunjukkan penurunan 1,16 poin dibandingkan dengan survei yang sama pada 2020, yakni 70,04.

Disimpulkan oleh laporan yang sama, ada berbagai faktor yang menyebabkan nilai Provinsi Papua rendah; mulai dari informasi yang tidak terbuka, masih ada kekerasan terhadap wartawan baik berupa intimidasi, teror, perusakan dan perampasan alat atau data liputan, maupun kekerasan fisik. Di satu sisi, masih ditemukan adanya kesalahan dalam pemberitaan karena lemahnya profesionalisme media. Agung mengatakan, ada 27 media siber dilaporkan ke Dewan Pers atas keluhan pemberitaan yang keliru.

Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Papua masih sangat buruk, bahkan berdasarkan Dewan Pers 2019, Papua berada di posisi terendah dari 34 provinsi di Indonesia, dengan skor IKP 2019 pada angka 66,65, sedangkan Papua Barat berada di posisi terbawah. Hak-hak jurnalis untuk meliput berita, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi mengenai keadaan yang ada di Papua sesungguhnya masih dalam keterbatasan.

Wartawan memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi karena merekalah yang mencari dan menyebarkan suatu informasi. Jika pers mengalami keterbatasan dalam mencari informasi, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang faktual dan benar? Pers di Papua tidak gampang mencari maupun menyebarkan berita. Mereka mengalami ragam hambatan, kebebasan mereka sangat terbatas.

Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2021 membuat sebuah survei yang disebut Survei Indeks Keterbukaan Informasi Pusat. Dalam survei tersebut (Hasugian, *et. al*, 2021: 169-171) disebutkan bahwa Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Papua juga adalah wilayah dengan keterbukaan informasi yang rendah.

Dalam FGD yang menghadirkan para narasumber ahli, terlihat korelasi minimnya informasi publik yang harus diberikan. Berdasarkan survei terhadap sembilan narasumber ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua mengenai indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 64,88 (kategori “sedang”). Hal ini menggambarkan adanya dua orang narasumber ahli, yang merupakan perwakilan NGO/CSO dan pengusaha lokal (masyarakat), memberikan nilai yang buruk terkait

penyampaian informasi secara berkala badan publik dengan mempertimbangkan asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Penilaian yang hampir mirip juga terjadi pada indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru. Nilai yang diperoleh di setiap sub-indikator berkisar antara 30-100. Nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 65,54 (hasil nilai kategori “sedang”).

Di Papua, sumber daya alam yang melimpah tidak dikelola dengan baik. Minimnya informasi publik menyebabkan tingkat kesejahteraan rendah. Kemiskinan yang terjadi di daerah kaya sumber daya alam, seperti Papua, dikarenakan tidak ada transparansi informasi bagi semua pihak. Keterbukaan informasi publik secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran. Akses terhadap informasi merupakan salah satu instrumen untuk membantu warga keluar dari kemiskinan. Ketersediaan informasi yang cukup bisa dioptimalkan untuk mengatasi persoalan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Papua maka sangat relevan.

Tidak hanya itu, pengelolaan dana untuk kesejahteraan masyarakat pun perlu lebih transparan. Masyarakat harus mengetahui sumber pendanaan untuk pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) atau dana-dana lainnya yang sebenarnya menjadi hak masyarakat Papua. Bagaimana pemanfaatan dan pertanggungjawabannya serta sejauh mana berdampak pada kesejahteraan masyarakat, membutuhkan transparansi informasi (Hasugian, 2021: 169-171).

Bagaimana Bentuk Kekerasan yang Terjadi pada Pers dan Jurnalis di Papua?

Data dari AJI Jayapura menyebutkan, antara tahun 2021 hingga Maret 2023 telah terjadi 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Papua. Kasus kekerasan yang terkini, pada tahun ini, terjadi pada tanggal 13 Maret lalu di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Massa mengintimidasi Redaksi *Teropong News* agar menghentikan peliputan masalah *illegal logging* di Kabupaten Sorong. Apabila ancaman itu tidak dilaksanakan, wartawan media *online* tersebut akan dibunuh dan kantornya dibakar massa. (<https://aji.or.id/read/press-release/1551/pokja-keselamatan-jurnalis-tanah-papua-terbentuk.html>)

Kasus tersebut hanyalah satu contoh dari sekian banyak kekerasan yang dialami oleh jurnalis dan media yang ada di Papua, maupun mereka yang hendak meliput tentang Papua. Beberapa jenis kegiatan yang kemudian mengarah pada tindakan pers yang tidak memadai antara lain:

- intimidasi terhadap jurnalis dan media,
- sensor untuk berita yang dianggap akan membuat pemerintah pusat marah,
- sensor untuk berita yang terkait masalah kelompok separatis,
- pelambatan akses internet untuk menghambat penyebaran informasi,
- larangan bagi jurnalis untuk meliput di Papua,
- akses informasi yang tidak seimbang,
- kecurigaan terhadap wartawan, dan
- sulit melakukan keberimbangan atau kesulitan untuk melakukan cek fakta.

Selain kekerasan ataupun sensor yang ditujukan pada media di Papua, gangguan jaringan telekomunikasi adalah bentuk lain dari sensor, seperti yang terjadi pada 9 Maret 2022 di Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura. Gangguan terjadi antara jam 08.15 hingga jam 15.00 waktu setempat. Dalam catatan AJI Jayapura, antara tahun 2015 hingga 2023 sudah tujuh kali terjadi gangguan jaringan telekomunikasi yang menjurus pada upaya sensor dengan cara melambatkan jaringan komunikasi sehingga tidak memungkinkan penyebaran informasi bisa dilakukan dari Jayapura ke tempat lain, seperti Jakarta.

Pada bulan Agustus 2019 terjadi kerusuhan di Papua, dan pada saat itu pemerintah melakukan pemadaman dan pemblokiran internet di Papua. Pemerintah berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan karena ada banyak hasutan dan informasi yang tidak benar tersebar. Sebagai pihak yang memiliki tugas untuk mengendalikan situasi, cara yang dilakukan pemerintah, salah satunya, adalah dengan pembatasan transmisi informasi, pengendalian transmisi informasi, dan bukan untuk menutupi atau mematikan.

Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, mulanya, pemerintah melakukan *throttling* atau pelambatan akses internet di beberapa daerah pada 19 Agustus 2019. Kebijakan tersebut dijalankan hanya melalui siaran pers. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.) Kemudian, pada 21 Agustus, pemerintah resmi melakukan pemblokiran internet di Bumi Cenderawasih. Akibat pemblokiran internet, warga Papua sempat membakar kantor Telkom Indonesia di Jayapura.

Selama dua pekan, warga di puluhan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dibuat mengalami kesulitan dalam perekonomian dan keseharian karena tidak dapat mengakses internet. Jaringan telekomunikasi, semisal pesan singkat (SMS) dan telepon di Jayapura juga sempat terganggu. Saat itu, pihak Telkomsel

menyebut bahwa layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua mengalami gangguan untuk sementara waktu pada 29 Agustus 2019. Kemudian, pada 6 September 2019 pemerintah mulai kembali membuka akses internet di Papua. Namun, saat itu hanya dilakukan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Atas kebijakan pemblokiran internet di Papua, sejumlah lembaga seperti *South East Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam, dan ICJR menggugat Jokowi dan Kemenkominfo ke PTUN. Gugatan itu dilayangkan ke PTUN pada 21 November 2019 dengan nomor gugatan 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Setelah hampir enam bulan, gugatan mereka akhirnya dikabulkan PTUN Jakarta. Hakim Ketua, Nelvy Christin bersama dua hakim anggota, Baiq Yuliani dan Indah Mayasari memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat pada 3 Juni 2020. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.)

Kekerasan lain yang dialami oleh jurnalis Papua, sebagaimana yang terjadi pada 24 Januari 2023 ketika jurnalis Victor Mambor menerima ancaman bom di rumahnya di Jayapura. Victor yang juga pendiri media lokal, *Jubi.id*, menduga bahwa ancaman bom tersebut terkait dengan *Jubi.id* yang mengangkat pemberitaan soal mutilasi empat warga sipil di kota Mimika dan juga kasus Paniai berdarah (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230124131253-12-904182/victor-mambor-duga-teror-bom-terkait-pemberitaan-mutilasi-dan-paniai>)

Sekitar pukul 04.00 Senin, sebuah bom rakitan diledakkan di luar rumah Mambor di Jayapura, sebuah kota di Provinsi Papua, mengacu pada laporan pers yang dikatakan oleh kelompok kebebasan pers, AJI Indonesia, serta Mambor yang berkomunikasi dengan CPJ melalui *e-mail*. Mambor, editor sekaligus pendiri portal berita independen lokal, *Jubi.id* dan kontributor tetap pada *Radio Free Asia* yang berafiliasi dengan portal berita *BenarNews*, masih terjaga ketika bom meledak.

Terkait insiden bom ini, perwakilan senior CPJ (*Committee to Protect Journalists*)—kelompok yang berbasis di New York—Asia Tenggara, Shawn Crispin mengatakan, “Pihak berwenang di Indonesia harus mengidentifikasi dan menangkap semua orang di balik serangan yang baru-baru ini terjadi pada jurnalis Victor Mambor. Mambor dan portal beritanya harus bebas melaporkan berita tanpa rasa takut adanya pembalasan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pengeboman rumahnya harus diadili.”

Di luar ancaman ini, Mambor mengatakan kepada CPJ bahwa dia juga telah mengalami serangan terus-menerus, diduga karena laporan *Jubi.id* mengenai

isu hak asasi manusia yang melibatkan konflik berkepanjangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang ingin memisahkan diri. Mambor mengatakan bahwa dia juga sering menerima ancaman dan ujaran kebencian di akun media sosialnya, bahkan tahun lalu akun *twitter*-nya pernah diretas hingga akhirnya dihapus, setelah dia memposting video yang menunjukkan diduga anggota tentara nasional Indonesia melakukan pelecehan terhadap warga sipil dengan disabilitas. (<https://aji.or.id/read/press-release/1504/jurnalis-victor-mambor-menerima-ancaman-bom-di-rumahnya-di-papua-indonesia.html>)

Kecurigaan terhadap jurnalis juga dialami oleh Mambor terutama jika wartawan lokal hendak melakukan peliputan terkait demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung Papua Merdeka. Kesulitan untuk melakukan peliputan juga diakui oleh Arnold Belau, pendiri *Suara Papua*, yang sering menyuarakan berita berbeda dengan informasi resmi dari pemerintah. Arnold merasa, penampilan fisiknya sebagai warga asli Papua menimbulkan ketidakpercayaan pemerintah yang menganggap mereka pro pada kemerdekaan Papua. “Kami wartawan lokal sering dianggap bagian dari anggota Gerakan Papua Merdeka. Mereka melihat rambut gimpal dan menganggap hal itu pastilah OPM. Kami juga merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi, terkadang dijawab terkadang tidak,” ungkapnya. (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>)

Kecurigaan terhadap jurnalis dari luar Papua juga terjadi, terutama terhadap jurnalis dari luar negeri. Dandhy Laksono, pembuat film dokumenter yang juga sering membahas soal Papua, juga merasakan kesulitan meliput di Papua. “Liputan di Papua itu unik. Kami dicurigai oleh kedua belah pihak. Kami pernah dicegat oleh kelompok asli orang Papua, mereka membawa senjata tajam dan panah. Tapi di sisi lain, kami juga dicegat aparat keamanan.”

Sementara itu Heyder Affan, wartawan BBC Indonesia, pernah diusir keluar Papua saat meliput bersama wartawan BBC warga negara Australia. “Ada semacam asumsi bahwa kita datang ke sana (Papua) untuk kepentingan asing, dan tidak cukup penjelasan bahwa posisi kita itu independen dan tidak memihak kepada Pemerintah Indonesia atau FPM. Itu sebabnya beberapa kali kita liputan agak mengalami kesulitan karena alasan tersebut,” jelasnya. Heyder juga menambahkan, wartawan harus memenuhi beberapa persyaratan. “Saat meliput ke Agats, wartawan harus punya izin dari Markas Besar POLRI, bahkan keterangan resmi dari badan intelijen.” (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>)

Alam Burhanan yang menulis untuk *VOA News* menyebutkan berbagai kekerasan yang menimpa jurnalis di Papua. (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>). Ia menulis demikian: Bagi wartawan lokal, kecurigaan terhadap pers kadang kala berakhir dengan kekerasan. Wartawan *Jubi* yang meliput demo tentang kemerdekaan Papua beberapa kali terkena masalah. “Ada yang dipukuli, ditangkap, di-*bully*, atau banyak yang secara verbal,” demikian yang disampaikan Victor Mambor kepada Burhanan.

Dalam kasus lain, wartawan *Suara Papua*, Ardi Bayage, menceritakan salah satu pengalamannya ketika ia tengah meliput di Nabire pada tahun 2018. “Aparat datang dan langsung tangkap saya dan bilang saya bukan wartawan dan anggap saya demonstran FPM. Kartu pers yang saya tunjukkan langsung ditarik dan saya dicekik leher.”

Aliansi Jurnalis Independen mencatat ada 6 kasus kekerasan atau intimidasi terhadap wartawan, yang melibatkan 10 wartawan di sejumlah kota di Papua (Asmat, Manokwari, Nabire, Yahukimo, dan Jayapura). Menurut Abdul Manan, Ketua AJI, “Kalau di Papua kan kekerasan paling banyak itu kekerasan fisik dan intimidasi. Misalnya ketika wartawan meliput demonstrasi, kadang-kadang aparat keamanan entah dengan sengaja mengabaikan dia wartawan atau tidak, akhirnya menjadi korban pemukulan.”

Aparat keamanan memang sangat sensitif terkait dengan demonstrasi yang mendukung kemerdekaan Papua, karena keluarnya Timor Timur sebagai provinsi Indonesia ke-27 pada tahun 1999 menjadi suatu pelajaran besar agar tidak ada lagi wilayah di lingkungan Republik Indonesia yang kemudian memisahkan diri, apalagi Papua adalah wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat besar. Saltford (2003) menyebutkan bahwa ketidakbebasan informasi sudah terjadi sejak Papua dalam situasi tarik-menarik: apakah akan masuk ke wilayah Indonesia atau wilayah Belanda.

Dengan wilayah yang sangat luas di Papua, secara geografis sulit bagi jurnalis dari Papua untuk melakukan turun lapangan ataupun ketika diminta untuk melakukan cek fakta di Papua. Hal ini juga ditegaskan oleh Makawara da Cunha, wartawan *Wone Papua*. “Kesulitan kami adalah untuk mendapat akses bila ada peristiwa di daerah pegunungan, daerah pedalaman. Kami susah mendapatkan gambar. Ceritanya pun kami dapat dari pihak kedua atau ketiga, jadi tidak bisa bicara langsung dengan pelaku-pelaku,” paparnya kepada Alam Burhanan. (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>)

Gratianus S. Anderson Aba, wartawan *Cenderawasih Pos* juga mengakui kesulitan mendatangi lokasi untuk pengecekan fakta. “Satu-satunya transportasi adalah melalui jalur udara, pesawat udara atau helikopter kalau kita bekerja sama dengan TNI dan POLRI,” jelasnya. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh media membawa dilema tersendiri. Wartawan menganggap, dengan menumpang transportasi aparat, muncul anggapan bahwa informasi yang didapat hanya menyuarakan kepentingan satu pihak. (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>)

Victor Mambor mengakui ada rasa hutang budi pada aparat kalau menumpang transportasi mereka. “Terakhir saya ke Nduga itu, saya pulang naik helikopter tentara. Jadi, wartawan difasilitasi untuk pergi ke Nduga. Kalau situasinya seperti itu, susah bagi kita untuk membuat liputan. Kita juga akan merasa berhutang budi pada aparat. Jadi, kalau kita mau menulis yang tidak baik, tidak bisa,” jelasnya. (<https://projects.voanews.com/kebebasan-pers-papua/indonesian/main/memilah-fiksi-dan-fakta.html>)

Akar Masalah di Papua

Jika menyinggung akar masalah yang ada di Papua, sebenarnya sangat kompleks, mulai dari masalah ketertinggalan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga pengakuan atas kelompok-kelompok masyarakat adat, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia di banyak tempat di Papua. Wilayah Papua yang demikian luas dengan kota-kota yang saling terisolasi membuat hubungan antarwilayah di Papua sulit terjangkau. Dengan kekayaan alam yang sangat besar mulai dari hutan, kebun, dan tambang maka Papua pun menjadi incaran berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kerap kali pemodal yang hendak menggarap Papua bergandengan tangan dengan aparat keamanan untuk menjaga usahanya. Di sisi lain, ada aspirasi kemerdekaan yang dipelihara oleh sejumlah pihak karena melihat perlakuan pemerintah (pusat) Indonesia yang mendudukkan Papua sebagai wilayah yang mudah dieksploitasi. Sudah banyak tulisan yang menggambarkan kondisi ini, seperti yang ditulis antara lain oleh Tebay (2005), Webb-Gannon (2021), Jason McLeod (2015), Anderson (2015), dan Meteray (2016).

Ketika pendekatan keamanan lebih dikedepankan oleh pemerintah pusat dan aparat keamanan, tidak pernah terjadi suatu dialog kemanusiaan yang memadai, di mana ada peluang bagi pemerintah pusat untuk mendengarkan apa yang menjadi kemauan masyarakat di Papua. Papua dijadikan wilayah otonomi khusus dengan gelontoran uang yang sedemikian besar malah menghasilkan korupsi di

berbagai wilayah, dan sejumlah tradisi lokal, seperti makanan pun lama-lama tergerus oleh arus modal yang masuk dan mengubah cara hidup masyarakat setempat.

Pemecahan wilayah dengan hadirnya sejumlah provinsi baru di Papua, yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga tidak menjamin persoalan besar tersebut akan tertangani. Sebaliknya, yang mungkin terjadi adalah pemecahbelahan masyarakat dengan iming-iming jabatan ataupun posisi di wilayah-wilayah baru tersebut, yang semakin menjauhkan hadirnya solusi menyeluruh bagi wilayah Papua.

Hakikat Kerja Pers dan Kebebasan Pers

Pada dasarnya media atau pers bekerja dalam suatu iklim yang demokratis. Pers, seperti disebut dalam UU Pers nomor 40/1999, dikatakan memiliki sejumlah fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Terkait dengan kasus Papua ini, fungsi informasi dan fungsi kontrol sosial sangat relevan untuk dibahas. Fungsi informasi terkait dengan arus informasi yang seharusnya berjalan dengan lancar, transparan, dan berita-berita yang akurat akan sampai kepada publik secara luas lewat media massa atau pers. Dalam konteks Papua, peristiwa yang terjadi di Papua baik itu menyangkut perkembangan wilayah ataupun konflik yang terjadi di sana seharusnya mengalir dengan lancar.

Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan yang ada, mekanisme dalam dunia jurnalistik sendiri mengenal apa yang disebut *check and recheck*, ataupun mekanisme menuliskan keberatan yang dapat disusulkan, demi adanya berimbang informasi. UU Pers sendiri memberikan mekanisme penanganan kasus pemberitaan yang akan ditangani oleh lembaga Dewan Pers yang independen.

Dalam konteks yang lebih besar ketika membicarakan tentang demokrasi, pers adalah salah satu tolok ukur penting selain tolok ukur lain soal partai politik, ideologi politik yang berbeda, keberadaan oposisi politik, dan lain-lain. Media dalam hal ini harus dilihat juga sebagai suatu keberagaman, karena media juga memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks demokrasi deliberatif, media adalah suatu institusi yang memungkinkan adanya suara yang berbeda-beda, dalam demokrasi diberi kesempatan untuk menyampaikan argumennya, sebelum suatu keputusan diambil. Dalam konteks demokrasi deliberatif adalah penting untuk mendengar semua suara yang ada agar semua kepentingan bisa terwakili.

Häussler (2018: 3) menyebutkan bahwa pada tingkat yang sangat mendasar, deliberasi memungkinkan para pihak yang terlibat dalam konflik politik menyelesaikan perbedaan yang ada di antara mereka tanpa menggunakan kekerasan, dan setiap pihak terlibat dalam diskusi yang bebas dan setingkat untuk mencapai suatu keputusan politik tertentu. Lebih jauh dikatakan Häussler bahwa para pihak yang terlibat dalam diskusi akan membicarakan terkait dengan kepentingan umum, pembuatan kebijakan, dan proses politik sebagai suatu kesatuan, agar dapat menjangkau teori normatif dan pengalaman politik yang ada. Dalam diskusi ini, media menjadi institusi yang penting, di mana Habermas—sebagai penggagas ide demokrasi deliberatif—sudah mengatakan bahwa ruang publik didominasi oleh media massa (Habermas, 1996, p. 379) di mana media bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimilikinya, dan media pun bisa menyeleksi dan memproses informasi untuk menghasilkan agenda politik, baik dari yang diharapkan oleh audiens media ataupun dari mereka yang menginginkan agar suaranya didengar (Habermas, 1996, p. 377).

Sementara itu menurut Brian McNair (2000), fungsi media untuk melakukan reportase, analisis, komentar, representasi, dan juga advokasi sudah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi dengan cara memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang isu yang bisa mereka sampaikan dengan menggunakan pilihan politik mereka yang dihormati menurut konstitusi.

Dari beberapa referensi ini kembali hendak ditekankan fungsi penting yang dibawakan oleh pers atau media dalam melaporkan apa yang terjadi dalam masyarakat, dan jika pun media menampilkan hal-hal yang politis, memang sudah demikianlah tugas media, menjembatani atau memberikan ruang agar hal-hal tersebut bisa didiskusikan bersama karena media menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan yang ada dan perbedaan atau cara menanggapi masalah bisa dilakukan tanpa menggunakan kekerasan.

Demikian halnya dengan masalah Papua, seharusnya bisa diberi ruang untuk diskusi secara terbuka agar kita menemukan jalan terbaik untuk Papua. Kebebasan pers yang dihambat dan arus informasi yang dihambat mencederai proses untuk mencapai jalan keluar terbaik. Justru keberadaan pers yang bebas dan arus informasi yang lancar akan mengurangi kesimpangsiuran kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Papua, apalagi persoalan yang ada di Papua sangat multidimensi dan membutuhkan bukan satu pendekatan untuk menyelesaikannya, melainkan dengan pendekatan yang juga multidimensi agar menemukan solusi terbaik. Kebebasan pers adalah salah satu syarat mutlak untuk

membuat masalah Papua menjadi terang benderang dan membuat upaya-upaya perbaikan menjadi lebih transparan serta bisa dinilai oleh masyarakat luas.

Indonesia sudah memiliki UU Pers nomor 40/1999 yang menjamin kebebasan pers di negeri ini dan menunjuk Dewan Pers sebagai institusi yang akan menangani masalah pemberitaan. Hendaknya hal ini juga berlaku di wilayah Papua, di mana kebebasan pers juga dijamin dan mereka yang keberatan dengan pemberitaan yang ada bisa mengajukan ke Dewan Pers. Tanpa mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, entah sampai berapa lama kondisi di Papua akan seperti ini. Kondisi ini mengeksklusi Papua serta para jurnalis ataupun media yang hendak meliput di sana. Hal ini sangat menyedihkan serta akan selalu membuat penilaian buruk atas kondisi pers di Papua. Kita memang membutuhkan solusi damai dengan mendengarkan semua pihak yang ada di Papua. (*)

Daftar Pustaka

- Anderson, Bobby. (2015). *Papua's Insecurity: State Failure in The Indonesian Periphery*. Honolulu: East West Center.
- Curran, James. (2011). *Media and Democracy*. London: Routledge.
- Hasugian, Maria, et.al. (2021). *Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021*. Jakarta: Komisi Informasi.
- Häussler, Thomas. (2018). *The Media and the Public Sphere: a Deliberative Model of Democracy*. London: Routledge.
- McLeod, Jason. (2015). *Merdeka and the Morning Star: Civil Resistance in West Papua*. Queensland: University of Queensland Press.
- McNair, Brian; Flew, Terry; Harrington, Stephen; Swift, Adam. (2017). *Politics, Media and Democracy in Australia: Public and Producer Perceptions of the Political Public Sphere*. London: Routledge.
- McNair, Brian. (2000) *Journalism and Democracy: A Qualitative Evaluation of The Political Public Sphere*. London: Routledge.
- Meteray, Bernarda. (2016). "Penguatan Demokrasi di Tanah Papua di Era Nieuw Guinea Raad (NGR) dan 1961 dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005." dalam: *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni, p. 77-103.
- Neuman, Laura. (2002). "Introduction" in *Access to Information A Key to Democracy*, Carter Centre, 2002 <https://www.cartercenter.org/documents/1272.pdf>
- Saltford, John. (2003). *The United Nations and The Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969*. London: Routledge.
- Stiglitz, Joseph. (2002). *Globalization and Its Discontent*. New York: Double Day.
- Tebay, Neles. (2005). *West Papua The Struggle for Peace with Justice*. London: Catholic Institute for International Relations.

Webb-Gannon, Camelia. (2021). *Morning Star Rising: The Politics of Decolonization in West Papua*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Kronik Papua November 2023

THEO VAN DEN BROEK

1. Perhatian Khusus

Papua di Ambang Pintu Konflik Horizontal

Bukan rahasia lagi bahwa selama bertahun-tahun Papua menjadi suatu wilayah konflik. Sampai saat ini, konflik ini pada intinya bersifat “vertikal”, secara konkret antara pihak pejuang kemerdekaan Papua dengan pihak pemerintah Indonesia. Di lapangan, konflik ini terlihat jelas melalui kontak bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bergabung dengan Polisi Republik Indonesia (Polri). Konflik vertikal ini juga tercermin dalam kenyataan bahwa ada sekitar 60.000 orang Papua yang memilih mengungsi, meninggalkan kampung halamannya karena merasa terancam. Selama ini, konflik vertikal belum secara signifikan berujung pada suatu “konflik horizontal”. Namun demikian, akhir-akhir ini ada tanda-tanda yang nyata bahwa konflik vertikal itu “diantar” menuju suatu konflik horizontal yang massal. Proses menuju “konflik horizontal” ini tidak berjalan secara alami, tetapi prosesnya direncanakan dengan teliti. Beberapa fenomena akhir-akhir ini menunjukkan adanya “strategi menuju konflik horizontal”.

Pertama, ada gejala intervensi dalam proses seleksi sampai dengan pelantikan para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah dijalankan selama bulan-bulan terakhir ini. Pada prinsipnya, semua anggota MRP yang terdiri dari Pokja (Kelompok Kerja) Perempuan, Pokja Adat, dan Pokja Agama dipilih oleh rakyat Papua asli sendiri melalui pendaftaran pada “Panitia Seleksi” dan disertai rekomendasi oleh para pemimpin perempuan, adat, dan agama. Lantas seleksi dibulatkan oleh Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan. Hasil penetapan final oleh gubernur dikirim ke menteri dalam negeri (Mendagri) demi pelantikan resmi. Ternyata, dalam proses ini terdapat sejumlah fakta yang kurang dapat diterima masyarakat/lembaga setempat

yang paling berkepentingan.¹ Ada protes dari masyarakat *karena* terdapat calon anggota yang bukan Orang Asli Papua (Provinsi Papua Selatan); *karena* kuota yang sampai saat ini berlaku untuk perwakilan masing-masing lembaga agama tiba-tiba diubah secara sepihak; *karena* calon-calon yang direkomendasi dan diusulkan oleh pemimpin agama ternyata dihapus dan diganti dengan orang yang tidak mempunyai suatu rekomendasi dari pemimpin agama yang bersangkutan (seperti Keuskupan Timika dan Keuskupan Manokwari-Sorong). Segala protes dalam hal ini tidak dihiraukan para penanggung jawab proses penyeleksian, dan proses diteruskan saja sampai meminta pelantikan kepada Mendagri. Pada tahap pelantikan pun ada “intervensi” sampai seorang beragama Muslim yang ada pada daftar calon-calon yang ditetapkan oleh gubernur tidak jadi dilantik. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini sekarang mencari penyelesaian secara hukum.² Pun ada intervensi Mendagri sehingga empat calon anggota yang ditetapkan dalam daftar gubernur tidak jadi dilantik. Dalam keterangannya, Mendagri menyatakan, “Mereka dinilai tidak layak karena pernah menyuarakan pendapatnya yang tidak setuju dengan Otsus II.”³ Ada juga intervensi untuk belum melantik Pokja Agama di Provinsi Papua Tengah. Alasannya adalah penyusunan Pokja itu masih dipermasalahan.⁴ Sementara itu, pemimpin Keuskupan Timika mengambil sikap jelas dengan tidak akan mengambil bagian dalam Pokja Agama MRP dalam susunan seperti sekarang ini karena proses penyeleksian cacat hukum/peraturan.⁵ Sebenarnya, Mendagri tidak mempunyai wewenang untuk mengubah daftar calon; mereka hanya berperan untuk mengadakan pelantikan resmi.⁶

Pokoknya, proses penyeleksian dinilai tidak beres dan melanggar peraturan yang berlaku. Suatu penelitian mendetail dipublikasikan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) yang menjelaskan pelanggaran peraturan serta gaya intervensi yang ditemukan dalam proses pengadaan sampai pelantikan MRP

1 <https://jubi.id/polhukam/2023/penjabat-gubernur-papua-pegunungan-diminta-batalkan-penetapan-calon-anggota-mrp-pokja-perempuan/>.

2 <https://papua.tribunnews.com/2023/11/12/mui-dan-ormas-islam-papua-tolak-keputusan-mendagri-kh-saiful-islam-al-payage-harus-dilantik>.

3 <https://jubi.id/polhukam/2023/legislator-papua-keliru-apabila-ada-calon-anggota-mrp-tidak-dilantik-karena-alasan-menolak-otsus/>.

4 <https://www.nabire.net/warga-gelar-unjuk-rasa-di-kantor-kesbangpol-papua-tengah-ini-penyebabnya/>.

5 <https://suarapapua.com/2023/09/26/pimpinan-keuskupan-timika-tegaskan-tak-ada-utusan-agama-katolik-di-mrpt-periode-pertama/>.

6 JUBI, edisi 22/23 Nov. 2023, hlm. 1-2: “MRP tidak dipilih pemerintah pusat”, keterangan ahli hukum Uncen.

masing-masing provinsi di Papua.⁷ Seluruh proses ini membuat orang marah dan siap saling memusuhi. Apalagi dikhawatirkan bahwa nanti (tahun 2024)—ketika penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat regional—“gaya manipulasi” yang sama akan dipraktikkan!

Kedua, ada suatu seruan dari Natalius Pigai (mantan anggota Komnas HAM) yang menarik perhatian pada fakta bahwa belakangan ini empat dari antara enam pejabat gubernur yang diangkat oleh Mendagri adalah beragama Islam. Pigai takut bahwa tindakan semacam ini akan sangat melukai perasaan masyarakat asli Papua yang sebagian besar orang Kristen/Katolik. Maka, ada bahaya bahwa akan ada peristiwa kekacauan antaragama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inti seruannya: “Saya minta Bapak Presiden Jokowi koreksi kebijakan penunjukan PJ gubernur empat orang Islam. Orang Papua menyatakan islamisasi sistematis oleh Mendagri. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, bisa guncang. Orang Papua selalu beringas jika menyentuh soal ras dan agama. Papua ini Tanah Kristen!” Empat pejabat gubernur itu perlu diganti kalau mau menghindari “konflik horizontal” antaragama.⁸

Ketiga, ada strategi menghancurkan kekompakan organisasi *United Liberation Movement West Papua* (ULMWP) dan Komisi Nasional Papua Barat (KNPB). Suatu perkembangan yang sangat memprihatinkan mulai kelihatan, yakni upaya penceraiberaian di dalam tubuh dua organisasi massa di Papua, ULMWP dan KNPB. Sampai saat ini, ULMWP yang dibentuk Desember 2014 dimaksudkan untuk menyatukan suara Papua secara organisatoris sehingga dapat diandalkan menjadi “suara bersatu dari Papua” dan “mitra resmi perwakilan Papua” dalam perundingan di tingkat mana pun. Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi II (KTT II) bulan Agustus-September 2023 di Port Vila, Vanuatu, ULMWP telah memilih pimpinannya untuk periode 2023-2028. Sekaligus pimpinan baru, Manasye Tabuni, menyatakan bahwa mulai saat ini tidak ada lagi “pemerintah sementara” (yang pernah dideklarasikan sepihak dan dipimpin oleh Benny Wenda sebagai Presiden). Ternyata perubahan personalia pimpinan serta penghapusan “pemerintah sementara” kurang diterima sejumlah tokoh dalam tubuh ULMWP, antara lain Benny Wenda, Buchtar Tabuni, dan Edison Waromi. Suatu kelompok

7 Aliansi Demokrasi untuk Papua: Siaran Pers “Inkonsistensi Negara Terkait Seleksi dan Pelantikan Anggota MRP”, 10 November 2023; <https://drive.google.com/file/d/12rzqfWRc0t9F6zOuHeBIGDF65H6vmbhM/view?usp=sharing>.

8 Pernyataan Natalius Pigai, 13 November 2023, yang viral di media sosial.

mulai diorganisir, menamakan diri “Forum Rakyat West Papua” dan ternyata mulai bergerak dengan restu dan bantuan pihak Kepolisian dan Badan Intel di Papua.

Fakta-fakta sebagai berikut: Forum Rakyat West Papua menolak hasil KTT II ULMWP, termasuk penyusunan pimpinan baru. Dalam demo pertama (6/11) di Kampwolker diumumkan supaya diadakan suatu kongres khusus untuk mengadakan koreksi penyusunan pimpinan ULMWP. Kongres Ke-1 ULMWP ini, yang semula direncanakan selama 3 hari namun akhirnya hanya berlangsung selama 4 jam saja, diselenggarakan di kompleks GOR STT GIDI (STAKIN) di Sentani pada tanggal 20 November 2023. Kongres Ke-1 ULMWP dihadiri oleh sekitar 1.500 orang. Sidang kongres dipimpin Buchtar Tabuni (Ketua Legislatif ULMWP, Parlemen Nasional West Papua/PNWP), Edison Waromi (Perdana Menteri Pemerintah Sementara/NRFB), dan Yakub Imbiri (Perwakilan Wilayah Adat Domberai). Dalam pertemuan singkat, hanya diadakan *voting* suara dari 7 wilayah adat. Hasil *voting* sekaligus merupakan putusan sidang Kongres Ke-1 ULMWP; intinya: “ULMWP tetap berada di bawah Pemerintah Sementara dan mendukung Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintahan Sementara beserta kabinetnya”. Sesudah rumusan keputusan itu, kongres dibubarkan dan rencana berkumpul kembali tanggal 23 November di Kampwolker (kediaman Buchtar Tabuni) untuk mendengarkan pembacaan putusan Kongres Ke-1 ULMWP ini.

Selama kongres ini, juga beredar catatan bahwa pelaksanaan Kongres ini “merupakan kegiatan lanjutan Unit 2.1 Dit Kamneg Baintelkam bersama Tim Opsnal Dit Intelkam Polda Papua dalam rangka kegiatan penceraiberaian kelompok KKP khususnya ULMWP dan KNPB”. Selanjutnya, juga dicatat bahwa “Unit 2.1 bersama Tim Opsnal Polda Papua telah melakukan *pressing* kegiatan yang rencana awal akan berlangsung selama 3 hari telah menjadi 1 hari dan melangsungkan penutupan Kongres Ke-1 ULMWP pada hari Kamis, 23 November 2023”.

Perkembangan ini juga **ditanggapi oleh pimpinan ULMWP hasil KTT II di Vanuatu**. Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni, mengatakan bahwa bertolak pada fakta-fakta dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP dan ketetapan hasil KTT II ULMWP, surat yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP maka dirinya selaku pemimpin terpilih ULMWP menegaskan kegiatan Kongres Ke-1 Sentani adalah kegiatan “melanggar konstitusi”. Manasye menegaskan bahwa ULMWP tidak pernah menyepakati dan membentuk “Forum Rakyat West Papua” dan tidak pernah menyetujui membentuk Panitia Kongres Ke-1 ULMWP. Ditegaskan juga bahwa dia dipilih secara sah, sebagai hasil KTT II yang diakui oleh semua pihak

internal maupun eksternal. “Maka semua manuver dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan ilegal,” ujarnya.⁹

Sementara itu, berkaitan dengan KNPB dapat dicatat bahwa telah terbentuk “KNPB Wilayah Sentani”. Sekretaris Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Simeon Surabut, pernah melantik “KNPB Wilayah Sentani” ini. Tercatat juga bahwa kelompok ini merupakan proyek Unit 2.1 Polda dan BIN. “KNPB Sentani” pernah bergerak dan terjadi bentrokan dengan KNPB asli. Hasilnya: akhirnya Ketua Umum KNPB Pusat dan Sekretaris KNPB Numbay ditahan (2/9) dan ditetapkan sebagai tersangka.¹⁰

Pada tanggal 19 November 2023, “KNPB Wilayah Sentani” mengadakan perayaan HUT ke-15 KNPB (2008-2023) di Aula Walter Post 7 dengan tujuan untuk mediasi rakyat West Papua Sorong – Merauke. Dalam perayaan ini, juru bicara, Vito Bahabol, menjelaskan bahwa KNPB Sentani sebagai media siap memediasi Kongres Ke-1 ULMWP di Port Numbay Tanah Tabi, West Papua pada tanggal 20-23 November 2023.¹¹

Dari berita-berita (fakta) di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu strategi yang nyata sudah mulai dijalankan untuk secara bertahap melumpuhkan/menghancurkan baik ULMWP maupun KNPB. Juga jelas bahwa strategi ini turut dikontrol dan dikoordinir oleh pihak Kepolisian dan Intelijen. Maka, bukan lagi suatu perkembangan alami, namun suatu perkembangan yang direncanakan dengan teliti.

Selanjutnya, perlu dicatat juga bahwa kedua pertemuan, baik perayaan HUT KNPB maupun Kongres Ke-1 ULMWP diselenggarakan di salah satu kompleks yang berkaitan erat dengan lembaga Gereja, masing-masing Aula Walter Post 7 (Kingmi) dan Gedung Olah Raga Sekolah Tinggi Teologi (GIDI). Apakah pemakaian lokasi ini kebetulan saja atau justru dipilih untuk men-kompromi-kan kedua denominasi Gereja Kristen ini?

Dapat dicatat pula bahwa penyingkatan lamanya kongres dari 3 hari menjadi 4 jam sangat mengherankan. Maka ada kongres yang menghadirkan 1.500 peserta

9 <https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/ini-sikap-terbuka-presiden-ulmwp-manasye-tabuni-soal-kongres-ke-i-di-sentani>; dan <https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami>; juga <https://wagadei.id/2023/11/27/dilarang-keras-gunakan-nama-ulmwp-di-luar-dari-keputusan-ktt-ii-ulmwp-di-port-vila/?amp=1>.

10 <https://jubi.id/polhukam/2023/ketua-knpb-pusat-dan-sekretaris-knpb-numbay-ditetap-sebagai-tersangka/>.

11 <https://globalindo.net/2023/11/20/knpb-sentani-memperingati-hut-ke-15-tahun-2008-2023-lahirnya-knpb>.

tanpa pembahasan materi atau diskusi namun ada “keputusan”. Aneh! Kenapa kongres begitu di-steril-kan? Takutkah akan ada perubahan atau perbedaan pendapat?

Catatan penutup: Sebenarnya kita sudah biasa dengan peluang munculnya konflik horizontal. Secara nyata muncul dalam kaitan dengan, misalnya, kepentingan berbeda antara para investor dan masyarakat adat, yang sering berujung perkelahian antara warga sendiri. Juga di bidang politik berkaitan dengan perebutan kedudukan dalam sistem pemerintahan, dan juga berkaitan dengan perbedaan religi dan ras. Di pelbagai bidang itu, sudah lama ada peluang munculnya konflik antarwarga sendiri dan dimotori oleh hak ulayat, ambisi, marginalisasi dan/atau ancaman/intimidasi sesaat. Namun dengan perkembangan yang baru ini, yaitu suatu strategi teratur dan terstruktur mulai kelihatan, peluang bergerak menuju suatu situasi “konflik horizontal massal” terbuka secara luas dan terarah karena sudah menjadi tujuan utama strateginya sendiri. Pendek kata: segala perkembangan sebagaimana dicatat secara singkat di atas sangat memprihatinkan dan pasti akan menumbuhkan semangat saling memusuhi yang pada gilirannya berujung konflik horizontal yang mematikan! Jelas strategi penceraiberaian ini sangat mengancam kita semua sekaligus menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat belum berniat mengutamakan suatu pendekatan yang lebih berdamai, manusiawi, dan bermartabat. (TvdB)

2. Keamanan dan Operasi TNI/Polri dan TPNPB

2.1. Catatan Umum Mengenai Suasana

Sementara waktu suasana di Papua diwarnai secara signifikan oleh beberapa hal.

- a. Ada kegelisahan di kalangan masyarakat mengenai polarisasi intern masyarakat serta konflik horizontal sebagaimana diterangkan dalam refleksi di atas.
- b. Ada titik terang berupa “ungkapan keprihatinan oleh tokoh-tokoh bangsa” dari luar Papua (*lih.* subbab 8 “Menuju Papua Tanah Damai” di bawah). Mereka menyoroti perkembangan di Papua serta penundaan terus-menerus untuk mencari suatu jalan dialog demi penyelesaian konflik di Papua. Inisiatif para tokoh bangsa ini perlu dihargai sekaligus diangkat menjadi titik awal proses perdamaian. Sementara ini, tindak lanjut oleh para tokoh bangsa Papua sendiri untuk memanfaatkan momentum ini masih kurang kelihatan. Mungkin mereka telah begitu merasa dilumpuhkan maka kehilangan daya bergerak.

- c. Perhatian dari pemerintah pusat pada Papua tetap kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat asli Papua. Kurang memperlihatkan suatu upaya nyata untuk mencari suatu penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Sementara itu, jumlah korban tetap besar, termasuk warga sipil baik orang asli Papua maupun orang non-Papua. Dalam kunjungan presiden, tetap kegiatan investasi dan proyek ekonomis besar-besaran yang diutamakan. Pejabat tinggi pun mempersalahkan masyarakat Papua yang dianggap “kurang bersyukur dan berterima kasih” walau “pemerintah pusat begitu baik hati dan mengunjungi mereka”. Orang Papua dinilai “tidak tahu diri”.¹² Mendengar bahasa pejabat tinggi seperti Bahlil Lahadalia, pantaslah pertanyaan muncul: Siapa sebenarnya yang “tidak tahu diri”? Sikap dan niat pemerintah pusat masih jauh dari “keprihatinan yang diungkapkan oleh sejumlah tokoh bangsa”.
- d. Banyak perhatian mulai diberikan pada Pemilu 2024. Suasana ini diwarnai oleh ketegangan politik serta perebutan kekuasaan, termasuk pola kebijakan pemerintah pusat dalam, misalnya, pengangkatan para pejabat gubernur dan penyusunan MRP di pelbagai provinsi Papua. Kampanye menjelang Pemilu 2024 sudah dimulai maka kegiatan rutin pemerintah setempat sangat terganggu atau sedang “beristirahat di tempat” saja. (TvdB)

2.2. Aksi Kekerasan/Bersenjata

- **31 Oktober 2023:** Pihak TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan mati seorang penjaga kios di kampung Purume, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Alasannya: orang yang bersangkutan adalah seorang intel yang menyamar sebagai penjaga kios. Pihak TNI menyatakan (2/11) bahwa orang ini bukan intel namun warga sipil biasa saja.¹³ *Sulit dapat diverifikasi!*
- **1 November 2023:** Dalam aksi menghindari pesawat yang hendak mendarat yang membawa barang milik TNI/Polri dan kontak senjata selanjutnya, TPNPB

12 <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/11/25/tokoh-melanesia-kritik-menteri-bahlil-lahadalia-yang-minta-orang-papua-tahu-diri>; <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/13593841/ke-masyarakat-papua-menteri-bahlil-kalau-presiden-sudah-baik-kita-tahu-diri>.

13 <https://nasional.tempo.co/read/1791743/soal-klaim-opm-tembak-intel-di-papua-kapuspen-tni-adanya-korban-warga-sipil>.

mengklaim telah menembak mati dua anggota Kopassus di kampung Bajemb di Kabupaten Intan Jaya. *Sulit dapat diverifikasi!*

- **6 November 2023:** Tiga anggota TNI mendatangi wakil kepala sekolah karena mereka menilai bahwa beliau kurang aktif mengadakan acara penaikan ben-dera di lapangan sekolah. Suatu video mengenai peristiwa intimidasi ini diedarkan di media sosial. Pengacara ternama, Yang Christian Warinussy, mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang terlihat melakukan “intimidasi” secara psikis terhadap Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Aifat, di kampung Susumouk, Kabupaten Maybrat, pada Senin (6/11).¹⁴
- **6 November 2023:** Menurut berita dari masyarakat setempat, pada 6 November 2023 pasukan TNI menyerang dan membom warga sipil yang sedang melakukan pendulangan emas di kali Yi, Kabupaten Yahukimo. Dalam penyerangan, TNI memakai tiga helikopter dan satu pesawat, dalam aksi ini dua warga sipil terkena; satu, Nopenus Murib, meninggal dunia, yang lain, Ayunga Telenggen, dalam keadaan parah dan sedang dirawat.
- **9 November 2023:** Di Titigi seorang anak sekolah, Misana Hasinijau (10), terluka serius karena terkena ledakan. Ternyata dekat dengan sekolahnya ditemukan bahan ledakan yang melukainya. Sudah tentu adanya bahan ledakan hanya dapat berasal dari aparat yang berada di wilayah itu. Kejadian ini sangat mengagetkan warga dan anak-anak sekolah di Titigi. Sampai ada protes para guru SD YPPK Titigi, termasuk kepala sekolah, bersama murid-muridnya berupa unjuk rasa atas kejadian ini (13/11). Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yohanes Weya, di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, turut memprotes dan menuntut kehadiran pemerintah sipil yang wajib menjamin keamanan di sekitar sekolah-sekolah. Apalagi dia mendesak pemerintah untuk menarik kembali pasukan TNI dari wilayahnya supaya proses pendidikan dapat dijalankan dalam keadaan yang aman, bebas, dan tenang.¹⁵ Sedangkan para guru menuntut supaya tenaga TNI tidak diizinkan mengajar di sekolah-sekolah.¹⁶

14 <https://suarajurnalis.online/warinussy-mendesak-panglima-tni-untuk-menidak-oknum-anggotanya-yang-melakukan-intimidasi-terhadap-wakil-kepala-sekolah-smpn-aifat/>.

15 <https://jubi.id/polhukam/2023/merasa-tak-aman-guru-dan-siswa-sd-yppk-titigi-demo-di-kantor-bupati-intan-jaya/>; <https://en.jubi.id/yppk-titigi-teachers-and-students-protest-for-safety-after-explosion-near-school/>; <https://jubi.id/polhukam/2023/ini-sikap-pelajar-dan-mahasiswa-intan-jaya-terkait-insiden-ledakan-di-kampung-titigi/>.

16 <https://www.propapua.com/2023/11/breaking-news-guru-kabupaten-intanjaya.html?m=1>;
<https://jubi.id/polhukam/2023/ketua-psw-yppk-intan-jaya-kutuk-peletak-bahan-peledak-di->

- **11 November 2023:** Di wilayah Gome, Kabupaten Puncak, suatu kompleks persekolahan SMP terbakar. Kurang jelas siapa-siapa pelakunya. Usai peristiwa ini, 200 warga mengungsi dari 10 kampung di Distrik Gome (12/11), entah cari perlindungan di gereja entah di pos pengamanan. Menurut pihak TNI, semua warga ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan penjagaan keamanan diperketat (14/11).¹⁷
- **22 November 2023:** Ada kontak senjata antara TPNPB dan TNI/Polri di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam insiden itu dua anggota Brimob tertembak, dan seorang di antaranya meninggal dunia.¹⁸
- **24 November 2023:** TPNPB menyerang sejumlah pekerja konstruksi puskesmas di kampung Jambul, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Tiga orang dinyatakan tewas, dua terluka serius. TPNPB menilai mereka sebagai “intel TNI”.¹⁹
- **25 November 2023:** Dalam kontak senjata antara TPNPB dengan Yonif Kostrad di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, 5 prajurit dinyatakan tertembak, 4 di antaranya meninggal dunia.²⁰

2.3. Tambahan Pasukan

Pasukan-pasukan baru tetap disiapkan untuk dikirim ke Papua.²¹ Kemudian dapat dicatat bahwa panglima yang baru, Agus Subiyanto, tetap akan memakai *hard power* untuk berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan di Papua. Maka, pengiriman pasukan dapat terus dinantikan. Pendekatan angkat senjata lawan para pejuang ini dinilai LBH Papua, Gustaf Kawer, sebagai suatu pengulangan kegagalan negara dalam membangun Papua.²²

kompleks-paroki-titigi/; <https://en.jubi.id/explosion-near-school-leaves-student-injured-sparks-outrage-and-safety-concerns-in-nabire/>.

17 <https://jubi.id/polhukam/2023/200-warga-gome-di-kabupaten-puncak-yang-semapat-mengungsi-sudah-kembali-ke-kampung-halaman/>.

18 <https://jubi.id/polhukam/2023/kontak-tembak-terjadi-di-titigi-satu-personel-damai-cartenz-meninggal/>.

19 <https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/194123778/kkb-tembaki-pekerja-bangunan-di-puncak-papua-tengah>.

20 <https://fajarpapua.com/2023/11/26/baku-tembak-dengan-kkb-papua-tiga-personil-yonif-kostrad-411-pandawa-tewas-tertembak-ini-kronologinya/>.

21 <https://indonesiadefense.com/persiapan-tugas-di-papua-450-prajurit-macan-kumbang-jelajahi-lereng-gunung-klotok/>.

22 <https://jayapura.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2767396016/pendekatan-panglima-tni-soal-papua-dengan-senjata-gustav-kawer-mengulangi-kegagalan-negara-membangun-papua>.

2.4. Sekitar Pengamanan Pemilu 2024

- **Siapa berpihak pada siapa?** Setelah penetapan para calon presiden dan calon wakil presiden, suasana perebutan kuasa didominasi oleh dua pertanyaan saja: (1) siapa mendukung siapa? dan (2) apa artinya netralitas sejumlah pihak yang seharusnya menjaga netralitasnya? Keraguan dalam penjagaan netralitas sangat tinggi dan sudah didukung oleh sejumlah insiden keberpihakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- **Aksi “melawan lupa”:** Masih muncul juga tulisan berkaitan dengan latar belakang para calon. Yang paling menonjol adalah berita mengenai sahnya ijazah cawapres, Gibran, di pelbagai media dan catatan profil seorang capres, Prabowo, dalam *Jakarta Post*.²³ Ternyata masih ada yang “melawan lupa”, termasuk di kalangan luar negeri. Dalam kerangka ini, suatu tulisan yang terdokumentasi secara mendetail disebarluaskan melalui media sosial. Tulisan ini berjudul “Prabowo Subianto, Ground Briefing” yang ditulis oleh Pat Walsh, bulan November 2023, di Australia.²⁴
- **Seruan moral Dewan Adat Papua:** Dari ketua Dewan Adat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mananwir Mayor, muncul suatu seruan moral berkaitan dengan pemilu nanti, khusus untuk Papua. Intinya: “agar tidak boleh memilih calon presiden dengan rekam jejak diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM, dan memainkan politik dinasti dengan menggunakan ‘kewenangan tertentu’ untuk merebut kekuasaan”.²⁵

2.5. Sekitar Penyanderaan Pilot Susi Air

- **Berita yang mengelirukan:** Belum lama ini, sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan Eugenius Kogoya, pimpinan kelompok yang menyandera pilot Susi Air, menyatakan bahwa Indonesia masih diberikan dua bulan untuk mulai mengambil langkah menuju perundingan. Kalau tidak, dia “siap membunuh pilot”. Namun demikian, melalui juru bicara TPNPB

23 <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/11/24/candidate-profile-prabowo-subianto.html>.

24 <https://awpasydneynews.blogspot.com/2023/11/prabowo-subianto-background-briefing.html>. Penulis, Pat Walsh, pernah menjadi penasihat pada Truth Commission (2001-2005) yang menginvestigasi sejarah Timor Leste selama diduduki oleh Indonesia. Dia juga salah satu pendiri majalah Inside Indonesia dan telah dihormati melalui suatu penghargaan nasional oleh baik Timor Leste (2009) maupun Australia (2012).

25 <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/11/28/ini-seruan-moral-dewan-adat-papua-terkait-pilpres-2024>.

diberitahukan bahwa itu video lama (Mei 2023), bahwa pilot masih dalam keadaan sehat, dan bahwa TPNPB tidak berniat membunuh pilot ini.

- **Pembebasan pakai *soft power*:** Dalam pernyataan pada wartawan panglima yang baru, Agus Subiyanto, mengatakan bahwa pembebasan pilot akan diupayakan melalui operasi teritorial yang bersifat *soft power*.²⁶ Beliau tidak menjelaskan *soft power* itu artinya apa.

3. Pengungsi-Pengungsi di Papua, Suasana Wilayah Konflik

Perhatian dan update: Berkat perhatian khusus yang diberikan oleh sejumlah lembaga swasta pada persoalan pengungsi, perhatian bagi mereka meningkat walau masih terbatas. Sebagai *update* data, sebaiknya membaca tulisan pada *Human Rights Monitor* (*lih.* catatan kaki).²⁷

4. Otsus Pemekaran

- **Otsus dinilai simbol saja:** Pada hari Otsus, 22 November 2023, ketua komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, menilai pemerintah tidak serius dengan menjalankan “otonomi khusus di Papua”. Beliau menyikapi perjalanan otonomi khusus hanya menjadi simbol belaka karena semua pemberi keputusan ada di Jakarta. Tidak hanya itu, Majelis Rakyat Papua yang di bentuk sebagai lembaga kultur OAP bahkan kini tidak mempunyai wewenang penuh dalam pengambilan keputusan yang konkret mengenai kekhususan Orang Asli Papua.²⁸
- **Angkat kembali konflik horizontal maupun vertikal:** Penjabat gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix Wanggai, diharapkan akan berperan terbuka dan adil dalam menangani masalah “lokasi kantor gubernur” yang menimbulkan suatu konflik horizontal maupun vertikal di sekitar Wamana, Kabupaten Jayawijaya. Sudah tersedia sejumlah laporan melalui investigasi kelompok masyarakat adat sendiri maupun melalui Komnas HAM. Menindaklanjuti proses penyelesaian secara adil dan terbuka sangat dinantikan masyarakat adat sendiri yang telah terpecah karena masalah ini.²⁹

26 <https://20.detik.com/detikupdate/20231120-231120059/jenderal-agus-bicara-penyanderaan-pilot-susi-air-hingga-pendekatan-soft-power>.

27 <https://humanrightsmonitor.org/news/ipd-update-nov-2023-the-idp-crisis-persists-across-west-papua/>.

28 <https://www.lintaspapua.com/lintas-jayapura/65510986073/ketua-komis-1-dpr-papua-elvis-tabuni-otsus-hanya-simbol-oap>.

29 <https://jubi.id/tanah-papua/2023/pj-gubernur-diminta-sediakan-waktu-bahas-bersama-masyarakat-wouma-soal-pembangunan-kantor-pemprov-papua-pegunungan/>; <https://humanrightsmonitor.org/news/dispute-over-highland-papua-governors-office-site-disagreement-among-indigenous-tribes-with-some-parties-rejecting-komnas-ham-findings/>.

5. Hukum-HAM-Keadilan

- **Tiga anggota KNPB tahanan polisi Sorong mulai sidang:** Tiga aktivis KNPB wilayah Maybrat, Urbanus Kamat, Willem Yekwam, dan Yeremias Yesnat, yang selama ini ditahan oleh aparat di Sorong, sekarang mulai sidang (1/11). Saat ini, dilibatkan sejumlah masyarakat untuk memprotes dan menuntut pembebasan tanpa syarat atas ketiga aktivis KNPB ini dan penghentian kriminalisasi terhadap KNPB. (*Info EB 1 November 2023*)
- **Dua puluh mahasiswa ditangkap aparat:** 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Papua Selatan (AMPERA PS) ditangkap oleh polisi di Merauke (18/11). Mereka terlibat dalam aksi protes berkaitan dengan penolakan hak masyarakat adat Awyu di Boven Digoel oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura.³⁰ Ternyata bagi masyarakat adat, peraturan hukum sudah tidak berfungsi lagi alias “sudah mati”. PTUN menolak gugatan oleh masyarakat adat Awyu atas SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua No. 82/2021 tentang Izin Kelayakan Lingkungan. Surat izin dinilai tidak sah karena masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses pelepasan tanahnya dan penelitian kelayakan lingkungan. Maka, surat izin perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan hukum yang berlaku.³¹
- **Macetnya investigasi kasus dua ibu di Dekai:** Soal kekerasan seksual serta pembunuhan terhadap dua ibu di Dekai, Kabupaten Yahukimo, belum ditangani dengan serius. Maka, dalam suatu diskusi publik yang diselenggarakan oleh Solidaritas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Papua (SAKTPP) ditetapkan suatu pernyataan sikap—Jayapura, 11 November 2023—sebagai berikut:

Kami mendesak dengan tegas

1. kepada DPRP Provinsi Papua untuk segera menegaskan kepada TNI/Polri dan TPNPB untuk menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya untuk perlindungan masyarakat sipil di tengah konflik,
2. kepada OPM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk memenuhi hak hidup bagi pengungsi dari konflik bersenjata di Kabupaten Yahukimo,

³⁰ <https://humanrightsmonitor.org/news/jayapura-court-rejects-lawsuit-by-awyu-tribe-over-palm-oil-permit-advocates-prepare-to-appeal/>.

³¹ <https://vt.tiktok.com/ZSNaMBUu5/>; JUBI, edisi 20/21 November 2023, hlm. 12; <https://jubi.id/polhukam/2023/sejumlah-aliansi-di-tanah-papua-sayangkan-pembubaran-aksi-damai-di-merauke/>.

3. kepada Kapolda Papua dan Kapolres Yahukimo untuk segera mengungkapkan pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan membunuh dua orang ibu di Yahukimo pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu,
 4. kepada Komnas HAM RI untuk segera membentuk tim investigasi dan turun ke Yahukimo guna mengungkapkan pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan kedua ibu di kota Dekai,
 5. kepada Ketua DPRP supaya segera membentuk tim khusus kemanusiaan untuk menangani persoalan pengungsi dan mengungkapkan pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap dua orang ibu di Yahukimo,
 6. kepada komisi I DPRP supaya menggunakan fungsi pengawasan DPR untuk mengawasi kinerja Komnas HAM RI dan mendesak untuk melakukan investigasi terhadap pemerkosaan dan pembunuhan kedua ibu di Yahukimo,
 7. kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Papua untuk mendorong Polda Papua dan Polres Yahukimo dan Komnas HAM RI untuk memenuhi hak atas keadilan bagi dua orang ibu korban kekerasan seksual dan pembunuhan.
- **Soal kriminalisasi KNPB:** Selama tahun-tahun terakhir berulang kali kami mencatat peristiwa-peristiwa bahwa aktivis KNPB mudah dituduh sebagai pelaku kegiatan kriminal. Walau KNPB berulang kali juga menerangkan sikap dan strateginya yang diwarnai nonkekerasan dan penuh damai, fenomena kriminalisasi KNPB terus berjalan. Sementara dalam Konstitusi Republik Indonesia, hak kebebasan mengungkap opini terjamin. Maka, makin terdengar seruan supaya kriminalisasi KNPB dihentikan. Seruan ini bukan tanpa dasar. *Salah satu contoh baru lagi:* Kelompok aktivis KNPB, sekitar 50 orang, di Memberamo Tengah, dihalangi dalam kegiatan (18/11) pembagian selebaran undangan untuk menghadiri ibadah syukur sewaktu perayaan atas usia KNPB yang ke-15. *Contoh lainnya:* Sewaktu mengadakan perayaan HUT ke-15, markas KNPB wilayah Paniai digeledah oleh aparat dan 7 orang dibawa ke markas polisi (19/11).³²
 - **Kegiatan Tim PPHAM:** Walau tidak ada banyak berita mengenai kegiatannya akhir-akhir ini, ternyata Tim Penyelesaian non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masih bergerak. Mereka baru-baru ini melakukan pertemuan lagi pada salah satu hotel di Wamena (13/11). Pertemuan ini diketahui keluarga korban kasus Wamena [4 April 2003] namun mereka tidak dilibatkan. Menurut informasi para korban dan pendampingnya, keluarga korban sudah

32 <https://wagadei.id/2023/11/19/markas-knpb-wilayah-paniai-digeledah-aparat-gabungan-saat-rayakan-hut-ke-15/?amp=1>.

mengambil sikap yang jelas dan menolak penyelesaian nonjudisial itu. Sikap ini disertai 4 poin tuntutan (yang dalam berita/tulisan *JUBI* kurang diterangkan). Namun demikian, Tim PPHAM terus datang menawarkan kompensasi saja, dan kurang menanggapi aspirasi keluarga korban yang sebenarnya. Maka, pertemuan ini dinilai oleh aktivis HAM, Theo Hese gem, sebagai “pertemuan tidak formal” saja, sedangkan koordinator keluarga korban, Linus Hiluka mengatakan, “Kami mencurigai Tim PPHAM mewakili pemerintah pusat yang tidak menjawab aspirasi dan pernyataan kami yang telah diusulkan.” Mereka merasa dipaksa terus untuk mengiyakan keinginan pemerintah. Seandainya dalam pertemuan pada tanggal 13 November 2023 ada keluarga yang menerima kompensasi, alangkah baiknya Tim PPHAM memberitahukan siapa-siapa, atau atas nama siapa?³³

- **Kasasi ditolak dalam kasus mutilasi serta pembunuhan:** Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi yang diajukan 4 prajurit TNI terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika. Putusan kasasi itu tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 291 K/Mil/2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia (23/11).³⁴
- **Aktivis HAM terancam dipenjarakan:** Proses pengadilan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menuju ke putusan vonis. Sebagaimana diketahui bahwa mereka digugat oleh Menteri Luhut Pandjaitan karena beliau merasa nama baiknya dinodai karena penelitian serta popularisasi hasilnya oleh kedua aktivis HAM itu. Kedua aktivis tersebut secara khusus berniat untuk membantu masyarakat di Papua. Dalam popularisasi hasil penelitian kedua aktivis mengaitkan Menteri Luhut dengan proyek pertambangan di Papua. Suatu kaitan kepentingan ekonomis antara proyek pertambangan dan pribadi Menteri Luhut ditemukan. Sekaligus kaitannya antara lokasi pertambangan dan kedekatannya dengan lokasi operasi militer dipersoalkan oleh mereka berdua. Mereka terancam divonis 3 setengah sampai 4 tahun dipenjara. Menurut banyak pengamat ahli hukum dan HAM, proses ini dinilai suatu kriminalisasi melulu, dan suatu upaya membungkam para kritisi menyangkut penguasa di Indonesia. Prosesnya disoroti oleh banyak pihak

33 *Jubi*, edisi 20/21 November 2023, hlm. 3.

34 <https://jubi.id/polhukam/2023/ma-tolak-kasasi-4-prajurit-tni-terdakwa-kasus-mutilasi-mimika/>.

baik di dalam maupun di luar negeri. Vonis akhir akan menentukan langkah-langkah lanjut gerakan advokasi yang telah muncul dengan cukup ramai.³⁵

6. Pendidikan-Kesehatan-Ekonomi Rakyat

6.1. Sekitar Pendidikan

- **Pelatihan khusus bagi guru-guru:** Sebanyak 45 orang guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Jayapura, Provinsi Papua, mengikuti pelatihan guru penggerak guna meningkatkan kompetensi. Pelatihan guru penggerak tahun 2023 dilaksanakan selama dua hari oleh Pemerintah Kota Jayapura (16/11). Melalui pelatihan ini diharapkan bahwa guru mempunyai kemampuan lebih dalam mendorong prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif baik akademik dan nonakademik.³⁶
- **Mengatasi ketertinggalan pendidikan di Papua:** Menarik untuk menyebut suatu penelitian mengenai ketertinggalan pendidikan di Papua yang diangkat oleh koran *Tempo*. Dicatat bahwa salah satu akar permasalahannya adalah kesenjangan antara kurikulum yang digunakan dan nilai-nilai tradisi serta warisan budaya orang Papua. Di sekolah, anak-anak Papua lebih banyak terpapar informasi yang berkaitan dengan budaya lain, seperti Jawa dan Sumatra, sedangkan perhatian terhadap budaya Papua sangat terbatas. Buku-buku pelajaran juga cenderung didominasi karakter anak-anak non-Papua. Apalagi perlu dicatat bahwa penggunaan bahasa asli Papua di kalangan siswa sangat menurun. Pemahaman adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal Papua juga semakin rendah. Bagaimana solusinya? Jawabannya terletak pada konsep pendidikan yang *inklusif*, *kolaboratif*, dan *integratif*. Selanjutnya, dalam berita koran *Tempo*, masing-masing aspek itu diuraikan lebih mendetail. Untuk membacanya, lihat referensi digital di bawah.³⁷

6.2. Sekitar Kesehatan

- **Ada masyarakat di Kabupaten Jayapura yang kurang akses pada pelayanan kesehatan:** Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan, mengatakan masih banyak

35 <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/27/18454991/lsm-internasional-sebut-kasus-yang-menjerat-haris-fatia-sebagai-upaya-pembungkaman-aktivis-HAM>; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231030122117-12-1017628/sidang-haris-fatia-faisal-basri-akui-pernah-bertemu-ingatkan-Luhut>.

36 <https://jubi.id/mamta/2023/45-guru-di-kota-jayapura-mengikuti-pelatihan-guru-penggerak/>.

37 <https://koran.tempo.co/read/485431/mengatasi-ketertinggalan-pendidikan-di-papua>.

masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Beliau baru-baru ini mengunjungi Distrik Kaureh. “Sangat miris sekali, letak puskesmas yang berdekatan dengan perkampungan, namun pelayanan tidak optimal,” ujarnya (21/11). Di kampung Lapua, Distrik Kaureh maupun di Distrik Unurum Guay ada masyarakat yang sakit dan tidak mendapat pelayanan medis hingga mengalami kelumpuhan total. Perlu disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang diharapkan melalui berbagai fasilitas penunjang yang disiapkan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat sama sekali tidak berfungsi dan tidak dikerjakan. “Ke mana saja anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam proses pelayanan di daerah ini?” katanya.³⁸

- **Status Rumah Sakit Dekai perlu dinaikkan:** Dalam kunjungannya ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, kaget bahwa di seluruh Provinsi Papua Pegunungan tidak ada satu rumah sakit (RS) yang ber-type C, semuanya type D. Mengunjungi RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Dekai dia mencatat baik kekurangan tenaga medis, kekurangan fasilitas dan peralatan medis, maupun kekurangan listrik. Maka, pelayanan yang dapat diberikan sangat terbatas dan banyak pasien perlu dirujuk ke Jayapura. Beliau berjanji akan melengkapi RSUD Dekai menjadi Type C.³⁹

6.3. Sekitar Ekonomi Rakyat

- **Inisiatif penyuluhan praktis:** Dalam kenyataan sehari-hari, menjadi jelas bahwa banyak masyarakat biasa sebenarnya kurang tahu sejauh mana hak mereka sudah dilindungi atau dijamin melalui Peraturan-Peraturan Daerah (Perdasi). Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, John NR Gobai, menyadari hal itu dan mengambil inisiatif untuk mengadakan penyuluhan serta sosialisasi peraturan-peraturan resmi di lapangan. Belum lama ini beliau duduk bersama masyarakat di kawasan Pantai Hamadi. Kali ini (30/10) dia mengadakan pertemuan sosialisasi di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P3W) di Padang Bulan, Abepura. Beliau menjelaskan isi Perdasi dan menjelaskan peraturan mengenai Perdasi Papua No. 7 Tahun

38 <https://jubi.id/jayapura-membangun/2023/anggota-drp-d-kabupaten-jayapura-sebut-ada-masyarakat-yang-belum-mendapat-layanan-kesehatan/>.

39 <https://en.antaranews.com/news/298395/yahukimo-ministry-to-raise-dekai-hospital-status-to-type-c>.

2020 tentang Pertambangan Rakyat, dan Perdasi Papua No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Konflik Sosial.⁴⁰

- **Nelayan di Manokwari mengeluh:** Ratusan nelayan melakukan aksi protes di Manokwari karena mengalami bahwa usaha mereka diganggu oleh kapal-kapal nelayan dari luar Papua Barat yang bergerak di wilayah hak mereka (9/11). Kehadiran kapal-kapal dari luar bukan saja mengurangi hasil penangkapan ikan oleh para nelayan lokal, melainkan juga mengakibatkan polusi yang merugikan kesehatan ikan di laut. Para partisipan dalam protes juga menyebutkan sikap “tidak tahu diri” para birokrat yang mengeluarkan izin operasional kepada kapal dari luar.
- **Mama-mama pedagang lokal menolak pasar baru di Blorep (Merauke):** Mama-mama asli Papua menolak pasar baru di Merauke karena mereka merasa terlalu jauh dari pusat Merauke, hingga tidak strategis. Bupati Mbaraka berpendapat bahwa mama-mama masih berpikir terlalu sempit; mereka belum memperhitungkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan di Merauke terus berjalan. “Saya kasih gambaran saja, besok perumahan di Blorep akan bertambah banyak; daerah nanti akan ramai,” ujarnya. Dari aspek strategis, sambung Mbaraka, kawasan Blorep berada pada posisi simpul kota. Kawasan itu dapat dengan mudah diakses melalui beberapa ruas jalan, sehingga dapat dipastikan daerah Blorep akan ramai di waktu mendatang. Para mama belum terlalu yakin. Ibu Mutom mengatakan, “Siapa yang mau datang beli kalo pasar di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman warga. Tentu nantinya juga merugikan kami.” Selain berlokasi di pinggiran kota, kata Mutom, tidak ada kendaraan transportasi umum atau angkutan kota yang beroperasi ke wilayah pasar tersebut. Tentu saja tidak akan ada pembeli atau pengunjung yang mau berbelanja di sana. “Kami sehari-hari berjualan di Pasar Wamanggu dan juga Pasar Mopah Baru (yang berlokasi di pusat kota). Kalau dipindahkan, tentu jualan kami tidak laku dan ini merugikan kami,” sambungnya.⁴¹
- **Kemiskinan ekstrem di Papua di atas 5%:** Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 2 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi di atas 5%. Keduanya berada di Papua dan Papua Barat dengan masing-masing di level 7,67% dan 6,43% pada Maret 2023. Walau masih tinggi, dicatat juga

40 <https://jubi.id/polhukam/2023/legislatur-papua-sosialisasi-perdasi-pertambangan-rakyat-dan-penanganan-konflik-sosial/>.

41 <https://jubi.id/kabupaten-merauke/2023/pembangunan-pasar-blorep-merauke-ditolak-ini-respons-bupati-mbaraka/>.

bahwa akhir ini persentase menurun cepat dari 10,92% (2018) menjadi 7,67 (Provinsi Papua sebelum pemekaran). Di Indonesia masih ada 14 provinsi yang levelnya di antara 1-5%. Hanya ada 18 provinsi atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan ekstremnya di bawah 1%. Secara nasional kemiskinan ekstrem berada di level 1,12% pada Maret 2023.⁴²

6.4. Sekitar Program Ekonomi Pemerintah

Proyek Strategis Nasional (PSN)

- **Pabrik gula di Merauke:** Menurut Menteri Pertanian, Andi Sulaiman, pemerintah akan mendirikan suatu “pabrik gula” di Merauke. Programnya sudah dibahas dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menyediakan 1.000.000 ha yang letaknya dalam kawasan Food Estate. Menurut Sulaiman, untuk program ini ada dua alasan, yakni: *pertama*, iklimnya yang cocok, dan *kedua*, banyak tanah tersedia di Papua.⁴³ *Sekiranya bagus, Menteri Sulaiman diingatkan bahwa “Papua bukan Tanah Kosong”!* (TvdB)
- **PT Freeport:** Telah diadakan pembahasan perpanjangan izin pengoperasian PT Freeport. Pemerintah pusat, melalui Presiden Jokowi, bersedia memperpanjang izin sampai tahun 2061. Pembahasan ini diadakan sementara masih ada suatu masalah besar yang belum diselesaikan oleh Presiden, yakni “nasib ribuan pekerja Freeport” (8.300 pekerja) yang pernah dipecat karena mengadakan demo pada tanggal 1 Mei 2017.⁴⁴
- **Eksplorasi minyak/gas:** Masyarakat Amungme tetap menolak kegiatan eksploitasi minyak di wilayahnya. Pihak pemerintah mencari investor untuk memulai pengeksplorasian Blok Warim yang letaknya dalam wilayah Amungme dan Taman Konservasi yang resmi terlindungi. Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) dan organisasi KNPB mendukung protes masyarakat Amungme.⁴⁵

42 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7028009/kemiskinan-ekstrem-di-papua-papua-barat-masih-di-atas-5>.

43 <https://en.tempo.co/read/1795250/indonesian-govt-prepares-1-mln-hectares-of-land-for-sugar-factory-in-papua>.

44 <https://money.kompas.com/read/2023/11/17/215752926/jokowi-bakal-izinkan-freeport-keruk-emas-papua-sampai-2061?page=all>, <https://en.jubi.id/jokowi-urged-to-resolve-freeport-worker-strike-amid-share-talks-with-ceos/>.

45 <https://suarapapua.com/2023/11/15/amptpi-knpb-dan-fri-wp-mendukung-rakyat-tolak-operasi-migas-di-agimuga/>.

- KEK Sorong:** Selama kunjungan kerja di Sorong, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa akan “pasang badan” supaya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dikembangkan dengan cepat. Sebenarnya program ini diprotes oleh masyarakat adat Moi. Esau Klagilit mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan masyarakat adat suku Moi di Kabupaten Sorong demi memuluskan investasi di Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Esau, ada berbagai problem konflik agraria yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya. “Banyak masalah dihadapi masyarakat adat dan buruh; bahkan masalah sosial lainnya yang belum diselesaikan pemerintah. Faktanya justru pemerintah sedang dan terus menciptakan konflik horizontal antara marga-marga pemilik ulayat. Harusnya fokus pemerintah bukan lagi datangkan masalah-masalah baru,” ujarnya.

“Pasti saja ada kepentingan tertentu dengan pernyataan Menteri, tetapi dia, Bahlil Lahadalia, tidak berhak atas tanah adat kami. Sekarang kami mau tanya, ‘ko pu tanah di mana? Trada!’ Jadi, stop mengorbankan kami suku Moi punyai tanah adat demi menteri punyai kepentingan pribadi. Kami tetap menolak semua investasi di wilayah adat suku Moi, terutama KEK Sorong karena tanah adat kami marga Klagilit juga termasuk dalam peta KEK. Selain itu, sejak tahun 1935 minyak bumi di Sorong mulai eksploitasi hingga 2023 tidak ada orang Moi sejahtera,” tegasnya.⁴⁶
- Pabrik pupuk di Fakfak:** Tanggal 23 November 2023 Presiden Joko Widodo juga meresmikan Bandara Siboru dan Pabrik Pupuk Kaltim. Di sini pula masyarakat adat mengungkapkan dugaan konflik kepentingan berhubungan dengan kedua fasilitas ekonomi yang baru ini. Dalam siaran pers di Manokwari (24/11) masyarakat mengaitkan kedua “Proyek Strategis Negara” ini dengan kepentingan Menteri Investasi dalam PT-PT yang terkait pula. Dicatat bahwa dalam salah satu PT, PT Bersama Papua Unggul (PT BPU), Bahlil Lahadalia memiliki saham sebanyak 450 lembar yang nilai investasinya sebesar 675 juta rupiah. Dicatat pula bahwa Komisaris Independen PT Pupuk Kaltim, Eka Sastra, merangkap “Staf Khusus” pada Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Dalam siaran pers juga disinggung mengenai kepentingan kegiatan “kayu ilegal”. PT Aulia Mitra Dewata (PT AMD) yang diduga menebang kayu tanpa izin, dan lokasinya dekat Bandara Siboru, telah memenangkan proyek pekerjaan pematangan Bandara

46 <https://suarapapua.com/2023/08/10/demi-kek-menteri-bahlil-lahadalia-pasang-badan-klagilit-ko-pu-tanah-dimana/>; <https://papua.tribunnews.com/2023/11/26/filep-wamafma-investasi-itu-penting-tapi-jangan-memarginalkan-masyarakat-adat-dan-oap>.

Siboru senilai 92,5 miliar rupiah (2019-2021). Selanjutnya dalam siaran pers diangkat fakta bahwa masyarakat setempat, kampung Fior,⁴⁷ belum diberikan informasi yang berarti mengenai pengoperasian PT Pupuk Kaltim serta konsekuensi bagi masyarakat lokal. Sementara PT Pupuk Kaltim mengklaim memiliki tanah seluas 2.000 ha.⁴⁸

7. Lingkungan-Deforestasi-Agrobisnis

- **Hak masyarakat adat:** Ternyata masyarakat adat tidak pernah dapat mengurangi intensitas perjuangannya. Sesuatu yang sebenarnya begitu logis, yakni bahwa para penduduk memiliki hak atas keutuhan habitat warisan nenek moyangnya, namun para penguasa ternyata berbeda pendapat. Maka, haknya perlu diangkat dan diperjuangkan terus. Apalagi karena mereka mengalami bahwa sampai di pengadilan hak mereka ditolak. Contoh terakhir adalah penolakan tuntutan masyarakat Awyu, Boven Digoel, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura (*lih.* subbab 5, “Dua puluh mahasiswa ditangkap aparat” di atas). Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jayapura, Benhur Wally, menekankan bahwa masyarakat adat baik secara kolektif maupun individual mempunyai hak dan kebebasan yang setara dengan semua orang. “Masyarakat berhak menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan ruang hidup atau wilayah adatnya beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya,” demikian tegas Wally.⁴⁹ Setiap bulan ada kasus masyarakat adat minta diakui, selain masyarakat adat Awyu juga pelbagai suku di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akhir-akhir ini terus mengangkat suara.⁵⁰ Mereka tetap mengharapkan bahwa akhirnya seruan hati mereka didengar.⁵¹

47 <https://koran.tempo.co/read/nasional/485844/cemas-warga-fakfak-karena-psn>.

48 <https://suarapapua.com/20213/11/26/masyarakat-sipil-ungkap-dugaan-konflik-kepentingan-proyek-strategis-nasional-bandara-siboru-dan-pupuk-kaltim/>.

49 <https://jubi.id/tanah-papua/2023/masyarakat-adat-berhak-hidup-bebas-setara/>; dan <https://jubi.id/seni-budaya/2023/aman-ruang-kebebasan-berekspresi-masyarakat-adat-di-tanah-papua-terpangkas-habis/>.

50 <https://en.jubi.id/students-and-indigenous-groups-demand-revocation-of-forest-company-licenses-in-southwest-papua/>.

51 <https://koran.tempo.co/read/485224/siapa-mengubur-ruu-masyarakat-adat>.

8. Menuju “Papua Tanah Damai”

Seruan tokoh bangsa demi perdamaian di Tanah Papua: Pada tanggal 9 November 2023 sejumlah tokoh mengangkat suara untuk memajukan perwujudan perdamaian di Papua. Seruan mereka berisi sebagai berikut:⁵²

Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina, adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus-menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama, dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

Tertanda,

52 <https://pgi.or.id/seruan-tokoh-bangsa-untuk-perdamaian-di-tanah-papua/>.

Dr. (H.C.) Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ
Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A.
Drs. Marzuki Darusman, S.H.
Alissa Wahid, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Prof. Dr. H.Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP Konferensi Waligereja Indonesia

Refleksi lanjut

Sudah tentu para pejuang perdamaian di Papua menyambut dengan gembira hati inisiatif yang diambil beberapa “tokoh bangsa”. Seruan serta keprihatinan mereka sangat tepat, dihargai, dan diharapkan bahwa inisiatif ini akan ditindaklanjuti, bukan saja di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional di Papua sendiri. Selama bertahun-tahun para aktivis perdamaian di Papua merasa bahwa perjuangan mereka kurang diangkat oleh para “tokoh bangsa”, termasuk para pimpinan agama. Secara khusus umat bangsa Papua yang mayoritas beragama Kristen/Katolik merasa sangat ditinggalkan oleh para pimpinan di Jakarta.

Karena kami sendiri beragama Katolik, kami secara khusus mencatat bahwa para aktivis perdamaian di Papua merasa ditinggalkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Malahan kadang-kadang ada kesan bahwa informasi mengenai keadaan di Papua—yang faktual, yang disalurkan ke KWI oleh para aktivis di lapangan—kurang diberikan perhatian atau malahan tidak dipercaya. Ada kesan bahwa pimpinan KWI lebih memprioritaskan “pengamanan institusionalnya” daripada “misi kenabiannya”. Kesannya, KWI kurang menghargai aktivis dari umatnya sendiri, seperti misalkan para aktivis perdamaian yang bergabung dalam Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Papua dan/atau bergabung dalam “perkumpulan para imam asli Papua”.

Syukurlah Mgr. Yanuarius You (Uskup Jayapura) yang menghadiri acara presentasi seruan ini mengingatkan para rekan uskup akan adanya masalah kekerasan yang terjadi di Papua secara berkepanjangan. Nyawa pun sudah seperti dianggap tidak berarti, dan masyarakat sipil yang harus menjadi korban. “Rakyat terpaksa harus mengungsi, terdiskriminasi, dan dimarginalkan. Belum lagi adanya eksploitasi alam yang besar. Sebab itu, seruan ini sangat tepat dan dialog harus terus dikedepankan agar kedamaian sungguh terjadi di Papua,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, “Papua masih bersimbah darah. Luka lama belum kering, tapi luka baru sudah ditoreh oleh berbagai kepentingan. PGI melihat derita Papua adalah derita kita semua.

Sebab itu, hendaknya kita terbebani untuk mendesak semua pihak yang bertikai, terkhusus pemerintah, juga elemen masyarakat, paling sedikit melakukan jeda kemanusiaan, agar kekerasan dapat dihentikan.”

Walau kami mencatat beberapa unsur kritis di atas ini, umat beragama di Papua tetap sangat mengharapkan supaya “seruan hati” dan “misi kemanusiaan” Uskup Jayapura mendapat dukungan aktif dari para teman uskup di KWI, supaya suara Gereja Katolik akhirnya juga bergema dengan lebih nyata dan memprioritaskan “misi kenabian dan pastoral Gereja”.

Pokoknya, kami sangat bergembira atas tanda keterlibatan awal yang terumus dalam seruan ini dan supaya seruan ini betul-betul ditindaklanjuti oleh semua pihak yang menandatangani. Secara khusus, semoga para agamawan bersama menempatkan diri di baris depan ketika martabat manusia diinjak, dan secara aktif mendesak “proses perdamaian” di Papua. Itulah doa kami. Sekaligus, dan tidak kalah mendesak, adalah harapan supaya seruan ini ditindaklanjuti di tingkat regional di Papua sendiri. Sudah waktunya para agamawan, secara khusus Gereja-Gereja, meninggalkan “sikap menonton dan menunggu” dan mulai tampil secara bersama, dan dengan lebih konkret memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil demi perdamaian di Papua. Salah satu yang paling mendesak adalah membuka kembali pembahasan dan perwujudan suatu “jeda kemanusiaan” supaya akhirnya kekerasan di Papua berkurang.⁵³ Perlu suatu keadaan tanpa “kekerasan harian seperti sekarang ini” untuk saling mendekatkan segala pihak yang berkonflik guna saling mendengar dan bersama mencari suatu solusi yang bermartabat. Sikap “menonton, diam, dan menunggu” sulit diterima lagi oleh umatnya. Seruan oleh sejumlah “tokoh bangsa” dapat mendorong para pemimpin agama di Papua untuk *bangkit bersama*, menjalankan misi pastoral, yakni “menciptakan perdamaian, hidup dalam damai seluruh umat manusia sesuai citra Allah sendiri” di Papua. Semoga! (TvdB)

9. Gerakan Pemerintah Papua

- **Kasus korupsi di Sorong:** Sekali lagi ada pejabat—dalam hal ini pejabat bupati—yang ditangkap karena diduga terlibat dalam kegiatan korupsi. Kedudukan permasalahan belum terlalu jelas. Namun jelas bahwa ada

53 Mendesaknya “jeda kemanusiaan” ini juga diserukan oleh Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) seusai kongresnya; <https://en.jubi.id/pmkri-voices-support-for-humanitarian-pause-in-papua/> dan <https://en.jubi.id/komnas-ham-calls-for-humanitarian-pause-in-papua-conflict/>.

juga keterlibatan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan di daerah.⁵⁴ Bukan berlebihan pemerintah daerah sudah mengambil sikap demi pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁵⁵ *Sangat berharap bukan kata-kata saja!* (TvdB)

- **Penggantian pejabat gubernur:** Provinsi Papua Pegunungan mengalami pergantian pejabat gubernur, Bapak Nikolaus Kondomo diganti oleh Bapak Velix Wanggai. Bapak Velix sudah lama berperan di tingkat pemerintah Jakarta, secara khusus untuk memperhatikan “desk Papua”.⁵⁶

10. Tren/Gerakan Politik di Pusat Indonesia

Nasional

- **Kemerosotan demokrasi di Indonesia:** Yang paling dibicarakan di Indonesia adalah segala macam aspek bahaya kemerosotan demokrasinya. Terdorong oleh gaya penerapan hukum secara kontroversial serta keraguan akan netralitas para pejabat tinggi dan pola berkampanye sekitar Pemilu, pemberitaan mengenai bahaya kehilangan nilai-nilai demokrasi makin diangkat. Kritik yang langsung diarahkan kepada Presiden Joko Widodo juga meningkat. Sudah tentu suasana selama kampanye menuju pemilu akan memperlihatkan suatu peningkatan “suhu perpolitikan”.⁵⁷

Internasional

- **PIF mengutus delegasi ke Indonesia:** Sambil menindaklanjuti hasil pertemuan *Melanesian Spearhead Group (MSG)*, dalam pertemuan sidang *Pacific Islands Forum (PIF)* dibentuk suatu delegasi untuk memperhatikan persoalan Papua. Delegasi ini, yang terdiri dari pimpinan Fiji dan Papua New Guinea, diutus mendekati pemerintah Indonesia berkaitan dengan penyelesaian konflik di Papua. Secara khusus mereka ditugaskan untuk

54 <https://jubi.id/polhukam/2023/kpk-tangkap-tangan-penjabat-bupati-sorong-dan-pemeriksa-bpk-papua-barat/>.

55 <https://jubi.id/polhukam/2023/pemerintah-daerah-di-papua-dukung-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/>.

56 <https://papua.tribunnews.com/2023/11/13/velix-wanggai-dilantik-jadi-pj-gubernur-papua-pegunungan-nikolaus-kondomo-diganti>.

57 <https://koran.tempo.co/read/485829/tangan-tangan-perusak-demokrasi>; dan <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/21355481/jusuf-kalla-kepada-jokowi-tidak-mungkin-2045-baik-kalau-hari-ini-tidak-baik>; serta <https://majalah.tempo.co/read/170078/jokowi-merusak-banyak-sendi-demokrasi>.

mendesak Indonesia mengizinkan kunjungan oleh Rappporteur PBB ke Papua.⁵⁸

11. Serba-Serbi

- **Kunjungan Presiden:** Sekali lagi Presiden mengunjungi Papua. Kali ini beliau singgah di Biak, Manokwari, dan Fakfak. Kegiatan antara lain pembukaan “International Sailing Event” di Biak, meresmikan dua bandara (Manokwari dan Fakfak), dan peletakan batu pertama pabrik pupuk (Fakfak).⁵⁹
- **Victor Yeimo meraih penghargaan:** Setelah sekian lama dalam proses pengadilan dan berdiam di penjara, Victor Yeimo dapat merasa bergembira karena diberikan penghargaan khusus di Australia. Beliau diberikan penghargaan “Voltaire Empty Chair” yang ditujukan kepada orang yang sangat berjasa dalam bidang perjuangan hak hidup dan hak asasi manusia.⁶⁰ *Selamat berbahagia!*

Jayapura, 30 November 2023

58 <https://www.fbcnews.com.fj/news/rabuka-marape-to-lead-west-papua-talks/>; <https://jubi.id/pasifik/2023/gereja-pasifik-sambut-baik-langkah-msg-tentang-utusan-khusus-papua-barat/>.

59 <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-kunjungan-kerja-ke-provinsi-papua/>.

60 <https://suarapapua.com/2023/11/10/gigih-perjuangkan-ham-papua-victor-yeimo-raih-penghargaan-voltaire-empty-chair/?fbclid=IwAR2aNtcC0u8ejwWi4xXTAS0RLCKJpx->.

10 Tahun Kegelapan Melanda Orang Asli Papua

SOCRATEZ YOMAN

1. Pendahuluan

Lagu “Aku Papua” karya Franky Sahilatua, yang salah satu penggalan liriknya berbunyi “Surga kecil jatuh ke bumi” dan lagu “Tanah Papua” karya Yance Rumbino, yang salah satu penggalan liriknya berbunyi “Cenderawasih burung emas Sungaimu yang deras mengalirkan emas” hanyalah pelipur lara bagi Orang Asli Papua (OAP). Pendeta Dr. Karel Phil Erari dalam bukunya *Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru* mengatakan: “Papua sampai dengan awal tahun 1960 tergolong kawasan yang relatif sangat aman di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Masih terjaga sikap dasar menghargai dan menghormati hak milik orang lain untuk tidak dirampas dan dicuri.” (Erari, 2006:177).

Erari melanjutkan: “Negeri ini yang sejak zaman dulu disebut Pulau Surga (*Island of Paradise*) telah berubah menjadi “tanah tumpah darah” karena darah ribuan rakyat yang terbunuh demi suatu perjuangan hak asasi menentukan masa depannya secara damai” (2006:180). Semua yang indah itu sudah berubah dan sudah identik dengan konflik, tirani kekerasan, militerisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme modern, rasisme, ketidakadilan, pelanggaran HAM berat, pemusnahan etnis, marginalisasi, kemiskinan, kelaparan, labelisasi, stigmatisasi, mitos, *hoax*, menjadi pasar kekerasan untuk tujuan perburuan ekonomi para elit Indonesia.

Sejarah konflik Papua yang panjang merupakan tragedi kemanusiaan yang kronis dan menahun, tetapi negara membelokkan akar konflik itu dengan mengedepankan “kesejahteraan”. Negara berusaha menutupi seluruh akar konflik dan persoalan ketidakadilan, dengan mengatakan bahwa persoalan Papua adalah masalah kesejahteraan. Kata “kesejahteraan” (*wellbeing* atau *welfare*) itu saudara kembar kedamaian. Untuk mewujudkan rakyat dan bangsa Papua “sejahtera” dan “damai” itu ada syaratnya. Persyaratan kesejahteraan dan kedamaian ialah

keadilan dan kebenaran. Tanpa rasa keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian itu mimpi-mimpi kosong.

Jenderal TNI Amir Machmud (kelahiran Cimahi, Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 1923) adalah orang pertama yang menanamkan kata “kesejahteraan” kepada rakyat dan bangsa Papua, melalui peserta Pepera 1969 yang diseleksi dan diawasi ABRI di Merauke, pada 14 Juli 1969. Penipuan dengan kata “kesejahteraan” itu diabadikan dalam laporan Dr. Fernando Ortiz Sanz, diplomat dari Bolivia yang mewakili Sekretaris Jenderal PBB, Maha Thray Sithu U Thant, sebagai berikut: “Menteri Dalam Negeri Indonesia Jenderal TNI Amir Machmud menyatakan Pemerintah Indonesia berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Papua; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia.” (Sumber: *United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN Assembly*, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 18, p. 2).

Muhammad Jusuf Kalla pernah mengatakan: “Masalah Papua adalah masalah kesejahteraan. Semuanya dikasih, jadi mereka menuntut dan meminta apa lagi” (Sumber: TVOne, 8 November 2011).

Membaca pernyataan Jenderal TNI Amir Machmud dan Muhammad Jusuf Kalla tersebut, Papua sepertinya dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik selama bertahun-tahun dalam upaya pendudukan dan penjajahan Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua. Kebanyakan orang sangat keliru dan melihat persoalan Papua tidak dengan utuh, tapi hanya sebatas pada kesejahteraan. Mereka berpikir bahwa orang Papua bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kesejahteraan bukan poin yang mendesak untuk diatasi. Pandangan seperti ini kerdil, sempit dalam melihat akar persoalan di Papua.

Rakyat dan bangsa Papua bukan lapar, bukan butuh makan dan minum. Rakyat dan bangsa Papua adalah orang-orang yang kaya dan mempunyai segala sesuatu sebelum bangsa Indonesia datang dan justru membuat keadaan sangat buruk seperti sekarang ini. Penghasilan dari tambang emas di Mimika, gas di Bintuni, dan minyak di Sorong sangat cukup untuk untuk membangun, memajukan, dan menyejahterakan rakyat dan bangsa Papua, kalau sumber daya alam itu dikelola untuk kesejahteraan bangsa Papua sebagai pemilik.

Benarlah apa yang disampaikan M. Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu: “Akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, terutama dalam kesejahteraan ekonomi. Kekayaan alam di wilayah itu dikeruk dan hasilnya dinikmati perusahaan asing dan pemerintah pusat. Rakyat setempat justru miskin dan kurang pendidikan.” (*Kompas*, 11 November 2011).

Kata “kesejahteraan” dijadikan tameng untuk menutupi empat akar persoalan Papua yang sudah berhasil ditemukan dan dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (2008).

Empat akar persoalan Papua tersebut adalah sebagai berikut:

- a. sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia,
- b. kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM,
- c. marginalisasi dan diskriminasi Orang Asli Papua,
- d. kegagalan pembangunan di Papua.

Selain kata “kesejahteraan”, Indonesia juga memproduksi mitos, stigma, dan label separatis, makar, anggota OPM, KKB dan teroris, monyet, gorila dan tikus-tikus, pemabuk, terbelakang, dan lain-lainnya yang diciptakan sebagai tameng untuk menyembunyikan akar sejarah konflik yang sebenarnya, yaitu rasisme, fasisme, militerisme, kolonialisme, neo-kapitalisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marginalisasi, genosida, sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa Pepera 1969.

Prof. Dr. Franz Magnis, Pastor Frans Lieshout, OFM, dan Dr. Anti Solaiman pernah menyatakan, “Papua adalah luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.... Kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata.” (Sumber: Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, 2015:255,257).

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber: Frans Lieshout, OFM, *Guru dan Gembala bagi Papua*, 2020:601).

Ibu Dr. Anti Solaiman dalam peluncuran 5 buku *Seri Sejarah Politik, HAM dan Demokrasi di West Papua* karya Markus Haluk di Graha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis 15 Juni 2023 menyatakan: “Buku ini cerita tentang luka. Luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun.”

2. Latar Belakang Otonomi Khusus 2001

Apakah Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah pemberian cuma-cuma dari Indonesia? Negara dalam keadaan sadar sangat mengabaikan dan mengaburkan latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Pasca tumbangannya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan bangsa Papua dengan cara damai dan bermartabat dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan.

2.1 Delegasi Tim 100

Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa Papua bertemu dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999. Mereka menyatakan: "... dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua menyatakan bahwa:

- *Pertama*, kami bangsa Papua berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.
- *Kedua*, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggung jawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.
- *Ketiga*, jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua, maka; (1) segera diadakan perundingan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); (2) Kami bangsa Papua menyatakan tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999."

2.2. Musyawarah Besar (Mubes) 23-26 Februari 2000

Dari 7 butir keputusan peserta Mubes, pada butir 4 dinyatakan "Bahwa kami bangsa Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan Pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara

Republik Indonesia, bangsa Papua mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genosida bangsa Papua, maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka dan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia serta kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua sejak 1 Desember 1961.”

2.3. Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua, 26 Mei–4 Juni 2000

Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid ini memutuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut.

- a. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
- b. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
- c. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil Pepera karena dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer, dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.
- d. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.
- e. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan internasional.
- f. PBB, AS, dan Belanda harus meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil, dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Menjadi jelas dan terang latar belakang lahir Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000,

dan Kongres II Nasional Rakyat dan Bangsa Papua pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.

3. Kekerasan Negara Selama 10 Tahun

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum berhasil memadamkan bara api dan menyembuhkan luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. Konflik kekerasan, ketidakadilan, kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, rasisme, pemusnahan etnis OAP, peminggiran atau marginalisasi, diskriminasi, perampokan, pencurian sumber daya alam, semua kekejaman dan kebrutalan penguasa terjadi di Papua.

Luka membusuk dan bernanah, yaitu akar persoalan konflik berkepanjangan di Tanah Papua tidak bisa diselesaikan dengan kunjungan-kunjungan ke Australia dan Papua New Guinea (PNG). Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada 4-5 Juni 2023. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo berbicara secara intensif dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke PNG pada 5 Juli 2023 dan bertemu dengan Perdana Menteri James Marape. Dari hasil pertemuan di dua negara dengan dua pemimpin ini, Presiden Joko Widodo dengan bangga mengatakan: “Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun kepada Papua New Guinea dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan.” Itu dikatakan Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Papua Street Carnival di Jayapura tanggal 7 Juli 2023.

Bara api dan luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia dan tidak bisa dan tidak akan selesai dengan mengunjungi negara-negara lain. Bara api dan luka membusuk dan bernanah di dalam bangsa Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan festival budaya, juga tidak bisa diselesaikan dengan Otonomi Khusus ataupun pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merugikan Orang Asli Papua.

Melihat persoalan ketidakadilan, siasat adu-domba, dan tragedi kemanusiaan yang sangat buruk seperti ini, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengambil langkah-langkah yang lebih adil dan manusiawi untuk menyelesaikan bara api dan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia, yaitu dengan memahami empat pokok akar masalah Papua.

Terlihat bahwa pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai cara untuk menghilangkan empat akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (yang sekarang disebut BRIN) yang tertuang dalam buku *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (2008).

Kekerasan terhadap OAP terus berlangsung karena ada perintah negara. Perintah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia itu belum dicabut sampai saat ini. Ini adalah masalah kekerasan militer. Menanggapi insiden pembunuhan pekerja Trans Papua 1-2 Desember 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan: “Saya telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan tersebut. Kita akan tumpas mereka sampai akar-akarnya. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata di Tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita tidak akan pernah takut.” (*Detiknews*, 5 Desember 2018). Sikap Presiden Joko Widodo tersebut didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Menko Polkam Wiranto.

Pada saat yang lain Menko Polkam Mahfud MD pernah menyatakan, “Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro-Republik.” Hal itu disampaikan di tengah pengumuman atas penetapan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Setelah pengumuman tersebut, pemerintah kemudian memerintahkan aparat keamanan untuk memburu KKB. (*Kompas.com*, 29 April 2021)

Tidak heran bila dengan demikian militer dan kepolisian diberi legitimasi untuk melakukan operasi militer di Papua. Orang-orang Papua yang berani menyampaikan aspirasinya dikategorikan sebagai teroris. Karena label teroris, maka mutilasi dan penyiksaan dan pembunuhan OAP dianggap sah dan tidak salah. Ada imunitas karena pelaku kejahatan dilindungi dan dihargai sebagai pahlawan.

Pendekatan kekerasan militer tidak pernah berubah dan tidak menyelesaikan akar konflik Papua. Kekerasan militer itu memperpanjang penderitaan di pihak Orang Asli Papua sampai sekarang ini. Itulah sumber dan penyebab kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua.

Dalam situasi kekerasan yang semakin meningkat, proses pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang diamanatkan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 ikut terganggu, yang terbukti dengan tidak adanya perlindungan (*protection*), pengakuan (*recognition*), keberpihakan

(*affirmative action*), dan pemberdayaan (*empowering*) terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Secara politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Papua dikuasai oleh orang-orang pendatang. Ini adalah ancaman serius yang menyebabkan semakin tersingkirnya Orang Asli Papua di tanah leluhur mereka. Dengan demikian, terjadi perampasan hak-hak dasar OAP dalam bidang politik. Lihat bukti dan contohnya sebagai berikut.

- a. Kabupaten Sarmi 20 kursi: pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.
- b. Kabupaten Boven Digul 20 kursi: pendatang 16 orang dan OAP 6 orang.
- c. Kabupaten Asmat 25 kursi: pendatang 11 orang dan OAP 14 orang.
- d. Kabupaten Mimika 35 kursi: pendatang 17 orang dan OAP 18 orang.
- e. Kabupaten Fakfak 20 kursi: pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.
- f. Kabupaten Raja Ampat 20 kursi: pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.
- g. Kabupaten Sorong 25 kursi: pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.
- h. Kabupaten Teluk Wondama 25 kursi: pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.
- i. Kabupaten Merauke 30 kursi: pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.
- j. Kabupaten Sorong Selatan 20 kursi: pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.
- k. Kota Jayapura 40 kursi: pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.
- l. Kabupaten Keerom 23 kursi: pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.
- m. Kabupaten Jayapura 25 kursi: pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

Ada pula para pengungsi di atas tanah leluhur OAP. Mereka terpaksa dipindahkan dari daerah asal mereka ke daerah baru. Akar-akar kehidupan mereka dicabut. Ada pengungsi Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Maybrat. Para pengungsi ini belum kembali ke tempat asal mereka karena alasan keselamatan dan karena mereka merasa terancam oleh aparat keamanan.

Sudah bukan rahasia bahwa Papua dijadikan ajang perebutan kepentingan ekonomi dan politik. Pentingnya keamanan dan stabilitas hanyalah merupakan alasan untuk menekan OAP. Kontrak-kontrak ekonomi dan politik terjadi di luar partisipasi OAP. Proses seperti itu sejak lama semakin menyingkirkan dan memarginalkan OAP. OAP diperlakukan sebagai objek dari suatu pemerintahan yang berorientasi pada motif ekonomi dan politik.

Komunikasi politik para penguasa Indonesia tentang Papua dari waktu ke waktu semakin buruk. Rakyat Indonesia dididik dalam komunikasi yang buruk

tersebut. Rasisme dan fasisme menjadi narasi dan fondasi yang buruk bagi Indonesia dalam membangun Papua selama 62 tahun sejak 1 Desember 1961 sampai sekarang. Narasi yang rusak dan buruk yang dibangun oleh Indonesia selama 62 tahun itu terbukti dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2023 pada saat kunjungan ke Papua tanggal 5-7 Juli 2023.

Sebagai Presiden RI, Joko Widodo tidak mampu melihat secara mendalam akar masalah dan persoalan rumit yang dihadapi Indonesia di Papua. Masalah konflik Papua sudah menjadi luka membusuk dan bernanah, seperti duri dalam daging, seperti batu kerikil dalam sepatu, atau seperti seekor nyamuk pada malam hari yang mengusik dan mengganggu orang yang sedang tidur. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2023 itu adalah pencerminan sikap Pemerintah Indonesia dalam melihat persoalan ketidakadilan, kekejaman, kejahatan negara, pelanggaran HAM berat, marginalisasi, genosida akibat dari kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan militerisme di Papua.

Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa komunikasi politik dan relasi sosial dengan rakyat dan bangsa Papua itu 99% rusak dan buruk. “Jangan dilihat (negatif). Karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di mana pun, di Papua kan juga aman-aman saja.” “Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga gak ada masalah, ya kan? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri.” Presiden Joko Widodo tidak mampu melihat masalah di Papua secara mendalam.

Sejak awal narasi buruk dibangun Indonesia terhadap Orang Asli Papua dengan memberikan stigma, label, dan mitos-mitos yang sangat rasis, seperti separatis, OPM, makar, KKB, KKSB, teroris, GPK, GPL, monyet, gorila, tikus-tikus, kopi susu, nyamuk-nyamuk, dan belalang-belalang.

Contoh komunikasi politik yang rusak dan buruk adalah stigma makar. Ini disalahartikan para praktisi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal yang dimaksud makar adalah jika orang angkat senjata di depan Istana Negara. Di Papua, mereka yang pada saat demo damai menggunakan bendera Bintang Kejora atau berorasi tentang hak-hak demokrasi bangsa Papua langsung dituduh makar. Sangat disayangkan banyak OAP telah menjadi korban dan menderita puluhan tahun di penjara karena stigma makar yang keliru ditafsirkan jaksa dan polisi.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2023 itu merupakan upaya membelokkan atau mengaburkan empat akar konflik yang ditemukan Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau yang sekarang disebut Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Ada masalah baru lain lagi yang dilakukan Indonesia, yaitu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebenarnya ditentang banyak Orang Asli Papua. DOB adalah surga bagi pendatang, tetapi api neraka dan mesin pemusnah Orang Asli Papua. Saya paham mengenai alasan mengapa Papua dimekarkan. Oleh karena itu, saya sejak dulu dengan konsisten sampai sekarang tidak setuju dengan pemekaran wilayah Papua.

DOB itu adalah sarana untuk pendudukan, penjajahan, kepentingan militer, kepentingan memindahkan penduduk Indonesia ke Tanah Papua, dan untuk kepentingan ekonomi. DOB itu bukan untuk kepentingan Orang Asli Papua.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku sedang menyiapkan satu markas komando daerah militer (Kodam) baru di daerah otonomi baru (DOB) Papua. Saat ini, tambah Yudo, pasukan teritorial TNI sedang mencari lokasi untuk dijadikan markas Kodam baru tersebut. “Iya, nanti akan ada penambahan Kodam. Nanti tempatnya, kita cek dulu tempatnya, yang memungkinkan bisa melingkupi empat provinsi yang baru,” kata Yudo usai Rapim TNI yang digelar di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, Kamis 9 Februari 2023.

Jenderal TNI A.M. Hendropriyono sebagai salah satu tokoh intelijen dan militer Indonesia pernah mengatakan, “Dulu itu ada pemikiran sampai 7 provinsi. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Ini sebenarnya bukan syarat suatu provinsi, melainkan syarat untuk meredam pemberontakan. Pemikiran ini adalah masalah keamanan dan masalah politik.”

Saya sudah lama merenungkan, mencermati, menganalisis, mengamati, serta menilai bahwa DOB ini sangat kejam dan berbahaya bagi Orang Asli Papua. Pengamatan saya tentang DOB ini saya gambarkan sebagai ular piton besar, harimau ganas, buaya liar, dan singa yang jahat siap menerkam Orang Asli Papua, serta menjadi bencana besar bagi Orang Asli Papua. DOB adalah ranjau yang ditanam di Papua dan sewaktu-waktu akan meledak.

Jejak-jejak kekerasan dan kejahatan negara adalah salah satu dari empat akar masalah Papua sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Negara harus bertanggung jawab terhadap berbagai bentuk pelanggaran berat HAM dan ketidakadilan di Papua sebagai berikut.

- a. Biak berdarah pada 6 Juli 1998.
- b. Abepura (Abe) berdarah pada 7 Desember 2000.
- c. Wasior berdarah pada 13 Juni 2001.

- d. Kasus Theodorus (Theys) Hiyo Eluay dan Aristoteles Masoka pada 10 November 2001.
- e. Wamena berdarah pada 4 April 2003.
- f. Kasus Musa (Mako) Tabuni 14 Juni 2012.
- g. Kasus Paniai berdarah pada 8 Desember 2014.
- h. Kasus Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 November 2020.
- i. Kasus mutilasi 4 warga sipil di Timika pada pada 22 Agustus 2022. Empat korban adalah Arnold Lokbere, Leman Nirigi, Iran Nirigi, dan Atis Titini. Saat itu empat korban bertemu dengan sembilan pelaku (5 anggota TNI dan 4 warga sipil).
- j. Bagaimana dan sejauh mana penguasa kolonial Indonesia bertanggung jawab untuk pengembalian 60.000 penduduk orang asli Papua ke kampung halaman mereka dan sampai saat ini masih berada di daerah-daerah pengungsian akibat operasi militer besar-besaran di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.
- k. Kasus sandera pilot Philip Mark Mehrstens pada 7 Februari 2023 di Nduga yang dilakukan oleh TPNPB sampai sekarang belum dibebaskan.
- l. Rakyat dan bangsa Papua melakukan demo damai pada 12-14 Juli 2023 untuk mendukung ULMWP sebagai anggota penuh MSG. Ini adalah masalah besar dan bukan tidak ada masalah.
- m. Mutilasi 4 warga sipil di Timika pada 23 Agustus 2023.

Saat ini terjadi krisis kelaparan di Kabupaten Puncak di dekat tambang emas yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia pada awal Agustus 2023. Ini membuktikan bahwa Indonesia telah gagal total membangun OAP selama 60 tahun sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang. Seluruh persoalan ketidakadilan dan kekerasan demi kekerasan dan juga pelanggaran HAM berat selama 10 tahun ini saya gambarkan sebagai 10 tahun kegelapan melanda Orang Asli Papua karena di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke dikontrol dan dikendalikan pemerintahan militer, sementara kendali pemerintahan sipil lumpuh total.

DOB di atas tanah adat milik OAP akhirnya menjadi alat untuk memperluas dan memperkuat wilayah pendudukan, penjajahan, perampokan, pencurian, dan pemusnahan OAP di Tanah Papua.

Sejak 1 Desember 1961 sampai sekarang, Tanah Papua adalah masalah militer dan bukan masalah sipil. Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan kekejaman dan kekerasan dengan menggunakan moncong senjata dengan tujuan

untuk merampok atau menjarah kekayaan sumber daya alam dan memusnahkan Orang Asli Papua.

Tidak heran, seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke dikendalikan militer karena “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintah militer” (Sumber: Amiruddin Al Rahab, *Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*: 2020:42).

Pastor Frans Lieshout memberikan kesaksian tentang pengalaman hidupnya sebagai berikut, “Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM, *Gembala dan Guru bagi Papua*, 2020, hlm. 593).

Melihat dan menyadari keadaan yang sangat buruk dan gelap ini, jelaslah bahwa OAP telah dan sedang mengalami fakta ketidakadilan sejarah, ketidakadilan hukum, dan ketidakadilan kemanusiaan. Oleh karenanya, tingkat kepercayaan OAP terhadap Pemerintah Indonesia sudah berada pada titik nol.

Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak normal seperti ini, dalam diri OAP telah lahir beberapa sikap, yaitu kesadaran (*awareness*), kebangkitan (*awakening*), persatuan (*unity*), ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakpatuhan (*disobedience*), penolakan (*rejection*), perlawanan (*resistance*), dan solidaritas (*solidarity*) serta sikap apatis terhadap penguasa.

Secara umum, sepertinya Indonesia sudah berhasil memecah belah OAP melalui pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. Indonesia telah membina serta mengindoktrinasi banyak generasi muda Papua untuk menjadi komprador dan agitator. Ideologi dan nasionalisme OAP akan tetap dan terus bertumbuh subur dan semakin mengakar lebih dalam di Papua karena ini adalah harga diri dan martabat kemanusiaan di atas tanah leluhur rakyat dan bangsa Papua. Harga diri, martabat kemanusiaan, ideologi dan nasionalisme rakyat dan bangsa Papua tidak bisa digadaikan dengan nilai uang, pemekaran DOB, dan kedudukan politik.

EPILOG: Simpul-Simpul Pembelajaran Selama Sepuluh Tahun Terakhir

PIUS SURATMAN KARTASASMITA

Memaknai dan Menarik Benang Merah dari 21 Tulisan

Dalam rangka memaknai dan menarik benang merah dari 21 tulisan yang dimuat dalam bunga rampai ini, tim editor melakukan empat langkah sistematis berikut. *Pertama*, melakukan pengelompokan tulisan ke dalam empat kategori dan menyusunnya dalam susunan yang sistematis seperti yang tampak dalam daftar isi. *Kedua*, menyimak komentar para *reviewer* mengenai ke-21 tulisan dan menggunakan komentar-komentar tersebut untuk melakukan triangulasi sumber informasi dan metode yang digunakan untuk memvalidasi informasi yang terkandung dalam ke-21 artikel. *Ketiga*, melakukan analisis konten dari ke-21 tulisan dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti. *Keempat*, memaknai hasil analisis Atlas.ti dengan cara membandingkannya dengan hasil studi pustaka sistematis.

Pengelompokan tulisan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pembahasan serta menemukan benang merah gagasan utuh yang menjadi pengikat bunga rampai ini. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga fokus pembaca terhadap gagasan dasar dalam bunga rampai ini, mengingat variasi di antara artikel-artikel tersebut sangat tinggi, baik dari isi maupun format tulisannya. Untuk tujuan tersebut seluruh 21 tulisan yang terkumpul dibagi ke dalam empat kelompok besar sesuai dengan 4 akar permasalahan Papua yang terdapat di dalam *Papua Road Map* yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2009 yang sampai saat ini dianggap masih relevan. Keempat kategori masalah tersebut meliputi:

1. sejarah dan status politik Papua,
2. marginalisasi dan diskriminasi Orang Asli Papua,
3. kegagalan pembangunan, dan
4. kekerasan negara dan pelanggaran HAM.¹

Secara grafis keempat kategori masalah Papua tersebut divisualisasikan seperti dalam **Diagram 1**.

Adapun *intisari* 21 tulisan yang dapat disarikan dari komentar para *reviewer*, baik komentar tertulis maupun komentar lisan yang disampaikan dalam *workshop* tanggal 1 November 2023, dapat dirumuskan menjadi dua hal. *Pertama*, dilihat dari isi tulisan, hampir semua penulis mencerminkan keprihatinan mendalam tentang satu atau dua bahkan banyak aspek dari masalah kompleks yang dialami masyarakat Papua selama sepuluh tahun terakhir. Para *reviewer* mencatat bahwa para penulis mengharapkan terwujudnya keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. *Kedua*, dilihat dari formatnya, tulisan-tulisan yang terkumpul sangat beragam. Hampir semua tulisan tidak menggunakan format, sistematika, diksi dan narasi yang layaknya digunakan dalam sebuah *paper* akademik. Hanya 3 dari 21 tulisan menggunakan format tulisan akademik, lengkap dengan kerangka konseptual, argumen teoretis maupun empiris, serta pencantuman daftar pustaka.

Sehubungan dengan hal tersebut, para *reviewer* memberikan tiga alternatif rekomendasi, yaitu *pertama*, menyisihkan tulisan-tulisan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan akademik; *kedua*, melakukan *hard editing*, baik terhadap isi maupun format tulisan; *ketiga*, mengelompokan tulisan-tulisan ke dalam dua kategori tulisan akademik dan tulisan populer. Setelah melewati proses diskusi dan refleksi, serta dilandasi keinginan untuk menampung dan mendengarkan berbagai cerita dari Papua dalam berbagai macam versi, tim editor akhirnya mengambil beberapa keputusan untuk menyajikan semua tulisan yang terkumpul dalam bunga rampai ini dengan hanya melakukan *editing* bahasa yang tidak mengubah isi dan makna tulisan. Dengan demikian, para pembaca yang budiman diharapkan dapat ikut menghayati kompleksnya menyelesaikan persoalan Papua, mulai diksi dan narasi yang bervariasi, posisi, kepentingan, kebutuhan, pengaruh dan sumber daya setiap pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya teridentifikasi, serta terjadinya konflik dengan kekerasan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM.

1 Elisabeth Adriana, dkk. (2009). Penelitian LIPI.

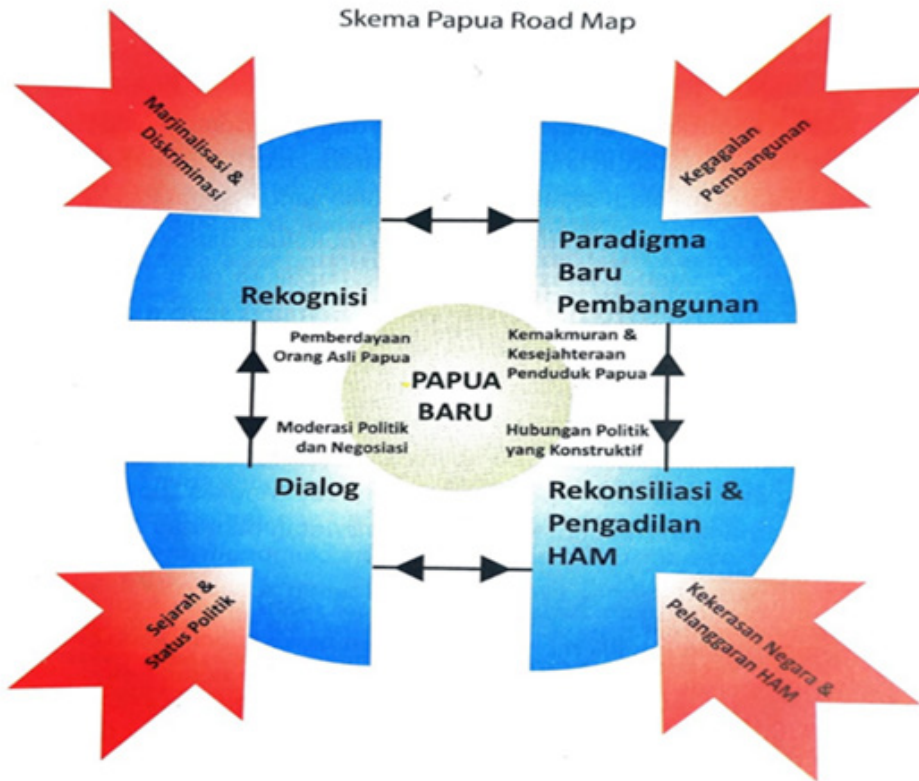


Diagram 1. Empat kategori masalah Papua dalam Papua Road Map.

Selain melakukan pengelompokan tulisan berdasarkan empat kategori yang terdapat dalam *Papua Road Map* dan menyimak rekomendasi para *reviewer* sebagai pembaca kritis dari tulisan-tulisan yang terkumpul, tim editor juga melakukan analisis tematik dengan menggunakan Atlas.ti, sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif termasuk artikel. Dengan bantuan data analisis dari Institute for Community and Regional Development (ICORD), tim editor melakukan proses *coding*, membuat visualisasi tema utama dalam bentuk awan kata (*word cloud*), membuat *peta kata* yang menunjukkan hubungan antarkonsep (*conceptual mapping*) dari semua tulisan, serta menyederhanakan peta tersebut menjadi sebuah model empiris (*empirical model*) yang merupakan intisari dari 21 artikel yang terkumpul. Hasil analisis konten yang dilakukan dapat dilihat dalam **Diagram 2**, **Diagram 3**, dan **Diagram 4**.

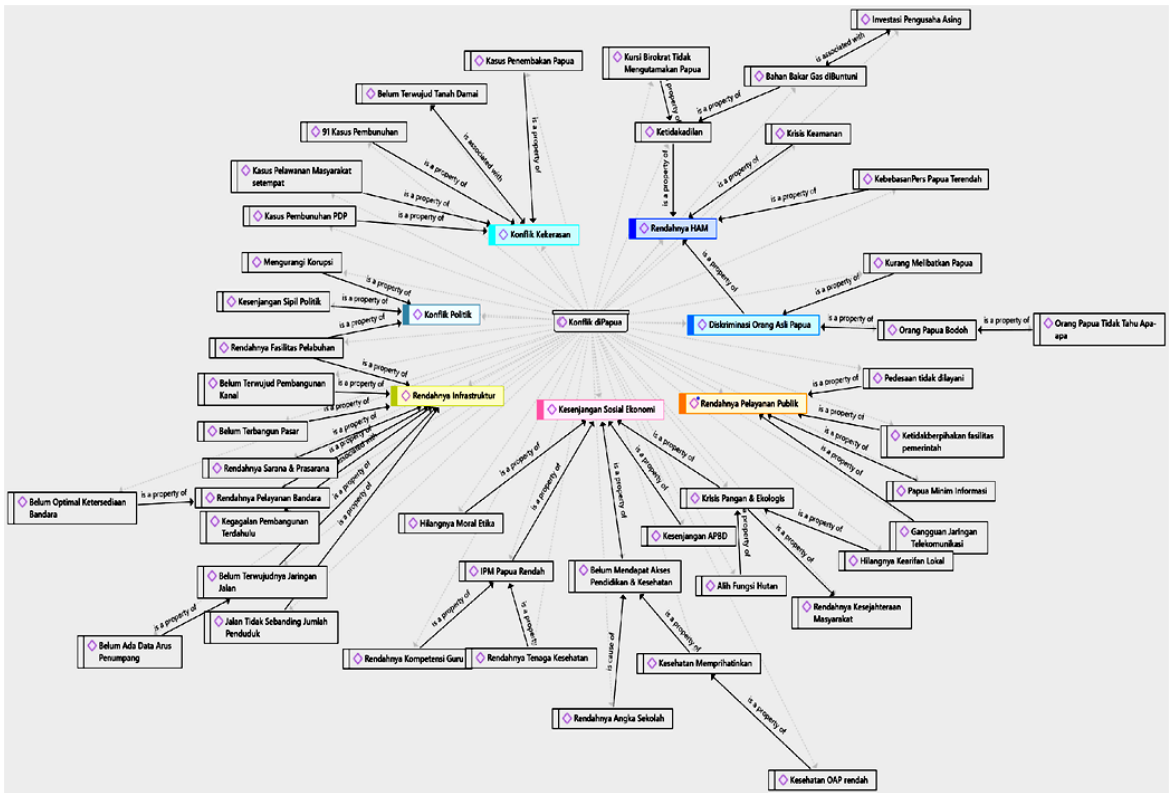


Diagram 3. Peta kata (*word mapping*) yang menunjukkan hubungan antarkonsep yang digunakan oleh 21 penulis.

Dari visualisasi *peta kata* yang terdapat di dalam **Diagram 3** tampak bahwa tema sentral yang mengemuka selama sepuluh tahun terakhir di Papua adalah kata “Konflik di Papua” dengan 7 simpul penjelasan sebagai berikut:

- a. “Konflik politik” mengindikasikan adanya perpecahan dalam masyarakat dan konflik dengan pemerintah di Papua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. “Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua” menghasilkan luka dalam bagi masyarakat Papua, dengan stereotipe negatif dan kurangnya pengakuan atas hak-hak mereka.
- c. “Kesenjangan sosial ekonomi” mengindikasikan adanya jurang lebar antara kelompok-kelompok masyarakat di Papua, khususnya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Papua.

- d. “Rendahnya infrastruktur” merupakan tantangan dalam membangun fasilitas yang memadai bagi masyarakat Papua.
- e. “Rendahnya pelayanan publik” merupakan kebutuhan mendesak, terutama untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
- f. “Konflik kekerasan” menjadi inti dari banyak permasalahan di Papua, termasuk penembakan misterius, hingga masalah kasus pembunuhan.
- g. “Rendahnya HAM” merupakan masalah serius yang menyebabkan ketidakadilan, ketidakbebasan pers, dan krisis keamanan yang ada hubungannya dengan kekayaan alam Papua.

Dari **Diagram 4** tampak bahwa para penulis juga menyimpan dan menorehkan harapan bagi hari depan Papua. Para penulis mengidentifikasi setidaknya empat “Harapan untuk Papua”, yaitu:

- a. terjadinya penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran HAM,
- b. dilakukannya rekonsiliasi kebenaran,
- c. terciptanya perdamaian di Papua, serta
- d. dilakukannya dialog antara Papua dan Jakarta untuk menyelesaikan berbagai masalah Papua yang kompleks dan bersifat multidimensi.

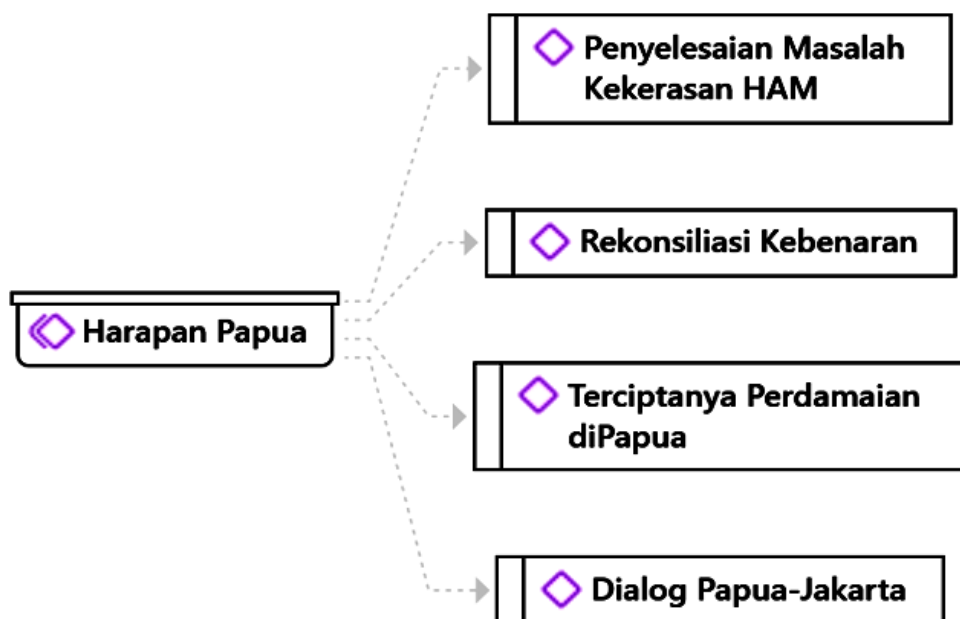


Diagram 4. Harapan untuk masa depan Papua.

Apabila hasil analisis terhadap 21 tulisan ini dikaitkan dengan tujuan dituliskannya bunga rampai ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan “*apakah isu-isu yang mengemuka dalam seminar di Savoy Homann sepuluh tahun lalu, masih merupakan isu sentral dalam upaya menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua?*” maka jawabannya adalah, *pertama*, isu-isu sentral tentang Papua selama 10 tahun terakhir tidak mengalami pergeseran. Isu-isu yang teridentifikasi secara kuat dalam seminar di Hotel Savoy Homann Bandung pada tanggal 24-25 September 2013 masih relatif sama dengan isu-isu yang teridentifikasi dalam *workshop* yang diselenggarakan sepuluh tahun kemudian pada tanggal 1 November 2023. Pertanyaan baru yang kemudian mengemuka adalah, apa yang terjadi dengan penyelesaian masalah Papua selama sepuluh tahun terakhir ini? *Kedua*, meskipun diksi, narasi dan format dari 21 tulisan yang terkumpul beraneka warna seperti pelangi, dapat ditarik sebuah benang merah dan esensi yang sangat jelas, setidaknya dapat menguatkan kejelasan yang sudah lama mengkristal: dari mana penyelesaian dan dialog tentang masalah Papua harus dimulai dan harapan apa yang harus diperjuangkan.

Menyimak dan memahami isi ke-21 tulisan dalam bunga rampai *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua* ini tidak saja merupakan proses belajar tentang betapa sulitnya membuka hati dan pikiran terhadap suka dan duka kehidupan yang dialami saudara-saudara yang tinggal di Tanah Papua, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang sulitnya membawa keadilan dan perdamaian ke Tanah Papua. Ada dua sikap ekstrem yang tidak memudahkan proses membuka hati dan mendengarkan suara serta harapan yang terus menggema, apalagi melakukan upaya membawa keadilan dan perdamaian ke Tanah Papua, yaitu diksi “NKRI Harga Mati” dan narasi “Papua Merdeka Harga Mati”. Kedua diksi dan narasi tersebut menutup pintu hati untuk saling mendengarkan dan berdialog dengan jujur, serta mencari jalan keluar. Para penulis dalam bunga rampai ini mengajak para pembaca untuk membuka hati dan mendengarkan berbagai kisah dari Tanah Papua. Sebagian ditulis oleh Orang Asli Papua, sebagian lagi ditulis oleh para pendatang. Sebagian ditulis oleh mereka yang tinggal di Papua, sebagian lagi ditulis oleh mereka yang tinggal di luar Papua. Oleh karena itu, ketika pintu hati dan pikiran mulai terbuka untuk sungguh mendengarkan, tidak sulit kiranya untuk menangkap esensi persoalan dan menarik benang merah tentang dari mana usaha mewujudkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua harus dimulai.

Melihat kesamaan simpul dan harapan yang ditemukan tim editor dari 21 tulisan yang diterima tim editor dengan 4 akar permasalahan serta solusi dan tujuan yang dirumuskan LIPI dalam *Papua Road Map*, serta sekaligus mengingat

Seminar di Hotel Savoy Homann Bandung tanggal 24-25 September 2013, tim editor menyimpulkan bahwa masalah yang dialami di Tanah Papua selama puluhan tahun sebenarnya relatif masih sama dan serupa. Di sisi lain harapan untuk Papua baru yang lebih adil dan damai juga masih ada. Solusi dan langkah untuk menuju Papua yang adil dan damai juga masih terbuka. Yang dibutuhkan adalah keputusan politik dan kesediaan semua pihak untuk membuka pintu-pintu dialog dalam semua sektor.

Tim editor berharap bahwa siapa pun yang nanti terpilih sebagai Presiden RI Periode 2024-2029 mempunyai keterbukaan dan semangat untuk membuka ruang dialog untuk sungguh bersama-sama mencari penyelesaian bagi Papua.

Kerangka Konseptual untuk Memaknai dan Menarik Benang Merah

Untuk memaknai dan mengkonfirmasi intisari 21 tulisan, bunga rampai ini menggunakan konsep dasar dan pendekatan studi *keadilan dan perdamaian*. Konsep dasar dan pendekatan tersebut mengacu pada upaya memahami, mengedepankan, dan mencapai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hidup berdampingan secara damai. Kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) tersebut mencakup beberapa komponen utama yang diharapkan dapat membantu menata alur logika, menyusun data, memberi makna, dan mendengarkan suara tentang Papua dari mereka yang memiliki rasa peduli dan tidak merasa lelah untuk tetap berupaya, meski mungkin membutuhkan ketahanan napas dan waktu yang panjang.[1] Inti dan titik berangkat studi keadilan dan perdamaian adalah *pengakuan atas martabat dan hak yang melekat pada semua individu*. Hal ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memahami dan menghormati hak asasi manusia tersebut bukan saja merupakan titik berangkat, melainkan juga merupakan muara bagi upaya menciptakan keadilan dan perdamaian. Tanpa pengakuan terhadap martabat dan hak asasi individu, usaha menciptakan keadilan dan perdamaian nyaris mustahil dan sia-sia.[2]

Langkah strategis *pertama* dan utama dalam studi keadilan dan perdamaian adalah mengidentifikasi secara jujur, tentang ada atau tidaknya *kekerasan struktural dan ketidakadilan sistemik*, yang menjadi sumber terciptanya dan pelanggaran kesenjangan dalam masyarakat; baik yang didasarkan pada faktor-faktor sosial, seperti jenis kelamin, ras, kelas, etnis, agama, maupun faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya.[3] Langkah strategis berikutnya, *langkah kedua*, adalah melakukan *analisis dan transformasi konflik*. Konflik adalah bagian alami dan hakikat yang melekat pada interaksi dan hidup bersama. Kerangka kerja

konseptual ini menekankan analisis terhadap akar penyebab konflik, baik yang terbuka (*open conflict*) maupun yang tersembunyi (*latent conflict*). Pendekatan dan kepemimpinan transformatif dibutuhkan untuk mengatasi penyebab-penyebab konflik dan menciptakan solusi berkelanjutan yang mendorong terciptanya keadilan dan perdamaian.[4]

Langkah strategis lainnya, *langkah ketiga*, adalah melakukan *komunikasi tanpa kekerasan dan resolusi konflik yang bersifat dialogis*. Teknik komunikasi tanpa kekerasan dan resolusi konflik memainkan peran penting dalam studi keadilan dan perdamaian. Teknik-teknik ini berfokus pada dialog, mendengarkan secara aktif, empati, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan meningkatkan pemahaman.[5] Upaya tersebut perlu diarahkan pada terciptanya *keadilan restoratif*, yaitu keadilan yang berfokus pada usaha memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh terjadinya konflik daripada sekadar menghukum para pelanggar. Hal ini menekankan pada akuntabilitas, restitusi, dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan memulihkan hubungan dan membangun kembali keutuhan masyarakat yang sempat terganggu akibat terjadinya konflik.[6]

Selain mencegah terjadinya kekerasan (*perdamaian negatif*), kerangka kerja konseptual studi keadilan dan perdamaian juga mengupayakan tumbuhnya *perdamaian positif*, yang mencakup upaya mengatasi penyebab struktural konflik dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk tercapainya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Studi keadilan dan perdamaian sering kali menekankan keterkaitan isu-isu global dan pentingnya solidaritas antar-individu, komunitas lokal, dan aktor negara. Prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk netralitas, ketidakberpihakan, dan kemanusiaan, memandu upaya untuk meringankan penderitaan dan mendorong perdamaian di zona konflik.[7] Gerakan dan advokasi sosial akar rumput, *langkah strategis keempat*, memainkan peran penting dalam studi keadilan dan perdamaian. Para aktivis berupaya meningkatkan kesadaran, memobilisasi dukungan, dan menekan lembaga-lembaga formal untuk mengatasi ketidakadilan dan mendorong terciptanya perdamaian, termasuk di dalamnya ketidakadilan lingkungan dan iklim. Kerangka kerja ini mengakui titik temu antara keadilan sosial, perdamaian, dan kelestarian lingkungan. Mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim sangat penting untuk memastikan perdamaian dan keadilan jangka panjang. *Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat* adalah mekanisme utama untuk memajukan keadilan dan perdamaian dengan cara memberdayakan individu dengan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk menantang ketidakadilan



Diagram 5. Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam studi keadilan dan perdamaian.

dan berupaya mencapai solusi damai.[8] Jika langkah-langkah tersebut diringkas dalam sebuah bagan sederhana, kerangka konseptual di atas akan tampak seperti dalam **Diagram 5**.

Ada hal yang menarik jika membandingkan **Diagram 3** tentang hubungan konseptual dan **Diagram 4** tentang harapan para penulis yang diekstrak secara empiris dari 21 tulisan menggunakan aplikasi komputer, dengan kerangka kerja konseptual yang tertuang dalam **Diagram 5** sebagai hasil *literature review* sistematis dengan menggunakan bantuan *chat GPT*. Tampak ketiga diagram tersebut memiliki wilayah irisan yang luas. Artinya, konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai kerangka kerja konseptual bunga rampai ini dapat dianggap absah (*valid*) karena terkonfirmasi, baik secara empiris maupun teoretis. Meskipun para penulis dalam bunga rampai ini menulis dengan format tulisan beragam, bahkan sebagian besar tidak menggunakan format tulisan akademik baku, karya-karya tulis tersebut memiliki kerangka kerja konseptual yang kokoh dan terkait dengan fakta empiris yang valid. Dengan demikian, jika betul masalah Papua menjadi prioritas utama bagi siapa pun yang berhasrat tulus menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua, tidak ada alasan lagi untuk bersikap abai tentang langkah apa yang sebaiknya dilakukan dan dari mana langkah tersebut harus dimulai.

Studi Keadilan dan Perdamaian dalam Perspektif Sejarah

Pemahaman tentang kerangka kerja konseptual studi keadilan dan perdamaian bukanlah kerangka baru. Konsep keadilan telah dieksplorasi dalam teks-teks filsafat kuno oleh para pemikir, seperti Plato, Aristoteles, Konfusius, dan Hammurabi. Diskusi awal ini meletakkan dasar bagi pertimbangan etis selanjutnya mengenai keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama (*bonum commune*). Banyak agama dunia menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan non-kekerasan. Ajaran dari tokoh-tokoh seperti Yesus, Buddha, dan Mahatma Gandhi memberikan landasan moral dan spiritual bagi gerakan-gerakan yang mempromosikan perdamaian dan keadilan.[9]

Dalam sejarah dunia, bangsa-bangsa belajar, bahwa kedahsyatan malapetaka Perang Dunia I memicu terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, sebuah upaya awal kerja sama internasional untuk mencegah konflik pada masa depan. Keberhasilan terbatas liga tersebut membuka jalan bagi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II. Persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mendominasi politik global. Periode ini menyaksikan kebangkitan gerakan perdamaian, kampanye perlucutan senjata nuklir, dan upaya untuk mempromosikan solusi diplomatik atas konflik bersenjata. Pada tahun 1960-an terjadi lonjakan aktivisme hak-hak sipil dan protes anti-perang, khususnya di Amerika Serikat. Gerakan-gerakan ini menyoroti keterkaitan antara keadilan sosial dan perdamaian sehingga menginspirasi generasi aktivis baru.[10]

Pada era 1960-an upaya menciptakan keadilan dan perdamaian ditandai dengan berdirinya program akademik pertama yang berfokus secara khusus pada studi perdamaian. Program serupa pertama diluncurkan di Universitas Bradford di Inggris pada tahun 1973, diikuti oleh program lain di Eropa dan Amerika Utara. Tahun 1980-an ditandai dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap senjata nuklir dan perlombaan senjata. Kampanye akar rumput seperti gerakan “Pembekuan Nuklir” menyerukan penghentian produksi dan penyebaran senjata nuklir. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin mendorong diskusi mengenai peran intervensi kemanusiaan untuk mencegah kekejaman dan konflik. Perdebatan pun muncul mengenai keseimbangan antara kedaulatan negara dan intervensi internasional. Pada tahun 1990-an terjadi peningkatan minat terhadap resolusi konflik dan mediasi sebagai disiplin akademik dan pendekatan praktis. Upaya untuk menemukan solusi damai terhadap konflik menjadi menonjol dalam diplomasi internasional.[11]

Abad ke-21 membawa tantangan baru bagi studi keadilan dan perdamaian, termasuk terorisme, degradasi lingkungan, dan krisis pengungsi. Tantangan-tantangan ini mendorong pemahaman yang lebih luas tentang perdamaian dan keadilan, yang mencakup isu-isu seperti keamanan manusia, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Interseksionalitas dan inklusivitas mulai mengemuka sebagai tantangan nyata. Bidang ini berevolusi untuk merangkul interseksionalitas, mengakui bahwa identitas seperti gender, ras, dan etnis saling bersinggungan untuk membentuk pengalaman ketidakadilan. Perspektif ini memperdalam analisis dan strategi untuk memajukan perdamaian dan keadilan. Perkembangan alat komunikasi digital memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat, memungkinkan kesadaran dan aktivisme global. Platform media sosial berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk tujuan keadilan sosial dan perdamaian.[12]

Institusi akademik di seluruh dunia memperluas program studi perdamaian dan keadilan mereka, menawarkan pendidikan interdisipliner mengenai resolusi konflik, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan banyak lagi. Inisiatif pembangunan perdamaian modern menekankan pada transformasi konflik jangka panjang, rekonsiliasi, dan rekonstruksi setelah konflik. Upaya-upaya diarahkan pada penyembuhan luka, pembangunan kembali masyarakat, dan mencegah terulangnya kembali kekerasan. Keterkaitan isu lingkungan dan keadilan sosial menyebabkan munculnya keadilan iklim, yang menekankan pentingnya mengatasi perubahan iklim sebagai isu global yang berdimensi etika dan hak asasi manusia. Belajar dari perjalanan sejarah studi keadilan dan perdamaian global, tampaknya bukan alasan untuk tidak menyelesaikan masalah Papua melalui proses yang elegan, seperti yang dapat dipelajari dari perjalanan sejarah umat manusia.

Studi keadilan dan perdamaian di Universitas Katolik Parahyangan ditandai dengan berdirinya Centre for Human Development and Social Justice (CHUDS) pada tahun 2010, dan direaktivasi pada tahun 2017 setelah mengalami kekosongan selama kurang lebih 3 tahun. Pendirian pusat kajian tersebut berawal dari kerja sama Centre for Public Policy and Management Studies (CPMS) di Program Studi Administrasi Publik dengan Lund University, Swedia, dalam proyek Comparative Public Administration (1998-2004). Kerja sama tersebut meluas dengan terlibatnya Nordic Institute for Asian Studies (NIAS) di Copenhagen, Finland University di Finlandia, serta beberapa universitas lain di tanah air termasuk Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Universitas Tanjungpura di Pontianak, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Cenderawasih Jayapura. Lembaga-lembaga tersebut ber-

gabung dalam sebuah jejaring yang bernama Indonesian Conflict Study Network (ICSN). Sebagai *co-founder* ICSN, Universitas Katolik Parahyangan bersama Finland University mengkoordinasi berbagai kegiatan akademik berupa riset, pelatihan, seminar internasional, dan *workshop* serta mediasi konflik di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan, dan Papua. Komitmen Universitas Katolik Parahyangan untuk terlibat dan memberi dampak dalam studi keadilan dan perdamaian berlandas pada visi lembaga yang saat ini dirumuskan sebagai berikut: “*Menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, di mana setiap pribadi memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih.*”²

Praksis Studi Keadilan dan Perdamaian di Berbagai Belahan Dunia

Ada banyak contoh tentang bagaimana kerangka kerja *keadilan dan perdamaian* diterapkan sebagai praksis. Berikut ini adalah beberapa kisah sukses kerangka kerja studi keadilan dan perdamaian yang dicatat dalam sejarah dunia.

- a. *Gerakan Hak Sipil (1950-1960-an)*. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks, dan Malcolm X. Gerakan ini berjuang melawan segregasi dan diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan perubahan hukum yang signifikan, termasuk Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965, yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakadilan rasial dan mendorong kesetaraan.
- b. *Berakhirnya Apartheid di Afrika Selatan (1990-an)*. Upaya Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan aktivis lainnya berujung pada penghapusan sistem apartheid di Afrika Selatan. Transisi damai menuju masyarakat demokratis, yang ditandai dengan pembebasan Mandela dari penjara dan pemilihan presiden berikutnya menjadi simbol rekonsiliasi dan transformasi sosial yang monumental, tidak hanya bagi Afrika Selatan tetapi menjadi inspirasi bagi dunia. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan (1995-2002) yang dipimpin oleh Uskup Agung Desmond Tutu didirikan dengan tujuan untuk menyembuhkan luka dan mendamaikan masyarakat Afrika Selatan setelah puluhan tahun mengalami pelanggaran hak

2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | Universitas Katolik Parahyangan (unpar.ac.id)

- asasi manusia dalam era apartheid. Kesaksian publik dan pencarian kebenaran dibandingkan balas dendam menyoroti pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. Sebuah gerakan global yang berlangsung selama beberapa dekade, *kampanye anti-apartheid* memberikan tekanan pada pemerintah Afrika Selatan untuk membongkar segregasi rasial. Boikot, divestasi, dan kecaman internasional berkontribusi pada berakhirnya apartheid.
- c. *Perjanjian Jumat Agung (1998)*. Perjanjian Jumat Agung, juga dikenal sebagai Perjanjian Belfast, mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Irlandia Utara. Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja pembagian kekuasaan, demiliterisasi, dan kerja sama antarkomunitas yang terpecah belah karena kekerasan sektarian.
 - d. *Perjanjian Oslo (1993)*. Perjanjian Oslo menandai terobosan dalam konflik Israel-Palestina dan mengawali negosiasi antara kedua belah pihak. Meskipun tantangan masih tetap ada, perjanjian ini membuka jalan bagi dialog dan pengakuan sehingga menciptakan potensi perdamaian abadi. Menyimak situasi saat ini di Jalur Gaza, memang keberhasilan kerangka kerja studi keadilan dan perdamaian diragukan efektivitasnya. Namun hal ini juga menegaskan kembali bahwa usaha menciptakan keadilan dan perdamaian merupakan hal mustahil dan sia-sia apabila tidak bertolak dari penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia serta mencari resolusi konflik yang sudah termanifestasi dalam kekerasan yang brutal.
 - e. *Gerakan Hak Pilih Perempuan (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20)*. Perjuangan hak perempuan untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses politik membawa perubahan sosial dan hukum yang signifikan. Pencapaian seperti gerakan hak pilih membuka jalan bagi kesetaraan dan pemberdayaan gender yang lebih besar di seluruh dunia.
 - f. *Perjanjian Dayton (1995)*. Perjanjian Dayton mengakhiri Perang Bosnia dengan menetapkan kerangka federal Bosnia dan Herzegovina. Hal ini menghentikan pertempuran, membawa perdamaian, dan mendorong kerja sama antar-etnis di wilayah yang hancur akibat konflik.
 - g. *Uni Eropa (1950-an-sekarang)*. Pembentukan Uni Eropa bertujuan untuk mencegah konflik melalui integrasi ekonomi dan pemerintahan bersama. Dengan mendorong kerja sama antarnegara-negara Eropa, hal ini berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan yang secara historis ditandai dengan peperangan.

- h. *Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat (1992-1997)*. Kampanye tersebut menghasilkan Perjanjian Ottawa, yang melarang penggunaan, produksi, dan penimbunan ranjau darat anti-personel. Inisiatif ini menunjukkan kekuatan masyarakat sipil untuk mempengaruhi perjanjian internasional dan mendukung tujuan kemanusiaan.
- i. *Gerakan Perlawanan Tanpa Kekerasan Gandhi (1930-1940-an)*. Filosofi perlawanan tanpa kekerasan Mahatma Gandhi, atau Satyagraha, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan India dari pemerintahan kolonial Inggris. Upayanya menunjukkan efektivitas protes damai dalam mencapai perubahan sosial dan politik.
- j. *Kesepakatan Nuklir Iran (2015)*. Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) mewakili upaya diplomatik untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. Kesepakatan tersebut menunjukkan potensi diplomasi untuk mengatasi tantangan keamanan global.

Hubungan 21 Tulisan dalam Bunga Rampai dengan Papua Road Map

Dari hasil *content analysis* terhadap 21 tulisan yang masuk diperoleh 7 simpul yang berkaitan dengan “konflik di Papua”, yaitu konflik politik, diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, kesenjangan sosial ekonomi, minimnya infrastruktur fisik, rendahnya pelayanan publik, konflik kekerasan, dan rendahnya perhatian terhadap HAM. Tim editor juga mengidentifikasi bahwa para penulis masih menyebut adanya harapan untuk masa depan Papua baru, yaitu lewat empat langkah sebagai berikut: (1) penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, melalui (2) rekonsiliasi kebenaran, agar (3) tercipta perdamaian di Papua, sehingga dapat dilaksanakan (4) dialog Papua-Jakarta untuk menuju Papua baru yang lebih adil dan damai.

Menarik ketika 7 simpul dan 4 harapan yang teridentifikasi dari 21 tulisan dalam bunga rampai ini ternyata memiliki irisan yang sangat besar dengan hasil riset LIPI yang dipublikasikan pada tahun 2009 dengan judul *Papua Road Map*. Hasil riset LIPI tentang Papua menemukan empat akar permasalahan Papua serta menunjukkan solusi dan jalan yang harus diperjuangkan. Apabila 7 simpul yang ditemukan dari 21 tulisan dalam bunga rampai ini dan 4 solusi yang diusulkan tim editor dimasukkan ke dalam 4 akar permasalahan yang ditemukan LIPI beserta solusi dan tujuan yang dirumuskan, hasilnya akan tampak seperti dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Irisan masalah dan langkah solutif untuk Papua dalam dua dokumen berbeda

Akar Masalah Menurut LIPI	Solusi dan Tujuan Menurut LIPI	7 Simpul dari bunga rampai	Solusi yang teridentifikasi
Sejarah dan status politik	Dialog: moderasi politik dan negosiasi	Konflik politik	(2) Rekonsiliasi kebenaran
Marginalisasi dan diskriminasi	Rekognisi: pemberdayaan Orang Asli Papua	Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua	(3) Terciptanya perdamaian di Papua
Kegagalan pembangunan	Paradigma baru pembangunan: Kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua	Kesenjangan sosial ekonomi Rendahnya infrastruktur Rendahnya pelayanan publik	(4) Dialog Papua-Jakarta
Kekerasan negara dan pelanggaran HAM	Rekonsiliasi dan pengadilan HAM: hubungan politik yang konstruktif	Konflik kekerasan Rendahnya HAM	(1)Penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran HAM

Melihat besarnya irisan antara intisari 21 artikel dalam bunga rampai ini dengan *Papua Road Map*, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang terjadi di Tanah Papua selama sepuluh tahun terakhir, bahkan selama puluhan tahun, masih relatif sama tidak mengalami pergeseran. Di sisi terangnya adalah bahwa baik tulisan-tulisan yang ada dalam bunga rampai ini maupun *Papua Road Map* sama-sama masih memberikan harapan bagi Papua baru yang lebih adil dan damai. Langkah solutif untuk menuju Papua yang adil dan damai juga masih terbuka. Yang dibutuhkan adalah keputusan politik dan kesediaan semua pihak untuk membuka pintu-pintu dialog dalam semua sektor. Ada harapan, siapa pun yang nanti terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 mempunyai keterbukaan dan semangat untuk membuka ruang dialog untuk sungguh bersama-sama mencari penyelesaian bagi Papua.

Belajar dari Pengalaman Aceh dan Timor Leste

Bagaimana masa depan Papua? Dua pendekatan “harga mati” agaknya menutup ruang dialog. Kalau prinsip “Papua Bagian NKRI Harga Mati” atau “Papua Merdeka Harga Mati” dikedepankan dan dibela mati-matian, maka tidak akan ada kesempatan untuk saling mendengarkan dan bersama-sama mencari alternatif yang terbaik bagi Indonesia dan Papua. Entah tetap bersama Indonesia seperti pengalaman Aceh, entah menjadi sahabat Indonesia dan tetangga Indonesia seperti Timor Leste, Indonesia sudah memiliki dua pengalaman luar biasa yang

memberi harapan. Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah model penyelesaian konflik yang diakui berbagai negara di dunia. Tesis Yanita Pricilia Yani di bawah bimbingan Siti Mutiah Setiawati (2018) di Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Proses Penyelesaian Konflik Aceh Melalui MoU Helsinki: Keberhasilan Pemerintah Indonesia Membuat GAM Menerima Konsep Self-Government” dapat dijadikan sumber belajar. Dalam tesis tersebut disimpulkan bahwa perjanjian Helsinki adalah keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk dapat membuat Gerakan Aceh Merdeka menerima otonomi khusus Aceh dalam konsep *self-government* dan meninggalkan tuntutan *self-determination*. Pilihan Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi adalah jalan yang dianggap bijaksana untuk mengakhiri konflik selama tiga dekade. Pemerintah Indonesia bahkan mengatur pertemuan rahasia untuk menawarkan pemberian kompensasi ekonomi dan politik bagi para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Sambil tetap mempertahankan kekuatan militer di Aceh, dorongan untuk mempertahankan kredibilitas negara mendorong Pemerintah Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan diplomasi. Alfon Kimbal dalam tesis “Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh” (2016) di Universitas Sam Ratulangi menyatakan bahwa konflik di Aceh pada dasarnya disebabkan penolakan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan syariat Islam di Aceh dan ketidakadilan Pemerintah Indonesia dalam soal bagi hasil kekayaan alam di Aceh. *Amnesty International* mencatat setidaknya antara 10-30 ribu orang terbunuh dalam konflik sejak tahun 1970-an. Keberhasilan penyelesaian konflik Aceh juga berkat keterbukaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan peran Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia selaku ketua dewan direktur Crisis Management Initiative sebagai fasilitator kesepakatan Helsinki.

Pengalaman berbeda dialami Indonesia dalam hal Timor Leste. Tanggal 5 Mei 1999 di New York AS dicapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Portugal di bawah koridor PBB untuk merancang suatu jajak pendapat (*public election*) untuk menentukan masa depan Timor Leste. Referendum tersebut dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999 dengan hasil 78,50% memilih merdeka dan 21,50% memilih integrasi dengan Indonesia. Kita bisa membaca hal itu dalam tesis Celestino Boavida Pereira di bawah bimbingan Mochtar Masoed (2006) di Universitas Gadjah Mada, berjudul “Kesepakatan tentang Referendum di Timor Timur”. Keberhasilan penyelesaian konflik di Timor Leste antara lain berkat keterbukaan Presiden B.J. Habibie serta peran PBB sebagai fasilitator. Tanggal 3-5 Oktober 2023 dalam Konferensi Agama dan Perubahan Iklim di Jakarta, hadir tiga

orang dari Timor Leste, yaitu Jose Belo (Rektor Universitas Dili, beragama Katolik), Arif Abdullah SAGRAN (Duta Besar Timor Leste untuk Uni Emirat Arab, beragama Islam), dan Francisco de Vasconcelos (Anggota DPR Timor Leste, beragama Kristen). Ketika ditanya mengenai perjuangan dan pengalaman mereka sebagai bangsa yang merdeka, yang tampak adalah tingkat kepercayaan, harga diri, kebebasan, dan sukacita yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

Entah tetap bersama Indonesia seperti pengalaman Aceh, entah menjadi sahabat Indonesia dan tetangga Indonesia seperti Timor Leste, Indonesia sudah memiliki dua pengalaman luar biasa yang memberi harapan. Jalan dialog adalah satu-satunya pilihan dan jalan terbaik bagi Indonesia dan Papua serta bagi kemanusiaan untuk Papua baru yang lebih adil dan damai. Jalan perang seperti Rusia dengan Ukraina atau Hamas dengan Israel adalah pilihan terburuk bagi kemanusiaan dan perdamaian sejati. Memang masalah Papua jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Aceh dan Timor Leste. Papua juga jauh lebih luas dan kaya. Sejarah integrasi dan kekerasan yang terjadi di Papua juga sangat panjang dengan banyak korban. Namun memilih jalan dan upaya merawat harapan menuju Papua baru yang lebih adil dan damai adalah salah satu jalan kemanusiaan yang sangat layak untuk diperjuangkan.

Dialog Setara: Salah Satu Jalan yang Harus Diperjuangkan

Sejatinya maksud Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah sebagai jawaban terhadap penindasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang telah dialami warga Papua selama ini. Sekaligus Otsus dimaksudkan untuk meredam gejolak ingin merdeka yang masih terus bermunculan di Tanah Papua. Apakah Pemerintah Indonesia serius dalam mendorong implementasi Otsus, sementara kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua tidak kunjung mereda? Apakah Otsus sungguh diperjuangkan agar bisa melepaskan warga Papua dari kemiskinan dan ketidakadilan? Menanggapi kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tak juga membaik, malahan kian meningkat selama pemberlakuan Otsus, beberapa tokoh Gereja menyuarakan kritik pedas terhadap komitmen Pemerintah Indonesia. Mereka juga berusaha menemui pejabat Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan tanggapan dan harapan mereka untuk Papua yang adil dan damai. Mereka mempertanyakan sebesar apa keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian bagi Papua.

Tim editor menyimak bahwa satu-satunya jalan menuju Papua baru yang lebih adil dan damai adalah dialog yang setara yang melibatkan semua pihak. Jalan

dialog tersebut dapat mengikuti temuan tim editor sebagai “Harapan untuk Papua”, yakni melalui 4 langkah sebagai berikut: (1) penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM, melalui (2) rekonsiliasi kebenaran, untuk menuju (3) terciptanya perdamaian di Papua, dan yang memungkinkan (4) terjadinya dialog antara Papua dengan Jakarta dalam semua sektor yang melibatkan semua pihak untuk menuju Papua baru yang lebih adil dan damai. Tentu saja keempat langkah untuk membawa keadilan dan perdamaian di Papua harus diupayakan bersama-sama sekaligus karena saling terkait. Namun, langkah pertama untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM. Untuk itu diperlukan rekonsiliasi kebenaran. Diperlukan Komisi Pengungkapan Kebenaran yang berpihak pada korban, tapi juga tidak mengharuskan membawa semua kasus ke forum pengadilan. Yang penting terjadi adalah rekonsiliasi kebenaran dan pengakuan bahwa telah terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM. Langkah Presiden Joko Widodo untuk mengakui telah terjadi 12 pelanggaran berat HAM, termasuk 2 kasus di Papua adalah langkah yang sudah benar. Tentu sesudahnya harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Pengungkapan Kebenaran. Selain lewat forum pengadilan, sebagian masalah kekerasan dan pelanggaran HAM juga bisa diselesaikan secara adat budaya Papua.

Tujuan seluruh upaya penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran HAM serta rekonsiliasi kebenaran adalah terciptanya perdamaian di Papua. Hanya dalam kondisi damai maka barulah dialog Papua dengan Jakarta dalam semua sektor bisa diupayakan untuk menuju Papua baru yang adil dan damai. Demikianlah rangkaian langkah-langkah untuk membawa keadilan dan perdamaian di Papua. Kami yakin dalam hal ini bahwa *Papua Road Map* yang dipublikasikan LIPI tahun 2009 adalah hasil penelitian dan solusi yang paling lengkap dan komprehensif yang tersedia sampai saat ini. Kami juga yakin bahwa sebagian besar pihak yang terkait mulai dari Pemerintah RI, TNI, Polri, dan semua pihak di Papua maupun di luar Papua termasuk komunitas internasional yang mengharapkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua masih menerima *Papua Road Map* sebagai peta jalan yang seharusnya diwujudkan di Tanah Papua. Penyelesaian masalah kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM harus dimulai dari “jeda kemanusiaan”, yaitu kesepakatan semua pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan.

Tahun 2022 sebenarnya setelah terjadi kekerasan dan korban di Maybrat sempat terjadi kesepakatan untuk mengadakan jeda kemanusiaan yang disepakati oleh Komnas HAM bersama ULMWP, Dewan Gereja Papua, dan Majelis Rakyat Papua pada tanggal 11 November 2022. Sayang bahwa jeda kemanusiaan ter-

sebut tidak diwujudkan. Jeda kemanusiaan tersebut seharusnya juga disepakati pihak-pihak yang berkonflik di lapangan, yaitu TNI dan Polri serta TPNPB. Jeda kemanusiaan adalah penghentian segala bentuk permusuhan, kekerasan, dan konflik bersenjata agar semua pihak bisa lebih mengutamakan penanganan segala bentuk penderitaan kemanusiaan karena kelaparan, bencana alam, pengungsian, dan termasuk penyanderaan. Jeda kemanusiaan juga harus disertai langkah-langkah mengurangi kehadiran pasukan militer. Sangat penting selain upaya pada tingkat nasional, juga ada upaya mendorong inisiatif lokal terkait perdamaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal yang bersangkutan.

Dalam dialog Papua dengan Jakarta sangat penting juga untuk melakukan dialog sektoral, yaitu harmonisasi kebijakan dan pendekatan dalam rangka mengatasi sumber-sumber persoalan di setiap sektor (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain). Dialog Papua dengan Jakarta juga harus melibatkan semua pihak di Papua dan di luar Papua termasuk ULMWP, TPNPB, dan komunitas internasional, khususnya MSG. Hanya lewat dialog yang setara dapat diupayakan mencari solusi bagi terwujudnya keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Pada akhirnya, amanah sejati otonomi khusus, yaitu kemandirian seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat Papua semakin terwujud entah dengan Papua tetap menjadi bagian Indonesia atau Papua menjadi sahabat dan tetangga yang berdaulat. Dalam dialog, kedua diksi tersebut perlu dihormati dan didiskusikan berbagai kemungkinannya. Ketika salah satu pihak hanya memaksakan harapan mereka, maka dialog yang setara tidak akan terjadi dan keadilan serta perdamaian di Tanah Papua semakin jauh dari terwujud.

Masih Ada Harapan untuk Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua

Kumpulan 21 tulisan dari berbagai penulis dengan berbagai latar belakang daerah, profesi, dan bidang tersebut adalah upaya bersama untuk mendengarkan dan memahami apa yang terjadi di Tanah Papua. Tim editor, para penulis, dan para pembaca bunga rampai ini adalah orang-orang Papua dan atau para sahabat orang Papua yang masih merawat harapan untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Pada saat menjalani proses penulisan editorial buku *Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua* ini, tim editor merasakan adanya peneguhan dan dukungan untuk memelihara harapan yang sama dari para tokoh bangsa yang berkumpul di Jakarta pada tanggal 9 November 2023. Mereka adalah Dr. (H.C.) Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Franz

Magnis Suseno, SJ, Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A., Drs. Marzuki Darusman, S.H., Alissa Wahid (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Pendeta Gomar Gultom (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah), dan Mgr. Siprianus Hormat (Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian-Pengungsi, Migran, dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia). Mereka berkumpul untuk berdiskusi dan menandatangani sebuah seruan untuk perdamaian di Tanah Papua yang isinya sebagai berikut.

SERUAN UNTUK PERDAMAIAN DI TANAH PAPUA

Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus-menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami menghimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali peninjauan-peninjauan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses peninjauan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama, dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya peninjauan dialog.

Jakarta, 9 November 2023

Seruan para tokoh bangsa tersebut mengingatkan kita semua bahwa negara Indonesia didirikan dengan jiwa dan amanah konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”* Sesuai jiwa dan amanah konstitusi tersebut, maka para tokoh bangsa yang berkumpul di Jakarta tanggal 9 November 2023 tersebut mengajak kita bukan hanya untuk memperhatikan situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina, namun pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan krisis kemanusiaan yang terjadi, yaitu di halaman rumah kita sendiri, yaitu di Tanah Papua.

Dalam rangka menanggapi krisis kemanusiaan di Palestina, pada tanggal 19 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan soal Palestina sebagai berikut:

“Indonesia mengancam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli, ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan, dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya, dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Hal ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN-GCC [Gulf Cooperation Council] esok hari.”

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut oleh sebagian orang Papua ditanggapi dengan sebuah harapan agar sikap terhadap Palestina dari Presiden Joko Widodo juga dipakai secara konsisten terhadap masyarakat sipil Papua. Mungkinkah suatu saat Presiden Joko Widodo atau Presiden Indonesia lainnya dapat mengucapakan pidato senada yang berbunyi:

“Indonesia mengancam keras tindak kekerasan yang terjadi di Papua karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Papua yang terus

terjadi. Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan, dan menyelesaikan akar permasalahan Papua yang dirumuskan LIPI (sekarang BRIN), yaitu: (1) sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, (2) marginalisasi dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, (3) kegagalan pembangunan, dan (4) kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Sekaranglah saatnya Indonesia berdiri bersama dunia untuk membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Papua secara adil-damai serta menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Hal ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional.“

Waktu yang tersedia bagi Presiden Joko Widodo memang tidak banyak lagi karena akan ada pemilihan presiden yang baru. Namun dalam waktu yang masih ada Presiden Joko Widodo atau siapa pun yang menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dapat melakukan *affirmative action* berupa keputusan politik yang solid, karena perjuangan masyarakat Papua untuk memperoleh keadilan dan perdamaian adalah jiwa dan amanah konstitusi. Proses dialog yang berdasar kesetaraan adalah adab yang bisa mengantar Papua memperoleh keadilan dan perdamaian. Dialog yang setara adalah keniscayaan dan awal solusi untuk Papua yang perlu terus diperjuangkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Kegagalan pemerintah menangani masalah Papua akan memberi nama buruk bagi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sebaliknya, keberhasilan Pemerintah RI dalam mengupayakan solusi untuk Papua yang menyeluruh akan memberi nama baik bagi Indonesia.

Pilihan penyelesaian masalah Papua hanya bisa ditempuh melalui dialog yang setara. Untuk itu, Pemerintah Indonesia sudah semestinya bersedia mendengarkan dan duduk setara bersama Orang Asli Papua. Arogansi sebagai pemegang kekuasaan mesti disingkirkan jauh-jauh dalam proses pencarian solusi bagi Papua. Dialog yang jujur dan setara, pembicaraan yang berkeadilan harus dikedepankan sehingga solusi yang utuh bagi penyelesaian masalah Papua pun bisa diwujudkan. Keberhasilan Pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua akan menjadi pujian dan penghargaan bagi Pemerintah Indonesia. Apalagi tanggal 11 Oktober 2023 yang lalu, Indonesia baru saja terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2024-2026 dengan memperoleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir. Indonesia yang mengusung tema “*Inclusive Partnership for Humanity*” berkomitmen menjunjung tinggi HAM serta berkomitmen menjadi solusi masalah HAM dunia. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan kali keenam. Indonesia pernah terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu periode 2006-2007,

2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB seharusnya menambah beban tanggung jawab moral Indonesia untuk sungguh aktif, jujur, dan konsisten mengusahakan solusi bagi Papua.

Rekomendasi bagi Terciptanya Keadilan dan Perdamaian di Tanah Papua

Dengan menggunakan kerangka kerja konseptual tentang keadilan dan perdamaian, termasuk menyimak perjalanan sejarah serta bukti empiris yang meyakinkan tentang aspek praktisnya; selain mendengarkan intisari dan menarik benang merah dari 21 tulisan tentang Papua yang dimuat dalam bunga rampai ini; ada dua rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengakselerasi terciptanya keadilan dan perdamaian di Tanah Papua, yaitu sebagai berikut.

- a. Menerapkan pendekatan *top-down* dengan menggunakan instrumen kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta menggunakan governansi publik untuk melaksanakannya dengan menggunakan berbagai program pembangunan sebagai instrumennya. Pendekatan ini lebih ditujukan untuk mengurai dan mencari solusi tentang masalah yang dihadapi pemerintah pusat di Tanah Papua.
- b. Menggunakan pendekatan *bottom-up*, berupa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Papua, termasuk di dalamnya meliputi pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan berupa akselerasi akuisisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap setiap insan Papua khususnya yang diidentifikasi dalam aturan perundang-undangan sebagai Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab tantangan dan mencari solusi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
- c. Mengoperasionalkan kedua pendekatan yang dilakukan secara simultan ke dalam empat langkah strategis yang dibingkai dalam kerangka pendekatan budaya. *Pertama*, memastikan tentang ada tidaknya kekerasan struktural dan ketidakadilan sistemik. *Kedua*, menganalisis pola-pola konflik yang terjadi, baik yang manifes maupun yang laten, serta mentransformasinya menjadi keadaan damai yang berkeadilan. *Ketiga*, melakukan dialog dengan menggunakan komunikasi dialogis. *Keempat*, mengkonsolidasikan, membingkai, dan mentransformasi advokasi publik yang dilakukan akar rumput menjadi *policy brief* dan sebagai dasar tindakan kolektif yang sistematis dan terpadu.

- d. Melakukan dialog mengenai tema-tema kunci yang diangkat dalam 21 tulisan dalam bunga rampai ini. Ada 16 tema yang berhasil disarikan dari tulisan-tulisan tersebut dan sudah tervalidasi melalui pemahaman kerangka kerja konseptual hasil studi literatur, eksplorasi praksis studi perdamaian di berbagai tempat, serta hasil *review* terhadap *Papua Road Map* yang pernah diterbitkan LIPI tahun 2009. Ke-16 tema yang berhasil disarikan dengan bantuan aplikasi *Vosviewer* tersebut tampak dalam **Diagram 6** dan **Diagram 7**.

Kedua visualisasi ini menggambarkan hubungan antara tema-tema utama dalam 21 tulisan yang dimuat dalam bunga rampai ini. Tema-tema utama yang

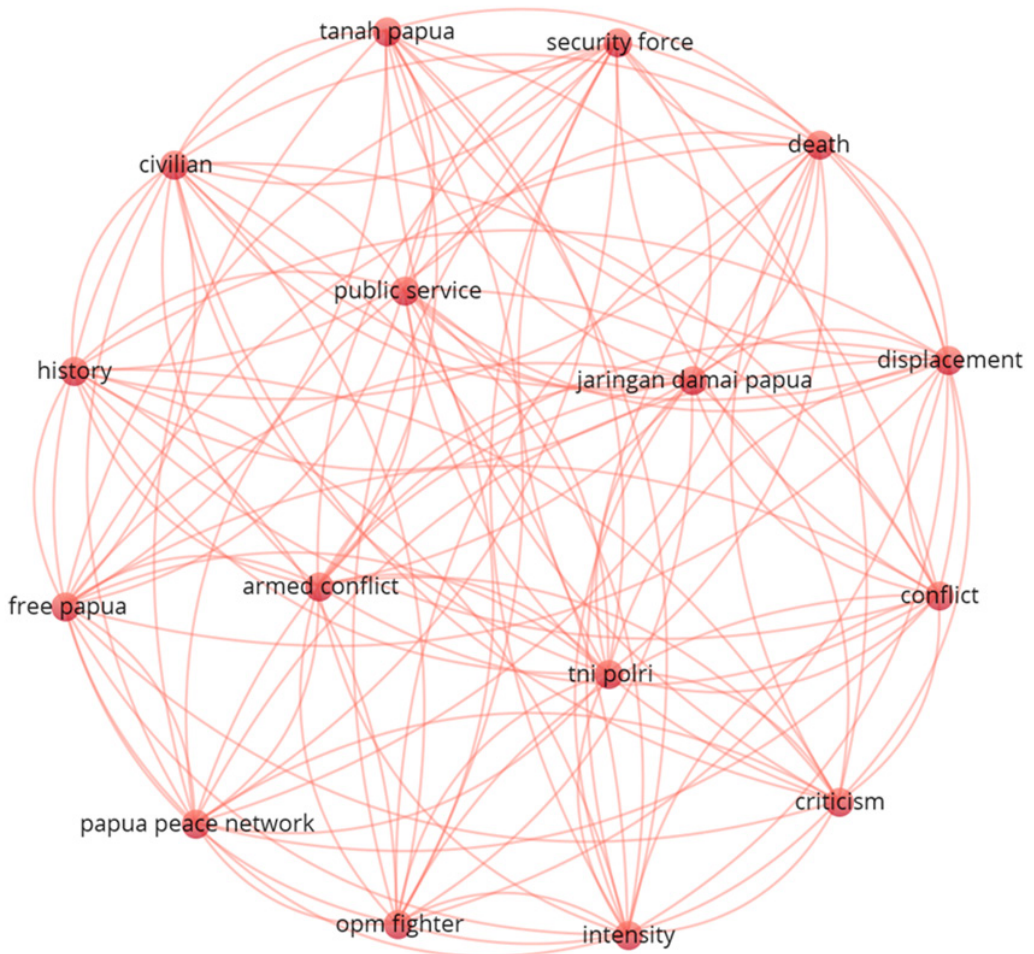


Diagram 6. Network visualization 16 tema yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

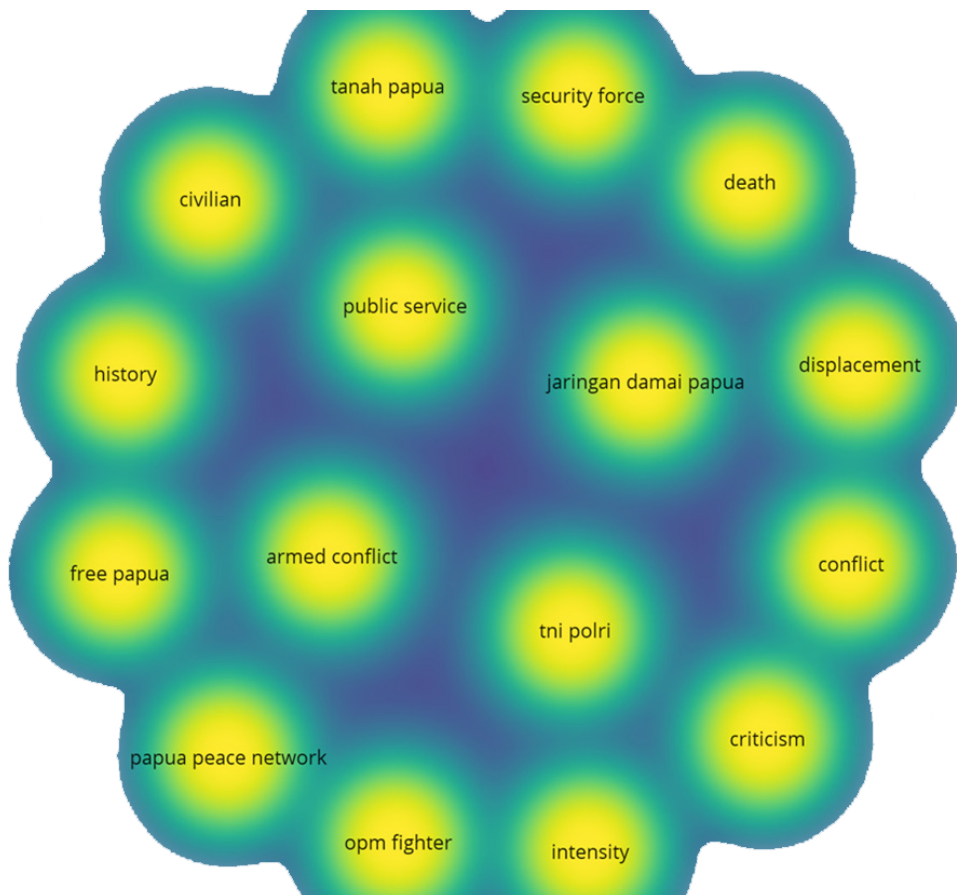


Diagram 7. Density visualization 16 tema yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

teridentifikasi adalah “Tanah Papua”, “Security Force”, “Civilian”, “Public Service”, “Armed Conflict”, “Conflict”, “Displacement”, “Death”, “OPM Fighter”, “TNI Polri”, “Criticism”, “History” dan “Free Papua”. Berdasarkan posisi dan keterkaitan antara 16 tema tersebut, juga dapat dibuat interpretasi dan deskripsi sebagai berikut:

- a. *Inti Konflik*; ditunjukkan dengan dua tema “Armed Conflict” dan “TNI Polri” yang berada di tengah, menandakan sebagai pusat diskusi, yang menunjukkan fokus utama pada aspek keamanan dan konfrontasi militer dalam tulisan-tulisan dalam bunga rampai ini.
- b. *Dampak Sosial*; ditunjukkan dengan adanya garis hubungan antara tema “konflik”, “displacement”, “civil”, dan “death” yang mengindikasikan,

bahwa tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan dampak sosial yang serius dari konflik yang terjadi di Tanah Papua.

- c. *Gerakan Otonomi*; ditunjukkan dengan tema “free Papua” yang terhubung dengan banyak tema lain, termasuk tema “OPM fighter” mencerminkan bahwa para penulis mengusulkan perlunya dialog tentang berbagai tema sensitif seperti “kemerdekaan.”
- d. *Sejarah dan Persepsi*; ditunjukkan dengan tema “history” terkait dengan banyaknya *node*, menunjukkan pentingnya pembicaraan tentang konteks historis dalam pemahaman konflik saat ini serta persepsi tentang hal tersebut. Selain itu, terdapat pembahasan tentang pentingnya pembicaraan tentang sejarah Papua.
- e. *Respon dan Kritik*; ditunjukkan dengan tema “criticism” dan “public service” yang berfokus menyoroti respons terhadap konflik dan evaluasi terhadap efektivitasnya.
- f. *Upaya Perdamaian*; ditunjukkan dengan menyebut tema “Jaringan Damai Papua” dan “Papua Peace Network” yang mengindikasikan adanya inisiatif perdamaian dan upaya dialog yang dibahas dalam berbagai tulisan dalam bunga rampai ini.

Belum lama ini dalam salah satu acara dialog dengan calon Presiden RI periode 2024-2029, ketika ditanya soal Papua, salah satu calon presiden menyatakan, “Saya barusan pulang dari Papua. Yang dibutuhkan hanya satu. Kasih kami ruang dialog untuk kami bisa mempresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang kami mau. Janganlah semua dikirim senjata kepada kami. Dan ini dibutuhkan para negosiator untuk masuk zona netral dan mereka membuat konsensus bersama.” Sikap dan pernyataan salah satu calon presiden tersebut menggambarkan kesediaan untuk duduk bersama dan membuka ruang dialog yang setara dengan semua pihak yang mewakili Papua. Semoga siapa pun yang nanti terpilih sebagai Presiden RI Periode 2024-2029 adalah presiden yang terbuka dan mau mendengarkan semua pihak dalam dialog yang terbuka dan setara. Semoga berkat keterbukaan dan kesediaan Presiden RI Periode 2024-2029 tersebut tercipta jalan solusi bagi Papua baru yang lebih adil dan damai.

Catatan Pustaka

- [1] Wahyuningroem, S. "Perdamaian Atau Keadilan? Transformasi untuk Perempuan di Wilayah Konflik dan Pascakonflik di Papua dan Aceh." dalam: *Jurnal Perempuan* Vol. 26, No. 3, (2021). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513624&lokasi=lokal>. (08.11.2023). 40.
- [2] Tahir, Imran dan Tahir, Irwan. "Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia." dalam: *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol 12, No 2, (2020), <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1360>. (08.11.2023). 74.
- [3] *Ibid.*, 74.
- [4] Fani, A, et.al. "Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik." dalam: *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 7, (2020), (08.11.2023). 85.
- [5] Arizona, et.al. 2021. *Manajemen Konflik*. Palembang: Bening Media. 65.
- [6] Azhar, A. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." dalam: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019). <https://www.jurnal.syekhnujati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/4936>. (08.11.2023). 137.
- [7] Locwood, B. 2023. *Human Rights Quarterly*. Cincinnati: Johns Hopkins University Press. 101.
- [8] Setadharmayanti, D., et al. "Restoratif Justice Tindak Pidana Laka Lantas Perwujudan Asas Keadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)." dalam: *Jurnal Mahkamah Hukum*, Vol 1, No. 2 (2023), https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/5900/3600. (09.11.2023). 20.
- [9] Gandhi, M. 1993. *Gandhi: An Autobiography - The Story of My Experiments with Truth*. United States: Beacon Press. 1948.
- [10] History Editor. 2021. *Civil Rights Movement*. Diakses dari <https://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-movement>.
- [11] Darnton, C. "Public Diplomacy and International Conflict Resolution: A Cautionary Case From Cold War South America." dalam: *Journal Foreign Policy Analysis*, Vol 16, Issue 1, (2020), <https://academic.oup.com/fpa/article/16/1/1/5380601>. (09.11.2023), 9-10.
- [12] SIPRI. 2021. *Social media: A tool for peace or conflict?*. Diakses dari <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounders/2021/social-media-tool-peace-or-conflict>.

Biodata

EDITOR

Pius Suratman Kartasasmita. Guru Besar Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan. Rektor Universitas Katolik Parahyangan 2002-2006. Meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan (1981), Magister Sosiologi di Universitas Indonesia (1986), Doktor dalam bidang Community and Regional Development Sociology dari Cornell University, Ithaca, NY, USA. Founder and Main Principal Institute for Community and Regional Development (ICORD). Penerima “The Iustitia et Pax Medallion” dari the Pontifical Council for Justice and Peace.

Ferry Sutrisna Wijaya. Lahir di Bandung tahun 1961, ditahbiskan sebagai imam diosesan Keuskupan Bandung tanggal 2 Februari 1990. Dosen Fakultas Filsafat di Universitas Katolik Parahyangan. Menempuh studi S-1 Fakultas Filsafat Unpar, S-2 East Asian Pastoral Institute Ateneo de Manila University, dan S-3 Pendidikan Nilai Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang bekerja di Integral Ecology Institute dan Eco Camp yang dikelola Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Penulis buku *Belajar Mencintai Papua*, *Rumah Belajar Masa Depan*, dan *Retret Ekologi Toraja*.

KONTRIBUTOR

Agus Sumule. Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian Universitas Papua, Manokwari. Pada tahun 2001, bersama-sama dengan sejumlah dosen Universitas Cenderawasih, diangkat oleh Gubernur Irian Jaya sebagai Tim Asistensi Penyusunan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan ditunjuk sebagai Ketua Subtim Pengkajian. Telah menulis sejumlah artikel tentang otonomi khusus Papua yang dipublikasikan di dalam dan di luar negeri, serta menjadi editor buku *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Papua* (Gramedia, 2003).

Dr. Ambirek G. Socratez Yoman. Lahir di Yiwenggame tahun 1964. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua periode 1998-2026 dan juga anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC) yang tinggal di Ita Wakhu Purom, Jayapura, Papua.

Dr. Antie Solaiman, MA. Lahir di Yogyakarta 72 tahun silam, mantan pengajar di Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Pendiri dan ketua Pusat Studi Papua (1997-2020), pendiri dan Ketua Yayasan Lentera Kasih (1986-1996), pendiri Yayasan Pijar Lentera (1996), pendiri Ikatan Mahasiswa Cenderawasih (Imace, 1991) dan Ikatan Alumni Papua (2021). Bertahun-tahun membaktikan diri untuk melayani daerah tertinggal Mentawai (1984-2000) dan Papua (1986-sekarang).

Biru Kira. Mahasiswa Program Doktor STFT Widya Sasana, Malang, dosen STK Touye Paapaa, Deiyai, imam Diosesan Keuskupan Timika, pernah menjadi Pastor Paroki Modio, Dekenat Kamuu-Mapia, Keuskupan Timika (2015-2022), kini sebagai Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Timika.

Dr. Bernadeta Subandini Astuti, S.T, M.Eng. Lahir di Sleman tahun 1973. Dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Menempuh pendidikan S-1 Teknik Geologi di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta (1998), S-2 Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2012), S-3 Teknik Geologi di Universitas Padjadjaran, Bandung (2022).

Brigitta Isworo Laksmi. Lahir di Solo, bercita-cita menjadi wartawan sejak kecil, akhirnya dia berlabuh di *Kompas* sampai tahun 2019. Menjalani profesi wartawan dengan pengalaman beragam, mulai dari menulis isu metropolitan, olahraga, hingga lingkungan hidup. Dia berpandangan bahwa manusia berhutang kehidupan pada Bumi dan Semesta. Saat ini dia melibatkan diri pada berbagai kelompok pencinta keutuhan ciptaan seperti Laudato Si dan Climate Reality Project. Perjalanan ke berbagai wilayah semakin memberikan kesadaran mendalam bahwa keberagaman adalah suatu keniscayaan: baik dalam konteks alam atau lingkungan, maupun konteks sosial. Saat ini terus berupaya untuk menularkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari jejaring kehidupan. Manusia berada di dalam suatu entitas utuh semesta yang diciptakan dengan penuh cinta oleh Sang Maha Pencipta. Maka, menjadi hal yang keliru jika manusia menghancurkan keutuhan itu dengan mengekstraksinya.

Cahyo Pamungkas. Profesor Riset bidang Sosiologi pada Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW- BRIN). Sejak 2003 bekerja menjadi staf peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sekarang namanya berubah menjadi Pusat Riset Kewilayahan-BRIN. Pada 2006 mendapatkan beasiswa Asian Public Intellectuals Fellowships dari The Nippon Foundation untuk melakukan penelitian mengenai “The Effectiveness of Autonomous Regions in Muslim Mindanao dan The Administrative Center of the Southern Border Provinces of Thailand in Coping with Separatism”. Menamatkan program doktoral dalam bidang ilmu sosial pada Faculty of Social and Behavioral Sciences, Radboud University Nijmegen, Belanda, pada 2015, dengan beasiswa dari Dutch Organization for Scientific Research (NWO). Minat penelitiannya pada topik etnisitas, konflik dan perdamaian, Papua dan Indonesia Timur. Berbagai tulisannya telah dipublikasikan, antara lain oleh *Suvannabhumi*, *International Journal of Indonesian Muslim Society (IJIMS)*, *Asian Journal of Peace Building*, *Chinese Journal of International Review (CIJR)*, Palgrave MacMillan, Springer Germany, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapore.

Ignatius Haryanto. Lahir di Bandung, 1969. Staf pengajar di Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara sejak tahun 2007, anggota Dewan Penasehat Remotivi, Ketua Badan Perkumpulan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Lulusan dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, magister filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan tengah menyelesaikan studi doktoral dalam bidang Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di sejumlah

majalah berita antara tahun 1994-2003, antara lain Majalah *Forum Keadilan, D&R*, Majalah *Tempo*. Ia juga mendirikan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) tahun 1994, menjadi Direktur Eksekutif pada tahun 2007-2014. Haryanto juga menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak tahun 1995 hingga sekarang, menjadi anggota Dewan Etik AJI Jakarta sejak tahun 2015. Ia menjadi anggota Ombudsman Harian *Kompas* sejak tahun 2008 hingga sekarang. Ia menulis dan mengedit puluhan buku soal jurnalistik, filsafat, dan sosial politik. Haryanto juga menjadi salah satu *reviewer* untuk *Jurnal Media Asia* yang berkedudukan di Manila, Filipina. Sejumlah buku yang ia tulis dan ia edit belakangan ini antara lain *Herry Priyono, Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022, mengedit bersama Karlina Supelli, Angga Indraswara) *Para Sahabat Mengenal Daniel Dhakidae: Cendekiawan Par Excellence* (Penerbit Buku Kompas, 2021, mengedit bersama Yohanes Krisnawan), *John Locke dan Akar Pemikiran Hak Kekayaan Intelektual* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), “Indonesian Women Journalists and precarious work”, dalam Marjoribanks, Zion, O’Donnell, Sherwood (eds) *Journalists and Job Loss* (London & New York: Routledge, 2022, menulis bersama Samiaji Bintang, Monika Winarnita, Hanif Suranto, dan Albertus M. Prestianta).

I Ngruh Suryawan. Dosen Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat dan Departemen Antropologi, FISIP Universitas Indonesia. Menyelesaikan pendidikan Doktor Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan beasiswa penulisan disertasi dari Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS) pada tahun 2013 dan NUFFIC-NESO di Faculty of Humanities, Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 2014. Program penelitian pascadoktoral dimulainya dari tahun 2016-2017 tentang ekologi budaya orang Marori dan Kanum di Merauke, Papua dalam skema ELDP (*Endangered Languages Documentation Programme*) bekerja sama dengan Australian National University (ANU). Menjadi peneliti tamu di KITLV (Koninklijk Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde), Universiteit Leiden 2017-2018 untuk menulis penelitiannya tentang terbentuknya kelas menengah Papua di daerah-daerah pemekaran. Bukunya, *Nyala yang Tak Pernah Padam: Kisah Pergumulan dari Kampung Papua* akan terbit 2023.

Markus Haluk. Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, Penulis 5 buku *Seri Sejarah Politik, HAM, dan Demokrasi West Papua*.

Dr. Martha Betaubun, M. Hum. Lahir di Holat, 1975. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Cenderawasih tahun 1998. Melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar Magister Humaniora pada tahun 2010. Pada tahun 2019 memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Yogyakarta. Telah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama lebih dari 20 tahun. Saat ini merupakan staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta menjabat sebagai koordinator Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Musamus Merauke. Semasa berkarier, pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Sastra Inggris, serta Wakil Dekan FKIP Universitas Musamus. Karya-karya tulis yang dihasilkan berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris, linguistik, dan sastra.

Paul Satyo Istandar Tan. Lahir tahun 1962, ditahbiskan sebagai imam diosesan Keuskupan Sorong tanggal 12 November 1989 di Kaimana, tempat ia dibesarkan. Lulusan STFT Fajar

Timur di Abepura, Licentiate in Theology dari Universitas Katolik di Leuven Belgia, dan Doktor Studi Pembangunan lulusan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Dosen STFT Fajar Timur di Abepura (1997-2017). Sekarang Dosen dan Ketua STPK St.Yohanes Rasul di Waena sejak 2018.

Dr. Petrus Bahtiar, S.T., M.T. Lahir di Desa Saptamarga Panyangkalang, Kabupaten Gowa, pada 1971. Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Universitas Hasanuddin tahun 1995, kemudian melengkapi jenjang S-1 di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, tamat pada tahun 1999. Tahun 2006 ia menyelesaikan studi S-2 Teknik Transportasi di Universitas Hasanuddin, lalu menempuh studi doktor pada Prodi S-3 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan tamat pada 2018. Ia mengajar di Teknik Sipil Universitas Cenderawasih sejak 2000 dan resmi berstatus PNS pada 2009. Ia menjadi Ketua Jurusan Teknik Sipil dua periode sejak tahun 2012 hingga Januari 2021 dan menjadi Staf Ahli pada Komisi IV Bidang Infrastruktur DPR Papua 2017–2023. Dalam bidang transportasi penulis terlibat sebagai Koordinator Tim Juri Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Regional Papua-Papua Barat yang diselenggarakan oleh Litbang Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dalam bidang organisasi penulis menjadi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dua periode 2013–2022, FSTPT Koordinator Wilayah Papua 2017–2018.

Ronald Guido Suitela. Menempuh studi sarjana kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar (1989) dan magister ekowisata di Insititut Pertanian Bogor (2002). Pernah menjadi Kepala Humas Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten, Administratur/KKPH Telawa, General Manager Industri Sagu di Papua. Kini aktif sebagai Ketua “Bhakti Hati Persada” Indonesia, Pengurus Penshutindo Daerah Jateng, Wakil Ketua Pengelola Taman Makam Rimbawan

Theo van den Broek. Lahir di Nijmegen, Belanda tahun 1944. Pindah ke Papua, Indonesia, tahun 1975. Sejak itu dia hidup dan bekerja di Papua sampai saat ini, kecuali selama tahun 2005 sampai 2009 waktu menjalankan suatu penugasan sementara di Timor Leste. Dia mendirikan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di Keuskupan Jayapura pada tahun 1998, dan mulai menerbitkan seri tulisan di bawah judul *Memoria Passionis*, sambil mendokumentasikan penderitaan kolektif bangsa Papua. Kegiatan ini sampai saat ini masih dijalankan oleh Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua. Dia sekarang pensiunan, namun masih mengikuti dengan teliti perkembangan di Papua dan sejak 2019 sampai saat ini menerbitkan suatu laporan bulanan atas perkembangan-perkembangan di Papua dewasa ini.

Wilhelmus Kamamas. Imam diosesan Keuskupan Agats. Lahir tahun 1971 dan ditahbiskan sebagai imam pada 1 Agustus 2004. Studi S-1 dan S-2 ditempuhnya di STFT Fajar Timur Abepura. Kini bertugas sebagai Pastor Paroki Hati Kudus Pirimapun Keuskupan Agats dan banyak terlibat dalam bidang pendidikan di Asmat.

Wolas Krenak. Wartawan *Tifa Irian* di Jayapura (1975-1986), Wartawan *Suara Pembaruan* Jakarta (1987-2011), Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (2011-2017).

Yan Puduuyiyai Aplukol Dou. Imam diosesan Keuskupan Jayapura, lahir di Yotapuga 1979, ditahbiskan sebagai imam pada 13 Februari 2011. Menyelesaikan studi Licentiatuara

Teologi Moral dan Spiritual di Universidad Navarra, Pamplona, Spanyol (2017). Kini berkarya sebagai Direktur Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Paulus Interdiokesan Regio Papua di Nabire, Timika.

Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You. Lahir di Paniai tahun 1961, ditahbiskan sebagai imam tanggal 16 Juni 1991, ditahbiskan sebagai Uskup Jayapura pada 2 Februari 2023. Ia merupakan Orang Asli Papua pertama yang menjadi uskup di Tanah Papua. Jenjang pendidikan S1 ditempuhnya di STFT Fajar Timur, S-2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (2010), dan S-3 Antropologi di Universitas Cenderawasih (2020).

Yohanes B.J. Rusmanta. Menempuh pendidikan S-1 Kimia Universitas Hasanuddin, S-2 Kimia Lingkungan Universitas Brawijaya, S-3 Ilmu Kimia Universitas Hasanuddin. Pernah aktif sebagai Community Organizer dan GIS-Officer pada WWF-Indonesia, dan dosen Universitas Cenderawasih (2008-2022). Sejak 2022 bertugas sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua memuat 21 tulisan dari berbagai penulis dengan berbagai latar belakang daerah, profesi, dan bidang, yang secara bersama-sama mencoba untuk mendengarkan dan memahami apa yang terjadi di Tanah Papua. Di sana masih ada banyak persoalan serius, bahkan berdarah, yang belum selesai dan sembuh hingga hari ini. Kendati tampak sulit dan panjang jalan yang harus ditempuh, harus terus dicari cara-cara untuk membawa keadilan dan perdamaian ke Tanah Papua.

The book is a collection of analyses by true insiders with long-term engagement in the practice of bringing peace to Papua. It is sharp, academic, and yet focused on practical solutions.

—**Timo Kivimäki**. Profesor of International Relationship University of Bath UK, Founder of Indonesian Conflict Study Network.

Buku ini memberikan konfirmasi atas tiga hal. Pertama, konflik meluas dan kekerasan terus berulang di Papua. Kedua, kebijakan negara terhadap Papua tidak sesuai dengan dinamika konflik, terutama di sektor sumber daya alam. Ketiga, para pihak memiliki multi-kepentingan (politik dan ekonomi) yang saling berkorelasi. Meskipun belum ada solusi yang pas, nirkekerasan merupakan cara terbaik bagi proses pemulihan kondisi Papua dalam jangka panjang menuju rekonsiliasi.

—**Adriana Elisabeth**. Jaringan Damai Papua.

Tema-tema yang dibahas dalam buku ini sangat beragam dan sudah menggambarkan beberapa masalah penting yang sedang terjadi di Papua. Oleh karena itu, buku ini adalah referensi, sekaligus karya budaya yang penting untuk lebih memahami kompleksitas masalah, sekaligus mencari jalan keluar yang konkret.

—**Vidhyandika Djati Perkasa**. Peneliti Senior, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Indonesia.

Memperkenalkan permasalahan di Tanah Papua dari berbagai sudut pandang, yang intinya memaparkan ada keinginan untuk menemukan wujud Tanah Papua yang memberi harapan akan hidup aman sejahtera, adil dan makmur, sehat dan terdidik, sampai ke pelosok pedalaman di wilayah Papua.

—**Albertus Istiarto**. Pernah berkarya di Asmat. Sejak 2009 pendamping mahasiswa Timika di Unika Soegijapranata.

Orang Papua bertanya: apakah bersama Indonesia akan diakui keadilan, hak asasi, pengakuan atas martabat manusia bagi bangsa Papua? Apakah rumah Indonesia menjamin masa depan Orang Papua? Sekelumit pertanyaan ini diulas oleh para penulis dalam buku yang ada di tangan pembaca.

—**Markus Haluk**. Sekretaris United Liberation Movement for West Papua.

Setelah dua puluh tahun Otsus Papua berjalan dan berbagai pendekatan telah dilakukan, masalah Papua tampaknya belum mengalami pergeseran yang signifikan, bahkan bertambah kompleks. Dalam konteks itulah buku ini perlu dibaca dan dimaknai.

—**Bernarda Meteray**. Dosen Universitas Cenderawasih, penulis buku *Nasionalisme Ganda Orang Papua*

Lahirnya buku ini merupakan bukti bahwa warta kemanusiaan tak pernah henti untuk didengungkan.

—**Romo Agustinus Heri Wibowo**. Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan KWI.

Tema buku ini selaras dengan kerinduan terdalam setiap manusia. Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud kalau ada keadilan, kebenaran, kebebasan, cinta kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Keadilan mensyaratkan pengakuan dan penghargaan dan perlindungan setiap manusia, baik itu hak atas hidup, ekonomi, politik, maupun budaya.

—**Mgr. Laurentius Tarpin, OSC**. Magister General Odo Salib Suci.